BAPPELITBANGDA

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai 1 januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman:

a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan

b. penyusunan rancangan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026.

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2026 terdiri atas:

a. pendahuluan;

b. gambaran umum kondisi Daerah;

c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;

f. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan

g. penutup.

(2) Ketentuan mengenai uraian sistematika RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKY KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 15

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kabupaten Bandung Barat 2026 merupakan pelaksanaan dari dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029. Selanjutnya, dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandung Barat, 2025

BUPATI BANDUNG BARAT

JEJE RITCHIE ISMAIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-5
1.3 Hubungan Antara Dokumen I-10
1.4 Maksud dan Tujuan I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-12
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-14
2.1.1.4 Aspek Demografi II-17
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-20
2.1.2.1 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB II-20
2.1.2.2 Inflasi II-26
2.1.2.3 Kemiskinan II-27
2.1.2.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) II-32
2.1.2.5 Ketenagakerjaan II-33
2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia II-36
2.1.2.7 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender II-39
2.1.2.8 Seni Budaya dan Olahraga II-40
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-43
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar II-43
2.1.3.1.1 Pendidikan II-43
2.1.3.1.2 Kesehatan II-46
2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-50
2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman II-55
2.1.3.1.5 Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat II-58
2.1.3.1.6 Sosial II-61
2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-63
2.1.3.2.1 Tenaga Kerja II-63

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-64
2.1.3.2.3 Pangan II-66
2.1.3.2.4 Pertanahan II-67
2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup II-68
2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil II-70
2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa II-71
2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-72
2.1.3.2.9 Perhubungan II-74
2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika II-74
2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-75
2.1.3.2.12 Penanaman Modal II-77
2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga II-77
2.1.3.2.14 Statistik II-79
2.1.3.2.15 Persandian II-79
2.1.3.2.16 Kebudayaan II-80
2.1.3.2.17 Perpustakaan II-80
2.1.3.2.18 Kearsipan II-81
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan..... II-82
2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan II-82
2.1.3.3.2 Pariwisata II-83
2.1.3.3.3 Pertanian II-84
2.1.3.3.4 Perdagangan II-87
2.1.3.3.5 Perindustrian II-88
2.1.3.3.6 Transmigrasi II-88

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah II-89
2.1.3.5 Unsur Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah..... II-90
2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum II-91
2.1.4 Aspek Daya Saing II-92
2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi daerah II-93
2.1.4.1.1 Lapangan Usahan Unggulan II-93
2.1.4.1.2. PDRB Per Kapita II-96
2.1.4.1.3. Pengeluaran Per Kapita II-96
2.1.4.2 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-98
2.1.4.3 Daya Saing Iklim Investasi..... II-101
2.1.4.4 Daya Saiang Sumber Daya Manusia II-103
2.1.4.4.1. Pendidikan II-104
2.1.4.4.2. Kesehatan II-109
2.1.4.4.3. Ketergantungan Penduduk II-111
2.1.4.4.4. Kondisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-113
2.1.4.4.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Karakteristik Penduduk Bekerja II-113
2.2 Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024..... II-116
2.2.1 Capaian Kinerja Makro Pembangunan..... II-118
2.2.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... II-122
2.2.3 Capaian Kinerja Program RKPD Tahun 2024 ..... II-127
2.2.3.1 Urusan Pendidikan..... II-130
2.2.3.2 Urusan Kesehatan..... II-132
2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-133
2.2.3.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman..... II-136
2.2.3.5 Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat II-137
2.2.3.6 Urusan Sosial..... II-139
2.2.3.7 Tenaga Kerja..... II-140
2.2.3.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... II-142
2.2.3.9 Pangan II-144
2.2.3.10 Pertanahan II-146
2.2.3.11 Lingkungan Hidup..... II-147
2.2.3.12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil..... II-150
2.2.3.13 Pemberdayaan Masyarakat Desa..... II-151
2.2.3.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-153
2.2.3.15 Perhubungan..... II-154
2.2.3.16 Komunikasi dan Informatika..... II-155
2.2.3.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-156
2.2.3.18 Penanaman Modal II-158

2.2.3.19 Kepemudaan dan Olah Raga II-159
2.2.3.20 Statistik II-161
2.2.3.21 Persandian II-162
2.2.3.22 Kebudayaan II-163
2.2.3.23 Perpustakaan II-164
2.2.3.24 Kearsipan II-165
2.2.3.25 Kelautan dan Perikanan II-166
2.2.3.26 Pariwisata II-168
2.2.3.27 Pertanian II-169
2.2.3.28 Perdagangan II-172
2.2.3.29 Perindustrian II-174
2.2.3.30 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-175
2.2.3.31 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-178
2.2.3.32 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah II-184
2.2.3.33 Unsur Pemerintahan Umum II-185
2.2.4 Permasalahan Umum Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 ..... II-187
2.2.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja II-192
2.2.6 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Develpoment Goals (SDGs) II-201
2.2.7 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ..... II-209
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-225
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-225
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-232
2.3.2.1 Permasalahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-232
2.3.2.2 Permasalahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-236
2.3.2.3 Permasalahan Urusan Pilihan II-244
2.3.2.4 Permasalahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II-247
2.3.2.5 Permasalahan Pengawasan Urusan Pemerintahan II-249
2.3.2.6 Permasalahan Urusan Pemerintahan Umum II-250
2.4 Inovasi Pembangunan Daerah II-250
2.4.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah II-251
2.4.2 Inovasi Pelayanan Publik II-255
2.4.3 Inovasi Daerah Lainnya II-269

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi dan Prospek Ekonomi Global III-2
3.1.2 Kondisi dan Prospek Ekonomi Nasional III-3
3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional III-8
3.1.4 Kondisi dan Prospek Ekonomi Provinsi Jawa Barat III-11
3.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat III-16
3.1.6 Kondisi dan Prospek Ekonomi kabupaten Bandung Barat III-18
3.1.7 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat III-25
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-27
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan III-27
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-30

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-32
3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah III-33

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.1.1 Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Pembangunan Nasional IV-3
4.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat..... IV-5
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat..... IV-35
4.1.4 Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026..... IV-50
4.1.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... IV-71
4.1.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... IV-16
4.1.7 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Bandung Barat..... IV-76

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Mendukung Arah Kebijakan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026..... V-1
5.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Kontribusi PDRB Kabupaten Bandung Barat terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat..... V-2
5.1.2 Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini V-4
5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka..... V-5
5.1.4 Indeks Pembangunan Manusia V-6
5.1.5 Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup V-6
5.1.6 Prevalensi Stunting V-7
5.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... V-8
5.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Mewakili Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat..... V-13
5.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... V-17
5.5 Program Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... V-23
5.6 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026..... V-24

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bandung Barat	II-2
2.2	Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian	II-5
2.3	Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Tanah	II-6
2.4	Kondisi Geologi Kandungan Pengendapan Batuan	II-6
2.5	Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat	II-10
2.6	Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat	II-10
2.7	Guna Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024	II-12
2.8	Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah	II-13
2.9	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir	II-15
2.10	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	II-16
2.11	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024	II-18
2.12	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Bandung Barat	II-20
2.13	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020 - 2024	II-21
2.14	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Bandung Barat	II-22
2.15	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020-2024	II-23
2.16	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)	II-24
2.17	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020-2024	II-25
2.18	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (persen)	II-26
2.19	Inflasi Y to Y Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024	II-27

2.20 Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-28
2.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen) II-29
2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-30
2.23 Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 ..... II-31
2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen) II-35
2.25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-36
2.26 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat Barat Tahun 2024 ..... II-38
2.27 Potensi Keragaman Budaya Kabupaten Bandung Barat 2020 – 2024 ..... II-40
2.28 Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 – 2024 ..... II-41
2.29 Indikator Kinerja Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-42
2.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-44
2.31 Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-45
2.32 Kondisi Ruang Kelas SMP Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-45
2.33 Data Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-46
2.34 Kondisi Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U Tahun 2020 – 2024 ..... II-47
2.35 Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-48
2.36 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ..... II-48
2.37 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat 2020 – 2024 ..... II-49

2.38 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-49
2.39 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020- 2024 ..... II-50
2.40 Panjang dan Ruas Jalan di Kabupaten Bandung Barat II-51
2.41 Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-54
2.42 Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh di Kab. Bandung Barat 2020-2024 ..... II-56
2.43 Realisasi Rehab/Perbaikan Rutilahu Tahun 2020 – 2024 ..... II-57
2.44 Tabel Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum II-63 II-57
2.45 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-58
2.46 Daerah Rawan Trantibum di Kabupaten Bandung Barat II-59
2.47 Kejadian Bencana di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 ..... II-60
2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-61
2.49 Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 ..... II-62
2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-62
2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-63
2.52 Capaian IDG dan IPG di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 ..... II-64
2.53 Data Kejadian Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan KDRT di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 ..... II-65
2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-65
2.55 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024 ..... II-66
2.56 Desa Dan Penduduk Sangat Rawan Pangan, Rawan Pangan Dan Tahan Pangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 II-67

2.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-67
2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-68
2.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-69
2.60 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 ..... II-70
2.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-71
2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-71
2.63 Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Bandung Barat Hasil Long Form SP Tahun 2020 ..... II-73
2.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-73
2.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-74
2.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-75
2.67 Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2020 – 2024 ..... II-75
2.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-76
2.69 Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2020 – 2024 ..... II-76
2.70 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-77
2.71 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-78
2.72 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-79
2.73 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-80

2.74 Indikator Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-81
2.75 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-82
2.76 Data Produksi Ikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 ..... II-82
2.77 Produksi Komoditas Perikanan Unggulan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 ..... II-82
2.78 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-83
2.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-84
2.80 Realisasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 ..... II-85
2.81 Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Pertanian Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-85
2.82 Realisasi Komoditas Peternakan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-86
2.83 Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Peternakan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-86
2.84 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Di Kabupaten Bandung Barat 2020-2024 ..... II-87
2.85 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-88
2.86 Capaian Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-89
2.87 Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-90
2.88 Capaian Capaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024 ..... II-92
2.89 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen) II-94
2.90 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-96

2.91 Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun) II-97
2.92 Data Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-98
2.93 Data Jumlah Angkutan Barang di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-99
2.94 Aksebilitas Kendaraan Umum di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-99
2.95 Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi di Kab. Bandung Barat Tahun 2020-2024 ..... II-101
2.96 Jumlah Izin yang Terbit Sesuai SOP di Kab. Bandung Barat Tahun 2024 ..... II-102
2.97 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun) II-105
2.98 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-106
2.99 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Tahun) II-111
2.100 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-112
2.101 Kondisi ASN Kabupaten Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024 ..... II-113
2.102 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2022-2024 (persen) II-116
2.103 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ..... II-118
2.104 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan II-123
2.105 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan II-124
2.106 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan II-125
2.107 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik II-126
2.108 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib dan Tentram dalam Kerangka Demokrasi II-127
2.109 Jumlah Program yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 ..... II-128

2.110 Skala Nilai Peringkat Kinerja II-129
2.111 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pendidikan II-130
2.112 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan Tahun 2024 ..... II-130
2.113 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Prog. Urusan Kesehatan II-132
2.114 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2024 ..... II-133
2.115 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-136
2.116 Capaian Indikator Kienrja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ..... II-135
2.117 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman II-136
2.118 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ..... II-137
2.119 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-138
2.120 Capaian Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 ..... II-138
2.121 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Sosial II-139
2.122 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2024 ..... II-140
2.123 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Tenaga Kerja II-141
2.124 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 ..... II-141
2.125 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-143
2.126 Capaian Indikator Kinerja Program DP2KBP3A Tahun 2024 ..... II-143
2.127 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pangan II-144
2.128 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 ..... II-145
2.129 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanahan II-146

2.130 Indikator Kinerja Program Dinas Perumahan & Kawasan Permukinan Urusan Pertanahan Tahun 2024 ..... II-147
2.131 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Lingkungan Hidup II-148
2.132 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 ..... II-149
2.133 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-150
2.134 Indikator Kiinerja Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 ..... II-151
2.135 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-152
2.136 Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ..... II-152
2.137 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana II-153
2.138 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ..... II-154
2.139 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perhubungan II-154
2.140 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Tahun 2024 ..... II-155
2.141 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Komunikasi dan Informatika II-156
2.142 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 ..... II-156
2.143 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah II-157
2.144 Capaian Indikator Kinerja ProgramDinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 ..... II-157
2.145 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Penanaman Modal II-158
2.146 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ..... II-159
2.147 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-160

2.148 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ..... II-160
2.149 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Statistik II-161
2.150 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Statistik Tahun 2024 ..... II-161
2.151 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Persandian II-162
2.152 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Persandian Tahun 2024 ..... II-162
2.153 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kebudayaan II-163
2.154 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 ..... II-164
2.155 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perpustakaan II-164
2.156 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 ..... II-165
2.157 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kearsipan II-165
2.158 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Arsip dan Perpustakaan Urusan Kearsipan Tahun 2024 ..... II-166
2.159 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kelautan dan Perikanan II-167
2.160 Capaian Indikator Kinerja ProgramDinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 ..... II-167
2.161 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pariwisata II-168
2.162 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan Pariwisata Tahun 2024 ..... II-169
2.163 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanian II-170
2.164 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 ..... II-170
2.165 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanian II-171
2.166 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 ..... II-172
2.167 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perdagangan II-173

2.168 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 ..... II-173
2.169 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perindustrian II-174
2.170 Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Urusan Industri Tahun 2024 ..... II-175
2.171 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-176
2.172 Capaian Indikator Kinerja ProgramSekretariat Daerah Tahun 2024 ..... II-176
2.173 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-177
2.174 Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD Tahun 2024 ..... II-177
2.175 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-178
2.176 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 ..... II-179
2.177 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-179
2.178 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ..... II-180
2.179 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-180
2.180 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ..... II-181
2.181 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-181
2.182 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ..... II-182
2.183 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-182
2.184 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ..... II-183
2.185 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-183

2.186 Capaian Indikator Kienerja Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 ..... II-184
2.187 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengawasan Urusan Pemerintahan II-184
2.188 Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Tahun 2024 ..... II-185
2.189 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pemerintahan Umum II-186
2.190 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ..... II-187
2.191 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Barat Tahun 2024 ..... II-193
2.192 Daftar Indikator Terpilih (Data, target, dan scorecard indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat II-204
2.193 Hasil Proyeksi Pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2030 Berdasarkan Scorecard II-208
2.194 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pendidikan II-211
2.195 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Kesehatan II-213
2.196 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-214
2.197 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-215
2.198 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat II-216
2.199 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Sosial II-217
2.200 Permasalahan Penerapan SPM Kabupaten Bandung Barat Triwulan IV Tahun 2024 ..... II-222
2.201 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2024 ..... II-251
2.202 Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ..... II-255
2.203 Inovasi Daerah Lainnya Kabupaten bandung Barat Tahun 2024 ..... II-269
3.1 1 Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Target Tahun 2025-2026 ..... III-12

3.2 Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026 ..... III-15
3.3 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 - 2024 (persen) III-19
3.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2023-2024 ..... III-20
3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 - 2024 (persen) III-21
3.6 Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 20202 - 2024 (persen) III-22
3.7 Target Pertumbuhan Komponen PDRB Kab. Bandung Barat Tahun 2025-2026 ..... III-30
3.8 Capaian dan Target Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Tahun 2024-2026 ..... III-25
3.9 Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026 ..... III-29
3.10 Belanja Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026 ..... III-31
4.1 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat IV-8
4.2 Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-13
4.3 Kegiatan Prioritas Utama Nasional IV-20
4.4 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... IV-30
4.5 Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 ..... IV-36
4.6 Rumusan Kerangka Penjabaran Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 ..... IV-37
4.7 Tujuan, Sasaran, Indikator beserta Target Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... IV-40
4.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... IV-43
4.9 Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... IV-37
4.10 Program Prioritas dan Langkah Strategis dalam Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2026 ..... IV-67

4.11 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... IV-70
4.12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... IV-71
4.13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... IV-74
4.14 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kab. Bandung Barat IV-76
4.15 Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat IV-84
5.1 Target Indikator Makro Tahun 2026 untuk Kabupaten Bandung Barat V-2
5.2 Program dan pendanaan untuk Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Kontribusi PDRB Kabupaten Bandung Barat terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat V-3
5.3 Program dan pendanaan untuk penurunan Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini V-5
5.4 Program dan pendanaan untuk penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) V-5
5.5 Program dan pendanaan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia V-6
5.6 Program dan pendanaan untuk penurunan Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup V-7
5.7 Program dan pendanaan untuk penurunan Stunting V-8
5.8 Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat terhadap Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ..... V-8
5.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan uraian aspirasi Masyarakat V-13
5.10 Jumlah dan Uraian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat V-16
5.11 Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 untuk RKPD Provinsi Tahun 2026 Provinsi Jawa Barat V-18
5.12 Proyek Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ..... V-23
5.13 Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ..... V-24
6.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026 ..... VI-3

6.2 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 ..... VI-3
6.3 Target dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Dampak (Impact) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026 ..... VI-4
6.4 Target dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Hasil (outcome) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026 ..... VI-7
6.5 Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat Tahun 2024 – 2026 ..... VI-18

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026	I-4
1.2	Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026	I-5
1.3	Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 Terhadap Dokumen Lainnya	I-10
2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat	II-3
2.2	Peta Batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya	II-4
2.3	Peta Ketinggian Kabupaten Bandung Barat	II-5
2.4	Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat	II-7
2.5	Peta Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat	II-8
2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat	II-11
2.7	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat	II-17
2.8	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-18
2.9	Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020	II-19
2.10	Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-29
2.11	Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-32
2.12	Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 – 2024	II-33
2.13	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2020-2024	II-34
2.14	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-35
2.15	Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-38
2.16	Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024	II-40
2.17	Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-93
2.18	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024	II-96
2.19	Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024	II-100
2.20	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kab. Bandung Barat, Tahun 2020-2024	II-104
2.21	APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-107

2.22	APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-108
2.23	APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-109
2.24	Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	II-110
2.25	Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024	II-112
2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Barat 2020 – 2024	II-114
2.27	Persentase Realisasi Capaian Kinerja SPM Kab. Bandung Barat Triwulan IV Tahun 2024	II-218
2.28	Grafik Persentase Realisasi Capaian Anggaran SPM Kab. Bandung Barat Triwulan IV Tahun 2024	II-221
2.29	Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 – 2023	II-251
4.1	Visi Misi Presiden dalam RPJMN Tahun 2025-2029	IV-4
4.2	Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 ...	IV-5
4.3	Tema dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026	IV-9
4.4	Highlight Intervensi Pembangunan Wilayah Jawa Barat	IV-24
4.5	Wilayah Pengembangan (WP) Cekungan Bandung	IV-31
4.6	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat.....	IV-80
4.7	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat ...	IV-84

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 merupakan dokumen yang berpedoman Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan kedalam RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan sasaran pokok pembangunan periode pertama RPJPD Tahun 2005-2045. Pentingnya dokumen RKPD 2026 untuk menjaga kesinambungan pembangunan didaerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sekaligus sebagai upaya mewujudkan sasaran pokok pembangunan daerah tahap pertama dalam periode pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dengan memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan Visi "Bandung Barat AMANAH (Agamis Maju Adaptif Nyaman Aspiratif Harmonis)" dengan Misinya yaitu: 1) Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter; Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah; 2) Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah; 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel; 4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah; 5) Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan dan 6) Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 mengusung Tema Pembangunan: **"Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah"**. Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Target Pencapaian Kinerja serta Pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada beberapa aspek di bawah ini:

1. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029;
2. Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2024;
3. RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029;
4. Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2026; dan

5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 disusun melalui tahap penyelarasan dengan berbagai kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2026 serta kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, baik yang bersifat *Common Goals* Provinsi Jawa Barat maupun kebijakan tematik kewilayahan.

Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 disusun dengan berorientasi pada proses menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang);
c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD untuk dijadikan acuan dan pedoman Calon Kepala Daerah yang dibahas bersama dengan DPRD;
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Serta dengan mengedepankan aspek tematik, holistik, integratif dan sinergis yang berorientasi pada substansi, yaitu:

a. Pendekatan holistik-tematik, dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bag/keg pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b. Pendekatan integrative, dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
c. Pendekatan spasial, dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perpaduan pendekatan dan aspek metode perencanaan ini diharapkan dapat membuat RKPD Kabupaten Bandung Barat menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan peraturan yang berlaku.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengharuskan seluruh kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut yang ditunjang dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 dilakukan melalui arus proses yang disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, diolah

Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 diawali dengan *Kick Off Meeting* perencanaan tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2025, dilanjutkan dengan tahapan Musrenbang Kecamatan untuk menjaring usulan dari kewilayahan dan selanjutnya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran penyempurnaan yang berasal dari berbagai stakeholder pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta rencana anggarannya dengan tetap dapat menjaring masukan dan saran penyempurnaan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2026.

Rangkaian perencanaan pembangunan ini kemudian diakhiri dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten sebagai forum pertemuan antar pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka membahas dokumen rancangan RKPD Tahun 2026.

Pasca pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2026 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Bandung Barat. Rancangan akhir RKPD Tahun 2026 yang telah disusun dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD Provinsi Tahun 2026 ditetapkan, untuk lebih jelasnya tahapan penyusunan RKPD 2026 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

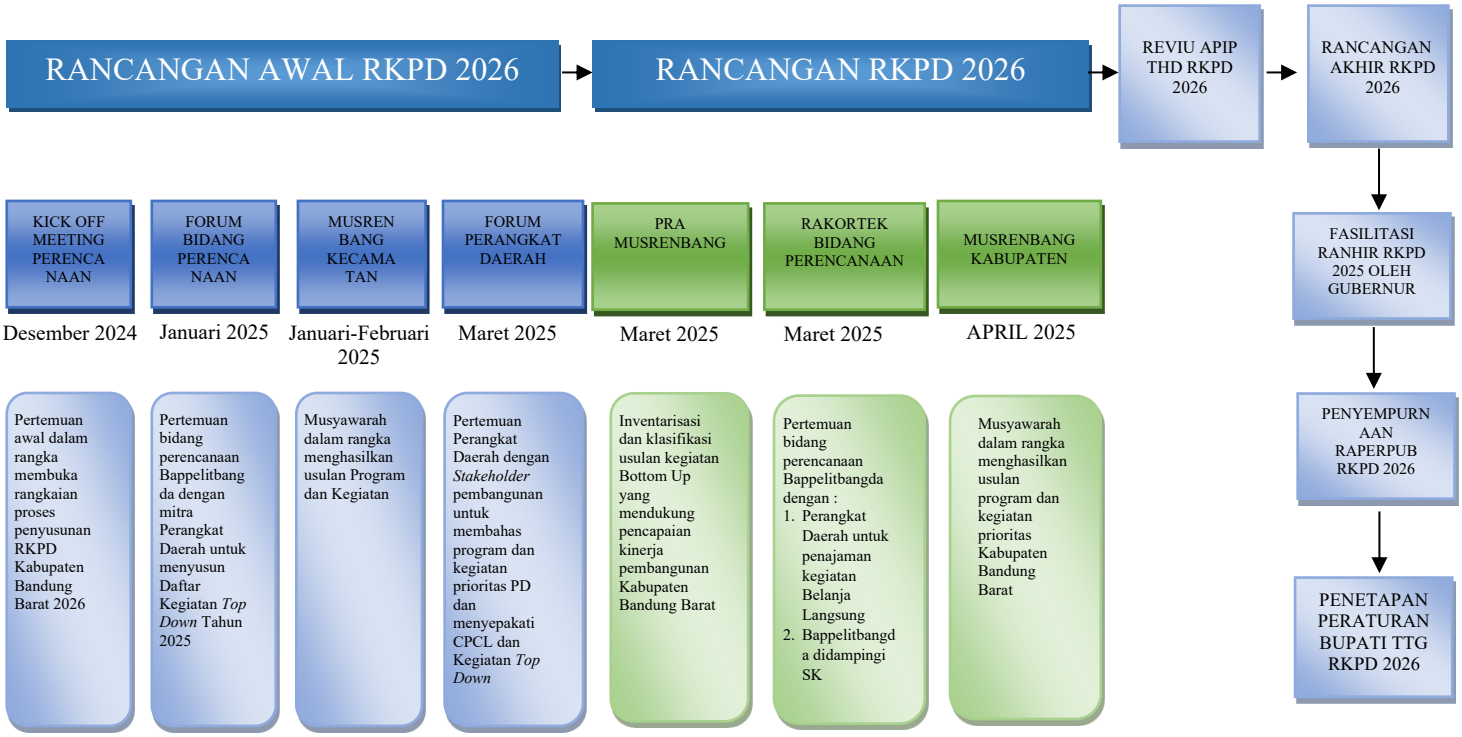

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, diolah

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 Nomor 9 Seri D); sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 Nomor 4);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut berdasarkan jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun.

Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2024. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1.3 Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 Terhadap Dokumen Lainnya

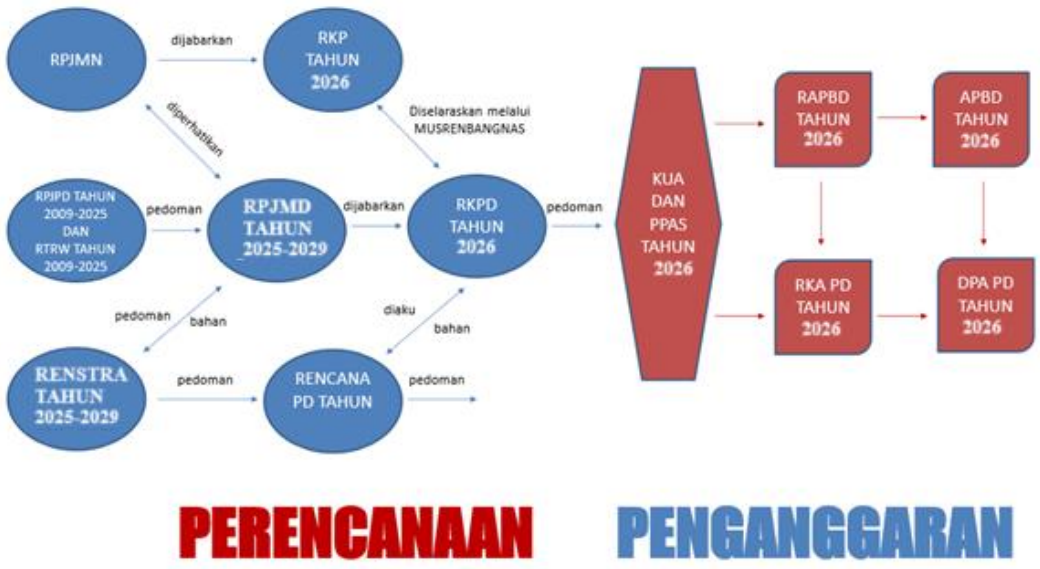

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, diolah

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan di masa transisi ini dalam bentuk RPJMD. RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan di masa transisi ini selama 5 (Lima) tahun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan strategi 5 (lima) tahunan perangkat daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian pembangunan selama 1 (satu) tahun dan selaras dengan RPJMD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga diselaraskan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025- 2029, dengan tujuan:

1) Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ada dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2025-2029 dalam upaya mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
2) Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui Musrenbang;
3) Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
4) Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah.

1.5 Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 disusun, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara RKPD Kabupaten Barat Tahun 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Kabupaten Barat Tahun 2026 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD s.d Tahun 2024

Menjelaskan evaluasi ketercapaian indicator makro pembangunan, pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja program (*outcome*) serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2024, evaluasi penerapan SPM dan program yang mendukung SDG's

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

2.4. Inovasi Pembangunan Daerah

Memberikan gambaran penerapan inovasi pembangunan daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandun Barat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan kondisi dan capaian pembangunan ekonomi tahun 2024 dan prospek ekonomi tahun 2025 serta tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2026

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2026 serta pendanaan pembangunan lainnya

3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Menjelaskan sumber - sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 sebagai penjabaran Rancangan RPJMD Kab. Bandung Barat Tahun 2025-2029.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Menjelaskan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, pokok pokok pikiran DPRD dan keterkaitannya dengan prioritas dan program pembangunan Kabupaten Bandung Barat, isu strategis, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan yang mendukung SPM dan SDG'S

4.3. Implementasi Inovasi Pembangunan

Menjelaskan penerapan inovasi yang sesuai dengan tema RKPD Tahun 2026 dan mendukung prioritas Pembangunan tahun 2026

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan target kinerja tahun ke dua yang direncanakan dalam Rancangan RPJMD tahun 2025-2029.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah tingkat damaph dan tingkat hasil serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2026

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ngamprah. Sejak ditetapkan setelah 18 tahun sampai dengan sekarang Kabupaten Bandung Barat mengalami banyak perkembangan dan kemajuan pembangunan, sebagai Kabupaten yang memiliki posisi strategis di wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung Barat berperan penting dalam kemajuan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Gambaran umum kondisi daerah mendeskripsikan tentang apa, bagaimana, dan sejauhmana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini serta mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pencapaian keberhasilan pembangunan daerah serta menjadi bahan kebijakan dalam merencanakan pembangunan kedepan.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi, untuk melihat gambaran dan kondisi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan geografis yang mencakup: karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana serta aspek demografi yang memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk di Kabupaten Bandung Barat.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Berdasarkan Karakteristik Lokasi dan Wilayah, secara Astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 3,73’ - 07º 1,031’ Lintang Selatan dan 107º 1,10’ - 107º 4,40’ Bujur Timur dengan Luas wilayah sebesar 1.283,44 Km2 atau 128.344 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 165 Desa, dengan rincian luas wilayah menurut administratif kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Desa
1. Rongga	112,25	8
2. Gununghalu	154,95	9
3. Sindangkerta	105,97	11
4. Cililin	77,60	11
5. Cihampelas	46,90	10
6. Cipongkor	79,90	14
7. Batujajar	31,02	7
8. Saguling	51,42	6
9. Cipatat	125,59	12
10. Padalarang	51,48	10
11. Ngamprah	35,55	11
12. Parongpong	44,90	7
13. Lembang	97,97	16
14. Cisarua	55,47	8
15. Cikalongwetan	110,61	13
16. Cipeundeuy	101,86	12
Kab. Bandung Barat	**1.283,44**	**165**

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044, yang dikelola dalam SIPD

Dari tabel diatas, Kecamatan Gununghalu merupakan wilayah terluas di Kabupaten Bandung Barat yaitu 154,95 Km2 dan berturut-turut kecamatan dengan luas wilayah di atas 100 Km2, yaitu Cipatat, Rongga, Cikalongwetan, Sindangkerta dan Cipendeuy. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Km2 dan Kecamatan Batujajar merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terendah yaitu 31,02 Km2. Sedangkan jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Lembang sebanyak 16 Desa dan Kecamatan Saguling merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa paling sedikit yaitu 6 Desa, berikut peta wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat:

Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Bandung Barat

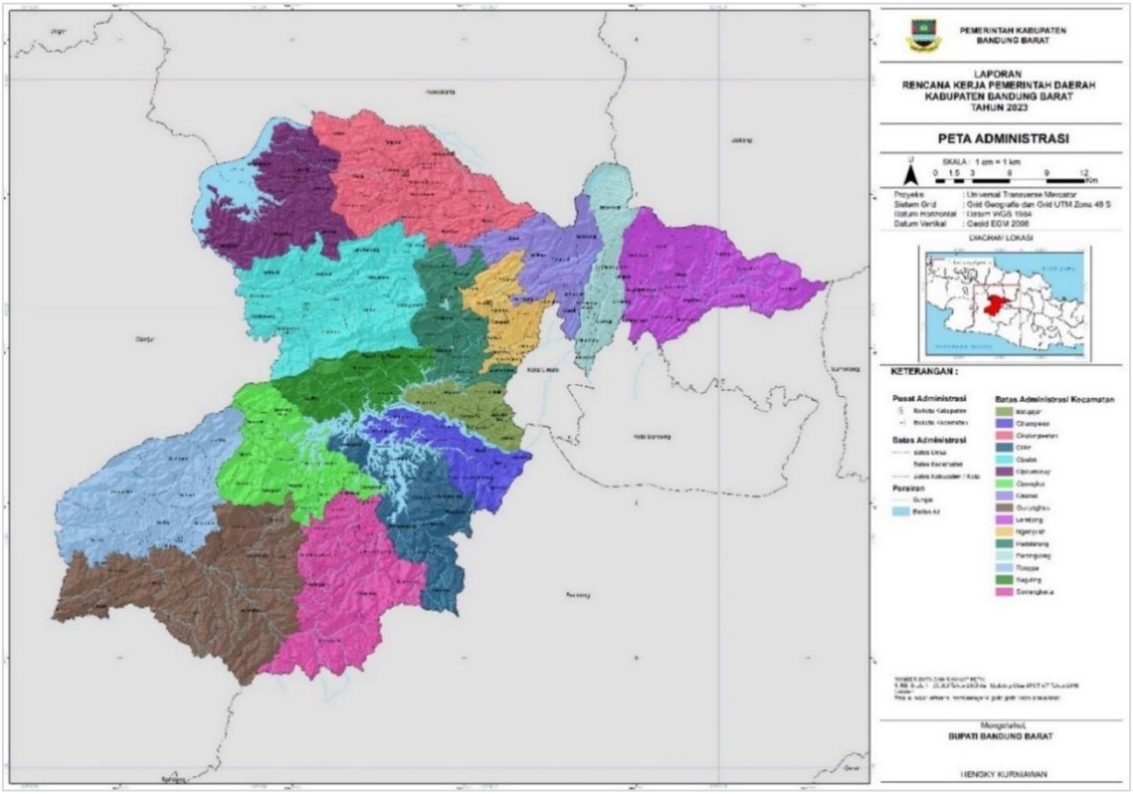

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Adapun Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi
c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.

Berikut peta batas wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kab/Kota Sekitarnya.

Gambar 2.2. Peta Batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya

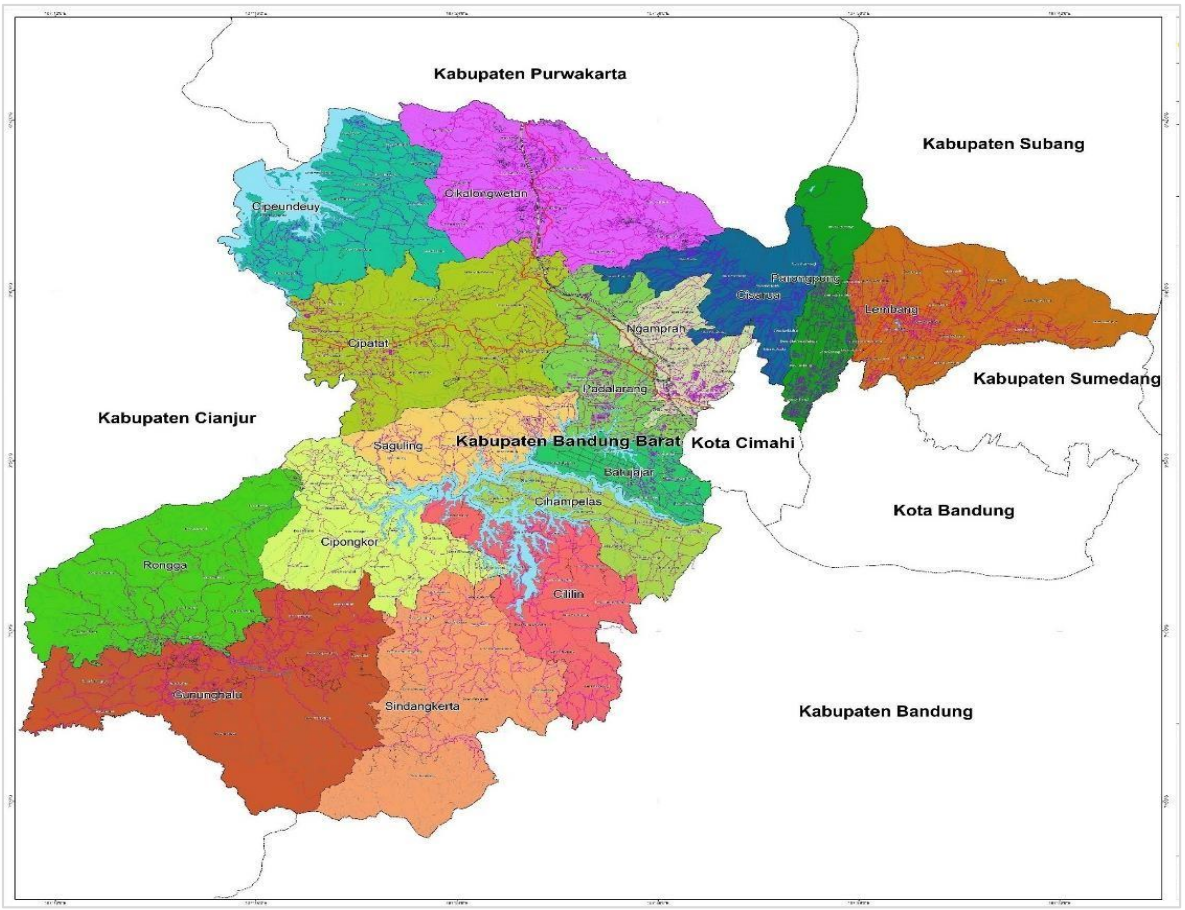

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Secara Topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal, wilayah yang sangat terjal terdapat di kecamatan Gununghalu seluas 13.480 Ha. Sedangkan kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0-2500 mdpl, seperti pada tabel dan gambar peta ketinggian berikut:

Tabel 2.2. Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Ketinggian

No.	Ketinggian	Luas (ha)
1	0-500 m	20,461
2	500-1000 m	68.786
3	1000-1500 m	32.487
4	1500-2000 m	6.732
5	2000-2500 m	20.461

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Gambar 2.3. Peta Ketinggian Kabupaten Bandung Barat

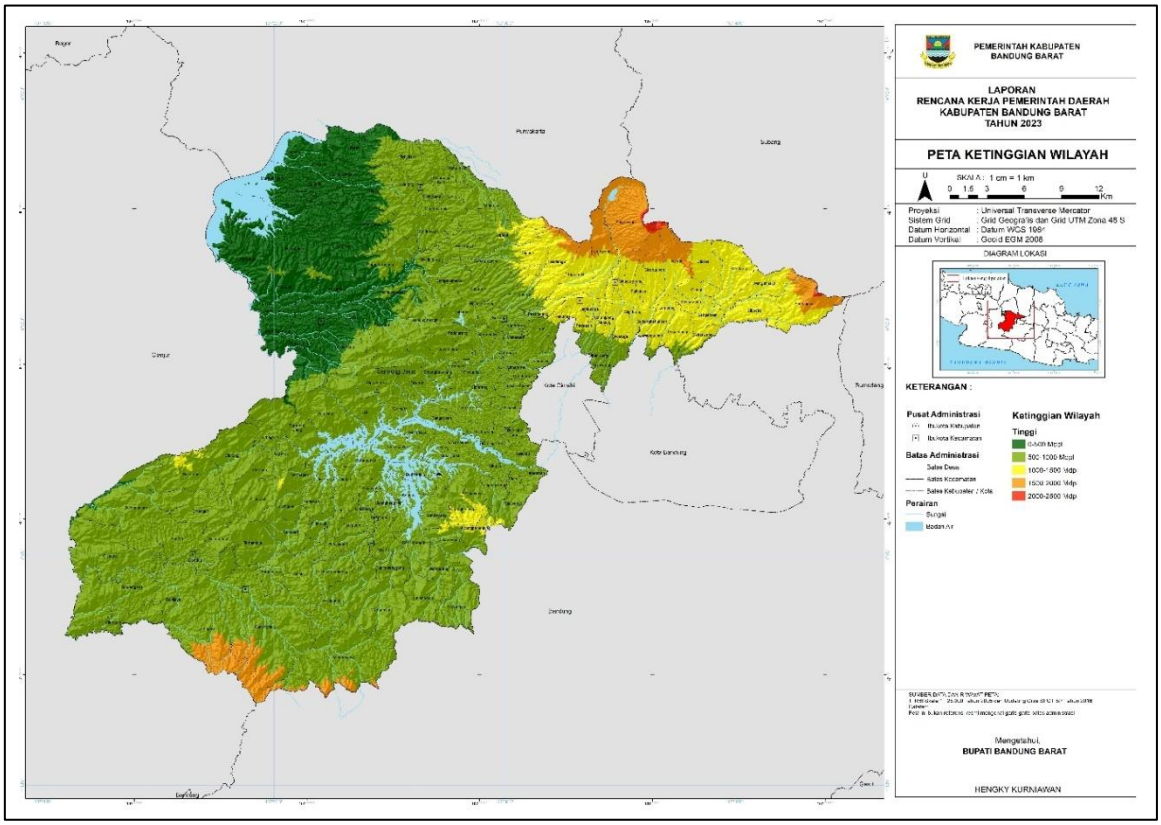

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Kawasan lahan terbesar pada elevasi ketinggian 500-1000 mdpl yaitu 68.786 Ha atau 66% dari total luas keseluruhan. Luas kawasan dengan elevasi dibawah 500 mdpl seluas 20.461 Ha atau 14%, kawasan dibawah 500 mdpl ini terdapat Waduk Saguling dan Cirata. Sedangkan kawasan dengan elevasi antara 500-1000 mdpl, merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan pertanian karena pada kawasan elevasi ini menentukan temperatur, kelembaban, penyinaran matahari, yang apabila dikaitkan dengan jenis tanah dan curah hujan, akan menentukan jenis tanaman apa yang paling tepat untuk mendukung pengembangan agroindustri.

Selain itu di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat kawasan sekitar 5% yang berada pada elevasi 1500-2000 mdpl dan 14% yang berada pada elevasi antara 2000-2500 mdpl. Struktur, karakteristik dan potensi kandungan secara Geologi Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.3. Kondisi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Tanah

No.	Jenis Tanah	Luasan (Ha)
1	Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol	2,729
2	Andosol Coklat	8,548
3	Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat	13,442
4	Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol	3,162
5	Latosol Coklat	17,572
6	Latosol Coklat Kemerahan	34
7	Latosol Coklat Tua Kemerahan	11,089
8	Aluvial Coklat Kekelabuan	7,757
9	Kompleks Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan	17,524
10	Podsolik Kuning	950
11	Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol	37,170
12	Asosiasi Aluvial Kelabu Dan Aluvial Coklat Kekelabuan	1,740
13	Asosiasi Glei Humus Rendah dan Aluvial Kelabu	6,748

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol sebesar 37,170 Ha, sedangkan luasan terkecil adalah jenis tanah latosal coklat kemerahan sebesar 34 Ha. Bila ditinjau dari potensi kandungan asal pengendapan batuan, Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu Littoral, Littoral Reef, Neritic, Plutonism Sub-Volcanic, Terrestrial Alluvium, Terrestrial Fluvial, Terrestrial Lacustrine, Transition, dan Volcanism Subaerial, dengan gambaran secara geologi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.4. Kondisi Geologi Kandungan Pengendapan Batuan

NO.	JENIS GEOLOGI	LUASAN (HA)
1	*Littoral*	4.550
2	*Littoral Reef*	866
3	*Neritic*	13.060
4	*Plutonism Sub-Volcanic*	4.215
5	*Terrestrial Alluvium*	560
6	*Terrestrial Fluvial*	39.373
7	*Terrestrial Lacustrine*	7
8	*Transition*	414
9	*Volcanism Subaerial*	59.984
10	*Unknown*	4.956

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat

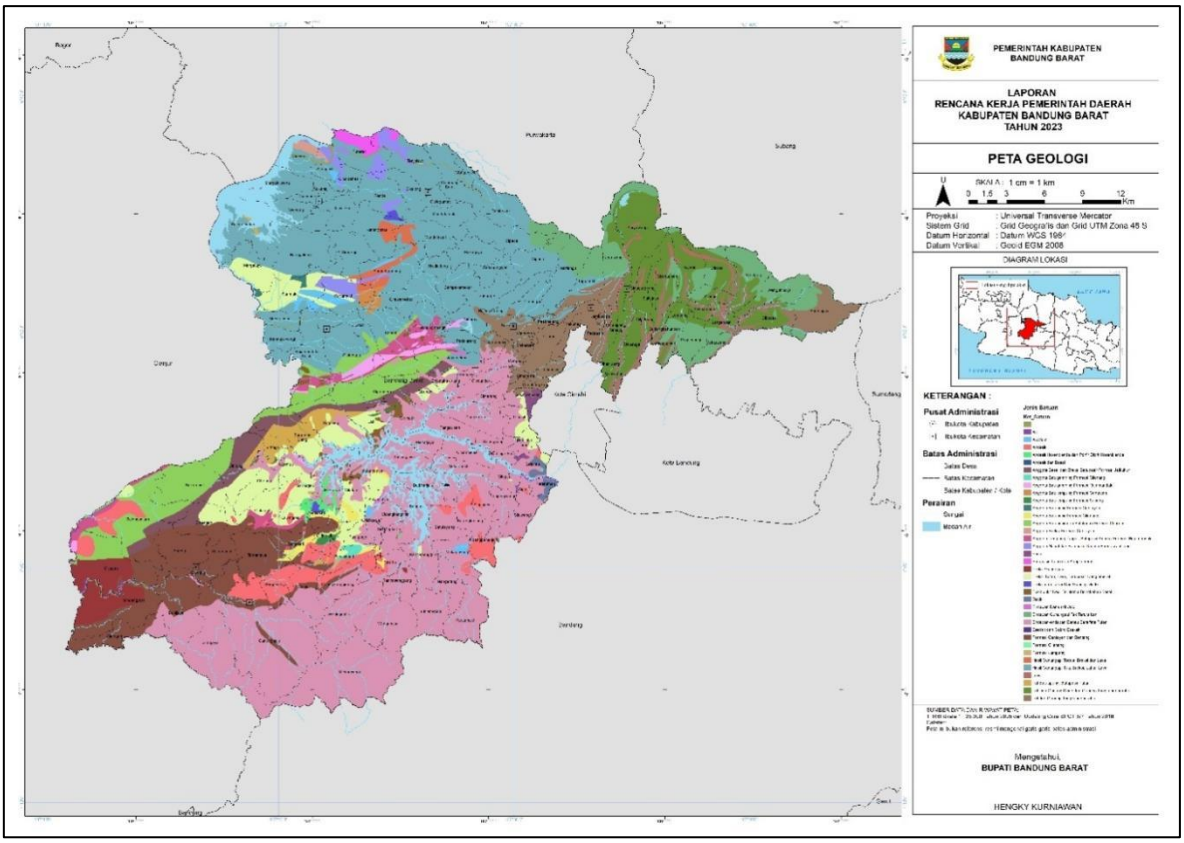

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Selanjutnya batuan sedimen pada daerah ini menempati 18,21 % luas wilayah KBB. Batuan sedimen yang tersebar pada wilayah ini cukup beraneka ragam mulai dari Breksi, Batulempung, Batupasir. Batugamping sampai Napal. Endapan sedimen kuarter hanya memiliki luas 636 Ha yang didominasi oleh endapan sungai dan danau.

Batuan Terobosan berupa Andesit Basalt, Shoshonitik dan juga batuan ultrabasa tersingkap pada daerah ini dengan persebaran hampir merata di setiap kecamatan. Namun batuan ini hanya menempati sekitar 3,28 %. Batuan ini juga pada bernilai ekonomis menjadi bahan galian industri yang cukup banyak tersebar di Kecamatan Sukasari dan sekitarnya. Selain itu batugamping dan tuff juga memiliki nilai ekonomis untuk menjadi bahan baku semen atau menjadi keramik.

Secara hidrologi, sumber daya air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, kondisi ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari sumber daya air permukaan dan air tanah, berupa sumber mata air, sungai, danau, rawa, embung.

Gambar 2.5. Peta Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat

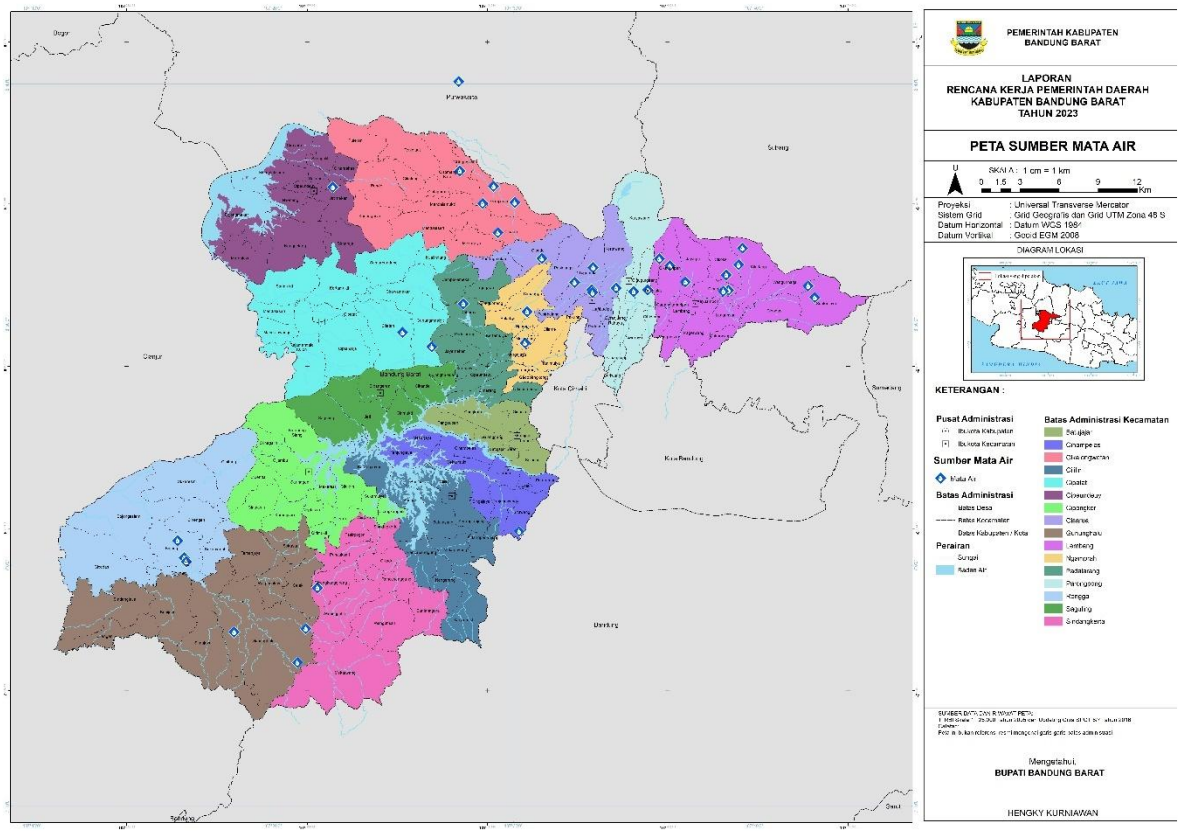

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Kabupaten Bandung Barat memiliki kurang lebih 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar. Sungai-sungai ini termasuk ke dalam Sub DAS Cikapundung (Lembang, Cisarua, Parongpong) dan Sub DAS Citarum (Cililin, Ngamprah, Batujajar, Padalarang) dengan total panjang adalah 3.941,68 Km.

Sumber daya air permukaan lainnya di Kabupaten Bandung Barat berupa 2 (dua) Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy serta Waduk Saguling dan Cirata, dengan kondisi sebagai berikut:

1) Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m3. Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi, kapasitanya sebesar 3,7 m3 dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 km3.
2) Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m3.

3) Waduk Cirata terletak kearah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m3, dengan ketinggian mukaair + 220 m/dpl.

Dalam aspek Hidrogeologi, berdasarkan studi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona:

1) Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3 perbulan, dengan penyebaran berada di Kecamatan Batujajar.
2) Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan ramah rangga dengan debit maksimum 100 m^3 per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar.
3) Daerah aman pengambilan air tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m^3 per hari dengan sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalong wetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.
4) Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m^3 per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang dan Cisarua.
5) Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3/bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan: Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.

Potensi Mata air di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 223 lokasi, yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan debit air sebesar 1-130 liter/detik seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2.5. Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kisaran Debit (lit/det) saat musim hujan
1.	Lembang	119	1 - 40
2.	Parongpong	26	1,5 - 100
3.	Cisarua	62	1- 60
4.	Ngamprah	46	1 - 130
5.	Cikalongwetan	73	1 - 50
6.	Padalarang	13	1 - 15
7.	Cipatat	28	1,5 -11
8.	Cililin	39	1 - 13
9.	Batujajar	29	0,5 - 3
10	Gununghalu	15	1 - 75
11.	Sindangkerta	32	1 - 8
12.	Cipongkor	24	0,8 - 12
13.	Cipendeuy	44	1 -10
14.	Rongga	116	0,5 - 50
15.	Cihampelas	50	2 - 13

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Secara Klimatologi, Wilayah Kabupaten Bandung Barat dikaruniai keberuntungan karena selalu disinggahi awan pembawa hujan dan ditempati penampungan air yang sangat besar yaitu waduk Saguling dan Cirata dengan curah hujan rata-rata pertahun adalah kurang lebih pada 1.500 – 3.500 mm/tahun, dengan gambaran dan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Kondisi Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No.	CURAH HUJAN	LUASAN (ha)
1	< 1500 mm/th	5,481
2	1.500 - 2.000 mm/th	19,489
3	2.000 - 2.500 mm/th	39,947
4	2.500 - 3.000 mm/th	48,993
5	3.000 - 3.500 mm/th	14,857

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Gambar 2.6. Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat

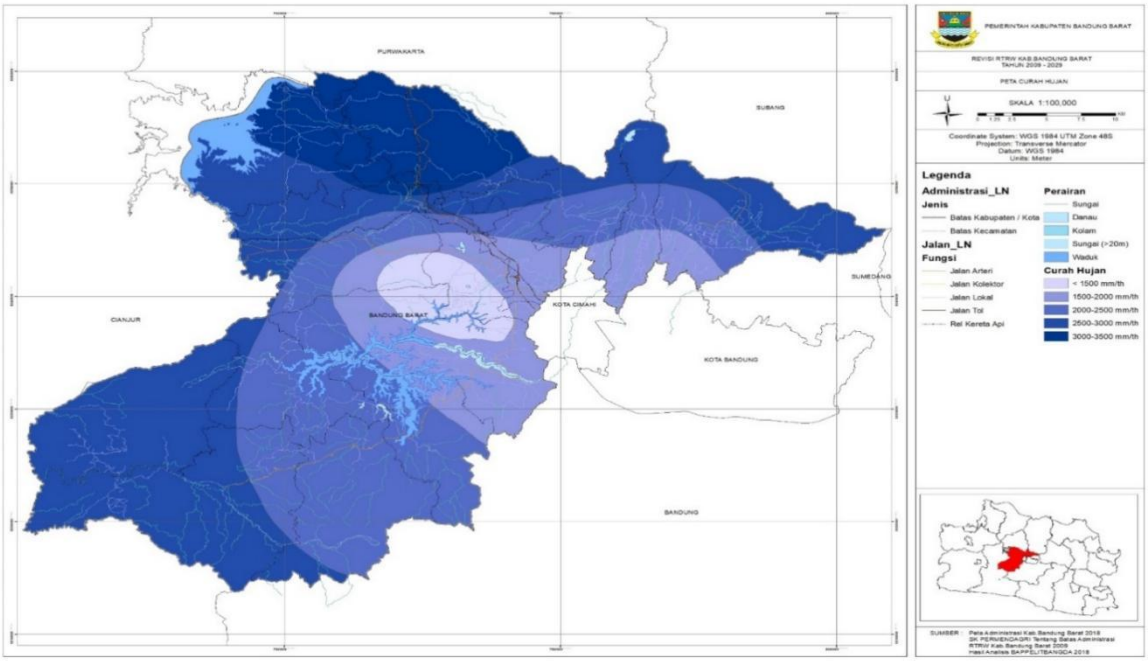

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Ada dua kecamatan yang memiliki curah hujan kurang dari 1.500 yaitu Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Sedangkan untuk curah hujan 1.500 - 2.000 mm/tahun adalah Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang Dan Parongpong. Selanjutnya wilayah yang memiliki curah hujan 2.000 – 2.500 adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, dan Sindangkerta. Untuk curah hujan 2500-3000 mm/th terdapat pada wilayah Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gunung Halu, Dan Sindangkerta. Terakhir wilayah yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Cikalong Wetan Dan Cipeundeuy. Berikut tabel curah hujan menurut luasan.

Penggunaan lahan merupakan suatu cara atau metode bagaimana pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang akan digunakan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jika dilihat dari fungsi guna lahan yang ada Kabupaten Bandung Barat, didominasi oleh fungsi budidaya non-pertanian sebesar 104.257.97 ha atau hampir 50% dari luasan total wilayah Kabupaten Bandung Barat. Disusul oleh luasan fungsi budidaya pertanian sebesar 37,5%. kabupaten Bandung Barat memiliki luasan fungsi kawasan lindung yang terbilang kecil, hanya 9% dari total wilayah yaitu 19.171 ha.

Tabel 2.7. Guna Lahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Jenis Tanah	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1		**Kawasan Lindung**	
	Kawasan Lindung	19.171,04	14,65%
	Jumlah	**19.171,04**	**14,65%**
2a		**Kawasan Budidaya Pertanian**	
	Kebun Campur	8.758,76	6,70%
	Perkebunan	9.562,95	7,31%
	Sawah	16.309,44	12,47%
	Sawah Tadah Hujan	19.342,69	14,79%
	Tegal/Ladang	24.472,31	18,71%
	Jumlah	**78.446,15**	**59,96%**
2b		**Kawasan Budidaya Non-Pertanian**	
	Industri	2.270,73	1,74%
	Institusi	251,94	0,19%
	Jalan	2.000,00	1,53%
	Jalan Kereta Api	52,76	0,04%
	Pasar / Pertokoan	776,79	0,59%
	Permukiman	20.260,16	15,49%
	Lapangan	50,02	0,04%
	Taman	35,11	0,03%
	Tambang	114,31	0,09%
	Jumlah	**25.811,82**	**19,73%**
	Total Kawasan Budidaya	**104.257,97**	**79,69%**
3		**Lainnya**	
	Tanah Kosong	3.702,29	2,83%
	Rumput	3.689,94	2,82%
	Jumlah	**7.392,23**	**5,65%**
	Total Kabupaten	**130.821,24**	**100,00%**

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti pertambahan jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan atau perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan masyarakat di dalamnya. Pusat pertumbuhan merupakan wilayah dengan pertumbuhan yang lebih pesat jika dibandingkan wilayah lain di sekitarnya dan menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi. Pusat pertumbuhan berfungsi sebagai pusat pembangunan yang

mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya sehingga membantu pemerataan pembangunan.

Pusat pertumbuhan memiliki hubungan fungsional dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tentunya banyak banget faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah pusat pertumbuhan di suatu wilayah, di antaranya karena faktor geografis, ekonomi, sosial dan fasilitas penunjang berupa jalan raya, jaringan internet, komunikasi, bahan bakar, jaringan listrik, rumah sakit, keamanan, dan sarana kebersihan.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kabupaten Bandung Barat memiliki beragam potensi sumber daya baik kondisi geografi, wilayah dan kondisi lingkungannya untuk dikembangkan, dengan memperhatikan daya dukung/kemampuan satuan lahan untuk selanjutnya dianalisis dengan kerangka pemikiran mengenai potensi pengembangan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan aspek-aspek fisik wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah

No	Aspek Fisik Wilayah		Kerangka Pengembangan Wilayah
1	Geografi	▪ Menjadi pintu masuk ke Metropolitan Bandung ▪ Dilalui jaringan transportasi primer ▪ Belum diminati investor	▪ Memanfaatkan lokasi wilayah yang strategis ▪ Memperluas kawasan lindung untuk melindungi badan air dan kawasan rawan bencana longsor ▪ Melindungi kawasan pertanian lahan basah ▪ Mengembangkan kegiatan dan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan
2	Topografi	Didominasi lahan dengan kemiringan terhal dan elevasi sama atau lebih dari 750 mdpl (batas elevasi Kawsan Bandung Utara)	
3	Hidrologi	▪ Memiliki dan dilalui banyak sungai, danau, dan waduk ▪ Terdapat potensi banjir dan sekaligus kekeringan	
4	Iklim	Didominasi wilayah dengan curah hujan sedang dan tinggi	
5	Penggunaan Lahan	Didominasi dengan kawasan budidaya non pertanian (terbangun). Kawasan budidaya pertanian lebih kecil, dan hanya 9% merupakan kawasan lindung.	
6	Kawasam Rawan Bencana	Rawan Longsor, dan terdapat potensi kekeringan dan banjir local	

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Pengembangan kawasan hutan produksi dan pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan diarahkan pada topografi yang cukup tinggi, pengembangan tersebut diarahkan di Kecamatan Lembang, Parompong, dan Cisarua, beberapa pertanian juga diarahkan pada daerah Cipatat dan Gununghalu. Pengembangan tersebut juga dapat dilihat melalui kelas kemampuan lahan A atau B yang dapat digunakan untuk kawasan pertanian. Pengembangan kawasan industri diarahkan pada kelerengan landai, atau morfologi datar.

Pengembangan kawasan industri banyak di arahkan di beberapa daerah di Kecamatan Ngamprah, Padalarang, Batujajar dan sekitarnya. Pengembangan kawasan Industri dapat diarahkan pada kelas kemampuan lahan C atau D pada dasarnya berlokasi pada morfologi landai. Pengembangan kawasan permukiman diarahkan pada topografi rendah, atau morfologi datar yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Permukiman dapat diarahkan pada kelas kemampuan lahan D dan E karena memiliki potensi pengembangan tinggi. Kawasan dengan potensi pengembangan tinggi memiliki topografi sangat rendah dan sedang, dan morfologi landai, dengan minimnya kawasan rawan bencana alam, juga memiliki kelas drainase sedang hingga tinggi, yang memungkinkan untuk pengembangn perkotaan.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Perubahan iklim dapat mempengaruhi aspek kebencanaan, diantaranya terkait dengan bencana kekeringan yang dapat melanda di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi bentang alam Kabupaten Bandung Barat yang merupakan dataran tinggi dan berbentuk cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Bandung Barat rentan terhadap bencana alam baik berupa banjir, longsor, erosi, dan bencana lainnya.

Cara untuk mengindentifikasi kapasitas wilayah dalam menghadapi kerawanan bencana, salah satunya dapat diketahui melalui tingkat indeks jasa lingkungan/ekosistem dalam pencegahan dan perlindungan terhadap bencana. Jenis jasa ekosistem ini merupakan infrastruktur dari alam yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kejadian bencana, diantaranya: jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana.

Jasa lingkungan/ekosistem pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Bandung Barat didominasi Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kedua kelas ini meliputi 50% luas wilayah Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi dengan luas 35.107 Ha atau 27% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, selanjutnya Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
- Kategori Tinggi sebagian besar 29.904 Ha atau 23% Sebagian besar berada di di Kecamatan Gununghalu, selanjutnya Kecamatan Cisarua, Cipongkor, dan Kecamatan Cipeundeuy.
- Kategori Sedang merupakan Sebagian besar seluas 40.292 Ha atau 31% yang berada di Kecamatan Rongga, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Saguling, Kecamatan Cihampelas.
- Kategori Rendah dengan luas 2.342 Ha atau 2 % menyebar sebagian kecil di beberapa kecamatan.
- Kategori Sangat Rendah dengan luas 23.551 Ha atau dengan persentase 18% tersebar di sebagian besar Kecamatan Cipatat, Gununghalu dan Kecamatan Lembang. Pada kategori sangat rendah memiliki dampak terhadap gangguan tata aliran dan banjir.

Tabel 2.9. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	23.551	18	Sebagian besar Cipatat, Gununghalu, Lembang
2	Rendah	2.342	2	Menyebar sebagian kecil dibeberapa Kecamatan
3	Sedang	40.292	31	Bagian besar Rongga, Gununghalu, Saguling, Cihampelas
4	Tinggi	29.904	23	Sebagian besar Gunung Halu,berikut Cisarua, Cipongkor, Cipeundeuy
5	Sangat Tinggi	35.107	27	Sebagian besar Cipatat, Selanjutnya Cihampelas Cikalongwetan, Cipeundeuy
Total		**131.195**	**100**	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK

Indikator jasa lingkungan/ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dapat memberikan kita perlindungan dan pencegahan dari kejadian bencana baik bencana erosi, longsor, pergerakan tanah dan kebakaran lahan. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi (ST) seluas 21% atau 27.000 Ha berada disebagian besar Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cihampelas
- Kategori Tinggi (T) seluas 15% atau 2.3478 Ha berada di sebagian besar di Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Lembang
- Kategori Sedang seluas 45.710 Ha atau 35% berada di sebagian besar Kecamatan Gununghalu, Rongga, selanjutnya Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Saguling

- Kategori Lahan kelas Rendah seluas 14.171 Ha atau 11% yang sebagian kecil menyebar di beberapa kecamatan
- Kategori kelas Sangat Rendah seluas 20.835 Ha sebesar 16% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipokongkor, Kecamatan Cipeundey.

Gabungan Kelas Sangat Tinggi dan Kelas Tinggi mencapai 39% jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari kejadian bencana alam. Dengan kondisi demikian menunjukkan bahwa kemampuan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat relatif rendah.

Tabel 2.10. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	20.835	16	Sebagian besar Cipatat, Cipokongkor, Cipeundey
2	Rendah	14.171	11	menyebar sebagian kecil
3	Sedang	45.710	35	Bagian besar Gununghalu, Rongga, selanjutnya Cipongkor, Saguling
4	Tinggi	23.478	18	Sebagian besar Cikalongwetan, Cisarua, Cipatat, Cipeundeuy, Lembang
5	Sangat Tinggi	27.000	21	Sebagian besar Cipatat dan Cihampelas
Total		**131.195**	**100**	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ - KLHK

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, pergerakan tanah, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan serta aingin puting beliung. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian gempa bumi, tanah longsor dan pergerakan tanah.

Kawasan rawan bencana longsor dan pergerakan tanah secara umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar, Cililin, Rongga, Gununghalu dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, dengan sebaran kawasan rawan bencana seperti terlihat pada gambar peta berikut:

Gambar 2.7. Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat

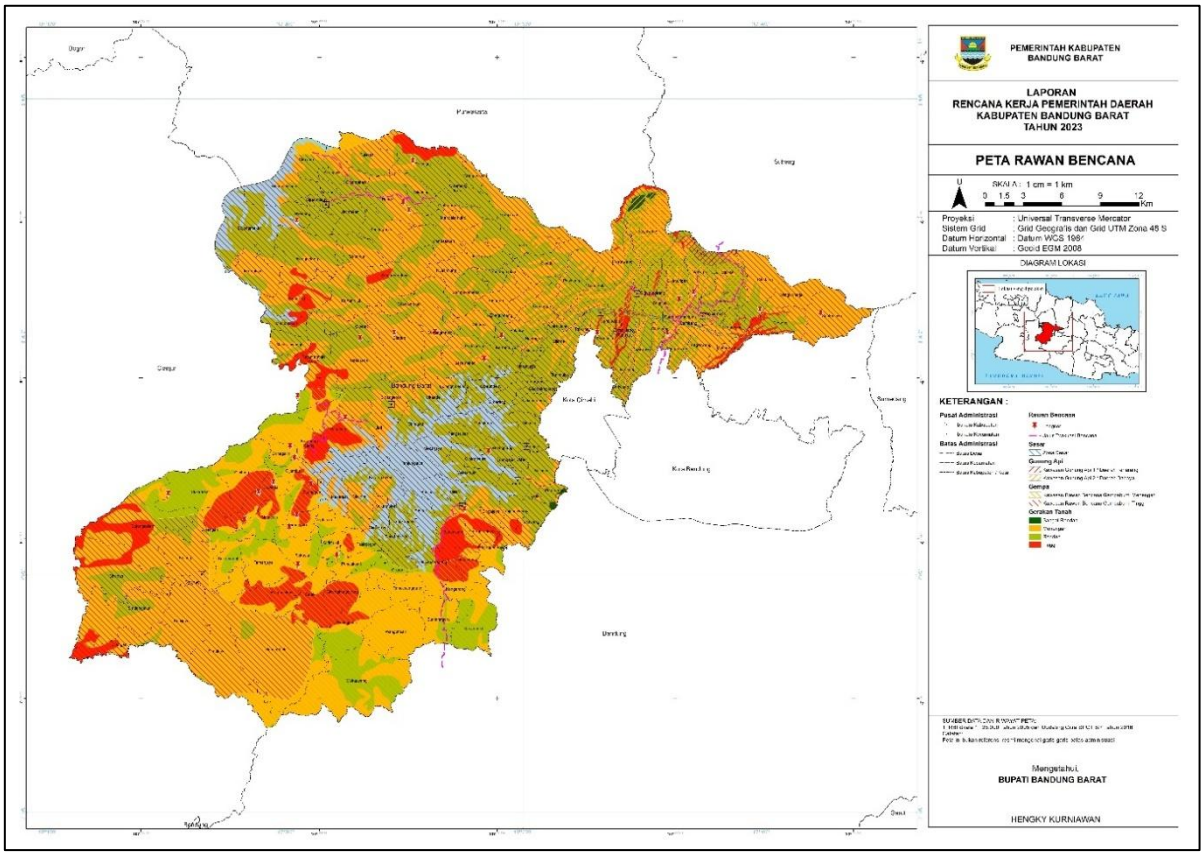

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

2.1.1.4 Aspek Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 sebanyak 1.788.336 jiwa dan tahun 2024 meningkat menjadi sebanyak 1.911.661 jiwa atau bertambah sebanyak 52.025 jiwa selama lima tahun dengan laju Pertumbuhan penduduk tahun 2024 sebesar 1,32 persen.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.911.661 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sebesar 974.016 jiwa (50,59 persen) dan penduduk perempuan sebesar 937.645 jiwa (49,05 persen) dengan sex ratio sebesar 104 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.040 laki-laki. Jumlah penduduk, komposisi penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 secara rinci menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

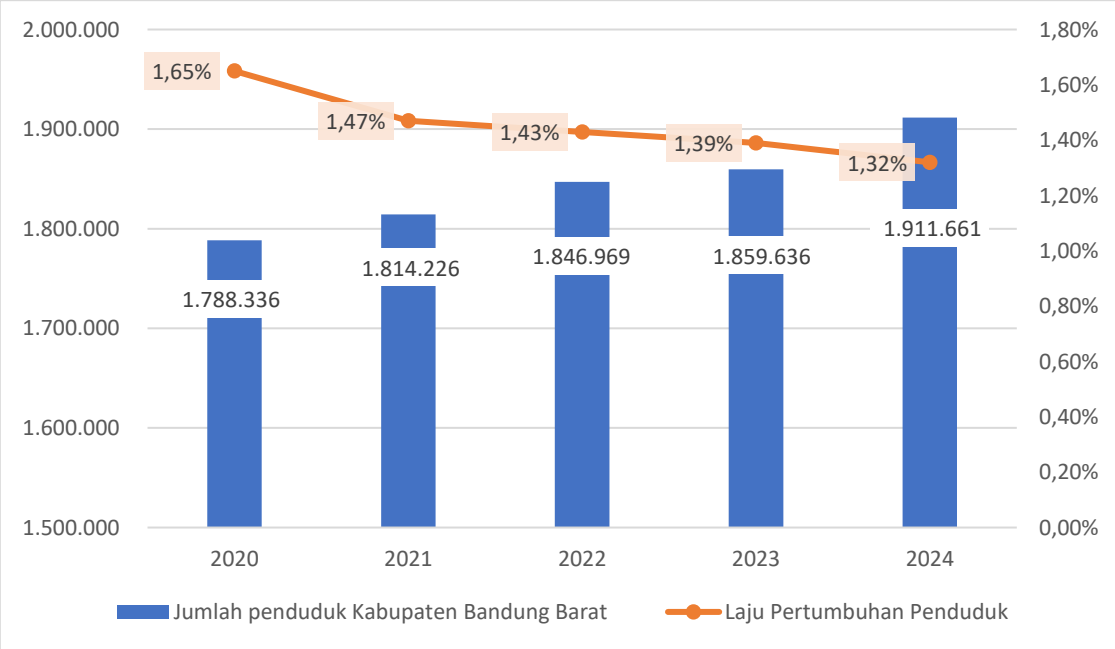

Sumber : KBBDA, 2020-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Tabel 2.11. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan			
1	Rongga	33.138	31.453	64.591	112,25	575
2	Gununghalu	43.015	40.685	83.700	154,95	540
3	Sindangkerta	40.644	39.274	79.918	105,97	754
4	Cililin	53.083	50.620	103.703	77,60	1.336
5	Cihampelas	75.239	71.862	147.101	46,90	3.136
6	Cipongkor	55.642	53.013	108.655	79,90	1.360
7	Batujajar	59.278	57.600	116.878	31,02	3.768
8	Saguling	19.153	18.510	37.663	51,42	732
9	Cipatat	77.610	74.390	152.000	125,59	1.210
10	Padalarang	98.060	95.054	193.114	51,48	3.751
11	Ngamprah	93.200	90.518	183.718	35,55	5.168
12	Parongpong	59.746	57.921	117.667	44,90	2.621
13	Lembang	106.178	102.906	209.084	97,97	2.134
14	Cisarua	43.128	41.523	84.651	55,47	1.526
15	Cikalongwetan	69.342	66.602	135.944	110,61	1.229
16	Cipeundeuy	47.560	45.714	93.274	101,86	916
Kab. Bandung Barat		**974.016**	**937.645**	**1.911.661**	**1.283,44**	**1.489**

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, 2023

Pada tahun 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.489 jiwa per Km2 dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Ngamprah dengan kepadatan 5.168 jiwa per Km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 540 jiwa per Km2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 adalah sebesar 1,32% dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Saguling sebesar 5,81% sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ngamprah sebesar 0,23%.

Komposisi penduduk yang digambarkan oleh Piramida Kabupaten Bandung Barat pada Gambar 2.28 memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun terakhir. Ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran.

Gambar 2.9. Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

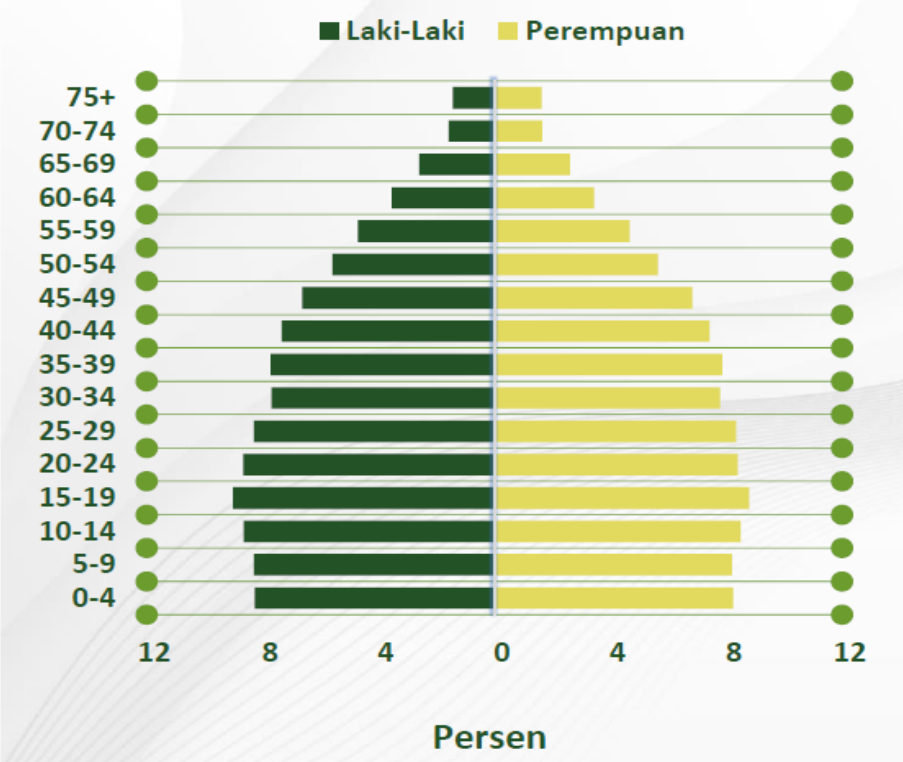

Sumber : BPS, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (diolah)

Terlihat dari bentuk piramida penduduk diatas, persentase penduduk Kab. Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 tahun terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. Pada periode tahun 2020-2023 PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021); 52.921,29 miliar Rupiah (2022); 56.945,18 miliar Rupiah (2023) dan 61.236,34 miliar rupiah (2024). Peningkatan pada periode 2020-2024 ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

Tabel 2.12. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Bandung Barat

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.173,59	6.140,22	6.812,50	7.247,21	7.732,00
2	Pertambangan dan Penggalian	476,31	506,84	517,68	535,90	574,97
3	Industri Pengolahan	18.744,16	20.188,77	22.012,92	23.440,63	25.014,94
4	Listrik dan Gas	375,83	418,08	441,35	463,10	511,74
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	19,68	21,60	23,85	24,50	28,83
6	Konstruksi	3.421,28	3.683,20	3.878,19	4.184,36	4.238,63
7	Perdagangan besar dan eceran	5.991,72	6.188,06	6.535,27	7.060,70	7.583,22
8	Transportasi dan pergudangan	2.436,30	2.511,57	2.905,25	3.409,12	3.794,05
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.401,86	2.417,65	2.783,85	3.063,80	3.203,71
10	Informasi dan komunikasi	999,36	1.069,96	1.120,75	1.191,52	1.261,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	418,93	455,56	490,38	516,24	612,70
12	Real Estate	855,11	939,98	1.016,14	1.096,94	1.214,39
13	Jasa Perusahaan	192,79	218,83	253,49	283,21	325,89
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.269,76	1.242,43	1.201,45	1.247,80	1.310,23

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
15	Jasa Pendidikan	1.942,60	1.983,84	2.078,60	2.248,48	2.727,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	258,02	274,36	290,83	316,87	388,32
17	Jasa lainnya	501,60	503,35	558,78	614,81	713,04
	PDRB ADHB	**46.478,90**	**48.764,31**	**52.921,29**	**56.945,18**	**61.236,34**

Sumber : Publikasi PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, BPS.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (production). PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi).

Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Bila dilihat dari sisi pengeluaran, Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan dan penurunan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bandung Barat pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.13. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020 - 2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	31.260,37	32.262,77	35.585,57	38.762,46	41.370,11
Konsumsi LNPRT	443,14	455,28	486,47	556,40	612,28
Konsumsi Pemerintah	2.948,57	3.078,08	3.080,70	3.204,43	3.514,89
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.354,54	10.540,03	11.216,89	12.110,42	12.639,69
Perubahan Inventori	661,74	-387,66	58,65	50,86	63,27
Net Ekspor/(Ekspor-Impor)	1.810,54	2.815,82	2.493,01	2.260,61	3.036,10
PDRB / GRDP	**46.478,90**	**48.764,31**	**52.921,29**	**56.945,18**	**61.236,34**

Sumber : Publikasi PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2020-2024, BPS.

Berdasarkan tabel diatas, berputarnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor disertai dengan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan terus meningkat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK sebesar 30.640,41milyar setelah pandemi covid-19 di awal tahun 2020, angka PDRB ADHK naik menjadi 31.701,79 miliar rupiah pada tahun 2021. Tetapi

pada tahun 2022, 2023, 2024 secara nominal PDRB ADHK Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan menjadi 33.393,29 milyar pada tahun 2022, 35.062,19 milyar pada tahun 2023 dan 36.793,68 milyar pada tahun 2024, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel gambar dan tabel berikut:

Tabel 2.14. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Bandung Barat

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.711,11	3.672,82	3.823,82	3.884,46	4.100,25
2	Pertambangan dan Penggalian	322,49	342,68	342,29	344,65	355,05
3	Industri Pengolahan	12.516,78	13.126,08	13.970,00	14.710,29	15.171,50
4	Listrik dan Gas	229,82	254,96	266,93	273,12	282,88
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	12,68	13,89	14,95	15,28	15,82
6	Konstruksi	2.214,82	2.378,25	2.419,98	2.528,35	266,56
7	Perdagangan besar dan eceran	4.024,97	4.142,79	4.305,72	4.479,13	4.684,35
8	Transportasi dan pergudangan	1.544,01	1.561,04	1.716,34	1.894,38	2.080,10
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.568,89	1.553,41	1.709,15	1.866,42	1.987,30
10	Informasi dan komunikasi	1.015,82	1.094,91	1.155,96	1.228,47	1.335,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,15	277,91	274,48	284,16	303,95
12	Real Estate	616,38	677,19	731,75	777,36	840,82
13	Jasa Perusahaan	135,50	146,31	161,89	173,66	184,85
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	706,20	688,15	666,91	683,00	728,77
15	Jasa Pendidikan	1.241,42	1.241,87	1.272,15	1.322,48	1.414,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	172,47	182,98	192,58	203,64	214,94
17	Jasa lainnya	343,91	346,54	368,39	393,35	431,41
	PDRB ADHK	**30.640,41**	**31.701,79**	**33.393,29**	**35.062,19**	**36.793,68**

Sumber : Publikasi PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2020-2024, BPS 2025

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010.

Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume

permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari berikut ini:

Tabel 2.15. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020-2024

Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2020	2021	2022	2023	2024
1. Konsumsi Rumah Tangga	19.770,88	20.033,77	20.909,97	21.921,28	22.974,98
2. Konsumsi LNPRT	300,82	305,53	314,86	347,42	374,95
3. Konsumsi Pemerintah/	1.770,07	1.806,28	1.765,63	1.817,98	1.960,37
4. Pembentukan Modal Tetap	6.529,16	7.009,20	7.050,77	7.371,64	7.726,05
5. Perubahan Inventori	374,39	-208,71	31,57	26,59	32,25
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	1.895,08	2.755,72	3.320,49	3.577,28	3.725,08
PDRB / GRDP	**30.640,41**	**31.701,79**	**33.393,29**	**35.062,19**	**36.793,68**

Sumber : PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024, BPS

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,46 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada saat terjadi pandemi covid-19 yang mengalami kontraksi/pertumbuhan negatif sebesar 2,41 persen. Pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan terakhir tahun 2024 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,94 persen. Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,62	-1,03	4,11	1,59	5,56
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,18	6,26	-0,11	0,69	3,02
C	Industri Pengolahan	-2,42	4,87	6,43	5,30	3,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,08	10,94	4,70	2,32	3,57
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,21	9,58	7,61	2,23	3,51
F	Konstruksi/Construction	-5,71	7,38	1,75	4,48	5,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,15	2,93	3,93	4,03	4,58
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,82	1,10	9,95	10,37	9,80
I	Penyediaan Akomodasi & Mamin	-4,67	-0,99	10,03	9,20	6,48
J	Informasi dan Komunikasi/	27,03	7,79	5,58	6,27	8,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	5,61	-1,24	3,53	6,97
L	Real Estat	0,21	9,86	8,06	6,23	8,16
M,N	Jasa Perusahaan	-12,11	7,98	10,65	7,27	6,45
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-7,68	-2,56	-3,09	2,41	6,70
P	Jasa Pendidikan	6,53	0,04	2,44	3,96	6,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,28	6,09	5,25	5,74	5,55
R,S,T, U	Jasa Lainnya	-0,38	0,76	6,30	6,78	9,68
Produk Domestik Regional Bruto		-2,41	3,46	5,34	5,00	4,94

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024, BPS

Pada tahun 2024, Kabupaten Bandung Barat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen, ini menurun dibandingkan pada tahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya 5%. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas produksi di semua lapangan usaha dengan percepatan pertumbuhan ekonomi terbesar terdapat pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,37 persen dan perceptan pertumbuhan ekonomi paling kecil ada pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,69 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB ADHK adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, sebagaimana terlihat dari Tabel berikut:

Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1. Konsumsi Rumah Tangga	-0,88	1,33	4,37	4,84	4,81
2. Konsumsi LNPRT	-4,58	1,57	3,05	10,34	7,92
3. Konsumsi Pemerintah	0,02	2,05	-2,25	2,96	7,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,24	7,35	0,59	4,55	4,81
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor/ (Ekspor- Impor)					
PDRB / GRDP	-2,41	3,46	5,34	5,00	4,94

Sumber : PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024, BPS,

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori

Dalam konstelasi regional Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menunjukkan arah pemulihan ekonomi dialami oleh semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Pertumbuhan ekonomi 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan positif rata-rata sebesar 4,95 persen.

Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kabupaten Majalengka sebesar 6,38 persen sementara pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh Kabupaten Indramayu sebesar 2,18 persen sedangkan Kabupaten Bandung Barat dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,94 persen, seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.18. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	-1,76	3,55	5,25	5,19	5,21
Sukabumi	-0,91	3,74	5,12	5,17	5,15
Cianjur	-0,77	3,48	5,04	5,16	5,14
Bandung	-1,80	3,56	5,35	4,97	5,04
Garut	-1,26	3,58	5,08	4,94	4,95
Tasikmalaya	-0,98	3,43	4,70	4,69	4,64
Ciamis	-0,14	3,66	5,02	4,99	4,97
Kuningan	0,11	3,56	5,53	5,25	5,61
Cirebon	-1,08	2,47	4,09	4,85	5,83
Majalengka	0,89	4,75	6,63	6,15	6,38

Sumedang	-1,12	2,97	5,03	5,01	4,05
Indramayu	-1,58	0,58	2,88	9,76	2,18
Subang	-1,15	2,18	4,21	4,64	4,81
Purwakarta	-2,13	3,42	5,24	4,97	4,64
Karawang	-3,80	5,85	6,31	5,40	4,20
Bekasi	-3,39	3,62	5,30	5,32	5,17
Bandung Barat	-2,41	3,46	5,34	5,00	4,94
Pangandaran	-0,05	3,67	5,03	5,26	5,12
Kota Bogor	-0,41	3,76	5,65	5,10	5,15
Kota Sukabumi	-1,49	3,71	5,35	5,12	5,11
Kota Bandung	-2,28	3,76	5,41	5,07	4,99
Kota Cirebon	-0,98	3,05	5,10	5,01	5,02
Kota Bekasi	-2,58	3,22	4,96	5,43	5,19
Kota Depok	-1,92	3,76	5,24	5,05	5,47
Kota Cimahi	-2,26	4,19	5,92	5,19	5,26
Kota Tasikmalaya	-2,01	3,57	5,01	5,96	5,22
Kota Banjar	0,94	3,69	4,19	4,63	5,48
Jawa Barat	**-2,52**	**3,74**	**5,45**	**5,00**	**4,95**
Nasional	**-2,07**	**3,69**	**5,31**	**5,05**	**5,03**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.2.2 Inflasi

Secara teoritis, laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya.

Kabupaten Bandung Barat bukan termasuk Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya. Bagi kabupaten yang tidak dihitung maka ada kota rujukan inflasi, dimana kota inflasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dan atau memiliki kedekatan secara geografis.

Berikut ditampilkan inflasi Kota Bandung dan inflasi Kabupaten Bandung, dengan pertimbangan secara geografis dan sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat berbelanja dan memiliki pola konsumsi yang mengarah ke Kota Bandung yang merupakan Kota yang menjadi acuan perhitungan inflasi Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2023 sedangakan mulai tahun 2024 inflasi mengacu kepada inflasi Kabupaten Bandung. Perkembangan inflasi tahunan 7 Kota di Jawa Barat, termasuk inflasi Kota Bandung dan Kabupaten Bnadung selama 5 tahun terakhir sebagai rujukan inflasi di Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 2.19. Inflasi *Y to Y* Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024

Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bandung	-	-	-	-	1,46
Kab. Majalengka	-	-	-	-	1,60
Kab. Subang	-	-	-	-	0,93
Kota Bogor	2,18	1,93	5,82	3,36	1,75
Kota Sukabumi	1,84	1,71	5,45	2,72	2,59
Kota Bandung	1,75	1,65	7,45	0,63	1,61
Kota Cirebon	1,16	1,81	4,86	3,22	1,10
Kota Bekasi	2,81	1,61	5,37	3,14	1,60
Kota Depok	1,78	1,81	6,06	2,49	1,95
Kota Tasikmalaya	1,61	1,17	6,65	2,84	1,94
Jawa Barat	**2,18**	**1,69**	**6,04**	**2,48**	**1,64**

Sumber: Indikator Statistik Terkini Prov. Jabar, BPS Prov. Jabar, Des 2024

2.1.2.3 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang antara lain mencakup Kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari. Bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung Barat yang didukung oleh data yang akurat, strategi dan arah kebijakan yang tepat sasaran.

Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Perkembangan tingkat kemiskinan, penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 - 2024 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.20. Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)

2020	10,49	362.212	179,46
2021	11,30	374.470	190,77
2022	10,82	393.956	183,70
2023	10,52	426.355	179,43
2024	10,49	455.325	179,70

Sumber : KBBDA, 2021-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2020 –2024, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.93.113,- dari Rp.362.212,- per kapita per bulan pada Tahun 2020 menjadi Rp.455.425,- per kapita per bulan pada Tahun 2024.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kab. Bandung Barat pada periode tahun 2020-2024 dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 2.14. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat masih relatif tinggi tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.10. Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

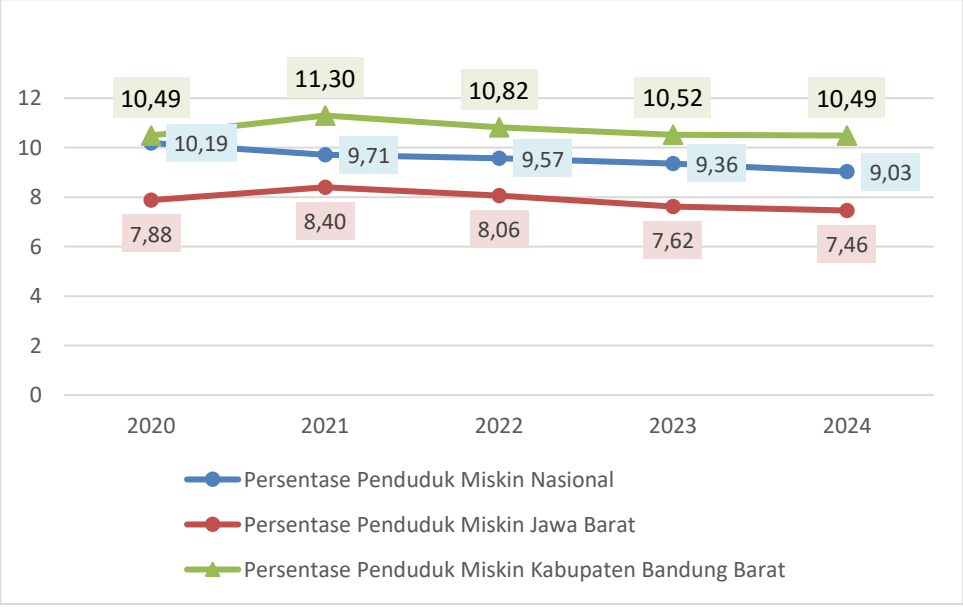

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbanda, 2025

Bila dilihat dari skala nasional, kemiskinan Kab. Bandung Barat masih di atas nasional dan dalam skala regional tingkat kemiskinan Kab. Bandung Barat masih tinggi yaitu berada pada peringkat 22 dari 27 Kab/Kota di Jabar.

Tabel 2.21. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

Peringkat	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Depok	2.45	2.58	2.53	2.38	2,34
2	Kota Bandung	3.99	4.37	4.25	3.96	3,87
3	Kota Bekasi	4.38	4.74	4.43	4.10	4,01
4	Kota Cimahi	5.11	5.35	5.11	4.66	4,39
5	Bekasi	4.82	5.21	5.01	4.93	4,80
6	Kota Banjar	6.09	7.11	6.73	6.14	5,85
7	Bandung	6.91	7.15	6.80	6.40	6,19
8	Kota Bogor	6.68	7.24	7.10	6.67	6,53
9	Sukabumi	7.09	7.70	7.34	7.01	6,87
10	Ciamis	7.62	7.97	7.72	7.42	7,05
11	Bogor	7.69	8.13	7.73	7.27	7,20
12	Kota Sukabumi	7.70	8.25	8.02	7.50	7,39
13	Karawang	8.26	8.95	8.44	7.87	7,86
14	Purwakarta	8.27	8.83	8.70	8.46	8,41
15	Pangandaran	8.99	9.65	9.32	8.98	8,75
16	Kota Cirebon	9.52	10.03	9.82	9.16	9,02
18	Sumedang	10.26	10.71	10.14	9.36	9,10
17	Subang	9.31	10.03	9.75	9.52	9,49
19	Garut	9.98	10.65	10.42	9.77	9,68
20	Cianjur	10.36	11.18	10.55	10.22	10,14
21	Tasikmalaya	10.34	11.15	10.73	10.28	10,23
22	**Bandung Barat**	10.49	11.30	10.82	10.52	10,49
23	Cirebon	11.24	12.30	12.01	11.20	10,82
24	Majalengka	11.43	12.33	11.94	11.21	11,00
25	Kota Tasikmalaya	12.97	13.13	12.72	11.53	11,10
26	Kuningan	12.82	13.10	12.76	12.12	11,88
27	Indramayu	12.70	13.04	12.77	12.13	11,93
	Provinsi Jawa Barat	**7.88**	**8.40**	**8.06**	**7.62**	**7,46**
	Nasional	**10.19**	**9.71**	**9.57**	**9.36**	**9,03**

Sumber : Data Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2020-2024, diolah.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.22. Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	1,40	0,25
2021	1,62	0,32
2022	1,56	0,31
2023	1,54	0,34
2024	1,17	0,23

Sumber : KBBDA, 2021-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) yang oleh Bank Dunia dihitung dengan membandingkan berbagai komoditas antar negara.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, maka perlu disajikan data kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Kepmen Menko Bidang PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 bahwa Kab. Bandung Barat merupakan salah satu prioritas lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dari 212 Kab/Kota.

Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung Barat terus mengalami penurunan dari 2,91 persen tahun 2020 menjadi 0,88 persen pada tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23. Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem				Persen Penduduk Miskin Ekstrem			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	63,497	107,250	146,120	47,220	1.17	1.77	2.38	0.76
2	Sukabumi	30,525	24,610	19,900	24,050	1.12	0.98	0.78	0.94
3	Cianjur	94,891	57,040	36,160	11,890	3.83	2.45	1.55	0.51
4	Bandung	89,145	66,960	56,430	46,810	2.46	1.78	1.48	1.22
5	Garut	50,937	30,320	82,170	9,550	1.97	1.15	3.10	0.36
6	Tasikmalaya	23,315	28,240	15,740	27,120	1.25	1.57	0.87	1.49
7	Ciamis	20,280	5,510	17,900	1,320	1.65	0.45	1.47	0.11
8	Kuningan	73,564	24,030	31,890	15,700	6.30	2.20	2.90	1.42
9	Cirebon	74,930	64,440	81,890	36,640	3.30	2.92	3.70	1.65
10	Majalengka	39,164	43,840	24,130	10,640	3.00	3.58	1.96	0.86
11	Sumedang	57,510	31,710	36,820	6,370	4.99	2.69	3.11	0.53
12	Indramayu	110,433	75,820	53,050	38,550	6.02	4.32	3.01	2.18
13	Subang	59,825	57,510	35,440	34,610	3.75	3.63	2.23	2.16
14	Purwakarta	29,437	18,580	16,930	10,190	2.95	1.95	1.76	1.06

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem				Persen Penduduk Miskin Ekstrem			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
15	Karawang	110,003	28,220	64,020	17,890	4.51	1.20	2.70	0.75
16	Bekasi	71,288	56,000	25,820	19,820	2.29	1.44	0.64	0.48
17	Bandung Barat	52,041	28,250	33,590	15,040	2.91	1.67	1.98	0.88
18	Pangandaran	17,413	5,610	5,930	2,650	4.11	1.38	1.46	0.65
19	Kota Bogor	28,789	13,590	14,450	4,930	2.76	1.23	1.30	0.44
20	Kota Sukabumi	10,875	9,980	4,490	2,540	3.14	3.03	1.35	0.76
21	Kota Bandung	41,795	24,790	25,370	9,140	1.71	0.96	0.98	0.35
22	Kota Cirebon	17,732	13,060	5,320	1,090	5.32	4.10	1.66	0.34
23	Kota Bekasi	31,796	33,250	61,750	-	1.25	1.09	1.99	-
24	Kota Depok	50,380	9,440	17,570	-	2.45	0.38	0.69	-
25	Kota Cimahi	11,027	8,340	2,630	2,980	1.94	1.37	0.43	0.49
26	Kota Tasikmalaya	30,365	27,170	23,880	6,590	4.24	3.99	3.49	0.96
27	Kota Banjar	2,894	2,080	2,490	80	1.44	1.10	1.32	0.04
Provinsi Jawa Barat		1,293,850	895,640	941,860	403,380	2.68	1.79	1.86	0.79
Nasional						4.00	2.14	1.74	1.12

Sumber : Data P3KE, Kemenko PMK, 2024.

2.1.2.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024 berfluaktif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah (<0,4). Nilai indeks pada grafik berikut, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih di bawah 0,4. Tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang.

Gambar 2.11. Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

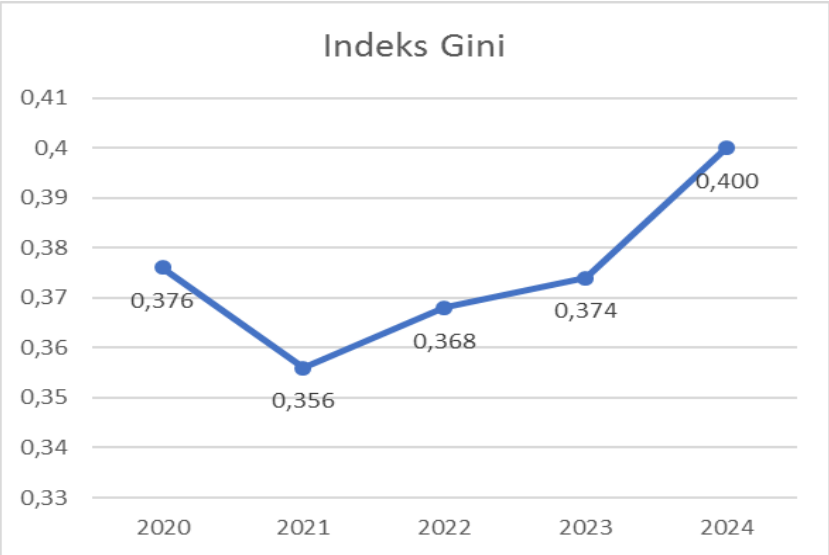

Sumber : KBBDA, 2021-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Selama lima tahun terakhir capaian gini rasio Kab. Bandung Barat cenderung meningkat, pada tahun 2020 nilai gini rasio Kab. Bandung Barat mencapai 0,394 poin, pada tahun 2021 turun menjadi 0,356 poin. Tetapi Pada tahun 2022 sampai dengan 2024 gini rasio meningkat menjadi 0,400 poin.

Bila dilihat dari skala regional Jawa Barat dan Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bandung Barat masih di bawah Jawa Barat dan Nasional, seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2.12. Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 - 2024

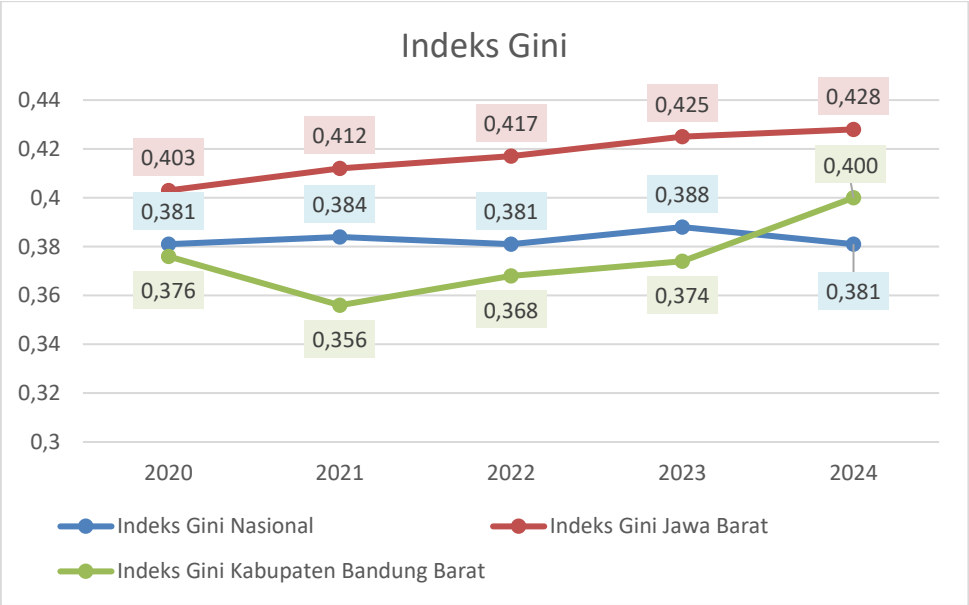

Sumber : KBBDA, 2021-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Nilai indeks pada grafik tersebut, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan sedang dengan nilai 0,4 poin.

2.1.2.5 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT).

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Dari gambar berikut, selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 747 ribu pada tahun 2020 menjadi 978 ribu pada tahun 2024, dengan penjelasan kondisi ketenagakerjaan selama tahun 2020 - 2024 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2.13. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2020-2024

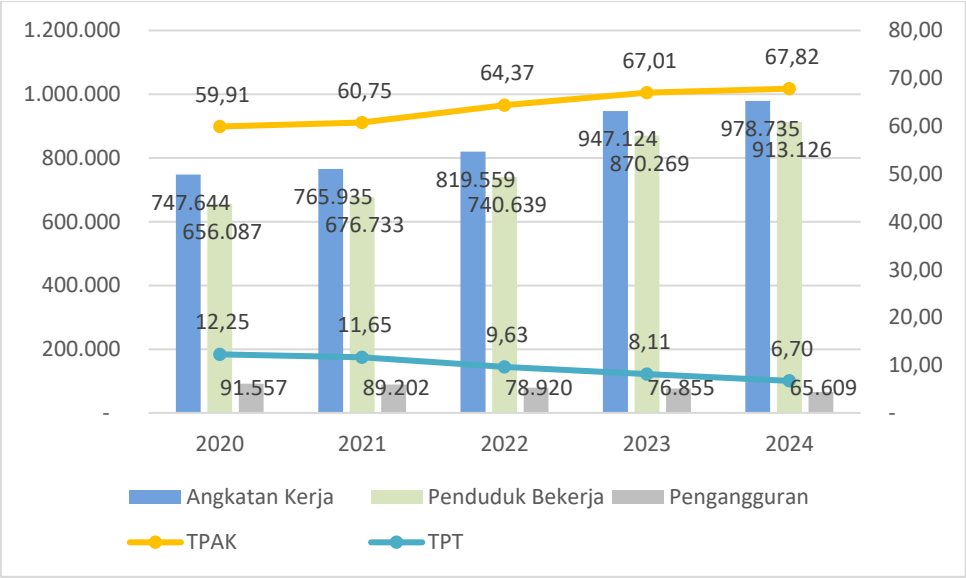

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2020-2024, diolah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2020 s.d 2024 di Kabupaten Bandung Barat tingkat penganggur terbuka (TPT) terus menurun, TPT pada tahun 2020 sebesar 12,25 persen, tahun 2021 sebesar 11,65 persen, tahun 2022 sebesar 9,63 persen, tahun 2023 sebesar 8,11 persen dan tahun 2024 turun kembali menjadi 6,70 persen.

Walaupun tingkat pengangguran pada tahun 2022 s.d. 2024 telah menyentuh satu digit, tetapi kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja, untuk lebih jelasnya digambarkan berikut:

Gambar 2.14. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

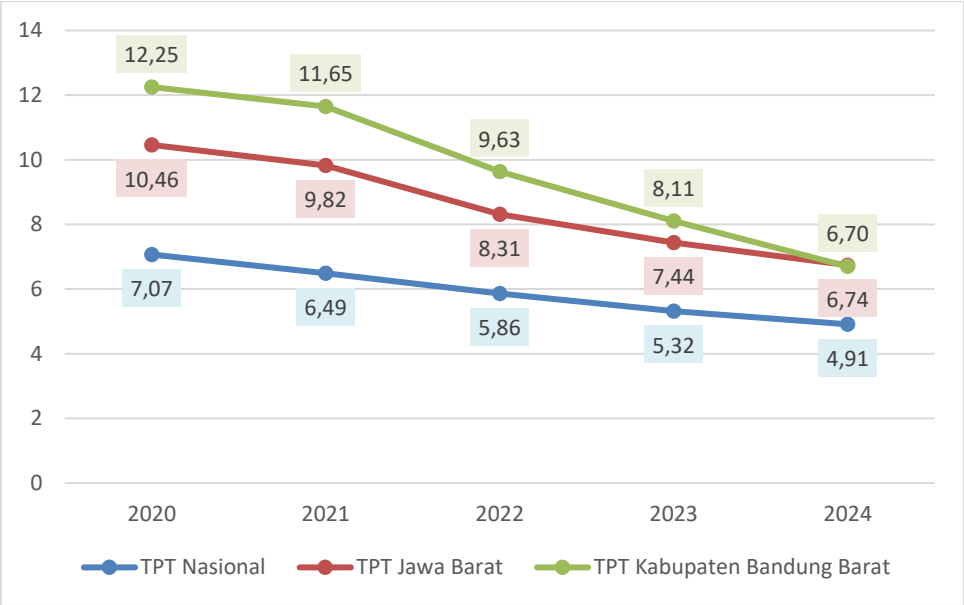

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada skala regional Jawa Barat, sampai dengan tahun 2024 rata-rata Kab/Kota di Jawa Barat mampu menekan angka pengangguran sampai dengan 1 (satu) digit salah satunya Kab. Bandung Barat dengan capaian TPT sebesar 6,70 persen.

Tabel 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	14.29	12.22	10.64	8.47	7,34
2	Sukabumi	9.60	9.51	7.77	7.32	7,11
3	Cianjur	11.05	9.32	8.41	7.71	5,99
4	Bandung	8.58	8.32	6.98	6.52	6,36
5	Garut	8.96	8.68	7.60	7.33	6,96
6	Tasikmalaya	7.12	6.16	4.17	3.89	3,74
7	Ciamis	5.66	5.06	3.75	3.52	3,37
8	Kuningan	11.22	11.68	9.81	9.49	7,78
9	Cirebon	11.52	10.38	8.11	7.65	6,78
10	Majalengka	5.84	5.71	4.16	4.12	6,74
11	Sumedang	9.89	9.18	7.72	6.94	4,01
12	Indramayu	9.21	8.30	6.49	6.46	6,16
13	Subang	9.48	9.77	7.77	7.65	6,25
14	Purwakarta	11.07	10.70	8.75	7.72	6,73
15	Karawang	11.52	11.83	9.87	8.95	7,34
16	Bekasi	11.54	10.09	10.31	8.87	8,04
17	Bandung Barat	12.25	11.65	9.63	8.11	6,70
18	Pangandaran	5.08	3.25	1.56	1.52	1,58
19	Kota Bogor	12.68	11.79	10.78	9.39	8,13
20	Kota Sukabumi	12.17	10.78	8.83	8.53	8,34
21	Kota Bandung	11.19	11.46	9.55	8.83	7,40

22	Kota Cirebon	10.97	10.53	8.42	7.66	6,29
23	Kota Bekasi	10.68	10.88	8.81	7.90	7,82
24	Kota Depok	9.87	9.76	7.82	6.97	6,27
25	Kota Cimahi	13.30	13.07	10.77	10.52	8,97
26	Kota Tasikmalaya	7.99	7.66	6.62	6.55	6,49
27	Kota Banjar	6.73	6.09	5.53	5.43	5,44
Provinsi Jawa Barat		**10.46**	**9.82**	**8.31**	**7.44**	**6,75**
Nasional		**7.07**	**6.49**	**5.86**	**5.32**	**4,91**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memperluas pilihan-pilhan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembagunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Capaian pembangunan manusia di Kab. Bandung Barat tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

No	Komponen	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,05	74,23	74,59	74,78	75,06
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,87	11,88	11,89	11,91	12
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,19	8,20	8,22	8,23	8,24
4.	Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah)	8.455	8.546	9.044	9.392	9.583
IPM		**68,81**	**69,03**	**69,82**	**70,33**	**70,77**

Sumber : KBBDA, 2021-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 sebesar 70,77. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan data pada tahun 2024,

umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 75,06 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 75,06 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,24 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 12 tahun atau setara dengan Kelas XII atau sampai SMA kelas 3. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai 9,583 juta rupiah per kapita per tahun.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk meilihat kemajuan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia bedasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut.

- Sangat Tinggi : IPM $\geq$ 80
- Tinggi : 70 $\leq$ IPM < 80
- Sedang : 60 $\leq$ IPM < 70
- Rendah : IPM < 60

Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM di atas, maka IPM Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir termasuk dalam kategori “Kelompok sedang”, yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga 70 dan telah mencapai “kelompok Tinggi” di tahun 2023. Status indeks kesehatan termasuk dalam kategori “Kelompok Tinggi” (dengan capaian antara 70-80), status indeks pendidikan dan indeks daya beli masih dalam kategori “Kelompok Sedang” (dengan capaian antara 60-70). Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan hidup layak penduduk beberapa tahun terakhir. Hal yang paling harus diperhatikan adalah tingkat pendidikan yang masih tergolong sedang.

Posisi IPM Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun secara tren sama sama menunjukan peningkatan yang kosisten dalam lima tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2023 sudah masuk dalam kategori IPM tinggi.

Gambar 2.15. Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

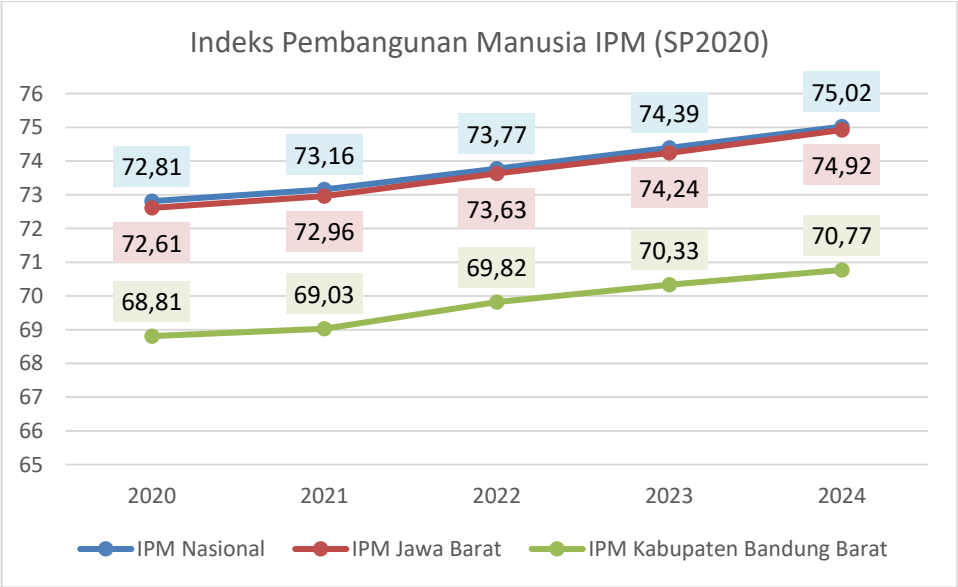

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbangda, 2025

Dalam konstelasi regional Jawa Barat capaian IPM Kab/Kota menunjukkan adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia, seperti terlihat pada tabel berikut. Perbedaan level pertumbuhan menunjukkan kinerja pembangunan manusia dalam kurun Tahun 2020-2024, semakin cepat laju pertumbuhannya semakin cepat pula peningkatan IPM-nya.

Tabel 2.26. Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat Barat Tahun 2024

Kab/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita	IPM
Bogor	74,90	12,75	8,39	11.563,00	73,63
Sukabumi	74,85	12,39	7,34	9.815,00	70,18
Cianjur	74,80	12,04	7,33	9.026,00	68,89
Bandung	75,23	12,74	9,15	11.392,00	74,59
Garut	74,87	12,17	7,85	9.168,00	69,91
Tasikmalaya	74,06	12,64	7,97	8.965,00	69,98
Ciamis	75,26	14,3	8,1	10.085,00	73,64
Kuningan	75,22	12,27	7,9	10.418,00	71,56
Cirebon	74,98	12,42	7,65	11.529,00	72,3
Majalengka	74,98	12,27	7,53	10.842,00	71,37
Sumedang	75,29	13,02	8,74	11.589,00	74,57
Indramayu	74,82	12,32	6,95	11.010,00	70,72
Subang	75,08	12,11	7,46	11.894,00	72,05
Purwakarta	74,92	12,25	8,14	13.099,00	73,99
Karawang	75,16	12,21	8,05	12.942,00	73,82
Bekasi	75,33	13,18	9,76	12.500,00	76,8
Bandung Barat	75,06	12	8,24	9.583,00	70,77
Pangandaran	75,11	12,31	8,1	9.654,00	71,03
Kota Bogor	75,80	13,51	10,71	13.154,00	79,03
Kota Sukabumi	75,11	13,62	10,38	12.252,00	77,69
Kota Bandung	75,83	14,25	11,07	18.795,00	83,75
Kota Cirebon	75,48	13,17	10,53	12.869,00	78,09

Kab/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita	IPM
Kota Bekasi	76,14	14,14	11,79	16.775,00	83,55
Kota Depok	75,82	14,11	11,59	16.640,00	83,05
Kota Cimahi	75,55	13,85	11,52	13.278,00	80,3
Kota Tasikmalaya	75,31	13,5	9,63	11.431,00	76,03
Kota Banjar	74,99	13,28	8,83	11.811,00	75,01
Provinsi Jawa Barat	**75,16**	**12,8**	**8,87**	**12.157,00**	**74,92**
Nasional	**74,15**	**13,21**	**8,85**	**12.341,00**	**75,02**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.2.7 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Pada tahun 2024 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 68,06 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2020 yang masih berada pada angka 65,40 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam lima tahun terakhir sebesar 2,66 poin. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Berikut capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024.

Gambar 2.16. Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

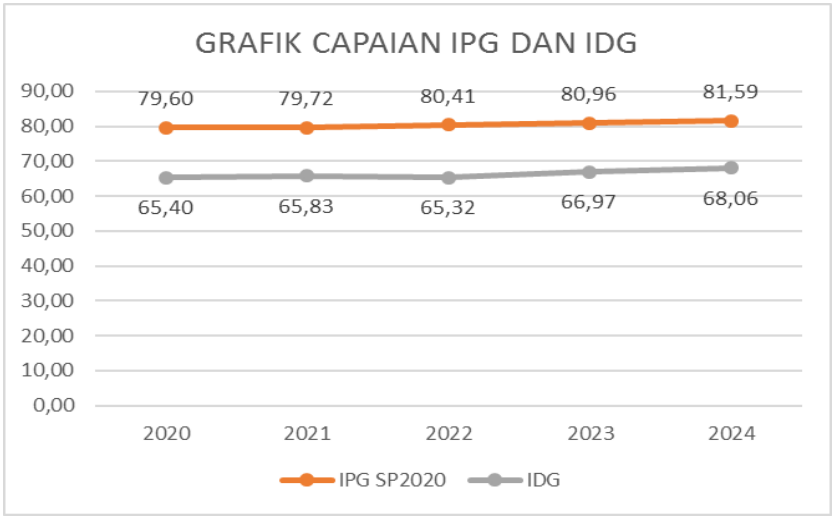

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025, diolah

Selama periode lima tahun terakhir, capaian IPG Kabupaten Bandung Barat mengalami tren yang positif. Pada tahun 2024 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar

81,59 poin, angka ini meningkat sebesar 1,99 poin dari tahun 2020 dengan capaian 79,60 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pembangunan gender di Kab. Bandung Barat.

2.1.2.8 Seni Budaya dan Olahraga

Tolok ukur kinerja pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah keberhasilan pelestarian seni budaya dan peningkatan prestasi olahraga. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan dalam rangka pemajuan dan pelestarian nilai dan objek budaya lokal.

Upaya dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap objek pemajuan kebudayaan, yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Data potensi keragaman seni dan budaya di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27. Potensi Keragaman Budaya Kabupaten Bandung Barat 2020 - 2024

No	Seni Budaya	Jumlah Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Seni Karawitan	50	50	48	200	475	Degung, Karawitan, Aneka Seni Sunda, Domyak, Karinding
2	Seni Teater	3	3	3	10	15	Lawak, Drama
3	Seni Pedalangan	6	6	8	15	20	Wayang Golek, Wayang Piling
4	Seni Lukis	0	0	1	15	22	-
5	Seni Pertunjukan	56	56	121	500	700	Calung, Qosidah, Singa Depok, Tagonian, Terbangan, Calung, Kacapi, Kuda Lumping, Orkes Melayu, Reog, Kaulinan Barudak
6	Seni Tari	88	88	120	230	340	Jaipong, Pencak Silat
7	Kontemporer	8	8	1	1	1	Elektone, Organ Tunggal, Campur Sari
8	Seni Rupa	0	0	1	1	1	Wayang
9	Seni Sastra	1	1	0	0	0	-
10	Adat Budaya	40	55	55	40	45	Ritual, Upacara tradisional/adat, Cerita Rakyat, Permainan Rakyat
Jumlah		**252**	**267**	**358**	**1012**	**1619**	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025.

Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat tiap tahunnya melalui inventarisasi, pengamanan,

pemeliharaan pada tahun 2020 terdapat 252 keragaman budaya yang dilestarikan meningkat s.d tahun 2024 menjadi 1.619 keragaman budaya.

Ruang lingkup olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, bahwa parameter keberhasilan pembangunan olahraga bukan hanya dilihat dari segi prestasi yang diraih oleh suatu negara atau daerah, akan tetapi parameter keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat dari segi pencapaian 4 aspek pembangunan keolahragaan atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). IPO merupakan indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga didasari oleh empat dimensi dasar yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam keolahragaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan berolahraga secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh derajat kebugaran jasmani pada masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 0,41 dan tahun 2022 sebesar 0,42 meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 0,45 tetapi capaian masih pada kategori rendah.

Tabel 2.28. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 - 2024

Jenis Indeks	2021	2022	2023	2024
Indeks ruang terbuka	0,59	0,58	0,66	0,67
Indeks SDM keolahragaan	0,33	0,33	0,29	0,31
Indeks partisipasi masyarakat	0,3	0,34	0,37	0,38
IPO	**0,41**	**0,42**	**0,44**	**0,45**

Sumber: Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.

Prestasi olahraga di Kabupaten Bandung Barat didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga, pelaku olahraga yang terlibat dan klub/perkumpulan olahraga sebagai wadah untuk berlatihnya atlet dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga. Untuk lebih jelasnya, capaian indikator penyelenggaraan urusan olahraga di Kabupaten Bandung Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.29. Indikator Kinerja Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Klub/	411	428	431	442	435	Olahraga Prestasi, Olahraga Pelajar, Olahraga

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Perkumpulan olahraga						Rekreasi, Olahraga Disabilitas
Jumlah Atlet	1.984	2.475	2.542	2.744	2.015	
Jumlah Pelatih	545	572	616	703	640	
Jumlah Atlet Berprestasi	0	38	471	791	123	PORDA 2018, PON 2021, SEAGAMES 2019, POPWILDA 2019, KEJURNAS 2019, Porprov 2022, Peparda 2022, PON 2024
Jumlah Sarana dan Prasaran olahraga	2.562	2.667	2.712	2.924	2.957	Tersebar di 16 Kecamatan dengan status Milik Pribadi, Milik Desa, Milik Swasta, Milik Pemda, Milik Yayasan, Milik Sekolah Swasta, Milik Sekolah Negeri & Milik BUMN
Jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP)	79	88	92	92	93	91 Organisasi Pemuda bernaung di KNPI, 1 FOBB (Forum Osis Bandung Barat), 1 KEMBARA (Keluarga Mahasiswa Bandung Barat)
Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	5,84	9,2	7,83	10,24	10,34	Layanan Kepemudaan mencakup Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan
Presentase pemuda yg aktif pada organisasi kepramukaan	1,1	1,5	1,5	3,21	5,77	Pramuka Peserta Didik sebanyak 24.449 anggota dan Pramuka Dewasa Sebanyak 2.233 anggota

Sumber Data : Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Potensi pelaku olahraga Atlet dan Pelatih dari olahraga di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan dari sisi kuantitas selama kurun waktu 5 tahun dengan jumlah atlet di tahun 2020 sebanyak 1.984 orang atlet meningkat sebesar 38,85 persen menjadi 2.744 atlet di tahun 2023 dengan melibatkan 703 pelatih sampai dengan tahun 2023.

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat baik berupa gedung dan lapang olahraga sebagai pusat aktivitas atlet dan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas olahraga pada tahun 2023 terdapat 2.956 lokasi sarana dan prasarana olahraga, artinya proporsi ketersediaan sarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat per 1.000 penduduk dari total penduduk tahun 2023 sebanyak 1.911.6616 jiwa adalah sebesar 0,16 persen atau setiap 1 lokasi prasarana olahraga digunakan oleh 629 orang.

Bila dilihat dari prestasi olahraga, keikutsertaan atlet-atlet Kab. Bandung Barat pada event POPDA XIII Bogor tahun 2018 dengan raihan 40 emas, 52 perak dan 111 perunggu berada pada peringkat 6 se Jawa Barat dan event PEPARDA V Bogor tahun 2018 dengan raihan prestasi 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2019, 7 atlet Kab. Bandung Barat memperoleh raihan medali 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu.

Pada tahun 2021 melalui event PON XX Papua Kab. Bandung Barat mengirimkan 48 atlet untuk mewakili Kontingen Jawa Barat dengan raihan prestasi medali 18 emas, 12 perak dan 7 perunggu, berkontribusi untuk mengantarkan kontingen Jawa Barat menjadi juara umum PON XX Papua. Terakhir pada tahun 2022, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tuan

rumah Porprov XIV Jabar tahun 2022 dengan raihan prestasi memperoleh 49 emas, 72 perak dan 104 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat dan event PEPARDA VI Bekasi tahun 2022 dengan raihan prestasi 18 emas, 25 perak dan 32 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat, baik pada urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar), urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang.

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Aspek pelayanan umum focus urusan wajib pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, dan sosial:

2.1.3.1.1 Pendidikan

Aspek penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota, diantaranya: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

Analisis kinerja atas layanan urusan pendidikan dilakukan terhadap indikator: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah. Perkembangan capaian indikator aspek pelayanan umum bidang pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR PENDIDIKAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Jumlah SD/MI Thd penduduk usia SD/MI	1 : 204,94	1 : 204,14	1 : 217,52	1 : 286,98	1 : 296,48
Rasio Jml SMP/MTs Thd Penduduk Usia SMP/MTs	1 : 274,75	1 : 269	1 : 291,43	1 : 441,71	1 : 456,28
Rasio Guru SD/MI Thd Murid	1 : 19,61	1 : 18,86	1 : 22,13	1:25,68	1:22,1

Rasio Guru SMP/MTs Thd Penduduk Usia SMP/MTs		1 : 13,60	1 : 17,24	1:21,17	1 : 19,16
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.19	8.20	8.22	8.23	8,24
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	102,77	102,99	104,84	101.78	103,79
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	100,07	91,38	93,97	96.32	97,79
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,93	97,69	97.91	97.87	91,35
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	80,44	76.56	75.87	88.60	81,2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	93,39	99,66	99,09	99.32	99,41
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS	91,1	94,29	94,75	96.85	96,91
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,14	0,0004	0,0012	0,1200	0,1140
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTS	0,16	0,0035	0,057	0,085	0,069
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,64	99,00	99,50	99,51	99,68
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS	99,50	98,95	99,43	99,26	99,54
Angka Melanjutkan (AM) ke SMP/Mts	96,16	95,20	89,26	91,74	92,94
Angka Melanjutkan (AM) ke SMA/MA	78,71	83,77	116,966	89,84	91,34

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat 2024

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Angka Partisipasi Murni atau APM merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, APM digunakan mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 91,35 persen, artinya 91,35 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat.

Angka Partisipasi Sekolah atau APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100% dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100%, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah, APS SD di Kabupaten Bandung Barat lebih besar dibanding dengan APS SMP.

Angka Kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah, angka kelulusan murid SD di Kabupaten Bandung Barat sebesar 99,41 persen ini lebih besar bila dibanding dengan angka kelulusan murid SMP sebesar 96,91.

Indikator lain yang juga relevan menggambarkan kondisi pelayanan bidang pendidikan adalah rasio guru dan murid. Perbandingan jumlah murid dan guru sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat berada pada kisaran 21-25 murid/guru. Ruang Kelas sekolah sebagai infrastruktur penunjang pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan peningkatan baik dilihat dari jumlah ruang kelas maupun kondisi ruang kelas dengan kondisi baik. Ruang Kelas SD dengan kondisi baik di tahun 2022 sebanyak 3.341 ruang kelas dari total 4.891 ruang kelas, dan ruang kelas SMP dengan kondisi baik di tahun 2022 sebanyak 1.278 ruang kelas dari toal 1.342 ruang kelas SMP, untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31. Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Tahun	Kondisi Ruang Kelas				Jumlah Ruang Kelas SDN
	Baik	Ringan	Sedang	Berat	
2020	1.634	2.715	-	555	4.904
2021	1.470	3.733	0	0	5.203
2022	1.694	1.889	1.217	369	5.169
2023	1.629	1.847	1.290	522	5.288
2024	1.656	1.793	1.397	541	5.387

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.32. Kondisi Ruang Kelas SMP di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Kondisi Ruang Kelas				Jumlah Ruang Kelas SMPN
	Baik	Ringan	Sedang	Berat	
2020	874	680	-	72	1.626
2021	800	1.320	-	0	2.120
2022	652	713	541	89	1.995
2023	723	647	708	92	2.170
2024	803	584	92	54	2.187

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Bandung Barat 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang menggambarkan kualitas manusianya. Pemerintah kabupaten Bandung Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan.

Keberhasilan program- program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indicator Umur Harapan Hidup, Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan serta rasio ketersedian sarana dan prasaran kesehatan. Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan.

Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat tergantung terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status orang tua si bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB, hal ini relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Tabel 2.33. Data Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Angka Kematian Bayi	129/3084= 14,18/1000 KH	106/26454 = 4,0/1000 KH	51/31160= 1,6/1000 KH	6/29620= 0,2/1000 KH	182 / 29351 = 62 / 1000 KH
2	Angka Kematian Ibu	38/32383 = 117/1000 KH	47/29895= 157/1000 KH	21/32718= 64/10000 KH	18/29620= 60/10000 KH	33 / 29336 = 11 / 1000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bandung Barat semakin menurun dari tahun 2020 sebesar 14,18 / 1.000 KH, menjadi 62/1.000 KH di tahun 2024, hal ini menunjukan semakin baiknya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui pelaksanaan fasilitasi layanan dan advokasi kesehatan ibu hamil, pelayanan persalinan oleh

tenaga kesehatanan dan layanan dan penanganan komplikasi neonatal dini dan layananan neonatal Esensial.

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U), dengan kondisi status gizi balita di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34. Kondisi Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U Tahun 2020 – 2024

No	Status Gizi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Gizi Sangat	1,34%	0,99%	0,89%	0,73%	0,80%
2.	Gizi Kurang	6,27%	5,54%	6,29%	5,74%	6,06%
3.	Gizi Baik	87,10%	88,44	88,52%	89,82%	89,70%
4.	Gizi Lebih	5,28%	5,03%	4,30%	3,70%	3,44%

Sumber Data : Hasil BPB Dinas Kesehatan, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Kondisi status gizi balita sangat kurang (Gizi Buruk) di Kabupaten Bandung Barat cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 1,34 persen dan pada tahun 2024 menjadi 0,80 persen atau <1%. Kondisi gizi balita erat kaitannya dengan stunting yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting, sebagaimana diamantkan pada Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kondisi capaian percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung Barat walaupun terus mengalami penurunan tetapi masih relative tinggi s.d dengan tahun 2024 Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah sebesar 30,08% dengan rincian capaian prevelansi stunting dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35. Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Imunisasi	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status	30,20	29,60	27,30	25,10	30,08

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Salah satu faktor rendahnya pencapaian angka harapan hidup adalah tingkat kematian bayi, dan salah satu tingginya angka kematian bayi adalah penolong saat persalinan. Pada golongan pengeluaran atas, semua ibu telah melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga keshatan. Golongan pengeluaran menengah, ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 85,30%. Hal yang masih mengkhawatirkan adalah golongan pengeluaran bawah ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan adalah sebanyak 83,54% dan yang ditolong tenaga kesehatan sebanyak 91,82%.

Tabel 2.36. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas	Penolong Persalinan
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	83,54	91,82
40 Persen Tengah	85,30	93,81
20 Persen Teratas	96,20	96,20
Pendidikan Tertinggi		
SD ke bawah	78,56	87,57
SMP ke atas	89,58	95,74
Kabupaten Bandung	**85,84**	**92,97**

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, diolah

Sejak diluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai Januari 2014, keikutsertaan masyarakat cukup banyak dan tentu memiliki kegunaan yang sangat berarti, terutama untuk golongan menengah bawah. Pada kelompok pengeluaran terbawah 21,71% telah menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, sementara untuk golongan menengah sebanyak 27,95%. Pada golongan pengeluaran atas penggunaannya 30,80% dan selebihnya menggunakan dana mandiri. Dalam memenuhi jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan bantuan keuangan berupa pemberian bantuan iuran kepada peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum tercakup oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional serta menganggarkan jaminan Kesehatan masyarakat melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda dan JKN serta Jampersal melalui APBD Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.37. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat 2020 - 2024

Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerima Bantuan Iuran (PBI)	48.847	54.018	56.502	52.438	871.761
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	675.249	558.139	713.690	735.278	
Jumlah	**725.845**	**613.017**	**770.192**	**787.716**	**871.761**

Sumber: Dinas Kesehatan KBB, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketersediaan sarana kesehatan di setiap desa seperti adanya Puskesmas, Posyandu dan Klinik dan fasilitas layanan kesehatan lainnya, yang dapat membantu akses pelayanan masyarakat dengan jarak tempuh yang relatif lebih dekat. Gambaran kondisi layanan bidang kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari jumlah fasillitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia. Fasilitas kesehatan tersebut mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Posyandu. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar pada tahun 2020 sebesar 75 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 79 persen, pada tahun 2022 menjadi 78,89 persen dn tahun 2024 sebesar 88,86 persen. Jumlah fasillitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Fasilitas Kesehatan dan Tenaga	Jumlah /				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	8	9	9	9	9
Puskesmas	32	32	32	32	32
Pustu	38	38	45	45	49
Poliklinik	67	75	71	71	95
Posyandu	1.780	1.780	2.330	2.340	2.343
Dokter	146	286	266	192	193
Tenaga Medis	1.325	2.194	2.228	1.457	1.710

Sumber: Dinas Kesehatan KBB, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Secara keseluruhan capaian indikator urusan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 - 2024, dengan tingkat capaian berfluktuasi adanya peningkatan dan penurunan baik berdasarkan cakupan layanan kesehatan maupun berdasarkan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.39. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Indikat	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi	4,18/ 1.000	4,0/ 1.000	1,6/ 1.000	0,2/ 1.000	62/
Angka Kematian Ibu	117/ 1.000	157/ 1.000	64/ 1.000	60/ 1.000	11/ 1000
Status Gizi Sangat Kurang	1,34	0,99	0,89	0,73	0,80
Cakupan imunisasi	86,40	82,80	84	83,32	82,4
Cakupan pelayanan kesehatan	95	99	99	99	99

Indikat	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan anak balita yang mendapat pelayanan	56	65	67	66,6	74
Cakupan melahirkan di fasilitas kesehatan	87,6%	88,48	89,59	89,61	90,01
Cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan	91,33	90,08	99,55	99,55	99,60
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat	725.845	613.017	770.192	787.716	879.914
Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar	97	99,56	88,86	90	90
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005
Rasio puskesmas, poliklinik,	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Rasio posyandu per satuan	12,07	11,7	11,77	11,77	11,77
Cakupan Puskesmas	2	2	2	2	2
Cakupan Puskesmas Pembantu	23,03	23,03	23,21	23,21	23,21
Rasio dokter per satuan	0,08	0,16	0,14	0,14	0,14
Rasio tenaga medis	0,74	1,21	1,2	1,22	1,24
Presentase Desa Siaga Aktif	44	51	56	55	57,50

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan KBB, 2025 diolah, yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SK Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.302-DPUPR/2023 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 648,06 Km sebanyak 152 ruas jalan, terdapat peningkatan panjang jalan Kabupaten sepanjang 122,49 Km dan peningkatan 44 ruas jalan.

Adapun kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung Barat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dengan proporsi panjang jalan kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 65,19 persen menjadi 70,91 persen di tahun 2022 dan kondisi jalan baik dengan mengacu pada SK jalan yang baru dengan penambahan sebanak 44 ruas jalan, kondisi jalan baik baru mencapai 46,23 persen.

Tabel 2.40. Panjang dan Ruas Jalan di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang	Panjang Jalan
1	Jl. Selacau – Cililin	Cililin	8.100
2	Jl. Cililin – Sindangkerta	Cililin,	10.500
3	Jl. Sindangkerta – Celak	Sindangkerta	9.800
4	Jl. Celak - Gununghalu	Gununghalu	8.700

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang	Panjang Jalan
5	Jl. Gununghalu - Bunijaya	Gununghalu	5.200
6	Jl. Bunijaya-Cilangari	Gununghalu	9.800
7	Jl. Cilangari-Cisokan	Gununghalu	5.100
8	Jl. Rancapanggung-Cijenuk	Cililin	9.400
9	Jl. Cijenuk-Sarinagen	Cipongkor	3.800
10	Jl. Sarinagen-Baranangsiang	Cipongkor	6.300
11	Jl. Baranangsiang-Saguling	Cipongkor	1.000
12	Jl. Cangkorah-Bts.Leuwigajah	Batujajar	1.050
13	Jl. Sesko AU - Lembang	Lembang	0.850
14	Jl. Kayu Ambon - Jl. Kiwi Lembang	Lembang	1.750
15	Jl. Rahayu - Lembang	Lembang	0.300
16	Jl. Pegadaian - Lembang	Lembang	0.250
17	Jl. Sukajadi - Lembang	Lembang	0.250
18	Jl. Murhadi - Lembang	Lembang	0.350
19	Jl. Citalaksana - Lembang	Lembang	0.150
20	Jl. Sendik BRI - Lembang	Lembang	0.250
21	Jl. Panorama Puskesmas - Lembang	Lembang	0.250
22	Jl. Sukajaya - Lembang	Lembang	0.170
23	Jl. Gunungsari - Lembang	Lembang	0.350
24	Jl. Bhayangkara - Lembang	Lembang	0.550
25	Jl. Mutiara Utama (Lembang)	Lembang	0.300
26	Jl. Bunijaya-Rongga (Ds. Bojong)	Rongga	1.100
27	Jl. Rongga - Cipari	Rongga	17.500
28	Jl. Purabaya - Rancabali	Padalarang	1.260
29	Jl. Purabaya - Jati (Batujajar)	Padalarang	13.100
30	Jl. Batujajar (Jati) - Saguling	Saguling	3.670
31	Jl. Purabaya - Gantungan	Padalarang	2.250
32	Jl. Cipeundeuy-Cipicung	Cipeundeuy	4.950
33	Jl. Ciawitali-Salakuning	Cikalongweta	7.500
34	Jl. Sp.Tagog Apu-Salakuning	Padalarang	7.100
35	Jl. Salakuning-Ps.Calung (Ds.Cipada)	Cikalongweta	7.400
36	Jl. Cisomang-Cipada	Cikalongweta	6.500
37	Cisarua - Ps. Calung (Ds. Cipada)	Cisarua	7.500
38	Jl. Kb.Kalapa-Ps.Calung	Ngamprah	9.100
39	Jl. H.Gofur-Pakuhaji	Ngamprah	6.600
40	Jl. Cihanjuang-Parongpong	Parongpong	7.300
41	Jl. Cihanjuang-Batas Gegerkalong	Parongpong	2.750
42	Jl. Bts. Cimahi Pasantren-Sariwangi	Parongpong	1.400
43	Jl. Cikole-Cikarumbi	Lembang	2.700
44	Jl. Sersan Bajuri	Parongpong	5.700
45	Jl. Maribaya-Patrol	Lembang	7.600
46	Jl. Gununghalu-Datarpuspa	Gununghalu	13.400
47	Jl. Rancapanggung -	Cililin	4.500
48	Jl. Cipatik-Nyalindung	Cihampelas	8.900
49	Jl. Tj. Wangi - Kidangpananjung - Muka Payung	Cihampelas	9.700
50	Jl. Cihampelas-Tanjung Jaya	Cihampelas	9.200
51	Jl. Cipatik - Leuwi Sapi	Cihampelas	2.500
52	Jl. Batujajar-Pangauban-Girimukti	Batujajar	7.300
53	Jl. Batujajar-SMP Batujajar	Batujajar	1.300

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang	Panjang Jalan
54	Jl. Cangkorah-Giri Asih	Batujajar	3.000
55	Jl. Pasirucing - Margaluyu	Cipeundeuy	7.900
56	Jl. Kertamukti - Sarimukti	Cipatat	6.700
57	Jl. Citatah-Nyalindung	Cipatat	9.100
58	Jl. Nanggeleng - Sirnaraja	Cipeundeuy	13.500
59	Jl. Cipeundeuy-Ciroyom	Cipeundeuy	5.800
60	Jl. Sukahaji - Margalaksana	Cipeundeuy	6.000
61	Jl. Mekarsari-Cilame	Ngamprah	2.050
62	Jl. Cimanggu (Cimeta) - Pasirlangu	Ngamprah	5.150
63	Jl. Bunisari-Cikandang	Ngamprah	2.230
64	Jl. Jambudipa - Citeureup	Cisarua	5.350
65	Jl. Cihideung-Ciwaruga	Parongpong	7.900
66	Jl. Lembang-Genteng	Lembang	1.500
67	Jl. Maribaya-Puncak Eurad	Lembang	6.100
68	Jl. Pasirbuluh-TPA	Lembang	0.300
69	Jl. Cikaramat-Lembang	Lembang	3.400
70	Jl. Kehutanan - Lembang	Lembang	0.300
71	Jl. SMP - Lembang	Lembang	0.300
72	Jl. Barlak - Lembang	Lembang	0.750
73	Jl. Puncrut (Bts.Kota Bandung)-Pagerwangi-	Lembang	4.530
74	Jl. Langensari-Medu-Dago	Lembang	5.200
75	Jl. Langensari-Simpangwaas-KPR ITB	Lembang	5.400
76	Jl. Cilumber - Cikole	Lembang	2.800
77	Jl. Ciririp-Bangsaya-Buninagara (Bts. Ciwidey)	Cililin	9.700
78	Jl. Cikadu - Rancasenggang	Sindangkerta	3.850
79	Jl. Rancasenggang - Wangunsari	Sindangkerta	7.100
80	Jl. Sindangkerta - Weninggalih	Sindangkerta	14.000
81	Jl. Cijenuk-Pasirpogor/Puncaksari	Cipongkor	5.400
82	Jl. Celak - Sodong	Gununghalu	6.100
83	Jl. Cisarongge - Sodong	Cipongkor	4.900
84	Jl. Gununghalu - Tamanjaya	Gununghalu	7.900
85	Jl. Rongga-Cicadas	Rongga	7.400
86	Jl. Rongga-Bojongsalam (Bts. Cianjur)	Rongga	9.000
87	Jl. Psr.Badak-Cimarel (Bts. Cianjur)	Rongga	3.500
88	Jl. Selacau - Lagadar	Batujajar	2.400
89	Jl. Cililin - Sukatani	Cililin	1.600
90	Jl. Sumur Bandung (Cililin)	Cililin	0.400
91	Jl. Terminal Cililin	Cililin	0.220
92	Jl. Citunjung-Haurngambang	Batujajar	1.850
93	Jl. Sindangkerta (Sindangkerta)	Sindangkerta	0.900
94	Jl. Citapen-Ciraden	Cihampelas	3.000
95	Jl. Cihampelas-Sayuran	Cihampelas	2.100
96	Jl. Cipatik-Citapen	Cihampelas	1.850
97	Jl. Rancasenggang - Babakan (Rawabogo)	Sindangkerta	5.000
98	Jl. Rajamandala-Cipanas	Cipatat	5.400
99	Jl. Cipeundeuy - Cimerang-Cikandang	Padalarang	4.850
100	Jl. Kadudamping-Padayungan-Cikadongdong-	Cikalongweta	9.750
101	Jl. Cipeundeuy-Cisauheun-Sirnagalih	Cipeundeuy	4.550
102	Jl. Kanangasari-Mandalamukti	Cikalongweta	4.100

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang	Panjang Jalan
103	Jl. Ciharashas-Cisauheun	Cipeundeuy	1.250
104	Jl. Boscha Wangunsari	Lembang	5.800
105	Jl. Mamaadiwarta - Lembang	Lembang	0.400
106	Jl. Sukamantri - Lembang	Lembang	0.270
107	Jl. Warungawi-Pasir haur (Bojongkoneng)	Ngamprah	6.300
108	Jl. Samsat - Sumur Bor - Cijamil	Ngamprah	4.940
109	Jl. Cisauheun-Cisalak		1.950
110	Jl. Sirnagalih (Kp. Baru) - Ciroyom		2.250
111	Jl. H. Gofur - Bts Cimahi (Somawinata)		2.200
112	Jl. H. Gofur - Bts Cimahi (Dirawinata)		1.300
113	Jl. Sadangmekar - Cipada		3.300
114	Jl. Margaluyu - Sarimukti		4.044
115	Jl. Rancapanggung - Cikadu		2.700
116	Jl. Rancapanggung - Ugrem		2.020
117	Jl. Taman Jaya - Cibenda		7.500
118	Jl. H. Gofur - Cibatu		1.100
119	Jl. Sukamaju - Cibatu		0.400
120	Jl. Datar Puspa Mekarwangi – Bts Kab. Bandung		5.400
121	Jl. Nanggerang - Karyamukti		7.840
122	Jl. Cikamirung-Parigi-Maroko		3.500
123	Jl. Padaasih – Bts Cimahi		1.300
124	Jl. Buniwangi – SMP2 - Langensari		0.500
125	Jl. Cikidang-Langensari		3.000
126	Jl. Cicadas – Curug Malela		2.200
127	Jl. Cikakak - Leuwinutug		1.400
128	Jl. Batujajar – taman Makam Pahlawan		0.700
129	Jl. Ciburuy – Cikamuning (Cikamuning-		2.700
130	Jl. SPN - Kertawangi		1.400
131	Jl. Cimanggu - Pasirlangu		10.200
132	Jl. Ngamprah - Cijamil		3.000
133	Jl. Cidadap Manah – Kepuh – Sudimampir		2.200
134	Jl. Baruajak - Boscha		0.750
135	Jl. Tipar		1.900
136	Jl. Gedong Lima		0.800
137	Jl. Taman Jaya – Karangsari - Sarinagen		5.900
138	Jl. Sodong – Girimukti - Cijenuk		6.950
139	Jl. Wangunjaya – Parakankadu (Bts		0.800
140	Jl. Cijamil - Cibuntu		3.517
141	Jl. Jampudipa – Mekarwangi (Bts Cimahi)		2.000
142	Jl. Cililin - Budiharja		3.500
143	Jl. Sindangkerta - Pasirlame		1.737
144	Jl. Kubang Pintu		1.493
145	Jl. Cibedug - Sukamanah - Bojong		3.452
146	Jl. Malaka - Cijenuk		1.547
147	Jl. Cikalong- Rende - Ciharashas		7.500
148	Jl. Jatimekar - Sirnaraja		5.139
149	Jl. Tugu Nanas - Cipada		3.800
150	Jl. Cipeuleum - Ciminyak		0.331
151	Jl. Pasircalung - Gemblok		2.500

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang	Panjang Jalan
152	Jl. Kotabaru Parahyangan Segmen 1		5.000
	TOTAL PANJANG JALAN		**648.060**

Sumber: Dinas PUPR, 2025.

Capaian Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020-2024 diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41. Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Panjang jalan kabupaten	525,57	525,57	525,57	648,06	648,06
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	318,617	332,375	372,682	299,594	347,33
Presentase jalan kabupaten dlm kondisi	60,62	63,24	70,91	71,69	75,90
Rasio panjang jalan dengan jml penduduk	0,00029	0,00029	0,00028	0,00035	0,00033
Jumlah jaringan Irigasi	435	435	435	449	453
Potensi area sawah yang terairi	36.232	36.232	36.312	33.456	33.456
Presentase irigasi Kab. kondisi baik	69,82	69,26	69,48	65	69,26
Rasio jaringan irigasi	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	65,5	66,9	65,5	68,5	83,42
Persentase cakupan pelayanan air limbah domestik	30	61,5	61,18	61,48	66,32
Presentase bangunan publik yang	50	99,48	50	-	100
Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	60,62%	63,24%	70,91%	80%	75,90%
Persentase sambungan rumah tangga yang terlayani akses air minum	N/A	N/A	82,92%	83,16%	83,42%
persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik	N/A	N/A	65,20%	65,91%	66.32%
Persentase capaian pengelolaan sumber daya air secara optimal	N/A	N/A	60%	60%	61,67%
Persentase kenaikan panjang drainase yang terbangun	N/A	N/A	64,80%	65,23%	66,89%
Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	N/A	N/A	100%	100%	100%
Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar	N/A	N/A	98,06%	0	100%
Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	N/A	N/A	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PUTR, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat tidak serta merta menambah kondisi panjang jalan, sehingga rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk semakin menurun. Sedangkan kondisi kemantapan jalan dengan kondisi baik terus diupayakan oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 sebesar 60,62 persen jalan

dengan konsisi baik, sampai dengan tahun 2024 kondisi jalan baik meningkat kembali menjadi 75,90 persen. Sama halnya dengan infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 69,82 persen di tahun 2020 menjadi 69,26 persen di tahun 2024, dengan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 sebanyak 435 Daerah Irigasi dan bertambah menjadi 453 Daerah Irigasi di Tahun 2024 dengan cakupan potensi area sawah yang terairi adalah 33.456 ha.

Infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum merupakan salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang terus dibangun. Cakupan pelayanan air minum terus meningkat, dimana terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar 65,5 persen, meningkat menjadi 83,42 persen di tahun 2024.

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Bandung Barat dapat diukur berdasarkan indikator: penataan wilayah kawasan kumuh, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat.

Luas kawasan kumuh di Kabupaten Bandung Barat tersebar di 6 (lokasi) seluas 228,82 ha dengan realisasi penanganan kawasan kumuh s.d tahun 2024 seluas 104,93 ha atau sebesar 45,86% yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2024 dengan sisa kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 123,89 ha, dengan lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 2.42. Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh di Kab. Bandung Barat 2020-2024

Lokasi	Luas (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani
Kampung Bosscha Desa Lembang, Kampung Citespong, Babakan, Pamecelen, Sukadami, Cipariuk dan Barunagara Desa Sukajaya, Kampung Bewak-Sukapinggir, Genteng I dan II Desa Jayagiri.	48,05			1,97		10,36
Kampung Cibaligo I dan II Desa Cihanjuang, Kampung Nyingkir dan Kancah Desa Cihideung, Kampung babakan, Sukamulus dan Cipanjak Desa Cigugurgirang, Kampung Panyairan-karyawangi Desa Karyawangi	48,92					20,79
Bunisari, Babakan Cianjur, Lebakgede - Cihampelas, Curug agung cihaliwung, Cikawati, Kebon kalapa-Cijerah	54,10			6,11		14,41
Kutaluhur-pamucatan, Kepuh, Cidadap, Andir, Cipanawar, Cileunca, Cileunca Hilir, Cipeundeuy, Pasir Gembong (Ciluncat)	39,82			25,86		
Kaum, Sukamaju-Cikadu-Warung Awi, Warung awi, Cikadu I, Cikadu II, Babakan Cianjur	15,73			8,37		4,98
Babakan Cianjur	22,20					12,08
Jumlah	**228,82**			**42,31**		**62,62**

Sumber: Satu Data Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2025

Kebutuhan akan tempat tinggal terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, dengan kondisi eksisting tahun 2024 sebanyak 381,565 unit rumah diperkirakan pada tahun 2025 ketika jumlah penduduk mencapai 2.020.293 jiwa, kebutuhan rumah tinggal mencapai 404.509 unit atau terdapat kekurangan sebanyak 22.944 unit tempat tinggal.Perlu adanya respon akan peningkatan kebutuhan tempat tinggal dengan pelaksanaan program yang memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan perumahan.

Pemenuhan kebutuhan rumah juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kekurangan perumahan (backlog) dan pertumbuhan kawasan kumuh serta harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dasar yang sehat dan produktif dari aspek kebutuhan air bersih, sanitasi, sistem drainase dan pengelolaan persampahan.Pemenuhan kebutuhan rumah/tempat tinggal bagi keluarga tidak mampu, Pemkab Bandung Barat melalui program rehab rumah dan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) s.d dengan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 6.848 dan sisa s.d tahun 2024 masih terdapat 14.518 nit Rumah Tidak Layah Huni yang belum tertangani.

Tabel 2.43. Realisasi Rehab/Perbaikan Rutilahu Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Kondisi Awal Tahun 2019	Realisasi Pemberian Bantuan / Rehab Rutilahu					Jumlah s.d Tahun 2024	Sisa s.d Tahun 2024
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Rongga	912	110	209	44	37	32	432	480
2	Gununghalu	899	30	158	18	151	353	710	189
3	Sindangkerta	1.087	100	153	253	305	573	1.084	3
4	Cililin	1.036	70	237	102	136	89	634	402
5	Cihampelas	1.714	30	30	60	95	35	250	1.464
6	Cipongkor	539	30	61	124	252	109	530	9
7	Batujajar	2.385	30	103	73	68	13	287	2.098
8	Saguling	1.734	10	90	32	5	46	183	1.551
9	Cipatat	662	20	91	103	102	66	382	280
10	Padalarang	699	40	98	176	119	125	558	141
11	Ngamprah	1.512	37	173	50	47	84	391	1.121
12	Parongpong	1.663	30	81	9	56	72	248	1.415
13	Lembang	937	34	132	84	81	45	376	561
14	Cisarua	3.011	110	110	51	10	1	282	2.729
15	Cikalongwetan	1.224	30	0	63	81	56	230	994
16	Cipeundeuy	1.352	30	20	143	46	32	271	1.081
JUMLAH		**21.366**	**741**	**1.746**	**1.385**	**1.591**	**1.731**	**6.848**	**14.518**

Sumber: Satu Data Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Selain itu, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren positif dengan cakupan 89 presen rumah tangga di kabupaten Bandung Barat telah menggunakan sumber air bersih untuk mencukupi kebutuhannya. Pengguna Air Bersih dan Air minum Layak di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 tersebar di seluruh kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44. Tabel Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum

No	Kecamatan	Air dalam kemasan	Pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Tidak bersi	Jumlah
1	Rongga	342	1.254	4.218	3.876	8.550	18.240
2	Gununghalu	1.040	780	8.320	2.470	10.790	23.400
3	Sindangkerta	535	1.712	3.852	1.819	11.235	19.153
4	CIlilin	4.796	5.559	7.412	3.270	2.943	23.980
5	Cihampelas	8.700	8.265	13.920	435	580	31.900
6	Cipongkor	1.036	5.476	16.724	1.480	4.884	29.600
7	Batujajar	16.080	4.920	3.600	135	465	25.200
8	Saguling	6.656	960	1.728	192	64	9.600
9	Cipatat	19.872	2.940	9.555	5.733	120	38.220
10	Padalarang	25.604	8.477	10.726	6.055	1.038	51.900
11	Ngamprah	27.664	9.646	4.186	8.008	3.276	52.780
12	Parongpong	6.840	8.664	3.496	12.160	2.128	33.288
13	Lembang	19.729	724	12.308	26.245	543	59.549
14	Cisarua	2.415	231	115	18.170	919	21.850
15	Cikalongwetan	4.455	945	12.015	15.120	2.565	35.100
16	CIpeundeuy	125	2.000	16.875	3.000	3000	25.000

No	Kecamatan	Air dalam kemasan	Pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Tidak bersi	Jumlah
Kab. Bandung		145.889	62.55	129.050	108.168	53.10	498.76

Sumber Data : Dokumen Analisis Data Makro Sosial, Bappelitbangda 2024, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Berikut realisasi capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2024:

Tabel 2.45. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha	ha	8	0	42,31	0	62,62
Persentase perumahan formal yang melakukan proses serah terima PSU kepada Pemerintah daerah	%	0	1	12	38,89	38.89
Persentase Penyediaan hunian layak bagi masyarakat	%	39,55	71,62	0	0	100
Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	3,47	11,64	18,12	25,57	33,67

Sumber: Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.1.5 Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Selama kurun waktu tahun 2020 -2024 di Kabupaten Bandung Barat telah terjadi beberapa jenis gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Perda K3 dalam rangka perlindungan masyarakat berupa: penegakan tipiring terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan, penertiban PKL, penertiban warung remang- remang/PSK, penertiban IMB, penertiban gepeng/anak jalanan dan penertiban reklame tidak berijin. Pemetaan daerah rawan Trantibum di Kab. Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46. Daerah Rawan Trantibum di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Bentuk Potensi Ancaman Trantibum
1	Rongga	Spanduk/Reklame
2	Gununghalu	Spanduk/Reklame
3	Sindangkerta	Spanduk/Reklame
		Penertiban PKL
4	Cililin	Spanduk/Reklame
5	Cihampelas	Penertiban PKL
		Spanduk/Reklame
6	Cipongkor	Spanduk/Reklame
7	Batujajar	Spanduk/Reklame
		Penunggakan Pajak
8	Saguling	Spanduk/Reklame
		Penertiban PKL
		Bangunan tanpa IMB
		Peredaran Minol
9	Cipatat	Spanduk/Reklame
10	Padalarang	Spanduk/Reklame
		Penertiban PKL
		Bangunan tanpa IMB
		Penunggakan Pajak
11	Ngamprah	Pelanggaran Pengelolaan Sampah
		Penunggakan Pajak
		Spanduk/Reklame
12	Parongpong	Penunggakan Pajak
		Spanduk/Reklame
13	Lembang	Bangunan tanpa IMB
		Penertiban PKL
		Penunggakan Pajak
		Pelanggaran Pengelolaan Sampah
		Spanduk/Reklame
14	Cisarua	Spanduk/Reklame
		Penunggakan Pajak
15	Cikalongwetan	Penunggakan Pajak
		Spanduk/Reklame
16	Cipeundeuy	Pelanggaran Pengelolaan Sampah
		Spanduk/Reklame

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Dalam melaksanakan perlindungan kepada masyarakat terkait penanganan bencana, di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2024 tercatat sebanyak 425 kasus kejadian bencana, kejadian tanah longsor dan pergerakan tanah dengan intensitas terbanyak yaitu 203 kasus dan kejadian bencana tahun 2024 tersebut mengakibatkan 14 orang korban jiwa, 1 orang korban luka dan mengakibatkan sekitar 1.187 kerusakan bangunan.

Tabel 2.47. Kejadian Bencana di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Bencana						Akibat Bencana		
		Longsor	Kebakaran	Angin Puting Beliung	Banjir Bandang	Pergerakan Tanah	Gempa Bumi	Korban jiwa	Korban Luka	Kerusakan Bangunan
1	Rongga	11	4	2	1	2		1		150
2	Gunung Halu	33	1	7	3	4	2			77
3	Sindangkerta	21	3	9	1	5	1			241
4	Cipongkor	14	4	3			1	10		168
5	Cililin	9		4			2			9
6	Cihampelas	1	2	7						14
7	Saguling	3	1	8		2				59
8	Batujajar	3		6		1				10
9	Ngamprah	9	2	10						19
10	Padalarang	9	4	16		1	1	1		86
11	Cipatat	19	3	18	5	1				80
12	Cipendeuy	2	5	19						86
13	Cikalong Wetan	25	2	31	1	4	2			138
14	Cisarua	8	4	13			3	1	1	24
15	Parongpong	7	2	2	1					12
16	Lembang	9	1	3	2			1		14
Jumlah		**183**	**38**	**158**	**14**	**20**	**12**	**14**	**1**	**1187**

Sumber: BPBD KBB, 2025. yang dikelola dalam SIPD

Dalam hal perlindungan terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Permen PU RI Nomor 20/ PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di WMK. dari target < 30 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/satwankar.

Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat dari tahun 2020 sebesar 475 persen menjadi 79,55 persen di tahun 2024 waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran semakin baik untuk meminimalisir korban jiwa maupun korban materi. Berikut capaian indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tabel 2.48. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	58,47	97,91	100	100	100
Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan	%	73	77	77	79,69	79,55
Meningkatnya Nilai Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan	%	100	100	100	100	100
Presentase peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan	%	31,2	38,67	53,22	78,95	38,67

Sumber: Dinas BPBD dan Satpol PP, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Bandung Barat yaitu penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis.

Pada tahun 2020 persentase angka PPKS yang tertangani sebesar 51,93 persen, s.d tahun 2024 telah mencapai sebesesar 100 persen. Untuk mengatasi masalah PPKS tersebut, di Kabupaten Bandung Barat dengan memberdayakan organisasi/lembaga sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 495 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 92 Lembaga, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Penyuluh Sosial, juga terdapat 54 sarana rehabilitasi sosial yaitu Panti Sosial Asuhan Anak sebesar 42 unit, Panti Jompo sebanyak 9 unit dan Panti Sosial Penyandang cacat sebanyak 3 unit.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan melalui bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Untuk melihat jumlah dan peran aktif pemerintah dalam upaya penanganan PPKS disajikan pada di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49. Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

No	Kecataman	JUMLAH PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)							
		Anak Terlantar	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Lansia Terlantar	Penyandang Disabilitas	Pengemis	Gelandangan /pemulung	Korban Penyalahgunaan Napza	Korban Bencana Alam dan
1	Rongga	8	24	83	151				1
2	Gunung Halu	21	185	93	138		3		2
3	Sindangkerta	28	70	98	121			1	31
4	Cililin	12	23	194	62		2		7
5	Cihampelas	17	12	125	103		2	3	2
6	Cipongkor	54	4	120	80			1	
7	Batujajar	6	87	143	73		9	5	4
8	Saguling	4	1	25	85			4	4
9	Cipatat	35	43	181	116			1	2
10	Padalarang	50	46	154	67	1			
11	Ngamprah	23	61	148	78	1		12	1
12	Parongpong	1	20	58	133			1	
13	Lembang	31	20	78	135		2	46	
14	Cisarua	7	54	96	108				6
15	CikalongWetan	39	42	104	88		2	9	
16	Cipeundeuy	11	-	77	75				
JUMLAH		**347**	**692**	**1.777**	**1.613**	**2**	**20**	**83**	**60**

Sumber: Satu Data Dinas Sosial, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Adapun rekapitulasi capaian indikator penyelenggaraan urusan sosial Kabupaten Bandung Barat, tersaji pada tabel berikut dimana capaian 2020 dan 2021 yang tidak ada realisasinya (N/A) mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD dan presentase tertanganinya warga negara migran sudah tidak lagi menjadi kewenangan Dinsos tetapi pada Disnaker.

Tabel 2.50. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan	%	51,93	71	72	72	100
Persentase PPKS yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	%	N/A	38	16,2	5	10
Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan	%	N/A	36	37	100	100
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban	%	100	0	100	100	100
Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	N/A	100	100	100	100
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban	%	N/A	N/A	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, diolah Bappelitbangda, 2024.

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Aspek pelayanan umum fokus urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, yaitu:

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan seperti Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran merupakan data dan informasi mengenai ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pembangunan dan pemecahan masalah urusan tenaga kerja. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat semakin menurun dari 2020 sebesar 12,25% menjadi 6,7% pada tahun 2024.

Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2024, terjadi peningkatan TPAK sebesar 8,03 persen di tahun 2024 menjadi 67,82 dibanding tahun 2020 dengan capaian 59,91. Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan menunjukan adanya kenaikan yang didukung oleh adanya pelaksanaan Job Fair, pada tahun 2021 indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 60% menjadi 100% di tahun 2024. Berikut capaian indikator penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.51. Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Jumlah Angkatan Kerja	oran	748 ribu	766 ribu	819 ribu	947 ribu	978 ribu
Tingkat Partisipasi Angkatan	%	59,91	60,75	64,37	67,01	67,82
Tingkat Pengangguran	%	12,25	11,65	9,63	8,11	6,7
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	20	42,86	60	31,48	28,78
Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	N/A	60	68	84,18	100
Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program- program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan serta bisa juga diukur melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Secara empiris, terjadi disparitas antara angkata kerja laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki selalu selalu lebih besar dari TPAK perempuan. Kondisi ini dinilai wajar karena norma-norma yang berlaku di masyarakat mengarahkan laki- laki untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga.

Pada tahun 2024, TPAK laki-laki sebesar 87,83 persen lebih tinggi dari pada TPAK perempuan sebesar 46,00 persen. Hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung Barat jauh lebih aktif secara ekonomi dibandingkan yang perempuan. Pada tahun 2024 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 68,06 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2020 yang masih berada pada angka 64,31 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam lima tahun terakhir sebesar 3,75 poin.

Selama periode lima tahun terakhir, capaian IPG Kabupaten Bandung Barat mengalami tren yang positif. Pada tahun 2024 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 81,02 poin, angka ini meningkat sebesar 1,30 poin dari tahun 2020 dengan capaian 79,39 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pembangunan gender di Kabupaten Bandung Barat. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Berikut capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.52. Capaian IDG dan IPG di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Uraia	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	79,39	79,44	79,82	80,37	81,02
Indeks Pemberdayaan Gender	64,31	65,11	65,83	66,97	68,06

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui indikator penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan capaian realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.53. Data Kejadian Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan KDRT di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Penyelesaian
Kekerasan Terhadap Anak	21	16	30	36	41	100%
Kekerasan terhadap Perempuan	1	5	10	17	9	100%
Kekerasan dalam rumah tangga	0	3	3	13	22	100%

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Dalam rangka kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga, dari tahun ke tahun kasusnya cenderung meningkat dari tahun 2020 s.d tahun 2024, walaupun kasus kejadian dapat diselesaikan semua atau 100%. Kedepannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Untuk lebih jelasnya capaian indikator penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disajikan pada tabel berikut, dengan catatan capaian 2020 dan 2024 yang tidak tersisi merupakan indikator lama sebelum dilakukan Perubahan pada RPJMD.

Tabel 2.54. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Non Kategori	Non Kategori	Non Kategori
Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi	%	82	82,5	84	85	87,50
Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan	%	N/A	39	39	42	40,51
Persentase Data dan profil gender dan anak Hasil analisis	%	N/A	85	87	87	0
Persentase penanganan korban kekerasan terhadap	%	100	100	100	100	100
Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam	%	N/A	67	100	100	100
Persentase penanganan korban kekerasan terhadap	%	100	100	100	100	100

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi- umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang- kacangan, gula, sayur dan buah. Skor PPH Kab. Bandung Barat Barat pada tahun 2022 adalah 76,8 poin dan menurun di tahun 2024 menjadi 87,68 Kelompok padi-padian terutama beras (25,0) dan sayuran serta buah (28,4) masih mendominasi konsumsi masyarakat Kab. Bandung Barat. Capain pola pangan harapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55. Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2020 - 2024

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2020	Skor PPH Tahun 2021	Skor PPH Tahun 2022	Skor PPH Tahun	Skor PPH Tahun
1	Padi-padian	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	1,4	1,8	1,7	1,9	1,23
3	Pangan Hewani	19,7	21,8	20,3	24	20,67
4	Minyak dan Lemak	5	5	5	5	5
5	Buah/biji	0,1	0,1	0,1	0,1	0,07
6	Kacang-kacangan	6,8	5,3	4,8	7,2	7,06
7	Gula	1,1	1,2	1,1	1,3	0,87
8	Sayuran dan buah	20,2	18,7	18,8	28,4	27,79
9	Lain-lain	-	-	-	-	-
Jumlah		**79,3**	**79,1**	**76,8**	**92,9**	**87,68**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Dengan telah ditetapkkanya Perda pada tahun 2023 tentang cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, realisasi capaian indikator cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 sebesar 10 ton dan Cadangan Pangan Masyarakat Kab. Bandung Barat sebesar 22 Ton. Dalam rangka penanganan daerah rawan pangan, berdasarkan Analisis FSVA di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 dan tahun 2022 masih terdapat 1 desa yang teridentifikasi daerah sangat rawan pangan sampai dengan tahun 2024 sudah tidak terdapat desa yang mengalami daerah sangat rawan pangan, tetapi masih terdapat 20 desa yang rentan rawan pangan.

Tabel 2.56. Desa Dan Penduduk Sangat Rawan Pangan, Rawan Pangan dan Tahan Pangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Desa dan Penduduk Sangat Rawan Pangan						
1	Jumlah Desa	0	1	1	0	0
2	Persentase Penduduk Sangat Rawan	0	0,60	0,60	0	0
Desa & Penduduk Rentan Rawan Pangan						
1	Jumlah Desa	37	84	45	43	20
2	Persentase Penduduk Rawan	22,4	50,3	27,28	24,60	12,12
Desa dan Penduduk Tahan Pangan						
1	Jumlah Desa	128	81	120	122	145
2	Persentase Penduduk Tahan	77,60	49,09	72,72	76,25	87,88

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Capaian indikator penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun
Jumlah sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	sertifikat	48	5	4	13	5
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	0	0	10	10	33,12
Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan	Laporan	N/A	12	12	12	12
Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Point	83,03	66,78	83,14	77,3	80,29
Penurunan Jumlah desa rawan pangan	Desa	2	0	0	0	0
Score Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	poin	-	-	76,8	92,9	87,677
Persentase Desa Tahan Pangan	%	77,60	49,09	72,72	73,9	87,88

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, dalam perubahan RPJMD mengalami penyesuaian indikator dan target, dengan capaian indikator pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.58. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun
Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	dokumen	N/A	100	0	100	100
Terkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah dan	Kegiatan	N/A	100	0	100	100
Jumlah rekomendasi pengelolaan izin lokasi	rekomen	N/A	0	0	100	100
Tersedia data subjek, objek redistribusi tanah untuk aset	dokumen	N/A	0	0	100	100
Penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	20	66,6	33,33	100	100
Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan	%	0	0	33,33	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Persentase penyelesaian sengketa/konflik tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2024 sebanyak 6 lokasi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dan Kp. Cikamuning Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang dengan capaian penyelesaian sengketa sebesar 100%.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan dokumen RPPLH bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Berikut capaian indikator urusan lingkungan hidup tahun 2020 – 2024:

Tabel 2.59. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun
Indeks Kualitas lingkungan Hidup	Indeks	47,07	50,27	63,03	55,79	58,43
Tonase sampah terangkut ke TPA	Ton/ Tahun	58.891	62.386	55.667	50.514	50.678
Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik	%	-	34,57	28,98	26,51	25,45
Persentase titik sampling air yang status mutunya baik	%	40	0	6	0	0
Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen pendukung	%	-	60	80	100	42,86
Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3 sesuai	Industri	-	30	31,78	34,44	40
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada	Entitas	-	20	15	30	35
RTH taman yang terawat	Lokasi	23	0	26	31	
Presentase RTH Taman yang	%	-	-	72,20	86,10	100
Presentase Desa yang telah menerapkan aksi peduli	%	100	100	100	100	100
Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Indikator Indikator urusan lingkungan hidup terkait kualitas lingkungan hidup sampai dengan tahun 2024 capaian IKLH sebesar 58,43 poin berada pada katagori sedang dengan target tahun 2024 sebesar 66,55 point hal ini ini menunjukan walaupun mangalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 55,79 poin tetapi bila dilihat dari target yang ditentukan belum mencapai target.

Dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat kapasitas sampah yang terangkut ke TPA selam 5 tahun terakhir capaiannya menurun pada tahun 2020 sebanyak 58.891 ton/tahun turun menjadi 50.678 ton/tahun di tahun 2024, hal tersebut untuk menjadi perhatian Pemkab Bandung Barat (DLH) dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah di tahun 2025, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula timbulan sampah yang dihasilkan dimana s.d tahun 2024 dari timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 5.461,45 m3/hari baru dapat terkelola dengan kapasitas daya angkut sampah ke TPA sebanyak 467,01 m3/hari sehingga masih terdapat timbulan sampah yang belum terkelola. Berikut realisasi capaian pengelolaan sampah di Kab. Bandung Barat:

Tabel 2.60. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

No	Area Pelayanan	Jumlah Lokasi	Volume Sampah yang dihasilkan		Kapasitas Total Daya Angkut Pelayanan Persampahan	
			Kap.Harian M3/Hari	Kapasitas Ton/Tahun	Kapasitas Harian M3/Hari	Kapasitas Ton/Tahun
1	Permukiman	250	5.461,42	275.091,74	467,01	50.677,82
2	Pasar	11				
3	Jalan					
4	Daerah Komersil (Hotel, Restoran dll)	19				
5	Institusi (Kantor Pemerintah/	10				
6	Industri	18				
7	Lainnya	9				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula timbulan sampah yang dihasilkan. Timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran buruk terhadap wajah suatu kawasan, selain itu juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Permasalahan sampah seharusnya dapat dikelola dengan baik dengan melibatkan lintas sektor, dari hulu sampai hilir, dari masyarakat hingga ke pemerintah yang bertanggung jawab.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib yang sangat terkait langsung dengan pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintahan. Kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil sangat penting terutama pada kalangan tertentu yang mewajibkan dokumen-dokumen tersebut sebagai syarat program. Capaian realisasi administrasi kependudukan cenderun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 persentase penduduk memiliki KTP elektronik sebesar 99 persen meningkat menjadi 99,7 persen di tahun 2024. Begitu juga dengan indikator lain presentase penduduk ber-akta kelahiran, persentase anak yang memiliki KIA. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, anak yang telah mempunyai KIA. Peningkatan indikator kependudukian yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte kematian menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan.

Tabel 2.61. Capaian Indikator Kinerja Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun
Persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	57	40	84	99,7	99,8
Persentase Penduduk Memiliki	%	99	98	98	98,7	99,7
Persentase Anak Ber KIA	%	18,1	30	24	25,8	27
persentase penduduk ber Akta	%	32,5	32	39	39,9	89
persentase penerbitan Akta	%	46	30	100	100	50
Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-	%	N/A	96	89	90,29	91,12
Persentase Lembaga yang Memanfaatkan	%	26,66	36	57	57	38
Profil Kependudukan yang	Dok.	N/A	0	1	1	1
Persentase Indentitas Kependudukan Digital	%	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	10,31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pedesaan, di Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 165 desa, 2.416 RW dan 9.009 RT yang tersebar di 16 kecamatan, berikut capaian indikator urusan pemebrdayaan masyarakat desa thun 2020-2024:

Tabel 2.62. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020– 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun
Persentase Desa Mandiri	%	-	24	37,58	47,88	60,6
Persentase Lembaga	%	60,4	82,34	91,82	100	100
Persentase Desa Maju	%	-	74	62,42	52,12	39,4
Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	Desa	-	0	21	20	100
Presentase Desa yang Terfasilitasi Penataan	%	N/A	N/A	0	100	100
Persentase Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	%	N/A	N/A	105	100	100
Percentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	%	N/A	N/A	100	100	100
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	60,4	82,34	91,82	100	79,17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan desa dengan status desa mandiri di Kab. Bandung Barat pada tahun 2021 terdapat 24 Desa Mandiri atau 15 persen dan meningkat di tahun 2024 menjadi 60,6 persen atau sebanyak 79 Desa, kriteris desa lainnya sampai dengan tahun 2024 terdapat 3 desa dengan status desa berkembang dan 65 desa dengan status desa maju. Hal yang tak boleh dilupakan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah pergerakan ekonomi desa, melalui lembaga ekonomi pedesaan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pasar desa dan usaha ekonomi desa yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebanyak 165 unit BUMDes, 66 pasar desa dan 468 unit usaha ekonomi desa.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 sebesar 1,32% dengan kepadatan penduduk sebesar 1.445 jiwa per Km^2. Komposisi penduduk Kab. Bandung Barat memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun terakhir, hal ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran.

Data hasil long form sensus penduduk Kab. Bandung Barat yang dilaksanakan oleh BPS, Fertilitas Kabupaten Bandung Barat menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,31 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2,24 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi. Pada tahun 2022, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, tercatat TFR sebesar 2,24. Berdasarkan hasil Long Form SP2020 tercatat Angka Kematian Kasar yang terhitung adalah sebesar 4,82. Artinya, terdapat 4 sampai dengan 5 kematian untuk tiap 1.000 penduduk di Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan selama periode satu dekade bonus demografi yang dialami Indonesia, Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung menurun dari 27 per 1000 kelahiran hidup pada

Sensus Penduduk 2010 menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita Bandung Barat membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.

Tabel 2.63. Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Bandung Barat Hasil Long Form SP Tahun 2020

No	Indikator		Satuan
Aspek Kelahiran (Fertalitas)			
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,24
Aspek Kematian (Mortalitas)			
1	Infant Mortality Rate (IMR)	Angka	14,13

Sumber : Hasil Long Form SP 2020, BPS

Secara umum, berikut capaian indikator penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2020 – 2024 :

Tabel 2.64. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun
Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan	%	0	5,11	6,78	8,46	7,57
Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa / Kelurahan	%	70	70	75	80	100
Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100
Persentase KB Aktif	%	79,86	73,85	72,71	76,29	80,1
Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	%	0	22,08	21,48	20,28	24,48
TFR (Total Fertility Rate)	Angk	2,24	-	-	2,12	2,15

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Kabupaten Bandung Barat berada pada posisi yang sangat stretegis, sehingga memerlukan pengeloaan pada urusan perhubungan yang baik. Untuk mendukung aksebilitas barang dan orang di dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana trasnsportasi yang menjadi urusan perhubungan diantaranya sarana angkutan darat, ASDP, terminal, dermaga. Secara umum indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi darat	Penumpang	598.435	746.618	577.299	463.774	404.830
Jumlah Pelayanan angkutan darat yang beroperasi wilayah KBB	trayek	9	12	19	19	17
Jumlah angkutan sungai danau dan penyeberangan yang terkelola	unit	196	165	154	165	187
Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi ASDP	Penumpang	6.858	90.819	13.460	82.723	76.248
Indeks Aksebilitas / Transportasi	Poin	13,31	13,27	13,05	16,94	13,52
Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	%	-	41,9	48,84	67,44	71,43
Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	%	-	70,9	81,48	86,00	68,49

Sumber: Dinas Perhubungan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

Indikator jumlah penumpang yang menggunakan tansportasi darat dan transportasi ASDP terjadi penurunan yang signifikan semenjak adanya pembatasan pergerakan orang pada pada tahun 2020 dan akibat adanya aplikasi kendaraan umum onlide. Terkait indikator sarana transportasi darat berupa jumlah trayek dan kendaraan angkutan umum serta jumlah ASDP menunjukan indikator yang semakin menurun. Layanan angkutan darat yang beroperasi pada tahun 2020 sebanyak 9 trayek s.d tahun 2024 bertambah lagi menjadi 17 trayek. Begitupun dengan jumlah ASDP yang terkelola tahun 2020 sebanyak 196 unit dan terus turun menjadi hanya 187 unit di tahun 2024..

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari presentase aplikasi TIK pemerintahan yang termanfaatkan dan persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta penerapan SPBE.

Tabel 2.66. Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satua	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks SPBE	point	2,71	2,85	2,65	3,32	3,78
Persentase Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan Yang Termanfaatkan	%	40	99,22	94,56	64,51	100

Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	%	39,27	100	97,62	73,18	100

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien menunjukkan peningkatan dimana tahun 2020 dengan capaian indeks SPBE sebesar 2,71 poin terus meningkat s.d tahun 2024 menjadi 3,78 poin Media informasi dan komuniaksi public berupa: website milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat maupun melalui pemanfaatkan media sosial diantaranya facebook, twitter, instagram dan youtube berperan dalam meningkatkan layanan informasi dan komunikasi public di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 39,27% menjadi 100% di tahun 2024 yang didukung oleh digitalisasi diberbagai sector serta dukungan aplikasi teknologi informasi pemerintahan dengan capaian sebesar 100%.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi menjadi ujung tombak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pada tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Bandung sebanyak 692 unit dimana 60,1 persennya merupakan koperasi aktif dan meningkat di tahun 2024 menjadi 779 unit dengan jumlah koperasi aktif sebesar 66,90 persen. Berdasarkan kondisi tingkat kesehatan koperasi terjadi peningkatan koperasi sehat sebesar 4,55 persen di tahun 2024 bila dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 20 persen.

Tabel 2.67. Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi	692	722	758	779	799
Koperasi Aktif	426	464	500	521	521
Koperasi Sehat	140	210	232	8	73

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode Tahun 2020-2024, adalah sebagau berikut:

Tabel 2.68. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	21	21	21	4	8
Jumlah kegiatan pemberdayaan dan	Keg	3	5	5	4	20,73
Presentase Usaha Mikro yang dikembangkan	%	-	213	716	838	27,40
Pertumbuhan pengembangan pelaku usaha mikro	Pelaku usaha	50	171	221	215	650
Pertumbuhan Koperasi	%	-	-	21,82	28,18	46,45
Persentase Koperasi aktif	%	-	-	22	44	65,21
Persentase Koperasi Sehat	%	22	22	21	31	46,45
Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan	%	0	10	7	23	0,06

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

Bila dilihat dari pertumbuhan usaha kecil dan menengah sebagai penopang perekonomian masyarakat, dari tahun 2019 s.d 2023 untuk pelaku UKM yang diberdayakan mengalami peningkatan dari 557 pelaku usaha menjadi 838 pelaku usaha tetapi pengembangan pelaku usaha UKM walaupun mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2023 tetapi pertumbuhannya kecil hanya 7,5% dalam kurun waktu lima tahun:

Tabel 2.69. Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	UMKM
1	2020	14,917
2	2021	54,586
3	2022	55,617
4	2023	58,216
5	2024	58.866

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Capaian indikator penanaman modal mengalami kenaikan yang signifikan, diantaranya jumlah investasi PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp.174 Milyar meningkat menjadi Rp.1.642 Milyar pada tahun 2024 dan Jumlah penerbitan perijinan dari tahun 2020 sebanyak 1.878 menjadi 4.027 penerbitan perijinan.

Hal ini didukung dengan semakin membaiknya waktu proses pelayanan perijinan sesuai SOP yang awalnya tahun 2020 sebesar 68 persen menjadi 78,03 persen di tahun 2024 serta presentase peningkatan promosi kerjasama investasi dengan realisasi 100%. Berikut indikator urusan Penanaman Modal:

Tabel 2.70. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Nilai Investasi PMDN	Milyar	174	192,6	704	2.730	1,642
Persentase peningkatan promosi dan kerjasama	%	14,19	33	16,67	50	100
Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	unit	-	268	622	1.520	3394
Jumlah penerbitan perijinan	%	1.878	2.344	3.248	4.027	
Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai	%	68	72,5	82,79	90,49	78,03
Realisasi Nilai Investasi	Trilyu	3,117	2,818	6,297	7,877	3,898
Presentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100
Jumlah penerbitan perijinan	%	2.308	1.878	2.344	3.248	4.027
Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai	%	88	68	72.5	82.79	90.49

Sumber: DPMPTSP diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Ruang lingkup olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, bahwa parameter keberhasilan pembangunan olahraga bukan hanya dilihat dari segi prestasi yang diraih oleh suatu negara atau daerah, akan tetapi parameter keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat dari segi pencapaian 4 aspek pembangunan keolahragaan atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), yaitu:

ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam keolahragaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan berolahraga secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh derajat kebugaran jasmani pada masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 0,41 dan tahun 2022 sebesar 0,42 meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 0,45 tetapi capaian masih pada kategori rendah.

Sedangkan peran serta pemuda dalam pembangunan diukur melalui capaian kapasitas layanan kepemudaan dengan capaian di tahun 2024 sebesar 10,34 persen dan presentase pemuda yang aktif di organisasi kepramukaan capaian 2024 sebesar 5,77 persen. Berikut indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga, tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.71. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Pembangunan	Indek	-	0,41	0,42	0,44	0,45
Jumlah ketersedian ruang terbuka dan sarana	unit	1.527	2.562	2.712	2.667	2.957
Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	org	-	33	569	160	201
Angka partisipasi masyarakat dalam	point	14,56	19,98	33	35	35
Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	%	-	9,2	7,83	10,24	10,34
Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan	%	-	1,5	2,86	3,21	5,77
Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana	poin	-	-	0,58	0,66	0,67
Indeks SDM Keolahragaan	poin	-	-	0,33	0,29	0,31
Indeks Partisipasi Masyarakat dalam	poin	-	-	0,34	0,37	0,38

Sumber: Dispora diolah Bappelitbangda,2025.

Walaupun IPO mengalami peningkatan tetapi dari indikator angak partisipasi dan tingkat kebugaran masih pada katagori rendah, dan peran serta pemuda dalam pembangunan pelayanan kepemudaan pada sector kewirausahaan pemuda masih mendominasi tetapi pelayanan kepemimpinan pemuda dan pemuda kader masih kurang.

2.1.3.2.14 Statistik

Dalam rangka pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Bandung Barat dengan indikator, presentase penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Banung Barat yang telah dikelola dan dipublikasikan capaian tahun 2020 sebesar 74,5 persen meningkat di tahun 2022 menjadi 99,05 persen. Peningkatan capaian penyelenggaraan statistik sektoral tidak terlepas dari efektifitasnya Forum satu data Bandung Barat melalui peran Pembina data, wali data dan

produsen data dalam mengumpulkan, menyediakan dan mempublikasikan data statistik sektoral dalam rangka berbagi pakai data untuk kebutuhan perencanaan dan evalausi pembangunan serta dengan ditetapkannya Perbup Nomor 19 tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bandung Barat.

Publikasi data melalui Portal data Kabupaten Bandung Barat yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, dengan tautan: https://opendata.bandungbaratkab.go.id sampai dengan tahun 2023, statistik data pada portal data telah tersedia sebanyak 2.275 Dataset dan 35 Organisasi.

Tabel 2.72. Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kabupaten	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Presentase Penyelenggaraan	Persen	74,5	99,22	99,05	98,84	100
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen	Poin	N/A	N/A	1	2	3

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2.15 Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Bandung Barat dititikberatkan pada pengamanan informasi Pemerintah Daerah dengan indikator persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 97,22 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 82,00 persen.

Dilihat dari pencapaiannnya dan begitu pentingnya pengamanan aplikasi terutama kemanan data probadi dan pengamanan informasi dari berita hoax, perlu didukung dengan adanya kerjasama antara Pemkab Bandung Barat dan BSSN tentang penyelenggaraan kemanan informasi, serta Pelatihan/Pendidikan bagi aparatur dalam pengelolaan sertifikat elektronik dan keamanan informasi terutama terkait literasi digital.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Pemetaan potensi budaya di Kabupaten Bandung Barat tertuang pada Data Potensi Adat Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat No. 188.45/Kep.196-Disparbud/2019 Perihal Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pada dokumen tersebut tercatat ada 40 jenis adat budaya baik berupa budaya tradisi/ritual, cerita rakyat, upacara tradisional, permainan rakyat dan jenis lainnya. Capaian pelestarian nilai

budaya local Kabupaten Bandung Barat dari 40 jenis adat budaya sampai dengan tahun 2024 baru terealisasi 55 jenis.

Dalam rangka pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya dari total potensi di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 173 objek, capaiannya semakin meningkat tahun 2019 sebanyak 10 objek telah dilestarikan dan tahun 2024 meningkat menjadi 30 objek benda, situs dan kawasan cagar budaya telah dilestarikan.

Tabel 2.73. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	Objek	4	8	20	30	30
Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan	Budaya	1	2	1	1	1
Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan Dalam Mendukung Pariwisata	%	-	-	6	29,26	38,51
Persentase objek pemajuan kebudayaan yang	%	-	-	32	33,52	25
Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	%	-	-	0	0	8,58
Persentase pembinaan sumber daya manusia /lembaga dan	%	-	-	25	0	51
Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	-	60	15	55

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, dilaksanakan melalui pelayanan perpustakaan, penyediaan buku perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan keliling maupun dalam bentuk taman bacaan masyarakat.

Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan selama periode Tahun 2020-2024 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif, Koleksi buku perpustakaan daerah semakin banyak pada tahun 2020 tersedia 62.206 buku dengan 14.826 judul menurun di tahun 2024 menjadi 48.343 buku dengan 11.976 judul buku. Sedangkan nilai kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan dengan capaian berpredikat "B". Indikator capaian penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74. Indikator Penyelenggaraan Perpustakaa di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah	62.206 Explr	65.826 Explr	70.980 Explr	72.793 Explr	48.343 Eksemplar
	14.826 Judul	15.188 Judul	17.877 Judul	18.510 Judul	11.976 Judul
Jumlah koleksi E-Book	-	1.869 Explr	5.139 Explr	5.145 Explr	5.145 Eksemplar
	-	1.014 Judul	2.107 Judul	2.080 Judul	2.080 Judul
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Daerah, Sekolah, Desa, PT dan Perpus Khusus	7.809 orang	5.331 orang	10.936 org	68.528 org	319.356 Orang
Jumlah Perpustakaan Desa	70	71	71	66	61
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat	12	12	12	50	56
Jumlah Kendaraan Perpustakaan Keliling	5	5	5	5	6
Layanan Kunjungan Perpustakaan Keliling	15 titik	-	18 titik	34 titik	43
Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	N/A	Predikat B	Predikat B	Predikat B	Predikat B
Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	-	47,18	47,80	64,74

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Capaian kinerja pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 30 persen menjadi 66 persen di tahun 2023, tetapi masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pengelola arsip di Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelamatan arsip, capaian mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 20 persen menjadi sebesar 66 persen ditahun 2024.

Tabel 2.75. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Indikator	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun
Jumlah arsip yang sudah dilakukan	20	30	31	46	66
Persentase Arsip PD yang sudah di Kelola	19	20	25	34	39
Indeks Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	71,17
Nilai pengawasan kearsipan eksternal	N/A	N/A	N/A	N/A	74,65
Nilai pengawasan kearsipan internal	N/A	N/A	N/A	N/A	65,96

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

Aspek pelayanan umum focus urusan pilihan pada than 2020-2024 terdiri dari 6 (enam) urusan, yaitu:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Produksi komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Bandung Barat mengalami progres peningkatan berkisar antara 42 ribu – 47 ribu ton/tahun, dengan rincian berikut:

Tabel 2.76. Data Produksi Ikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Produksi Ikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Ikan (Ton)	42.327	44.161	46.760	49.123	51.586

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Adapun jenis produk komoditas unggulan Kabupaten Bandung Barat diantaranya: Ikan Mas, Nila, Patin, Lele dan Gurame dengan komoditas terbesar adalah jenis komoditas ikan patin dan ikan mas, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77. Produksi Komoditas Perikanan Unggulan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Komoditas Ikan	Produksi Ikan Tahun	Produksi Ikan Tahun	Produksi Ikan Tahun	Produksi Ikan Tahun	Produksi Ikan Tahun
1	Ikan Mas	15.763,99	14.097,74	14,063.87	15.531,21	20.042,41
2	Ikan Nila	18.450,00	21.627,23	21,054.44	23.715,90	23.180,72
3	Ikan Patin	5.849,56	6.077,52	6,204.65	6.444,31	4.059,93
4	Ikan Lele	1.917,19	1.981,37	-	2.772,30	3.771,22
5	Gurame	345,98	377,57	41:36:00	659,03	531,43
Jumlah		**42.326,72**	**44.161,43**	**41.364,32**	**49.122,75**	**51.585,70**

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

Adapun capaian indikator urusan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase Penyebaran Benih	Persen	-	11	15,1	12,9	13,1
Jumlah RTP	RTP	2.689	4.872	5.030	3.019	3.459
Jumlah Kelompok Pelaku Usaha pengolahan hasil perikanan	Kelompok	80	80	83	86	86
Peningkatan Jumlah Unit usaha budidaya dan pembenihan perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB	Unit	15	20	20	20	32
Persentase pengolahan ikan yang menerapkan SSOP	%	-	-	35	38,46	42,31

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Berdasarkan data potensi pariwisata, sampai dengan tahun 2024 terdapat 158 objek wisata di Kab. Bandung Barat dimana 2 diantaranya dikelola oleh Pemda yaitu: Situ Ciburuy, Gua Pawon dan Curug Malela dan sisinya 160 objek wisata dikelola oleh swasta. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab. Bandung Barat pada tahun 2024 dengan realisasi sebanyak 3.434.829 orang mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan dibanding tahun 2022 sebanyak 5.045.679 orang. Sektor pariwisata sebagai penyumbang PAD, dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor pariwisata perlu peningkatan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat melalui promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif pendukung pariwisata serta peningkatan fasilitas pendukung pariwisata, dengan capaian indikator kepariwisataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.088.811	4.497.692	5.045.679	4.829.886	3.434.829
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemda	Objek	3	3	2	2	2
Jumlah Obyek Wisata yang dikelola pihak swasta	Objek	143	155	155	156	157
Hotel/Penginapan/Vila	Unit	89	90	95	95	96
Jumlah Tamu yang Menginap	Orang	134.350	147.785	607.390	401.353	579.179
Restoran, Rumah Makan, Café	Unit	135	141	142	143	146
Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Ekraf)	Jumlah	350	1.494	615	1,427	1,735
Jumlah pelaku usaha industri kreatif, penggerak pariwisata dan budaya yg meningkat kompetensi	Pelaku Usaha	70	75	105	225	170
Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	%	23	35,29	55,56	53,33	60,44
Presentase kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang efektif	%	100	100	77	42,85	100
Persentase Desitinasi Wisata yang dikembangkan	%	-	-	42	16,67	25
Persentase Jumlah kunjungan Wisatawan	%	-	-	12	-4	-29
Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	-	-	91	86	19

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
dan yang Akan Didaftarkan HAKI						
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi sertifikasi profesi dan kompetensinya	%	-	-	3,25	3,09	7,32

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.3.3.3 Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha salah satunya adalah sektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 12,63 persen pada tahun 2024 turun dari kontribusi tahun 2023 sebesar 12,73 persen atau mengalami pelambatan sebesar -0,10 persen.

Pada sub sector pertanian tanaman pangan, Tanaman padi sebagai komoditas pangan utama bila dilihat dari produksinya mengalami kenaikan untuk padi sawah di tahun 2024 menjadi 289.395 ton dibanding tahun 2023 dengan capaian 258.451 ton, dengan lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 2.80. Realisasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Tanaman Pangan	Luas Tanam (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi Sawah	46.291	42.217	44.735	39.229	46.515
2	Padi Ladang	858	1.035	415	56	829
No	**Tanaman Pangan**	**Luas Panen (Ha)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Padi Sawah	46.247	43.199	45.807	39.754	43.765
2	Padi Ladang	1.186	1.055	416	551	428
No	**Tanaman Pangan**	**Produksi (Ton)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Padi Sawah	299.139	279.990	297.093	258.451	289.395
2	Padi Ladang	4.654	3.355	1.635	2.162	2.141

Sumber Dinas Ketahana Pangan dan Pertanian, 2024

Nilai tukar petani yang merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (lb) menunjukan tren meningkat dimana NTP tahun 2022 sebesar 109 meningkat menjadi 112,17 di tahun 2024. Capaian indikator urusan sub sektor pertanian tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.81. Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Pertanian di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun	Capaian Tahun
Pertumbuhan sektor pertanian	%	-0,62	-1,03	4,11	1,59	5,56
Jumlah Produksi Komodistas Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan	Ton	387.939	444.368	457.816	425.446	358.812
Nilai Tukar Petani	point	101,4	108,3	109	113,8	112,17
Jumlah Ahli Pertanian Berkualitas	orang	83	83	89	100	100
Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis	orang	45	25	17	45	45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD.

Sedangkan realisasi capaian sub sector peternakan, untuk produktifitas hasil peternakan seperti daging, susu dan telur, dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan di dalam daerah juga sebagian dijual ke daerah lain, dengan jumlah potensi komoditas hasil peternakan dan dengan capaian sub sector peternakan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.82. Realisasi Komoditas Peternakan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Komoditas	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Daging Sapi	5.667.360 kg/Tahun	5.488.866 kg/Tahun	5.512.777 Kg/Tahun	6.868.437 Kg/ Tahun	5.783.647 Kg/ Tahun
Daging Ayam	16.926.150 kg/Tahun	16.888.469 kg/Tahun	16.893.290 Kg/Tahun	17.570.618 Kg/Tahun	12.199.726 Kg/Tahun
Susu	95.099.514 Liter/Tahun	94.443.188 Liter/Tahun	57.992.138 Liter/Tahun	67.012.252 Liter/Tahun	56.341.479 Liter/Tahun
Telur Ayam	5.749.109 kg/Tahun	5.733.099 kg/Tahun	5.734.991 Kg/Tahun	5.738.910 Kg/Tahun	1.980.258 Kg/Tahun
Telur Bebek	2.217.302 kg/Tahun	2.216.806 kg/Tahun	2.217.070 Kg/Tahun	2.220.679 Kg/Tahun	898.529 Kg/Tahun

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.83. Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Peternakan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	N/A	4,1	-32	15	9.7
Produksi Daging	Kg	24.769	24.548	27.418	24.434	26.621
Produksi Telur	Kg	1.405	1.966	659	2.220	2.019
Produksi Susu	liter	84.210	97.088	57.992	67.012	66.561
Persentase kelahiran Ternak	Persen	74	75	94	82,68	80
Cakupan pelayanan kesehatan hewan	Persen	-	63	77,3	80	100
Prevalensi Brucellosis (%)	Persen	-	2	2,2	3	3
Persentase Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi	Persen	-	78	100	100	100
Tefasilitasinya Penerbitan izin usaha peternakan	Persen	-	100	100	100	100
Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	-	-	100	100	100
Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	-	-	100	100	100
Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	-	-	78	80	85
Persentase kelompok peternak yang naik kelas	%	-	-	10	15	16
Persentase Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	-	-	71,50	77,50	80

Sumber: Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.3.4 Perdagangan

Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2020-2024 salah satunya adalah sektor perdagangan, dengan kontribusi sebesar 12,38 pada tahun 2024 menurun dibanding kontribusi tahun 2023 sebesar 12,40 atau bila dilihat dari pertumbuhannya sector perdagangan di tahun 2024 mengalami pelambatan sebesar 0,20 persen dari total PDRB. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesaar 1,53% untuk pengembangan usaha produk ekspor unggulan dan penurunan pada indikator standarisasi perlindungan konsumen dari capaian tahun 2023 sebesar 40 persen menjadi 26,31 di tahun 2024. Tetapi sector perdagangan tetap optimis dalam meningkatkan perekonomian hal ini terlihat dari pertumbuhan pelaku usaha sector perdagangan menjadi 4.431 di tahun 2024 atau meningkat bila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 4.370.Berikut capaian indikator kinerja urusan perdagangan, tahun 2020 - 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.84. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Pertumbuhan sektor perdagangan	%	12,89	12,69	12,35	12,4	12,38
Persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen	%	19	29	40	26,31	27,10
Persentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	%	0	0	50	48,47	50
Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	%	1.960	3,880	4,268	4,370	4.431
Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	20	30	33	31,79	50,1
Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota	Keg	0	2	7	3	3
Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Keg	70	120	150	90	100
Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	%	-	-	40	26	50
Nilai ekspor barang dan jasa	Milyar	-	-	2.493,01	2.118,28	3.036,10
Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	%	-	-	10	2,4	10
Persentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	-	-	33	31,79	33

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda,2024

2.1.3.3.5 Perindustrian

Perindustrian merupakan sektor yang berperan penting bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, terlebih pada jenis agroindustri. Diketahui bahwa pertumbuhan industri (baik industri kecil, sedang dan besar), terus mengalami peningkatan. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami tren meningkat tiap tahunnya pada tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 40,33 persen terus meningkat sampai dengan tahun 2024 berkontribusi sebesar 40,85 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,52 persen.

Terdapat kondisi terjadi penurunan dalam pengembangan IKM dari realisasi tahun 2022 sebesar 405 turun menjadi 26,75% ditahun 2023, tetapi perijinan IKM dan industry yang terintegrasi ke dalam SINAS mengalami tren meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Berikut indikator urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.85. Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	-2,42	4,87	6,43	5,3	3,14
Prersentase Pengembangan IKM	%	20,67	28	40	26,75	45
Pertumbuhan industri yang berizin	%	37,87	39,73	41,41	52,20	63,36
Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SINAS	%	28,65	29,21	30,38	33,71	35,17
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	40,33	41,40	41,6	41,16	40,85

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi melalui program transmigrasi regional. Program tersebut ditunjang oleh kegiatan monitoring dan penempatan transmigrasi. Monitoring tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai daerah penempatan transmigrasi. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin berkurangya tanah yang akan dibuka untuk penempatan transmigrasi.

Tetapi pada tahun 2021 indikator urusan transmigrasi berubah menjadi presentase transmigran mandiri dengan capaian sebesar nol persen hal ini karena baru pada tahap sosialisasi kepada 54 orang calon transmigran dan s.d tahun 2024 telah terdaftar 25 orang calon transmigrasi.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

Unsur pendukung urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung capaian reformasi birokrasi dan Sekretariat DPRD, dalam rangka fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat dengan capaian indikator selalu patuh tepat waktu dengan capaian tiap tahun sebesar 100 persen. Salah satu indikator peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah bidang perekonomian pembangunan adalah melalui pengukuran level kematangan/maturitas PBJ.

Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Capaian indikator tingkat kematangan UKPBJ Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2024 berada pada Level 2 (Repeatable) UKPBJ, dengan capaian indikator terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86. Capaian Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	point	80,29	80,75	82,39	82,65	84,26
Persentase data & informasi bid. Perekonomian yang di gunakan sebagai policy brief	%	70	85	80	85	90
Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	30	90	75	100	85
Center of excelent pengadaan barang jasa	%	100	100	100	100	100%

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	90	100	100
Persentase Perda yang ditetapkan	%	60	90	85	100	85.71
Persentase Data dan Informasi Bidang Sosial yang digunakan sebagai Policy Brief	%	80	80	85	100	100
Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase Layanan Keuangan, Kesejahteraan dan Administrasi DPRD	%	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	point	-	82,35	83,25	81,98	82,91%

Sumber: Setda dan Sekretariat DPRD, diolah Bappelitbangda ,2025, yang dikelola dalam SIPD

Sedangkan bila dilihat dari capain kinerja Sekretariat DPRD bahwa Persentase Perda yang ditetapkan s.d tahun 2024 menjelang tahun terakhir masa bakti DPRD dengan capaian penetapan Perda adalah sebesar 100 persen. Indikator dalam rangka fasilitasi dukungan terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang diukur dengan Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan capaian 83,25 persen menjadi 82,91 di tahun 2024.

2.1.3.5 Unsur Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

Unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah mencakup urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan serta unsur pengawasan yang dilaksanakan oleh Bappelitnbangda, BKPSDM, BKAD, Bapenda, Inspektorat Daerah dan seluruh sekretariat di Perangkat Daerah. Ddilaksanakan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung capaian reformasi birokrasi serta dalam rangka mendukung sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.87. Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Reformasi Birokrasi	poin	57,60	57,81	60,97	72,27	80,77
Nilai SAKIP	poin	67,04 B	67,55 B	68,03 B	68,59 B	68,85 B
Nilai Komponen Sakip Perencanaan Kinerja	poin	24,45	24,58	24,75	24,80	27,70
Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja	poin	15,6	15,86	15,94	16,09	16,21
Indeks Merit	skore	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3
Opini BPK	opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	7,36	13,41	32,12	10,8	15,98
Persentase peningkatan pengelolaan aset daerah	%	80,78	77	111,16	64	87
Presentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian	%	65	79,34	61,7	78,61	80
Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	42,77	70	75	75	80
Persentase diseminasi hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100
Persentase Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti oleh PD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda, BKAD, Bappenda, BKPSDM, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB Kab. Bandung Barat pada tahun 2020 masuk pada kategori CC (CUKUP) dengan nilai 57,60. Nilai IRB Kab. Bandung Barat meningkat pada tahun 2024 menjadi katagori A dengan nilai sebesar 80,77.

Capaian indikator SAKIP Kabupaten Bandung Barat pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun masih pada katagori “B” tetapi secara nilai mutu pada Tahun 2020 sebesar 67,04 terus mengalami kenaikan s.d tahun 2024 menjadi sebesar 68,85. Dari sisi perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang menjadi kewenangan bappelitbangda capaian komponen SAKIP masih pada katagori sedang, pada tahun 2024 dan 2025 merupakan tahun

perencanaan dimana Bappelitbangda harus menyusun dokumen perencanaan secara simultan yaitu RPJPD 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2025 dan 2026.

Capaian indikator urusan keuangan terkait pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah lebih baik dengan capaian opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019 dan 2021 dengan opini WTP, sedangkan untuk tahun 2023 belum keluar hasilnya.

Capaian indikator urusan keuangan terkait pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah lebih baik dengan capaian opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah s.d tahun 2024 dengan opini WTP. Sedangkan bila dilihat dari indikator persentase peningkatan pendapatan daerah Kab. Bandung Barat meningkat menjadi 15,98 persen di tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar 10,8 persen. Indeks Sistem Merit ASN merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Capaian indeks sistem merit ASN di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2020 – 2024 telah baik dengan capaian katagori 3 dengan nilai sebesar 0,81 poin.

2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum di Kabupaten bandung Barat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan capaian secara umum kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan umum menunjukkan kinerja yang baik, yeitu terdapat beberapa indikator yang mengalami kenaikan capaian di tahun 2024, diantaranya Persentase penyelesaian jumlah potensi konflik social, Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, indeks kerukunan umat beragama, dengan rincian capaian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88. Capaian Capaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Presentase Konflik Sosial yang Ditangani	%	80,49	80,46	84,86	81,17	100
Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	*	*	83,18	106,25	100
Persentase fasilitasi Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	*	*	98,12	41,67	100
Presentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat	%	*	*	75	75	75

Dan Berpolitik Di Masyarakat						
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	*	*	50,00	75	88,89
Persentase Fasilitasi Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	*	*	47,62	88,14	100

Sumber: BadanKesbangpol, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD (*) indikator baru pada RPD

2.1.4 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN tahun 2020, bahwa Kabupaten Bandung Barat masuk pada kategori Daya Saing "Tinggi" dengan nilai indeks sebesar 2,097 dan sampai dengan tahun 2024 dengan capaian IDSD sebesar 3,72.

Gambar 2.17. Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

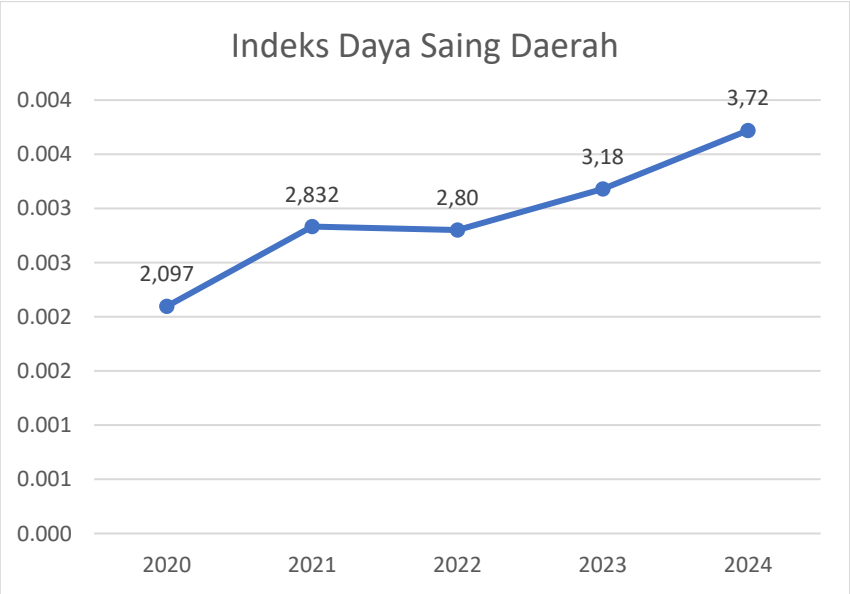

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Kondisi daya saing daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kemampuan ekonomi daerah diantaranya berdasarkan sektor lapangan usaha unggulan dan potensial, PDRB per Kapita dan pengeluaran per Kapita.

2.1.4.1.1. Lapangan Usahan Unggulan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Sementara peranan lapangan usaha- lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di bawah 5 (lima) persen, distribusi peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.89. Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,28	12,59	12,87	12,73	12,63
2	Pertambangan dan Penggalian	1,02	1,04	0,98	0,94	0,94
3	Industri Pengolahan	40,33	41,40	41,60	41,66	40,85
4	Listrik dan Gas	0,81	0,86	0,83	0,81	0,84
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05
6	Konstruksi	7,36	7,55	7,33	7,35	6,92
7	Perdagangan besar dan eceran	12,89	12,69	12,35	12,40	12,38
8	Transportasi dan pergudangan	5,24	5,15	5,49	5,99	6,20
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,17	4,96	5,26	5,38	5,23
10	Informasi dan komunikasi	2,15	2,19	2,12	2,09	2,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,9	0,93	0,93	0,91	1,00
12	Real Estate	1,84	1,93	1,92	1,93	1,98
13	Jasa Perusahaan	0,41	0,45	0,48	0,5	0,53
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 89ocial wajib	2,73	2,55	2,27	2,19	2,14
15	Jasa Pendidikan	4,18	4,07	3,93	3,95	4,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,56	0,56	0,55	0,56	0,63
17	Jasa lainnya	1,08	1,03	1,06	1,08	1,16
PDRB ADHB		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2020 – 2025, BPS 2025, yang dikelola dalam SIPD

1. Industri Pengolahan

   Industri pengolahan merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat dibanding sektor lainnya, dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 39,96 - 41,66 persen dari total PDRB.

2. Perdagangan Besar dan Eceran

   Sektor Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah Industri Pengolahan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,35 - 12,89 persen dari total PDRB. Pada saat pandemi covid-19 sektor ini sangat terpengaruh dengan adanya pembatasan aktifitas manusia atau barang sehingga kontribusinya melambat dibanding saat kondisi normal sebelum adanya covid-19 tetapi berangsur-angsur pulih kembali di tahun 2022 dan 2023.

3. Pertanian

Lingkup lapangan usaha ini meliputi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Perikanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,59 - 13,28 persen dari total PDRB. Khusus di tahun 2020 pada saat awal terjadi pandemi covid-19, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ada pergeseran dimana lapangan usaha pertanian menjadi urutan kedua melampaui pencapaian lapangan usaha perdagangan. Ini terjadi karena dampak Pandemi Covid-19, lapangan usaha pertanian walaupun sama mengalami hantaman karena covid namun tidak sebesar lapangan usaha perdagangan.

4. Konstruksi

   Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha konstruksi memberikan andil terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 6,92 - 7,55 persen dari total PDRB. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup konstruksi pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prefabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Proyek pembangunan infrastruktur strategis di Bandung Barat jangka menengah seperti Kereta Api Cepat Jakarta- Bandung serta Proyek perbaikan dan pembukaan ruas jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat memberikan kontribusi pada perekonomian di sektor ini.

5. Transportasi dan Pergudangan

   Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2018 - 2022 memberikan andil 5,15 - 6,20 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan didorong oleh perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi serta juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan impor.

6. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman

   Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman pada tahun 2019 - 2023 memberikan andil 4,96 - 5,38 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi.

2.1.4.1.2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.90. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
- ADHB	26,09	26,97	28,85	30,62	32,50
- ADHK	17,2	17,53	18,21	18,85	19,52
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	-8,38	1,93	3,85	3,56	3,57

Sumber : KBBDA, 2020-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat

2.1.4.1.3. Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020, perkembangannya seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.18. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

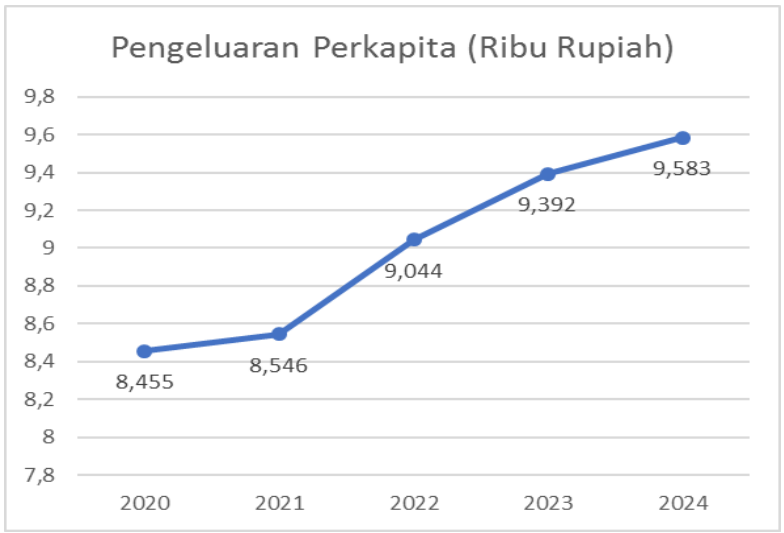

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita Kabupaten Bandung Barat menurun menjadi sebesar Rp.8.455.000,- atau mengalami kontraksi sebesar 0,28% dibandingkan tahun 2019. Hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid- 19 pada awal tahun 2020. Namun dengan mulai menurunnya kasus Covid-19 pada tahun 2021 sehingga keadaan perekonomian mulai membaik, pengeluaran per kapita Kabupaten Bandung Barat terus meningkat menjadi sebesar Rp.9.583.000,- atau naik sebesar 8,15% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2020.

Pada skala regional Jawa Barat (terlihat pada tabel 2.32), pengeluaran per kapita merupakan komponen IPM yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Semua kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2020.

Tetapi di tahun 2021 - 2024 seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai menunjukkan pemulihan, seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita dibandingkan tahun sebelumnya termasuk di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian di tahun 2022 sebesar Rp.9.044.000,- dan terus meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar Rp.9.583.000,-

Tabel 2.91. Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	10.317	10.410	10.860	11.153	11.563
2	Sukabumi	8.823	8.850	9.210	9.482	9.815
3	Cianjur	7.980	8.052	8.244	8.626	9.026
4	Bandung	10.201	10.307	10.588	11.018	11.392
5	Garut	7.876	7.961	8.227	8.685	9.168
6	Tasikmalaya	7.852	7.829	8.177	8.562	8.965
7	Ciamis	9.288	9.259	9.428	9.750	10.085
8	Kuningan	9.459	9.409	9.620	10.011	10.418
9	Cirebon	10.342	10.368	10.791	11.128	11.529
10	Majalengka	9.521	9.591	9.950	10.340	10.842
11	Sumedang	10.217	10.262	10.776	11.136	11.589
12	Indramayu	8.959	9.810	10.166	10.580	11.010
13	Subang	10.790	10.854	11.294	11.537	11.894
14	Purwakarta	11.614	11.669	12.193	12.619	13.099
15	Karawang	11.315	11.522	11.927	12.392	12.942
16	Bekasi	11.241	11.341	11.757	12.123	12.500
17	**Bandung Barat**	8.455	8.546	9.044	9.392	9.583
18	Pangandaran	9.084	9.065	9.389	9.406	9.654
19	Kota Bogor	11.564	11.716	12.058	12.656	13.154

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
20	Kota Sukabumi	10.999	10.942	11.229	11.799	12.252
21	Kota Bandung	16.887	16.996	17.639	18.236	18.795
22	Kota Cirebon	11.800	11.810	12.087	12.506	12.869
23	Kota Bekasi	15.776	15.903	16.239	16.479	16.775
24	Kota Depok	15.281	15.420	15.926	16.279	16.640
25	Kota Cimahi	12.025	12.019	12.500	12.883	13.278
26	Kota Tasikmalaya	10.263	10.213	10.578	11.063	11.431
27	Kota Banjar	10.535	10.476	10.967	11.356	11.811
	Provinsi Jawa Barat	**10.845**	**10.934**	**11.277**	**11.695**	**12.157**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.4.2 Daya Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan daya saing daerah pada bidang infrastruktur, dibutuhkan kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien melalui pemaduan jaringan pelayanan dan juga prasarana, diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi. Sarana infrastruktur aksesibilitas/transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi berperan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Data kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SK Bupati Bandung Barat Bandung Barat No: 188.45/Kep.302- DPUPR/2023 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 648,06 Km sebanyak 152 ruas jalan. Adapun kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan proporsi panjang jalan kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 65,19 persen menjadi 70,91 persen di tahun 2022 dan kondisi jalan baik dengan mengacu pada SK jalan yang baru dengan penambahan sebanak 44 ruas jalan, kondisi jalan baik baru mencapai 46,23 persen..

Tabel 2.92. Data Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Kondisi Jalan	PANJANG JALAN (Km)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	318,62	332,38	372,68	299,59	374,33
Sedang	88,70	57,34	61,74	73,08	117,54
Rusak Ringan	21,75	49,65	53,45	91,89	47,52
Rusak Berat	116,08	86,21	37,70	183,49	108,67
Total Panjang Jalan	525,57	525,57	525,57	648,06	648,06

Sumber : Dinas PUPR, Kab. Bandung Barat, 2025

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan data, panjang jalan di Kabupaten Bandung Barat sepanjang 525,57 km dengan jumlah rata-rata harian angkutan darat yang melintas berdasarkan data dari Dinas Perhubungan yaitu sebanyak 62.683 kendaraan/hari sehingga rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 119,27 artinya per 1 km jalan melayani/dilalui oleh 119 kendaraan.

Jumlah sarana angkutan umum dan angkutan barang serta layanan kendaraan umum berpenumpang di Kab. Bandung Barat sebagai sarana aksebilitas penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.93. Data Jumlah Angkutan Barang di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Jumlah Unit Angkutan Barang				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cililin	416	0	0	0	0
2	Cihampelas	444	444	4	4	6
3	Sindangkerta	46	0	0	0	0
4	Gununghalu	120	120	0	0	0
5	Rongga	70	70	32	32	32
6	Cipongkor	209	209	0	0	0
7	Batujajar	849	447	446	446	445
8	Lembang	3.184	3.184	3	3	4
9	Parongpong	1.213	1.213	112	112	116
10	Cisarua	757	757	973	975	960
11	Ngamprah	1.425	1.425	435	437	430
12	Padalarang	3.557	3.557	48	47	51
13	Cipatat	771	771	48	48	45
14	Cipeundeuy	579	577	42	41	40
15	Saguling	94	94	16	15	18
16	Cikalongwetan	605	605	92	90	95
	JUMLAH	**14.337**	**13.473**	**2.251**	**2.250**	**2.242**

Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.94. Aksebilitas Kendaraan Umum di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkutan Umum	614	965	600	459	480
Jumlah Penumpang yang melalui Terminal	746.618	777.966	577.299	463.774	404.830

Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Aksebilitas pergerakan manusia dan barang sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh ketersediaan angkutan umum dan angkatan barang, dengan kondisi layanan angkutan barang tahun 2020 sebanyak 14.337 unit terus mengalami penurunan s.d tahun 2024 menjadi 2.242 unit. Begitu pun dengan pergerakan manusia yang dilayani oleh angkutan umum pada tahun 2020 sebanyak 746.618 penumpang semakin turun di tahun 2024 menjadi 404.830 penumpang. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan jumlah armada layanan angkutan umum berkurang menjadi 480 unit di tahun 2024 dan juga hal ini pun terdampak adanya angkutan umum berbasis online.

Sedangkan untuk fasilitas infrastruktur air bersih, persentase rumah tangga yang mengonsumsi air minum bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 telah mencapai lebih dari 89,35 persen. Proporsi pemakaian air minum menurut sumbernya dalam penggunaan air bersih di Kabupaten Bandung Barat, bahwa penggunaan sumber air minum dari air ledeng/air kemasan sebesar 29,25 persen diikuti oleh sumur terlindung sebesar 25,87 persen masih mendominasi terkait pemenuhan kebutuhan sumber air minum masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah bahwa masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan sumber air minum tidak bersih sebesar 10,65 persen.

Gambar 2.19. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

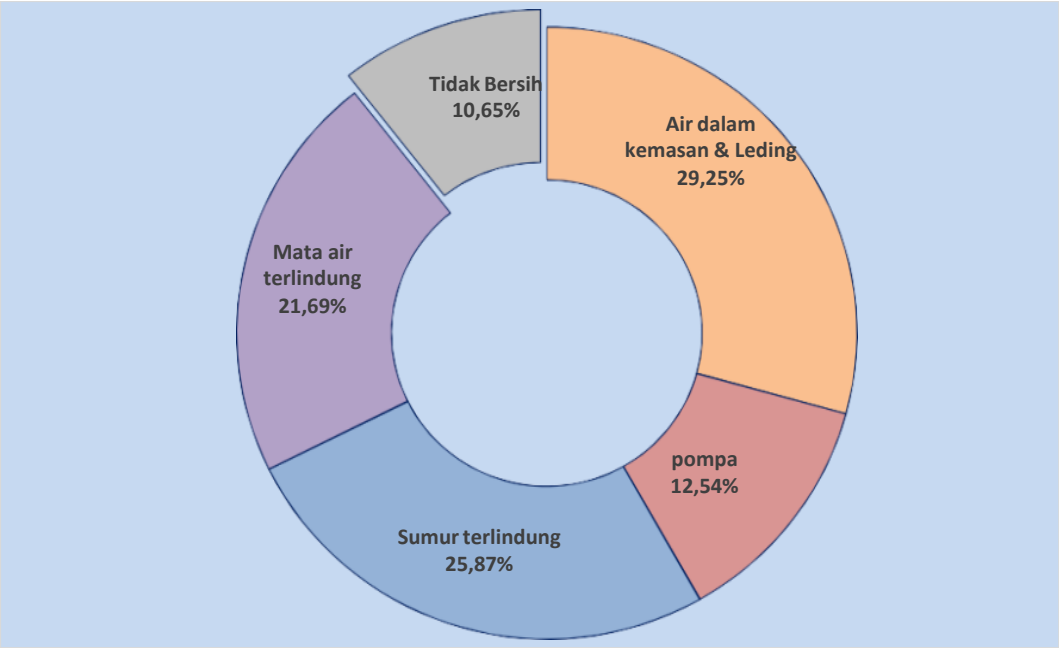

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2024

Indikator lain dari aspek daya saing daerah adalah ketersediaan energi terutama penggunaan listrik sebagai sumber penerangan. Sebanyak 43 desa (26,06%) sebagian besar jalannya telah diterangi listrik. Ada 95 desa (57,58%) yang sebagian kecil jalannya telah diberi penerangan dan sebanyak 27 desa (16,36%) belum memiliki penerangan jalan. Diantara 138 desa yang memiliki penerangan jalan sebanyak 96 Desa (69,57%) menggunakan listrik yang diusahakan pemerintah dan sisanya sebanyak 42 desa (30,43%) listriknya non pemerintah. Aspek daya saing daerah fokus terhadap kondisi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi diantaranya ketersediaan pasar, restoran, rumah/warung makan, hotel/penginapan, Bank/BPR di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Basis Data Pembangunan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95. Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi di Kab. Bandung Barat Tahun 2020-2024

Jenis Infrastruktur	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar Tradisional/Modern	388	306	309	309	303
Restoran/Warung Makan, Cafe	1.738	1.436	1.606	1.748	1.881
Hotel/Penginapan	159	117	162	167	297
Bank/BPR	98	90	95	95	95
Penerangan Jalan	4.627	4.972	5.044	5.164	5.580

Sumber : Basis Data Pembangunan, BPS/Diskominfotik, 2024, yang dikelola dalam SIPD

2.1.4.3 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti indeks rasa aman, angka kriminalitas, jumlah demonstrasi dan pelayanan perijinan.

Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting dalam berinvestasi. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing iklim investasi yang lebih tinggi. Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi.

Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang aspek daya saing dengan mengabaikan aspek keamanan. Investor tidak akan mungkin menanamkan investasinya apabila diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman dari lingkungan maupun ancaman terjadinya bencana.

Berdasarkan Basis Data Pembangunan 2 (dua) tahun terakhir (2022-2023), jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan angka yang cenderung turun. Pada tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 446 kasus, sementara itu pada tahun 2023 berkurang menjadi 320 kasus dengan jenis kejahatan yang paling banyak adalah pencurian, perampokan dan penganiayaan. Sedangkan jumlah kejadian demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bandung Barat, disebabkan karena adanya beberapa isu-isu seperti isu-isu pengupahan, pelaksanaan outsourcing, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, dan sebagainya dengan angka kejadian pada tahun 2022 sebanyak 6 kejadian dan menurun di tahun 2023 menjadi 5 kejadian demonstrasi/unjuk rasa.

Perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian sistem dan prosedur perijinan yang meliputi persyaratan, waktu dan biaya serta transparansi dan akuntabilitas proses perijinan merupakan komponen penting dalam pelayanan perijinan. Pelayanan perijinan yang berbasis digital terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon, meningkatkan efisiensi dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan.

Tabel 2.96. Jumlah Izin yang Terbit Sesuai SOP di Kab. Bandung Barat Tahun 2024

No	Izin	SOP (Hari)	Izin Tidak Sesuai SOP	Izin Terbit Sesuai SOP	Jumlah Izin	% SOP
1	Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg)	28	0	382	382	100
2	Sertifikat Laik Fungsi (Slf)	28	0	24	24	100
3	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non-Berusaha	30	91	56	147	38,1
4	Izin Pendirian Pendidikan Dasar (Sd & Smp)	12	9	4	13	30,77
5	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal	44	1	15	16	93,75
6	Izin Pendirian Pendidikan Jalur Non Formal	24	4	46	50	92
7	Izin Praktik Dokter (Mandiri & Faskes)	11	46	415	461	90,02
8	Izin Praktik Perawat	11	65	467	532	87,78
9	Izin Praktik Bidan (Mandiri & Faskes)	11	73	345	418	82,54
10	Izin Praktik Apoteker	11	13	215	228	94,3
11	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	11	17	166	183	90,71
12	Izin Praktik Fisioterapis	11	2	8	10	80
13	Izin Praktik Terapis Wicara	11	0	5	5	100
14	Izin Kerja Radiografer	11	7	7	14	50
15	Izin Kerja Refraksionis Optisien	11	3	7	10	70
16	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	11	0	2	2	100
17	Izin Praktik Rekam Medis	11	14	62	76	81,58
18	Izin Praktik Analis/ Ahli Teknologi Laboratorium Medik	11	12	83	95	87,37
19	Izin Praktik Gizi	11	7	22	29	75,86
20	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (Mandiri & Faskes)	11	3	17	20	85
21	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	11	3	12	15	80
22	Izin Praktik Penata Anestesi	11	0	3	3	100
23	Izin Praktik Terapi Okupasi	11	0	1	1	100

No	Izin	SOP (Hari)	Izin Tidak Sesuai SOP	Izin Terbit Sesuai SOP	Jumlah Izin	% SOP
24	Izin Praktik Elektromedis	11	0	4	4	100
25	Surat Keterangan Tidak Berpraktik Di Kbb	11	0	147	147	100
26	Izin Penyelenggaraan Reklame (Permanen & Insidentil)	14	184	25	209	11,96
27	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	7	12	1	13	7,69
28	Izin Pengumpulan Sumbangan Dan Penyaluran Bantuan Sosial	7	3	0	3	0
29	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	8	155	33	188	17,55
30	Izin Praktik Dokter Hewan	10	2	4	6	66,67
31	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan	11	0	0	0	0
32	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pelayanan Inseminator Kesehatan Hewan	11	0	0	0	0
33	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	11	0	0	0	0
34	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi	11	0	0	0	0
35	Pencabutan Surat Izin Apotek	11	0	0	0	0
TOTAL			**726**	**2578**	**3304**	**78,03**

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah.

Pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, dengan adanya aplikasi perijinan online, lamanya pengurusan perizinan bisa diperpendek, dengan ketentuan semua persyaratan perizinan terpenuhi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Capaian investasi di Kab. Bandung Barat terus mengalami kenaikan dari jumlah investasi PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp.335 Milyar di tahun 2022 menjadi Rp.704 Milyar dan tahun 2024 naik signifikan menjadi Rp.3.898 Milyar, sedangkan persentase waktu proses pelayanan perijinan sesuai SOP semakin membaik awalnya 2020 sebesar 68% menjadi 72,5% di tahun 2021 dan naik kembali di tahun 2022 menjadi 82,79% serta tahun 2024 turun kembali menjadi 78,03%. Hal ini dengan adanya dukungan aplikasi perijinan online.

2.1.4.4 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Analisis daya saing sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator pendidikan, kesehatan, rasio ketergantungan, kondisi PNS menurut pendidikan yang ditamatkan dan kualitas tenaga kerja berdasarkan penduduk usia produktif.

2.1.4.4.1. Pendidikan

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Selama Periode 2020 hingga 2024, pengetahuan masyarakat Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator HLS dan RLS yang menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan harapan lama sekolah.

Hal ini wajar karena rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator keluaran pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program- program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Gambar 2.20. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kab. Bandung Barat, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024, diolah

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun selama tahun 2020-2024.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Walau HLS dan RLS menunjukkan peningkatan tetapi peningkatannya

lambat, sehingga sektor pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas- luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Angka ini menunjukkan bahwa, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak laki- laki maupun anak perempuan. Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek. Dalam konstelasi regional Jawa Barat, HLS Kabupaten Bandung Barat termasuk rendah dibanding Kab/Kota lainnya di Jawa Barat. Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan Kab/Kota lain lebih lama dibandingkan di Kab. Bandung Barat.

Tabel 2.97. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	12,48	12,49	12,50	12,64	12,75
2	Sukabumi	12,23	12,24	12,25	12,38	12,39
3	Cianjur	11,99	12,00	12,01	12,03	12,04
4	Bandung	12,69	12,70	12,71	12,73	12,74
5	Garut	11,91	12,03	12,15	12,16	12,17
6	Tasikmalaya	12,53	12,54	12,59	12,63	12,64
7	Ciamis	14,06	14,20	14,28	14,29	14,30
8	Kuningan	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
9	Cirebon	12,25	12,27	12,28	12,41	12,42
10	Majalengka	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
11	Sumedang	12,97	12,98	12,99	13,01	13,02
12	Indramayu	12,25	12,26	12,27	12,29	12,32
13	Subang	11,70	11,71	11,78	11,91	12,11
14	Purwakarta	12,11	12,12	12,13	12,18	12,25
15	Karawang	12,09	12,10	12,19	12,20	12,21
16	Bekasi	13,09	13,10	13,11	13,17	13,18
17	Bandung Barat	11,87	11,88	11,89	11,91	12,00
18	Pangandaran	12,07	12,08	12,11	12,30	12,31
19	Kota Bogor	13,41	13,42	13,43	13,45	13,51
20	Kota Sukabumi	13,47	13,58	13,59	13,60	13,62
21	Kota Bandung	14,20	14,21	14,23	14,24	14,25
22	Kota Cirebon	13,12	13,13	13,14	13,16	13,17
23	Kota Bekasi	14,00	14,10	14,11	14,12	14,14
24	Kota Depok	13,92	13,93	13,94	13,96	14,11
25	Kota Cimahi	13,80	13,81	13,82	13,84	13,85
26	Kota Tasikmalaya	13,45	13,46	13,47	13,49	13,50
27	Kota Banjar	13,23	13,24	13,25	13,27	13,28
	Provinsi Jawa	12,50	12,61	12,62	12,68	12,80

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang, capaian RLS Kab. Bandung Barat 2020-2024 pada kisaran 8,19 - 8,24 tahun, bila

dilihat pada skala regional Jawa Barat termasuk pada capain RLS yang tinggi dibanding Kab/Kota lain di Jawa Barat.

Tabel 2.98. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	8,30	8,31	8,34	8,37	8,39
2	Sukabumi	7,07	7,10	7,11	7,33	7,34
3	Cianjur	7,18	7,19	7,20	7,22	7,33
4	Bandung	8,96	9,07	9,08	9,10	9,15
5	Garut	7,52	7,53	7,83	7,84	7,85
6	Tasikmalaya	7,35	7,48	7,73	7,96	7,97
7	Ciamis	7,70	7,90	8,00	8,09	8,10
8	Kuningan	7,57	7,80	7,88	7,89	7,90
9	Cirebon	6,92	7,10	7,40	7,64	7,65
10	Majalengka	7,27	7,31	7,49	7,52	7,53
11	Sumedang	8,51	8,52	8,72	8,73	8,74
12	Indramayu	6,30	6,52	6,83	6,94	6,95
13	Subang	7,10	7,11	7,20	7,45	7,46
14	Purwakarta	8,09	8,10	8,11	8,13	8,14
15	Karawang	7,77	7,78	7,96	8,04	8,05
16	Bekasi	9,12	9,30	9,53	9,57	9,76
17	Bandung Barat	8,19	8,20	8,22	8,23	8,24
18	Pangandaran	7,74	7,85	8,03	8,04	8,10
19	Kota Bogor	10,33	10,53	10,63	10,64	10,71
20	Kota Sukabumi	9,59	9,81	10,14	10,37	10,38
21	Kota Bandung	10,75	10,99	11,00	11,06	11,07
22	Kota Cirebon	9,91	10,12	10,33	10,37	10,53
23	Kota Bekasi	11,16	11,31	11,44	11,66	11,79
24	Kota Depok	11,28	11,46	11,47	11,58	11,59
25	Kota Cimahi	10,96	11,08	11,21	11,39	11,52
26	Kota Tasikmalaya	9,33	9,52	9,53	9,54	9,63
27	Kota Banjar	8,63	8,77	8,78	8,79	8,83
	Provinsi Jawa Barat	8,55	8,61	8,78	8,83	8,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah, biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur

keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 2.21. APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Pada Gambar 2.15 terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang usianya di atas 12 tahun, tetapi masih duduk dibangku SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SD di

Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 91,35 persen, artinya 91,35 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

Gambar 2.22. APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

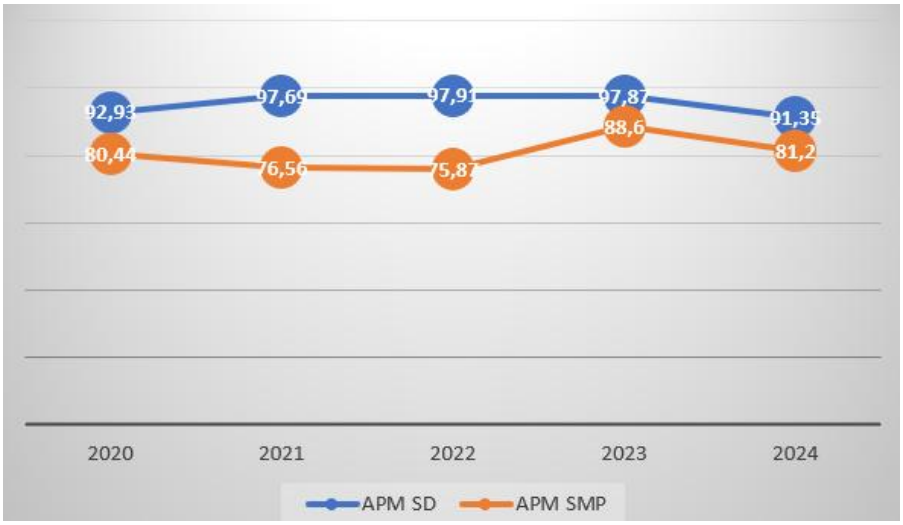

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024, diolah

Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. APM SD penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD penduduk perempuan. Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Gambar 2.23. APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 - 2024, diolah

Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SMA/MA. Gambar 2.17 memperlihatkan APS penduduk Kabupaten Bandung Barat, dimana pada semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang besar antara angka partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan perempuan.

2.1.4.4.2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Umur harapan hidup saat lahir yang diwakili dimensi umur panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 2.24. Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

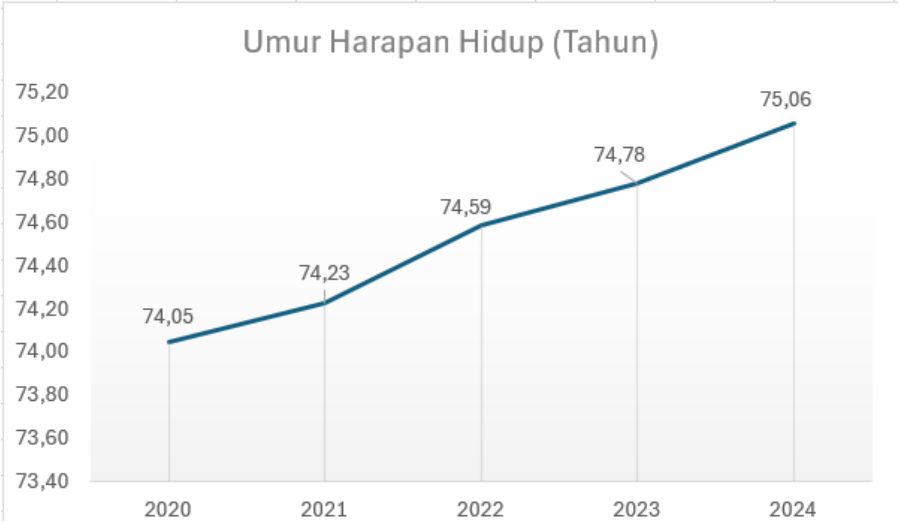

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, usia harapan hidup meningkat dari 74,05 pada tahun 2020 menjadi 75,06 pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung, hal ini merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat. Dalam skala regional Jawa Barat, perkembangan UHH di kabupaten/kota selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan, disparitas antara daerah dengan capaian UHH tertinggi dengan yang terendah semakin mengecil, dalam hal ini capaian UHH Kabupaten Bandung Barat bila dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99. Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	73,90	74,09	74,42	74,67	74,90
2	Sukabumi	73,90	74,15	74,40	74,65	74,85
3	Cianjur	73,90	74,10	74,37	74,61	74,80
4	Bandung	74,19	74,38	74,67	74,92	75,23
5	Garut	73,97	74,16	74,43	74,66	74,87
6	Tasikmalaya	73,06	73,22	73,64	73,87	74,06
7	Ciamis	74,23	74,42	74,69	74,96	75,26
8	Kuningan	74,25	74,43	74,67	74,91	75,22
9	Cirebon	73,97	74,16	74,43	74,71	74,98
10	Majalengka	73,95	74,14	74,44	74,73	74,98
11	Sumedang	74,30	74,49	74,77	75,04	75,29
12	Indramayu	73,88	74,09	74,39	74,61	74,82
13	Subang	73,99	74,22	74,46	74,87	75,08
14	Purwakarta	73,92	74,11	74,40	74,67	74,92
15	Karawang	74,17	74,35	74,63	74,9	75,16
16	Bekasi	74,54	74,65	74,86	75,09	75,33
17	Bandung Barat	74,05	74,23	74,59	74,78	75,06
18	Pangandaran	74,12	74,32	74,60	74,88	75,11
19	Kota Bogor	74,72	74,92	75,21	75,52	75,80
20	Kota Sukabumi	74,23	74,38	74,64	74,89	75,11
21	Kota Bandung	74,82	74,99	75,26	75,53	75,83
22	Kota Cirebon	74,43	74,59	74,87	75,17	75,48
23	Kota Bekasi	75,01	75,27	75,60	75,86	76,14
24	Kota Depok	74,80	74,97	75,24	75,53	75,82
25	Kota Cimahi	74,56	74,73	74,99	75,27	75,55
26	Kota Tasikmalaya	74,34	74,52	74,80	75,08	75,31
27	Kota Banjar	73,99	74,19	74,48	74,77	74,99
	Provinsi Jawa Barat	74,19	74,37	74,65	74,91	75,16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.4.4.3. Ketergantungan Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat menurut kelompok umur salah satunya digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan, yang dilihat berdasarkan tabel serta digambarkan oleh Piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.100. Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung **Barat Tahun 2020 - 2024**

Penduduk Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia < 15 Tahun	452.602	461.949	450.086	449.623	477.342
Penduduk Usia > 64 Tahun	103.373	104.824	118.923	120.583	151.786
Penduduk (< 15 Tahun dan > 64 Tahun)	555.975	566.733	569.009	570.206	629.128
Penduduk Usia Produktif (15-64)	1.232.361	1.250.977	1.277.960	1.289.430	1.282.533
Jumlah	1.788.336	1.817.770	1.846.969	1.859.636	1.911.661
Rasio Ketergantungan	45,11	45,31	44,59	44,22	49,05

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2024

Gambar 2.25. Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

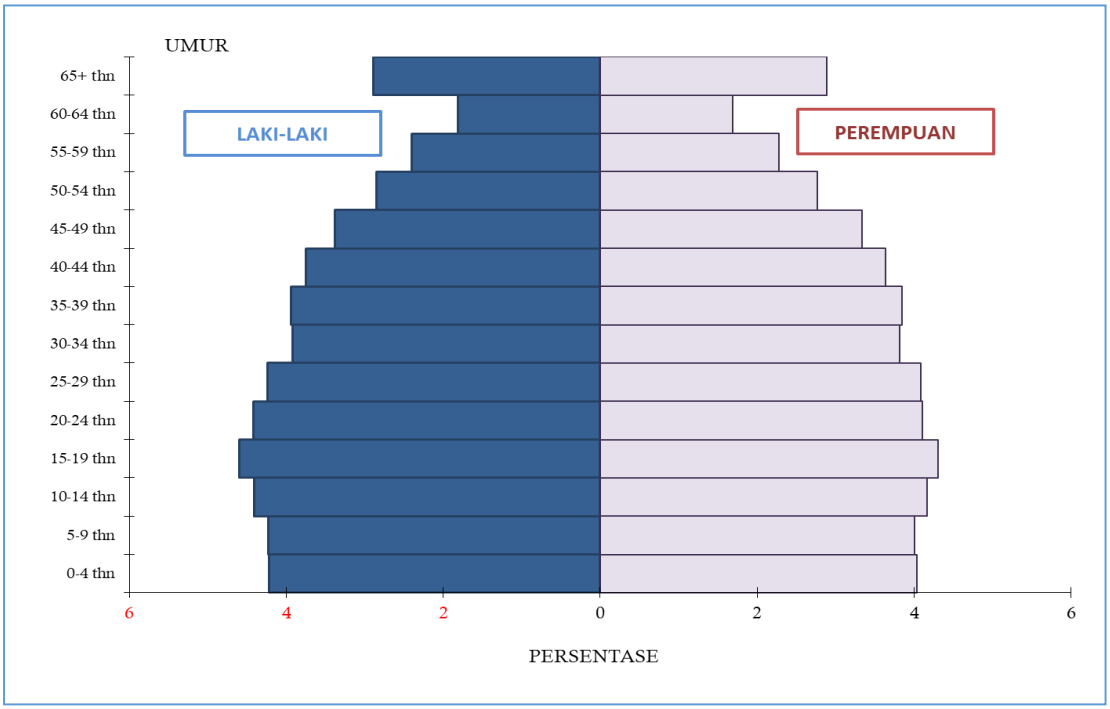

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Tahun 2023, diolah

Terlihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 tahun terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif. Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang belum/tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Dependency Ratio Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 49.05. Angka ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat harus menanggung 45 orang penduduk usia tidak produktif.

2.1.4.4.4. Kondisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila dilihat dari daya saing SDM berdasarkan kondisi ASN di Kabupaten Bandung Barat menurut pendidikan yang ditamatkan mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum telah memiliki: kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media, kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah. Namun demikian dalam perspektif ke depan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada jenjang S-2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101. Kondisi ASN Kabupaten Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024

Tingkat Pendidikan	2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Sampai dengan SD	39	2	41	38	0	38	21	0	21	21	0	21			
SMP/ Sederajat	56	3	59	50	2	52	37	3	40	20	3	23	51	0	51
SMA/ Sederajat	472	159	631	402	114	516	286	55	341	249	51	300	247	67	314
Diploma I, II/ Akta I, II	32	14	46	119	124	243	119	124	243				34	36	70
Diploma III/ Akta III/ Sarjana Muda	84	456	540	128	505	633	100	486	586	94	486	580	1551	2548	4,099
Tingkat Sarjana/ Doktor/Ph.D	2967	3119	6086	2451	3304	5755	2412	3139	5551	2252	2803	5055	443	401	844
Jumlah/ Total	3618	3739	7357	3188	4049	7237	2856	3683	6539	2636	3343	5979	2,326	3,052	5,378

Sumber : BKPSDM, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.4.4.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Karakteristik Penduduk Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. TPAK dihitung berdasarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

TPAK Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen dari tahun 2023 sebesar 67,01 persen menjadi 67,27 persen di tahun 2024. Peningkatan TPAK mengindikasikan terjadi peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja. TPAK Kabupaten Barat Tahun 2024 sebesar 67,27 persen, artinya dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat, 67 - 68 orang diantaranya aktif secara ekonomi.

TPAK Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 87,83 persen lebih tinggi dari pada TPAK perempuan sebesar 46,00 persen. Hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung Barat jauh lebih aktif secara ekonomi dibandingkan yang perempuan.

Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2023, TPAK laki- laki tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen sedangkan TPAK perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen. Pada periode 2024 ini partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat lebih cepat dibandingkan yang laki-laki.

Gambar 2.26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Barat 2020 – 2024

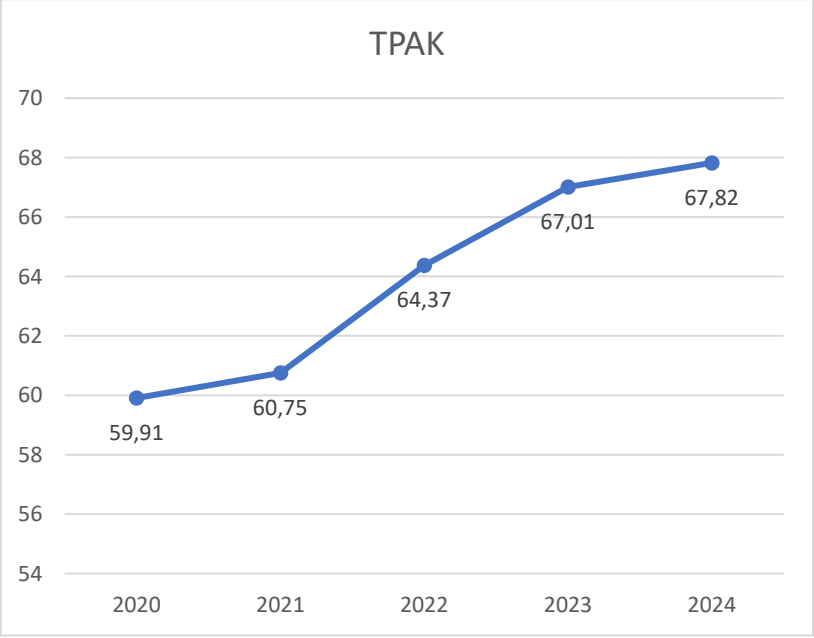

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2020-2024

Karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan kriterianya, adalah sebagai berikut:

- Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

  Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 adalah sektor jasa sebesar 47,91 persen; sektor manufaktur sebesar 32,56 persen; dan Pertanian sebesar 19,53 persen. Dibandingkan tahun 2023 (Agustus), lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah lapangan pekerjaan sektor manufaktur (23.064 orang), sektor pertanian (12.778 orang) dan sektor jasa (7.015 orang).

- Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

  Penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 40,35 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap yaitu sebesar 2,08 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase terbesar adalah status pekerja buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 2,2 persen poin. Pada Tahun 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 525.720 orang (57,57 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 387.406 orang (42,43 persen). Dibandingkan Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 10.024 orang.

- Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

  Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 46,11 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 4,56 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Tahun 2023. Dibandingkan dengan Tahun 2023, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah mengalami peningkatan persentase sebesar 0,60 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan universitas (Diploma IV, S1, S2, S3) mengalami penurunan persentase, sebesar 0,44 persen poin.

Tabel 2.102. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2022-2024 (persen)

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2020-2024.

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2022		Agustus 2023		Agustus 2024		Perubahan Agt 2022 – Agt 2023		Perubahan Agt 2023 – Agt 2024	
	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen (%)	orang	persen poin[1)]	orang	persen poin[1)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Pekerjaan Utama										
A. Pertanian	152.453	20,58	165.532	19,02	178.310	19,53	13.079	-1,56	12.778	0,51
B. Manufaktur	249.979	33,75	274.234	31,51	297.298	32,56	24.255	-2,24	23.064	1,05
C. Jasa	338.207	45,66	450.503	49,47	437.518	47,91	92.296	3,81	7.015	-1,56
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	
Berusaha sendiri	197.371	26,65	210.495	24,19	186.796	20,46	13.124	-2,46	-23.699	-3,73
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	70.986	9,58	84.073	9,66	97.687	10,70	13.087	0,08	13.614	1,04
Berusaha dibantu buruh tetap	17.903	2,42	22.572	2,60	18.968	2,08	4.669	0,18	-3.604	-0,52
Buruh/karyawan/pegawai	291.364	39,34	332.001	38,15	368.438	40,35	40.637	-1,19	36.437	2,2
Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian	119.814	16,18	144.043	16,55	153.216	16,78	24.229	0,37	9.173	0,23
Pekerja keluarga/tak dibayar	43.201	5,83	77.085	8,86	88.021	9,64	33.884	3,03	10.936	0,78
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	
Status Pekerjaan Formal/Informal										
Formal	309.267	41,76	354.573	40,74	387.406	57,57	45.306	-1,02	32.833	16,83
Informal	431.372	58,24	515.696	59,26	525.720	42,43	84.324	1,02	10.024	-16,83
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	352.722	47,62	396.043	45,51	421.026	46,11	43.321	-2,11	24.983	0,60
Sekolah Menengah Pertama	150.531	20,32	187.853	21,59	177.566	19,45	37.322	1,27	-10.287	-2,14
Sekolah Menengah Atas	109.707	14,81	121.680	13,98	152.214	16,67	11.973	-0,83	30.534	2,69
Sekolah Menengah Kejuruan	81.077	10,95	111.356	12,80	106.589	11,67	30.279	1,85	-4.767	-1,13
Diploma I/II/III	9.871	1,33	9.829	1,13	14.122	1,55	-42	-0,2	4.293	0,42
Universitas (Diploma IV, S1, S2, S3)	36.731	4,96	43.508	5,00	41.609	4,56	6.777	0,04	-1.899	-0,44
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	

2.2 Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan

penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Pengukuran kinerja adalah sebuah proses penilaian/pengukuran secara objektif dengan menggunakan informasi yang relevan untuk menegetahui capaian organisasi atau program organisasi sebagai bagian upaya penguatan manajemen organisasi dan sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan, demi peningkatan kualitas capaian dan akuntabilitas ke depan. Pengukuran kinerja juga dapat diartikan sebagai usaha pelacakan dimensi efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas layanan, kepuasan pelanggan sampai kepada efektivitas anggaran dari sebuah organisasi dan/program dengan melakukan proses pendefinisian, observasi dan penggunaan suatu ukuran dan ukuran yang dimaksud tersebut biasa dikenal sebagai indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja merupakan alat managemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam perkembangannya, untuk memudahkan proses pengukuran kinerja, para pakar dan akademisi mengembangkan beberapa jenis indikator kinerja, yaitu input, output, outcome, dan impact.

Terkait hal tersebut, ada tiga hal penting yang perlu untuk diketahui. Pertama masing-masing jenis indikator kinerja memiliki tujuan tertentu. Kedua, didalam proses pelaksanaan pengukuran kinerja, masing-masing indikator kinerja memiliki keterkaitan. Ketiga, ada sebuah kesepakatan diantara praktisi dan akademisi bahwa di dalam proses pengukuran kinerja terdapat konsep “proses” yang diletakkan diantara input dan output, namun bukan sebagai indikator kinerja. Maksud penggunaan proses tersebut tidak lain adalah untuk mempermudah publik dalam memahami pelaksana pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja kadang kala juga menimbulkan respon yang tidak diharapkan. Meskipun logika pengukuran kinerja didesain untuk memperkuat kinerja organisasi, tetapi seringkali proses ini tidak diikuti.

Ketidaktepatan ukuran atau ketidakseimbangan sejumlah indikator dapat mengarahkan pada tujuan yang salah sehingga memunculkan perilaku yang tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Suatu program/kegiatan tidak bisa diukur hasilnya dengan baik, boleh jadi merupakan pertanda organisasi atau institusi tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu dibutuhkan tolak ukur yang berisi tentang indikator-indikator (penunjuk/penanda) terjadinya perubahan. Capaian kinerja merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja pembangunan daerah dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik tahunan (RKPD) dan 5 tahunan (RPJMD) atau untuk kondisi saat ini yaitu RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Bandung Barat 2024-2026.

2.2.1 Capaian Kinerja Makro Pembangunan

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan daerah seara umum. Capain kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional. Indikator Makro Kabupaten Bandung Barat dalam RKPD Tahun 2024 menggambarkan kemajuan Pembangunan daerah pada tahun 2024. Indikator makro Pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Gini serta Pendapatan Perkapita.

Tabel 2.103. Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,33	69,44	70,77
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,43	1,58	1,32
3.	Presentase Penduduk Miskin	10,52	10,40	10,49
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,11	9,20	6,70
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,00	5,66	4,94
6.	Indeks Gini	0,374	0,341	0,400
7.	Pendapatan Perkapita	30.622	30.110	32.500

Sumber: RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026

Adapun pencapaian Indikator Makro Pembanguna Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Bandung Barat berada pada 70,77 point melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu sebesar 69,44 point. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (2023), dapat dikatakan terjadi peningkatan sebesar 0,44 point dari semula 70,33 point. Demikian angka tersebut masih jauh dengan capaian IPM Provinsi Jawa Barat yang pada Tahun 2024 berada pada 74,92 point. Sementara jika dibandingkan dengan capaian daerah otonom lain,

Kabupaten Bandung Barat berada pada urutan 22 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, unggul dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memberikan implikasi yang cukup besar terhadap lingkungan, seperti penggunaan lahan, konsumsi air dan produksi limbah. Hal ini dapat mempercepat degradasi lingkungan, penuruan kualitas air dan udara serta hilang keanekaragaman hayati. Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 1,32% dengan target kinerja sebesar 1,58%. Dalam hal ini, laju pertumbuhan penduduk tidak dapat diukur keberhasilannya secara konstan dimana penentuan ketercapaian target kinerja membutuhkan analisis secara mendalam tentang kondisi aktual kependudukan yang dihadapkan pada aspek sosial dan ekonomi.

Di Kabupaten Bandung Barat sendiri memiliki kecenderungan bahwa laju pertumbuhan penduduk harus ditekan mengingat adanya tekananan pada penyediaan sarana infrastruktur, isu kerusakan lingkungan, serta belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

c. Persentase Penduduk Miskin

Pada Tahun 2024, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 10,49% dimana tidak mencapai target kinerja sebagaimana yang ditentukan di dalam dokumen perencanaan pembangunan sebesar 10,40%. Demikian angka tersebut setidaknya telah menunjukan adanya tren penurunan kemiskinan apabila dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya (2023) yang berada pada angka 10,52%. Pada Tahun 2024 seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami tren penurunan persentase penduduk miskin.

Demikian jika dibandingakan dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki capaian persentase sebesar 7,46%, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat masih relatif cukup tinggi dengan angka 10,49%. Selain itu jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat dalam hal persentase penduduk miskin, berada di posisi ke 22 di atas Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu.

Kondisi penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat yang cenderung stagnan salah satunya disebabkan oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dimana hanya bergantung pada sektor-sektor tertentu yang kebetulan mengalami pelemahan. Selain itu kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin menyempit setidaknya

memberikan kontraksi terhadap kondisi kemiskinan. Demikian terkait dengan penurunan persentase penduduk miskin, diprediksi Tahun 2025 akan mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan positifnya kondisi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Tahun 2024, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 6,70% dimana telah melampaui secara signifikan target kinerja sebagaimana yang ditentukan di dalam dokumen perencanaan pembangunan sebesar 9,20%. Selain itu jika dilihat dari capaian angka tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami trend penurunan dimana pada Tahun 2023 berada pada angka 8,11% atau turun sebesar 1,41 di Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami tren penurunan tingkat pengangguran terbuka. Hanya Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar yang mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dapat dikatakan lebih baik jika dibandingakan dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki capaian persentase sebesar 6,75%. Kondisi penurunan pengangguran di Kabupaten Bandung Barat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti diantanya ialah adanya peningkatan iklim investasi yang mengarah pada terciptanya lapangan pekerjaan. Selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh adanya keseimbangan angkatan kerja dan lapangan pekerjaan serta terlaksananya program-program ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada tahun 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat berada pada 4,94% dimana tidak mancapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu sebesar 5,66%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (2023), juga dapat dikatakan terjadi penurunan walau tidak signifikan sebesar 0,06 point dari semula 5,00%. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat yang pada Tahun 2024 berada pada 4,95 point. Sementara jika dibandingkan dengan capaian daerah otonom lain, Kabupaten Bandung Barat berada pada urutan 21 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, unggul dari Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kawarang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Indramayu. Secara garis besar kondisi laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat sangat bervariatif dimana 15 daerah mengalami penurunan sedangkan 12 daerah mengalami peningkatan.

Kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh lapangan usaha sektor industri pengolahan yang terkontraksi atau mengalami penurunan fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah, atau dampak dari peristiwa ekonomi global. Terlepas dari penurunan ini, Kabupaten Bandung Barat masih memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pariwisata, kuliner, dan kerajinan tangan.

f. Indeks Gini

Pada Tahun 2024 Indeks Gini di Kabupaten Bandung Barat tepat berada di angka 0,400 dimana telah mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan pembangunan sebesar 0,341. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya (2023), indeks gini Kabupaten Bandung Barat juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari semula 0,374. Hal ini setidaknya telah menunjukan semakin berkurangnya tingkat kesenjangan antar individu. Kondisi ini setidaknya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang semakin menurun, kebijakan fiskal yang tepat sasaran, serta kualitas pendidikan yang mengalami peningkatan.

g. Pendapatan Perkapita.

Pada Tahun 2024, Pendapatan Perkapita di Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 32.500 (dalam ribu rupiah) dimana telah mencapai target kinerja sebagaimana yang ditentukan di dalam dokumen perencanaan pembangunan sebesar 30.110 (dalam ribu rupiah).

Selain itu jika dilihat dari capaian angka tahun sebelumnya, Pendapatan Perkapita juga mengalami trend peningkatan dimana pada Tahun 2023 berada pada angka 30.622 atau meningkat sebesar 1.878 (dalam ribu rupiah) di Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami tren peningkatan pendapatan perkapita dengan rata-rata kenaikan sebesar 3.098 (dalam ribu rupiah). Pendapatan perkapita Kabupaten Bandung Barat berada di urutan 20 di atas Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur. Peningkatan pendapatan perkapita di Kabupaten Bandung Barat sejalan dengan berkurangnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan yang secara langsung menjadi variabel yang saling mengikat dan memiliki hubungan kausalitas.

2.2.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tecapaianya tujuan, berupa hasil Pembangunan daerah / perangakt daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)

program perangkat daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifikl terukur dan memiliki jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun berjalan. Berdasarkan kepada RPD Kabupaten Bandung Barat 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, Kabupaten Bandung Barat memiliki 5 Tujuan dan 26 Sasaran.

Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 beserta indikator dengan target kinerjanya disampaikan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan,** dengan sasaran:
   - 1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan;
   - 1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan;
   - 1.3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk;
   - 1.4 Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender; dan
   - 1.5 Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan.

Tabel 2.104. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	CAPAIN KINERJA
1	TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKESETARAAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Poin	69,44	70,77
1.1	Meningkatnya KualitasKesehatan	Angka Harapan Hidup	Poin	72,80	74,90
		Prevalensi Stunting	% SSGI	17	
			% EPPGBM	7,36	4,95
1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Poin	11,91	12
		Rata - Rata Lama Sekolah	Poin	8,23	8,24

1.3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,58	1,40
1.4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	79,73	
1.5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	Presentase Layanan Kepemudaan	%	10,30	10,34
		Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,44	0,45

Sumber: RPD Kab. Bandung Barat 2024-2026

2. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan,** dengan sasaran:
   - 2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
   - 2.2 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
   - 2.3 Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha;
   - 2.4 Terkendalinya Tingkat Kemiskinan;
   - 2.5 Meningkatnya Ketahanan Pangan; dan
   - 2.6 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Tabel 2.105. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	CAPAIN KINERJA
2	PERTUMBUHAN EKONOMIDAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	%	5,66	4,94
		GINI RASIO	Poin	0,341	0,370
2.1	Meningkatnya PertumbuhanEkonomi Sektor Unggulan	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	12,88	12,63
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,98	12,38
		Kontribusi Sektor Industriterhadap PDRB	%	41,61	40,85
2.2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	3	5,23
		Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung pariwisata	%	36,14	38,51

2.3	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	Realisasi Nilai investasi	Trilyun	6,5	3,898
		Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	48,40	46,45
		Pertumbuhan Usaha Mikro	%	23,23	31,30
2.4	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	Presentase Penduduk Miskin	%	10,40	10,49
2.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase desa tahan pangan	%	75,76	87,88
2.6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,20	6,70

Sumber: RPD Kab. Bandung Barat 2024-2026

3. **Pemerataan Pembangunan Infrastuktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan,** dengan sasaran:

   3.1 Meningkatnya Infrastuktur Permukiman;

   3.2 Meningkatnya Aksebilitas Wilayah;

   3.3 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;

   3.4 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana;

   3.5 Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan; dan

   3.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.106. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	CAPAIN KINERJA
3	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DENGAN MEMPERHATIKAN KUALITAS LINGKUNGAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	Poin	26,37	
3.1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman	%	66,72	47,13
3.2	Meningkatnya Aksebilitas Wilayah	Indeks Aksebilitas / Transportasi	Poin	13,11	
3.3	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	100	92,67
3.4	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Katagori	0,49 / Sedang	0,49
3.5	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	Persentase Desa mandiri	%	42,42	60,60

3.6	Meningkatnya Kualitas LingkunganHidup	Indeks Kualitas LingkunganHidup	Poin	63,10	58,43

Sumber: RPD Kab. Bandung Barat 2024-2026

4. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,** dengan sasaran :
   - 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
   - 4.2 Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel;
   - 4.3 Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur;
   - 4.4 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   - 4.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
   - 4.6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah.

Tabel 2.107. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	CAPAIN KINERJA
4	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai/ Katagori	62 (CC)	
4.1	Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaPemerintahan Daerah	Nilai Sakip	Nilai/ Katagori	71(BB)	68,85
4.2	Terkelolanya Keuangan Daerah yangSehat, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadapLKPD	Skor	WTP	
4.3	Berkembangya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Merit	Skor	0,76	0,81
4.4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Poin	2,75	3,78
4.5	Meningkatnya Kualitas PelayananPublik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,67	83,67
4.6	Meningkatnya Kualitas PengelolaanArsip Daerah	Indeks Kearsipan	Poin	57,94	71.17

Sumber: RPD Kab. Bandung Barat 2024-2026

5. **Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi,** dengan sasaran:
   - 5.1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

5.2 Menurunnya Potensi Konflik Sosial; dan

5.3 Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat dan Berpolitik Di Masyarakat

Tabel 2.108. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tertib dan Tentram dalam Kerangka Demokrasi

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	CAPAIN KINERJA
5	TERWUJUDNYA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN TERTIB DALAM KERANGKA DEMOKRASI	INDEKS DEMOKRASI	Poin	70	
5.1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Presentase penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	92,64	92,98
5.2	Menurunnya Potensi Konflik Sosial	Presentase Konflik Sosialyang Ditangani	%	100	100
5.3	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi,Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, BerpendapatDan Berpolitik di Masyarakat	%	75	75

Sumber: RPD Kab. Bandung Barat 2024-2026

2.2.3 Capaian Kinerja Program RKPD Tahun 2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sebelumnya merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui evaluasi ini, berbagai capaian, hambatan, serta potensi yang ada dapat diidentifikasi secara objektif dan komprehensif. Hasil evaluasi memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, tingkat pencapaian indikator kinerja, serta kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, hasil evaluasi menjadi landasan utama dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan. Evaluasi membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus, baik karena

capaian yang belum optimal maupun karena adanya dinamika dan perubahan kebutuhan masyarakat

Selain itu, evaluasi juga mengungkap praktik-praktik baik yang perlu dipertahankan dan direplikasi, serta memberikan masukan terhadap perbaikan mekanisme pelaksanaan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat merencanakan 241 program yang akan dilaksankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada APBD Perubahan 2024 terdapat 240 program yang dilaksanakan. Hal ini menjelaskan bahwa persentase tingkat penjabaran konsistensi program RKPD Perubahan ke dalam APBD Perubahan sebesar 99,29%. Berikut adalah gambaran mengenai jumlah program yang dilaksanakan oleh 47 perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Triwulan IV tahun 2024.

Tabel 2.109. Jumlah Program yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD	Jumlah Program APBD	Persentase
1	Dinas Pendidikan	3	3	100
2	Dinas Kesehatan	5	5	100
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	10	10	100
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	9	9	100
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	100
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	100
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	100
8	Dinas Sosial	6	6	100
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	4	100
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A	9	9	100
11	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	100
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	100
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	100
14	Dinas Perhubungan	3	3	100
15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	5	5	100
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	7	100
17	Dinas Penanaman Modal PTSP	6	6	100
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	100

19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3	3	100
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	11	11	100
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	8	100
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	8	100
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	9	100
24	Sekretariat Daerah	3	3	100
25	Sekretariat DPRD	2	2	100
26	Kecamatan Ngamprah	5	5	100
27	Kecamatan Cipatat	5	5	100
28	Kecamatan Batujajar	5	5	100
29	Kecamatan Padalarang	5	5	100
30	Kecamatan Sindangkerta	5	5	100
31	Kecamatan Cipongkor	5	5	100
32	Kecamatan Gununghalu	5	5	100
33	Kecamatan Rongga	5	5	100
34	Kecamatan Cililin	5	5	100
35	Kecamatan Cikalong Wetan	5	5	100
36	Kecamatan Cipeundeuy	5	5	100
37	Kecamatan Parongpong	5	5	100
38	Kecamatan Cisarua	5	5	100
39	Kecamatan Lembang	5	5	100
40	Kecamatan Cihampelas	5	5	100
41	Kecamatan Saguling	5	5	100
42	Inspektorat Daerah	3	3	100
43	Bappelitbangda	4	4	100
44	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	100
45	BKPSDM	3	3	100
46	Badan Pendapatan Daerah	2	2	100
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	100
	TOTAL	**241**	**241**	**100**

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bandung Barat Triwulan IV Tahun 2024, diolah

Metode Analisis dalam evaluasi RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 secara umum menggunakan metode rappid assesment yang menilai capaian realisasi terhadap target/menilai realisasi berdasarkan tren/menilai rata-rata realisasi, dengan menggunakan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Skala penilaian peringkat kerja sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.110. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai RealisasiKinerja (Tahunan)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ Nilai ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ Nilai ≤ 90 %	Tinggi
3	66 %≤ Nilai ≤ 75 %	Sedang

4	51 % ≤ Nilai ≤ 65 %	Rendah
5	Nilai ≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.2.3.1 Urusan Pendidikan

Secara teknis Urusan Pendidikan dalam hal ini diampu oleh Dinas Pendidikan. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Pendidikan setidaknya melaksanakan 3 program, 6 kegiatan dan 94 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.111.957.248.430,-. Besaran anggaran tersebut berkurang sebanyak 7,96% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 1.208.224.616.283,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.111. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pendidikan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01	**Pendidikan**				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	128,05	ST	32,18	SR
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	120,93	ST	95,77	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**124,49**	**ST**	**63,97**	**R**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan pendidikan terdapat dua program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rata-rata capaian kinerja urusan pendidikan adalah sebesar 124,49% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 63,97% atau beraa pada kriteria penilaian Rendah. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pendidikan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.112. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan				
Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	%	103.9	103,79
	APM SD	%	97.85	98,00

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
	APS (7-12)	%	99.35	99,41
	Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	%	29.82	30.81
	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	70.25	76,59
	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	65.5	68,00
	Indeks Iklim Keamanan SD	Indeks	72.25	74,28
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Indeks	70.25	71,87
	Indeks Inklusivitas SD	Indeks	55.55	56,24
	APK SMP	%	97.5	97,79
	APM SMP	%	88.5	88,70
	APS (13-15)	%	95.75	96,91
	Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	%	33.63	33.67
	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	71.95	72,29
	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	66.65	67,09
	Indeks Iklim Keamanan SMP	Indeks	69.25	69,57
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Indeks	70.15	71,48
	Indeks Inklusivitas SMP	Indeks	55.25	55,81
	Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik	%	60,75	62,36
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	2,5	2,87
	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	26,21	27,88
	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	anak	4275	4338

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
	Jumlah Lembaga PKBM, Kursus, dan Pelatihan yang berizin	Lembaga	46	46
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kurikulum	%	100	100
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid SD	Rasio	1 : 22,67	1:22.1
	Rasio Pengawas SD	Rasio	1 : 12	1:19
	Rasio Guru/Murid SMP	Rasio	1 : 18,52	1:19.9
	Rasio Pengawas SMP	Rasio	1 : 13	1:22
	Rasio Guru/Murid PAUD	Rasio	1 : 15,02	1:10.10
	Rasio Penilik PAUD	Rasio	1 : 60	1 : 60
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD, Pendidikan Non Formal yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	2,5	2,87
	Peningkatan proporsi Jumlah satuan pendidikan dasar yang mendapatkan minimal akreditasi A	%	26.86	25,73
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan indikator program telah mencapai target kinerja perencanaan. Adapun Indikator Program yang tidak tercapai, yakni Peningkatan proporsi Jumlah satuan pendidikan dasar yang mendapatkan minimal akreditasi A.

2.2.3.2 Urusan Kesehatan

Secara teknis Urusan Kesehatan dalam hal ini diampu oleh Dinas Kesehatan. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Kesehatan setidaknya melaksanakan 5 program, 20 kegiatan dan 79 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 541.344.958.745,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 12,01% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 483.302.462.069,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.113. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Prog. Urusan Kesehatan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Cap Kinerja	redikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02	**Kesehatan**				
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90,74	T	83,50	T
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	ST	97,71	ST
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	86,24	T	99,44	ST
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	44,44	SR	99,76	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**72,02**	**S**	**83,88**	**T**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan kesehatan terdapat empat program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan rata-rata capaian kinerja urusan kesehatan adalah sebesar 72,02% atau berada pada kriteria penilaian Sedang, sementara untuk capaian keuangan sebesar 83,88% atau berada pada kriteria penilaian Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kesehatan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.114. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	88
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	90	90
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif	%	57.50	68.50
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	72	100
Sasaran 2.4 Terkendalinya Tingkat Kemiskinan				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Penduduk Miskin yang menerima bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, diketahui bahwa terdapat 1 indikator program yang pada Tahun 2024 yang tidak mencapai target kinerja yakni Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

2.2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara teknis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setidaknya melaksanakan 10 program, 20 kegiatan dan 84 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 541.344.958.745,-.

Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 12,01% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 483.302.462.069,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.115. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	131,50	ST	945,80	ST
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2977,78	ST	107,77	ST
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	218,75	ST	91,79	ST
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5815	ST	99,68	ST
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	422,87	ST	99,25	ST
6	Program Penataan Bangunan Gedung	250	ST	451,26	ST
7	Program Penyelenggaraan Jalan	155	ST	96,29	ST
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	280,56	SR	56,56	SR

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	62,50	R	129,07	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**1145,99**	**R**	**230,83**	**R**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat sembilan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 1145,99% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 230,83% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.116. Capaian Indikator Kienrja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan				
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	83.42	83.46
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik		66.26	66.32
Sasaran 2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan				
Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase capaian pengelolaan sumber daya air secara optimal	%	60,51	61,67
Sasaran 3.1 Meningkatnya Infrastruktur Permukiman				
Program pengembangan permukiman	Persentase sarana prasarana permukiman yang dibangun kawasan strategis kabupaten (Berbasis Kawasan)	%	100	
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase kenaikan panjang drainase yang terbangun	%	66,89	68,93
Sasaran 3.2 Meningkatnya Aksebilitas Wilayah				
Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	75.90	75.90
Sasaran 3.3 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				
Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	%	100	100

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 3.4 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana				
Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar	%	100	100
Program penataan bangunan gedung	Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	%	100	100
Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase capaian penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	100
Sasaran 3.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai target kinerja perencanaan. Demikian terdapat 1 program yang tidak memiliki capaian karena tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2024 yakni Program pengembangan permukiman.

2.2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Secara teknis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam hal ini diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setidaknya melaksanakan 9 program, 19 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.690.373.213,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 3,78% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 21.863.866.733,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.117. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
1	Program Pengembangan Perumahan	40	SR	74,58	S
2	Program Kawasan Permukiman	50,38	R	92,83	ST

3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	ST	94,78	ST
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	100	ST	89,88	T
	Rata-Rata Capaian Urusan	**72,595**	**S**	**88,01**	**T**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdapat empat program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan rata-rata capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebesar 72,595% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 88,01% atau berada pada kriteria penilaian Rendah.

Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.118. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 2.4 Terkendalinya Tingkat Kemiskinan				
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	%	25	25.47
Program kawasan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di kawasan kumuh di bawah 10 Ha	%	25	23.18
Sasaran 3.1 Meningkatnya Infrastruktur Permukiman				
Program kawasan permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	%	33.33	33.57
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan formal yang melakukan proses serah terima PSU kepada Pemerintah daerah	%	66,67	66,67
Sasaran 3.4 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana				
Program pengembangan perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana	%	33,33	72

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mencapai target kinerja perencanaan. Hanya ada satu program yang tidak mencapai target

kinerja yakni Program Kawasan Permukiman dengan capaian kinerja sebesar 23,18% dan target kinerja sebesar 25%.

2.2.3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Secara teknis Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam hal ini diampu oleh tiga perangkat daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 program, 7 kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.098.126.516,-. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program, 5 kegiatan, dan 8 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.982.124.627,. Terakhir, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Praja melaksanakan 2 program, 8 kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.804.058.320,-.

Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.119. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**				
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	120,31	ST	91,60	ST
2	Program Penanggulangan Bencana	909,72	ST	63,14	R
3	Program Pencegahan, Penangulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	25	SR	92,33	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**351,68**	**ST**	**84,02**	**T**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat adalah sebesar 351,68% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 84,02% atau berada pada kriteria penilaian Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator

Program dari Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.120. Capaian Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 6.1 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100
	Presentase peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Satlinmas	%	77,92	78.95
	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100
Sasaran 3.4 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana				
Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	82	79,55

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan indikator program telah mencapai target kinerja perencanaan. Adapun Program yang tidak tercapai, yakni Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2.2.3.6 Urusan Sosial

Secara teknis Urusan Sosial dalam hal ini diampu oleh Dinas Sosial. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Sosial setidaknya melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.290.512.336,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 13,66% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 12.572.030.673,-. Adapun rata-rata capaian program baik

kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.121. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06	**Sosial**				
1	Program Pemberdayaan Sosial	206,01	ST	89,11	T
2	Program Rehabilitasi Sosial	82,36	T	99,39	ST
3	Program Perlindungan & Jaminan Sosial	204	ST	95,31	ST
4	Program Penanganan Bencana	105	ST	92,51	ST
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	ST	93,30	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**139,474**	**ST**	**93,92**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Sosial terdapat lima program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan rata-rata capaian kinerja urusan Sosial adalah sebesar 139,47% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 93,92% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Sosial Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.122. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 2.4 Terkendalinya Tingkat Kemiskinan				
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	%	33	10
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	100	100
Sasaran 3.4 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana				
Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah mencapai target kinerja perencanaan. Hanya ada satu program yang tidak mencapai target kinerja yakni Program Rehabilitasi Sosial dengan capaian kinerja sebesar 10% dan target kinerja sebesar 33%.

2.2.3.7 Urusan Tenaga Kerja

Secara teknis Urusan Tenaga Kerja dalam hal ini diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setidaknya telah melaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.684.804.964,-.

Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 1,54% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 21.354.801.464,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.123. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07	Tenaga Kerja				
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	333	ST	869,46	ST
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	87	T	154,72	ST
3	Program Hubungan Industrial	241,56	ST	525,62	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**220,24**	**ST**	**651,35**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Tenaga Kerja terdapat tiga program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan rata-rata capaian kinerja urusan Tenaga Kerja adalah sebesar 220,24% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 651,35% atau berada pada kriteria penilaian Sangat

Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.124. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 2.6 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja				
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	%		
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	30,67	28.78
	Produktivitas Tenaga kerja	Juta rupiah		
Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	16,43	100
Program Hubungan Industrial	Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Disnaker	%	100	100
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang di berangkatkan	%		

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa dari tiga program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hanya dua program yang telah mencapai target kinerja perencanaan. Adapun satu program yang tidak mencapai target kinerja yakni Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian kinerja sebesar 28,78% dan target kinerja sebesar 30,67%. Selain itu juga terdapat dua program yang tidak memiliki capaian karena tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2024 yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

2.2.3.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 9 program, 27 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

37.481.010.612,-. Besaran anggaran tersebut berkurang sebanyak 2,10% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 38.288.192.965,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.125. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	6,31	SR	94,20	ST
2	Program Perlindungan Perempuan	50	SR	98,61	ST
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0	SR	100	ST
4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	50	SR	99,96	ST
5	Program Perlindungan Khusus Anak	81,08	SR	97,97	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**37,48**	**SR**	**97,04**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat lima program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar 37,48% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 97,04% atau berada pada kriteria penilaian Sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.126. Capaian Indikator Kinerja Program DP2KBP3A Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Capaian 2024
Sasaran 1.4 Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender				
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	40,51	40,51
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data dan profil gender dan anak	%	79	0
Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100	100
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	%	87,5	87,5
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	%	80	80%
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	%	100	100%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencapai target kinerja perencanaan. Demikian terdapat satu program yang tidak memiliki capaian karena tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2024 yakni Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Persentase data dan profil gender dan anak.

2.2.3.9 Urusan Pangan

Secara teknis Urusan Pangan dalam hal ini diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setidaknya melaksanakan 10 program, 20 kegiatan dan 84 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.877.092.452,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 12,86% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 49.507.163.466,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.127. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pangan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Rata-Rata Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09	Pangan				
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	115,76	ST	96,19	ST
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-	-	-
3	Prog Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	-	-
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	50	SR	96,89	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**82,88**	**T**	**96,41**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Pangan terdapat dua program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pangan adalah sebesar 82,88% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 96,41% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.128. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan				
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Score Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Poin	93,00	92,10
Sasaran 2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan				
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang tersertifikasi	%	27.78	31,33
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Tahan Pangan	%	76.36	87,88
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase sarana dan prasarana pangan yang terbangun	%	100	0
Program Peningkatan Diversifikasi Dan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ton	30	33,12

Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	poin	85.64	80.29

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa sebagian besar indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah mencapai target kinerja perencanaan. Terdapat satu program dengan dua indikatornya yang tidak mencapai target kinerja yakni Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Score Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan capaian kinerja sebesar 92,10 Poin dari target kinerja sebesar 93,00 Poin dan indikator Pencapaian Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan capaian kinerja sebesar 80,29 Poin dari target kinerja sebesar 85,29 Poin.

2.2.3.10 Urusan Pertanahan

Secara teknis Urusan Pertanahan dalam hal ini diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setidaknya melaksanakan 9 program, 19 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.690.373.213,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 3,78% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 21.863.866.733,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.129. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.10	Pertanahan				
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50	SR	89,26	T
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	ST	80,67	T
3	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	0	SR	75,69	T

4	Program Pengelolaan Tanah Kosong	-	-	-	-
5	Program Penatagunaan Tanah	0	SR	62,16	R
	Rata-Rata Capaian Urusan	**37,50**	**SR**	**80,18**	**T**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Pertanahan terdapat empat program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pangan adalah sebesar 37,50% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 80,18% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.130. Indikator Kinerja Program
Dinas Perumahan & Kawasan Permukinan Urusan Pertanahan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 3.3 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				
Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	100	100
Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase capaian dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan	%	100	100
Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, ter-sinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria	%	100	100
Program pengelolaan tanah kosong	Persentase Capaian inventarisasi, kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%	100	
Program penatagunaan tanah	Persentase capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan	%	100	100

	tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa seluruh indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mencapai target kinerja perencanaan. Hanya ada satu yang tidak memiliki capaian kinerja karena tidak dilaksanakan pada APBD Tahun 2024 yakni Program pengelolaan tanah kosong.

2.2.3.11 Urusan Lingkungan Hidup

Secara teknis Urusan Lingkungan Hidup dalam hal ini diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup setidaknya melaksanakan 10 program, 20 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.592.259.504,-.

Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 174,72% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 16.959.906.180,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.131. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11	Lingkungan Hidup				
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100	ST	88,70	ST
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	ST	68,09	S
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	0	SR	78,17	T
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	191,67	ST	98,10	ST
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	941,67	ST	89,33	T
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1456,67	ST	88,07	T

7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	146,67	ST	76,09	T
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	840,00	ST	61,33	R
9	Program Pengelolaan Persampahan	2271,63	ST	94,58	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**672,03**	**ST**	**93,94**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Lingkungan Hidup terdapat sembilan program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pangan adalah sebesar 672,03% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 93,94% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.132. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 3.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	42,86	42.86
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sampel kualitas air sungai dengan status mutu air baik	%	6	0
	Persentase sampel kualitas udara dengan status mutu udara baik	%	70	100%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase RTH Taman yang terawat	%	100	100
Program pengendalian bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan	%	37	40
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Presentase ketaatan industri dan/atau usaha dalam pelaporan pelaksanaan PPLH	%	62	17.57
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Presentase Desa yang telah menerapkan aksi peduli lingkungan	%	100	100

Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Entitas	15	35
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100
Program pengelolaan persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik	%	12	25.45

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa hampir secara keseluruhan indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah mencapai target kinerja perencanaan. Demikian terdapat satu program yang tidak mencapai target kinerja yakni Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan capaian kinerja sebesar 17,57% dan target kinerja sebesar 62%.

2.2.3.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara teknis Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setidaknya melaksanakan 4 program, 9 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.862.680.153,-. Besaran anggaran tersebut berkurang sebanyak 0,11% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 15.879.486.466,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.133. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	Program Pendaftaran Penduduk	100	ST	1.979	ST
2	Program Pencatatan Sipil	125	ST	2.220	ST

3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-
	Rata-Rata Capaian Urusan	**101,39**	**ST**	**226,56**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat dua program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan rata-rata capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan adalah sebesar 101,39% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 226,56% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.134. Indikator Kiinerja Program
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.5 Indeks Kepuasan Masyarakat				
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Memiliki KTP-El	%	95	99,7
	Persentase Indentitas Kependudukan Digital (IKD)	%	10	10,31
	Persentase Anak Ber KIA	%	26	27
Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta kematian	%	50	50
	Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	%	90	91,12
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	50	38
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan yang terselesaikan	Dokumen	1	1

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mencapai target kinerja perencanaan. Hanya ada satu program yang tidak mencapai target

kinerja yakni Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian kinerja sebesar 38% dari target kinerja sebesar 50%.

2.2.3.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara teknis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setidaknya melaksanakan 5 program, 9 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.948.177.471,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 8,33% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 14.721.930.671,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.135. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Program Penataan Desa	602,53	ST	99,92	ST
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	350,00	ST	98,23	ST
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2394,36	ST	3,87	SR
4	Program Pemberdayaan Lembagakemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakathukum Adat	125,00	ST	67,67	S
	Rata-Rata Capaian Urusan	**867,97**	**ST**	**325,13**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat empat program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar 867,97% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 325,13% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Untuk

mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.136. Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 3.5 Meningkatnya Pembangunan di Wilayah Pedesaan				
Program Penataan Desa	Presentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	%	33.33	100
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	%	33.33	100
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Percentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Tertib	%	33.33	100
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	100	79.17

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mencapai target kinerja perencanaan. Hanya ada satu program yang tidak mencapai target kinerja yakni Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan capaian kinerja sebesar 79,17% dari target kinerja sebesar 100%.

2.2.3.14 Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Secara teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 9 program, 27 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.481.010.612,-. Besaran anggaran tersebut berkurang sebanyak 2,10% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 38.288.192.965,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.137. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.14	Pengendalian Penduduk dan KB				
1	Program Pengendalian Penduduk	12,50	SR	93,88	ST
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	38,15	SR	92,36	ST
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	30,83	SR	99,89	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**27,16**	**SR**	**95,53**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana terdapat tiga program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana adalah sebesar 27,16% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 95,53% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.138. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan				
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	100	100
Sasaran 1.3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk				
Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2.23	2.15
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (MCPR)	%	70.8	71.75

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencapai target kinerja perencanaan.

2.2.3.15 Urusan Perhubungan

Secara teknis Urusan Perhubungan dalam hal ini diampu oleh Dinas Perhubungan. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Perhubungan setidaknya melaksanakan 3 program, 16 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.026.049.203,-. Besaran anggaran tersebut berkurang sebanyak 0,55% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 60.355.380.570,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.139. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perhubungan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Cap.Kinerja	Predikat Kinerja	Rata-Rata Cap.Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.15	Perhubungan				
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100,33	ST	97,16	ST
2	Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	ST	96,61	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**100,17**	**ST**	**97,16**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Perhubungan terdapat dua program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan rata-rata capaian kinerja urusan Perhubungan adalah sebesar 100,17% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 97,16% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perhubungan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.140. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 3.2 Meningkatnya Aksebilitas Wilayah				
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	%	97,92	71,43
Program pengelolaan pelayaran	Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	%	96,25	68,49

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa seluruh indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan tidak mencapai target kinerja perencanaan

dimana diantaranya ialah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan capaian kinerja sebesar 71,43% dari target kinerja sebesar 97,92% dan Program pengelolaan pelayaran dengan capaian kinerja sebesar 68,49% dari target kinerja sebesar 96,25%

2.2.3.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Secara teknis Urusan Komunikasi dan Informatika dalam hal ini diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik setidaknya melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.106.723.474,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 45,28% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 35.176.890.693,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.141. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16	Komunikasi dan Informatika				
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	34,99	SR	97,63	ST
2	Program Aplikasi Informatika	197,50	ST	65,60	S
	Rata-Rata Capaian Urusan	**85,60**	**T**	**85,49**	**T**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada Urusan Komunikasi dan Informatika terdapat dua program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pangan adalah sebesar 85,60% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 85,49% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.142. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

Sasaran Strategis / rogram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah				
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Yang Terkelola	%	100	100

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa seluruh indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah mencapai target kinerja perencanaan.

2.2.3.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Secara teknis Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam hal ini diampu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah setidaknya melaksanakan 7 program, 14 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.013.175.531,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 15,59% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 6.932.699.232,-.

Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.143. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	81,05	T	106,36	ST
2	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	100,00	ST	99,78	ST
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100,00	ST	61,79	R
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	66,67	R	117,83	ST
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	100,00	ST	125,87	ST
6	Program Pengembangan Umkm	50,00	SR	73,29	S
	Rata-Rata Capaian Urusan	**82,95**	**T**	**107,68**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat enam program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan rata-

rata capaian kinerja urusan Pangan adalah sebesar 82,95% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 107,68% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.144. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 2.3 Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha				
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	67,02	65,21%
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	48,40	46,45%
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	%	0,45	0,06%
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan	%	40	20,73%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Presentase Usaha mikro yang diberdayakan	%	20	26,40%
Program Pengembangan UMKM	Presentase Usaha Mikro yang dikembangkan	%	20	27,40%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa sebagian besar indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tidak mencapai target kinerja perencanaan. Dari 6 program yang dilaksanakan, hanya 2 program yang telah mencapai target kinerja dimana diantaranya ialah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM. Sementara 4 program lainnya tidak mencapai target.

2.2.3.18 Urusan Penanaman Modal

Secara teknis Urusan Penanaman Modal dalam hal ini diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setidaknya melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.558.233.286,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 13,64% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 8.410.622.703,-. Adapun rata-rata capaian

program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.145. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.18	Penanaman Modal				
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100,00	ST	74,96	S
2	Program Promosi Penanaman Modal	50,00	SR	159,36	ST
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	169,59	ST	87,43	T
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	75,00	S	400,68	ST
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100,00	ST	14,63	SR
	Rata-Rata Capaian Urusan	**98,92**	**ST**	**124,39**	**ST**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada urusan Penanaman Modal terdapat lima program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rata-rata capaian kinerja urusan Penanaman Modal adalah sebesar 98,92% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 124,39% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.146. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 2.3 Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha				
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal	%	100	100
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	100	100
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	KBLI	882	3394
Sasaran 4.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan	%	100	100%

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	84	78.03

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa hampir keseluruhan indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mencapai target kinerja perencanaan. Hanya ada satu program yang tidak mencapai target kinerja yakni Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian kinerja sebesar 78,03% dan target kinerja sebesar 84%.

2.2.3.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Secara teknis Urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam hal ini diampu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga setidaknya melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.587.460.310,-.

Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 16,27% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 32.328.421.295,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.147. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Cap. Kinerja	Predikat Kinerja	Rata-Rata Cap. Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.19	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	119,64	ST	114,33	ST
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100	ST	86,66	T
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	286,23	ST	119,52	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	**135,29**	ST	**118,49**	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga terdapat tiga program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pangan adalah sebesar 135,29% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 118,49% atau dengan kriteria penilaian

realisasi kinerja Sangat Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.148. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 1.5 Meningkatnya Kontribusi Pemuda Dalam Pembangunan				
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Layanan Kepemudaan	%	10,30	10,34
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Pemuda yang Aktif Pada Organisasi Kepramukaan	%	5	5,77
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	poin	0.67	0,67
	Indeks SDM Keolahragaan	poin	0.31	0,31
	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	poin	0.38	0,38
	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Jumlah	50	201

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa seluruh indikator program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga telah mencapai target kinerja perencanaan.

2.2.3.20 Urusan Statistik

Secara teknis Urusan Statistik dalam hal ini diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik setidaknya melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.106.723.474,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 45,28% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 35.176.890.693,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.149. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16	Statistik				
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	77,39	S	87,97	T

	Rata-Rata Capaian Urusan	**77,39**	**S**	**87,97**	**T**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada Urusan Statistik terdapat satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pangan adalah sebesar 77,39% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang, sementara untuk capaian keuangan sebesar 87,97% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.150. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Statistik Tahun 2024

Sasaran Strategis / rogram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah				
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Poin	2	3

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Urusan Statistik telah mencapai target kinerja perencanaan.

2.2.3.21 Urusan Persandian

Secara teknis Urusan Persandian dalam hal ini diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Pada APBD Perubahan Tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik setidaknya melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.106.723.474,-. Besaran anggaran tersebut bertambah sebanyak 45,28% jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang tertuang dalam Dokumen RKPD sebesar Rp. 35.176.890.693,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.151. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16	Persandian				
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	59,95	R	81,58	T

	Rata-Rata Capaian Urusan	**59,95**	**R**	**81,58**	**T**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, pada Urusan Statistik terdapat satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan rata-rata capaian kinerja urusan Pangan adalah sebesar 59,95% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 81,58% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.152. Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Urusan Persandian Tahun 2024

Sasaran Strategis / rogram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Sasaran 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah				
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi Pemerintah	Poin	2	3

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 dapat dikatakan bahwa Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Urusan Statistik telah mencapai target kinerja perencanaan.

2.2.3.22 Urusan Kebudayaan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 8 program, 18 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.049.840.642,- . Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.153. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.22	Kebudayaan				
1	Program Pengembangan Kebudayaan	431,94	ST	93,34	ST

2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	66,67	S	93,97	ST
3	Program Pembinaan Sejarah	85	T	60,79	R
4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	174,72	ST	95,13	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	189,58	ST	91,68	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Kebudayaan adalah sebesar 35,16% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 38,96% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 melaksanakan 2 program,4 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.577.782.782,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.154. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 2.2.b Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan Dalam Mendukung Pariwisata				
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	35	25,00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	%	8,58	8,58
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sumber daya manusia/lembaga dan informasi sejarah	%	51	51,00
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan	%	50	55,00

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 terdapat target Indikator Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada urusan kebudayaan yang tidak tercapai yaitu persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan.

2.2.3.23 Urusan Perpustakaan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Urusan Perpusatakaan dilaksanakan oleh Disarpus melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.811.301.405,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024, yaitu:

Tabel 2.155. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.23	Perpustakaan				
1	Program Pembinaan Perpustakaan	90	T	98,78	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	90	T	98,78	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Perpustakaan adalah sebesar 290,3% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk rata-rata capaian keuangan sebesar 100,01% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.276.405.845,-.Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.156. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 1.2.a Harapan Lama Sekolah				
IKS 1.2.b Rata-Rata Lama Sekolah				
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	48.42	64.74

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target indikator program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan urusan perpustakaan telah tercapai.

2.2.3.24 Urusan Kearsipan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.811.301.405,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.157. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kearsipan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.24	Kearsipan				
1	Program Pengelolaan Arsip	100.00	ST	98,65	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100.00	ST	98,65	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Kearsipan adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 98,65% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.276.405.845,-.

Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan urusan kearsipan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.158. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Arsip dan Perpustakaan Urusan Kearsipan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.6 Indeks Kearsipan				
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat pemenuhan penyelamatan dan perlindungan arsip	Level	0	0
	Nilai pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	63,24	74,65

Program Pengelolaan Arsip	Nilai pengawasan kearsipan internal	Nilai	50,21	65.96
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Fasilitasi perizinan penggunaan arsip	SOP	0	0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 terdapat target indikator program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan urusan kearsipan telah tercapai.

2.2.3.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan 11 program, 29 kegiatan dan 72 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 27.883.302.205,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.159. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Cap. Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.25	Kelautan dan Perikanan				
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100	ST	99,45	ST
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100	ST	99,65	ST
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	100	ST	99,82	ST
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	ST	99,82	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100	ST	99,66	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 99,66% atau dengan kriteria penilaian

realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 melaksanakan 11 program, 29 kegiatan dan 72 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.165.479.805,- .Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.160. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 2.1.a Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB				
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Jumlah Nelayan Tangkap yang terdaftar	%	25	25
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Jumlah Unit usaha budidaya dan pembenihan perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB	Unit	30	32
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Kesadaran Nelayan terhadap Penangkapan Ikan yang Baik	%	5	5
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan ikan yang menerapkan SSOP	%	42.31	42.31

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 terdapat target Indikator Program Dinas Perikanan dan Peternakan urusan kelautan dan perikanan telah tercapai.

2.2.3.26 Urusan Pariwisata

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan pariwisata melaksanakan 8 program, 18 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.049.840.642,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.161. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pariwisata

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.26	Pariwisata				

1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100	ST	104,69	ST
2	Program Pemasaran Pariwisata	125	ST	125	ST
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0	SR	0	SR
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	122,50	ST	139,30	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	115,83	ST	114,42	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Pariwisata adalah sebesar 72,42% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang, sementara untuk capaian keuangan sebesar 41,08% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 melaksanakan 8 program, 18 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 12.980.117.867,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan pariwisata Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.162. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan Pariwisata Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 2.2.a Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB				
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Desitinasi Wisata yang dikembangkan	%	33,33	25
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah kunjungan Wisatawan	%	12,86	-29.00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan yang Akan Didaftarkan HAKI	%	0	0
Program Pengembangan	Persentase sumber daya manusia pariwisata yang	%	34,78	9,78

Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	ditingkatkan kompetensinya			
	Persentase sumber daya manusia ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	%	29,27	7,32
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi sertifikasi profesi dan kompetensinya	%	24,39	7,32

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun target indikator kinerja program urusan pariwisata tidak ada yang tercapai.

2.2.3.27 Urusan Pertanian

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 2 (Dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang melaksanakan 8 program, 16 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 49.507.163.466,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.163. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Cap. Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27	Pertanian (DKPP)				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	104,17	ST	62,02	R
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19,44	SR	33,85	SR
3	Program Penyuluhan Pertanian	63,75	R	96,25	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	348,89	ST	87,27	T

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketanan Pangan dan Pertanian adalah sebesar 348,89% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 87,27% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 melaksanakan 8 program, 16 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.877.092.452,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.164. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 2.1.a Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB				
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun	%	100	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	365,883	358,812
	Produksi pertanian tanaman hortikultura (sayuran dan buah"an)	ton	110,886	112,943
	Produksi pertanian tanaman hortikultura (tanaman hias)	tangkai	124.643.635	117.112.085
	Produksi pertanian tanaman perkebunan	ton	9,409	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase penanggulangan bencana pertanian	%	90	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi perizinan usaha	%	75	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM penyuluh pertanian	%	76,79	
	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	16,73	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu Jumlah Produksi Komodistas Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan) Nilai Tukar Petani dan Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis

Perangkat Daerah ke 2 (dua) yang melaksanakan urusan pertanian adalah Dinas Perikanan dan Peternakan yang melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 27.883.302.205,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.165. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.27	Pertanian (Dispernakan)				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100	ST	99,25	ST
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	ST	59,07	R
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	ST	103,62	ST
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	ST	99,33	ST
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	50	SR	50	SR
6	Program Penyuluhan Pertanian	0	SR	95,16	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	75	S	96,40	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebesar 75% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang, sementara untuk capaian keuangan sebesar 96,40% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Dinas Perikanan dan Perikanan Tahun 2024 melaksanakan 11 program, 29 kegiatan dan 72 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.165.479.805,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program Dinas Perikanan dan Perikanan Tahun 2024, disajikan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.166. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 2.1.a Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB				

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	100	100
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kelahiran ternak	%	83	80
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	100	100
	Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	85	85
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok peternak yang naik kelas	%	16	16
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	80	80

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 terdapat Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu Persentase Kelahiran ternak.

2.2.3.28 Urusan Perdagangan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 9 program, 23 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.430.384.075,- . Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.167. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perdagangan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.28	Perdagangan				
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	50	SR	50	SR
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100	ST	795,83	ST
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	77,78	T	3626,18	ST
4	Program Pengembangan Ekspor	105	ST	173,23	ST
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	0	SR	0	SR

6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0	SR	0	SR
	Rata-Rata Capaian Urusan	55,46	R	508,37	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebesar 55,46% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 508,37% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 melaksanakan 9 program, 23 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.430.384.075,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.168. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 2.1.b Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB				
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	%	50	50
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang dan jasa	Milyar	2,500	2,500
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	%	10	10
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	33	33
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Presentase pelaku usaha terfasilitas dalam pemasaran produk dalam negeri	%	100	100
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	10	10

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan urusan perdagangan tahun 2024 telah tercapai.

2.2.3.29 Urusan Perindustrian

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 9 program, 23 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.092.656.195,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.169. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.29	Perindustrian				
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	102,08	ST	636,20	ST
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	0	SR	0	SR
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50	SR	198,31	R
	Rata-Rata Capaian Urusan	50,69	R	626,11	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Disperindag adalah sebesar 50,69% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 626,11% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 melaksanakan 9 program, 23 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.430.384.075,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.170. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Urusan Industri Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 2.1.c Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB				

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan IKM	%	45	45
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri yang berizin	%	63,36	63,36
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	%	30,38	30,38

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan urusan industri tahun 2024 telah tercapai.

2.2.3.30 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Urusan Pendukung Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dilaksanakan oleh 2 Perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program, 20 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 91.096.544.320,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah:

Tabel 2.171. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01	Sekretariat Daerah				
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	ST	168,74	ST
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	100	ST	938,54	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	100	ST	262,82	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 262,82% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya

dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Tahun 2024 melaksanakan 3 program, 20 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 84.893.876.460,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Sekretariat Daerah Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.172. Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.1 Nilai SAKIP Pemda				
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase data dan informasi bid. Perekonomian yang di gunakan sebagai policy brief	%	85	80
	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	87	85
	Center of excelent pengadaan barang jasa	%	85	100
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	85	100
	Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	%	87	85
	Persentase Perda yang ditetapkan	%	85	85,71
	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	85	80

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 indikator program pada tahun 2024 yang tidak tercapai yaitu Persentase data dan informasi bid. Perekonomian yang di gunakan sebagai policy brief, Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief, Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti.

Sementara itu untuk Urusan Pendukung Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dilaksanakan juga oleh daerah yaitu Sekretariat DPRD yang melaksanakan 2 program, 18 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 118.064.894.201,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.173. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.02	Sekretariat DPRD				
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	183,87	ST	132,56	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	183,87	ST	132,56	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DRPD adalah sebesar 183,87% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 132,56% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Tahun 2024 melaksanakan 2 program, 18 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 128.240.384.086,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Sekretariat DPRD Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.174. Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.2.1.a Indeks Kepuasan Masyarakat				
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks	84,75	82,91

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Sekretariat DPRD tahun 2024 tidak tercapai.

2.2.3.31 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 20223Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 4 program, 17 kegiatan dan 70 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 18.181.151.368,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.175. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

5.01	Perencanaan				
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95,83	ST	63,97	R
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	88,63	T	97,26	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	92,23	ST	79,30	T

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebesar 92,23% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 79,30% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 melaksanakan 4 program, 17 kegiatan dan 70 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17,696,213,818,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.176. Capaian Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.1 Nilai SAKIP Pemda				
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	100	100
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	%	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Keuangan dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah yaitu BKAD melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 598.383.720.749,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.177. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02	Keuangan				
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	81,68	T	85,41	T
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	86,39	T	120,14	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	84,03	T	102,77	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar 84,03% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 102,77% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 556.829.324.449,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.178. Capaian Indikator Kinerja Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.2 Opini BPK terhadap LKPD				
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai standar dan peraturan yang berlaku	%	100	100
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan aset daerah	%	87	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Persentase peningkatan pengelolaan aset daerah pada tahun 2024 tidak tercapai. Perangkat daerah selanjutnya yang melaksanakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Keuangan yaitu Badan Pendapatan Daerah yang dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 melaksanakan 2 program, 7 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 32.469.043.799,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.179. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.02	Keuangan				
1	Program Pengelolaan Pendapaan Daerah	86,39	T	120,14	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	86,39	T	120,14	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar 86,39% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 120,14 % atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 melaksanakan 2 program, 7 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.835.272.671,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.180. Capaian Indikator Kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.2 Opini BPK terhadap LKPD				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3	15,98

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target Indikator Program Badan Pendapatan Daerah telah tercapai.

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 program, 12 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 18.638.557.315,-. Adapun rata-rata capaian

program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.181. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.03	Kepegawaian				
1	Program Kepegawaian Daerah	97,22	ST	112,31	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	97,22	ST	112,31	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar 99,32% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 112,33% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.902.690.015,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.182. Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.3 Indeks Merit				
Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	106,5	120
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	27,5	30
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Nilai	102,5	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 bidang urusan Kepegawain telah tercapai. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh BKPSDM yang dalam RKPD Perubahan Tahun 2024 melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.18.638.557.315,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.183. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	50	SR	193,71	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	50	SR	193,71	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar 100% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 120,91% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) BKPSDM tahun 2024 melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.902.690.015,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.184. Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.3 Indeks Merit				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Nilai	67,5	82,5

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui target indikator kinerja untuk urusan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 tidak tercapai. Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk Unsur Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 4 program, 17 kegiatan dan 70 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 18.181.151.368,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.185. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	66,67	S	94,19	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	66,67	S	94,19	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebesar 66,67% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sedang, sementara untuk capaian keuangan sebesar 94,19% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Bappelitbangda Tahun 2024 melaksanakan 4 program, 17 kegiatan dan 70 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17,696,213,818,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Bappelitbangda Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.186. Capaian Indikator Kienerja Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.1 Nilai SAKIP Pemda				
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,6	42,20

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui target indikator kinerja untuk urusan penelitian dan pengembangan tahun 2024 tidak tercapai.

2.2.3.32 Pengawasan Urusan Pemerintahan

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 23.021.080.364,-.

Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.187. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.01	Pengawasan				
1	Progam Penyelenggaraan Pengawasan	62,90	R	312,71	ST
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	62,50	R	70,84	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	62,70	R	210,71	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah adalah sebesar 62,70% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Rendah, sementara untuk capaian keuangan sebesar 210,71% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Tahun 2024 melaksanakan melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 23.147.590.364,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Inspektorat Daerah Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.188. Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 4.1 Nilai SAKIP Pemda				

Program Penyelenggaraan Pengawasan	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai / Kategori	71 (BB)	68,85(B)
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Level	Level 3	Level 3
IKS 4.2 Opini BPK terhadap LKPD				
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	70	76,7

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat satu target indikator kinerja inspektorat daerah yang tidak tercapai yaitu Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah.

2.2.3.33 Unsur Pemerintahan Umum

Dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 program, 9 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 52.037.329.012,-. Adapun rata-rata capaian program baik kinerja maupun keuangan berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.189. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Keuangan Program Unsur Pemerintahan Umum

No	Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Capaian Keuangan	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100	ST	217,19	ST
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	ST	1552,01	ST
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	ST	163,06	ST

4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	75	S	424,28	ST
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	ST	150,05	ST
	Rata-Rata Capaian Urusan	95	ST	944,04	ST

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar 95% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, sementara untuk capaian keuangan sebesar 944,04% atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi. Selanjutnya dalam dokumen pelaksanaan perubahan angggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 melaksanakan 6 program, 9 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.145.946.112,-. Untuk mengetahui capaian Indikator Program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.190. Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
IKS 6.2 Persentase Konflik Sosial yang Ditangani				
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	75	91,30
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	84	100
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitasi Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	65	100
IKS 6.3 Presentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat				

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	86	88,89
Program Peningkatan Peran Partai Politik & Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Fasilitasi Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	60	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Bandung Barat (2025)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui seluruh target kinerja Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tercapai.

2.2.4 Permasalahan Umum Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi hasil akhir dari pencapaian kinerja tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap realisasi kinerja RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 beserta data dan fakta yang telah diolah, Tim Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda telah merumuskan beberapa permasalahan umum yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran. Adapun permasalahan umum sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan dalam rangkuman sebagaimana berikut:

1. **Perumusan indikator dan target kinerja pada dokumen perencanaan tidak didasarkan pada permasalahan, metode dan tata cara perhitungan yang jelas**

   Dalam penyusunan dokumen perencanaan, perumusan indikator kinerja memiliki fungsi yang penting dimana indikator kinerja dapat menggambarkan keberhasilan suatu pembangunan dan bagaimana permasalahan daerah dapat teratasi. Dalam dokumen perencanaan indikator kinerja ada pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan, sampai pada sub kegiatan. Berdasarkan hasil penelaahan dan analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan perumusan indikator kinerja dimana diantaranya ialah:

   a. Penentuan indikator kinerja terkadang tidak menggambarkan permasalahan yang sebenarnya (aktual dan faktual). Dalam hal ini penentuan indikator kinerja tentu harus di dasarkan pada permasalahan yang terjadi sehingga pembangunan yang berjalan menjadi solusi alternatif bagi permasalahan daerah.

b. Penentuan indikator kinerja cenderung mengabaikan kriteria SMART (*Specific, Measurable*, *Attainable*, *Relevant, and Timely*).

c. Beberapa indikator kinerja (Sasaran/Program) tidak memiliki tata cara perhitungan yang jelas sehingga menyebabkan sulit untuk melakukan kalkulasi dan penghitungan capaian kinerja. Hal ini salah satunya disebabkan oleh RPJMD/Renstra yang tidak dilengkapi dengan dokumen metadata yang berisi tentang penjelasan detail kegunaan, fungsi dan tata cara penghitungan indikator (tujuan, sasaran, dan program).

d. Penentuan target kinerja pada level perangkat daerah terkadang tidak didasarkan pada teknik proyeksi dan perhitungan yang jelas dan tepat. Dalam hal penentuan target kinerja terdapat kecenderungan bahwa besaran pagu anggaran menentukan jumlah target kinerja yang ditetapkan. Di sisi lain dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, terdapat beberapa sumber daya lain yang dapat dioptimalkan untuk mendongkrak capaian kinerja pembangunan seperti diantaranya ialah SDM, potensi sumber pendanaan lain, potensi kolaborasi, metode pelaksanaan kegiatan, dan lain sebagainya.

2. Penguatan Isu Strategis dan Permasalahan

Secara etis tujuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ialah untuk mencapai apa yang dinamakan *social walfare* atau kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dokumen perencanaan pembangunan itu sendiri dapat dilihat dari sejauhmana ia menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sejalan dengan perkembangannya, persoalan yang terjadi pada saat ini ialah belum optimalnya proses identifikasi permasalahan dan isu strategis baik yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Bappelitbangda maupun pada level perangkat daerah pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari penentuan isu dan permasalahan yang tidak didasarkan pada data, kedalaman masalah yang diangkat tidak spesifik, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian indikator namun tidak menggambarkan penyelesaian masalah.

3. **Belum optimalnya penataan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi antar perangkat daerah dalam mengintervensi urusan/bidang masalah yang bersifat lintas sektor/*crosscutting***

Dalam konsep perencanaan pembangunan daerah, fungsi dari perencanaan itu sendiri ialah untuk mengatasi isu strategis dan permasalahan daerah. Diantara permasalahan daerah, dirumuskan beberapa yang bersifat kompleks dan multidimensi sehingga memerlukan intervensi dari beberapa perangkat daerah atau bahkan melibatkan lembaga vertikal dan *stakeholder* terkait. Dalam hal ini, menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah sehingga mampu memberikan arah dan kejelasan dalam merumuskan kegiatan yang dapat mengintervensi langsung permasalahan daerah. Sejalan dengan perkembangannya, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum optimal terkait proses sinkronisasi dan harmonisasi fungsi antar perangkat daerah dalam mengatasi permasalahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan/pembangunan yang cenderung bersifat sektoral dan tidak saling mendukung untuk pencapaian tujuan daerah. Kecenderungan tersebut secara langsung mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang salah satunya tercermin dari capaian indikator yang bersifat makro serta kondisi permasalahan yang tidak terselesaikan.

4. **Harmonisasi dan Konsistensi antara RPJMD dan RKPD**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarkan merupakan dokumen strategis 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau RKPD untuk menjamin adanya keselarasan antar dokumen perencanaan. Demikian dalam perkembangannya ada beberapa aspek yang mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara RPJMD dan RKPD. Beberapa diantaranya ialah berkenaan dengan kesesuaian jumlah program pembangunan beserta target dan indikator, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program prioritas.

5. **Rencana Tata Ruang Wilayah belum sepenuhnya dijadikan acuan sebagai matra spasial pembangunan daerah**

Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah salah satunya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial yang memberikan pedoman dan batasan dalam pembangunan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah secara garis besar bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah serta melindungi aspek lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, terdapat potensi permasalahan tata ruang diantaranya ialah alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari inkonsistensi pengaturan dan pelaksanaan pembangunan dalam dokumen perencanaan. Salah satu contohnya ialah tidak adanya kejelasan terkait dengan pengembangan dan penguatan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, perlu melakukan pengembangan kawasan strategis dengan merumuskan program prioritas yang memiliki basis ekologi lingkungan. Sehingga selain dapat meningkatkan efektivitas pembangunan berdasarkan basis kawasan sesuai dengan pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan, pembangunan juga dapat menekan kerusakan lingkungan yang terjadi.

6. Potensi sumber dana lainnya tidak diperhitungkan dalam pencapaian target dokumen perencanaan

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terdapat konsep sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antara pusat dan daerah. Konsep tersebut menegaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan tidaklah berdiri sendiri dan saling berkesinambungan dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi dari konsep tersebut menciptakan skema pendanaan pembangunan antara pusat dan daerah dimana pembangunan di kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota lainnya. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat ialah bahwa potensi sumber pendanaan lain seperti Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus tidak diproyeksikan dan diakumulasikan ke dalam pagu indikatif dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tidak memetakan program dan kegiatan yang potensial untuk dilaksanakan dengan menggunakan sumber pendanaan lain. Akibatnya target kinerja yang ditetapkan dalam

dokumen perencanaan pembangunan tidak optimal/relevan dan sumber pendanaan lain yang diperoleh cenderung tidak mengintervensi target kinerja yang sudah ada karena sudah diintervensi menggunakan APBD.

7. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mencapai apa yang disebut sebagai tujuan daerah, tidak terlepas dari bagaimana tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Berdasarkan data capaian sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terlihat bahwa ada ketidaksesuaian antara rata-rata capaian program dengan capaian program yang sesungguhnya. Hal ini terlihat dari beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak berdampak secara langsung terhadap pencapaian indikator program, tujuan, dan sasaran. Kondisi yang demikian setidaknya telah mengindikasikan adanya pelaksanaan kegiatan tidak memiliki konsep dan arah yang jelas, belanja yang tidak tepat sasaran serta tidak berorientasi pada masalah aktual dan faktual. Hal tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh beberapa kondisi mulai dari kondisi sumber daya manusia, kondisi keuangan daerah, dan komitmen pimpinan

8. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang masih belum optimal

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan menjadi salah satu proses penting yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Secara garis besar tujuan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan ialah memastikan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah direncanakan, memberikan masukan yang valid untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa depan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi kepala daerah dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks evaluasi hasil RPJMD, setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang cukup krusial dimana diantaranya ialah:

a. Pengendalian dan evaluasi dianggap tidak memiliki urgensi dimana sebagian besar ASN/perangkat daerah hanya menganggap sebuah formalitas atau sebatas pelengkap pada dokumen perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya dokumen/laporan evaluasi renstra yang seharusnya disusun dan disampaikan oleh perangkat daerah kepada Kepala Daerah melalui Bappelitbangda. Di sisi lain,

sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi hasil renstra memiliki peranan yang cukup penting sebagai sumber dalam penyusunan evaluasi RPJMD.

b. Pada intern Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) hanya dilakukan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kondisi sumber daya manusia yang terbatas. Dalam hal ini, proses pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan seharusnya juga dilakukan oleh seluruh mitra bidang perencana sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari proses pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud.

2.2.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Selain permasalahan umum yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Sub Bab ini juga akan menjelaskan tentang bagaimana faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh perangkar daerah. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat kondisi hubungan kausalitas dokumen perencanaan antara RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Identifikasi faktor pendorong dan penghambat dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis realisasi kinerja perangkat daerah yang tergambar pada capaian indikator. Selain itu identifikasi juga dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data dan fakta yang kemudian diolah menjadi narasi yang saling berkesinambungan dengan capaian kinerja perangkat daerah. Adapun tujuan dilakukannya identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat ialah untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menjadi masukan dan bahan perbaikan untuk penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. Adapun penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.191. Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Barat Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	*Dinas Pendidikan*	*1. Urusan Pendidikan menjadi salah satu isu dan prioritas dalam pembangunan sehingga memiliki sumber dana lain di luar APBD.*	*1. Tidak tersedianya analisis data dan road map terkait dengan prioritas pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah sehingga penentuan lokus/sekolah tidak memiliki dasar dan terkesan sporadis.*

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			2. Terdapat inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra-Renja-DPA) sehingga menyulitkan untuk melakukan perhitungan rata-rata capaian kinerja. Hal ini diakibatkan oleh tidak optimalnya dalam penyusunan dokumen perencanaan. 3. Adanya keterbatasan perangkat daerah dalam memahami tata cara pengisian formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (Formulir E.81).
2	Dinas Kesehatan	1. Peningkatan efisiensi dalam layanan internal perangkat daerah melalui digitalisasi dan integrasi sistem informasi. 2. Kerjasama antar perangkat daerah yang berjalan optimal dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah. 3. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan optimal dalam perluasan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat awam. 4. Terlaksananya pelatihan, workshop, dan pendidikan yang dilakukan oleh berbagai unsur yang secara langsung mempengaruhi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. 5. Adanya pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana pada RSUD di Kabupaten Bandung Barat sebagai rumah sakit rujukan sehingga turut meningkatkan layanan kesehatan. 6. Optimalisasi penggunaan e-katalog untuk pengadaan farmasi dan alat kesehatan sehingga menjadi lebih efisien dan transparan. 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan yang menjadi stimulus untuk meningkatkan perilaku hidup sehat.	1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas dimana kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi persoalan terutama di daerah-daerah pelosok. 2. Keterbatasan fasilitas kesehatan dan obat-obatan di Faskes Pertama di daerah-daerah pelosok. 3. Keterbatasan anggaran dalam rangka memperluas dan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. 4. Kurangnya data kesehatan yang akurat dan sistematis untuk mendukung perencanaan program. 5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap obat ilegal, alat kesehatan tidak standar, dan makanan/minuman berbahaya belum dilakukan secara optimal. 6. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi layanan kesehatan.

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
3	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	1. Dukungan kebijakan dan anggaran baik pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Bandung Barat. 2. Kerjasama dan kolaborasi dengan Pihak Ketiga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan infrastruktur.	1. Masih banyaknya permasalahan genangan air yang terjadi pada saat musim penghujan. 2. Faktor iklim dan cuaca yang tidak pasti seikit banyaknya menjadi penghambat dalam pelaksanaan kinerja fisik. 3. Pembangunan infrastruktur terhambat oleh masalah pembebasan lahan baik secara administrasi, sosial, maupun teknis di lapangan. 4. Keterbatasan data terkait sumber air permukaan yang belum terpetakan. 5. Adanya refocusing anggaran pada beberapa kegiatan.
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	1. Adanya percepatan proses administrasi dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Penguatan aspek koordinasi antar personal dan organisasi sehingga secara langsung dapat meningkatkan efektivitas kinerja dinas.	1. Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 2. Terdapat beberapa tanah Pemerintah Daerah yang dikalaim oleh masyarakat. 3. Penerapan SPM Bencana masih memiliki kendala teknis terkait alur usulan masyarakat. 4. UPTD Pertamanan masih masih Menginduk pada Bidang Perumahan.
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Adanya koordinasi yang baik antar internal instansi dan lintas lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan. 2. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda/Perkada.	1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas dan tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Bandung Barat. 2. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Urusan kebencanaan menjadi urusan multisektor dimana melibatkan dukungan berbagai instansi dan elemen masyarakat. Di sisi lain koordinasi dan kolaborasi sudah dilakukan secara optimal.	1. Banyak ditemukan inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra-Renja-APBD) sehingga beberapa target kinerja tidak dapat dicapai atau terhitung. 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan kebencanaan sehingga menimbulkan kerentanan masyarakat terhadap bahaya risiko bencana.

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Standar operasional prosedur pelayanan yang diterapkan secara konsisten.	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas sehingga mempengaruhi kualitas layanan.
8	Dinas Sosial	1. Terbentuknya mitra strategis Dinas Sosial mulai dari lembaga kesejahteraan, TKSK, TRC, Puskesos, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang secara langsung memberikan kontribusi dalam pencapaian target kinerja dinas. 2. Penguatan koordinasi dan sinergitas antar lembaga dan mitra dinas sosial, terutama di pelayanan kedaruratan. 3. Adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi.	1. Akurasi dan validitas data terkait jumlah dan jenis pemerlu kesejahteraan sosial masih menjadi permasalahan. 2. Pembentukan lembaga mitra strategis Dinas Sosial seperti Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) masih belum merata eksistensinya di setiap desa. 3. Bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi tidak terlalu efektif dalam pencapaian target kinerja karena sejak awal tidak pernah diperhitungkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Adanya program pemerintah pusat yang secara langsung menstimulan atmosfer ketenaga kerjaan di Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya ialah terkait implementasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan menggunakan Aplikasi Siap Kerja.	1. Belum adanya tenaga/pegawai instruktur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. 2. Belum memadainya sarana dan prasarana gedung dan peralatan pelatihan di UPTD BLK.
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A	1. Pemanfaatan Media sosial sebagai sarana KIE tentang Program Bangga Kencana dan PPPA. 2. Dukungan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Operasial Pembrdayaan Perempuan perlindungan Anak (BOPPA).	1. Strategi kelembagaan dan pengarustamaan gender dalam pelaksanaan kebijakan dan program di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat masih belum berjalan efektif. 2. Keterbatasan kompetensi SDM dalam penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak masih terbatas.
11	Dinas Lingkungan Hidup	1. Tersedianya personil/tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan dinas terutama dalam rangka penyusunan kajian DDDTL. 2. Kolaborasi dan sinergitas antar lembaga yang terjalin terutama dengan pihak laboratorium lingkungan. 3. Penerapan sistem berbasis aplikasi teknologi baik yang dikembangkan oleh pemerintah	1. Adanya pembatasan pencairan anggaran sehingga pelaksanaan pekerjaan sebagian besar dilakukan pada akhir triwulan. 2. Kurangnya integrasi kebijakan program dan kegiatan pada tataran lintas sektor terkait dengan pengelolaan lingkungan. 3. Berubah-ubahnya penempatan tusi pertamanan pada struktur organisasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		pusat maupun daerah secara langsung meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah. 4. Environmental telah berkembang menjadi isu strategis sehingga mendorong terciptanya berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.	Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga dokumen perencanaan menjadi tidak sinkron dan tidak dapat terhitung capaian kinerja. 4. Kurangnya personil PPLH untuk melakukan pengawasan lingkungan.
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Akta Catatan Sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik.	1. Kurangnya kebijakan teknis dalam pencarian, permintaan serta penyebarluasan data kependudukan serta kurangnya awareness terhadap keamanan informasi dan data pada perangkat daerah.
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Partisipasi aktif dari lembaga-lembaga mitra strategis seperti Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Posyandu, Karang Taruna), APDESI, APBEDNAS serta instansi vertikal lainnya. 2. Dukungan sumber pendanaan dari Provinsi Jawa Barat untuk beberapa kegiatan.	1. Kapasitas sumber daya manusia perangkat desa yang masih terbatas dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan.
14	Dinas Perhubungan	1. Komitmen pimpinan dan semua pegawai terhadap optimalisasi kinerja. 2. Optimalnya sinergitas dan koordinasi yang terjalin dengan Stakeholder terkait.	1. Sulitnya untuk mengetahui informasi tentang manajemen keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. 2. Masih banyaknya pihak swasta yang tidak memiliki mengurus perizinan perparkiran. 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung kinerja dinas maupun UPTD.
15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik		1. Keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanaan tugas yang cenderung tidak sebanding dengan beban kerja. 2. Belum terbangunnya kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan sistem kehumasan termasuk media sosial sehingga cenderung tidak berjalan harmonis dan efektif.

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Adanya dukungan Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan peningkatan dan penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. 2. Penguatan jaringan kemitraan antara UMKM dengan berbagai pihak mulai dari sesama pelaku UMKM, Akademisi, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Sehingga membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan saling menguntungkan. 3. Masifnya penyelenggaraan kegiatan fasilitasi UMKM seperti pameran produk, promosi, dan bazar yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.	1. Koordinasi dan sinergitas antar internal dinas yang belum berjalan efektif. 2. Banyaknya kasus koperasi bermasalah yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat untuk berkoperasi.
17	Dinas Penanaman Modal PTSP	1. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan melakukan pengembangan pada aplikasi teknologi informasi bagi para pelaku usaha. 2. Segmentasi pasar yang masih terbuka luas dalam berinvestasi di Kabupaten Bandung Barat. 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	1. Belum optimalnya mekanisme pendataan pelaku usaha sehingga mempengaruhi validitas data. 2. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan jika mengacu pada rekomendasi Kemendagri dan BKPM. 3. Data potensi dan peluang investasi yang masih belum teridentifikasi dan tersusun secara sistematis sehingga mempengaruhi efektivitas promosi yang ditawarkan kepada calon investor. 4. Promosi investasi yang dilaksanakan cenderung tidak efektif.
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1. Terjalinnya komunikasi dan koorinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam upaya mencapai output kinerja.	1. Penetapan indikator dan target kinerja tidak konsisten serta tidak didasarkan pada analisis tugas dan fungsi serta permasalahan yang ada. 2. Proses pencairan anggaran yang dibatasi dan cenderung mendekati batas akhir waktu pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi pada pemenuhan target kinerja yang tidak tepat waktu.

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Dorongan pemerintah pusat-daerah terkait regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.	1. Masih terbatasnya fasilitas layanan perpustakaan dan digitalisasi perpustakaan yang sejatinya harus dikembangkan. 2. Sebagian besar perangkat daerah masih abai dalam pengelolaan arsip statis.
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	1. Komitmen semua pegawai dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.	1. Kondisi lingkungan waduk dan sungai yang teregradasi oleh pencemaran menjadi hambatan dalam produksi perikanan tangkap dan budidaya. 2. Keterbatasan anggaran dalam menjangkau bantuan sarana dan modal untuk para pembudidaya perikanan. 3. Masih terdapatnya permasalahan dalam pemasaran hasil perikanan seperti penyerapan yang tidak lancar dan fluktuasi harga. 4. Potensi penyakit hewan ternak cenderung sulit untuk terdeteksi secara optimal.
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Dukungan arah dan kebijakan pusat-daerah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.	1. Keterbatasan kondisi keuangan daerah pada penyusunan APBD mengakibatkan beberapa sub kegiatan pada renja tidak tercover pada APBD. 2. Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, usaha pariwisata dan masyarakat. 3. Belum optimalnya perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pariwisata baik pada aturan maupun kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata.
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1. Adanya keterbatasan perangkat daerah dalam memahami proses pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan.
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Sarana dan prasarana yang relatif memadai; 2. Sistem akuntabilitas kinerja yang semakin membaik yang secara langsung mempengaruhi	1. Keterbatasan perangkat daerah baik dari segi kapasitas kelembagaan dan anggaran dalam mengoptimalkan jaringan pemasaran, pemberian fasilitas permodalan, kesadaran produsen

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		kapasitas organisasi dalam mencapai target kinerja.	dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. 2. Produk dalam negeri cenderung masih sulit bersaing. 3. Tidak terbangunnya keterkaitan dan rantai pasok antara industri besar dan industri kecil/menengah.
24	Sekretariat Daerah		1. Penyusunan dokumen perencanaan masih belum optimal dimana masih terdapat inkonsistensi indikator dan target kinerja antar dokumen perencanaan dan penganggaran. 2. Penyusunan kebijakan belum dilakukan secara komprehensif dan berbasis data/bukti yang handal.
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan alur pewaktuan yang telah ditentukan. 2. Adanya dukungan anggaran yang diberikan pada Sekretarian Dewan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	1. Perangkat daerah tidak menyampaikan laporan sistematika evaluasi hasil renja.
26	Inspektorat Daerah	1. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil. 2. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam upaya pencapaian target kinerja.	1. Keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas sehingga kegiatan dilaksanakan tidak optimal.
27	Bappelitbangda	1. Ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. 2. Terbukanya komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pimpinan daerah dan TAPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan proses pengambilan kebijakan.	1. Belum adanya keterpaduan output dan outcome pada pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang dalam penyusunan perencanaan dimana ada kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri. 2. Masih adanya permasalahan terkait perbedaan pemaknaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan.
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1. Adanya dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai dalam pencapaian target kinerja. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi terpadu sebagai alat bantu yang digunakan untuk	1. Masih ditemukan berbagai temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal pada ranah pengelolaan keuangan daerah dimana hal ini mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum optimal.

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.	2. Belum terpenuhinya sumber daya manusia yang berkompeten di masing-masing perangkat daerah menyebabkan belum optimalnya ketepatan data dan waktu dalam penatausahaan keuangan.
29	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	1. Adanya kebijakan pusat yang secara langsung berkontribusi terhadap akselesasi capaian kinerja dinas. 2. Banyaknya kesempatan pengembangan kompetensi ASN terutama dari Kementerian dan Lembaga.	1. Pengembangan kompetensi dan motivasi ASN belum menjadi perhatian serius baik pada level organisasi maupun individu ASN 2. Budaya kerja ASN cenderung belum menunjukan perbaikan yang signifikan.
30	Badan Pendapatan Daerah	1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 2. Adanya penyesuaian dasar hukum di bidang perpajakan yang secara langsung mendorong peningkatan pendapatan daerah	1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terkait pajak dan retribusi. 2. Data potensi pajak dan retribusi daerah belum akurat.
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki urgensi untuk dilaksanakan sehubungan dengan adanya kebijakan pusat. 2. Adanya sinergitas dengan mitra kerja Kesbangpol dalam mendukung setiap capaian target kinerja.	1. Keterbatasan perangkat daerah dalam upaya menjangkau dan mengembangkan budaya demokrasi yang ideal. 2. Kurang efektifnya eksistensi organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan agenda politik dan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. 3. Kurang optimalnya kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas yang bersifat Crosscutting. 4. Penentuan indikator dan target kinerja tidak didasarkan pada konsep dan perhitungan yang jelas sehingga tidak menggambarkan kompleksitas permasalahan yang ada. 5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi mitra dan forum strategis yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan.
32	Kecamatan	1. Sinergitas yang berjalan optimal baik dalam internal kecamatan maupun dengan pihak eksternal seperti lembaga kemasyarakatan, pemangku kepentingan, perangkat desa, dan lain sebagainya.	1. Belum optimalnya pemahaman dan persepsi SDM kecamatan terkait konsep evaluasi dokumen perencanaan. 2. Belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		2. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas. 3. Koordinasi yang baik antar Seksi yang dikoordinasikan oleh Camat dan Sekretaris.	3. Penentuan indikator dan target kinerja tidak didasarkan pada konsep dan perhitungan yang jelas sehingga tidak menggambarkan kompleksitas permasalahan yang ada. 4. Keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. 5. Proses pencairan anggaran yang dibatasi dan cenderung mendekati batas akhir waktu pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi pada pemenuhan target kinerja yang tidak tepat waktu.

Sumber: Evaluasi hasil RKPD Tahun 2023, Bappelitbangda

2.2.6 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Develpoment Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah agenda kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas hak asasi manusia dan kesetaraan, bersifat universal, holistik, terintegrasi, inklusif dan membutuhkan kemitraan dan partisipasi antar pihak. TPB/SDGs memiliki 17 tujuan yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030, adapun 17 tujuan tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu:

1) Pilar Sosial, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia berkualitas, terdiri dari 5 (lima) tujuan:
   - Tujuan 1 Tanpa kemiskinan
   - Tujuan 2 Tanpa kelaparan
   - Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
   - Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
   - Tujuan 5 Kesetaraan Gender
2) Pilar Ekonomi meliputi penyediaan energi untuk semua, faktor penting dalam mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan dan penurunan kemiskinan, terdiri dari 5 (lima) tujuan:
   - Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
   - Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
   - Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
   - Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
   - Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

3) Pilar Lingkungan merupakan landasan semangat transformatif pembangunan berkelanjutan, terdiri dari 6 (enam) tujuan:
   - Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi yang Layak
   - Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
   - Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
   - Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
   - Tujuan 14 Ekosistem Laut
   - Tujuan 15 Ekosistem Daratan
4) Pilar Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 1 (satu) tujuan yaitu tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Untuk mengetahui kesiapan pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat, Bappelitbangda bekerjasama dengan SDGs Center Unpad mengevaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung Barat dengan menganalisis baseline atas 63 indikator (apabila memperhitungkan sub-indikator menjadi 92 indikator) dari 13 tujuan SDGs, 4 tujuan yaitu tujuan 12-Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, tujuan 13-Penanganan Perubahan Iklim, tujuan 14-Ekosistem Lautan, dan tujuan 15-Ekosistem Daratan tidak dianalisis karena keterbatasan data.

Sumber data yang digunakan diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Pusdatin Kemnaker) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes). Hasil evaluasi diperoleh dengan melakukan proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs di tahun 2030 dengan asumsi skema Business As Usual (BAU) kemudian membandingkannya dengan target SDGs yang telah ditentukan.

Apabila hasil proyeksi mencapai atau hampir mencapai (97.5%) target TPB/SDGs maka akan diberikan nilai A (skor 4). Suatu indikator akan diberikan nilai B (skor 3) jika hasil proyeksi pada tahun 2030 mendekati target TPB/SDGs setidaknya 90%. Bernilai C (skor 2) apabila hasil proyeksi lebih dari 75% menuju target TPB/SDGs.

Nilai D (skor 1) diberikan jika hasil proyeksi pencapaian indikator di tahun 2030 setidaknya mencapai 50% dari target TPB/SDGs. Dan bernilai E (skor 0) jika indikator masih cukup jauh untuk mencapai target TPB/SDGs (dibawah 50%). Daftar Indikator Terpilih (Data, Target, Dan Scorecard Indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.192. Daftar Indikator Terpilih (Data, target, dan scorecard indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat

TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025[a]	2030[a]	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	12.67	9.38	10.49	7.82	6.33	6.335	A	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : Data tahun tersebut belum tersedia.
1	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40)(%)	69,91	76.05	b	100	100	100	A	BPS Susenas	2015-2019	
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	47,62	61.80	61.13	66.12	74.02	100	D	BPS Susenas	2002-2019	
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	36,13	34.80	48.05	52.30	54.77	100	D	BPS Susenas	2002-2019	
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (B40)	17.9	13.68	11.87	7.27	4.99	0	B	BPS Susenas	2006-2019	
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat (B40) (%)	96.82	97.33	97.45	99.80	100	100	A	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (B40) (%)	73.51	77.46	72.42	81.13	85.04	100	C	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (B40) (%)	40.03	39.87	51.74	66.56	83.01	100	C	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)	64.25	71.19	77.03	94.14	100	100	A	BPS Susenas	2004-2020	
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	100	100	b	100	100	100	A	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Kontrak/Sewa)	2.60	7.51	3.71	4.99	5.39	38.34	E	Susenas KOR	2010-2020	
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Milik Sendiri)	91.44	83.25	83.89	84.19	83.60	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	5,34[f]	4,2	5,06	3,35	1,93	3,6	A	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2017-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : Data tahun tersebut belum tersedia. c : data 2007. d : data 2013. e : data tahun 2016. f : data tahun 2017. g : data tahun 2018.
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	22,4[d]	b	13,48[g]	17,94	17,94	0	C	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Prov Jabar	2007-2018	
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	16,9	9,4[e]	16,7[f]	13,43	12,93	0	C	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017	
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.(0-59 Bulan)	52,5[d]	b	36,69[g]	44,59	44,59	31,5	C	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Prov. Jabar	2007-2018	
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	29,6	32,6[e]	34,3[f]	32,16	32,16	17,76	C	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017	
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita. (0-59 Bulan)	13,2[d]	b	9,67[g]	11,43	11,43	5	B	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)Prov. Jabar	2007-2018	
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7,3	5,6[e]	8,19[f]	7,03	7,03	5	A	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017	

TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025[a]	2030[a]	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	83,06	100	97,01	100	100	100	A	BPS Susenas	2001-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : data tahun 2018.
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	78,40	100	95,96	100	100	100	A	Susenas KOR	2015-2020	
3	3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	56,29	48,74	45,84	44,26	40,10	64,55	D	Susenas KOR	2010-2020	
3	3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	2,61	15,23	7,91	7,73	8,43	0	B	Susenas KOR	2010-2020	
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 10% Total Pengeluaran Rumah Tangga)	1,80[b]	3,41	1,15	2,11	2,11	0	A	Susenas KOR	2018-2020	
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 25% Total Pengeluaran Rumah Tangga)	0,23[b]	0,97	0,11	0,44	0,44	0	A	Susenas KOR	2018-2020	
3	3.a.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	12.67	36,18	35,05	34,79	34,52	0	D	Susenas KOR	2015-2020	
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	108.58	104.22	104.54	105.74	106.27	100	A	BPS Susenas	2001-2020	a : Hasil Analisis Proyeksi. b : Data tidak tersedia pada tahun tersebut
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	93.18	90.65	90.99	97.21	100.80	100	A	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	58.30	65.88	66.99	103.96	142.61	100	A	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	7.81	8.71	.b	9.23	9.87	12	C	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat	88.91	98.33	96.10	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat	33.33	61.29	61.83	68.52	81.36	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat	66.94	81.18	84.26	94.28	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	89.48	91.56	98.55	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	32.38	30.64	.b	57.03	86.58	100	C	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	9.72	13.95	16.17	19.24	22.79	42.08	D	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	35.03	84.43	91.73	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	16.93	61.54	69.75	82.48	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	84.80	157.16	141.70	94.29	94.29	100	B	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	.b	11.83	75.00	16.18	16.18	100	E	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	98.65	103.67	98.05	100.23	100.23	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	108.62	108.55	101.84	104.90	104.90	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/Sederajat untuk perempuan/laki-laki	121.84	106.01	119.19	114.05	114.05	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	66.53	58.82	105.72	55.56	55.56	100	D	Susenas KOR	2010-2020	

TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025[a]	2030[a]	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, untuk perempuan/ laki-laki	94.11	101.94	112.62	105.15	105.15	100	B	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil Analisis Proyeksi. b : Data tidak tersedia pada tahun tersebut
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	75.25	90.21	78.06	77.77	77.77	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	134.02	224.09	208.34	107.27	107.27	100	B	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	.b	.b	43.48	15.40	15.40	100	E	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	107.04	102.45	98.08	101.16	101.16	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100.70	99.12	98.44	100.27	100.27	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	94.41	105.15	119.23	113.44	113.44	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	65.07	67.45	72.24	52.88	52.88	100	D	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	97.50	101.44	104.67	106.40	106.40	100	B	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	77.95	96.61	74.19	80.12	80.12	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya	98.90	99.51	99.66	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun (%)	99.91	99.95	99.91	100	100	100	A		2001-2020	
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	100	100	100	100	100	100	A		2001-2020	
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	2.18	0.80	2.35	b	2.94	0.00	B	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : tidak ada data pada tahun tersebut. c : data tahun 2017
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	22.37	18.35	19.12	20.49	19.57	0.00	C	Susenas KOR	2010-2020	
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	12.67	23.18	21.84	18.52	18.52	50	E		2010-2020	
5	5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	55.10	61.76	56.63	76.33	86.05	100	C	Susenas KOR	2015-2020	
6	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	32.28	35.41	37.57	30.69	28.21	88.20	E	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : data tahun 2017
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	12.67	72.43	68.39	82.84	99.30	100	A	BPS	2002-2020	
6	6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	48.55 [b]	56.63	73.99	100	100	100	A	Susenas KOR	2017-2020	
6	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	43.04	59.47	71.47	74.95	82.49	100	C	Susenas KOR	2010-2020	

TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025[a]	2030[a]	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
7	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	78.92	85.98	90.64	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.75	4.05	-3.27	4.26	4.26	7	D	BPS	2011-2020	a : Hasil analisis proyeksi.
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	20861.14	27754.69	27101.68	39599.07	57859.38	119635.88	E	BPS	2010-2020	b : tidak ada data pada
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	9.18	2.32	4.40	3.73	3.73	3.78	A	BPS	2011-2020	tahun tersebut. c : data tahun 2017
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	75.88	55.22	59.48	55.90	55.62	25	D	BPS Sakernas	2010-2020	
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	24.12	44.78	40.52	44.10	44.38	75	D	BPS Sakernas	2007-2020	
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	81.36	88.67	.b	81.00	80.47	-	B	BPS Sakernas	2007-2019	
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	7348.22	14872.91	.b	18343.98	22157.91	-		BPS Sakernas	2007-2019	
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	10.01	8.24	12.25	10.86	10.86	3.80	B	BPS Sakernas	2007-2020	
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	12.01	5.95	12.48	9.26	9.26	-		BPS Sakernas	2010-2020	
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	35.80	28.15	37.09	27.10	25.19	3.80	C	BPS Sakernas	2017-2020	
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	24.02	36.34[c]	.b	26.93	28.94	36.03	C	BPS Susenas	2002-2017	
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	0.17	0.21	0.18	0.18	0.18	0.33	D	BPS Sakernas	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi
10	10.1.1*	Koefisien Gini	0.34	0.36	0.38	0.41	0.44	0.31	D	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2001-2020	a : Hasil analisis proyeksi
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	4.29	8.86	5.18	7.98	8.44	0	B	Susenas KOR	2001-2020	
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	13.25	24.41	31.46	58.48	100	100	A	BPS Susenas	2012-2020	a : Hasil analisis proyeksi
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0.16	0.82	1.28	0	0	0	A	BPS Susenas	2001-2020	a : Hasil analisis proyeksi
16	16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	24.81	18.92	34.98	33.53	43.16	100	E	Susenas KOR	2010-2020	
16	16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	74.04	61.59	68.65	81.32	87.33	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet	13.94	48.11	55.12	100.00	100.00	100.00	A	BPS Susenas	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi

Sumber : Kajian Studi Baseline Indikator TPB/ SDGs KBB, Litbnag Bappelitbangda.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai 2,61 atau C. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai TPB/SDGs masih cukup berat. Hasil proyeksi pencapaian SDGs hingga tahun 2030 berdasarkan scorecard dapat dilihat berikut:

Tabel 2.193. Hasil Proyeksi Pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2030 Berdasarkan Scorecard

No.	*Scorecard*	Jumlah Indikator
1	A	37
2	B	11
3	C	21
4	D	12
5	E	7
6	Belum dapat ditentukan nilainya	4
Total		92

Sumber : Kajian Studi Baseline Indikator TPB/ SDGs KBB, Litbnag Bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat dalam capaian indikator-indikator SDGs-nya. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari banyaknya indikator yang masih memiliki nilai scorecard C, D dan bahkan E Indikator dengan nilai C, D, E diklasifikasikan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang pendidikan ditunjukkan dengan APM SD, SMP dan SMA yang masih jauh dari target terutama disagregasi berdasarkan kuintil untuk SD dan SMA; APK SMP, SMA, PT, PAUD berdasarkan kuintil untuk SMA dan PT; rata-rata lama sekolah dan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat.
2) Bidang kesehatan ditunjukkan dengan angka stunting dan underweight yang masih tinggi; penduduk di bawah 15 tahun yang merokok; rendahnya penggunaan alat kontrasepsi, dan rendahnya sumber air dan sanitasi layak di Kabupaten Bandung Barat.
3) Bidang ekonomi ditunjukkan dengan tingginya angka usia muda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja; rendahnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara; rendahnya laju PDB per kapita; tingginya lapangan kerja informal; rendahnya tenaga kerja formal (termasuk tenaga kerja industri manufaktur); semakin meningkatnya koefisien gini.
4) Bidang sosial ditunjukkan dengan rendahnya proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran; rendahnya proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir; tingginya proporsi perempuan 20-24 yang kawin sebelum 18 tahun; rendahnya proporsi rumah yang memiliki hak atas tanah milik sendiri terutama kontrak/sewa dan rendahnya proporsi perempuan yang menempati managerial;

Berdasarkan hasil dari analisis SDGs interlinkages yang disusun oleh SDGs Center Unpad untuk Kab. Cirebon (Komarulzaman dkk, 2020), dengan menggabungkan hasil analisis baseline Kabupaten Bandung Barat dan juga analisis interlinkages tersebut (Komarulzaman dkk, 2020), Kabupaten Bandung Barat disarankan untuk memprioritaskan indikator-indikator sebagai berikut:

1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (*B40) (%)
3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (*B40) (%)

   * Keterangan : B40 adalah penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah* (kuintil 1 dan kuintil 2).
4) Persentase tenaga kerja formal
5) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.

2.2.7 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib tersebut, ditetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemkab Bandung Barat, sebagai tolok ukur mutu kinerja yang dilaksanakan sesuai amanat Perundang-Undangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) melekat dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014, yakni ada 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan social. Berikut Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, yang terdiri dari:

1. Urusan Pendidikan, dengan jenis pelayanan dasar:
   a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   b. Pendidikan Dasar; dan
   c. Pendidikan Kesetaraan.
2. Urusan Kesehatan, degan jenis pelayanan dasar yaitu:
   a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
   b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
   c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan jenis pelayanan dasar yaitu:
   a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
   b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan jenis pelayanan dasar yaitu:
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar yaitu :
   a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
   b. Pelayanan informasi rawan bencana;
   c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   d. Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana; dan
   e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran
6. Urusan Sosial, dengan jenis pelayanan dasar yaitu :
   a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
   b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
   c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
   d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
   e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

1. SPM Bidang Pendidikan

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan 3 jenis pelayanan dasar yang diterjemahkan ke dalam 2 Program 5 Kegiatan serta 26 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 138.162.312.906,- dengan realisasi anggaran pelaksanaan SPM bidang Pendidikan sebesar Rp. 113.048.183.171,- dengan tingkat capaian anggaran 81,82%. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan SPM bidang Pendidikan di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.194. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.725.388.000	11.259.943.850
2			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	807.160.000	629.413.328
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	761.124.000	291.109.664
4			Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.282.313.251	2.007.266.661
5			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.118.376.000	440.694.615
6			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	25.502.320.000	18.956.500.000
7			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.116.900.000	2.973.477.000
8			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	1.110.690.000	907.257.508

			Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
9			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17.632.313.290	6.302.012.132
10		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.532.557.584	2.473.038.350
11			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.859.810.000	1.674.355.961
12			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	36.728.087.601	36.431.180.800
13			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	560.881.000	0
14			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.202.325.000	1.123.781.750
15			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	350.735.400	0
16			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	24.804.103.474	24.795.770.407
17		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	179.022.000	177.844.000
18			Pembangunan Ruang Kelas Baru	774.285.423	540.293.819
19			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	603.920.000	600.970.576
20			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	809.033.683	375.443.900
21			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	419.390.000	199.001.577
22			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	167.064.000	166.482.000

23			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	359.629.200	376.326.930
24			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	235.332.800	0
25		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	162.132.000	161.081.200
26			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	357.419.200	184.937.143

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

2. SPM Bidang Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang melaksanakan 11 jenis pelayanan dan diterjemahkan ke dalam 1 Program 1 Kegiatan 12 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.457.454.392,- dengan realisasi anggaran pelaksanaan SPM bidang Kesehatan sebesar Rp. 4.942.256.125,- dengan tingkat capaian anggaran 76,53%. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di jelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.195. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	899.542.859	18.481.200
2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	79.783.500	279.783.500
3			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.526.800	38.976.800

4			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	105.890.111	105.889.900
5			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.338.599.952	1.254.733.125
6			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.304.000	2.304.000
7			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.310.689.000	1.057.852.500
8			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	822.612.400	450.000.400
9			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.141.543.400	23.744.800
10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	477.030.000	26.000.000
11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	167.970.241	167.528.000
12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	70.962.129	1.516.961.900

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang melaksanakan 2 jenis pelayanan dan diterjemahkan ke dalam 2 Program 2 Kegiatan 4 Sub Kegiatan dengan total

anggaran sebesar Rp. 24.027.678.224,- dengan realisasi anggaran pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp. 20.987.713.335,- dengan tingkat capaian anggaran 87,34%. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.196. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	10.863.543.300	10.610.161.300
2				2.643.222.200	
3			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	759.276.000	1.481.418.735
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.861.637.044	8.896.133.300
5		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	899.999.700	0

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan 2 jenis pelayanan dan diterjemahkan ke dalam 1 Program 3 Kegiatan 7 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.208.203.342,- serta terealisasi anggaran pelaksanaan SPM bidang

Perumahan Rakyat sebesar Rp. 1.028.141.380,- dengan tingkat capaian anggaran 46.56%. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.197. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	25.000.000	0
2			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	74.800.000	0
3		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.708.052.200	899.321.180
4		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	107.251.942	0
5			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	7.885.000
6			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	161.562.400	119.076.200
7			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	81.536.800	1.859.000

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

5. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan 1 jenis pelayanan dan diterjemahkan ke dalam 1 Program 1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.565.102.900,- Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan 2 jenis pelayanan dan diterjemahkan ke dalam 1 Program 1 Kegiatan 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.6.455.048.900,- dan Dinas Pemadam Kebakaran dna Penyelamatan yang melaksanakan 1 jenis pelayanan dan diterjemahkan ke dalam 1 Program 1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.013.081.100,-.

Anggaraan pelaksaan SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 13.033.232.900,- serta teresalisasi sebesar Rp. 8.267.689.751,- dengan tingkat capaian anggaran 63.43%. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.198. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.164.470.000	3.083.510.000
2			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	400.632.900	301.192.601
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.650.246.000	9.825.000

4		Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.743.202.700	1.524.135.100
5		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	52.139.200	84.200.000
6			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.519.943.800	195.044.400
7			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	489.517.200	321.298.500
8	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.952.081.600	2.748.484.150
9			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	60.999.500	0

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

6. SPM Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang melaksanakan 2 jenis pelayanan dan diterjemahkan ke dalam 2 Program 2 Kegiatan 8 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.114.286.400,- serta teresalisasi sebesar Rp. 1.687.035.830,- dengan tingkat capaian anggaran 151,40%. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan SPM Bidang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.199. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	116.545.000	176.533.900
2			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	237.849.200	233.991.050
3			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	260.805.400	259.948.600
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	11.168.000	11.168.000
5			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	153.555.000	7.680.000
6			Penyediaan Makanan	166.478.800	829.829.240
7			Penyediaan Sandang	18.277.500	18.277.500
8			Penyediaan Tempat penampungan Pengungsi	149.607.500	149.607.540

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

Capain Pelaksanaan SPM Kabupaten Bandung Barat sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut:

Gambar 2.27. Persentase Realisasi Capaian Kinerja SPM Kab. Bandung Barat Triwulan IV Tahun 2024

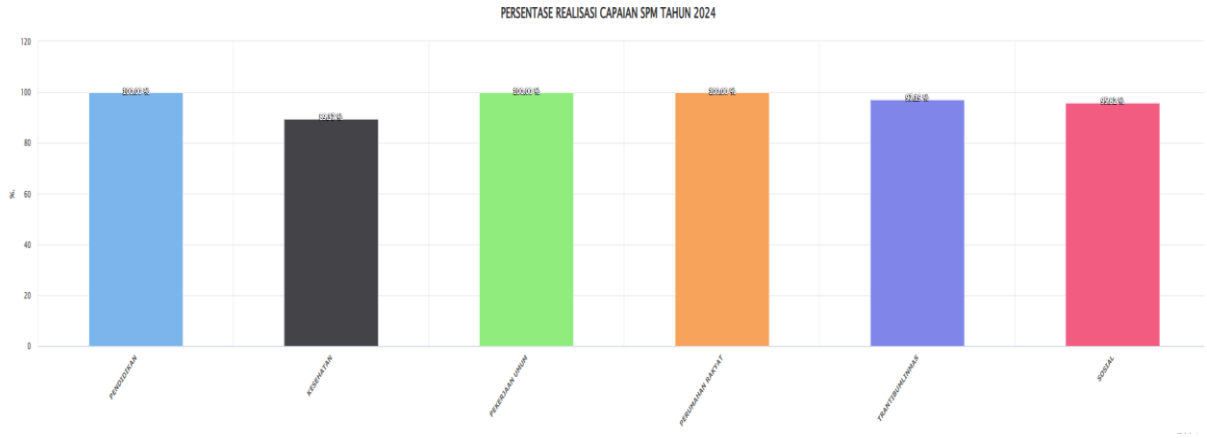

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

Berdasarkan grafik pencapaian SPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 sampai dengan triwulan IV dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan dengan realisasi capaian sebesar 100%
    - Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 34.623 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 34.623.
    - Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 221.383 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 221.383.
    - Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 7.201 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 7.201.
2. SPM Bidang Kesehatan dengan realisasi capaian sebesar 89,37%
    - Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 33.162 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 29.415 atau 88,70%.
    - Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 33.011 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 29.035 atau 87,96%.
    - Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 31.442 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 28.791 atau 91,57%.

- Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Balita dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 154.401 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 142.724 atau 92,44%.
- Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 256.406 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 243.258 atau 94,87%.
- Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 1.075.087 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 1.006.840 atau 93,56%.
- Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 203.828 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 180.074 atau 88,35%.
- Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 108.906 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 93.286 atau 85,66%.
- Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 15.911 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 15.911 atau 100%.
- Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 2.639 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 2.290 atau 86,78%.
- Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 43.543 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 35.380 atau 81,25%.
- Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 36.408 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 24.161 atau 66,36%.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dengan realisasi capaian sebesar 100%
    - Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 31.615 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 31.615.

- Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 4.680 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 4.680.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan realisasi capaian sebesar 100%
    - Pelayanan Dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 65 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 65.
5. SPM Bidang Trantibumlinmas dengan realisasi capaian sebesar 97,19%
    - Pelayanan Dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota (TRANTIBUM) dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 1.834.256 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 1.834.256.
    - Pelayanan Dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 254.660 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 254.660.
    - Pelayanan Dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 254.660 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 254.660.
    - Pelayanan Dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 16.653 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 16.639.
    - Pelayanan Dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 1.834.256 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 1.834.256.
6. SPM Bidang Sosial dengan realisasi capaian sebesar 95,82%
    - Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 354 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 354.
    - Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 40 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 40.
    - Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 1.256 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 1.256.

- Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 16 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 16.
- Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan jumlah total yang harus dilayani adalah sebanyak 300 dan pada tahun 2024 telah terlayani sebanyak 300.

Hingga triwulan IV berakhir persentase realiasi anggaran untuk setiap bidang SPM disampaikan sebagai berikut :

Gambar 2.28. Grafik Persentase Realisasi Capaian Anggaran SPM Kab. Bandung Barat Triwulan IV Tahun 2024

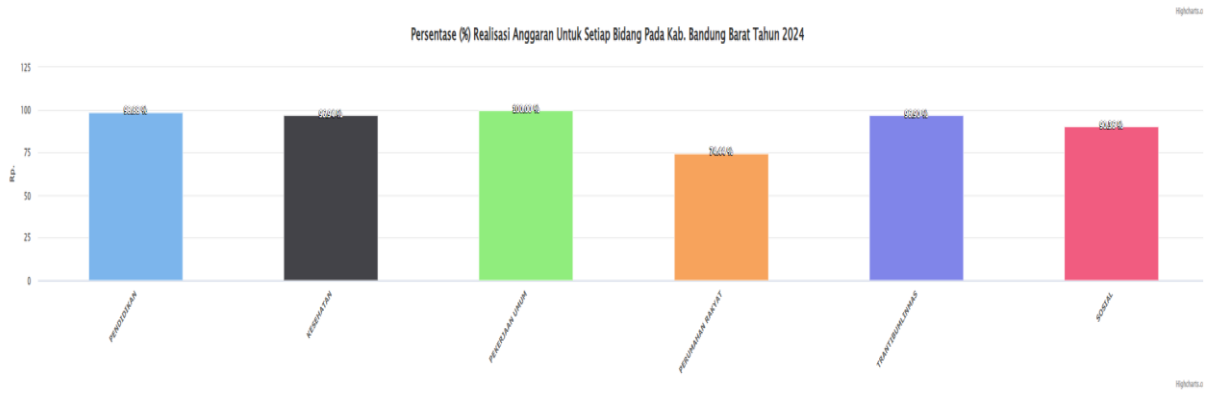

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

Berdasarkan grafik diatas persentase realisasi anggaran pelaksanaan spm hingga triwulan IV disampaikan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 98,88%;
2. SPM Bidang Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 96,94%;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dengan realisasi anggaran sebesar 100%;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan realisasi anggaran sebesar 74,44%;
5. SPM Bidang Trantibumlinmas dengan realisasi anggaran sebesar 96,90%; dan
6. SPM Bidang Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 90,36%.

Penerapan SPM di Kabupten Bandung Barat tahun 2024 sampai dengan triwulan IV ini tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai macam permasalahan yang mengakibatkan penerapan SPM tidak berjalan dengan cukup baik. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan triwulan IV disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.200. Permasalahan Penerapan SPM Kabupaten Bandung Barat Triwulan IV Tahun 2024

No	Bidang SPM	Permasalahan
1	Pendidikan	Pengumpulan Data • Pengumpulan data yang tidak terintegrasi antar Bidang; • Keterbatasan sistem informasi yang menyebabkan data sulit diakses dan dianalisis.
		Penghitungan Kebutuhan • Ketidakakuratan dalam perhitungan kebutuhan sumber daya seperti tenaga pengajar, sarana prasarana, dan anggaran; • Data yang tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya di lapangan.
		Perencanaan dan Penganggaran • Penganggaran yang tidak mencakup semua aspek yang diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan; • Perencanaan yang tidak berbasis pada kebutuhan nyata dan data yang valid.
		Pelaksanaan • Pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan rencana karena kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan; • Kurangnya evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
		Lain – Lain • Tidak adanya mekanisme evaluasi yang sistematis dan terus menerus terhadap implementasi SPM; • Kurangnya feedback dari pihak terkait dalam peningkatan kualitas Pendidikan.
2	Kesehatan	Pengumpulan Data • Perlu adanya penyesuaian untuk pemeriksaan K1 USD dan K6 USG karena USG baru terdistribusi pada akhir thaun 2023; • Data yang sudah didapat tidak terkumpulkan di puskesmas; • Target terlalu tinggi sehingga petugas dan kader di lapangan kesulitan mencari sasaran; • Target terlalu tinggi sehingga petugas dan kader di lapangan kesulitan mencari sasaran; • Sarana prasarana laptop, jaringan internet, SDM terlatih input data dalam system informasi HIV masih kurang; • Laporan puskesmas pengiriman tidak tepat dan sering salah hitung.
		Penghitungan Kebutuhan • Sudah terpenuhi untuk pengadaan USG tetapi masih ada puskesmas yang tidak ada dokter umum terlatih USG karena adanya mutase; • Belum terpenuhinya BMHP untuk skrining lansia sesuai sasaran; • Adanya ketidaksesuaian antara estimasi sasaran dan data riil, data estimasi lebih besar dibandingkan dengan sasaran rillnya, sehingga capaian tidak sesuai dengan target; • Jumlah logistic (catridge, pot dahak, tuberculin) tidak mencukupi; • Penggunaan logistic reagen HIV masih rendah, cakupan orang beresiko HIV dan masih rendah

		• Estimasi di puskesmas ada yang lebih besar ataupun lebih kecil dari data real.
		Perencanaan dan Penganggaran • Perencaaan dan penganggaran bersumber dari APBD dan DAK • Anggaran selalu direfocusing; • Dalam pemenuhan kebutuhan prasarana masih kurang di prioritaskan; • Tidak terakomodirnya pengajuan kebutuhan logistic dan kegiatan yang sudah direncanakan; • Dukungan anggaran program HIV rendah; • Tidak semua SPM ada anggaran terutama untuk KIE.
		Pelaksanaan • Masih banyak ibu balita yang tidak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu) untuk memeriksakan pertumbuhan dan perkembangannya; • Skrining yang sudah dilaksanakan untuk menjaring suspek TBC terkadang terhambat karena faskes TCM overload dan sampel tertunda pemeriksaannya; • Belum semua Faskes mampu tes HIV dan Pengobatan (Test and Treatment); • Mengikuti Permenkes tentang SPM terbaru ada kesenjangan antara ekspektasi dan reality terutama skrining keswa masih rendah; • Dari 32 Puskesmas, sudah terbentuk 24 Posyandu remaja namun sasaran diluar sekolah tidak terdata karena memang sasarannya tidak berkunjung ke Posyandu remaja.
		Lain-lain • Tidak adanya Tenaga LSM Penjangkau lapangan untuk sasaran populasi kunci Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Pengguna Jarum Suntik. Stigma tentang HIV masih tinggi di masyarakat menghambat pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV maupun bagi ODHIV
3	Pekerjaan Umum	Pengumpulan Data • Pendataan dalam pengalokasian CPLC untuk penerima manfaat berdasarkan data pemohon, pengguna belum berdasarkan BNBA.
		Perencanaan dan Penganggaran • Perencanaan kesiapan lahan terkadang tidak sepenuhnya terverifikasi.
4	Perumahan Rakyat	Pengumpulan Data • Terkati CPCL, terdapat kekurangan persyaratan administratif.
		Perencanaan dan Penganggaran • Masih membutuhkan anggaran yang memadai untuk Penerapan SPM tersebut.
5	Trantibumlinmas	Pengumpulan Data • Data pelaporan SPM di setiap bidang rentan tercecer dan hilang; • BAP kejadian belum lengkap;

		• Data masih menggunakan warga Kabupaten Bandung Barat; • Kajian Resiko Bencana (KRB) masih menggunakan periode 2017-2021 dan akan diperbaharui pada Tahun Anggaran 2025.
		Penghitungan Kebutuhan • Perhitungan kebutuhan SPM di setiap bidang terdakang muncul kebutuhan yang mendadak diluar perhitungan sebelumnya.
		Perencanaan dan Penganggaran • Perencanaan dan penganggaran terkadang berubah diakibatkan oleh rasionalisasi anggaran akibat terbatasnya anggaran yang ada; • Anggaran menggunakan gaji pegawai (DAMKAR); • Anggaran sebesar Rp.676.322.700,- bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) yang mendukung kegiatan peningkatan kapasitas anggota satpol pp.
		Pelaksanaan • Dengan luasnya wilayah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 16 kecamtan dan 165 desa, dalam pelaksanaan kegiatan di bidang SPM urusan penegakan perda (GAKDA) dan Trantibumlinmas hanya dilakukan disebagian wilayah. Hal ini disebabkan kurangnya SDM dan Saran Prasarana serta terbatasnya anggaran yang ada; • Peningkatan SDM BPBD serta system pendataan yang belum tersedia dan anggaran yang terbatas; • Perlu dibentuknya tim reaksi cepat multisector dan pembentukan cluster logistik peningkatan sarana prasarana (Gudang).
6	Sosial	Pengumpulan Data • Data DTKS tidak memunculkan per-jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial); • Belum adanya secretariat puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial)
		Penghitungan Kebutuhan • Standar satuan harga tidak lengkap; • Data PPKS belum padan
		Pelaksanaan • Adanya rasionalisasi anggaran pada tahun berjalan; • Sarana dan prasarana penunjang layanan dasar belum lengkap

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, 2024

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah yang mana faktor- faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah diperlukan sebagai dasar pijakan dalam perencanaan tahun 2026 mendatang.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 berdasakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, fokus prioritas pembangunan diarahkan untuk menjaga stabilitas politik di daerah dan menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi pasca dampak pandemi covid-19 dengan dukungan optimalisasi sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur wilayah. Tema Pembangunan untuk Tahun 2024 ialah "Kondusifitas daerah dan stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan SDM serta penyediaan infrastruktur" dengan arah kebijakan meliputi:

1. Optimalisasi akses dan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
2. Optimalisasi layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Stabilitas dan penguatan ekonomi sektor unggulan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta optimalisasi potensi investasi.
4. Percepatan pemulihan sector pariwisata.
5. Perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan terpadu dan tepat sasaran terutama kemiskinan ekstrem serta perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran.
6. Penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang aksebilitas wilayah dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup serta kesiapsiagaan terhadap resiko bencana.
7. Transpormasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
8. Menjaga dan meningkatkan kondusifitas daerah.
9. Pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial serta peningkatan kesadaran politik dan demokrasi di masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPD, maka permasalahan pembangunan yang harus menjadi perhatian pada tahun 2026, diantaranya:

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama dalam hal pemerataan akses dan optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu. Meskipun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dan permasalahan mendasar yang perlu segera ditangani. Walau HLS dan RLS menunjukan peningkatan tetapi peningkatannya cenderung lambat, sehingga sector pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya akses fisik terhadap pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan pelosok kecamatan. Banyak sekolah dasar dan menengah berada dalam kondisi rusak, dengan lebih dari 75% ruang kelas mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga menurunkan minat dan kenyamanan peserta didik untuk datang ke sekolah, terutama bagi siswa di daerah dengan sarana transportasi yang terbatas. Selain itu, ketimpangan distribusi sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi isu serius. Sekolah-sekolah di daerah padat penduduk cenderung mengalami kelebihan siswa tanpa disertai peningkatan kapasitas ruang kelas, sementara di wilayah lain kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, bahkan sanitasi yang layak. Hal ini memperlebar kesenjangan mutu antar wilayah, yang berdampak langsung pada pencapaian hasil belajar siswa.

Dari aspek partisipasi pendidikan, masih terdapat anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan formal, terutama di jenjang menengah. Rata-rata lama sekolah di Bandung Barat baru mencapai sekitar 7,86 tahun, atau setara tingkat SMP. Ini menunjukkan bahwa banyak siswa masih berhenti sekolah setelah pendidikan dasar. Angka putus sekolah di daerah pelosok masih terjadi, meskipun jumlahnya menurun, namun tetap menjadi perhatian. Permasalahan lain yang mengemuka adalah rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan layanan pendidikan. Sebagian besar anggaran pendidikan habis untuk belanja pegawai, termasuk gaji guru dan honorer, sementara belanja infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak rencana perbaikan gedung sekolah, pelatihan guru, serta program inovatif tidak dapat direalisasikan sesuai kebutuhan.

Lebih lanjut, praktik-praktik seperti penahanan ijazah akibat tunggakan administrasi masih ditemukan di beberapa sekolah, terutama tingkat swasta. Hal ini menimbulkan hambatan administratif yang menghalangi siswa untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja, dan mencerminkan belum optimalnya perlindungan hak peserta didik.

2. Keterbatasan Layanan Kesehatan

Penyelenggaraan layanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam aspek pemerataan akses, ketersediaan fasilitas, ketercukupan sumber daya, serta efektivitas sistem perlindungan kesehatan masyarakat. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Salah satu persoalan krusial yang mencuat adalah ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan antarwilayah. Sebagian besar fasilitas kesehatan terpusat di daerah perkotaan seperti Padalarang dan Ngamprah, sementara di wilayah-wilayah seperti Rongga dan Gununghalu, jumlah fasilitas masih sangat terbatas. Ketimpangan ini menyebabkan warga di daerah terpencil kesulitan menjangkau layanan kesehatan dasar secara cepat dan layak.

Selain itu, ketersediaan obat-obatan di sejumlah Puskesmas masih belum memadai, khususnya bagi pasien penerima bantuan iuran (PBI) BPJS. Banyak pasien miskin terpaksa membeli obat sendiri di luar fasilitas kesehatan karena stok obat di Puskesmas tidak tersedia. Permasalahan juga terjadi dalam pelaksanaan program-program nasional seperti pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang diluncurkan pemerintah pusat. Antusiasme masyarakat rendah karena kurangnya sosialisasi serta kendala teknis penggunaan aplikasi pendukung seperti ASIK (Aplikasi Sehat IndonesiaKu). Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital kesehatan dan literasi masyarakat belum mendukung pelaksanaan program preventif secara optimal.

Dari sisi sumber daya manusia, beberapa RSUD dan Puskesmas di Bandung Barat masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, serta belum seluruhnya menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Akibatnya, pelayanan terhadap pasien BPJS menjadi terbatas, dan dalam beberapa kasus, masyarakat tidak mendapatkan layanan yang semestinya. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya sistem informasi status keaktifan peserta BPJS, sehingga banyak warga yang datang berobat tidak mengetahui bahwa kepesertaannya sudah tidak aktif.

3. Penguatan pada Sektor Unggulan Belum Mampu Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Secara Inkusif

Pada Tahun 2024 prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat salah satunya difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan. Fokus ini didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi serta memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi global. Sektor unggulan yang menjadi lokomotif penggerak ekonomi di Kabupaten Bandung Barat meliputi industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Keempat sektor ini dinilai memiliki potensi besar baik dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun letak geografis strategis yang menjadi keunggulan komparatif maupun kompetitif daerah. Meskipun Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang cukup besar pada sektor industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata, namun hingga tahun 2024 kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah masih belum optimal. Kondisi ini tercermin dari capaian laju pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan belum mampu secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah ini.

Sektor pertanian mengalami tantangan serius akibat alih fungsi lahan, keterbatasan infrastruktur irigasi, dan rendahnya adopsi teknologi modern. Akibatnya, produktivitas pertanian khususnya padi dan hortikultura mengalami penurunan, serta ketahanan pangan daerah berada dalam tekanan. Petani juga masih menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan, pasar, dan dukungan kelembagaan. Di sektor industri, meskipun terdapat kawasan industri strategis di Padalarang dan sekitarnya, namun penyerapan tenaga kerja masih rendah dan tidak sebanding dengan besarnya investasi yang masuk. Kelembagaan pendukung industri seperti Kadin dan koperasi industri juga belum optimal dalam mendorong kolaborasi dan integrasi sektor usaha kecil dan menengah dengan pelaku industri besar.

Sementara itu, sektor perdagangan dihadapkan pada realitas persaingan yang ketat dengan e-commerce dan retail modern. Pasar tradisional kehilangan daya saing karena minimnya modernisasi, pengelolaan sampah yang buruk, dan lemahnya pengawasan mutu barang. Produk lokal belum sepenuhnya terdigitalisasi dan belum memiliki sertifikasi yang mendukung ekspansi pasar nasional atau regional. Di sektor pariwisata, meskipun Kabupaten Bandung Barat memiliki destinasi unggulan seperti Lembang, Curug Cimahi, dan Kawasan Cisarua, namun belum terkelola secara maksimal. Rendahnya kualitas infrastruktur, minimnya konektivitas antar destinasi, serta belum optimalnya promosi dan inovasi layanan wisata menyebabkan pertumbuhan sektor ini berjalan lambat. Selain itu, dampak ekonomi dari pariwisata belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.

Keseluruhan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keempat sektor strategis ini masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dalam sebuah ekosistem ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam memperkuat rantai nilai, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat yang berkualitas.

4. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Mengalami Stagnansi

Kemiskinan dan persoalan sosial masih menjadi tantangan mendasar dalam pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada tahun 2024. Meskipun secara makro ekonomi daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, namun tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata, khususnya di wilayah pedesaan, kawasan perbukitan, dan daerah terpencil. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, serta keberadaan kelompok rentan menandakan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya inklusif.

Pada Tahun 2024, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 10,49% dimana tidak mencapai target kinerja sebagaimana yang ditentukan di dalam dokumen perencanaan pembangunan sebesar 10,40%. Demikian angka tersebut setidaknya telah menunjukan adanya tren penurunan kemiskinan apabila dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya (2023) yang berada pada angka 10,52% walau tidak secara signifikan. Adapun sebaran angka kemiskinan tertinggi berada di wilayah selatan seperti Kecamatan Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, dan Cipongkor. Masyarakat di wilayah ini umumnya bekerja di sektor informal atau pertanian tradisional yang rentan terhadap fluktuasi cuaca dan harga pasar. Keterbatasan infrastruktur jalan, transportasi, air bersih, dan sanitasi memperparah kondisi kemiskinan struktural yang sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Masalah sosial yang muncul juga semakin kompleks, seperti tingginya jumlah anak tidak sekolah, pernikahan usia dini, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta keterlantaran lansia dan disabilitas. Kelompok masyarakat ini seringkali terpinggirkan dari intervensi program karena lemahnya pendataan, kurangnya layanan sosial dasar yang inklusif, dan belum optimalnya kapasitas lembaga layanan sosial di tingkat desa dan kecamatan. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka, terutama di kalangan usia produktif lulusan SMA/SMK, juga turut menyumbang kemiskinan baru. Banyak lulusan muda tidak terserap ke dunia kerja karena kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, minimnya pelatihan vokasi, serta rendahnya peluang kerja di sektor formal di wilayah KBB. Sementara itu, potensi sektor informal dan UMKM belum sepenuhnya digerakkan untuk menyerap tenaga kerja miskin.

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial juga menjadi masalah serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Basis data penerima bantuan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), belum sepenuhnya mutakhir dan akurat, sehingga masih terdapat masyarakat miskin yang tidak terlayani, sementara sebagian penerima tidak benar-benar tergolong miskin. Selain itu, berbagai program bantuan sering berjalan sektoral dan tidak terintegrasi antar-perangkat daerah maupun dengan pemerintah desa.

5. Belum Optimalnya Kondisi Infrastruktur dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Pada tahun 2024, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup masih menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah telah menetapkan sektor ini sebagai salah satu prioritas utama dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat secara umum masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Sebagian besar jaringan jalan kabupaten, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan industri, mengalami kerusakan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 72,14% jalan dalam kondisi mantap, sementara sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Di sisi lain, infrastruktur pendukung layanan dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, drainase, dan transportasi publik masih belum sepenuhnya memadai. Fasilitas publik di beberapa kecamatan mengalami keterbatasan kualitas maupun kuantitas, dan belum merata menjangkau seluruh wilayah. Minimnya jalur pedestrian yang aman serta tidak terintegrasinya moda transportasi publik juga menyebabkan masyarakat lebih mengandalkan kendaraan pribadi, yang memperparah kemacetan dan pencemaran udara.

Sementara itu, kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat juga menunjukkan tantangan serius. Persoalan utama terletak pada pengelolaan sampah yang belum optimal. Tumpukan sampah di TPS dan area publik masih sering ditemukan akibat kurangnya sarana pengangkutan serta minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Program edukasi lingkungan telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama sekolah dan komunitas, namun belum berdampak signifikan secara luas.

Sungai-sungai besar seperti Citarum yang melintasi wilayah KBB juga masih menghadapi ancaman pencemaran, baik dari limbah domestik maupun aktivitas industri. Meskipun Kabupaten Bandung Barat telah berpartisipasi dalam program nasional Citarum Harum, namun lemahnya pengawasan di tingkat desa dan kelurahan menyebabkan hasilnya belum optimal. Kejadian tumpahan bahan kimia natrium hidroksida di akhir tahun 2024 yang

mencemari jalan dan tanah di kawasan Padalarang menjadi contoh nyata bahwa sistem mitigasi dan kesiapsiagaan lingkungan masih perlu diperkuat. Dari sisi perencanaan tata ruang, pemerintah telah menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) serta kebijakan zonasi wilayah, namun realisasinya masih terbatas. Ruang terbuka hijau (RTH) belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan kota yang sehat, dan pengendalian alih fungsi lahan masih menjadi persoalan krusial di tengah pesatnya urbanisasi.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kolaborasi lintas perangkat daerah, pelibatan masyarakat, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci untuk mewujudkan wilayah yang lebih tangguh, bersih, dan layak huni di masa mendatang.

6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Public Belum Berjalan Efektif dan Cenderung Stagnan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB Kab. Bandung Barat pada tahun 2019 masih pada kategori CC dengan nilai 56,79 poin dan sampai dengan tahun 2024 Nilai IRB meningkat pada katagori A- dengan nilai sebesar 80,77 Poin. Salah satu fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Capaian indikator SAKIP Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan walaupun masih pada katagori “B” tetapi secara nilai mutu pada Tahun 2023 sebesar 68,59 mengalami kenaikan s.d tahun 2024 menjadi sebesar 68,85.

Demikian walaupun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami peningkatan, namun dalam perkembangannya masih terjadi permasalahan terkait dengan tata kelola dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih menghadapi berbagai permasalahan yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, yang mengakibatkan tumpang tindih program dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah dinilai belum merata, terutama dalam penguasaan teknologi informasi, perencanaan berbasis data, dan pemanfaatan sistem pelayanan digital. Kondisi ini turut memengaruhi rendahnya inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik, yang sebagian besar dilakukan secara konvensional dan belum sepenuhnya responsif pada kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, sistem pengawasan internal juga belum berjalan optimal, sehingga pengendalian terhadap kinerja dan kepatuhan regulasi belum efektif. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan pun masih rendah, diperparah dengan keterbatasan akses terhadap informasi publik yang transparan. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan ketimpangan kualitas pelayanan publik antar wilayah, di mana masyarakat di daerah pinggiran masih kesulitan mengakses layanan dasar secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, memperkuat integrasi data dan sistem digital, serta mendorong partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2024 dan gambaran umum kondisi daerah. Berikut permasalahan pembangunan yang disusun menurut bidang urusan.

2.3.2.1 Permasalahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Masih adanya ketimpangan akses pendidikan antar wilayah dimana masih ada daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan.
b. Kondisi sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai.
c. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang belum merata.

d. Angka partisipasi dan putus sekolah masih relatif tinggi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi dan kondisi sosial yang tidak mendukung.
e. Kurangnya penerapan digitalisasi dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan dimana masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat TIK. Selain itu kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran masih relatif rendah.
f. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter pada anak.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Keterbatasan fasilitas kesehatan dan obat-obatan di Faskes Pertama pada daerah pelosok.
b. Belum optimalnya pengelolaan data kesehatan yang akurat dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
c. Keterbatasan tenaga kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
d. Belum optimalnya penanganan jaminan kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang tidak mencapai target kinerja.
e. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di beberapa wilayah, khususnya di daerah yang sulit dijangkau layanan kesehatan.
f. Belum optimalnya intervensi terhadap penanganan stunting di Kabupaten Bandung Barat.
g. Belum optimalnya gerakan PHBS dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Kondisi infrastruktur jalan dalam kondisi mantap berada pada angka 72,4% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 648,06 KM dengan total 152 ruas jalan.

b. Sistem drainase perkotaan yang belum terintegrasi dan terhubung secara menyeluruh yang menyebabkan terjadinya genangan di kawasan padat seperti Lembang, Batujajar, dan Ngamprah.
c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat yang disebabkan oleh letak geografis pemukiman yang sulit dijangkau.
d. Belum terpetakannya pendataan sumber mata air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi.
e. Pengelolaan bangunan gedung kantor yang belum optimal dimana masih terdapat infrastruktur perkantoran layanan publik yang mengalami kerusakan atau berada pada kondisi tidak layak.
f. Penyusunan, pengendalian, pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum terimplementasikan dengan baik.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Belum optimalnya penyediaan perumahan yang terjangkau ditengah kebutuhan tempat tinggal yang terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
b. Belum optimalnya proses serah terima dan pengelolaan fasos dan fasum perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
c. Masih tingginya rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 16 kecamatan yang pada Tahun 2024 mencapai 13.032 rumah tidak layak huni.
d. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
e. Belum terkelolanya administrasi pencatatan lahan pemakaman yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
f. Penaangan relokasi rumah akibat bencana belum optimal dalam pelaksanaannya karena terhambat oleh proses validasi data yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Penegakan Perda dan Perkadan yang belum optimal dimana banyak PKL liar, reklame tak berizin, bangunan tanpa izin, TPS liar, dan tambang ilegal masih belum tertangani maksimal.
b. Personel yang tersedia masih belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas gangguan ketertiban. Selain itu, sebagian besar personel belum dibekali pelatihan teknis penanganan konflik sosial, komunikasi publik, atau SOP penegakan hukum.
c. Tidak semua kecamatan memiliki posko pengawasan, dan belum ada command center untuk patroli terpadu.
d. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan masih rendah.
e. Masih rendahnaya ketaaatan masyarakat dan pelaku usaha dalam mematuhi aturan yang berlaku.
f. Tidak semua kecamatan memiliki pos damkar aktif dimana pelayanan masih terpusat di wilayah Padalarang dan sekitarnya, sehingga waktu tempuh ke wilayah selatan berisiko mengalami keterlambatan penanganan kebakaran dan evakuasi.
g. Hanya tersedia beberapa unit mobil pemadam operasional yang aktif dan sebagian armada sudah berusia tua dan rawan kerusakan.
h. Banyak kawasan yang rawan kebakaran karena instalasi listrik tidak standar, aktivitas dapur gas, dan bangunan berhimpitan.
i. Tingginya risiko dan kerentanan bencana geologi dan hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Bnadung Barat.
j. Keterbatasan Sistem Peringatan Dini dan Infrastruktur Mitigasi.
k. Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya BPBD Masih Terbatas.

6) Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
b. Masih rendahnya tingkat validitas dan akurasi data tentang pemerlu kesejahteraan sosial yang tersedia sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan kebijakan.
c. Pembentukan mitra strategis Dinas Sosial seperti Puskesos masih dilakukan secara parsial atau belum tersedia di semua wilayah desa.

d. Masih tingginya masalah anak terlantar, lansia terbengkalai, dan penyandang disabilitas tanpa perlindungan memadai.
e. Masih banyaknya jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) tidak terlayani.
f. Adanya keterbatasan anggaran dan skema kolaboratif dalam pelaksanaan program perlindungan sosial di Kabupaten Bandung Barat.
g. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi/lembaga sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Penyuluh Sosial).
h. Belum optimalnya verifikasi dan validasi dtks secara reguler serta belum optimalnya objektivitas dalam penentuan/penerapan penerima bantuan.

2.3.2.2 Permasalahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi.
b. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja.
c. Adanya kesenjangan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal.
d. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal, dengan status rentan (tanpa jaminan kerja, upah rendah, dan tidak tetap).
e. Peluang kerja formal di sektor industri dan jasa masih tersentralisasi di wilayah tertentu.
f. Fasilitas BLK daerah masih terbatas secara peralatan, kurikulum, dan pelatih tersertifikasi serta cakupan pelatihan belum menjangkau desa-desa dan kelompok rentan, seperti perempuan, disabilitas, dan pemuda putus sekolah.
g. Terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan berdampak pada lemahnya perlindungan hak buruh (upah, jam kerja, jaminan).

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
b. Belum optimalnya layanan perlindungan dan penanganan kasus.

c. Rendahnya partisipasi dan akses perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan politik masih terbatas atau kurang dari 30%, termasuk dalam BPD dan DPRD.
d. Angka pernikahan usia anak masih tinggi di beberapa kecamatan, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya pendidikan seksualitas serta kesehatan reproduksi.
e. Ruang publik ramah anak (RPRA), taman bermain aman, dan ruang laktasi masih sangat terbatas di kantor pemerintahan, sekolah, dan fasilitas umum.
f. Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya memenuhi indikator dalam 5 kluster KLA (hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus).

3) Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Penurunan luas panen padi dari 1,58 juta ha (2023) menjadi 1,48 juta ha (2024), atau turun sebesar 6,84%.
b. Tingkat Konsumsi pangan yang kurang beragam.
c. Terdapat tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang berpotensi mengalami kekeringan dan kerawanan pangan yakni Kecamatan Saguling, Kecamatan Cililin, dan Kecamatan Cihampelas.
d. Pengawasan distribusi pangan yang belum optimal.
e. Cadangan Pangan Daerah masih tidak mencapai target yang disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrem, alih fungsi lahan, belum optimalnya sistem penyimpanan dan distribusi, serta produksi pangan lokal yang fluktuatif.

4) Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Masih belum optimalnya upaya sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
b. Banyaknya kasus sengketa tanah baik antar individu maupun dengan pemerintah daerah yang belum terselesaikan.

5) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Armada pengangkut sampah beserta dengan sarana prasarana persampahan yang kurang memadai.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga jumlah produksi sampah di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat setiap tahunnya.
c. Belum optimalnya pengelolaan limbah LB3 sesuai peraturan, dengan bertambahnya usaha dan atau kegiatan yang mengelola limbah LB3 belum dibarengi dengan pengawasan dan monitoring bila terjadi pelanggaran terhadap perda yang berlaku.
d. Cakupan luasan taman dan RTH masih belum sesuai aturan.
e. Masih terdapat lahan kritis yang belum terkelola.
f. Masih adanya usaha dan atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH.

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Masih rendahnya tingkat penerapan identitas kependudukan digital.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai urgensi administrasi kependudukan.
c. Keberlanjutan layanan terganggu akibat distribusi blanko KTP-el yang masih menjadi tanggung jawab pusat dan kadang terbatas di daerah.
d. Meskipun ada aplikasi SIDILAN untuk administrasi online, belum semua warga mendapat akses, dan masih ada kendala infrastruktur serta adaptasi budaya birokrasi
e. Masih perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pelayanan admnistrasi kependudukan berbasis digital.
f. Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai dikarenakan banyak nya peralatan dan perlengkapan pelayanan yang sudah lama dan sering rusak terutama Server dan Alat Perekaman KTP-EL.
g. Masih rendahnya pemanfaatan Data Kependudukan secara komprehensif oleh lembaga-lembaga terkait.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Transparansi dan akuntabilitas dana desa masih lemah sehingga membuka kerentanan dalam penyalahgunaan dana desa.
b. Banyak desa belum mampu mengelola dana desa secara profesional. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi Kemendes, termasuk masalah administrasi, perencanaan, dan pelaporan.
c. Peran BUMDes dan kelembagaan lokal belum optimal belum mampu untuk meningkatkan perekonomian desa secara signifikan.
d. Minimnya keterlibatan masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan desa dalam musyawarah desa menyebabkan program kurang aspiratif .
e. Edukasi kepada masyarakat terkait LPJ dan pengawasan dana desa masih lemah, sehingga masyarakat menjadi awam dan kurang berani untuk menuntut akuntabilitas kinerja pemerintah desa.
f. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif dan belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas.

8) Urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pengendalaian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Persentase perempuan usia 15–49 tahun yang menggunakan alat/kb tradisional atau kontrasepsi modern masih relatif rendah.
b. Implementasi Program KB Pascapersalinan (KBPP) masih berkorelasi tinggi, namun dalam pelaksanaannya tidak merata.
c. Implementasi program kampung KB dan Edukasi KB kepada remaja masih belum merata.
d. Layanan kontrasepsi, konsultasi KB, dan fasilitas KBPP lebih mudah diakses di pusat kecamatan, sedangkan wilayah selatan dan barat jarang tersentuh.
e. Belum optimalnya Petugas KB di lapangan. Hal ini ditandai belum semua desa memiliki rasio satu PKB satu desa sehingga belum maksimalnya pembinaan KIE.
f. Masih belum terbangunnya persepsi masyarakat mengenai pentingnya program keluarga berencana bagi kesejahteraan sehingga menyulitkan Pemerintah dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk.

9) Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Sebagian besar angkutan umum tidak memiliki izin trayek dimana banyak pengusaha/pemilik angkot yang tidak memperpanjang izin akibat dari penurunan penumpang dan biaya operasional.
b. Aksesbilitas angkutan umum masih belum optimal dan tidak terintegrasi dengan baik.
c. Pergeseran mode ke transportasi online dan kendaraan pribadi membuat angkutan umum konvensional mengalami penurunan penumpang sehingga banyak pemilik memilih tidak memperpanjang izin.
d. Masalah kemacetan yang sulit diurai pada beberapa lokasi/kawasan strategis di Kabupaten Bandung Barat.
e. Kondisi jalan yang rusak, marka jalan yang tidak jelas, dan rambu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan baik.
f. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap angkutan umum.

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Masih adanya beberapa daerah di kecamatan yang masuk ke dalam kategori wilayah *Blank Spot* dimana jaringan internet tidak dapat diakses.
b. Belum optimalnya implementasi keterbukaan informasi publik melalui layanan teknologi informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
c. Ruang server yang belum terstandarisasi internasional dan belum tersedianya *back up plan Disaster Recovery Center* (DRC).
d. Belum adanya integrasi media informasi yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat.
e. Digitalisasi dan penerapan *Smart City* dalam tatan praktis belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
f. Kurangnya layanan edukasi dan proteksi masyarakat terhadap risiko digital.

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif atau *Underperforming* dimana banyak koperasi yang tidak berkomunikasi intens dengan pemerintah desa atau perangkat daerah sehingga menyebabkan kelembagaan koperasi menjadi lemah.
b. Banyak pengurus koperasi yang belum memahami proses pendirian secara teknis dan tata kelola (AD/ART, SHU, laporan keuangan), berdampak pada kepercayaan anggota.
c. Keterbatasan sumber daya manusia baik koperasi maupun pelaku UMKM masih terkendala dengan kualitas sehingga mempengaruhi kapasitas dan daya saing.
d. Akses UMKM terhadap permodalan masih terbatas sehingga menyulitkan untuk mengembangkan usaha.
e. Fokus pelatihan dan pembiayaan terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sedangkan banyak desa belum tersentuh program pemberdayaan koperasi/UMKM.
f. Belum optimalnya integrasi dan pemasaran produk lokal UMKM pada rantai pasok ekonomi dan pariwisata.
g. Belum tersedianya data yang valid tentang profil koperasi dan UMKM secara utuh yang disusun oleh perangkat daerah terkait sehingga berpotensi mengakibatkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan dan pemberian bantuan.

12) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Data potensi dan peluang investasi yang masih belum teridentifikasi dengan baik sehingga mempengaruhi efektivitas promosi yang ditawarkan kepada calon investor.
b. Ketidakpastian regulasi dan proses perizinan rumit.
c. Promosi investasi kurang dibarengi tindakan lanjutan dan pendanaan implementatif.
d. Sistem digitalisasi perizinan butuh optimalisasi pada aspek teknis layanan.
e. Rendahnya pelaporan perusahaan dalam menyampaikan LKPM.
f. Belum meratanya penyebaran infrastuktur yang mendukung pengembangan investasi.

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Potensi pemuda tidak tersalurkan dan diarahkan pada upaya peningkatan kreativitas, olahraga, dan kepemimpinan sehingga berdampak pada lemahnya kapasitas dan daya saing pemuda.
b. Kapasitas organisasi kepemudaan tidak optimal akibat regulasi dan mekanisme kelembagaan yang belum matang.
c. Rendahnya partisipasi pemuda dalam agenda politik pemerintahan dan pembangunan daerah.
d. Pembinaan dan pengembangan olahraga masih sangat tergantung kepada ketersediaan melalui APBD.
e. Belum adanya prasarana olahraga berupa gelanggang/gedung/lapang olaraga/Gedung Diklat olahraga sebagai pusat aktifitas masyarakat maupun atlet dalam penyelenggaraan olahraga.
f. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga yang dipengaruhi oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana serta ruang terbuka untuk melakukan kegiatan berolahraga.
g. Pembinaan atlet dan kondisi infrastruktur olahraga yang kurang memadai sehingga berpengaruh pada daya saing keolahragaan.

14) Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Adanya inkonsistensi data statistik sektoral dimana konsep, definisi, dan teknis pengambilan data antar OPD tidak seragam, menyebabkan perbedaan angka antara data kabupaten, provinsi, dan pusat.
b. Keterbatasan sumber daya manusia statistik profesional masih terbatas secara kualitas dan kuantitas.
c. Keterbatasan infrastruktur statistik dan digitalisasi yang belum terintegrasi kurang mendukung penerapan kebijakan satu data di Kabupaten Bandung Barat.
d. Koordinasi forum satu data dengan perangkat daerah belum berjalan dengan optimal.
e. Pengelolaan data statistik pada perangkat daerah belum secara konsisten memenuhi standar dan kriteria yang diharapkan.
f. Dalam rangka integrasi dan publikasi data masih secara manual belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi

15) Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan peersandian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Keterbatasan sumber daya persandian & kapasitas teknis dalam melaksanakan operasi mandiri dan pemulihan insiden siber.
b. Belum adanya implementasi sistem persandian bersama perangkat daerah dalam penyelenggaraan keamanan administrasi elektronik internal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
c. Terbatasnya infrastruktur persandian seperti enkripsi, *Hardware Security Module* (HSM), dan perangkat lunak yang secara keseluruhan masih mengandalkan sistem dasar yang berisiko tinggi saat terjadi insiden siber.
d. Program sosialisasi tentang persandian dan literasi keamanan data kepada ASN maupun masyarakat masih relatif minim.
e. Belum ada jadwal audit persandian rutin di OPD, sehingga potensi kebocoran data serta kerentanan tetap tidak terdeteksi.

16) Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Minimnya inventarisasi dan penetapan cagar budaya dimana hanya **5 cagar budaya** yang ditetapkan selama tiga tahun terakhir dari target 12 cagar budaya . salah satunya disebabkan oleh terbatasnya kajian akademis dan literasi sejarah.
b. Pelaksanaan pelestarian budaya lokal tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis dimana hanya muncul pada kegiatan-kegiatan informal.
c. Kurangnya sarana dan prasarana kebudayaan sehingga sulit mengembangkan kegiatan budaya secara mandiri dan berkelanjutan.
d. Ruang ekspresi budaya untuk pemuda masih relatif terbatas.
e. Belum terstrukturnya pendokumentasian warisan budaya seperti upacara adat, kuliner, dan kesenian lokal di tingkat Kabupaten.
f. Warisan budaya lokal belum mampu dijadikan identitas untuk membangun *branding* daerah Kabupaten Bandung Barat.

17) Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan peerpustakaan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Kurangnya minat baca di masyarakat, terutama pelajar sehingga berdampak pada rendahnya literasi dan IPM.
b. Belum optimalnya kualitas dan layanan perpustakaan sebagai akibat dari terbatasanya fasilitas layanan perpustakaan dan tidak lengkapnya koleksi bahan pustaka.
c. Masih rendahnya keanggotaan dan pemanfaatan perpustakaan dimana hal ini terlihat dari kunjungan publik yang masih dibawah target.

18) Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Terbatasnya fasilitas pendukung ruang arsip (Depo Arsip) sehingga menghambat proses pelestarian arsip penting.
b. Kurangnya tenaga arsiparis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan arsip.
c. Implementasi kebijakan penyusutan arsip belum optimal karena terkendala oleh SDM, infrastruktur, dan kesadaran perangkat daerah yang masih lemah.

2.3.2.3 Permasalahan Urusan Pilihan

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Produksi perikanan budidaya ikan cenderung stagnan atau menurun yang disebabkan oleh aktivitas cuaca ekstrem.
b. Menurunnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas hasil perikanan di Kabupaten Bandung Barat sebagai akibat dari pencemaran air/tingginya kadar merkuri pada beberapa perairan seperti Waduk Saguling dan Waduk Cirata.
c. Minimnya hilirisasi dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan hasil perikanan sehingga penjualan ikan dalam bentuk mentah masih dominan sehingga nilai jual relatif rendah.
d. Akses permodalaan dan penerapan teknologi pada budidaya perikanan masih relatif terbatas dan sulit diakses oleh pembudidaya.
e. Konsumsi ikan Per Kapita di Jawa Barat masih relatif rendah dengan angka 41kg/tahun. Angka tersebut masih di bawah target nasional yakni sebesar 57kg/tahun.

2) Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Ketimpangan pengembangan dan dukungan potensi pariwisata antara daerah utara dan selatan dimana potensi pariwisata di daerah selatan cenderung minim perhatian.
b. Penurunan kunjungan wisatawan cenderung turun drastis dari 3,8 juta (2023) menjadi 3,02 juta (2024). Hal ini menandakan adanya masalah pada daya tarik dan strategi promosi.
c. Okupansi hotel dan resto pada destinasi wisata daerah Lembang dan sekitarnya turun hingga 30 % sepanjang 2024. Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan pada sektor pendukung pariwisata.
d. Kurang memadainya akses menuju destinasi wisata di wilayah Kab. Bandung Barat terutama destinasi wisata yang berada di wilayah selatan;
e. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan yang mendukung pariwisata;

3) Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Lahan baku sawah mengalami penyusutan dimana hanya tersisa 18.350 ha dari target 60.238 ha karena banyak mengalami alih fungsi menjadi permukiman.
b. Lebih dari 1.500 ha sawah mengalami kekeringan selama kemarau yang diperparah dengan kondisi irigasi rusak dan saluran tidak efektif sehingga perlu pompanisasi dan pengairan alternatif .
c. Sebagian besar lahan persawahan bergantung pada hujan atau ketergantungan tinggi pada sawah tadah hujan sehingga produktivitas pertanian kurang dapat dimaksimalkan dengan optimal.
d. Produktivitas rendah dan minimnya hilirisasi yang mengarah pada integrasi rantai pasok modern.
e. Program lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) belum berlaku luas dan dilaksanakan secara optimal sehingga perlindungan lahan dari alih fungsi masih relatif lemah.

f. Tingginya harga pakan ternak dan ketersediaan yang cenderung fluktuatif secara langsung mempengaruhi pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Bandung Barat.
g. Penanggulangan wabah penyakit ternak masih belum optimal terutama kaitannya dengan tindakan pencegahan, tingkat responsivitas dan kompensasi untuk peternak.
h. Struktur usaha peternakan di Kabupaten Bandung Barat masih relatif kecil dan belum terintegrasi dengan baik sehingga mempengaruhi produktivitas dan harga jual yang rendah.
i. Minat usaha tani dan ternak yang menurun setiap tahunnya atau masih stagnan.
j. Terbatasnya tempat pemotongan hewan ternak/unggas yang berada di bawah standar ketentuan.

4) Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Menurunnya omset pedagang pasar tradisional karena kesulitan beradaptasi dengan transformasi perdagangan/e-commerce sehingga mengancam keberlanjutan ekonomi lokal.
b. Tidak optimalnya pengelolaan pasar terutama soal persampahan yang secara langsung mempengaruhin iklim usaha dan kenyamanan konsumen.
c. Kondisi buruh dan tenaga kerja yang tidak terlindungi dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi mikro.
d. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat penggunaan produk dalam negeri yang dapat mengutungkan masyarakat lokal.

5) Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Pemulihan industri pasca-pandemi belum optimal yang ditandai dengan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja yang masih rendah.
b. Pertumbuhan industri di Kabupaten Bandung Barat tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal dimana tingkat pengangguran dan kemiskinan justru masih relatif tinggi.
c. Belum optimalnya konektivitas rantai pasok antara industri besar dengan industri kecil menengah di Kabupaten Bandung Barat.

d. Infrastuktur yang kurang memadai mempengaruhi distribusi barang industri dan IKM dalam pemasaran dan ekspor.
e. Regulasi dan perizinan yang masih rumit dan menyulitkan pengembangan iklim usaha industri.
f. Terbatasnya akses pasar dan branding yang lemah menyebabkan pengembangan industri tidak berjalan signifikan.

2.3.2.4 Permasalahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Unsur Perencanaan

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur perencanaan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Belum optimalnya proses sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja PD serta antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran dari mulai RKPD/Renja, KUA, PPAS dan APBD, sehingga tidak membentuk satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan yang utuh.
b. Belum optimalnya peran masyarakat/stakeholder dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga proses perencanaan dinilai kurang representatif dengan kondisi masyarakat.
c. Belum optimalnya data sektoral perencanaan yang dihasilkan baik dari aspek validitas maupun ketersediaan data sebagai intrumen penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
d. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi sebagai satu kesatuan utuh dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan periode selanjutnya.

2) Unsur Keuangan

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur keuangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Penatausahaan dan pengelolaan asset tetap dan aset lainnya belum dilakukan secara optimal dan terintegrasi.
b. Belum optimalnya sinkronisasi antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan dimana salah satunya tergambar dari kurangnya sinkronisasi antara program prioritas dan kemampuan fiskal.

c. Sumber pendapatan asli daerah belum dikelola secara optimal sehingga peningkatan PAD dari tahun ke tahun cenderung tidak signifikan. Salah satunya disebabkan oleh lemahnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta sistem pemungutan dan pengawasan belum efektif.
d. Tingkat akuntabilitas dan transparansi masih perlu ditingkatkan dimana masih terdapat keterbatasan akses publik terhadap informasi pengelolaan anggaran dan aset.

3) Unsur Kepegawaian

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur kepegawaian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Perencanaan kebutuhan ASN belum sepenuhnya berbasis analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK).
b. Kualitas dan kompetensi ASN belum merata sebagai akibat dari masih terbatasnya pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan serta adanya kesenjangan kemampuan teknis dan manajerial antar pegawai.
c. Masih ada persepsi negatif terkait objektivitas proses mutasi dan promosi.
d. Manajemen kinerja ASN belum efektif dimana penilaian kinerja masih bersifat administratif dan belum mencerminkan kinerja riil serta belum ada keterkaitan kuat antara kinerja individu dan pencapaian organisasi.
e. Disiplin dan etos kerja ASN masih perlu ditingkatkan dimana tingkat kepatuhan terhadap jam kerja dan tanggung jawab belum konsisten. Selain itu masih terjadi pelanggaran disiplin tanpa sanksi pembinaan yang jelas.
f. Sistem reward and punishment belum diterapkan secara konsisten.

4) Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Belum terpenuhinya kebutuhan pelatihan secara merata dimana pelaksanaan pelatihan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan dan fungsi kerja.
b. Penyusunan program diklat belum berbasis kompetensi dan belum sepenuhnya disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan (*training needs assessment*).
c. Kurangnya pemetaan kompetensi ASN yang akurat sebagai dasar pengembangan SDM.
d. Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas Diklat.
e. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasca-Diklat Tidak Maksimal.

5) Unsur Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan fungsi penunjang urusan Pemda unsur penelitian dan pengambangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Alokasi anggaran untuk urusan Litbang masih sangat terbatas dan belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.
b. Jumlah penelitian dan kajian yang dilakukan oleh perangkat daerah masih minim serta kualitas metodologi dan keluaran penelitian belum memadai untuk menjadi dasar kebijakan.
c. Belum Terintegrasinya Hasil Litbang ke dalam Proses Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan.
d. Jumlah dan kompetensi aparatur yang memiliki latar belakang atau keahlian dalam penelitian masih rendah.
e. Penelitian yang dilakukan belum diarahkan untuk mendukung inovasi pelayanan publik atau pemecahan masalah lokal secara strategis.

2.3.2.5 Permasalahan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan pengawasan urusan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Jumlah auditor dan pejabat fungsional pengawas masih terbatas dan belum sebanding dengan cakupan objek pengawasan.
b. Pengawasan belum mampu menjangkau seluruh perangkat daerah, BUMD, dan kegiatan prioritas secara optimal.
c. Banyak rekomendasi hasil audit belum ditindaklanjuti secara tuntas oleh perangkat daerah.
d. Tumpang tindih pengawasan atau justru kekosongan pengawasan pada kegiatan tertentu masih terjadi.
e. Pendekatan pengawasan masih lebih bersifat represif dibandingkan preventif, ditambah dengan minimnya kegiatan pembinaan, sosialisasi regulasi, dan edukasi pengelolaan risiko kepada perangkat daerah.

2.3.2.6 Permasalahan Urusan Pemerintahan Umum

Permasalahan pembangunan unsur pendukung urusan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. pelaksanaan program pemerintahan umum.

b. Struktur organisasi dan tata kerja beberapa perangkat daerah belum mendukung pelayanan pemerintahan yang adaptif dan responsif.
c. Belum tersedia basis data yang akurat dan terintegrasi terkait dinamika sosial-politik di masyarakat.
d. Koordinasi antar lembaga seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan perangkat daerah lainnya masih belum intensif dan sistematis serta penanganan isu-isu strategis seringkali bersifat reaktif, bukan antisipatif.
e. Pendataan dan pembinaan terhadap ormas dan partai politik belum berjalan maksimal.
f. Keterbatasan sumber daya dan anggaran pada perangkat daerah terkait yang membidangi urusan pemerintahan umum.;

2.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut dengan Inovasi Daerah, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melaksanakan penilaian inovasi daerah dengan menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) serta memberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) kepada pemerintah daerah yang terinovatif. Pada tahun 2019 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar 550 dan pada tahun 2020 menjadi 673.

Tetapi mulai tahun 2023 perhitungan Indeks Inovasi Daerah Pada Tahun 2021 menggunakan metode yang berbeda dengan capaian tahun 2021 sebesar 47,39 dengan kategori inovatif, menduduki peringkat ke-120 dari 415 kabupaten. Pada tahun 2022 capaian IID sebesar 53,40 dengan katagori inovatif tetapi pada tahun 2023 capaian IID turun menjadi 39,07 tetapi masih pada katagori inovatif.

Gambar 2.29. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 – 2023

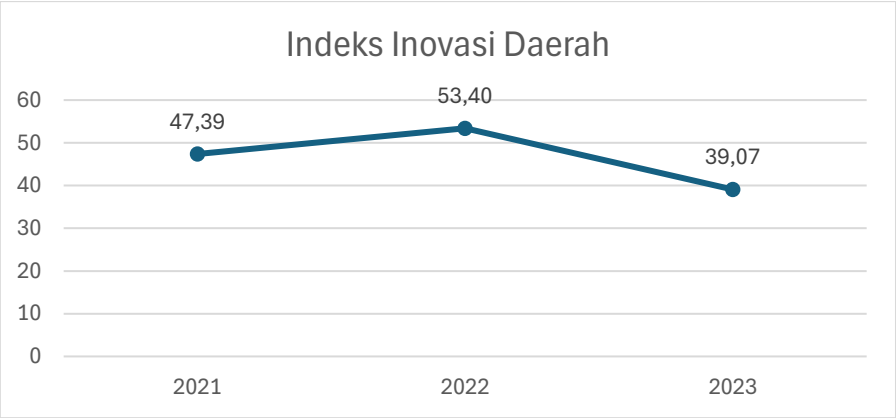

Sumber: Litbang Bappelitbangda, 2024, diolah

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.900-Bappelitbangda/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat terdapat 185 inovasi. Sampai dengan Januari 2025, terdapat 102 inovasi unggulan yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 11 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, 67 Inovasi Pelayanan Publik, dan 24 Inovasi Daerah Lainnya. Inovasi tersebut digunakan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja program dan kegiatan di tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

2.4.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Tabel 2.201. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2024

NO	JENIS TATA KELOLA	NAMA TATA KELOLA	KETERANGAN	TAHUN
1	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Analisis Kelembagaan)	SIMAK merupakan aplikasi yang dibangun oleh Bagian Organisasi pada Sekretaris Daerah yang menghasilkan informasi dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (Evjab) Perangkat Daerah, sedangkan informasi mengenai dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah, Perbup SOTK dan Perbup Tupoksi Perangkat Daerah sedang dalam tahap pengembangan. Aplikasi berbasis web ini didirikan pada tahun 2021 dan berada pada tahap pelaksanaan dan pengembangan	2021
2		SMART ASN (Sistem Monitoring ASN RealTime)	Aplikasi SMART ASN merupakan super app yang dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) pada tahun 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan. Aplikasi ini dibangun atas dasar prinsip keterpaduan (standar data dan informasi, harmonisasi proses bisnis dan layanan terpadu). SMART ASN	2022

			dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kemudahan dan efisiensi. Dengan serangkaian fitur yang disematkan, aplikasi ini membawa pengalaman pengelolaan kepegawaian ke tingkat baru. Fitur absensi yang terintegrasi memungkinkan para ASN untuk melakukan pencatatan kehadiran dengan cepat dan akurat, sementara riwayat absensi memberikan gambaran yang jelas tentang pola kehadiran mereka. Pengguna dapat dengan mudah menginput aktivitas harian mereka, memantau progres tugas, dan memastikan bahwa semua pekerjaan terlaksana dengan efisien. Tidak hanya itu, SMART ASN juga menyediakan akses langsung ke eoffice, sehingga pengguna dapat dengan cepat menanggapi komunikasi resmi. Informasi instruksi dari pimpinan juga tersedia dengan mudah, memastikan para ASN selalu terhubung dengan arahan terbaru dan prioritas organisasi. Fitur layanan pengaduan aplikasi dan jaringan memastikan setiap masalah teknis pada aplikasi dan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. SMART ASN juga memberikan akses langsung untuk memeriksa Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), memberikan kenyamanan dalam mengurus kewajiban pajak. Dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pengguna dapat melakukan donasi dengan mudah melalui platform ini, membantu masyarakat yang membutuhkan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan integrasi fitur-fitur kepegawaian yang komprehensif dan kemudahan penggunaan yang luar biasa, SMART ASN tidak hanya menjadi alat penting bagi para ASN dalam menjalankan tugas-tugas mereka, tetapi juga sebagai katalisator untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di seluruh organisasi pemerintah	
3		Aplikasi e-SKM (elektronik Survei Kepuasan Masyarakat)	Secara garis besar e-SKM dapat menghasilkan nilai akhir indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang merupakan indikator utama yang terdapat pada misi 4 dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023. Setiap tahunnya indikator	2021

			kinerja utama harus selalu diukur keberhasilannya apakah mencapai target atau tidak. Indikator kinerja utama juga digunakan sebagai ukuran keberhasilan aspek pelayanan pada setiap dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (RENSTRA PD). Aplikasi berbasis web ini didirikan pada tahun 2021 dan berada pada tahap pelaksanaan. Aplikasi ini dibangun oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.	
4		Pengaduan Layanan Diskominfotik (PLASTIK)	PLASTIK merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) sejak tahun 2019 dan saat ini berada pada tahap pelaksanaan. Aplikasi Pengaduan Layanan Diskominfotik (PLASTIK) berbasis web dan android telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja secara eksternal. Proses pengaduan layanan aplikasi, jaringan dan persandian menjadi lebih mudah, sementara pelapor dapat memantau perkembangan aduan mereka berdasarkan nomor tiket yang diberikan oleh sistem hingga penyelesaiannya. Hal ini membantu dalam mewujudkan pelayanan Diskominfotik yang berkualitas, efektif dan efisien. Selain itu, aplikasi ini telah terintegrasi dengan aplikasi SMART untuk memperluas jangkauan layanan pengaduan dan meningkatkan koordinasi antaraplikasi dalam jaringan pemerintah, yang berdampak positif bagi efisiensi operasional dan pelayanan publik yang lebih baik.	2019
5		SIPEPEP ADA KABAR (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengamanan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat).	Melalui aplikasi “SIPEPEP ADA KABAR” ini diharapkan kegiatan pengamanan asset daerah komplek Pemda Kab. Bandung Barat dapat terdokumentasi secara digital dan terintegrasi. Yang kemudian dapat memudahkan didalam melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan Pam asset tersebut sebagai bahan evaluasi. Selain kewajiban melaksanakan tugas secara teknis, POLPP diwajibkan untuk membuat pelaporan secara administrasi sebagai bukti pelaksanaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. sebagai contoh yaitu melaksanakan salah satu tugas pengamanan asset daerah milik pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang cukup banyak.	2023

6		SICPAK (Sistem Pencatatan dan Pengelolaan Angka Kredit) Bagi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja)	Melalui SICPAK ini diharapkan Aparatur Polisi Pamong Praja yang merupakan ASN termasuk kedalam kualifikasi jenis Jabatan Fungsional, dapat melakukan inventarisasi/pendokumentasian pelaksanaan tugas / kegiatan, dengan mudah dan efisien, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur capaian organisasi didalam pelaksanaan penegakan perda & perkada, penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas juga sebagai bahan ajuan penetapan Angka Kredit bagi pejabat fungsional itu sendiri	2023
7		SIGAP (Survey Informatif Gampang Akurat Dan Paperles)	SIGAP menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari kebijakan SPBE ini. Melalui SIGAP, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan penggunaan kertas dalam jumlah besar, kini diubah menjadi survey digital yang tidak lagi bergantung pada kertas (paperless). Proses pengumpulan data menjadi lebih efisien dan praktis.	2024
8		Sistem Operasi Bendung Secara Online	Melalui Sistem Operasi Bendung Secara Online pelaksanaan operasi pintu bendung irigasi dilakukan secara manual oleh petugas operator bendung. Permasalahan yang dihadapi dalam pengoperasian manual ialah disaat kondisi cuaca buruk atau operator mengalami masalah Kesehatan, akan menjadi sulit juga dalam pengoperasiannya dikarenakan jarak bendung yang lumayan jauh dari rumah jaga. Inovasi operasi bendung berbasis online sangat diperlukan untuk menghadapi masalah tersebut. Dengan operasi bendung berbasis online, operasi pintu bendung irigasi bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa harus datang ke Lokasi bendung. Di dalam basis online tersebut dapat diketahui tinggi bukaan pintu nya. Serta terdapat cctv untuk memonitoring di lingkungan bendung, yang sangat berguna disaat malam hari	2024
9		Pemetaan Inventarisasi Sungai Kabupaten Bandung Barat	Melalui Pemetaan Inventarisasi Sungai Kabupaten Bandung Barat Sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Bandung Barat sebelumnya belum pernah terdata dengan baik. Pelaksanaan inventarisasi Sungai yang melintas di wilayah Kabupaten Bandung Barat diperlukan guna mengetahui Sungai yang ada di kabupaten	2024

			bandung barat serta mengetahui panjang dari sungai-sungai tersebut. Selain inventarisasi Sungai, dilakukan juga pendataan terhadap Sub DAS / Catchment Area dari DAS Citarum guna mengetahui ada berapa daerah tangkapan air di wilayah kabupaten bandung barat. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilanjutkan dengan analisa-analisa lainnya terkait hidrologi/hidrolika/hidrometri guna mengukur proyeksi, potensi, dan dampak dari sumber daya air.	
1	Tata Kelola Pemerintahan di Puskesmas	Inovasi Puskesmas DTP Saguling	1. Aplikasi E BLUD 2. Aplikasi SIAP BARANG	2022 2022
2		Inovasi Puskesmas DTP Cikole	1. Aplikasi E BLUD 2. Aplikasi SIAP BARANG	2022 2022

Sumber : Litbang Bappelitbangda, 2025

2.4.2 Inovasi Pelayanan Publik

Tabel 2.202. Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

NO	JENIS TATA KELOLA	NAMA TATA KELOLA	KETERANGAN	TAHUN
1	PELAYANAN PUBLIK	SIDILAN	SIDILAN (Sistem Daftar Informasi Layanan Online) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis web mulai dikembangkan pada masa pandemik Covid-19. Dengan sidilan masuk sekolah, permasalahan orang tua murid dalam memenuhi persyaratan pendaftaran masuk sekolah dapat terselesaikan. 681 sekolah dasar di wilayah Kab Bandung Barat mempunyai user khusus akses SIDILAN, yang berfungsi untuk permohonan adminduk (KIA dan akta kelahiran) secara online. Orang tua murid membawa berkas persyaratan adminduk ke sekolah dan sekolah akan memprosesnya melalui sidilan. Inovasi ini sendiri didirikan pada tahun 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan	**2022**
2		KBB Superapp	Aplikasi KBB Superapp adalah aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) pada bulan Mei tahun 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan. KBB Superapp adalah solusi terkini yang mengubah cara berinteraksi dengan layanan publik dan kesejahteraan sosial. Dengan menyatukan berbagai fitur unggul dalam satu platform, KBB Superapp menghadirkan kemudahan dan	**2022**

			kenyamanan dalam genggaman. Salah satu fitur utama KBB Superapp adalah layanan pendaftaran UMKM pada berbagai event, memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan eksposur bisnis. Tak hanya itu, dalam situasi darurat, layanan gawat darurat seperti panggilan ambulan, fogging, dan disinfektan dapat diakses dengan cepat melalui aplikasi ini, membantu menyelamatkan nyawa dan mencegah penyebaran penyakit. Kesehatan juga menjadi prioritas utama dalam KBB Superapp. Pengguna dapat dengan mudah menemukan fasilitas kesehatan terdekat untuk keperluan medis mereka. Di samping itu, layanan Islami seperti informasi waktu shalat, arah kiblat, dan lokasi masjid terdekat memberikan kenyamanan bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah mereka sehari-hari. Dalam hal kemanusiaan, KBB Superapp menyediakan layanan donasi yang memudahkan pengguna untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bersatu dalam membantu sesama.	
3		Aplikasi Kir Online Bandung Barat (AKURAT)	Aplikasi AKURAT ini didirikan pada tahun 2022 dibawah Dinas Perhubungan, dalam rangka mewujudkan *e-Government*, masyarakat dapat melaksanakan pendaftaran dan pembayaran pengujian kendaraan secara online dari ponsel masing masing sehingga diharapkan dapat menghilangkan pungutan liar. Aplikasi ini di unduh melalui playstore dan berada pada tahap pelaksanaan, pada tahun 2023 mengalami pengembangan dalam aplikasi ini pengembangan yang dibuat menambahkan sebuah fitur pelayanan pemerikasaan uji emisi bagi kendaraan pribadi	
4		"POJOK KOPEAH (POJOK KONSULTASI PERTANAHAN DAN PAJAK DAERAH)" Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat	Secara garis besar Pojok Konsultasi Pertanahan dan Pajak Daerah dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat terkait bidang pertanahan dan pajak daerah, selain itu Pojok Kopeah juga merupakan embrio pelayanan baru di Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara. Inovasi POJOK KOPEAH sendiri didirikan pada Januari 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan	**2022**

5		Sistem Aplikasi Mall Pelayanan Publik Digital (MPP Digital)	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) adalah pembaharuan aplikasi dari Sistem Aplikasi Perizinan Layanan Unggul, Mudah dan Cepat (SIAP LUMPAT), aplikasi yang berbasis web ini didirikan oleh DPMPTSP pada tahun 2018 dan berada pada tahap pelaksanaan. Sistem Aplikasi Perizinan Layanan Unggul, Mudah dan Cepat (SIAP LUMPAT) merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan. Aplikasi tersebut terdapat fitur cetak mandiri dan dilengkapi dengan pengaman digital berupa tanda tangan digital. Dan dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi kontak fisik antara pemohon dan petugas pelayanan perizinan, sehingga dapat meminimalisir adanya gratifikasi pada tahun 2024 aplikasi (SIAP LUMPAT) mengalami pembaharuan menjadi aplikasi MPP Digital (Mall Pelayanan Publik Digital) Sistem MPP Digital adalah Tempat berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan nyaman. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengakses aplikasi Sistem MPP melalui laman website dengan menggunakan browser pada komputer atau perangkat mobile lain yang dapat terhubung ke internet, aplikasi ini memilki penambahan beberapa fitur didalamnya fitur baru yang terdapat pada aplikasi MPP antara lain adalah Terintegrasi dengan sistem antrian MPP fisik (bisa cek antrian dan booking antrian), Alur perizinan disesuaikan (sebelumnya ada verifikasi dokumen oleh dpmptsp, sekarang langsung diverifikasi tim teknis), Terintegrasi dengan SISDMK - Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Tandatangan Digital terintegrasi dengan BsrE.	**2018**
6		Ngajamu Kecamatan Lembang	Inovasi ini didirikan pada tahun 2022 dan sudah pada tahap pelaksanaan, inovasi ini digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk per batas usia desa dan kecamatan sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan wilayah, perangkat daerah dan Lembaga Akses link adminduk mandiri	**2022**
7		IKD Goes To Campoes	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (Disdukcapil KBB) pada tahun 2022 berinisiatif meluncurkan Program IKD Goes To Campoes, yaitu pelayanan	**2022**

			jemput bola dengan menggunakan kepada setiap perguruan tinggi di Kabupaten Bandung Barat, berkeliling ke perguruan tinggi untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada mahasiswa. Setelah melalui serangkaian tahapan dan penyempurnaan, baik dari segi jaringan konektivitas, mekanisme pelayanan maupun peningkatan kualitas SDM, selama periode Januari – Desember 2022 pelayanan IKD Goes To Campoes bahwa penerapan Identitas Kependudukan Digital merupakan langkah maju dalam administrasi kependudukan di Indonesia.. Jika dinominalkan, pelayanan IKD Goes To Campoes telah menghemat belanja masyarakat KBB dengan memangkas biaya pengurusan dokumen kependudukan.	
8		SIKOBRA	Media website dengan alamat ***sikobra.bandungbaratkab.go.id*** didirikan pada April 2021 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan merupakan inovasi yang mampu mempermudah penyebarluasan informasi serta penyediaan data keolahragaan dengan harapan dapat meningkatkan layanan keolahragaan. Masyarakat dan pelaku olahraga kapan dan dimana saja dengan akses internet melalui perangkat handphone dapat dengan murah, cepat dan mudah mengakses data dan informasi keolahragaan melalui informasi keolahragaan berbasis website ini	**2021**
9		Jemput Pajak (JEJAK)	Layanan mobil jemput pajak atau biasa disapa "Jejak" merupakan layanan jemput bola kepada para wajib pajak (WP) oleh BAPENDA. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam melaporkan pajak. Layanan Mobil Jejak ini berkeliling ke daerah dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya. Inovasi ini merupakan pengembangan dari layanan warung pajak yang dilaksanakan mulai 2017 yang dirintis oleh bidang pendapatan dengan membuka warung/tenda pelayanan pajak (pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak reklame) di kecamatan - kecamatan. Pada tahun 2020 diluncurkan mobil layanan warung pajak daerah. Pada tahun 2021 branding layanan ini	**2021**

			menjadi "Jejak" (Jemput Pajak). Inovasi ini dibuat sebagai upaya untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD).	
10		Sistem Informasi Pajak Daerah – Pajak Bumi Bangunan (SIPADA-PBB)	Aplikasi berbasis web ini didirikan oleh BAPENDA pada Maret 2022 dan berada pada tahap pelaksanaan. Secara garis besar Sistem Informasi Pajak Daerah merupakan inovasi pelayanan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Manfaat dari inovasi ini adalah : a. Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan pelayanan hanya dengan mendatangi kecamatan sesuai dengan domisili terdekat; b. Wajib Pajak dapat melakukan monitoring posisi berkas secara online melalui nomor resi berkas yang sudah diberikan petugas dengan mengakses website Bapenda; c. Wajib Pajak dapat melakukan pengecekan tunggakan PBB-P2 secara online melalui website Bapenda (https://sipada-pbb.bandungbaratkab.go.id/) dengan mengisi Nomor Objek Pajak (NOP) d. Wajib Pajak dapat melakukan cetak SPPT Mandiri secara online melalui website Bapenda dengan mengisi Nomor Objek Pajak (NOP) dan nama pemilik; e. Pelayanan dari awal hingga selesai dilakukan melalui administrasi secara online, sehingga monitoring berkas dapat diakses secara transparan dan akuntabel oleh petugas Bapenda dan Wajib Pajak; f. Transaksi data pengajuan pelayanan per-harinya dapat dilakukan lebih banyak dari sebelumnya selama kantor pelayanan masih buka dan mendapat antrean; g. Dokumen persyaratan akan tersimpan pada Database Server, sehingga pengajuan pelayanan ini bersifat paperless dan berkas tidak akan tercecer/hilang.	**2022**
11	PELAYANAN PUBLIK	Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (GEPRAK)	Geprak didirikan pada April 2022 oleh DP2KBP3A, secara garis besar GEPPRAK (Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak) timbul dari keresahan masih banyaknya perlakuan yang tidak sepantasnya dialami perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat sehingga menjadi satu kegiatan gerakan yang diusung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan fungsi perlindungan	**2022**

			perempuan dan anak secara optimal dengan melibatkan pentahelix yang melibatkan peran pemerintah, lembaga swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa. Dalam pelaksanaanya menguatkan jejaring dan kerjasama/kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dalam pencegahan dan penanganan serta penguatan dan pengembangan struktur pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan, anak, disabilitas dan lanjut usia untuk mewujudkan Bandung Barat bebas kekerasan.	
12		Sistem Informasi Kelitbangan	Aplikasi Sistem Informasi Kelitbangan didirikan pada tahun 2020 oleh Bappelitbangda, dimana secara garis besar Sistem Informasi Kelitbangan dapat menghasilkan informasi : hasil kelitbangan (hasil kelitbangan Bappelitbangda dan perangkat daerah lainnya), forum komunikasi (usulan penelitian/kajian dari perangkat daerah, usulan ide dan inovasi, input hasil kelitbangan perangkat daerah, input hasil kelitbangan stakeholder lainnya). Sistem Informasi Penelitian dikembangkan berbasis web, memudahkan untuk mengakses sistem tersebut dimana saja dan kapan saja.	**2020**
13		LINDA (Lomba Inovasi Daerah)	Melalui LINDA merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Bappelitbangda yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem inovasi di Kabupaten Bandung Barat dan meningkatkan minat kepeda seluruh element di Kabupaten Bandung Barat dalam berinovasi sesuai dengan PP 38 Tahun 2017 entang pedoman penyelenggaraan inovasi di daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.	
14		Sesah Hilap (Sedekah Sampah Hidup Lebih Mantap	Inovasi yang baru didirikan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 4 Januari tahun 2024 demi memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam tata cara pengelolaan sampah diwilayah kecamatan ngamprah, sama seperti halnya Bank Sampah pada umumnya bagaimana cara dalam memilah sampah menjadi rupiah tujuanya agar masyarakat diwilayah Kecamatan Ngamprah dapat memilah sampah organik dan non organik menjadi rupiah serta menjaga lingkungan yang	**2024**

			bersih dan sehat terbebas dari tumpukan sampah.	
15		ABTHREE (AMBULANCE BANDUNG BARAT BERKAH)	Inovasi ini berdiri dilatarbelakangi untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke rumah sakit juga membantu kecelakaan dan paramedis kedaruratan di wilayah Ngamprah, manfaat dengan adannya inovasi ini mempercepat pelayanan kedaruratan masalah kesehatan, bencana serta kesiapsiagaan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi, membantu mempercepat penurunan angka kematian karena kehamilan, nifas dan melahirkan.	**2023**
16		SI TT (Sidat Tuk PMT)	Inovasi ini didirikan pada 4 Agustus 2021 di Kecamatan Ngamprah karena adanya kasus stunting. Inovasi ini bertujuan untuk menurunkan dan mencegah angka stunting di wilayah Kecamatan Ngamprah melalui pemberian PMT bagi balita di posyandu	**2021**
17		GURILEM KBB (Gudang Literasi Elektronik Masyarakat Kabupaten Bandung Barat)	Inovasi ini didirikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat diantaranya dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu pendidikan secara formal maupun non formal Artinya bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari upaya mendorong masyarakat supaya terbiasa belajar, kegiatan belajar tidak bisa dipisahkan dari kegiatan membaca. Berdasarkan data statistik UNESCO tahun 2012, indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001 yang artinya dari 1.000 penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca dan indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara. Dengan adanya E-book, harapannya bisa lebih mendekatkan bahan bacaan dan bahan informasi bagi seluruh masyarakat secara merata sehingga dengan demikian tugas Pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat bisa dilaksanakan oleh semua pihak mulai dari pemerintah kabupaten sampai ke tingkat desa dan masyarakat umum yang mempunyai perhatian terhadap pemasyarakatan minat baca masyarakat. Aplikasi ini di unduh melalui playstore. Adapun manfaat aplikasi adalah : 1. terwujudnya pelayanan kepada masyarakat untuk dapat membaca dimana saja dan kapan saja; 2. pemerataan layanan perpustakaan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat; 3. mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan perpustakaan digital guna meningkatkan minat dan kebiasaan membaca.	**2022**
18		SIGAP BENCANA	Aplikasi SIGAP BENCANA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPBD untuk memudahkan warga dalam melaporkan kejadian bencana. Aplikasi ini tersedia dalam versi web, sedangkan untuk versi mobile akan segera dikembangkan. Aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk membantu Admin dalam mengelola laporan bencana yang diterima oleh dari masyarakat. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, BPBD dapat mempercepat penanganan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.	**2021**
19		Pelita Bening	Pelita Bening adalah program di Kabupaten Bandung Barat yang bertujuan untuk menangani	**2022**

			stunting pada ibu hamil dan balita berisiko stunting. Program ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang berperan dan bertanggung jawab dalam upaya penurunan angka stunting, dengan setiap perangkat daerah mendampingi satu kecamatan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai program Pelita Bening: • **Tujuan:** Menurunkan angka stunting pada ibu hamil dan balita berisiko stunting. • **Pendekatan:** Sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah, di mana setiap perangkat daerah memiliki kecamatan dampingan. • **Aksi:** Memberikan makanan tambahan (PMT) berupa telur ayam, serta upaya lainnya untuk mempercepat penurunan angka stunting. • **Contoh:** Diskominfotik KBB, bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, mendampingi Kecamatan Sindangkerta dalam program ini. Dengan kata lain, Pelita Bening adalah upaya bersama untuk mengatasi masalah stunting di Bandung Barat dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah.	
22		GOBANG (Go Obat Lembang)	Inovasi ini dibangun untuk memberikan pelayanan kefarmasian di rumah sakit untuk memecahkan masalah lamanya pelayanan penyediaan obat dari resep yang diberikan untuk pasien. Pasien yang telah selesai dari poli rawat jalan, memasukkan resep obat ke bagian farmasi kemudian oleh bagian farmasi ditawarkan pengantaran obat ke rumah yang bersangkutan atau ke toko obat atau apotik yang sudah bekerjasama dengan RSUD Lembang yang lokasinya dekat rumah pasien. Gobang diutamakan untuk pasien lansia atau prolanis.	**2022**
23		SIP (SISTEM INFORMASI POSYANDU)	Inovasi ini dibangun di DPMD untuk memecahkan masalah lambatnya pendataan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang meliputi cakupan	**2022**

			program, pencapaian program hasil penimbangan dan partisipasi masyarakat. Data yang dihasilkan dari sistem informasi ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi kader posyandu untuk memahami permasalahan sehingga dapat mengembangkan kegiatan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Inovasi ini memudahkan pendataan serta menghasilkan informasi yang tepat guna dan tepat waktu mengenai pengelolaan posyandu, agar berbagai pihak yang berperan dalam pengelolaan posyandu dapat menggunakannya untuk membina posyandu demi kepentingan masyarakat	
24		PETADIK (Pelayanan Data Pendidikan)	Aplikasi ini didirikan tepatnya pada 09 Mei 2022, latar belakang didirikannya PETADIK (Pelayanan Data Pendidikan) demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat khususnya di sektor pendidikan dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat membuat inovasi Pelayanan Data Pendidikan (PETADIK), Tujuan utama inovasi pelayanan data pendidikan dalam bentuk digitalisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.	**2022**
25		SIKASIK (Sistem Informasi Layanan Berbasis Elektronik)	Aplikasi ini berdiri pada tahun 2020, latar belakang didirikanya aplikasi ini berdasarkan hasil dari Project Leader bersama Sistem Analis Program Sistem Informasi Dan Layanan Berbasis Elektronik (SIASIK) mendesain kebutuhan. Kebutuhan user berdasarkan hasil FGD. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang maksimal terkait Kesiswaan, Sarana Prasarana dan Kelembagaan, dan Kurikulum pada masyarakat sehingga informasi diperoleh secara jelas dan aktual terkait Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat.	**2020**
26		Alumni Ngaraksa Sakola	Alumni Ngaraksa Sakola merupakan Program mengajak alumni untuk memberikan bantuan kepada sekolah SD atau SMP tempat dahulu menimba ilmu. Dengan semangat "ngaraksa", yang berarti melindungi atau memelihara, para alumni diundang untuk memberikan kembali kepada sekolah mereka dengan berbagai bentuk bantuan. Melalui program ini, kami bertujuan	**2023**

			untuk membangun kembali jejak pendidikan yang telah kami lalui dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan pendidikan di sekolah kami. Para alumni memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan fasilitas, sarana, dan lingkungan belajar di sekolah mereka. Dengan demikian, kami tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga membangun hubungan yang berkelanjutan antara alumni, sekolah, dan masyarakat. Berbagai bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh para alumni meliputi penyediaan peralatan pembelajaran, buku -buku referensi, perlengkapan olahraga, renovasi ruang kelas, dan program pengembangan guru. Selain itu, para alumni juga dapat memberikan bantuan berupa pembinaan, pelatihan, dan mentoring kepada siswa -siswa yang membutuhkan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi sekolah dan siswa, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan kepedulian di antara alumni. Melalui kolaborasi dan solidaritas, kami bersama -sama menjaga warisan pendidikan kami dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan generasi mendatang. Dengan semangat "Alumni Ngaraksa Sakola", kami berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan sekolah kami serta menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan inklusif bagi semua siswa.	
27		Ekstrakurikuler Hafid Al-Quran	Ekstrakurikuler Hafid Al-Quran merupakan program inovasi yang Di Sekolah dilaksanakan ektra Kulikuler Hafid Alquran sehingga siswa dapat menjadi hafid/hafidoh Alquran sekaligus membentuk karakter siswa yang religious. Melalui program ini, siswa memiliki kesempatan untuk mendalami pemahaman, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al - Quran sebagai bagian integral dari pendidikan mereka di sekolah. Dengan memperkenalkan ekstrakurikuler ini, kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang mempromosikan nilai - nilai keagamaan dan mengembangkan keterampilan membaca Al - Quran. Siswa diajak untuk mengeksplorasi dan mendalami makna serta ajaran -ajaran yang terkandung dalam Al - Quran melalui berbagai kegiatan, seperti	**2023**

			pengajian, diskusi, tadarus, dan perlombaan membaca Al - Quran. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang religius, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Melalui pembelajaran Al - Quran, siswa diajak untuk memahami nilai - nilai moral dan etika Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari -hari. Mereka juga dibimbing untuk menjadi teladan dalam kebaikan, toleransi, dan kasih sayang kepada sesama. Dalam pelaksanaannya, program Ekstrakurikuler Hafid Al-Quran melibatkan guruguru yang berkualifikasi di bidang keagamaan dan pengajar AlQuran. Mereka memberikan bimbingan, pembinaan, dan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran AlQuran. Selain itu, kerja sama dengan komunitas keagamaan dan lembaga-lembaga terkait juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan program ini. Melalui program Ekstrakurikuler Hafid Al-Quran, kami berharap siswa dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam membaca AlQuran, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan karakter religius mereka. Kami yakin bahwa dengan mendalami AlQuran, siswa akan menjadi individu yang lebih baik, bermanfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa	
28		Podcast BISA CERDAS (Bincang Santai Cerita Seputar PAUD, Penmas, Pendas	Podcast BISA CERDAS (Bincang Santai Cerita Seputar PAUD, Penmas, Pendas yang mengupas inovasi-inovasi para pendidik dan tenaga kependidikan di Bandung Barat agar dapat disebarluaskan.. Dengan gaya bincang santai, podcast ini bertujuan untuk membagikan cerita inspiratif, pengalaman, dan praktik terbaik dalam dunia pendidikan kepada seluruh masyarakat. Melalui podcast ini, kita berusaha untuk memberikan pengakuan kepada para pahlawan pendidikan yang selama ini bekerja keras untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas di Kabupaten Bandung Barat. Para pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, strategi, dan inovasi yang telah berhasil mereka terapkan di sekolah - sekolah mereka. Podcast BISA CERDAS tidak hanya mempromosikan inovasi - inovasi tersebut, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi para pendidik dan tenaga	**2023**

			kependidikan lainnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka. Dengan mendengarkan cerita -cerita sukses dari reka n -rekan seprofesi, diharapkan para pendidik dapat merasa termotivasi dan terdorong untuk mengembangkan ide -ide kreatif dalam upaya menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Kami berharap bahwa melalui podcast ini, inovasi -inovasi yang dilakukan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan di Bandung Barat dapat disebarluaskan secara lebih luas, bahkan hingga ke seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita dapat membangun jaringan kolaboratif yang kuat dan saling mendukung dalam menciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerdas dan berkualitas	
29		Majalah Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)	Majalah Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) sebagai media menyebarluaskan informasi inovasi-inovasi dari para pendidik juga menyebarluaskan kegiatan kegiatan Dinas Pendidikan, agar dapat dibaca oleh halayak ramai, majalah kinanti ini terbit setiap bulan. Majalah Kinanti adalah sebuah inovasi media yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai berbagai inovasi dari para pendidik serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Majalah ini terbit setiap bulan dan tersedia untuk dibaca oleh masyarakat luas. Dalam setiap edisinya, Majalah Kinanti akan mengulas berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh para pendidik di Kabupaten Bandung Barat. Ini termasuk cerita inspiratif, praktik terbaik, dan kegiatan - kegiatan kreatif yang telah berhasil mereka terapkan di lingkungan pendidikan. Melalui penyebaran informasi ini, kita berharap untuk memotivasi dan menginspirasi pembaca, baik para pendidik maupun masyarakat umum, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, Majalah Kinanti juga akan menjadi wadah untuk menyebarluaskan kegiatan -kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Ini termasuk program -program unggulan, acara - acara penting, dan informasi - informasi terkini mengenai perkembangan pendidikan di daerah tersebut. Dengan demikian, Majalah Kinanti tidak hanya menjadi	**2023**

			sumber inspirasi, tetapi juga sumber informasi yang penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Kami berharap bahwa melalui Majalah Kinanti, inovasi-inovasi dari para pendidik serta kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan dapat lebih mudah diaksesdan dipahami oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis, kreatif, dan berdaya saing untuk masa depan yang lebih baik.	
30		Jurnal Kinanti	Jurnal Kinanti: Media untuk menerbitkan Karya Tulis Ilmiah Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan secara gratis sebagai salah satu media untuk mendapatkan Angka Kredit. Jurnal kinanti terbit setiap 6 bulan. Jurnal Kinanti merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menjadi media publikasi karya tulis ilmiah bagi para pendidik dan tenaga kependidikan secara gratis. Dengan terbitnya Jurnal Kinanti setiap 6 bulan, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bandung Barat memiliki akses yang lebih luas terhadap karya - karya tulis ilmiah yang relevan dan berkualitas. Mengirimkan karya tulis ilmiah ke Jurnal Kinanti adalah salah satu cara bagi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan Angka Kredit yang diperlukan dalam proses penilaian kinerja mereka. Jurnal ini menyediakan platform yang terbuka bagi para penulis untuk membagikan hasil -hasil penelitian, pemikiran, dan praktik terbaik dalam bidang pendidikan. Dengan menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang dan bidang keahlian, Jurnal Kinanti bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan, pengetahuan, dan pengalaman antara para profesional pendidikan. Ini juga menjadi sarana untuk memperluas wawasan, meningkatkan kualitas, dan mempromosikan kolaborasi di antara komunitas pendidikan. Keberadaan Jurnal Kinanti tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca yang ingin mendapatkan wawasan baru tentang perkembangan terkini dalam pendidikan. Dengan menyediakan akses gratis, Jurnal Kinanti berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif di	**2023**

			Kabupaten Bandung Barat. Kami berharap bahwa melalui Jurnal Kinanti, para pendidik dan tenaga kependidikan dapat lebih mudah mengakses, menyebarkan, dan memperoleh pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.	
31		LAMSIJAN (Limbah Sisa Uang Jajan)	Limbah sisa uang jajan (LAMSIJAN) merupakan fenomena yang umum terjadi di masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Banyak dari kita memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian uang jajan atau uang saku setiap hari, yang pada akhirnya tidak terpakai dan menjadi limbah yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, di Palestina, kondisi sosial dan ekonomi yang sulit telah menyebabkan banyak penduduk hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan sumber daya.	**2023**
32		SISPRAJAL (Sistem Pendaftaran Rawat Jalan)	Inovasi ini berdiri dilatarbelakangi oleh Penumpukan Pasien Rawat Jalan karena pendaftaran dilakukan secara manual sehingga menciptakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk Memudahkan Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengurangi penumpukan pasien rawat jalan dengan adanya SISPRAJAL dengan harapan dapat membantu Pasien untuk mendaftarkan diri secara online tanpa harus mengantri dan dapat mengurangi penumpukan pasien rawat jalan.	**2023**
33		SINANSI (Sistem Informasi Layanan Edukasi Ruang Perawatan Kebidanan)	Inovasi yang berdiri dilatarbelakangi Banyaknya mitos/hoak seputar kesehatan khsusunya kebidanan membuat pasien tidak mendapatkan pendidikan kesehatan yang benar, dengan adanya SINANSI pasien/keluarga yang pernah dirawat di RSUD Cililin ruangan perawatan kebidanan (NIfas) akan dengan mudah mendapatkan edukasi kesehatan dengan murah, mudah dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun, tujuan adanya inovasi ini Memudahkan pasien mendapatkan edukasi kesehatan secara digital mengenai permasalahan pada saat kehamilan, nifas, bayi barul ahir dan ginekolog, hasil dari hadirnya SINANSI dapat membantu pasien/keluarga/masyarakat untuk mendapatkan edukasi pendidikan kesehatan seputar kebidanan dari sumber yang benar, akurat, terupdate dan professional.	**2023**
34		Kepo Asik	Melalui Kepo Asik inovasi yang dilaksanakan di SDN Sarinagen dilatarbelakangi kurang ramahnya	2024

			lingkungan sekitar sekolah pada saat musim hujan, hingga terciptanya inovasi ini memberikan kemanfaatan untuk setiap siswa dari kain bekas menjadi keset anyaman dan memanfaatkan kain bekas menjadi keset anyaman yang setiap hari dipakai	
35		JARAN BERSISIT	Melaui JARAN BERSISIT Website resmi SMP Negeri 6 Lembang, yang dapat diakses melalui https://smpn6lembang.sch.id, dirancang sebagai sarana komunikasi dan informasi antara sekolah dengan siswa, orang tua, guru, serta masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi terkini mengenai kegiatan akademik dan non-akademik, serta mendukung proses pembelajaran digital. Website ini memiliki struktur navigasi yang terorganisir dengan baik, memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai informasi penting. Menu utama meliputi: Profil: Menampilkan sambutan kepala sekolah, informasi tenaga kependidikan, dan kegiatan PGRI. Info Kurikulum: Berisi agenda sekolah dan informasi terkait kurikulum. Kelulusan & PPDB: Menyediakan informasi mengenai kelulusan siswa dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Info Layanan: Memberikan informasi layanan yang tersedia di sekolah. Perpustakaan: Menyediakan akses ke buku elektronik dan sumber belajar lainnya. Web App: Fitur aplikasi web untuk mendukung kegiatan sekolah. OSIS: Informasi mengenai Organisasi Siswa Intra Sekolah dan daftar alumni. Galeri Kegiatan: Menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah, termasuk galeri Instagram. 3. Fitur Utama Berita & Pengumuman: Menampilkan informasi terkini seperti jadwal PSAS, kegiatan visitasi akreditasi, dan pengumuman penting lainnya. Media Ajar Digital: Menyediakan materi pembelajaran digital untuk mata pelajaran Seni Budaya, yang dapat	2021

			diakses oleh siswa kelas 7 hingga 9. Penilaian Akhir Semester (PAS) Daring: Fasilitas untuk pelaksanaan PAS secara daring, memanfaatkan platform seperti Google Forms yang terintegrasi dengan domain resmi sekolah. Website ini menggunakan domain resmi .sch.id, sesuai dengan standar domain untuk institusi pendidikan di Indonesia. Integrasi dengan platform seperti Google Sites untuk media ajar digital dan Google Forms untuk evaluasi daring menunjukkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran.	
36		ACOFUME (Parfum dari Limbah Puntung Rokok)	Melalui ACOFUME (Parfum dari Limbah Puntung Rokok) Salah satu gagasan yang menarik adalah dengan menghasilkan parfum dari limbah puntung rokok. ACOFUME adalah produk inovatif yang dihasilkan dari proses daur ulang limbah puntung rokok menjadi bahan baku parfum yang berkualitas. Proses produksi parfum daur ulang limbah puntung rokok dimulai dengan pengumpulan bahan baku limbah puntung rokok dari berbagai sumber, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pihak kantor desa dalam pengumpulan limbah putung rokok yang sudah tidak terpakai. Bahan baku yang diambil dari limbah puntung rokok tersebut berupa daun tembakau yang masih tersisa pada puntung rokok. Langkah selanjutnya yaitu mengekstrak tembakau melalui metode destilasi uap. Proses ini melibatkan penguapan bahan baku untuk memisahkan tembakau dari komponen lain. Setelah tembakau diekstraksi, langkah selanjutnya adalah mencampurkan ekstrak tembakau tersebut dengan bahan lain, seperti alkohol, air, dan bahan pengikat lainnya. Campuran ini akan membentuk dasar parfum. Campuran tersebut kemudian disimpan dalam	2024

			wadah tertutup selama beberapa minggu atau bulan untuk memungkinkan aroma berkembang dan menyatu dengan baik. Setelah proses pematangan, parfum disaring untuk menghilangkan sisa-sisa bahan mentah dan mendapatkan tekstur yang halus. Parfum yang telah disaring kemudian disimpan dalam botol atau wadah khusus untuk menjaga kualitas dan aroma parfum. Sebelum dipasarkan, parfum akan diuji untuk memastikan keamanan serta aroma yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam perancangan produk ACOFUME, kami bekerjasama dengan Kantor Desa Kertawangi serta kedai- kedai kopi UMKM sebagai pemasok utama limbah puntung rokok. Kami juga telah bekerjasama dengan Kelompok Disabilitas Daur Ulang Kertas (Cemara Paper Bandung) sebagai vendor dalam pembuatan kemasan produk, sehingga produk yang dihasilkan ramah lingkungan serta memberikan pesan edukatif terhadap konsumen yang membeli produk kami. Saat ini, produk ACOFUME belum mencapai tahap finalisasi dan masih dalam tahap pengembangan. Kami sedang mengumpulkan kembali beberapa riset, jurnal maupun artikel yang mendukung. Selain itu mencari racikan dan takaran yang pas juga merupakan tantangan kami saat ini, namun hal tersebut tidak meruntuhkan semangat kami untuk merampungkan produk ACOFUME.	

37		ATCS KBB	Melalui ATCS KBB sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. **ATCS** terdiri dari beberapa sistem utama yaitu : • **Server & Workstation** yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area • **Wall Map** yang berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dari Local Controller • **Local Controller** yang berfungsi sebagai pengontrol persimpangan • **Video Surveilance** yang berfungsi untuk memantau melalui jaringan kamera CCTV • **Vehicle Detector** yang berfungsi untuk mendeteksi kendaran-kendaran yang terpantau melalui kamera CCTV • **Untuk** mencapai kinerja lalu lintas yang optimal dengan meminimalkan tundaan disetiap simpang yang dikoordinasikan dan mempersingkat waktu tempuh, dan salah satu strategi dalam upaya pengurangan emisi dari sektor transportasi	
38		Pusaka (Pusat Layanan Data Koperasi Kabupaten Bandung Barat)	Melalui Pusaka (Pusat Layanan Data Koperasi Kabupaten Bandung Barat) merupakan aplikasi Pelaporan dan Pelayanan Koperasi yang dibuat oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024. Pembuatan Aplikasi ini bertujuan Menyediakan sarana pelaporan perkembangan koperasi kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, Menyediakan sistem pengolahan keaktifan koperasi secara on line. Menyajikan data dan informasi perkoperasian secara cepat, mudah, akurat, dan simple. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat memperoleh data data yang akurat terkait Perijinan Koperasi, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar tiap Koperasi Binaan Kabupaten Bandung Barat Mengoptimalkan fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap Koperasi. Meningkatkan keakuratan data dan informasi perkoperasian. Untuk mempermudah koordinasi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat.	

39	Pelayan Publik di Puskesmas	Inovasi Puskesmas DTP Cikalongwetan	1. CENTING DAWAL	2022
40		Inovasi Puskesmas DTP Padalarang	1. JASUKE (Jamu Suka – suka hari Kemis) 2. KIPAS (Kleompok Ibu Peduli ASI)	2023 2023
41		Inovasi Puskesmas DTP Cipongkor	1. BADE ULIN (Bantuan Desa Untuk Bersalin) 2. MARTABAK KEMALIN (Mari Kenali Tanda Bahaya Kehamilan Untuk Mencegah Kematian Ibu Bersalin). 3. GEBUK BUNYI (Gerakan Cegah Bumil Kurang Energi Kronik dan Bayi Stunting Tertangani)	2019 2022 2022
42		Inovasi Puskesmas DTP Parongpong	1. KECEMAGI (Kelompok Cegah Masalah Gizi) 2. KETUBES (Keroyok Tuntas Tuberkulosis)	2019 2023
43		Inovasi Puskesmas DTP Cisarua	1. JEMBATAN PANGANTUK (JEMPUT DAN PENGOBATAN PASIEN DENGAN BATUK LEBIH DARI 2 MINGGU)	2023
44		Inovasi Puskesmas DTP Cibodas	1. Asumsi Joki DeSI (Asuhan Makanan Bergizi dan Jogging Kecil untuk DM dan Hipertentensi)	2023
45		Inovasi Puskesmas DTP Jayamekar	1. Gemasi Botak (Gerakan Masyarakat Imunisasi Booster Anak) 2. Gasternak (Gerakan Sadar Booster Anak) 3. Geter (Gerakan Imunisasi Booster) 4. Kajedak (Kader Jemput Dahak) 5. Penyulumpat (Penyuluhuan Setiap Hari Jumat)	2024 2024 2024 2020 2019
46		Inovasi Puskesmas DTP Rende	1. Gardu Gempita (Gerakan Terpadu Gizi, Edukasi, Monitoring, dan Penanganan Ibu Hamil dan Balita) 2. Sekring Isma (Sekali skrining, isi semua)	2023 2023
47		Inovasi Puskesmas DTP Cipatat	1. “RUMAH KASIH “ SURVIVOR ODGJ	2024
48		Inovasi Puskesmas DTP Jayagiri	1. Bikini (Bidan isi link Bumil KEK dan resti, intervensi dan evaluasi) 2. AB TRI (Ajak Bidan Tripel Eliminasi) 3. ROK MINI (Mengurangi Rokok Meminimalisir Resiko) 4. ASIK TB (Ayo Skrining Investigasi Kontrak Erat Tuberkolosa) 5. SKY-LINE (Skrining Konseling Gangguan Mental Emosional dan Napza Online)	2023 2021 2023 2023 2021
49		Inovasi Puskesmas DTP Rongga	1. Geprek Caltin 2. Paduka Beristri 3. Pelur Resing (Pemberian Telur Resiko Balita Stunting) 4. LINK Kosan (Link Konseling Sanitasi)	2018 2022 2023 2023
50		Inovasi Puskesmas DTP Sindangkerta	1. Rikat TB 2. Goreng Mas Kepiting	2021 2018

51		Inovasi Puskesmas DTP Cimareme	1. ASIH KURING (Asuhan Sayang Ibu Hamil Keluarga bebas Stunting) 2. BAJIGUR [Balita Gizi Buruk Mendapat Formula 100) 3. KARTU CERDAS PTM	2017 2022 2022
52		Inovasi Puskesmas DTP Ciwaruga	1. BANK SYANJAYA (BANK Sampahku untuk posyandu jaya) 2. BLACKPINK (Berkeliling Lacak Keluarga Penderita Tb Investigasi Kontak)	2023 2023
53		Inovasi Puskesmas DTP Cicangkanggirang	1. MINTAKES (Mitra Akademisi Kesehatan) 2. GUNTING KERTAS (Gerakan Cegah Stunting Kerahkan, Eratkan bersama lintassektor) 3. SI WAWA HAMIL (edukasi lewat WA pada Ibu Hamil)	2022 2022 2022
54		Inovasi Puskesmas DTP Mukapayung	1. GERAKAN MASYARAKAT SADAR CEGAH STUNTING (GEMAR CETING)	2022
55		Inovasi Puskesmas DTP Lembang	1. UPETI (Upaya Pemantauan Resiko Tinggi) 2. POTENSI (Pojok Hipertensi)	2023
56		Inovasi Puskesmas DTP Rajamandala	1. Barang Tambah (Balita Gizi Kurang yang Mendapat Makanan Tamabahan)	2023
57		Inovasi Puskesmas DTP Cihampelas	1. NATASA (Pembina Kesehatan Desa) 2. MAWAS DIRI (Masyarakat Dan Tenaga Kesehatan Waspada Dengan Ibu Hamil Resiko Tinggi) 3. Doyan Jalan Sore (Dokter Pelayanan Rawat Jalan Sore) 4. SEKITAR PECI (Skrining Penyakit Tidak Menular Puskesmas Cihampelas)	2020 2022 2022 2023
58		Inovasi Puskesmas DTP Pasirlangu	1. Maspenjaga 2. Lita (Layani Penderita Tb) Merekah Bersama Ultrasonografi(“Mendeteksi Resiko Tinggi Kehamilan Dengan Usg”) 3. Ceker Seuhah (Cek Kesehatan Rutin Sehat Untuk Semua) 4. Dedi Berbisa (Deteksi Dini Bersama Bidan Desa) 5. Hai Cinta 6. Sazi Pintar (Kelompok Ibu Pintar Sadar Gizi)	2022 2022 2022 2022 2023 2023
59		Inovasi Puskesmas DTP Pataruman	1. Kunjungan Rumah Balita BerisikoStunting dan Wasting	2023
60		Inovasi Puskesmas DTP Cililin	1. SAYANG IKAN (Sayang Ibu Melahirkan) 2. YUMI DARA MANIS(Yu Minum Tablet Tambah Darah Tiap Hari Kamis) 3. MARSELA (Mari Raih Kesehatan Lanjut Usia) 4. TOPLI KTR (Tidak Anti Orang Perokok tapi Jadikan Lingkungan KawasanTanpa Rokok)	2023 2023 2023 2023

61		Inovasi Puskesmas DTP Batujajar	1. Lentera Jiwa 2. Nya'ah ka kolot	2021 2022
62		Inovasi Puskesmas DTP Tagogapu	1. KOPPI TUBRUK(KONSELING,PENCEGAHAN dan PENGENDALIAN TUBERKULOSIS) 2. Pendekatan Keluarga Berorientasi mengatasi penyakit hipertensi (Pendekar Bereaksi) 3. SOLATIF(Sekolah Lansia Alfatih) 4. GEMA PERANG GAJI (Gerakan Bersama Penanggulangan Orang dengan Gangguan Jiwa)	2023 2023 2023 2023
63		Inovasi Puskesmas DTP Ngamprah	1. Kemas chating (Kegiatan Memasak Cegah Stunting) 2. Kejar Dahak	2023 2018
64		Inovasi Puskesmas DTP Cipeundeuy	1. GETUK 41 (Gerakan Mengetuk Pintu pada 4 Rumah yang kontak erat dengan 1 Pasien TB) 2. PEDESAN (Peduli Desa Siaga Untuk Persalinan) 3. HIBER LUMPAT (Hirup Bersih, Lumampah Liwat Sampah Mangfaat) 4. GEMURUH (Gerakan Mengasuh 10 Ibu Hamil) 5. MADU 3P (Pemantauan Terpadu PTM - Prolanis dan PRB) 6. CAFÉ KERITING (Cegah Anemia dengan Tablet Fe Konsumsi Rame-rame untuk Cegah Stunting) 7. ANTER PAKET CINTA (Ante Natal Terpadu Pada Kehamilan Cegah Kematian Ibu, Bayi, dan Balita) 8. POJOK JKN	2019 2019 2019 2022 2022 2022 2022 2023
65		Inovasi Puskesmas DTP Rawat Inap Saguling	1. Sacanting (Saguling Cegah Stunting) 2. Sacanting (Saguling Cegah Stunting)	2023 2019
66		Inovasi Puskesmas DTP Cirata	1. Anjelin Puspita (Antar Jemput Ibu Bersalin Di Puskesmas Pilihan Cirata)	2023
67		Inovasi Puskesmas DTP Sumur Bandung	1. Mulus	2018

Sumber : Litbang Bappelitbangda, 2025

2.4.3 Inovasi Daerah Lainnya

Tabel 2.203. Inovasi Daerah Lainnya Kabupaten bandung Barat Tahun 2024

NO	JENIS TATA KELOLA	NAMA TATA KELOLA	KETERANGAN	TAHUN

1	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	GERAI BerAKHLAK (UP2PKK, UMKM, UPPKA, PEKKA)	Gerai Kecamatan BerAKHLAK bertujuan untuk memasarkan produk produk unggulan dari 11 Desa se Kecamatan Ngamprah agar dapat dikenal secara umum, dimana Gerai ini didirikan pada tahun 2022 dan sudah berjalan, produk unggulan dari Kecamatan Ngamprah yang dikembangkan dari hasil UMKM, UP2K, UPPKA, dan PEKKA	2022
2		Petani Zilenial Berbasis Digital Internet of Things (IoT)	Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya **pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern**. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2023 dengan visi "Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, **Kreatif**, **Unggul** dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan **kualitas sumber daya manusia**". Kendala pembangunan pertanian antara lain rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian menyebabkan kesenjangan regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian. Petani zilenial dengan rentang usia 17 – 21 tahun memerlukan strategi khusus untuk menarik minat dan menjadi pelaku utama usaha pertanian. Salah Oleh karena itu diperlukan inovasi khusus yaitu Program Petani Zilenial Berbasis Digital Internet of Things (IoT) di Kabupaten Bandung Barat . Tujuan adanya ini mendorong regenerasi petani dan wirausahawan muda pertanian yang maju, mandiri dan modern, dengan teknologi pertanian Berbasis Digital Internet of Things (IoT)	2022
3		SAMARAJU (Sampah Magot Jadi Rupiah)	Inovasi ini didirikan pada 4 Agustus 2021 di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang didirikannya inovasi demi memaksimalkan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Ngamprah, tujuan didirikannya inovasi SAMARAJU demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta membantu perkekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah secara tepat	2021

4		Manik (Majalah dinding elektronik)	Aplikasi ini didirikan pada tahun 2021, secara garis besar Manik DISDIK dapat membangun komunikasi secara utuh antara siswa, guru, Dinas Pendidikan dan Masyarakat secara luas. Manik DISDIK KBB diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran bagi siswa dan menjadi referensi bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru. Selain itu melalui Manik DISDIK KBB berbagai potensi siswa dan daerah dapat terangkat serta dikenal oleh masyarakat luas. Inovasi Manik DISDIK dimanfaatkan sebagai media dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara hybrid/kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring dengan peserta terbatas, secara daring melalui aplikasi zoom, dan disiarkan melalui streaming youtube dan live instagram, kepada masyarakat umum sebagai Dokumentasi kegiatan Disdik dan memperkenalkan ciri khas, potensi daerah, dan keunikan lokal Kabupaten Bandung Barat.	2021
5		RADIO BELAJAR DISDIK	Radio belajar adalah inovasi dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemic covid 19. Pembelajaran yang disiarkan melalui radio merupakan salah satu solusi bagi siswa yang tidak memiliki akses mengikuti pembelajaran secara online. Inovasi ini digagas berdasarkan kebutuhan akan layanan Pendidikan dalam masa pandemi covid – 19. Seluruh kegiatan dihentikan secara massif, termasuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Para pemangku kebijakan di ranah Pendidikan mengambil sikap untuk merubah pola pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ), salah satunya melalui daring (online) maupun luring (offline). Pembelajaran secara daring mewajibkan seluruh siswa untuk memiliki perangkat teknologi seperti handphone, komputer, laptop, dan juga kuota internet. Bagi siswa yang orangtuanya terdampak secara ekonomi sangat kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online ini, jangankan untuk membeli perangkat teknologi dan juga kuota internet, untuk kehidupan sehari-hari pun terasa sangat sulit. Hal ini pun dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan formalnya. Peserta didik dalam program	2021

			pendidikan kesetaraan pun ikut mengalami penurunan yang signifikan, hal ini akan sangat berdampak pada angka rata-rata lama sekolah yang otomatis akan mengalami penurunan. Selain pembelajaran secara online, bagi siswa yang tidak bisa mengakses jenis pembelajaran ini maka Dinas Pendidikan memfasilitasi pembelajaran offline melalui berbagai metode. Metode yang digunakan dalam pembelajaran jenis ini diantaranya adalah guru berkunjung ke rumah siswa untuk memberikan materi, pembelajaran dengan menggunakan media TV melalui channel TVRI, dan juga pembelajaran dilakukan melalui media radio sekolah seperti yang dilakukan oleh beberapa SMP di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya SMP Negeri 1 Ngamprah. Radio ESTU 107.2 FM yang dimiliki SMPN 1 Ngamprah, menjadi salah satu solusi dalam melaksanakan program Pembelajaran Jarak Jauh. Tujuan utama diluncurkannya Radio ESTU adalah untuk mengakomodasi sebagian besar siswa yang belum memiliki smartphone sebagai perangkat utama dalam pembelajaran jarak jauh. Sekolah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi seluruh siswanya dalam mendapatkan layanan pendidikan yang sama.	
6		Tantangan Membaca Bandung Barat (TMBB)	Kabupaten Bandung Barat menindaklanjuti program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan Gerakan Literasi Sekolah Membaca dan Berkarya (GLS MEKAR), yang dideklarasikan pada Desember 2017. Pendeklarasian ini sekaligus pula peluncuran salah satu program GLS MEKAR yaitu Tantangan Membaca Bandung Barat (TMBB). TMBB merupakan program tantangan dari Bupati Bandung Barat kepada guru dan peserta didik. Awalnya tantangan ini dilakukan terhadap sekolah-sekolah jenjang Pendidikan Dasar baik SD maupun SMP, namun pada tahun kedua karena berbagai kendala, TMBB hanya diikuti oleh SMP saja. Kegiatan TMBB (Tantangan Membaca Bandung Barat) dilaksanakan selama 7 bulan pada tahun 2018 dan 2019, selama 3 bulan pada tahun 2020 dan 2021 dengan kegiatan yang terstruktur dan terencana. Akhir kegiatan siswa yang lolos mendapat reward dari Bupati Bandung Barat. Secara sederhana literasi diartikan sebagai	2022

			kemampuan membaca dan menulis. Seseorang dikatakan literat jika ia mampu membaca dan menulis. Seiring dengan perkembangan zaman definisi literasi pun bergeser dari pengertian yang sempit sebagai keterampilan berbahasa menuju pengertian yang lebih luas menjadi literasi dalam berbagai bidang ilmu. Oleh karena itu, kemampuan literasi dalam berbagai bidang ilmu perlu dikuasai peserta didik dalam era digital 4.0. Pada era ini, kemampuan literasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan untuk memahami berbagai informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Untuk terwujudnya kemampuan literasi tersebut, menuntut sekolah lebih menggalakkan kegiatan literasi. Pelaksanaan Tantangan Membaca Bandung Barat mengadopsi kegiatan tantangan membaca yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat walaupun ada inovasi yang dikemas dalam West Java Leader Reading's Challenge (WJLRC) yang dilaksanakan tahun 2017 dan Kabupaten Bandung Barat mengikuti tantangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi tersebut kemudian menindak lanjuti kegiatan tersebut di Kabupaten Bandung Barat yang dikemas dalam TMBB yang sekarang sudah memasuki tahun ke empat. Tantangan membaca yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selama 10 bulan, namun dalam TMBB waktunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yaitu tahun 2018 selama 7 bulan dari bulan Februari sampai bulan Agustus, tahun 2019 selama 7 bulan, dari bulan maret sampai bulan September, sedangkan tahun 2020 dan 2021 karena terjadi pandemi covid 19 waktunya hanya selama 3 bulan yaitu dari bulan September sampai November. Tahun 2018 siswa ditantang untuk membaca buku dan mereview selama 7 bulan minimal seganyak 15 buku, tahun 2019 dengan jumlah bulan yang sama dengan tahun 2018 siswa harus membaca dan mereviu minimal sebanyak 21 buku, sedangkan tahun 2020 dan 2021 siswa ditantang untuk membaca dan mereviu buku selama 3 bulan minimal 9 buku.	
7		Jarnasih (Pembelajaran Kombinasi)	Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan sangat perlu dilakukan. Ada beberapa kendala yang menyebabkan hal ini	2022

			belum dapat dilaksanakan dengan baik diantaranya: masih rendahnya kompetensi PTK (Penelitian Tindakan Kelas) khususnya pendidik yang dapat dilihat salah satu indikatornya rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG), banyaknya jumlah PTK, anggaran yang belum optimal, kondisi pandemi COVID 19, Revolusi Industri 4.0, dan wilayah yang luas. Oleh karena perlu adanya inovasi pembelajaran kombinasi (Jarnasi) yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online dalam rangka peningkatan kompetensi PTK. Inovasi ini didirikan pada tahun 2020. Adapun tujuan untuk jangka pendek dari Inovasi adalah tersedianya pedoman Jarnasi, tersedianya Learning Management System (LMS), dan terlaksananya Jarnasi bagi guru jenjang SD	
8		Belajar Dari Rumah (BDR)	***Belajar Dari Rumah*** (BDR) merupakan sebuah blok program pendidikan lewat siaran televisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek RI) dalam rangka memfasilitasi pendidikan di masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Blok program ini disediakan untuk menjadi alat pembelajaran dan edukasi untuk siswa dan masyarakat. *Belajar Dari Rumah* berisi program-program pendidikan, kebudayaan, dan hiburan untuk seluruh jenjang pendidikan; dimulai dari PAUD dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, dan SMA dan sederajat, serta program pengasuhan untuk orang tua. Pada waktu *primetime*, akan ditayangkan film anak dan film nasional pilihan sebagai suguhan tayangan edukasi untuk anak-anak dari usia 4-13 Tahun. Film nasional juga mencakup film-film edukasi yang menayangkan cerita-cerita khas Indonesia. Di akhir pekan, blok program ini menayangkan program-program pendidikan dan kebudayaan untuk semua umur Dalam proses pengembangan inovasi ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mengadopsi program ini dilihat secara geografis wilayah di Kabupaten Bandung Barat serta jangkauan pendidikan yang kurang merata sehingga inovasi BDR ini perlu diterapkan.	2022

9		Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	Terwujudnya peningkatan Inovasi non- digital pelayanan respon time. Pembentukan REDKAR sebagai strategi penaggulangan kebakaran merupakan Implementasi strategi pelayanan penaggulangan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, yang bertujuan untuk Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pencegahan dan penaggulangan kebakaran dan penyelamatan, Membantu pencapaian mutu layanan, standar pelayanan sub urusan kebakaran, Menciptakan sinergi antara dinas dengan Masyarakat, Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran	2023
10		Sekolah Kader Padalarang Harmonis Berdedikasi "SEDEKAH HADE"	Melalui "SEDEKAH HADE" diharapkan Inovasi sekolah online ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu secara berkelanjutan melalui pembelajaran digital yang mudah diakses, fleksibel, dan relevan.	2024
11		Cikalongwetan Makalangan	Melalui Cikalongwetan Makalangan Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah pemberdayaan masyarakat, sudah menjadi kewajiban semua pihak pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berbagai program ke arah tersebut harus dirancang dan diimplementasi melalui penerapan program-program yang relevan dengan kebutuhan kontekstual. Berbagai langkah guna meningkatkan kualitas kehidupan yang muaranya adalah menyejahterakan masyarakat harus terus dilakukan.	2023
12		BAASO HANGAT (Bapa Asuh Anak Stunting Oleh Pengusaha Ngamprah Hebat)	Melalui BAASO HANGAT (Bapa Asuh Anak Stunting Oleh Pengusaha Ngamprah Hebat) Menindaklanjuti Program PELITA BENING (Perangkat Daerah Peduli Ibu Hamil dan Balita Beresiko Stunting) di Kabupaten Bandung Barat , Kecamatan Ngamprah memiliki Inovasi Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) bersama BAASO HANGAT (Bapa Asuh Anak Stunting Oleh Pengusaha Ngamprah Hebat) seperti PT Indofood NSF, PT Medion, PT Ultrajaya. Mendukung Program Bandung Barat AMANAH dan Deklarasi Jawa Barat ISTIMEWA , Zero New Stunting.	2025
13		BELL PENDITEKSI GEMPA BUMI (Kelompok	Melalui BELL PENDITEKSI GEMPA BUMI melakukan inovasi tersebut tidak semata-mata membuat inovasi asal asalan. Adapun dasar	2023

		Masyarakat Kecamatan Cipeundeuy)	hukum kami melakukan inovasi ini sesuai dengan PERBUP NO 188.45/KEP.720-DPMD/2018. Merupakan suatu alat yang di buat untuk mendeteksi gempa. Rancang bangun pendeteksi gempa bumi dapat dilakukan dengan menggunakan sensor seismograf yang dapat mendeteksi getaran tanah yang disebabkan oleh gempa bumi. Berikut adalah contoh rancang bangun pendeteksi gempa bumi	
14		Alat Penyiram Si PINTAR (Kelompok Masyarakat Kecamatan Cisarua)	Melalui Alat Penyiram Si PINTAR Alat ini di buat atas dasar keinginan kami memberikan suatu terobosan bertani dengan efisien dan berdaya manfaat tinggi bagi petani. Issue makcro yg kami ciptakan ini lebih kepada membuat para petani lebih melek teknologi dalam pencapaian hasil pertaniannya dengan mengefisiensi waktu dan tenaga dengan menggunakan theknologi Digital	2023
15		ALAT PENGIRIS OTOMATIS (Kelompok Masyarakat Kecamatan Ngamprah)	Melalui ALAT PENGIRIS OTOMATIS Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan dan penerapan alat pengiris otomatis yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses pengirisan.	2023
16		SI IMAH PANGAN	Berdasarkan Data harga di 16 Kecamatan yang telah diinput ke SI IMAH PANGAN, selanjutnya dianalisis apakah harga rata- rata 12 komoditi pangan strategis di Kabupaten Bandung Barat melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan Pemerintah. Apabila di Kecamatan tertentu terjadi gejolak harga, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan memberi respon teknis berupa Gerakan Pangan Murah di Kecamatan tersebut. Selanjutnya, dengan adanya pendataan jumlah pasokan yang ada di 16 Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat, kita dapat menyusun Neraca Pangan Wilayah yang menggambarkan kondisi Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung Barat apakah surplus/ defisit terhadap pangan tertentu.	2024
17		Hablas Mucho Art & Creatif team (SDN Pancasila Lembang)	Hablas Mucho adalah inovasi pendidikann yang bergerak dibidang seni, sastra dan industri kreatif di dunia pendidikan, kami menyadari terbatasnya waktu yang didapatkan oleh peserta didik dibidang seni sastra dan kratif team seolah membatasi cara berpikir peserta didik, oleh sebab itu kami hadir sebagai wadah bagi penyaluran bakat yang selama ini tidak dapat	2018

			disalurkan oleh siswa diwaktu jam pembelajaran. Dari hablas mucho ini kita mendapatkan kesempatakan yang utama selain dapat membentuk karakter peserta didik juga dapat menempatkan posisi bahwa siswa bukan hanya menjadi objek dalam sebuah pembelajaran melainkan juga sebagai inisiator dalam sebuah kegiatan kreatif yang sering dilakukan di sekolah. Di era pendidikan yang memiliki kurikulum sesusai dengan kemajuan jaman, pembaharuan dan kemampuan peserta didik menjadi tombak bagi kemajuan pendidikan itu sendiri, maka hablas mucho mengambil andil untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia terutama yang ada di Bandung Barat	
18		SEBLAK (Sampah Bermanfaat untuk Lingkungan, Alam, dan Kehidupan)	Melalui SEBLAK (Sampah Bermanfaat untuk Lingkungan, Alam, dan Kehidupan) Bank sampah merupakan program pengelolaan sampah berbasis komunitas, di mana sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti plastik dan kertas, dikumpulkan dan dihargai sesuai beratnya. Bank sampah merupakan program pengelolaan sampah berbasis komunitas, di mana sampah yang memiliki nilai ekonomis, seperti plastik dan kertas, dikumpulkan dan dihargai sesuai beratnya.	2025
19		Menciptakan Sekolah Aman melalui GAUL (GAME ANTI BULLYING)	Melalui Menciptakan Sekolah Aman melalui GAUL (GAME ANTI BULLYING) Menciptakan sekolah SMAN 5 Lembang yang ramah anak, sehingga perkembangan mental dan sosial mereka tumbuh positif yang akan berdampak pada masa depan bangsa. Dengan terjaganya tumbuh kembang anak, maka akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, dan akan mewarnai lingkungan masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari produk inovasi ini adalah: (1) memberikan edukasi pada anak bahaya perundungan sehingga mereka tidak melakukannya dan bisa menghindari untuk tidak menimpa mereka; (2) terciptanya sekolah yang menyenangkan sehingga tumbuh kembang anak terjadi dalam situasi yang kondusif; (3) memberikan edukasi tentang game online yang positif dan menarik dengan mengenalkan aplikasi Scratch, yakni anak sendiri dapat	2024

			membangun game dengan bahasa pemograman yang sederhana.	
20		GEMILANG DENGAN LAMBANG TERAS	Melaui GEMILANG DENGAN LAMBANG TERAS di SMAN 5 Lembang Metode Penyelesaian Pemasalahan Menjalaskan dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalam mengatasi permasalahan sehingga inovasi tersebut diperlukan dalam mengatasi permasalahan. Inovasi ini tentunya dirasakan sebagai solusi untuk mengawal dan memantau motivasi/semangat siswa dalam bidang baca buku dan mereviu kan hasil bacanya. Kemudian juga dapat mengevaluasi mengases sejauh mana siswa memahami tentang literasi baca nya.	2024
21		ADHWI	Melalui ADHWI di SMAN 2 Cisarua Bertujuan untuk mengalihkan anak-anak yang sudah kecanduan gawai dapat kita atasi dengan permainan edukasi yang dapat dilakukan secara santai bersama keluarga dan anak, yaitu dengan mengalihkannya kepada produk kami yang bernama ADHWI.	2024
22		Inomita	Melaui Inomita inovasi yang tercipta di SMAN 1 Cisarua Di tengah kompleksitas tantangan ini, Inomita lahir sebagai solusi transformasional. Kami menghadirkan inovasi yang mengubah sisa produksi tahu yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal menjadi mi instan sehat kaya akan protein, bergizi, dan ramah lingkungan. Dengan teknologi pemanggan menggunakan oven bersuhu rendah, kami menjaga nilai gizi dan memperpanjang umur simpan tanpa bahan pengawet. Tidak sampai di sana, Inomita mengembangkan produk dengan bahan lokal berkualitas, berkolaborasi dengan petani jamur shitake lokal untuk menghasilkan topping kaya serat, vitamin B3 dan B5, serta antioksidan yang tinggi untuk yang mendukung kesehatan tubuh. Kami juga menggunakan minyak sacha inchi, sumber alami omega-3 dan omega-6, untuk kesehatan jantung dan metabolisme. Dengan pendekatan ini, Inomita tidak hanya menyediakan pangan sehat, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan, pemberdayaan petani lokal, dan pelestarian lingkungan, membangun ekosistem pangan yang lebih resilien, inklusif dan berkelanjutan.	2024

23		Biokonversi Limbah Dapur oleh Maggot BSF: Solusi Hijau ADIWIYATA SMA Negeri 2 Padalarang untuk Pupuk Organik Berkelanjutan	Melalui Biokonversi Limbah Dapur oleh Maggot BSF: Solusi Hijau ADIWIYATA SMA Negeri 2 Padalarang untuk Pupuk Organik Berkelanjutan, Inovasi biokonversi limbah dapur dengan maggot BSF di ADIWIYATA SMA Negeri 2 Padalarang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan serta memberikan manfaat ekologis, edukatif, dan ekonomi. Berikut adalah tujuan utama dari program ini: 1. Pengelolaan Limbah yang Ramah Lingkungan Mengurangi volume limbah organik yang dihasilkan sekolah dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Meningkatkan kesadaran ekologi di kalangan siswa dan staf sekolah mengenai pentingnya daur ulang dan ekonomi sirkular. 2. Produksi Pupuk Organik Berkualitas Menghasilkan pupuk organik kaya nutrisi dari proses biokonversi yang dapat digunakan dalam penghijauan sekolah atau pertanian lokal. Mengembangkan alternatif pupuk alami sebagai solusi bagi petani dan komunitas sekitar. 3. Edukasi dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Mempraktikkan konsep biologi dan ekologi dalam kehidupan nyata melalui proyek berbasis lingkungan. Meningkatkan keterampilan siswa dalam penelitian, kewirausahaan, dan manajemen proyek lingkungan. Mengintegrasikan inovasi ini ke dalam kurikulum, sehingga siswa memahami konsep keberlanjutan secara lebih mendalam. 4. Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Sirkular Memanfaatkan hasil biokonversi sebagai produk bernilai ekonomi, seperti pupuk organik dan maggot untuk pakan ternak. Mendorong siswa untuk mengembangkan ide bisnis berbasis lingkungan, menciptakan inovasi yang dapat berkontribusi pada ekonomi hijau. Menjalin kolaborasi dengan komunitas dan industri untuk memperluas manfaat program. 5. Keberlanjutan dan Replikasi Program Membangun sistem yang mudah diterapkan di sekolah lain, sehingga inovasi ini dapat	2025

			menyebar lebih luas. Melibatkan masyarakat, dinas lingkungan, dan universitas dalam pengembangan program agar semakin optimal. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi biokonversi, seperti sensor lingkungan dan otomatisasi sistem. Dengan tujuan yang jelas ini, inovasi biokonversi limbah dapur dengan maggot BSF tidak hanya berdampak pada sekolah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem hijau yang lebih luas.	
24		Penerapan Sensor Ultrasonik untuk Tongkat Tunanetra	Melalui Penerapan Sensor Ultrasonik untuk Tongkat Tunanetra Inovasi tongkat tunanetra berbasis sensor ultrasonik merupakan inovasi teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan keselamatan penyandang tunanetra dalam beraktivitas sehari-hari. Dengan memanfaatkan sensor ultrasonik, tongkat ini mampu mendeteksi keberadaan objek atau rintangan di depan pengguna melalui gelombang ultrasonik yang dipancarkan dan dipantulkan kembali dari objek yang terdeteksi. Gelombang ultrasonik yang terdeteksi kemudian diterima dan diolah oleh mikrokontroler. Jika jarak sensor kurang dari 50 cm maka mikrokontroler akan menyalakan buzzer untuk memberi peringatan kepada penyandang tunanetra jika didepannya ada rintangan atau objek baik dalam kondisi terang maupun gelap tanpa perlu menyentuhnya terlebih dahulu. Pemilihan sensor ultrasonik sebagai sensor yang digunakan didasarkan pada kemudahan konfigurasi sensor, ketahanan terhadap intensitas cahaya dan harga sensor yang ekonomis menjadikan tongkat tunanetra ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap penyandang tunanetra akan tetapi biaya yang dibutuhkan untuk membuat tongkat tunanetra menjadi lebih ekonomis. Dengan penerapan teknologi ini, penyandang tunanetra tidak hanya lebih mudah dalam mengenali halangan di jalan, tetapi juga merasa lebih aman dan percaya diri saat berjalan di lingkungan baru. Inovasi ini terbukti meningkatkan efektivitas mobilitas pengguna dibandingkan tongkat konvensional yang hanya mengandalkan sentuhan fisik. Selain itu, tongkat ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih	2025

			lanjut dengan menambahkan fitur GPS, sensor arah, atau integrasi dengan aplikasi ponsel. Secara keseluruhan, inovasi tongkat tunanetra berbasis sensor ultrasonik merupakan langkah maju dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung inklusi dan kemandirian penyandang disabilitas di era digital.	

Sumber : Litbang Bappelitbangda, 2025

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 berdasarkan prospek ekonomi hasil perhitungan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Bandung Barat s.d triwulan II tahun 2025. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro diberbagai level yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat pada bidang perekonomian sebagaimana tercantum pada misi ke 2 dalam rangka “Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah” tujuan yang ingin diwujudkan berdasarkan misi tersebut yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikatornya adalah PDRB per Kapita (ADHB) dan Kontribusi PDRB Kab. Bandung Barat terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.

Sasaran yang akan dicapai untuk Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah diantaranya:

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi, dengan indikatornya adalah: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Ekonomi Hijau Daerah, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Tingkat Inflasi.

2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang, dengan indikatornya adalah Tingkat Kemiskinan dan Gini Rasio.
3. Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja dengan indikatornya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan pada pembangunan sector ekonomi di Kabupaten Bandung Barat tersebut, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 juga mempertimbangkan kondisi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024 dan target dan capaian s.d triwulan II tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2026. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi global, nasional dan provinsi Jawa Barat maupun prospek dan perkiraan maju tahun 2026.

3.1.1 Kondisi dan Prospek Ekonomi Global

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 ditopang aktivitas perdagangan global yang meningkat, tecermin dari kenaikan rata-rata Baltic Dry Index ke level 1.742,66 dari 1.393,56 pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kinerja perdagangan di negara berkembang seperti Tiongkok dan India, penguatan perdagangan jasa, serta praktik frontloading, yaitu peningkatan perdagangan sebelum kenaikan tarif impor oleh AS. Namun, kinerja perdagangan global pada tahun 2025 diperkirakan masih akan diliputi dengan ketidakpastian, terutama akibat kebijakan tarif yang diberlakukan secara luas oleh AS terhadap seluruh negara mitra dagang. Kebijakan ini telah memicu berbagai respons dari negara-negara lain, menciptakan dinamika perdagangan yang tidak menentu. Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pelemahan permintaan global, termasuk AS dan Tiongkok, yang berdampak pada melambatnya aktivitas perdagangan. Aktivitas manufaktur tahun 2024 membaik dibanding tahun 2023, tecermin dari tren peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur ke zona ekspansif di atas level indeks 50,0. Namun demikian, perang dagang akibat kebijakan resiprokal AS sejak April 2025 berisiko menurunkan permintaan global serta aktivitas manufaktur global ke depan. Di sisi lain, pergerakan harga komoditas pada tahun 2024 bervariasi dibanding tahun 2023. Harga batu bara, minyak mentah, dan gandum melanjutkan tren penurunan, sementara harga logam dan Crude Palm Oil (CPO) meningkat.

Pada tahun 2024, inflasi di beberapa negara, seperti AS (3,0 persen), Inggris (2,5 persen), dan Kawasan Eropa (2,4 persen), telah mendekati target inflasi bank sentral sebesar 2,0 persen. Sehingga, bank sentral di negara-negara tersebut sepanjang 2024 telah beberapa kali menurunkan suku bunga acuannya untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Namun, inflasi di negara berkembang masih di level tinggi bahkan meningkat menjadi 6,6 persen. Secara keseluruhan, inflasi global tahun 2024 melambat tetapi masih relatif tinggi pada level 5,7 persen.

Berdasarkan kondisi ekonomi global s.d tahun 2024, pada tahun 2025 dan 2026 ekonomi global masih menghadapi tantangan utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global. Mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan terhadap AS, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi

Pada tahun 2025 dan 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen. Perlambatan cukup dalam pada tahun 2025 dipicu oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

3.1.2 Kondisi dan Prospek Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 relatif kuat di tengah gejolak global. Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi sektor jasa lainnya (9,80 persen); transportasi dan pergudangan (8,69 persen); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,56 persen). Pertumbuhan sektor jasa lainnya didorong oleh peningkatan aktivitas rekreasi serta berbagai event olahraga dan hiburan. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh seiring peningkatan mobilitas, jumlah penumpang, dan volume barang. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas pemerintah dan swasta. Adapun sektor pertanian, yang memberikan kontribusi sebesar 12,61 persen terhadap perekonomian Indonesia, tetap tumbuh positif sebesar 0,67 persen.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 4,43 persen pada tahun 2024. Industri makanan dan minuman, yang berperan dominan, tumbuh 5,90 persen seiring meningkatnya permintaan domestik untuk konsumsi dan bahan baku industri serta permintaan luar negeri. Sementara itu, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 6,16 persen, didorong oleh ekspor barang logam komponen elektronik dan peralatan listrik. Optimisme pelaku industri pun tetap tinggi, tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri yang mencapai 52,93 pada akhir tahun 2024, menandakan sektor industri masih dalam fase ekspansi. Namun, beberapa subsektor mengalami perlambatan, seperti industri alat angkutan serta industri tekstil dan pakaian jadi, akibat penurunan daya beli masyarakat dan membanjirnya impor produk tekstil murah.

Pertumbuhan ekonomi nasional juga turut dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata dan industri pendukungnya. Pada tahun 2024, rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,04 persen, dengan devisa pariwisata mencapai sebesar US$16,71 miliar. Capaian ini terutama didorong oleh pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara yang hampir mencapai tingkat prapandemi serta lonjakan wisatawan nusantara yang telah melampaui tingkat sebelum pandemi. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti World Water Forum 2024, Aqua Bike Jetski World Champhionship 2024, Bali Internasional Airshow 2024, Moto GP Mandalika, dan konser musik internasional, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini. Faktor lain yang mendukung adalah pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, peningkatan frekuensi penerbangan langsung ke Indonesia, terutama dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mendorong pertumbuhan pariwisata domestik

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tumbuh 4,94 persen, meningkat dari 4,82 persen pada tahun 2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 12,48 persen, didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat tumbuh 5,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 6,61 persen seiring meningkatnya belanja negara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan program bantuan sosial.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tahun 2024 mencapai 4,61 persen. Pertumbuhan investasi ini didorong oleh peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp1.714,24 triliun atau tumbuh hingga 20,80 persen. Pertumbuhan tinggi PMA sebesar 21,00 persen didorong oleh peningkatan kinerja investasi hilirisasi utamanya untuk subsektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Sementara itu, pertumbuhan tinggi PMDN sebesar 20,60 persen didorong oleh peningkatan investasi untuk subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Pada tahun 2024, kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB meningkat 0,43 persen menjadi 22,18 persen, didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebesar 6,51 persen. Ekspor barang tumbuh 2,29 persen, terutama pada kelompok barang logam mulia dan perhiasan/permata, nikel dan barang daripadanya, alas kaki, karet dan barang dari karet, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, dan berbagai produk kimia. Sementara itu, ekspor jasa mengalami peningkatan seiring bertambahnya kunjungan wisatawan mancanegara.

Selain berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan sector PDRB, kondisi perekonomi nasional juga dipengaruhi oleh stabilitas moneter tahun 2024, hal tersebut tecermin dari **realisasi inflasi** yang melambat dan terjaga dalam rentang sasaran, serta volatilitas **nilai tukar rupiah yang terjaga**. Realisasi inflasi umum sepanjang tahun 2024 mengalami tren penurunan, pada akhir tahun 2024, realisasi inflasi mencapai 1,57 persen (yoy) lebih rendah dari capaian tahun 2023 sebesar 2,61 persen (yoy). Inflasi yang terjaga dalam kisaran sasaran merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Inflasi inti terjaga rendah tersebut sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang memadai untuk dapat memenuhi permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI dan dampak positif berkembangnya digitalisasi serta didukung oleh pasokan yang terjaga dan kelancaran distribusi.

Sepanjang tahun 2024, pergerakan nilai tukar mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal, utamanya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan ekonomi, termasuk pergantian kepemimpinan di sejumlah negara yang berdampak terhadap masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2024 mencapai Rp15.846 per US$, tetap terjaga dalam rentang target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni Rp15.700–Rp16.100 per US$.

Sedangkan prospek ekonomi nasional pada awal tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai dinamika, seperti melambatnya pengeluaran masyarakat; meningkatnya risiko pengangguran akibat penutupan perusahaan padat karya; serta penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, melemahnya permintaan global, serta disrupsi rantai pasok Tiongkok. Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan domestik serta kebijakan pendorong perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan mencapai 5,20 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat diprakirakan tumbuh meningkat menjadi 4,97 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali, program bantuan sosial, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh sebesar 4,91 persen, seiring percepatan pelaksanaan belanja prioritas. PMTB atau investasi pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 4,96 persen, didukung oleh kebijakan optimalisasi pengelolaan aset BUMN; pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); peningkatan kredit investasi untuk industri padat karya, tax holiday dan tax allowance; dan penghapusan buku atau tagih utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sedangkan kinerja ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 tetap didorong tumbuh melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain diversifikasi produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, serta penguatan sektor-sektor yang terdampak tarif. Sementara itu, impor diprakirakan meningkat untuk mendukung kebutuhan sektor industri dalam negeri yang terus berkembang.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diprakirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2025, industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 5,05 persen, dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang mencapai 20,80 persen dari total PDB nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral, terutama di wilayah timur Indonesia, yang dipercepat melalui penanaman modal negara; inisiasi program MBG bagi anak sekolah dan ibu hamil yang mendorong permintaan pada subsektor industri makanan dan minuman; peningkatan penggunaan teknologi Generative AI (Artificial Intelligence) yang mendorong permintaan pada subsektor industri elektronik; serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0, penerapan standardisasi, dan akselerasi transisi menuju industri hijau.

Sektor pertanian pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 3,16 persen, seiring peningkatan permintaan produk pertanian yang didorong oleh program MBG. Dari sisi pasokan, pertumbuhan sektor pertanian tahun 2025 akan didukung oleh pelaksanaan program-program menuju swasembada pangan dan optimalisasi peran Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program-program menuju swasembada pangan di antaranya melalui pengembangan lumbung pangan; penguatan cadangan pangan nasional; pengembangan pangan hewani; pengembangan pangan lokal dan nabati; serta fortifikasi dan biofortifikasi pangan.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 8,80 persen, utamanya didorong oleh program MBG yang dimulai sejak awal tahun 2025. Selain itu kinerja pariwisata yang meningkat juga mendukung pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan diprakirakan tumbuh sebesar 8,91 persen didukung peningkatan mobilisasi masyarakat; peningkatan kinerja pariwisata; serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya.

Kontribusi pariwisata diproyeksikan meningkat sejalan dengan pemulihan perjalanan wisata global. Rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,20–4,30 persen pada tahun 2025, didukung oleh pemulihan ekonomi negara asal wisatawan, peningkatan konektivitas penerbangan langsung ke Indonesia serta penyelenggaraan acara berskala internasional. Dukungan lainnya meliputi program unggulan pariwisata Indonesia yaitu Gerakan Wisata Bersih, Wisata Berbasis Minat Khusus, Acara Bertaraf Global, Pengembangan Desa Wisata, Peningkatan Acara dengan IP Indonesia, dan Program Tourism 5.0 yang mendorong adopsi kecerdasan buatan dan digitalisasi di sektor pariwisata. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Indonesia.

Sedangkan stabilitas moneter tahun 2025, Inflasi akan dijaga dalam rentang sasaran 1,5–3,5 persen (yoy) didukung oleh (i) pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar dan pasar murah; (ii) peningkatan produksi dalam negeri diantaranya melalui pengembangan kawasan produksi pertanian hortikultura melalui pemanfaatan pekarangan; (iii) penguatan infrastruktur dan konektivitas; serta (iv) perbaikan kualitas data pangan. Pada tahun 2025, nilai tukar rupiah diprakirakan terkendali dalam rentang Rp16.300-Rp16.800 per US$ didukung oleh prospek penguatan ekonomi domestik serta berbagai upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat pendalaman pasar uang dan menarik aliran modal asing masuk ke dalam negeri, utamanya dalam bentuk FDI dan investasi portofolio.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan kondisi di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80–6,30 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Pada tahun 2026, stabilitas moneter moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat inflasi dijaga pada rentang sasaran 2,5±1,0 persen (yoy), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.500-Rp16.900 per US$.

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia yang tetap berdaya tahan tumbuh di atas lima persen pada tahun 2024 serta dengan memperhatikan tantangan dan prospek ekonomi di tengah gejolak dan tingginya ketidakpastian perekonomian global, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 diprakirakan tetap baik sehingga mampu bertahan sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country), dalam rangka pencapaian target tersebut, arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 diantaranya sebagai berikut:

- Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh kebijakan peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui kebijakan pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan.
- Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebijakan program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya.
- PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan kebijakan dalam rangka peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global melalui optimalisasi pengelolaan aset

BUMN; pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); peningkatan kredit investasi untuk industri padat karya, tax holiday dan tax allowance; dan penghapusan buku atau tagih utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

- Dalam upaya mencapai target investasi, diperlukan kebijakan untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, dengan kebijakan yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.
- Ekspor barang dan jasa pada tahun 2026 tetap didorong tumbuh melalui strategi arah kebijakan (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi market intelligence, business matching dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi Free Trade Agreement (FTA) dan/atau Comprehensive Eonomic Partnership Agreement (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e-commerce bagi pelaku UMKM, pengembangan exporter tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara real-time; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

- Peningkatan kinerja industri pengolahan utamanya didukung oleh kebijakan keberlanjutan proyek hilirisasi mineral, terutama di wilayah timur Indonesia, yang dipercepat melalui penanaman modal negara; inisiasi program MBG bagi anak sekolah dan ibu hamil yang mendorong permintaan pada subsektor industri makanan dan minuman; peningkatan penggunaan teknologi Generative AI (Artificial Intelligence) yang mendorong permintaan

pada subsektor industri elektronik; serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0, penerapan standardisasi, dan akselerasi transisi menuju industri hijau.

- Sektor pertanian diprakirakan tumbuh pada tahun 2026, seiring peningkatan permintaan produk pertanian yang didorong oleh program MBG. Dari sisi pasokan, pertumbuhan sektor pertanian didukung oleh kebijakan pengembangan lumbung pangan; penguatan cadangan pangan nasional; pengembangan pangan hewani; pengembangan pangan lokal dan nabati; serta fortifikasi dan biofortifikasi pangan.
- Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, utamanya didorong oleh program MBG, selain itu kinerja pariwisata yang meningkat juga didukung oleh sektor transportasi yang dapat peningkatan mobilisasi masyarakat; peningkatan kinerja pariwisata; serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya. Rasio PDB pariwisata diproyeksikan meningkat, didukung oleh kebijakan peningkatan konektivitas penerbangan mancanegara langsung ke Indonesia serta penyelenggaraan acara berskala internasional, kebijakan program unggulan pariwisata Indonesia yaitu Gerakan Wisata Bersih, Wisata Berbasis Minat Khusus, Acara Bertaraf Global, Pengembangan Desa Wisata, Peningkatan Acara dengan IP Indonesia, dan Program Tourism 5.0 yang mendorong adopsi kecerdasan buatan dan digitalisasi di sektor pariwisata.
- Pemerintah mengambil pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (pro-stability) dan keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability)
- Pada tahun 2026, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat inflasi dijaga pada rentang sasaran 2,5±1,0 persen (yoy), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.500-Rp16.900 per US$.

- Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2026 diarahkan melalui kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi. Upaya tersebut meliputi (i) stabilisasi harga melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (ii) peningkatan produksi dalam negeri melalui: pengembangan kawasan pangan dan hortikultura; optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastuktur pertanian; penguatan

sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan; penerapan praktik budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP); serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD); (iii) penguatan kelancaran distribusi melalui: peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) serta penguatan dan perluasan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD); serta (iv) perbaikan kualitas data pangan, penguatan koordinasi sejak proses perencanaan, serta koordinasi perumusan kebijakan harga diatur pemerintah baik dari sisi timing maupun sequencing sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap kenaikan inflasi

- Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diarahkan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya melalui (i) strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, masuknya aliran modal asing, serta pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing; (ii) menetapkan tingkat suku bunga BI-Rate yang optimal untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan; (iii) mendorong penerapan kebijakan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan pencapaian target inflasi dan mendukung stabilitas eksternal; (iv) menjaga ketersediaan cadangan devisa untuk mendukung stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri (ULN) Pemerintah; serta (v) optimalisasi implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

3.1.4 Kondisi dan Prospek Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Perekonomian Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, terutama melalui perdagangan barang dan jasa. Selain itu, proporsi konsumsi rumah tangga yang mencapai 66,2 persen dari PDRB, menjadikan intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, atau lebih rendah dibandingkan capaian dengan tahun 2023 (5%) serta dengan mempertimbangkan target perekonomian Jawa Barat tahun 2025, kondisi ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan target ekonomi makro pada tahun 2026, seperti tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Target Tahun 2025-2026

No	Indikator	Realisasi 2024[1)]	Target 2025[2)]	Target 2026[3)]
1	LPE (%, *c-to-c*)	4,95	4,96 – 5,37	5,15 - 6,20
2	Laju Inflasi (%, *y-o-y*)	1,67	2,5 ± 1	2,5 ± 1

3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	41,39	41.15 - 41.38	40,10 - 42,00
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	3,07	2,88	3,21 - 3,46
5	PMTB (% PDRB)	24,70	23,60	23,82 - 23,84
6	Rasio Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,53	26,3	20,50 - 20,54

Sumber: 1) BPS Provinsi Jawa Barat, Februari 2025;
2) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan;
3) Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diproyeksikan tumbuh sebesar 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026 yang didukung oleh stabilitas perekonomian di tengah perlambatan ekonomi global. Terkendalinya perekonomian ditunjukan oleh terkendalinya inflasi pada tingkat 2,5 + 1 persen yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali juga mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa yang terkendali seiring dengan peningkatan efektivitas produksi dan distribusi bahan pokok penting. Secara bersamaan, prospek ekonomi global dan nasional yang masih tumbuh lebih lambat juga mempengaruhi kondisi Jawa Barat.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan dalam menyongsong tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045. Pemantapan ekonomi tersebut diterjemahkan ke dalam komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun produksi. Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 didukung oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor. Konsumsi Rumah Tangga diproyeksikan meningkat seiring dengan terjaganya tingkat inflasi pada target 2,5 + 1 persen. Pengendalian inflasi pada berbagai peak season, efektivitas sistem distribusi komoditas, dan kemudahan sistem pembayaran dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Selain itu, peningkatan penyerapan tenaga kerja, stabilitas suku bunga, dan berlanjutnya berbagai program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dapat menjadi sebab yang penting dalam meningkatkan konsumsi masyarakat.

Pada tahun 2026, PMTB diproyeksikan tumbuh lebih ekspansif pada tingkat 6,30 - 7,58 persen, seiring dengan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur dan mulai beroperasinya kawasan industri baru yang tentunya dapat meningkatkan akumulasi modal pada tahun tersebut. Selain itu, fokus pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas layanan dasar di Jabar Selatan, diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan PMTB ke tingkat yang lebih tinggi. Kinerja Ekspor Luar Negeri Jawa Barat tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 7,21 - 8,18 persen dengan dorongan ekspor non

migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, serta Karet. Penguatan peran dan fungsi pelabuhan patimban dan BIJB secara efisien sebagai simpul transportasi berskala internasional untuk aktivitas ekspor, serta diversifikasi produk unggulan ekspor Jawa Barat juga akan turut mendorong kontribusi kinerja ekspor di tahun 2026. Sementara itu nilai realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 342 T, atau sekitar 15 persen terhadap target realisasi investasi nasional. Upaya pencapaian realisasi investasi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, baik melalui peningkatan kepastian hukum, ketersediaan sumber daya input, serta stabilitas ekonomi dan politik. Penerapan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan juga menjadi penting, utamanya melalui implementasi green economy dan blue economy, ketersediaan infrastruktur dan pemerataan investasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan potensi masing-masing, serta hilirisasi sektor primer bernilai tambah tinggi di Jabar Selatan. Pengembangan ekonomi di Jabar Selatan melalui promosi investasi juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa Barat.

Dari sisi produksi, terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat tahun 2024 yaitu Industri Pengolahan (41,39 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (14,46 persen), serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (8,42 persen). Ketiga sektor ini diharapkan dapat tumbuh di tingkat yang lebih tinggi, terutama pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang ditargetkan tumbuh 2,16 - 2,60 persen pada tahun 2026. Target pertumbuhan tahun 2026 dapat diwujudkan melalui peran Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, serta hilirisasi blue economy. Target pertumbuhan yang lebih tinggi juga diberikan kepada sektor Industri pengolahan di tingkat 4,69 - 5,65 persen pada tahun 2026.

Peningkatan ini diharapkan dapat tercapai seiring dengan upaya Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing produksi di luar industri besar, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam dan luar negeri, maupun kebutuhan produksi industri besar melalui link and match. Hilirisasi sektor primer juga diharapkan mampu meningkatkan output pada sub sektor industri Makan Minum. Pada tahun 2026, industri Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan output pada sektor Pertanian, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, Transportasi, dan Real Estate. Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat diproyeksikan tumbuh 4,69 - 5,65 persen yang didorong oleh sub sektor industri Alat Angkutan, Barang dari Logam, Makan dan minum, dan Tekstil.

Selain 3 sektor tersebut, sector potensial lainnya yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2025 dan 2026 yaitu sector pariwisata di wilayah yang menjadi

koridor pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rancangan RPJMN, yang mencakup Bogor-Sukabumi-Cianjur dan Cekungan Bandung. Pada tahun 2026, sector ini diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan yang penting dalam mendorong pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan Jawa Barat sebesar 8,58 - 10,33 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,97 - 9,59 persen. Tingginya pertumbuhan sektor transportasi didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Barat seiring dengan pembangunan berbagai infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan dan Jawa Barat bagian selatan. Fokus pembangunan provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 dan 2026 yang berfokus pada peningkatan layanan infrastruktur transportasi, serta pembangunan kawasan industri di Subang Smartpolitan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi. Pada tahun 2026, sektor Konstruksi ditargetkan tumbuh pada rentang 6,66 - 8,02 persen.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional, dan global. Resiliensi pertumbuhan global diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan yang lebih tinggi bagi Jawa Barat. Selain itu, pertumbuhan nasional yang ditargetkan lebih tinggi selama periode RPJMN Tahun 2025-2029 didorong oleh peningkatan pembangunan infrastruktur, serta eksplorasi yang lebih luas dalam mengembangkan komoditas unggulan di Jawa Barat. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Prov. Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.2 Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2026
1	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,56
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,51 – 6,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,30 - 6,65
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,15 - 6,20
5	Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah/Kapita)	64,60
6	Gini Ratio (Poin)	0,420 - 0,425
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2,62

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;

Berdasarkan tabel tersebut, kerangka ekonomi daerah yang kokoh dan resilien terhadap berbagai guncangan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi aktivitas perekonomian dan membawa pertumbuhan pada tingkat yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan membaiknya Indeks Modal Manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataannya.

Dalam rangka peningkatan Indeks Modal Manusia, Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya strategis, diantaranya peningkatan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan sejumlah beasiswa. Selain itu, juga memperkuat sektor kesehatan dengan memperluas akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat. Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi juga terus digencarkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang merata. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan IMM sebesar 0,56 poin di tahun 2026.

Pada indikator makro terkait kemiskinan, secara statistik, penduduk miskin di Jawa Barat menurun dari 3,85 juta pada Maret 2024 menjadi 3,67 juta pada September 2024, atau menurun sebesar 0,38 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen secepat-cepatnya pada tahun 2025, dan selambatnya pada tahun 2026. Untuk mencapai target ini, penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menjadi langkah strategis yang diambil. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, diharapkan program-program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera.

Dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta perluasan kesempatan kerja, kebijakan diarahkan dengan mendorong investasi, khususnya investasi padat karya serta pemberdayaan usaha mandiri melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas. Dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan berbagai pelatihan keterampilan kerja baik keterampilan kompetensi industri maupun usaha mandiri, serta sertifikasi keahlian. Untuk memperkuat akses ke pasar kerja, difasilitasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri (migran), pelaksanaan job fair dan platform informasi lowongan kerja. Pencapaian target indikator makro terkait ketenagakerjaan difokuskan pada pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan diharapkan akan memberikan andil dalam menurunkan tingkat kemiskinan daerah pada level 6,35 - 6,87 persen pada tahun 2026.

Upaya mempersempit ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat antara lain dilakukan melalui pengembangan aktivitas perekonomian yang bertumpu pada kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah seperti UMKM, IKM dan Ekonomi kreatif, serta mendorong aktivitas perekonomian berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur dan investasi di wilayah afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan. Pada indikator makro sector lingkungan, langkah-langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian juga diagendakan melalui pengarusutamaan penerapan ekonomi hijau serta penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca pada berbagai sektor-sektor pembangunan.

Penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2026 ditargetkan pada angka 2,62 persen melalui 4 sektor utama yaitu sektor berbasis lahan (kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, lahan mangrove), sektor energi dan transportasi, serta sektor limbah dan persampahan terhadap PDRB

3.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

- Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ramah lingkungan dan ekonomis;
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
- Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta perlindungan konsumen

- Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
- Penyiapan dan penataan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah afirmasi 3 TP (Khususnya Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand;
- Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global
- Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
- Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat Bagian Selatan);
- penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
- penguatan tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia, serta pengembangan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi;
- Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
- Peningkatan iklim investasi dan kemudahaan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM;
- Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
- Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
- Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment);
- Pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik

di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan; dan

- Penataan dan restrukturisasi BUMD

3.1.6 Kondisi dan Prospek Ekonomi kabupaten Bandung Barat

Sampai dengan tahun 2024, struktur perekonomian Bandung Barat masih didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan (40,85%); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,62%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,38%); Konstruksi (6,92%); Transportasi dan Pergudangan (6,20%); serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (5,23%) sedangkan sektor lainnya berkontribusi masih dibawah 5 persen. Pada tahun 2024, diantara keenam lapangan usaha tersebut, kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan peranan yang paling besar yaitu sebesar 9,80 persen sedangkan 5 lapangan usaha lainnya adalah kategori yang mengalami penurunan peranan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya produktivitas padi akibat kekeringan lahan (dampak bencana el nino), menurunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung Barat dan masih minimnya penggunaan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian serta tren pergeseran potensi ekonomi ke sektor non-primer seperti perdagangan dan jasa.

Penurunan peranan kategori Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat selama tahun 2024 akibat terjadinya beberapa kali deflasi serta akibat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3.3 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 - 2024 (persen)

No	Sektor	Tahun		Peningkatan / Penurunan
		2023	2024	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,73	12,63	-0,10
2	Pertambangan dan Penggalian	0,94	0,94	0,00
3	Industri Pengolahan	41,66	40,8	-0,31

No	Sektor	Tahun		Peningkatan / Penurunan
		2023	2024	
			5	
4	Listrik dan Gas	0,81	0,84	0,03
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,05	0,01
6	Konstruksi	7,35	6,92	-0,43
7	Perdagangan besar dan eceran	12,40	12,38	-0,02
8	Transportasi dan pergudangan	5,99	6,20	0,22
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,38	5,23	-0,15
10	Informasi dan komunikasi	2,09	2,06	-0,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	1,00	0,09
12	Real Estate	1,93	1,98	0,05
13	Jasa Perusahaan	0,5	0,53	0,03
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan Social wajib	2,19	2,14	-0,05
15	Jasa Pendidikan	3,95	4,45	0,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,56	0,63	0,07
17	Jasa lainnya	1,08	1,16	0,08
PDRB ADHB		**100**	**100**	

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2020 – 2024, BPS 2025

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pada tahun 2024 distribusi PDRB sebagian besar (lebih dari 65 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Kenaikan peranan distribusi PDRB menurut pengeluaran yaitu pada sector nilai net ekspor hal ini menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi "surplus" atau menguntungkan, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan domestik dapat dipenuhi oleh produk yang berasal dari dalam wilayah sendiri bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan domestik wilayah lain (ekspor). Sebaliknya penurunan peranan terbesar terhadap PDRB menurut pengeluaran yaitu pada sector Konsumsi Rumah Tangga hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat.

Tabel 3.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2023-2024

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2023*	2024**	Peningkatan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ *Household Consumption*	68,32	67,56	-0,76

2. Konsumsi LNPRT/ *NPISH Consumption*	0,98	1,00	0,02
3. Konsumsi Pemerintah/ *Government Consumption*	5,63	5,74	0,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ *Gross Fixed Capital Formation*	21,27	20,64	-0,63
5. Perubahan Inventori/ *Changes of Inventory*	0,09	0,10	0,01
6. Net Ekspor/*NettExport* (Ekspor-Impor)	3,72	4,96	1,24
PDRB / *GRDP*	**100,00**	**100,00**	

Sumber: PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2020 – 2024, BPS 2025

Pertumbuhan PDRB Bandung Barat pada tahun 2024 melambat dibandingkan tahun 2023. Aktivitas ekonomi yang melambat mendorong penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara umum. Nilai PDRB Bandung Barat tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 36.793, 68 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.731,50 miliar dari 35.062,18 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,00 persen.

Dari sisi Lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi Bandung Barat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Perlambatan pertumbuhan terbesar terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang hanya tumbuh 6,48 persen, dibanding laju 2023 yang mencapai 9,20 persen. Kategori industri pengolahan melambat sebesar 2,16 persen (dari 5,30 persen tahun 2023 menjadi 3,14 persen tahun 2024). Lapangan usaha lainnya yang mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 ada 12 kategori. Percepatan pertumbuhan terbesar terjadi pada kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh 6,70 persen dibanding capaian 2023 sebesar 2,41 persen serta sector Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan yang tumbuh 5,56 persen disbanding keadaan tahun 2023 sebesar 1,59 persen.

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 - 2024 (persen)

	Lapangan Usaha	2023	2024	Peningkatan/ Penurunan
A	Pertanian, Kehutanan, dan	1,59	5,56	3,97

	Lapangan Usaha	2023	2024	Peningkatan/ Penurunan
	Perikanan			
B	Pertambangan dan Penggalian	0,69	3,02	2,33
C	Industri Pengolahan	5,30	3,14	-2,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,32	3,57	1,25
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,23	3,51	1,28
F	Konstruksi	4,48	5,27	0,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,58	0,55
H	Transportasi dan Pergudangan	10,37	9,80	-0,57
I	Penyediaan Akomodasi & Mamin	9,20	6,48	-2,72
J	Informasi dan Komunikasi	6,27	8,71	2,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,53	6,97	3,44
L	Real Estate	6,23	8,16	1,93
M,N	Jasa Perusahaan	7,27	6,45	-0,82
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,41	6,70	4,29
P	Jasa Pendidikan	3,96	6,97	3,01
Q	Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	5,74	5,55	-0,19
R,S,T, U	Jasa Lainnya	6,78	9,68	2,9
Produk Domestik Regional Bruto		5,00	4,94	-0,06

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024, BPS, 2025.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 mengalami perlambatan dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan LNPRT, yakni dari 4,84 persen (2023) menjadi 4,81 persen (2024) untuk konsumsi rumah tangga, dan untuk konsumsi LNPRT dari 10,34 persen (2023) menjadi 7,92 pada tahun 2024. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan dari capaian 2023 sebesar 2,96 persen menjadi 7,83 persen.

Pada tahun 2024, komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Bila dilihat dari komponennya, kelompok makanan, minuman dan rokok mengalami pelambatan pertumbuhan dari capaian tahun 2023 sebesar 4,37 persen melambat menjadi 3,23 persen di tahun 2024.

Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Pengeluaran Tahun 20202 - 2024 (persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2023	2024	Peningkatan/ Penurunan
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**4,84**	**4,81**	**-0,03**
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,37	3,23	-1,14
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,92	6,44	2,52
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,54	5,77	1,23
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,76	5,44	1,68
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	6,90	7,09	0,19
1.f. Hotel dan Restoran	5,62	7,39	1,77
1.g. Lainnya	3,57	4,66	1,09
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**10,34**	**7,92**	**-2,42**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**2,96**	**7,83**	**4,87**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**4,55**	**4,81**	**0,26**
4.a. Bangunan	4,48	4,79	0,31
4.b. Non Bangunan	6,15	5,32	-0,83
5. Perubahan Inventori			
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah			
PDRB	**5,00**	**4,94**	**-0,06**

Sumber: PDRB KBB Menurut Pengeluaran 2020 – 2024, BPS 2025

Perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat di tahun 2026 yang didukung oleh ketersediaan sumber daya dan posisi geografis yang strategis serta didukung perbaikan kondisi ekonomi regional dan nasional walaupun masih terdapat tantangan dan prospek ekonomi di tengah gejolak dan tingginya ketidakpastian perekonomian global. Perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2026, diharapkan menuju peningkatan ekonomi seluruh sektor lapangan usaha yang didorong untuk tumbuh ekspansif sejalan dengan berbagai kebijakan dan program pada sector ekonomi pada masa kepemimpinan Kepala Daerah baru periode Tahun 2025-2029 dengan Visi AMANAH (Agamis, Maju, Adaftif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) dengan salah satu Visinya MAJU mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat Bandung Barat yang unggul, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan berbasis potensi lokal guna mendongkrak kesejahteraan seluruh masyarakat, meningkatkan

pendapatan daerah yang didukung oleh Misi ke 2 dalam rangka "Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah".

Strategi pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat melalui Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah.

Keberhasilan strategi pembangunan bidang ekonomi didukung sejumlah porgram prioritas dan program unggulan, diantaranya: Program pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif; Program One Village One Product; Program Pemberian bantuan pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); Mendorong investasi dan pengembangan pariwisata berbasis desa; Mendorong investasi tempat wisata baru, Program penyuluhan, pembinaan & pelatihan bagi remaja dlm bid. digital & Ekraf; Pembangunan sumber air pertanian (sal. irigasi, pompanisasi, sumur bor dan kantung air); Pemberian Bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan; menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan; Subsidi bebas PBB bagi lahan sawah yang dilindungi; Modernisasi pengolahan lahan pertanian; pembangunan sentra-sentra pemasaran produk unggulan, kepastian hukum, kemudahan investasi dan digitalilsasi investasi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat ke depan tidak terlepas dari kebijakan menjaga stabilitas pada sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi seperti sektor industri, perdagangan dan pariwisata serta dan meningkatkan sektor - sektor yang masih minim berkontribusi terhadap perekonomian, serta dari sisi pengeluaran menjaga kontibusi pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk setiap kelompok pengeluaran terutama kelompok makan minum dan rokok serta meningkatkan kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan nilai ekspor.

Optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2026 didukung oleh prioritas pembangunan tahun 2025 dan tahun 2026 yang focus pada pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur pelayanan public diharapkan mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik. Sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kab. Bandung Barat yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan provinsi. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Konstruksi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dan pengeluaran di tahun 2025 dan 2026 dengan memperhatikan capaian tahun

2024, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berkisar diangka 5,19 – 5 49 persen, dengan proyeksi masing-masing sector pemebrntuk PDRB berikut:

Tabel 3.7 Target Pertumbuhan Komponen PDRB Kab. Bandung Barat Tahun 2025-2026

	Lapangan Usaha	Capaian Tahun 2024*	Target (hasil proyeksi)	
			2025**	2026***
Produsi				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,56	2,76	3,95
B	Pertambangan dan Penggalian	3,02	1,42	-1,05
C	Industri Pengolahan	3,14	6,30	5,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,57	4,95	4,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,51	5,57	4,45
F	Konstruksi	5,27	4,29	3,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,58	4,47	4,99
H	Transportasi dan Pergudangan	9,80	7,06	8,09
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,48	5,82	5,54
J	Informasi dan Komunikasi	8,71	6,42	7,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,97	1,72	2,98
L	*Real Estate*	8,16	5,71	5,81
M,N	Jasa Perusahaan	6,45	7,18	7,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,70	-1,61	0,82
P	Jasa Pendidikan	6,97	1,70	3,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,55	4,78	4,71
R,S,T, U	Jasa Lainnya	9,68	3,72	5,10
Pengeluaran				
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,81	3,83	4,96
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,92	4,65	4,96
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,83	0,71	6,49
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,81	3,54	3,59

*Sumber: * 2024 BPS,*
***2025 Target RKPD Tahun 2025*
****2026 Hasil analisis proyeksi, Bappelitbangda, 2025.*

Berdasarkan kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung Barat sepanjang tahun 2024 tersebut diatas yang tumbuh sebesar 4,94 persen, atau lebih rendah dibandingkan capaian dengan tahun 2023 (5%). Dengan memperhatikan tantangan dan prospek ekonomi di tengah gejolak dan tingginya ketidakpastian perekonomian global serta dengan mempertimbangkan

kondisi perekonomian nasional dan regional Jawa Barat serta target perekonomian Kab Bandung Barat tahun 2025, kondisi ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan target pembangunan sector ekonomi di Kab. Bandung Barat pada tahun 2026, seperti tabel berikut:

Tabel 3.8 Capaian dan Target Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat BaratTahun 2024-2026

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025*	Target Tahun 2026**
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,94	5,07	5,21
2	Laju Inflasi	1,46	1,01 - 2,00	1,01 - 2,00
3	PDRB harga berlaku (milyar)	61.236,36	64.766,13	68.913,42
4	PDRB harga Konstan (milyar)	36.793,68	38.659,12	40.673,26
5	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	32.500	34.085	36.430
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,70	6,58	6,28
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,49	9,98	9,63
8	Indeks Gini (poin)	0,400	0,369	0,367

*Sumber: * Target RKPD KBB Tahun 2025*
***Target hasil analisis proyeksi, Bappelitbangda*

3.1.7 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 difokuskan untuk menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi daerah yang diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan dan industri kecil menengah, koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan dan kemudahan investasi daerah, pengendalian kemiskinan yang tepat sasaran yang didukung oleh data yang akurat, meningkatnya ketahanan pangan, serta peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Arah Kebijakan dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, diantaranya:

- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan yang terintegrasi melalui modernisasi dan implementasi teknologi
- Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
- Pengendalian kesehatan ternak

- Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
- Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Penyiapan dan pembinaan rantai pasok bahan baku sesuai potensi sumber daya lokal, (produksi pertanian, peternakan, dan perikana) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis.
- Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)
- Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif
- Peningkatan Sarana Prasarana jaringan distribusi perdagangan
- Penguatan pengendalian inflasi daerah serta stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Peningkatan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat
- Pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah
- Peningkatan standar dan daya saing produk IKM
- Peningkatan koperasi aktif dan sehat
- Peningkatan kompetensi SDM pengelola koperasi
- Pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah putih
- Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) serta penerapan teknologi dan kemitraan UMKM
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis UMKM
- Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perluasan penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, kesehatan, bantuan pemenuhan ketahanan pangan dan gizi, bantuan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
- Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran melalui pemutakhiran dan pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

- Pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dalam mencegah terjadinya kemiskinan baru
- Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
- Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Meningkatkan skill dan keterampilan tenaga kerja
- Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
- Peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor potensial

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2026. Dengan adanya rancangan tersebut diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2026 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses bottom up dan top down serta semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285, sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna meningkatkan pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:

1) Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
2) Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
3) Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
4) Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pungutan pajak melalui legalitas formal berupa dikeluarkannya Peraturan Daerah;
5) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
6) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
7) Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;
8) Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menarik investor

b. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersumber dari hasil Penerimaan jasa giro memanfaatkan uang mengendap (idle money), tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian.

2. Pendapatan Dana Transfer Pusat ke Daerah

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah

dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Dana Transfer Pusat ke Daerah untuk Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Dana Perimbangan yang meliputi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Transfer Dana Alokasi Umum dan Transfer Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
2) Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima oleh Pemkab Bandung Barat. Proyeksi/target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 dan seterusnya Struktur Pendapatan Daerah berpedoman berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah tahun 2026 diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 9,71 persen apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2025, selanjutnya untuk proyeksi/target Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026

No/Kode	Uraian	Jumlah			
		Realisasi 2024	APBD 2025	APBD 2025 parsial 2	RKPD 2026
1	2	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.410.264.951.636**	**3.465.066.875.614**	**3.367.314.144.635**	**2.875.794.980.504**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**799.932.118.379**	**952.021.711.556**	**955.021.711.556**	**1.047.769.660.836**
4.1.01	Pajak Daerah	590.254.784.373	741.518.755.652	741.518.755.652	787.483.755.652
4.1.02	Retribusi Daerah	14.701.304.603	194.607.048.593	197.607.048.593	12.608.143.510

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.306.239.012	1.253.070.525	1.253.070.525	1.253.070.525
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	193.669.790.391	14.642.836.786	14.642.836.786	244.243.400.759
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.610.332.833.257**	**2.513.045.164.058**	**2.412.292.433.079**	**1.830.206.610.058**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.221.997.027.103	2.335.113.284.000	2.204.897.561.000	1.652.274.730.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	388.335.806.154	177.931.880.058	207.394.872.079	177.931.880.058
Jumlah Pendapatan		**3.410.264.951.636**	**3.465.066.875.614**	**3.367.314.144.635**	**2.875.794.980.504**

Sumber : SIPD kabupaten bandung barat Tahun 2025, diolah Bappelitbangda KBB

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 pada Pendapatan Asli Daerah, terdapat perbedaan pada pos pajak daerah yang diproyeksikan meningkat 6,20% dan proyeksi lain-lain PAD yang sah dan retribusi dikarenakan adanya perubahan rekening Pendapatan untuk BLUD dan termasuk penambahan target pendapatan BLUD. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, pengembangan wilayah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengurangan dan penangulangan resiko bencana yang sering terjadi setiap tahun dan pengelolaan lingkungan hidup berekelanjutan guna pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Prinsip money follow function harus diubah menjadi prinsip money follow program dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2026. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja. Belanja daerah terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Modal, Dana cadangan pembiayaan dan bunga untuk. Kebijakan belanja daerah diupayakan penggunaannya untuk:

1. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan Urusan pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.
3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah dialokasikan kepada 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat;
b. Prioritas II adalah untuk program-program sesuai arah prioritas perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat serta untuk memenuhi program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar; dan terakhir
c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sedangkan proyeksi/target Belanja Daerah taun 2025 dan 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Belanja Daerah Tahun 2025 dan Belanja Daerah Tahun 2026

No/Kode	Uraian	Jumlah (rupiah)		
		APBD 2025	APBD 2025 parsial 2	RKPD 2026
1	2	3	4	5
5	**BELANJA DAERAH**	**3.465.066.875.614**	**3.364.314.144.635**	**2.901.763.262.838**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**2.597.763.043.728**	**2.565.139.706.735**	**2.155.563.573.140**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.507.786.175.565	1.510.389.853.729	1.260.979.384.761
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.652.368.163	1.018.823.780.985	821.692.717.216
5.1.04	Belanja Subsidi			5.499.913.161
5.1.05	Belanja Hibah	31.104.500.000	32.346.072.021	59.721.558.001

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.220.000.000	3.580.000.000	7.670.000.000
5,2	**BELANJA MODAL**	**326.228.674.356**	**258.096.986.920**	**211.918.099.308**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.269.807.140	3.269.807.140	10.958.495.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.187.963.634	114.009.183.320	33.621.211.381
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.198.800.935	66.224.959.255	71.431.625.774
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137.325.579.583	60.346.514.141	95.242.981.653
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.361.224.900	13.361.224.900	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	885.298.164	885.298.164	663.785.500
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**53.772.545.881**	**53.772.545.881**	**37.905.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.772.545.881	53.772.545.881	37.905.000.000
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**487.302.611.649**	**487.302.611.649**	**496.376.590.390**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	62.697.901.449	62.697.901.449	67.761.443.390
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	424.604.710.200	424.604.710.200	428.615.147.000
Jumlah Pendapatan		**3.465.066.875.614**	**3.364.314.144.635**	**2.901.763.262.838**

Sumber : SIPD Tahun 2024, diolah

Rencana belanja daerah tahun 2026 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan belum masuknya proyeksi Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat serta menyesuaikan dengan hasil LRA Tahun 2024.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi- potensi daerah.

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2026 diasumsikan belum memperhitungkan adanya SiLPA artinya adalah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendanai seluruh belanja daerah

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kabupaten Bandung Barat. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Bandung Barat selain bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada Masa Pasca Pandemi COVID-19.

APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi.

Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kabupaten Bandung Barat sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah provinsi sehingga dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi Pendanaan dari APBD Kabupaten Bandung Barat dan APBDes dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Desa sejalan dan sinergi dengan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten sehingga dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2026 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahunan selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja PD). RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 yang disusun di tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, berpedoman pada arah kebijakan nasional/Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) kesesuaian dengan dokumen perencanaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2026; (2) Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah erpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, didalamnya terdapat arahan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta isu strategis daerah; (3) Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana; (4) Untuk masing-masing prioritas pembangunan, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas; (5) Dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolak ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan s.d Triwula II Tahun 2025; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan (4) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2026.

1.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan pembangunan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Bandung Barat dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Kabupaten Bandung Barat memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dirancang sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah untuk mewujudkan Bandung Barat "AMANAH" (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) sekaligus juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2025-2029 serta sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian Jabar Istimewa (Lembur diurus Kota ditata) yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

4.1.1 Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKP Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029 menetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** yang mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan indonesia setara negara maju ditahun 2045. Dalam mencapai Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagimana tertuang dalam RPJMN tahun 2025–2029 sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2025–2029 dengan **8 (delapan) Misi atau Asta Cita** yang selanjutnya ditetapkan menjadi Proritas Nasional atau goals (tujuan) yang ingin dicapai, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Visi Misi Presiden dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, 2025

Sasaran pembangunan pada RPJMN Tahun 2025-2029 menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mewujudkan visi dan misi presiden tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahula 2025-2029 merupakan manifestasi dari pelaksanaan periode pertama RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Representase keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut:

Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, 2025

Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional tersebut, meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8 (Asta) agenda pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 17 program prioritas presiden dan wakil presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor, yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan dan energi dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pembenrantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan peptisida langsung ke petani

13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif -karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumberdaya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan eknomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga

Untuk selanjutnya 17 program prioritas tersebut dirumuskan kedalam langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins, yaitu:

1. Memberikan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah- sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu- kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR;
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Untuk lebih jelasnya program prioritas dan program hasil terbaik cepat/quick wins, tersebut dapat dilihat pada tabel beikut:

Tabel 4.1 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat

17 PROGRAM PRIORITAS	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5) Pemberantasan kemiskinan. 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9) Penguatan pertahanan dan keamanaan Negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya. 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2) Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6) Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sumber: RKP Tahun 2026

Bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sarana untuk menerjemahkan cita-cita dan tujuan negara ke dalam pembangunan negara yang lebih konkret yang dilaksanakan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. Selanjutnya untuk optimalisasi perencanaan pembangunan nasional jangka tahunan, pada tahun 2026 disusun dan ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Pada RKP Tahun 2026 ini, arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada gambar berikut:

Gambar 4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang RKP Tahun 2026

Prioritas pembangunan tersebut di atas, pada tahun 2026 pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (blue food) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien. Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

Pengelolaan sampah nasional menghadapi kondisi darurat akibat proyeksi timbulan sampah mencapai 82,2 juta ton per tahun pada 2045, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mulai melampaui batas. Reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pendekatan teknis, perubahan perilaku, dan pelibatan multipihak. Pengelolaan Sampah Terpadu bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, menciptakan nilai tambah ekonomi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta mendukung penurunan emisi GRK. Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi pilar utama, meskipun menghadapi tantangan pembiayaan, perizinan, dan regulasi. Program ini disinergikan dengan agenda nasional seperti MBG, ekonomi sirkular, dan pengentasan kemiskinan melalui peran sektor informal. Program Prioritas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listri (PSEL) dengan lokasi prioritas PSEL yang diusulkan dalam PSN RPJMN Tahun 2025-2029 salah satunya berada di Bandung.

RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program MBG.

Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin. Di sektor pendidikan, pemerintah berupaya untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif. Afirmasi pada akses pendidikan yang berkualitas dilakukan di antaranya melalui percepatan renovasi sekolah, serta pembangunan Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif untuk memberikan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia. Selanjutnya, digitalisasi pendidikan merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan nasional, sekaligus membekali generasi muda dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di era ekonomi berbasis teknologi. Program ini diharapkan juga mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat sistem manajemen mutu pendidikan secara nasional.

Pada sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem MBG, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, dan mempercepat pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota, diiringi dengan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan di daerah sulit akses. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis akan diperkuat untuk mendukung deteksi dini, edukasi, pencegahan penyakit, serta mengurangi potensi beban anggaran akibat biaya pengobatan dan perawatan, serta hilangnya produktivitas masyarakat.

Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Tujuannya adalah membentuk pemerintahan yang adaptif, melayani secara cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Pemerintahan yang efektif diharapkan mampu mewujudkan kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik. Strategi dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dilakukan melalui transformasi digital pemerintah yang difokuskan pada (i) pengembangan arsitektur pemerintah digital; (ii) penguatan keterpaduan layanan publik prioritas dalam portal pelayanan publik terintegrasi sesuai proses bisnis tematik; dan (iii) implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital.

Selanjutnya, investasi merupakan salah satu pendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Investasi didorong tidak hanya dengan peningkatan nilai realisasi investasi, namun juga peningkatan kualitas investasi baik PMA maupun PMDN. Transformasi digital menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya saing nasional di tingkat global, membangun kegiatan sosial yang kondusif dengan memanfaatkan data, informasi, pengetahuan, serta perkembangan teknologi digital, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital dan peningkatan produktivitas.

Riset dan inovasi juga menjadi salah satu strategi untuk mendukung adopsi teknologi dan inovasi. Pengembangan riset dan inovasi diarahkan melalui pendekatan ekosistem iptek dan inovasi (Iptekin) yang lebih terstruktur, sederhana, dan adaptif terhadap berbagai konteks implementasi serta mudah dimengerti oleh berbagai stakeholder. Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, peningkatan kapasitas iptekin akan dilakukan melalui peningkatan peran lembaga intermediasi yang ada di lembaga penelitian dan perguruan tinggi, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Science Techno Park (STP), pusat diseminasi, Transfer Technology Office (TTO), dan inkubator, sehingga riset dan inovasi dapat lebih terarah dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pertahanan semesta diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui komponen cadangan, pemenuhan alutsista, dan penguatan kemampuan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan nasional dari gangguan yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional. Peningkatan produktivitas nasional juga didukung oleh pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (pro-stability) dan keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability).

Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh percepatan hilirisasi yang difokuskan pada beberapa komoditas unggulan, yang meliputi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan peran sebagai pusat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan perekonomian desa antara lain melalui sistem distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, pengendalian inflasi lokal, peningkatan nilai jual hasil pertanian, pengurangan ketergantungan pada perantara, serta penciptaan lapangan kerja baru di desa.

Dalam rangka mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan penerapan data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, program tiga juta rumah yang menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk masyarakat miskin dan rentan. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, Presiden menetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang bertujuan menyatukan data sosial ekonomi dari berbagai K/L menjadi sistem terpadu yang akurat, mutakhir, dan interoperabel. DTSEN diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, efisiensi anggaran, dan kualitas kebijakan. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mendorong pelaksanaan program yang terintegrasi dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 – 6,3
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44 – 4,96
3.	Tingkat Kemiskinan	%	6,50 – 7,50
4.	PDRB per Kapita	Juta	5.870 (GNI per Kapita, US$)
5.	Rasio Gini	Nilai	0,377 – 0,380
6.	Indeks Modal Manusia	Poin	0,57
7.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	37,14
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,67

Sumber: RKP Tahun 2026

Pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan visi RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2026 pemerintah menegaskan komitmennya dalam mengarusutamakan berbagai aspek pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengarusutamaan pembangunan meliputi:

1. Integrasi Perspektif Gender dan Inklusi Sosial

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang adil dan setara dengan memberikan akses yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

2. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Dalam rangka mempercepat pencapaian SDGs, Indonesia mengadopsi pendekatan sistematis dengan mengintegrasikan 118 target dan 190 indikator SDGs ke dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RKP Tahun 2026. Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus didorong untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Aksi Daerah SDGs guna memastikan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan dapat terimplementasi secara local

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

4. Akselerasi Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, transformasi digital memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif dengan memanfaatkan data, informasi, pengetahuan, serta teknologi digital. Implementasi transformasi ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi digital yang berkontribusi pada PDB nasional yang didukung oleh SDM digital yang berkualitas, literasi digital yang memadai, regulasi yang adaptif, pendanaan yang berkelanjutan, keamanan siber yang kuat, perlindungan data pribadi, serta riset dan pengembangan berbasis inovasi.

5. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Pada tahun 2026, pemerintah terus menargetkan pengurangan emisi GRK dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan, efisiensi energi, serta rehabilitasi lahan dan ekosistem. Strategi ini diimplementasikan antara lain melalui penerapan pajak karbon, investasi hijau, serta pengembangan industri ramah lingkungan.

Tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2026 mengangkat tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan dan Prioritas Nasional. Prioritas Nasional, Sasaran pembangunan beserta indikatornya serta arah kebijakan dan intervensi pada RKP Tahun 2026 adalah:

1) **Prioritas Nasional 1** : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

   Sasaran: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia dengan indikator

   a. Indeks Demokrasi Indonesia
   b. Indeks Hak Asasi Manusia.

2) **Prioritas Nasional 2** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

   Sasaran:

   1. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanan pembangunan dengan indikator
      a. Asia Power Index (Military Capability),
      b. Asia Power Index (Diplomatic Influence),
      c. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya (%)
      d. Golbal Cybersecurity Index
      e. Indeks keamanan laut nasional
   2. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW nexus)
      f. Indeks Ketahanan Pangan
      g. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%)
      h. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
   3. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW nexus)
      i. Indeks ketahanan energi
      j. Porsi EBT dalam bauran energi Primer (%)

4. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, da air (FEW nexus)
   k. Indeks ketahanan air nasional
   l. Kapasitas tampungan air
   m. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan
   n. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
5. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan
   o. Posisi ekonomi syariah indonesia ditingkat global (peringkat)
   p. Indonesia Blue Economy index (IBEI)
   q. Indeks daya saing digital tingkat global (peringkat)
6. Terwujudnya transformasi ekonomi hijau
   r. Indeks ekonomi hijau
   s. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
   t. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif (%)
   u. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan (%)
   v. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati
   w. Indeks kualitas lingkungan hidup
   x. Indeks kualitas udara
   y. Indeks kualitas air
   z. Indeks kualitas lahan
   aa. Indeks kualitas air laut

3) Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Sasaran

1. Terwujudnya pemgembangan infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator
   a. Stok infrastruktur terhadap PDB (%)
2. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB dengan indikator:
   b. Total aset sektor keuangan /PDB (%)
   c. Aset perbankan/PDB (%)
   d. Aset dana pensiun/PDB (%)
   e. Aset asuransi/PDB (%)

f. Kapitalisasi pasr modal/PDB (%)
g. Total kredit/PDB (%)
h. Inklusi keuangan (%)

3. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dengan indikator:
   i. Proporsi penciptaan lapangan kerja fromal (%)
   j. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)
   k. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)
   l. Rasio kewirausahaan (%)
4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dengan indikator:
   m. Rasio PDB pariwisata (%)
   n. Devisa pariwisata (Miliar USD)
5. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif dengan indikator :
   o. Proporsi PDB ekonomi kreatif.

4) Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generesi Z) dan penyandang disabilitas

Sasaran:

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata dengan indikator:
   a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun(tahun)
   b. Harapan lama sekolah (tahun)
   c. Rata rata nilai PISA (membaca, matematika, dan sains)
   d. Rata rata nilai assesmen tingkat nasional (literasi membaca dan numerasi)
   e. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (%)
   f. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi
   g. Persentase pekerja lulusan pendidikan menenga dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
2. Terwujudnya kesehatan untuk semua dengan indikator:
   h. Usia harapan hidup (UHH) (tahun)
   i. Angka kelahiran total (total fertility rate (rata-rata kelahiran perwanita usia subur 15-49 tahun)
   j. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
   k. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
   l. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

m. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

3. Keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarkat inklusif
   n. Indeks pembangunan kualitas keluarga
   o. Indeks perlindungan anak
   p. Indeks pembangunan pemuda
   q. Indeks ketimpangan gender
   r. Indeks pembangunan gender
   s. Mobilitas penduduk lanjut usia (%)
   t. Mobilitas penduduk penyandang disabilitas (%)
4. Menguatnya iptek, inovasi dan produktifitas tenaga kerja
   u. Peringkat indeks inovasi global
   v. Tingkat pengangguran terbuka (%)
   w. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)
   x. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan)(%)
5. Meningkatnya prestas olahraga indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat
   y. Peringkat pada Asian Games
   z. Peringkat pada Asian Para Games
   aa. Peringkat pada asian para games
   bb. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga.

5) Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Sasaran:

1. Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan dengan indikator
   a. Rasio PDB industri pengolahan (%)
2. Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, dengan indikator:
   b. Biaya logistik (%PDB)
   c. Pembentukan modal tetap bruto (%PDB)
   d. Ekspor barang dan jasa (%PDB)

6) Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,

Sasaran :

1. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dengan indikator:
   a. Tingkat kemiskinan (%)
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem (%)
   c. Proporsdi penduduk kelas menengah (%)
   d. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
   e. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formasl (%)
2. Meningkatkan akses hunian llayak, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan indikator:
   f. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
3. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan indikator
   g. Persentasi desa mandiri (%)
4. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan indikator
   h. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)
   i. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan tehradap nasional (%)

7) Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan,

Sasaran :

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dab tidak memihak serta sistem politik yang fungsional, dengan indikator:
   a. Indeks pembangunan hukum
   b. Indeks persepsi korupsi
   c. Indeks integritas partai politik
2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, dengan indikator:
   d. Indeks reformasi birokrasi nasional
   e. Indeks pelayanan dan perlindungan WNI diluar negeri
3. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan indikator:
   f. Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika
4. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkann kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dengan indikator
   g. Return on Asset (ROA) BUMN (%)

5. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan seumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dengan indikator:
   h. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%)
   i. Rasio perpajakan terhadap PDB (%)
6. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator:
   j. Tingkat inflasi

8) Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan tolerasi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,

Sasaran:

1. Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju
   a. Indeks pembangunan masyarakat (IPMas)
   b. Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
   c. Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)
2. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan indikator:
   d. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2026. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya, yaitu meliputi:

Tabel 4.3 Kegiatan Prioritas Utama Nasional

PRIORITAS NASIONAL		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	
1	Prioritas Nasional 1	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
2	Prioritas Nasional 2	2	Transformasi tata kelola industry pertahanandan penerapan skema *spend to invest*
		3	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
		4	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung

			pangan Sumatra Selatan
		5	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
		6	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
		7	Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)
		8	Pembangunan pangan hewani
		9	Pembangunan pangan lokal dan nabati
		10	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
		11	Peningkatan penyediaan energi
		12	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi
		13	Penguatan implementasi transisi energy berkeadilan
		14	Konservasi sumberdaya air
		15	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
		16	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
		17	Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa
		18	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
		19	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lain
		20	Pengelolaan susut dan sisa pangan
		21	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
		22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
		23	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
		24	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
		25	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
		26	Pengembangan industry garam dan produk olahan hasil laut
3	Prioritas Nasional 3	27	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
		28	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
		29	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
		30	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena
		31	Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba
		32	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo
		33	Penguatan ekosistem aplikasi dan Game
		34	Pengembangan koperasi sector produksi
4	Prioritas Nasional 4	35	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
		36	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
		37	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
		38	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
		39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in- *service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
		40	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
		41	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
		42	Penurunan kematian ibu dan anak

		43	Pencegahan dan penurunan stunting
		44	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
		45	Penuntasan TBC
		46	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
		47	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
		48	Eliminasi penyakit kusta dan *Schistosomiasis*
		49	Investasi pelayanan kesehatan primer
		50	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pel. kesehata bergerak dan daerah sulit akses
		51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
		52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya
		53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
		54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
5	Prioritas Nasional 5	55	Pengembangan hilirisasi Nikel
		56	Pengembangan hilirisasi Tembaga
		57	Pengembangan hilirisasi Bauksit
		58	Pengembangan hilirisasi Timah
		59	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
		60	Pengembangan hilirisasi Kelapa
		61	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
		62	Pengembangan hilirisasi Kimia
		63	Pengembangan industri semikonduktor
		64	Pengembangan industry tekstil dan produk tekstil
		65	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja
		66	Pengembangan industri dirgantara
		67	Pengembangan KEK Sei Mangkei
		68	Pengembangan KIT Batang
		69	Pengembangan KI Weda bay
6	Prioritas Nasional 6	70	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
		71	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
		72	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
		73	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
		74	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
		75	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
7	Prioritas Nasional 7	76	Pencegahan tindak pidana korupsi
		77	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja ASN
		78	Transformasi digitallayanan public prioritas
		79	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
		80	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
8	Prioritas Nasional 8	81	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
		82	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
		83	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

Sumber: RKP Tahun 2026

Tujuan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 konsisten dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu mengurangi ketimpangan pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Sesuai dengan arah RPJMN Tahun 2025-2029 untuk penguatan fondasi transformasi, maka fokus pembangunan kewilayahan pada tahun 2026 adalah:

a. Penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah, melalui penuntasan rencana tata ruang, perluasan pendaftaran dan sertifikasi tanah, penataan otonomi daerah, penyediaan data dan informasi geospasial dasar, dan penguatan fondasi keuangan daerah
b. Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi, melalui Peningkatan kemandirian perdesaan, Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang, Pembangunan kawasan perbatasan, Pengelolaan urbanisasi dan perkotaan, Pengembangan pusat pertumbuhan baru, Penuntasan dan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersifat kawasan
c. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana, melalui Pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, layanan peringatan dini dan resiliensi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.

Pembangunan kewilayahan dilaksanakan melalui berbagai strategi untuk mempercepat pemerataan antarwilayah, di antaranya (i) strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara merata; (ii) strategi afirmatif pembangunan daerah-daerah tertinggal dan perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan; (iii) strategi konservasi untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; serta (iv) strategi penguatan konektivitas infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Pelaksanaan program pembangunan kweilayahan tersebut akan dijabarkan dalam highlight intervensi pembangunan wilayah di masing-masing provinsi, khusus Jawa Barat dimana Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu bagiannya, Highlight Intervensi Pembangunan Wilayah Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.4 Highlight Intervensi Pembangunan Wilayah Jawa Barat

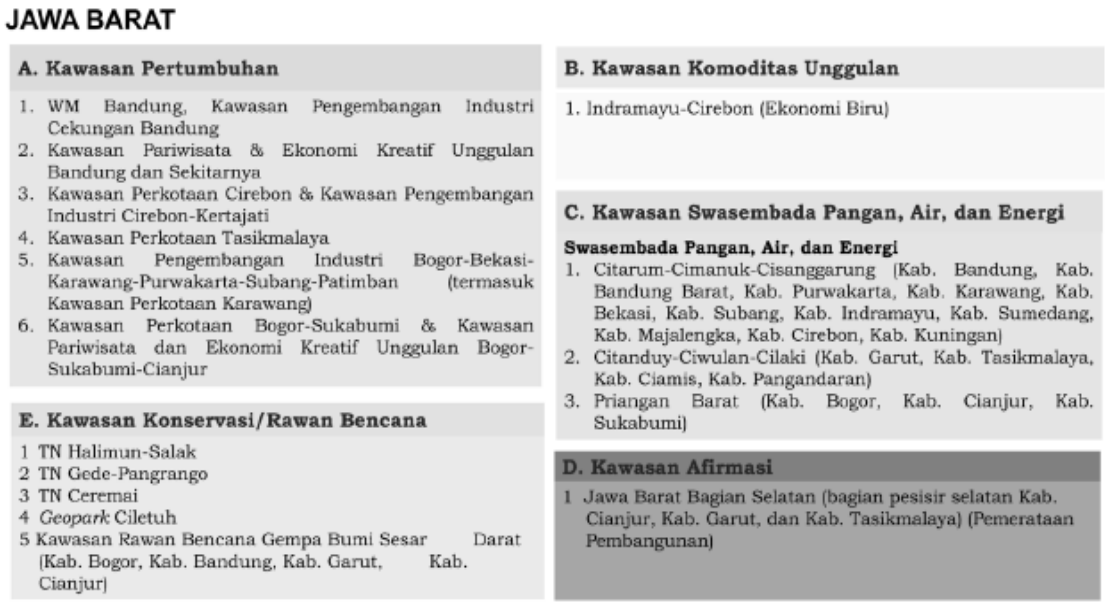

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang RKP Tahun 2026

4.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode tahun 2025-2029, yaitu **"JAWA BARAT ISTIMEWA, Lembur Diurus, Kota Ditata"**. Visi ini diterjemahkan kedalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi Jawa Barat Istimewa, yaitu:

1. Misi Kesatu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.
2. Misi Kedua: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif
3. Misi Ketiga Yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
4. Misi Keempat: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Adapun tujuan dan sasaran pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;
3. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
4. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;
5. Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.

Tujuan 2.1

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;
3. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa;
4. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif.

Tujuan 2.2

Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja;
2. Meningkatnya Kualifikasi, kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
3. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, Serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan;

2. Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;
3. Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat

Tujuan 4.1

Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan;
2. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.

Tujuan 4.2

Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan pelaksanaan atau penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, yaitu "Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola", maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah: **"Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar"**. Tema tersebut memiliki makna bahwa aksesibilitas layanan dasar perlu merata. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ditandai dengan fokus pembangunan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dimulai dari layanan dasar melalui peningkatan intensitas dan cakupan, baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya pada daerah-daerah yang belum merata namun memiliki nilai strategis yang tinggi.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan, Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk tahun 2026.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan). Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. **Prioritas 2**, yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif;
3. **Prioritas 3**, yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4. **Prioritas 4**, yaitu Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Program Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 didasarkan pada agenda pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun pada periode RPJMD Tahun 2025-2029. Program prioritas daerah ditetapkan dengan mengacu pada hasil penjabaran strategi sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan kebijakan (visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan) pada RPJMD Tahun 2025-2029. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 diimplementasikan melalui program prioritas Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1) Program Prioritas 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul

1. Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan;
2. Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional;
3. Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup;
4. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama;
5. Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi
7. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat

2) **Program Prioritas 2**: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif
   8. Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
   9. Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
   10. Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
   11. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan;
   12. Program Peningkatan dan pemerataan investasi;
   13. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah;
   14. Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD;
   15. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan.
   16. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan

3) **Program Prioritas 3**: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin Dan Kaya
   17. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
   18. Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan;
   19. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim;
   20. Program Pengurangan Risiko Bencana;
   21. Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)

4) **Program Prioritas 4**: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good And Clean Governance
   22. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah;
   23. Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan;

24. Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk Sembilan Langkah Membangun Jabar (9 Lengkah Ngawangun Jabar) sebagai berikut:

1. **Lengkah Kahiji**

   Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan).

2. **Lengkah Kadua**

   Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya

3. **Lengkah Katilu**

   Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat

4. **Lengkah Kaopat**

   Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan.

5. **Lengkah Kalima**

   Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.

6. Lengkah Kagenep

Penanganan stunting dan gizi burukdengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan

7. Lengkah Katujuh

Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan

8. Lengkah Kadalapan

Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).

9. Lengkah Kasalapan

Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak

Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 beserta targetnya merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15 – 6,20
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,31 - 6,66
3.	Tingkat Kemiskinan	%	5,51 - 6,02
4.	PDRB per Kapita	Juta	63,65 – 66,00
5.	Kontribusi PDRB Provinsi Jawa Barat	%	12,8
6.	Rasio Gini	Nilai	0,381 – 0,420
7.	Indeks Modal Manusia	Poin	0,58
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	6,97
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	64,31

Sumber: RKPD Prov. Jabar 2026

Dalam konteks pengembangan wilayah di Jawa barat, pada dasarnya arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di lingkup Provinsi Jawa Barat masih menggunakan pendekatan pengembangan kewilayahan berbasis Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042. RTRW Provinsi Jawa Barat membagi 27 kota/kabupaten ke dalam 6 (enam) WP dimana Kabupaten Bandung Barat termasuk pada WP Cekungan Bandung. Adapun kebijakan pembangunan untuk WP Cekungan Bandung yang harus diwujudkan dalam periode tahun 2022-2042 (termasuk pada tahun 2026 ini) diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.5 Wilayah Pengembangan (WP) Cekungan Bandung

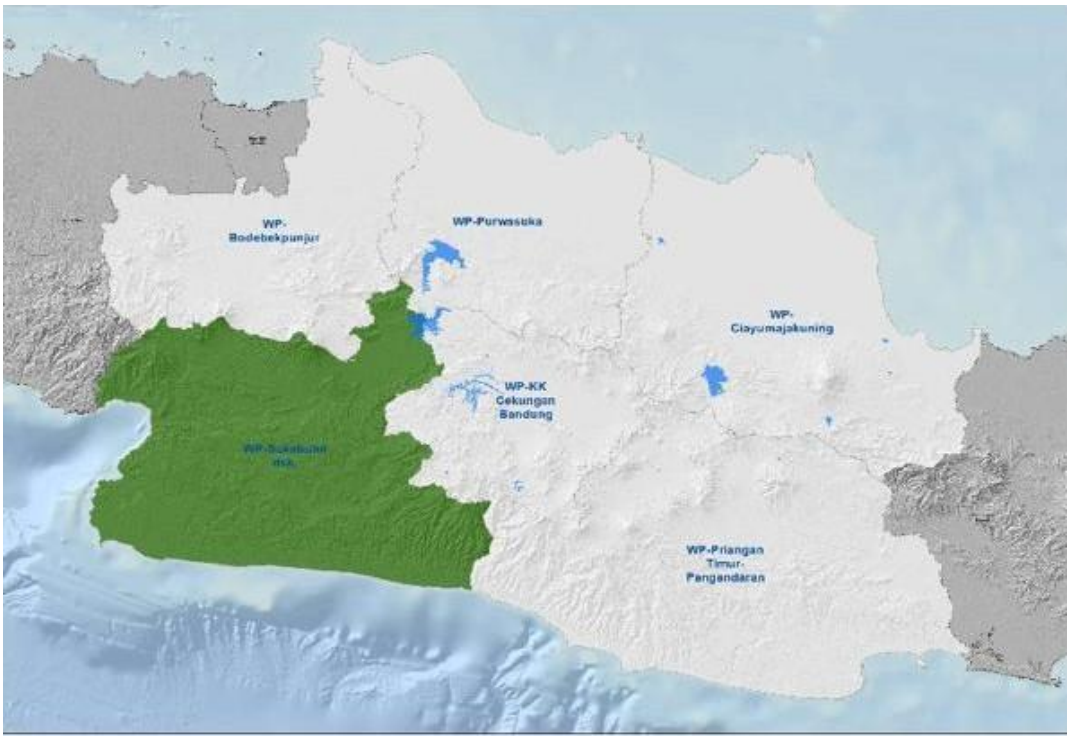

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Wilayah Pengembangan (WP) Cekungan Bandung Lingkup Wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, **Kabupaten Bandung Barat**, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.

Tema Pengembangan: Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

Arah Pengembangan:

1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL.
2. Mengendalikan pengembangan kegiatan di Kawasan perkotaan.

3. Mengembangkan Kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung Kawasan.
4. Mengembangkan Pembangunan dan hunian vertikal.

Fokus Pengembangan:

Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi;

Sektor Unggulan:

Pertanian horti-kultura, perikanan, agroforestri, industri non-polutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas Kab./ Kota yang se-cara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya

Prioritas Pembangunan dalam RPJMD

Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.

Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.

Indikasi Program RTRW

a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
e. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya:
   - Kawasan ekosistem esensial.
f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian:
   - Pengembangan kawasan tanaman pangan.
   - Pengembangan kawasan hortikultura.

- Perwujudan Kawasan Pertanian (P): Pengembangan kawasan tanaman pangan; Pengembangan kawasan hortikultura; Pengembangan Potensi Lahan Kering; Pengembangan kawasan perkebunan.
- Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan
- Pengembangan Agro Techno Park dan Science Technopark.
- Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian

g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU):
- Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU).
- Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman.

h. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):
- Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi.
- Modernisasi irigasi.
- Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir.
- Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ.
- Penataan dan revitalisasi situ.

i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:
- Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.
- Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota).

j. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional:
- Pembangunan TPPAS Regional.
- Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA).
- Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional.
- Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota.
- Pengembangan TPST atau TPA Lokal.
- Pembangunan dan Pengembangan TPA.
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).
- Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R).
- Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.

k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:
   - Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/ kota.
   - Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri.
   - Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.

l. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan:
   - Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah.
   - Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
   - Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
   - Pengembangan Gardu Listrik.

m. Program Pengelolaan Energi Terbarukan:
   - Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan.
   - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
   - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).
   - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
   - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
   - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
   - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
   - Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

n. Program Pengembangan Perumahan:
   - Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
   - Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.

o. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

p. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

q. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

r. Program Penyelenggaraan Jalan:
   - Pembangunan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
   - Pembangunan Jalan Kolektor.
   - Pembangunan/peningkatan jalur jalan poros.
   - Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang.
   - Rencana Pembangunan jalan tol baru.
   - Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer.

- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2).
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3).
- Pemeliharaan jalan tol.

s. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ):
- Pengembangan sistem angkutan umum massal.
- Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum.

t. Program Penyelenggaraan Perkeretaapian:
- Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting antar kota.
- Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting perkotaan.
- Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api perkotaan.
- Pengembangan Stasiun Kereta Api.
- Pengembangan Stasiun Commuter Line.
- Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel.
- Pengembangan Stasiun Kereta Api berbasis Transit Oriented Development (TOD).

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Tujuan pembangunan merupakan bentuk penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah, sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih operasional untuk mengetahui keberhasilan dalam tujuan yang bermuara pada keberhasilan masing-masing misi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029.

Keadaan/kondisi Kabupaten Bandung Barat yang ingin diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Visi RPJMD Kabupaten Barat 2025– 2029 merupakan arah pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang dengan kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi terkini dan tantangan pembangunan ke depan dalam mendukung dan mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dengan memperhatikan pemikiran di atas, maka Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat 2025 – 2029 adalah : **BANDUNG BARAT AMANAH" (Agamis Maju Adaptif Nyaman Aspiratif Harmonis)** yang mengandung makna bahwa sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui

pemanfaatan sumber daya alam dan keterlibatan selutuh potensi sumber daya manusia yang dapat mengemban kepercayaan masyarakat, makna dan pokok-pokok visi AMANAH dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Visi		Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"A M A N A H"	**AGAMIS**	Nilai Religius	**AGAMIS** mengandung makna bahwa nilai-nilai religius menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Agamis juga berarti mengedepankan prinsip-prinsip agama dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang baik
	MAJU	Pengembangan Ekonomi	**MAJU** mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat Bandung Barat yang unggul, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan berbasis potensi lokal guna mendongkrak kesejahteraan seluruh masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan Bandung Barat di kawasan Bandung Raya dan Jawa Barat
	ADAPTIF	Tata Kelola Pemerintahan	**ADAPTIF** mengandung makna pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Visi Adaftif dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan merespons perubahan secara cepat, mengurangi prosedur yang berbelit, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
	NYAMAN	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	**NYAMAN** mengandung makna bahwa pembangunan di Bandung Barat dengan segala potensinya diarahkan dalam rangka mempercepat dan pemerataan Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Visi		Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
			hidup serta kondisi geografis yang rawan terhadap bencana serta tidak merusak lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
	ASPIRATIF	Pembangunan Sumber Daya Manusia	**ASPIRATIF** mengandung makna potensi penduduk Bandung Barat sebagai modal dasar pembangunan diarahkan dalam rangka meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pondasi yang kuat bagi generasi mendatang dengan memperhatikan nilai inklusif bagi seluruh masyarakat.
	HARMONIS	Kondisi Harmonis di Masyarakat dan Kearifan Budaya Lokal	**HARMONIS** berarti masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras berlandaskan kearifan budaya lokal serta membangun kondisi harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat

Sumber: Ranwal RPJMD Kab. Bandung Barat 2025-2029

Untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Visi diterjemahkan kedalam 6 (enam) Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 – 2029 yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rumusan Kerangka Penjabaran Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Misi		Penjelasan Misi	Langkah Penjabaran
1	Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter	Misi isi disusun dalam rangka mewujudkan mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang berakhlak, cerdas dan sehat didasari nilai-nilai religius dengan melibatkan peran keluarga serta penguatan Peran Perempuan dan Pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan
			Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)
			Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
			Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan
2	Meningkatkan Produktifitas	Misi ini bertujuan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan,

Misi		Penjelasan Misi	Langkah Penjabaran
	dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah	produktifitas ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berdaya saing dan berhasil guna dengan tidak merusak lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah
			Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan sosial
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Misi ini disusun untuk mewujudkan sistem birokrasi yang lebih sederhana dan mudah diakses, serta digitalisasi layanan publik untuk mempercepat proses perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang ketat guna terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.	Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
			Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan
			Meningkatkan Profesionalisme ASN
			Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan berbasis teknologi dan informasi
4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah	Misi ini disusun untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur dan konektifitas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
			Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah
5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	Misi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana, perubahan Iklim serta ketahanan air dan kemandirian pangan	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat
			Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
			Ketahanan Daerah terhadap bencana, perubahan iklim dan kemandirian pangan
6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan	Misi ini disusun untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang	Meningkatkan kondusivitas wilayah
			Meningkatkan Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa
			Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa
			Meningkatkan Pelestarian dan

Misi	Penjelasan Misi	Langkah Penjabaran
Budaya Lokal	harmonis serta penguatan pembangunan desa berbasis kearifan budaya lokal	Pemajuan Kebudayaan

Sumber: Ranwal RPJMD Kab. Bandung Barat 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025- 2029 terdiri dari 8 (delapan) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak, dengan sasaran:
   1) Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak
   2) Kesehatan yang berkualitas untuk semua
   3) Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
2. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas, dengan sasaran:
   4) Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran:
   5) Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi
   6) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
   7) Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja
4. Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:
   8) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif
   9) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital
   10) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah, dengan sasaran:
   11) Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman
   12) Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah

6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh, dengan sasaran:
   13) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

14) Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan

7. Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah, dengan sasaran:

15) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan

8. Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal, dengan sasaran:

16) Meningkatnya Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa

17) Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran dan indikator beserta target pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 adalah sebagia berikut:

Tabel 4.7 Tujuan, Sasaran, Indikator beserta Target Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN		SATUAN	Capaian 2024	TARGET	
							Tahun 2025	Tahun 2026
1	**I**	**Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter**						
1.1	**1**	**Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak**	**1**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**70,77**	**71,33**	**72,14**
	1	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	**Poin**	-	60	64
2		Kesehatan yang berkualitas untuk semua	2	Umur Harapan Hidup	Poin	75,06	75,28	75,25
3				Prevalensi Stunting	% SSGI	30,80	24,11	25,14
3		Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	4	Harapan Lama Sekolah	Poin	12,00	12,01	12,19
5				Rata - Rata Lama Sekolah	Poin	8,24	8,25	8,27
1.2	**2**	**Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas**	**2**	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**Poin**	**6,12**	**6,91**	**63,11**
	4	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	6	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Poin	70,15	70,60	71,00
			7	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	-	43,85	44,20
2	**II**	**Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah**						
2.1	**3**	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	**3**	**PDRB per Kapita (ADHB)**	**Milyar**	**32,500**	**34,085**	**38,79**
			4	**Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi**	**Milyar**	**2,16**	**2,16**	**2,14**
	5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	5,07	6,05
			9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	63,85	64,05	40,70
			10	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	12.639,69	13.542,27	21,37
			11	Tingkat Inflasi	%	1,46	1,01 - 2,00	2,5 ± 1
	6	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	12	Tingkat Kemiskinan	%	10,49	9,98	9,63
			13	Rasio Gini	Poin	0,400	0,369	0,367

	7	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,70	6,58	5,88
3	**III**	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel**						
3.1	**4**	**Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan**	**5**	**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**	**Poin**	**3,72**	**3,80**	**3,92**
	8	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,77	81,58	82,41
	9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	16	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	0	1,0	1,2
	10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26	85,94	86,38
4	**IV**	**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah**						
4.1	**5**	**Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah**	**6**	**Indeks Infrastruktur**	**Poin**	**-**	**71,84**	**74,5**
	11	Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	-	43,29	44,32
	12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	19	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55	25,11	24,67
5	**V**	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan**						
5.1	**6**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh**	**7**	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	Persen	N/A	**2,63**	**2,94**
	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59	59,84
			21	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif	Ton Co2eq	N/A	116.125,67	286,294.84
	14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan	22	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62	81,32	80,68

6	**VI**	**Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal**						
6.1	**7**	**Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah**	**8**	**Indeks Harmoni**	**Poin**	N/A	6,5	6,6
	15	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan	23	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Poin	-	58,48	60,83
6.2	**8**	**Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal**	**9**	**Indeks Desa**	**Poin**	**0,8436**	**0,7585**	**0,7765**
	16	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	24	Presentase Desa Mandiri	Poin	60,60	18,79	62,42
	17	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	57,58	58,50

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaen Bandung Barat, perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029. Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

NO	TUJUAN / SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1.1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berakhlak**				
	1	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan	Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan
					Peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan
					Peningkatan kesempatan dan Kebebasan Beribadah
					Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama
	2	Kesehatan yang berkualitas untuk semua	2	Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
					Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan
					Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
					Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
					Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
					Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
					Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
					Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
	3	Pendidikan yang berkualitas dan Merata	3	Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Percepatan wajib belajar 13 tahun
					Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
					Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik
					Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar

					Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
					Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
					Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah
					Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
					Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
					Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
					Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
					Peningkatan kegemaran membaca masyarakat
1.2	**Terwujudnya keluarga yang berkualitas**				
	4	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak serta meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	4	Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Pengendalian Rata-rata Angka Kelahiran (TFR)
					Peningkatan Prevalensi kontrasepsi modern
					Peningkatan Layanan KB dan kesehatan reproduksi
					Peningkatan ketahanan keluarga
					Pemberdayaan perempuan melalui penguatan kapasitas dan kemandirian perempuan
					Peningkatan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan
					Penguatan pengarusutamaan gender
					Pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak
					Pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak
					Pemenuhan hak dan perlindungan pemuda terhadap pengaruh destruktif
					Pemberdyaan dan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
					Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan pemuda kader
					Pemberdayaan dan pengembangan pemuda pada organisasi kepemudaan dan kepramukaan
					Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
					Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
					Peningkatan SDM Keolahragaan
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

					Peningkatan Prestasi Olahraga
					Penyediaan sistem data keolahragaan terpadu
2.1	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**				
	5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	5	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan yang terintegrasi melalui modernisasi dan implementasi teknologi
					Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan
					Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi
					Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan & ekonomis
					Pengendalian kesehatan ternak
					Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
					Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)
					Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif
					Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
					Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
					Peningkatan Sarana Prasarana jaringan distribusi perdagangan
					Penguatan pengendalian inflasi daerah serta Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
					Peningkatan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat
					Pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah
					Peningkatan standar dan daya saing produk IKM

					Peningkatan koperasi aktif dan sehat
					Peningkatan kompetensi SDM pengelola koperasi
					Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
					Pembentukan dan pengembangan Koperasi desa Merah putih
					Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) serta penerapan teknologi dan kemitraan UMKM
					Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis UMKM
					Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
					Peningkatan produktivitas BUMD
	6	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	6	Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta mengurangi pengangguran	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perluasan penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
					Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran melalui pengelolaan Data masyarakat Miskin
					Pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dalam mencegah kemiskinan baru
					Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
					Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	7	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja			Meningkatkan skill dan keterampilan tenaga kerja
					Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
					Peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor potensial
3.1		**Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan**			
	8		7		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah

		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif		Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
					Penguatan kerjasama strategis antar daerah
					Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
					Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
					Center of excelent pengadaan barang jasa
					Peningkatan kualitas penganggaran dan pengawasan
					Peningkatan kualitas dan keselarasan Perencanaan pembangunan
					Sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
					Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
					Penguatan tata kelola kebijakan dan implementasi Satu Data Indonesia (SDI)
					Peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi
					Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
					Peningkatan kualitas dan pemantapan manajemen ASN
					Peningkatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
					Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
					Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah
					Pengembangan ekosistem inovasi dalam tata kelola pemerintahan
					Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif
					Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah
					Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah
					Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance
					Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
					Meningkatkan perngelolaan arsip dinamis dan arsip statis

	9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik			Pembangunan ekosistem digital melalui penguatan infrastruktur TIK, peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK, literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital
					Pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage
					Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet
					pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
					Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
					Peningkatan layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informasi
	10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
					Peningkatan layanan administasi kependudukan dan pencatatan sipil
					Peningkatan layanan dan kemudahan perijinan
					Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan
4.1	**Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah**				
	11	Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	8	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan dasar dan pelayanan Publik serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat berbasis spasial	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak
					Percepatan penyediaan infrastruktur air minum
					Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya
					Pemenuhan, penyediaan dan percepatan pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi
					Peningkatkan akses sanitasi
					Percepatan penanganan dan penataan kawasan kumuh
					Peningkatan pelayanan PSU perumahan formal
					Peningkatan layanan pemakaman umum bagi masyarakat
					Peningkatan pembangunan sistem drainase
					Pemeliharaan dan penataan bangunan gedung milik daerah
					Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah
					Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah dan RDTR
					Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C

					Penyelenggaraan penatagunaan tanah sesuai tata ruang
	12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah			Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik
					Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik
					Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal
					Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
5.1	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh**				
	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	9	Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat dan meningkatkan ketahanan daerah serta kemandirian pangan	Pengendalian dan pemantauan pencemaran udara
					Pengendalian dan pemantauan pencemaran air sungai serta buangan air limbah domestik dan industri
					Meningkatkan pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS)
					Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
					Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu
					Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
					Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri
					Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah
					Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah dan RDTR
	14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan			Peningkatan ketahanan bencana
					Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan
					Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
					Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
					Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana
					Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian serta penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
					Peningkatan diversifikasi pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

					Peningkatan Ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan
6.1	**Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah**				
	15	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	10	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
					Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
					Peningkatan penegakan Perda dan Perkada
					Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan
					Penanganan Bencana dan Penyelamatan korban bencana
					Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
					Penguatan ideologi pancasila dan karekter kebangsaan
					Penguatan peran pemerintah daerah kehidupan demokrasi yang sehat dan Penguatan integritas partai politik
6.2	**Meningkatnya Pembangunan Berbasis desa dan budaya lokal**				
	16	Meningkatnya Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa	11	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa	Penguatan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					Peningkatan pengelolaan adminsitrasi dan keuangan desa
					Peningkatan kerjasama dan penguatan kelembagaan ekonomi desa
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
					Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
					Pemberdayaan Masyarakat Desa
	17	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	12	Pemajuan Kebudayaan	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat berasaskan kepada Pancasila
					Pelestaraian Warisan Budaya Tak Benda dan cagar budaya
					Pengembangan Kesenian Tradisional
					Penguatan ideologi pancasila dan karekter kebangsaan

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pedoman bagi pelaksanaan program– program perangkat daerah untuk fokus pada penanganan yang bersifat prioritas dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

4.1.4 Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, terdiri dari 6 (enam) prioritas pembangunan, mencakup:

1) **Prioritas 1**, yaitu Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter
2) **Prioritas 2**, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah
3) **Prioritas 3**, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel
4) **Prioritas 4**, yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah
5) **Prioritas 5**, yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan
6) **Prioritas 6**, yaitu Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, fokus atau tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat pada RPJMD Tahun 2025-2029 per tahun menjadi tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Bandung Barat 2026 yaitu **"Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah"**.

Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan telah ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan cara untuk mewujudkan setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan diatas, membutuhkan program yang tepat selanjutnya disebut program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah selain dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah daerah, juga ditujukan untuk melaksanakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan 32 (tiga puluh dua) program prioritas Kepala Daerah untuk selanjutnya diterjemahkan sesuai dengan nomenklatur program menjadi 87 program prioritas, dalam rangka mendukung prioritas pembangunan tahun 2026 dengan lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1: Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter, terdiri dari 10 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 14 Program Prioritas, yaitu:

1. Peningkatan Kesejahteraan SDM Keagamaan,
2. Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan termasuk Pesantren
   dengan Program Prioritas:
   1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah
   dengan Program Prioritas:
   2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
4. Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
5. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PUSKESDES)
6. Penanganan stunting dan peningkatan gizi
   dengan Program Prioritas:
   3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7. Penempatan Tenaga Kesehatan Desa
   dengan Program Prioritas:
   5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan

dengan Program Prioritas:

6) Program Pengelolaan Pendidikan
7) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

9. Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

dengan Program Prioritas:

8) Program Pembinaan Keluarga Berencana
9) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
10) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
11) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
12) Program Pemenuhan Hak Anak

10. Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan

dengan Program Prioritas:

13) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
14) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Prioritas Daerah 2: Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah, terdiri dari 7 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 21 Program Prioritas, yaitu:

11. Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital
12. Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa

dengan Program Prioritas:

15) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
16) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
17) Program Penyuluhan Pertanian
18) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
19) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

13. Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf

dengan Program Prioritas:

20) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
21) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
22) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

23) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
24) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

14. Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah
    dengan Program Prioritas:
    25) Program Pengembangan UMKM
    26) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
15. Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat
    dengan Program Prioritas:
    27) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
    28) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
    29) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
    30) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif
    dengan Program Prioritas:
    31) Program Rehabiliasi Sosial
    32) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
    33) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
17. Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja
    dengan Program Prioritas:
    34) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
    35) Program Penempatan Tenaga Kerja

Prioritas Daerah 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel, terdiri dari 5 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 20 Program Prioritas, yaitu:

18. Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
    dengan Program Prioritas:
    36) Program Perekonomian Dan Pembangunan
    37) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
    38) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
    39) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    40) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

41) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
42) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
43) Program Penyelenggaraan Pengawasan
44) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
45) Program Pengelolaan Arsip

19. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan
dengan Program Prioritas:
46) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
20. Meningkatkan Profesionalisme ASN
dengan Program Prioritas:
47) Program Kepegawaian Daerah
48) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
21. Penguatan Pembangunan Smartcity
22. Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan
dengan Program Prioritas:
49) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
50) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
51) Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik
52) Program Pendaftaran Penduduk
53) Program Pencatatan Sipil
54) Program Pelayanan Penanaman Modal
55) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Prioritas Daerah 4: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah, terdiri dari 2 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 8 Program Prioritas, yaitu:

23. Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
24. Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan
dengan Program Prioritas:
56) Program Kawasan Permukiman
57) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

58) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
59) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
60) Program Pengembangan Permukiman
61) Program Penyelenggaraan Jalan
62) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
63) Program Pengelolaan Pelayaran

Prioritas Daerah 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan, terdiri dari 3 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 13 Program Prioritas, yaitu:

25. Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup
    dengan Program Prioritas:
    64) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    65) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
    66) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
26. Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga
    dengan Program Prioritas:
    67) Program Pengelolaan Persampahan
    68) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
27. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah
    dengan Program Prioritas:
    69) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    70) Program Penanggulangan Bencana
    71) Program Penanganan Bencana
    72) Program Pengembangan Perumahan
    73) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
    74) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    75) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
    76) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Prioritas Daerah 6: Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan

Budaya Lokal, terdiri dari 5 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 11 Program Prioritas, yaitu:

28. Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan
    dengan Program Prioritas:
    77) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    78) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
    79) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
    80) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
29. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
30. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
31. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
    dengan Program Prioritas:
    81) Program Penataan Desa
    82) Program Administrasi Pemerintahan Desa
    83) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
    84) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
    85) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
32. Pemajuan Kebudayaan, dengan Program Prioritas:
    86) Program Pengembangan Kebudayaan
    87) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tabel 4.9 Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

NO			MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
1			Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter					
1.1	1		Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak		Indeks Pembangunan Manusia			
	1		Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)			
		1.1	Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan	1	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan yang	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra Setda
		1.2	Peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan	2	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan			
		1.3	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kebebasan beribadah	3	Indeks kerukunan Umat Beragama	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
	2		Kesehatan yang berkualitas untuk semua	2	Umur Harapan Hidup			
				3	Prevalensi Stunting			
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	4	Angka kematian ibu	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				5	Angka kematian bayi			
				6	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis			
				7	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis			
				8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional			
				9	Presentase ketersediaan sapras kesehatan yang memenuhi standar			
				10	Cakupan Layanan Intervensi Balita dan Ibu Hamil bermasalah gizi			
		2.2	Meningkatnya kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan	11	Presentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		2.3	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	12	Presentase cakupan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan perijinan makanan minuman	5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	3		Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	4	Harapan Lama Sekolah			
				5	Rata - Rata Lama Sekolah			
		3.1	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	13	APS usia 5-6	6	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
				14	APS usia 7-15			
				15	APS usia 7 - 18 Kesetaraan			
		3.2	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	16	Rasio Guru/Murid PAUD	7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				17	Rasio Guru/Murid SD			
				18	Rasio Guru/Murid SMP			
1.2	2		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			
	4		Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	6	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)			
				7	Indeks Pembangunan Pemuda			
		4.1	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	19	Total Fertility Rate (TFR)	8	Program Pengendalian Penduduk	BPS/DP2KBP3A
		4.2	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	20	Indeks Kerentanan Keluarga	9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
				21	Median Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP)			
				22	Indeks Lansia Tangguh			
		4.3	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam pembangunan	23	Presentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhuk sosek	10	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
		4.4	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	24	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar	11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		4.5	Terjaminnya pemenuhan semua hak anak secara kemprehensif	25	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	12	Program Pemenuhan Hak Anak	
		4.6	Meningkatnya layanan kepemudaan dan daya saing pemuda	26	Presentase layanan kepemudaan	13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
		4.7	Meningkatnya pembangunan olahraga dan prestasi olahraga	27	Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				28	Indeks SDM Keolahragaan			
				29	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga			
				30	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi			

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME			INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME			PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
2			Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah					
2.1	3		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		PDRB per Kapita (ADHB)			
					Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi			
	5		Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	8	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
				9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah			
				10	Pembentukan Modal Tetap Bruto			
				11	Tingkat Inflasi			
		5.1	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	31	Persentase Sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
				32	Persentase peningkatan produksi peternakan			Dispernakan
		5.2	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	33	Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasana	16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
				34	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik			Dispernakan
		5.3	Meningkatnya kapasitas SDM pelaku pertanian dan peternakan	35	Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	17	Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
				36	Presentase SDM petani yang ditingkatkan kompetensinya			
				37	Presentase kelompok peternakan yang dibina			Dispernakan
		5.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	38	Presentase luas layanan irigasi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUTR
		5.5	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	39	Jumlah produksi perikanan budidaya	18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispernakan
		5.6	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	40	Jumlah produksi perikanan tangkap	19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		5.7	Meningkatnya produksi hasil olahan ikan	41	Jumlah produksi olahan ikan	20	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		5.8	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	42	Peresentase pengembangan daya tarik wisata yang siap kunjung	21	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Disparbud
		5.9	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	43	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi	22	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		5.10	Meningkatnya produktivitas koperasi	44	Presentase koperasi yang berkualitas	23	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop UKM
		5.11	Meningkatnya kapasitas UMKM	45	Pertumbuhan Wirausaha	24	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
		5.12	Meningkatnya daya saing UMKM	46	Presentase pengembangan UMKM	25	Program Pengembangan UMKM	
		5.13	Meningkatnya potensi investasi daerah / Meningkatnya investasi	47	Persentase Peningkatan Dokumen Investasi yang Siap ditawarkan kepada Investor	26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		5.14	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegrasi	48	Presentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag
		5.15	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	49	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		5.16	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	50	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	29	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		5.17	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	51	Presentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	30	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag
		5.18	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	52	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag. Perekonomian
	6		Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	12	Tingkat Kemiskinan			
				13	Rasio Gini			
		6.1	Meningkatnya rehabilitasi sosial	53	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	31	Program Rehabiliasi Sosial	Dinsos
		6.2	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	54	Presentase penerima manfaat (individu/keluarga miskin) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				55	Presentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindugan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan			
				56	Presentase pengelolaan data kemiskinan daerah			
		6.3	Meningkatnya pencegahan terhadap berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	57	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	33	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim
	7		Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
		7.1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	58	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	34	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		7.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	59	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	35	Program Penempatan Tenaga Kerja	

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME			INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS		PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
3			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel					
3.1	4		Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)			
	8		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	15	Indeks Reformasi Birokrasi			
		8.1	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	60	Persentase produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Hukum Setda
		8.2	Meningkatnya kerja sama strategis Regional yang ditindaklanjuti	61	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti			Bag. Tapem Setda
				62	Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan			
		8.3	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	63	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	36	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag. Pemb. Setda
		8.4	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	64	Tingkat kematangan UKPBJ			Bag ULP Setda
		8.5	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Perpu	65	Presentase pembentukan Ranperda Tahun n	37	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				66	Ketepatan penetapan perda APBD Tahun n			
		8.6	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	67	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			
				68	Persentase peningkatan kapasitas DPRD			
		8.7	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	69	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	38	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				70	Presentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan			
		8.8	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang PPM, Ik dan PSDA	71	Persentase Capaian program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	39	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				72	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
				73	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA			
		8.9	Meningkatnya pamanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi dalam perencanaan	74	Indeks inovasi daerah	40	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
		8.10	Meningkatnya tata kelola anggaran	75	Presentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	41	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
				76	Presentase alokasi belanja infrasturktur pelayanan publik			
		8.11	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	77	Presentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar			
				78	Presentase penurunan silva			
		8.12	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan	79	Presentase laporan keuangan tepat waktu			
		8.13	Meningkatnya tata kelola aset daerah	80	Presentase penambahan nilai aset tetap	42	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		8.14	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	81	Persentase Peningkatan Pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah	43	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
		8.15	Meningkatnya kualitas layanan adm. Kepegawaian	82	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	44	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		8.16	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	83	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi			
		8.17	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	84	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin			
		8.18	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	85	Nilai Aspek Pengembangan Karir	45	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		8.19	Menurunnya kejadian penyelewengan/penyimpangan baik yang bersipat anggaran atau proses dan kewenangan	86	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	46	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		8.20	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	87	Nilai Peningkatan Kapabilitas APIP	47	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
				88	Nilai Survey Penilaian Integritas			
		8.21	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	89	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	48	Program Pengelolaan Arsip	Disarpus
				90	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	9		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	16	Indeks Pemerintahan Digital			
		9.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menunjang transformasi digital	91	Nilai Strategi dan Rencana Pemdigi	49	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfotik
				92	Nilai Teknologi Digital			
		9.2	Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral dalam rangka mendukung penyelenggaraan SDI	93	Nilai implementasi prinsip Satu Data Indonesia	50	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				94	Nilai Kualitas Data staitsik			
				95	Nilai Proses Bisnis statistik			
	10		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	Indeks Kepuasan Masyarakat			
		10.1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemda	96	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemda	51	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfotik
		10.2	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	97	Presentase kepemilikan identitas kependudukan digital	52	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
				98	Presentase kepemilikan kartu identitas anak			
		10.3	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	99	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	53	Program Pencatatan Sipil	
				100	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
				101	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
				102	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
		10.4	Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan	103	Persentase Waktu Proses Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	54	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		10.5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	104	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16 Kecamatan

NO			MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
4			Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah					
4.1	5		Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah		Indeks Infrastruktur			
	11		Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak			
		11.1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	105	Presentase luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani	56	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		11.2	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	106	Presentase peningkatan PSU perumahan formal yang sudah serah terima	57	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
		11.3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	107	Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum	58	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR
		11.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	108	Presentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		11.5	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	109	Presentase cakupan drainase dalam kondisi baik	60	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
		11.6	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	110	Presentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	61	Program Pengembangan Permukiman	
	12		Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	19	Indeks Kesulitan Geografis			
		12.1	Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	111	Persentase jalan dalam kondisi baik	62	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
		12.2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	112	Konektifitas transportasi darat	63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		12.3	Meningkatnya kualitas layanan transportasi pelayaran	113	konektifitas transportasi pelayaran	64	Program Pengelolaan Pelayaran	
5			Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan					
5.1	6		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh		Penurunan Intensitas Emisi GRK			
	13		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
				21	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif			
		13.1	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	114	Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat	65	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		13.2	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3	115	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3	66	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	
		13.3	Meningkatnya tata kelola persampahan	116	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	67	Program Pengelolaan Persampahan	
				117	Presentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			
		13.4	Meningkatnya penyediaan sarpras persampahan	118	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana persampahan	68	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUTR
	14		Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan	22	Indeks Resiko Bencana			
		14.1	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	119	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	69	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		14.2	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	120	Presentase penanganan tanggap darurat bencana			
		14.3	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	121	Presentase penanganan pasca bencana			
		14.4	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	122	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	70	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		14.5	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga korban bencana	123	Presentase penanganan rumah korban bencana	71	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan
		14.6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	124	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	72	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
		14.7	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap ketahanan air dan banjir	125	Kapasitas Air Baku	73	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
				126	Presentase perlindungan rawan banjir			
		14.8	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	127	Presentase penanganan bencana pertanian	74	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
				128	Presentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian			
				129	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak			Dispernakan
		14.9	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian	130	Presentase sarpras pangan yang terbangun	75	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPP
		14.10	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	131	Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)	76	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				132	Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)			

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME			INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS		PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
6			Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
6.1	7		Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah		Indeks Harmoni			
	15		Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan	23	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
		15.1	Meningkatnya penanganan ganguan ketentraman dan ketertiban umum	133	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	77	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		15.2	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	134	Persentase Cakupan perlindungan masyarakat			
		15.3	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	135	Presentase penegakan perda dan perkada			
				136	Persentase PPNS yang telah mengikuti peningkatan kapasitas			
		15.4	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran	137	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	78	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Disdamkar & Penyelamatan
		15.5	Meningkatnya kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana	138	Presentase penanggulangan bencana		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		15.6	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	139	Presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	79	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
		15.7	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	140	Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
		15.8	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	141	Presentase konflik sosial yang diselesaikan	80	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
6.2	8		Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal		Indeks Desa			
	16		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	24	Presentase Desa Mandiri			
		16.1	Meningkatnya kualitas penataan desa	142	Presentase fasilitasi penataan desa	81	Program Penataan Desa	DPMD
		16.2	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengasawan pemerintahan desa	143	Presentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	82	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				144	Presentase fasilitasi tata kelola desa			
		16.3	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	145	Presentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakat desa	83	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum	
		16.4	Meningkatnya lembaga kemasyarakatn yang aktif dalam pembangunan	146	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16 Kecamatan
		16.5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	147	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	85	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	17		Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	25	Indeks Pembangunan Kebudayaan			
		17.1	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	148	Presentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	86	Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
		17.2	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	149	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	87	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Selanjutnya dalam rangka untuk mendukung 32 program prioritas pembangunan disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk **"12 (dua belas) Amanah Ngawangun Bandung Barat"** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Amanah Kahiji

yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan, dilaksanakan melalui: Pemberian insentif guru ngaji dan ustadz; Pemberian insentif Marbot Masjid dan pengelola tempat ibadah; Pendataan, pelatihan, dan sertifikasi bagi pengajar, guru ngaji dan marbot; Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi sarana keagamaan; Peningkatan nilai hibah kelembagaan keagamaan; Pendampingan dan tata kelola manajemen sarana peribadatan; Renovasi sarana peribadatan; Digitalisasi layanan peribadatan; Peningkatan moderasi dalam beragama; Pendidikan karakter dengan pemusatan pendidikan masing-masing pemeluk agama di usia sekolah; Pendidikan karakter melalui penguatan keagamaan di sekolah dasar dan Kehadiran pejabat pemerintah daerah dalam acara keagamaan.

2. Amanah Kadua

yaitu eningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting), dilaksanakan melalui: Membentuk Satuan Gugus Tugas Kesehatan sampai tingkat desa; Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan puskesmas; Penguatan kapasitas pos kesehatan desa; Pengadaan ambulance desa; Pemberian pelayanan kesehatan yang cepat dan ramah; Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan obat – obatan; Peningkatan pelayanan kesehatan melalui mobil kesehatan ke setiap desa; Peningkatan peran puskesmas pembantu terintegrasi di setiap desa; Akses pelayanan kesehatan gratis; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan rumah sakit daerah; Meningkatkan peran puskesmas pembantu di desa dalam pelayanan kesehatan; Meningkatkan peran posyandu dalam pemberian gizi ibu hamil dan anak balita; Meningkatkan kualitas kesehatan di sekolah-sekolah melalui peran puskesmas pembantu; Penambahan fasilitas Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan); SATU NAFAS DESA (Satu Nakes dan Satu Faskes di setiap Desa); Peningkatan kapasitas kader posyandu; Pemberian makan siang bergizi bagi siswa pendidikan dasar; Pemberian bantuan pangan, sandang dan papan dan Pemberian susu dan telur gratis bagi ibu menyusui dan balita.

3. Amanah Katilu

yaitu Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dilaksanakan melalui: Program PARENTING (Pemberian edukasi wajib belajar terhadap orang tua bahwa wajib belajar itu penting); Bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah desa dan sektor swasta mengembangkan pusat-pusat belajar masyarakat di desa; Pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan bansos bagi siswa tidak mampu; Memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pendidik; Penguatan wajib belajar melalui bantuan penyetaraan pendidikan, pemberantasan buta huruf dan pemberantasan putus sekolah; Pemberian bantuan jaringan internet gratis bagi seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah; Membangun sekolah-sekolah baru dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi; Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai bagi masyarakat; dan Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan sekolah - sekolah desa.

4. Amanah Kaopat

yaitu Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan, dilaksanakan melalui: Peningkatan pembangunan sarana olahraga; Pekan olahraga antar sekolah SD dan SMP; Pekan olahraga antar kecamatan; Tata kelola sarana olah raga yang baik; Pembinaan kelembagaan pemuda; Pelatihan dasar kepemimpinan; Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda; Memberikan advokasi pertanian terhadap pemuda; Penguatan advokasi kepada calon pengantin; Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan; Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak; Penguatan dan pengembangan kelembagaan perempuan dan anak; Pemberdayaan peranan perempuan di bidang ekonomi;

5. Amanah Kalima

yaitu Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah, dilaksanakan melalui: Mendorong kebijakan pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif; Fasilitasi hasil produk UMKM; Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM dan akses modal UMKM; Program One Village One Product; Fasilitasi jejaring dan bantuan permodalan bagi UMKM; Pemberian bantuan pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); Mendorong investasi dan pengembangan pariwisata berbasis desa; Mendorong investasi tempat wisata baru; Fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif masyarakat; Pemberian penyuluhan, pembinaan & pelatihan bagi remaja dlm bid. digital & Ekraf; Pembangunan gedung creative centre untuk kreativitas milenial; Job Fair / Bandung

Barat Job Fair; Pembangunan sumber air pertanian (sal. irigasi, pompanisasi, sumur bor dan kantung air); Pembangunan jalan pertanian dan optimalisasi lahan pertanian; Pemberian kebutuhan benih yang berkualitas; Bantuan sarana dan prasarana pertanian; Pengembangan peternak melalui bantuan bibit dan pakan ternak; Fasilitasi pengolahan hasil pertanian; Mendorong pembangunan pertanian terintegrasi; Fasilitasi insentif modal usaha pertanian, peternakan dan perikanan; Pelayanan kesehatan ternak; Diversifikasi/klusterisasi sistem pertanian; Menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan; Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan; Pemberian Bibit Kepada Para Petani Dengan Kualitas Yang Unggul; Subsidi bebas PBB bagi lahan sawah yang dilindungi; Pembentukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; Modernisasi pengolahan lahan pertanian; Pembangunan sentra-sentra pemasaran produk unggulan; Revitalisasi teknik tradisional, penggunaan bahan baku lokal, atau penemuan produk baru yang terinspirasi oleh budaya dan alam local; Pemetaan potensi sentra ekonomi; Pemberian akses permodalan bagi pelaku usaha di sentra produk local; dan Peningkatan kualitas produk unggulan desa; Fasilitasi hasil produk local.

6. Amanah Kagenep

yaitu Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan social, dilaksanakan melalui: Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin; Validasi data penduduk miskin; Pemberian bantuan pangan, sandang dan papan; Pelatihan wirausaha bagi para penyandang disabilitas; Renovasi rumah untuk lansia penyandang disabilitas; Mendirikan rumah kreatif untuk penyandang disabilitas; Pelatihan keterampilan kerja bagi para penyandang disabilitas; Mewujudkan pembangunan fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas dan Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

7. Amanah Katujuh

yaitu Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi, dilaksanakan melalui: Penguatan dan hilirisasi inovasi daerah melalui Bandung Barat Innovation Week; Menyediakan layanan pengaduan terintegrasi; Menjamin keterbukaan informasi secara digital; Penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi; Pengelolaan keuangan desa secara non tunai dan dipadukan dengan siskeudes secara online; Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah; Penguatan Satu Data Indonesia (SDI); Memperkuat pemberian insentif pajak; Integrasi sistem pemungutan pajak; Menciptakan sistem pengembangan kompetensi ASN melalui Government University; Menjamin pelaksanaan sistem merit di lingkungan ASN; Penghargaan ASN Berprestasi; Penghargaan ASN of The Month; Program FIFO (first in first out) pada pelayanan

public; Membangun Mall Pelayanan Publik Digital; Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Penyederhanaan SOP pelayanan public; Mengembangkan pelayanan jemput bola keliling (mobile); Membangun infrastruktur ICT pelayanan yang terintegrasi secara menyeluruh; Penguatan dimensi smart governance; penguatan dimensi smart branding; Penguatan dimensi smart economy; Penguatan dimensi smart society; Penguatan dimensi smart living; dan Penguatan dimensi smart environtment

8. Amanah Kadalapan

yaitu Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat, dilaksanakan melalui: Penambahan dan perbaikan akses jalan desa; Perbaikan jalan akses pariwisata; Peningkatan pembangunan listrik desa, dan jaringan internet desa; Mempercepat penataan kawasan kumuh; Pembangunan sarana air bersih, melalui pipanisasi air bersih; Penertiban tata ruang wilayah; Mendukung infrastruktur Program BRT (Bus Rapid Transit) Bandung Raya; Penataan pemakaman yang sudah teridentifikasi wakaf; Pembentukan Satuan Pengelola Pemakaman Tingkat Desa; Penyediaan air bersih untuk masyarakat desa; Penyediaan air minum untuk masyarakat desa dan Penyediaan MCK umum bagi masyarakat desa tidak mampu.

9. Amanah Kasalapan

yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah, dilaksanakan melalui: Memberikan pelatihan kebencanaan yang terencana, terukur dan berkelanjutan; Melengkapi infrastruktur penanganan kebencanaan; Meningkatkan anggaran penanganan kebencanaan; Mendorong program desa tangguh bencana; Program pemilahan sampai rumah tangga; Program pengelolaan sampah perdesaan; Program pengelolaan sampah terpadu; Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat melalui program kebersihan masyarakat; Perlindungan untuk wilayah sumber mata air; Pembangunan lahan - lahan hijau pedesaan; Pembangunan TPST (Tempat Pembuangan Sampah terpadu) dengan lokasi yang representative dan Program mengubah sampah bernilai ekonomis;

10. Amanah Kasapuluh

yaitu Meningkatkan kondusivitas wilayah, dilaksanakan melalui: Pencegahan dan

penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan penegakan Perda dan Perkada serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan

11. Amanah Kasabelas

yaitu Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa, dilaksanakan melalui: Pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi RT/RW, BPD, Linmas dan Kader PKK; RT/RW Leadership Program; Pemberian insentif bagi perangkat RT/RW; Pembinaan dalam pengembangan manajemen dan SDM pengelola lembaga ekonomi desa; Menjalin kemitraan dan jaringan dlm memberikan bantuan permodalan pengembangan ekonomi desa; Pelatihan dan pendidikan manajemen dan SDM pengelola lembaga ekonomi desa; Pemilihan perangkat desa berprestasi se-Kabupaten Bandung Barat; Memberikan akses beasiswa bagi perangkat desa; Membangun kerja sama dalam rangka pemberian beasiswa perangkat desa.

12. Amanah Kaduabelas

yaitu Pemajuan Kebudayaan, dilaksanakan melalui: Festival dan pameran seni dan budaya Bandung Barat; Peningkatan pembangunan sanggar seni dan budaya serta Tata kelola sanggar seni yang baik

Tabel 4.10 Program Prioritas dan Langkah Strategis dalam Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2026

No	Prioritas Daerah	No	32 PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	No	87 PROGRAM PRIORITAS SESUAI NOMENKLATUR	No	LANGKAH SRATEGIS 12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter	1	Peningkatan Kesejahteraan SDM Keagamaan dan Pengelola Tempat Ibadah	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan	Bag. Kesra Setda
		2	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan termasuk Pesantren					
		3	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Bakesbangpol
		4	Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2	Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)	Dinkes
		5	Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
		6	Penanganan stunting dan peningkatan gizi					
		7	Penempatan Tenaga Kesehatan Desa	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		8	Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan	6	Program Pengelolaan Pendidikan	3	Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Disdik
				7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			
		9	Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4	Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	DP2KBP3A
				9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera			
				10	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			
				11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			
				12	Program Pemenuhan Hak Anak			
		10	Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan	13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			Dispora
				14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	11	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah	DKPP Dispernakan
		12	Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa	16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
				17	Program Penyuluhan Pertanian			
				18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
				19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
		13	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf	20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata			Disparbud
				21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			
				22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			Disperindag
				23	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			Diskop UKM
				24	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro			
					Program Perekonomian Dan Pembangunan			Bag. Perekonomian Setda
		14	Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah	25	Program Pengembangan UMKM			Diskop UKM
				26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			DPMPTSP
		15	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat	27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			Disperindag
				28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
				29	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			
				30	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri			
		16	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif	31	Program Rehabiliasi Sosial	6	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan sosial	Dinsos
				32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			
				33	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Disperkim
		17	Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja	34	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			Dinsos
				35	Program Penempatan Tenaga Kerja			

No	Prioritas Daerah	No	32 PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	No	87 PROGRAM PRIORITAS SESUAI NOMENKLATUR	No	LANGKAH SRATEGIS 12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT	PERANGKAT DAERAH
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	18	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7	Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi	Setda
				36	Program Perekonomian Dan Pembangunan			
				37	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			Sekretariat DPRD
				38	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Bappelitbangda
				39	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
				40	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah			
				41	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			BKAD
				42	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			
				46	Program Penyelenggaraan Pengawasan			Inspektorat Daerah
				47	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			
				48	Program Pengelolaan Arsip			Disarpus
		19	Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan	43	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Bapenda
		20	Meningkatkan Profesionalisme ASN	44	Program Kepegawaian Daerah			BKPSDM
				45	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		21 22	Penguatan Pembangunan Smartcity Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan	49	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			Diskominfotik
				50	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
				51	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik			
				52	Program Pendaftaran Penduduk			Disdukcapil
				53	Program Pencatatan Sipil			
				54	Program Pelayanan Penanaman Modal			DPMPTSP
				55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			16 Kecamatan
4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah	23 24	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan	56	Program Kawasan Permukiman	8	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
				57	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum			
				58	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Dinas PUTR
				60	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			
				61	Program Pengembangan Permukiman			
				62	Program Penyelenggaraan Jalan			
				63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Dinas Perhubungan
				64	Program Pengelolaan Pelayaran			
5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	25	Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup	65	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
				66	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)			
				59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Dinas PUTR
		26	Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga	67	Program Pengelolaan Persampahan			Dinas Lingkungan Hidup
				68	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			Dinas PUTR
		27	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah	72	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			Dinas PUTR
				69	Program Penanggulangan Bencana			BPBD
				70	Program Penanganan Bencana			Dinsos
				71	Program Pengembangan Perumahan			Disperkim
				73	Program Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas PUTR
				74	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			DKPP
				75	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			
				76	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			

No	Prioritas Daerah	No	32 PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	No	87 PROGRAM PRIORITAS SESUAI NOMENKLATUR	No	LANGKAH SRATEGIS 12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT	PERANGKAT DAERAH
6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai kearifan Budaya Lokal	28	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan	77	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Satpol PP
				78	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			Disdamkar & Penyelamatan
				80	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan			Bakesbangpol
				79	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
		29 30 31	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	81	Program Penataan Desa	11	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa	DPMD
				82	Program Administrasi Pemerintahan Desa			
				83	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			
				84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			16 Kecamatan
				85	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
		32	Pemajuan Kebudayaan	86	Program Pengembangan Kebudayaan	12	Pemajuan Kebudayaan	Disparbud
				87	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 beserta targetnya merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KAB/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KAB. BANDUNG BARAT TAHUN 2026	KETERANGAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05 - 6,05	6,05	Target Kab/Kota berdasarkan Surat No: 2575/PR.01/PPEPD Tanggal 10 Juni 2025 Perihal Penyampaian Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025-2030
2	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta	36,42 - 38,79	38,79	
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi	%	2,14	2,14	
4	Tingkat Kemiskinan	%	8,82 - 9,63	9,63	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,88 - 6,2	5,88	
6	Rasio Gini	Poin	0,375 - 0,371	0,367	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,01	72,14	
8	Persentase Penurunan Intesitas Emisi GRK	%	2,94	2,94	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,25	59,84*	*Berdasarkan BA No: BA13/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/ B04/ 2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target IKLH Kab/Kota Lingkup Prov. Jawa Barat Tahun 2025-2045

Sumber : Target RPJMD 2025-2029, diolah

Target indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2026 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

4.1.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sehingga diharapakan adanya keterkaitan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2026. Keselarasan Program Daerah terhadap Program Nasional menjadi faktor penting bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan. Keselarasan program Nasional, di turunkan kedalam program-program yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat, selengkapnya keterkaitan dan keselarasan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat		Program Prioritas Nasional		Program Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia						
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,	5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	9 1 11	Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif Mencapai swasembada pangan dan energi dan air	28 24 25 26	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan

	ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				Menjamin pelestarian lingkungan hidup		Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah			23	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generesi Z) dan penyandang disabilitas	1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter	8 9 10 17	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta disabilitas Pelestarian seni budaya, peningkatan eknomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	1 2 4 5 6 7 8 9	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji, Dan Pengelola Tempat Ibadah Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PUSKESDES) Penanganan stunting dan peningkatan gizi Penempatan Tenaga Kesehatan Desa

						10 32	Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan Pemajuan Kebudayaan
5	Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumberdaya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi		
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	5 12 13 14	Pemberantasan kemiskinan Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan peptisida langsung ke petani Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif	11 12 13 14 15 16	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah

					-karakteristik-mandiri lainnya	17 29 30 31	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	2 3 4 7	Penyempurnaan sistem penerimaan Negara Reformasi politik, hukum dan birokrasi Pencegahan dan pemberantasan korupsi Pencegahan dan pemberantasan narkoba	18 19 20 21 22	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan Meningkatkan Profesionalisme ASN Penguatan Pembangunan Smartcity Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan

8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan tolerasi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah pendirian dan perawatan rumah ibadah	3 27	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah

Sumber : RKP Tahun 2026, diolah

4.1.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Sehingga diharapakan adanya keterkaitan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Untuk mengetahui keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026 antara Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dilihat secara parsial, karena pada prinsipnya untuk satu tujuan dan sasaran provinsi Jawa Barat bisa didukung oleh beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Secara rinci berikut keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat		Program Prioritas Pembangunan Jawa Barat		Program Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat	
1	Mewujudkan Sumber Daya	1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang	1	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan	1 2	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji, Dan Pengelola Tempat Ibadah

	Manusia Berkarakter	6	berakhlak dan berkarakter Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 3 4 5 6	IPTEK serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi Program Peningkatan dan Pemerataan Layanan Kesehatan Primer dan Layanan Pengobatan Tradisional Program Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi dan Nutrisi bagi Anak, Balita, serta Ibu Hamil dan Menyusui Program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Lokal dan Informal Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Pemuda dan Perlindungan Kelompok Rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas)	3 4 5 6 7 8 9 10 16 32	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PUSKESDES) Penanganan stunting dan peningkatan gizi Penempatan Tenaga Kesehatan Desa Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif Pemajuan Kebudayaan
2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	7 8 9	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Program Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri Program Pengembangan Kewirausahaan Daerah, Ekonomi Kreatif, dan	11 12 13	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf

				10	Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	14	Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah
				11	Program Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	15	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat
				12	Program Penguatan Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	17	Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja
				13	Program Pengendalian Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
				14	Program Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru		
				15	Program Pengembangan digitalisasi sektor Ekonomi Strategis		
3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	45	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	16	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan	23	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
				17	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah	24	Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan
				18	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	25	Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup
				19	Program Pengelolaan Sampah Mandiri dan Terpadu	26	Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga
				20	Program Pelestarian, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	27	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah
				21	Program Peningkatan Ketahanan Air dan Energi	29	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
				22	Program Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Implementasi Pembangunan Rendah Karbon		

						3 1	
4	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	2 3 2 4 2 5	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 8	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan Meningkatkan Profesionalisme ASN Penguatan Pembangunan Smartcity Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan

Sumber : RKPD Prov. Jabar Tahun 2026, diolah

4.1.7 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Bandung Barat

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang dan pola ruang, rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044, meliputi:

a. Kebijakan Penataan Ruang

Tabel 4.14 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kab. Bandung Barat

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
Penetapan sistem pusat permukiman sesuai fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan pengembangan pusat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya	Meningkatkan peran daerah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan regional
	Meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
	Meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan perdesaan sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan
	Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Kawasan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dengan memantapkan fungsi pusat pelayanan kawasan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung
	Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai kawasan perdesaan yang berfungsi untuk melayani keg skala desa
Mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk	Menetapkan 4 (empat) WP untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah
	Mengoptimalkan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas pembangunan
	Mengarahkan pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP
	Memantapkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di setiap WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan perekonomian daerah
	Meningkatkan ketersediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap WP
Penataan dan pengembangan jaringan prasarana	Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan serta kualitas jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan antar WP
	Mengembangkan sistem angkutan umum massal
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di setiap WP

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis daerah aliran sungai untuk menunjang kegiatan perkotaan, industri, dan pertanian
	Meningkatkan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah di kabupaten, sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kegiatan perkotaan
	Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Perwujudan, pemeliharaan kelestarian dan pencegahan kerusakan kawasan lindung	Mengendalikan alih fungsi kawasan hutan
	merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi lindung
	Menyediakan pemenuhan RTH di kawasan perkotaan, paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas seluruh Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat
Perwujudan keterpaduan kawasan budi daya	Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan utk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wil. sekitarnya
	Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
	Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan
	Mengembangkan potensi kecamatan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi
	Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang bernilai ekonomi tinggi di waduk/danau untuk meningkatkan perekonomian
Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung	Membatasi pengembangan lahan terbangun di daerah bagian utara
	Mengendalikan air larian kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk mencegah erosi
	Mengendalikan pembangunan pada lahan yang melampaui daya dukung dan daya tampung
	Mengendalikan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
	Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah bagian utara

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
Pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan	Mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan padat penduduk
	Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Lembang, dan Batujajar
Mengembangkan kawasan permukiman di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung	Mengembangkan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan penduduknya dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung ruang yang ada
	Mempertahankan kawasan non terbangun di sekitar kawasan permukiman dan menjaga fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya
	Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana
Pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri	Mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Lembang
	Mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Cililin.
Pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan	Mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur utara
	Mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur selata
	Mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur barat
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan
	Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannnya
	Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun
	Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan
Pengembangan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan kegiatan ekonomi yang ada di dalam dan sekitar KSK
	Menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan masuknya investasi
	Mengembangkan kawasan tematik
Pengembangan KSK sudut kepentingan pendayagunaan	Menata kegiatan yang ada di dalam dan sekitar KSK
	Mengendalikan alih fungsi lahan

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
sumber daya alam dan teknologi tinggi	Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata
Pengembangan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Mengembangan kegiatan pertanian yang ada di dalam dan sekitar KSK
	Mengembangan pusat agobisnis
	Mengendalikan alih fungsi lahan lindung dan pertanian
	Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata
Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budi daya	Menetapkan ketentuan umum zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian KKPR untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum
	Menetapkan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UKM
	Menerapkan penilaian perwujudan RTR daerah
	Menetapkan ketentuan pemberiaan insentif dan disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk perwujudan RTRW
	Menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan yang melanggar KKPR yang diberikan
	Menjalankan penyelesaian sengketa penataan ruang dan konflik pemanfaatan ruang yang berkeadilan

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

b. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah sesuai dengan peran dan fungsi wilayahnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah lainnya. Sistem pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan menciptakan perkembangan ekonomi yang pesat. Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten, yang tersusun atas pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain berdasarkan peran dan fungsinya serta saling terhubung satu sama lainnya oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, meliputi sistem pusat permukiman, sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 4.6 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat

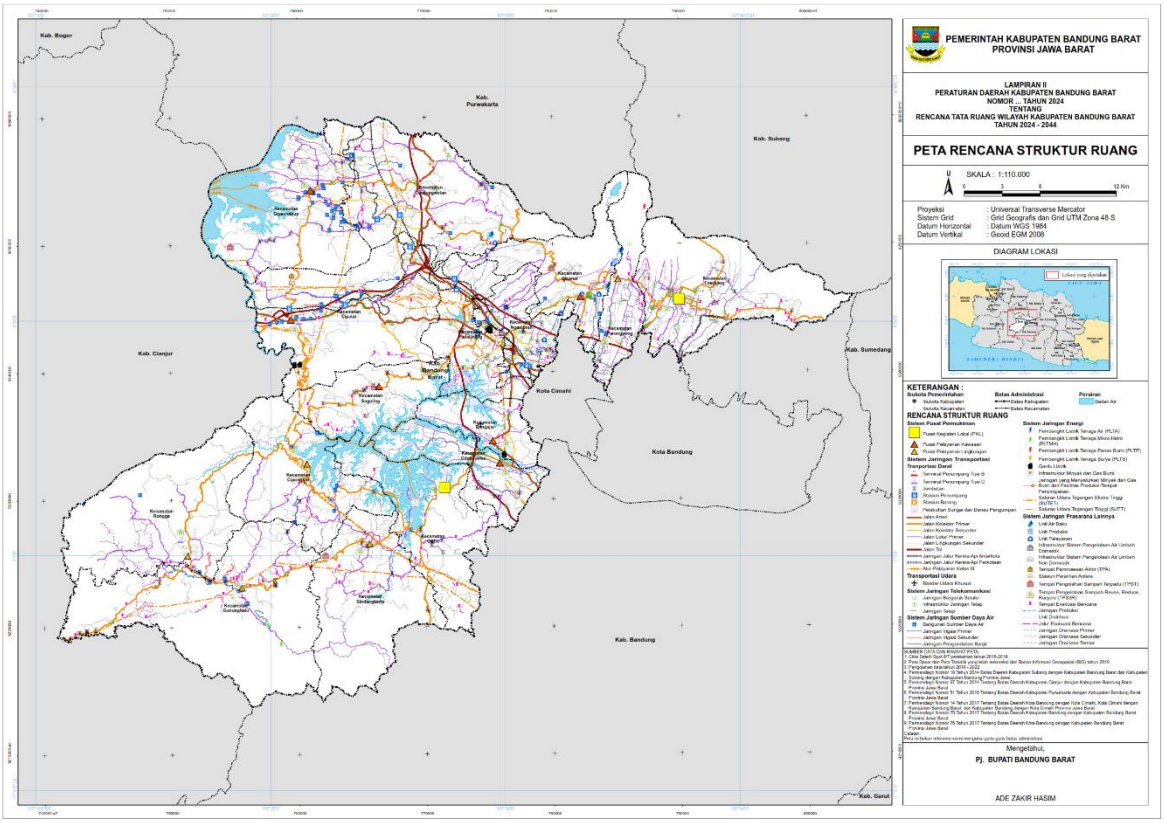

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Berdasarkan karakteristik serta fungsinya, rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dibedakan menjadi dua rencana pengembangan, yaitu rencana pengembangan sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

Rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan pusat lainnya. Rencana sistem perkotaan yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan berdasarkan rencana hierarki kota. Titik simpul (kota-kota) berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat-pusat pelayanan. Sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/ atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
- Ditandai dengan adanya bandar udara skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A
- Pusat Kegiatan Nasional Bandung Raya yang menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satunya meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah,

Kecamatan Cikalongwetan, sebagian Kawasan Perkotaan Batujajar, sebagian Kawasan Perkotaan Cihampelas, sebagian Kawasan Perkotaan Cililin, sebagian Kawasan Perkotaan Cipatat, sebagian Kawasan Perkotaan Cipeundeuy, dan sebagian Kawasan Perkotaan Lembang.

2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
   - Fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan
   - PKL terletak di Kawasan Perkotaan Cililin yang berada di Kecamatan Cililin dan Kawasan Perkotaan Lembang yang berada di Kecamatan Lembang.

3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi: Batujajar, Cihampelas, Cipatat, Cipeundeuy, Cisarua, dan Saguling.
   - Fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal
   - Selain itu juga berfungsi sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan yang berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya,
   - Didukung kelengkapan sarana minimum seperti: pasar, dan sub terminal

4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa, meliputi: Cipongkar, Gununghalu, Parongpong, Rongga, Sindangkerta.
   - Selain itu juga berfungsi sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan yang berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya, dengan didukung kelengkapan sarana minimum seperti: pasar, dan sub terminal.

Sistem jaringan prasarana di Kabupaten Bandung Barat direncanakan meliputi Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

c. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Bandung Barat dan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan. Secara umum, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan fungsi utamanya, meliputi:

1) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kabupaten Bandung Barat meliputi

- Badan air, tersebar di 13 Kecamatan
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yakni berupa kawasan hutan lindung seluas 18.103 ha, tersebar di 10 kecamatan
- Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan sungai, sempadan sekitar waduk/danau/situ, dan kawasan perlindungan setempat lainnya seluas 2.548 ha, tersebar di 13 Kecamatan
- Kawasan konservasi yang meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, terdiri dari Kawasan Suaka Alam, mencakup: Cagar Alam Junghunh di Kecamatan Lembang, Cagar Alam Gunung Tangkuban Parahu meliputi wilayah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong, Cagar Alam Burangrang meliputi Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Cisarua dan Kawasan pelestarian alam, mencakup: Taman Hutan Raya berupa Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda terletak di Kecamatan Lembang serta Taman Wisata Alam berupa Taman Wisata Alam Kawah Gunung Tangkuban Parahu meliputi Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong.
- Kawasan cagar budaya. mencakup: Teropong Bintang Bosscha di Kecamatan Lembang; Monumen/Makam Franz Wilhelm Junghuhn di Kecamatan Lembang; Stasiun Kereta Api Padalarang di Kecamatan Padalarang; Pabrik Kertas Padalarang di Kecamatan Padalarang; Situs Cagar Budaya Gua Pawon di Kecamatan Cipatat; Kampung Budaya Gua Pawon, terletak di Kecamatan Cipatat; Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro di Kecamatan Cipatat; Situs Batu Mukapayung di Kecamatan Cililin; Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin; Gedung Pemancar Radio (Telefunken/NIROM) di Kecamatan Cililin; dan Makam Tiga Waliulloh di Kecamatan Cipongkor

2) Kawasan budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah: Kawasan Hutan Produksi; Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; Kawasan Pertanian Tanaman Holtikultura; Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan; Kawasan Peternakan dan perikanan; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman; Kawasan Transportasi serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

d. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan dalam lingkup kabupaten. Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya struktur dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 4.7 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

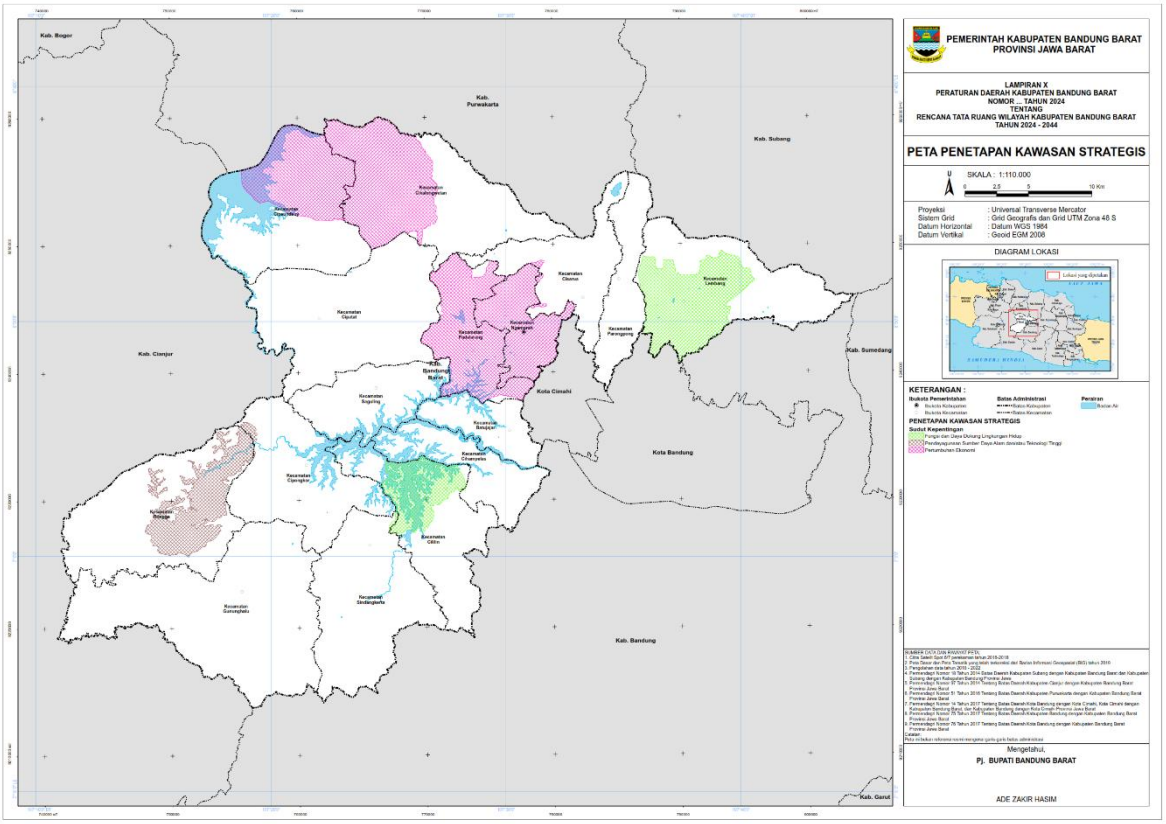

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Tabel 4.15 Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

No	Program	Lokasi
III	**Kawasan Strategis**	
III.A	**Kawasan Strategis Nasional**	
III.A.1	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	KSN Perkotaan Cekungan Bandung; KSN Teropong Bintang Bosscha
III.A.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional	
III.B	**Kawasan Strategis Provinsi**	
III.B.1	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang	KSP Kawasan Bandung Urata (KBU)
III.B.2	Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	
III.B.3	Monitoring dan evaluasi	
III.B.4	Fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah	
III.B.5	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang	

No	Program	Lokasi
III.B.6	Rehabilitasi Kawasan hutan, Kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang	
III.B.7	Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir Wilayah Sungai Citarum	
III.C	**Kawasan Strategis Kabupaten**	
III.C.1	**Pertumbuhan Ekonomi**	
III.C.1.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cisarua Kecamatan Ngamprah Kecamatan Padalarang
III.C.1.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.1.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.1.4	Pengembangan Kegiatan Pariwisata	
III.C.1.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
	Penataan Kawasan pusat pemerintahan	
	Penataan Kawasan sekitar Stasiun Kereta Api Padalarang	
	Penataan RTH di sekitar waduk Saguling	
	Penataan Pusat Kota Padalarang	
III.C.1.6	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cikalongwetan
III.C.1.7	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.1.8	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.1.9	Pengembangan Kegiatan Pariwisata	
III.C.1.10	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
III.C.1.11	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cipeundeuy
III.C.1.12	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.1.13	Pengembangan Sapras dan utilitas Kawasan	
III.C.1.14	Pengembangan Kegiatan Industri	
III.C.1.15	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
III.C.2	**Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**	

No	Program	Lokasi
III.C.2.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kecamatan Cipongkor Kecamatan Rongga
III.C.2.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.2.3	perlindungan dan pelestarian Kawasan	
III.C.2.4	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.2.5	Pengembangan Kegiatan Pariwisata	
III.C.2.6	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
III.C.3	**Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**	
III.C.3.1	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kecamatan Cililin Kecamatan Lembang Kecamatan Sindangkerta
III.C.3.2	Perlindungan dan pelestarian Kawasan	
III.C.3.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.3.4	Pengembangan Agrbisnis	
III.C.3.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

e. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Dalam rencana struktur ruang RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 tertuang bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp), yaitu kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Fasilitas minimum yang harus dimiliki Kabupaten Bandung Barat sebagai PKNp adalah pusat bisnis kegiatan utama yang akan dikembangkan dengan skala internasional maupun nasional dan akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional.

Penetapan Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dimana Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu bagiannya, didasari oleh perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pendidikan tinggi. Salah satu indikasi pesatnya perkembangan tersebut adalah tingginya alih fungsi lahan menuju kawasan perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan di Kawasan Perkotaan Bandung Raya menjadi salah satu amanat yang harus dipenuhi oleh

wilayah-wilayah di dalamnya. Salah tujuannya untuk mengurangi kecendrungan alih fungsi lahan yang menerus di kawasan perkotaan, mengingat target jumlah kawasan lindung yang ditargetkan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 45%.

Dalam Rencana Struktur Ruang Dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 juga ditetapkan sistem perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, yang di dalamnya juga terdapat beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kecamatan Padalarang sebagai Kota Hierarki II serta Kecamatan Cililin, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang sebagai Kota Hierarki III.

Kawasan Bandung Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042. Saat ini, pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara tidak terkendali sehingga mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan daerah sebagai daerah tangkapan air. Kawasan Bandung Utara atau yang disingkat KBU, memiliki peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Kawasan Bandung Utara merupakan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Penataan ruang pada kawasan ini diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dan dalam berbagai aspek.

Secara administratif, Kawasan Bandung Utara meliputi sebagian Kabupaten Bandung, seluruh Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Bandung Utara yang termasuk ke dalam daerah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Sebagian daerah Kecamatan Cikalongwetan
2. Kecamatan Cisarua
3. Kecamatan Lembang
4. Sebagian Kecamatan Ngamprah
5. Sebagian Kecamatan Padalarang
6. Kecamatan Parongpong

Berdasarkan pola ruang, Kawasan Bandung Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Daerah kawasan lindung Kawasan Bandung Utara yang masuk kedalam wilayah Kab Bandung Barat adalah:

1. Kawasan pelestarian alam: sebagian Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda serta Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu
2. Kawasan suaka alam: Cagar Alam Tangkuban Perahu
3. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Observatorium Bosscha

4. Kawasan rawan bencana alam geologi: Sesar Lembang

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2026 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahunan selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja PD). RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 yang disusun di tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, berpedoman pada arah kebijakan nasional/Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*.

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) kesesuaian dengan dokumen perencanaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2026; (2) Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah erpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, didalamnya terdapat arahan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta isu strategis daerah; (3) Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana; (4) Untuk masing-masing prioritas pembangunan, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas; (5) Dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolak ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan s.d Triwula II Tahun 2025; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan (4) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2026.

1.7 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan pembangunan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Bandung Barat dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Kabupaten Bandung Barat memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dirancang sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah untuk mewujudkan Bandung Barat "AMANAH" (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) sekaligus juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2025-2029 serta sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian Jabar Istimewa (Lembur diurus Kota ditata) yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

4.1.4 Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKP Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029 menetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** yang mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan indonesia setara negara maju ditahun 2045. Dalam mencapai Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagimana tertuang dalam RPJMN tahun 2025–2029 sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2025–2029 dengan **8 (delapan) Misi atau Asta Cita** yang selanjutnya ditetapkan menjadi Proritas Nasional atau goals (tujuan) yang ingin dicapai, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Visi Misi Presiden dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, 2025

Sasaran pembangunan pada RPJMN Tahun 2025-2029 menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mewujudkan visi dan misi presiden tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahula 2025-2029 merupakan manifestasi dari pelaksanaan periode pertama RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Representase keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut:

Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

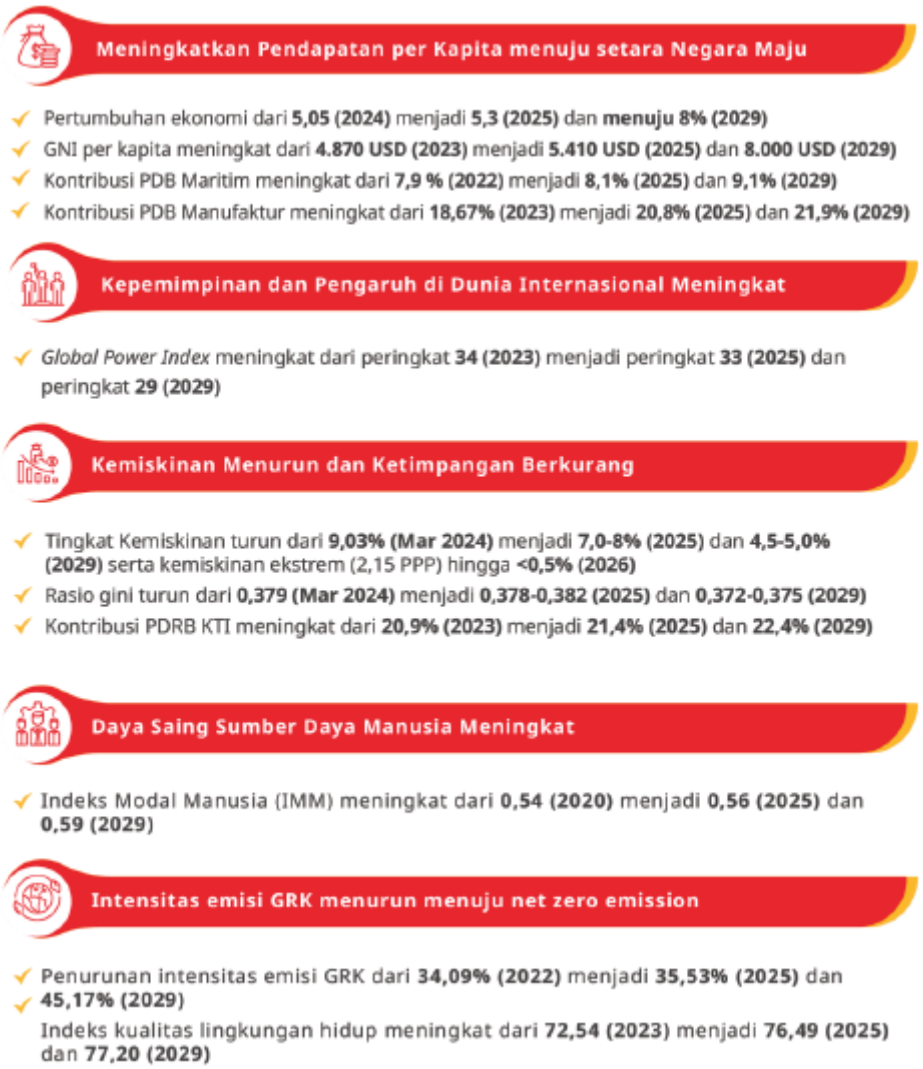

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, 2025

Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional tersebut, meliputi:

9. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
10. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
11. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri

kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

12. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
13. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
14. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
15. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
16. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8 (Asta) agenda pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 17 program prioritas presiden dan wakil presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor, yaitu:

18. Mencapai swasembada pangan dan energi dan air
19. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
20. Reformasi politik, hukum dan birokrasi
21. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
22. Pembenrantasan kemiskinan
23. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
24. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
25. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
26. Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
27. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta disabilitas
28. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
29. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan peptisida langsung ke petani
30. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan

31. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif -karakteristik-mandiri lainnya
32. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumberdaya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
33. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah pendirian dan perawatan rumah ibadah
34. Pelestarian seni budaya, peningkatan eknomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga

Untuk selanjutnya 17 program prioritas tersebut dirumuskan kedalam langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins, yaitu:

9. Memberikan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita
10. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
11. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
12. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah- sekolah yang perlu renovasi;
13. Melanjutkan dan menambahkan program kartu- kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
14. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
15. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR;
16. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Untuk lebih jelasnya program prioritas dan program hasil terbaik cepat/quick wins, tersebut dapat dilihat pada tabel beikut:

Tabel 4.1 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat

17 PROGRAM PRIORITAS	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
18) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 19) Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 20) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 21) Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 22) Pemberantasan kemiskinan. 23) Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 24) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 25) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 26) Penguatan pertahanan dan keamanaan Negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 27) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 28) Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 29) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 30) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 31) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya. 32) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi 33) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 34) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	9) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 10) Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 11) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 12) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 13) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 14) Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 15) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 16) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sumber: RKP Tahun 2026

Bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sarana untuk menerjemahkan cita-cita dan tujuan negara ke dalam pembangunan negara yang lebih konkret yang dilaksanakan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. Selanjutnya untuk optimalisasi perencanaan pembangunan nasional jangka tahunan, pada tahun 2026 disusun dan ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Pada RKP Tahun 2026 ini, arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada gambar berikut:

Gambar 4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang RKP Tahun 2026

Prioritas pembangunan tersebut di atas, pada tahun 2026 pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (blue food) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien. Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

Pengelolaan sampah nasional menghadapi kondisi darurat akibat proyeksi timbulan sampah mencapai 82,2 juta ton per tahun pada 2045, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mulai melampaui batas. Reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pendekatan teknis, perubahan perilaku, dan pelibatan multipihak. Pengelolaan Sampah Terpadu bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, menciptakan nilai tambah ekonomi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta mendukung penurunan emisi GRK. Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi pilar utama, meskipun menghadapi tantangan pembiayaan, perizinan, dan regulasi. Program ini disinergikan dengan agenda nasional seperti MBG, ekonomi sirkular, dan pengentasan kemiskinan melalui peran sektor informal. Program Prioritas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listri (PSEL) dengan lokasi prioritas PSEL yang diusulkan dalam PSN RPJMN Tahun 2025-2029 salah satunya berada di Bandung.

RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program MBG.

Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin. Di sektor pendidikan, pemerintah berupaya untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif. Afirmasi pada akses pendidikan yang berkualitas dilakukan di antaranya melalui percepatan renovasi sekolah, serta pembangunan Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif untuk memberikan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia. Selanjutnya, digitalisasi pendidikan merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan nasional, sekaligus membekali generasi muda dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di era ekonomi berbasis teknologi. Program ini diharapkan juga mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat sistem manajemen mutu pendidikan secara nasional.

Pada sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem MBG, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, dan mempercepat pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota, diiringi dengan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan di daerah sulit akses. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis akan diperkuat untuk mendukung deteksi dini, edukasi, pencegahan penyakit, serta mengurangi potensi beban anggaran akibat biaya pengobatan dan perawatan, serta hilangnya produktivitas masyarakat.

Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Tujuannya adalah membentuk pemerintahan yang adaptif, melayani secara cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Pemerintahan yang efektif diharapkan mampu mewujudkan kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik. Strategi dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dilakukan melalui transformasi digital pemerintah yang difokuskan pada (i) pengembangan arsitektur pemerintah digital; (ii) penguatan keterpaduan layanan publik prioritas dalam portal pelayanan publik terintegrasi sesuai proses bisnis tematik; dan (iii) implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital.

Selanjutnya, investasi merupakan salah satu pendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Investasi didorong tidak hanya dengan peningkatan nilai realisasi investasi, namun juga peningkatan kualitas investasi baik PMA maupun PMDN. Transformasi digital menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya saing nasional di tingkat global, membangun kegiatan sosial yang kondusif dengan memanfaatkan data, informasi, pengetahuan, serta perkembangan teknologi digital, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital dan peningkatan produktivitas.

Riset dan inovasi juga menjadi salah satu strategi untuk mendukung adopsi teknologi dan inovasi. Pengembangan riset dan inovasi diarahkan melalui pendekatan ekosistem iptek dan inovasi (Iptekin) yang lebih terstruktur, sederhana, dan adaptif terhadap berbagai konteks implementasi serta mudah dimengerti oleh berbagai stakeholder. Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, peningkatan kapasitas iptekin akan dilakukan melalui peningkatan peran lembaga intermediasi yang ada di lembaga penelitian dan perguruan tinggi, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Science Techno Park (STP), pusat diseminasi, Transfer Technology Office (TTO), dan inkubator, sehingga riset dan inovasi dapat lebih terarah dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pertahanan semesta diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui komponen cadangan, pemenuhan alutsista, dan penguatan kemampuan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan nasional dari gangguan yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional. Peningkatan produktivitas nasional juga didukung oleh pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (pro-stability) dan keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability).

Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh percepatan hilirisasi yang difokuskan pada beberapa komoditas unggulan, yang meliputi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan peran sebagai pusat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan perekonomian desa antara lain melalui sistem distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, pengendalian inflasi lokal, peningkatan nilai jual hasil pertanian, pengurangan ketergantungan pada perantara, serta penciptaan lapangan kerja baru di desa.

Dalam rangka mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan penerapan data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, program tiga juta rumah yang menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk masyarakat miskin dan rentan. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, Presiden menetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang bertujuan menyatukan data sosial ekonomi dari berbagai K/L menjadi sistem terpadu yang akurat, mutakhir, dan interoperabel. DTSEN diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, efisiensi anggaran, dan kualitas kebijakan. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mendorong pelaksanaan program yang terintegrasi dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 – 6,3
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44 – 4,96
3.	Tingkat Kemiskinan	%	6,50 – 7,50
4.	PDRB per Kapita	Juta	5.870 (GNI per Kapita, US$)
5.	Rasio Gini	Nilai	0,377 – 0,380
6.	Indeks Modal Manusia	Poin	0,57
7.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	37,14
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,67

Sumber: RKP Tahun 2026

Pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan visi RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2026 pemerintah menegaskan komitmennya dalam mengarusutamakan berbagai aspek pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengarusutamaan pembangunan meliputi:

6. Integrasi Perspektif Gender dan Inklusi Sosial

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang adil dan setara dengan memberikan akses yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

7. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Dalam rangka mempercepat pencapaian SDGs, Indonesia mengadopsi pendekatan sistematis dengan mengintegrasikan 118 target dan 190 indikator SDGs ke dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RKP Tahun 2026. Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus didorong untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Aksi Daerah SDGs guna memastikan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan dapat terimplementasi secara local

8. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

9. Akselerasi Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, transformasi digital memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif dengan memanfaatkan data, informasi, pengetahuan, serta teknologi digital. Implementasi transformasi ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi digital yang berkontribusi pada PDB nasional yang didukung oleh SDM digital yang berkualitas, literasi digital yang memadai, regulasi yang adaptif, pendanaan yang berkelanjutan, keamanan siber yang kuat, perlindungan data pribadi, serta riset dan pengembangan berbasis inovasi.

10. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Pada tahun 2026, pemerintah terus menargetkan pengurangan emisi GRK dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan, efisiensi energi, serta rehabilitasi lahan dan ekosistem. Strategi ini diimplementasikan antara lain melalui penerapan pajak karbon, investasi hijau, serta pengembangan industri ramah lingkungan.

Tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2026 mengangkat tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan dan Prioritas Nasional. Prioritas Nasional, Sasaran pembangunan beserta indikatornya serta arah kebijakan dan intervensi pada RKP Tahun 2026 adalah:

3) **Prioritas Nasional 1** : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

   Sasaran: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia dengan indikator

   c. Indeks Demokrasi Indonesia
   d. Indeks Hak Asasi Manusia.

4) **Prioritas Nasional 2** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

   Sasaran:

   7. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanan pembangunan dengan indikator
      bb. Asia Power Index (Military Capability),
      cc. Asia Power Index (Diplomatic Influence),
      dd. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya (%)
      ee. Golbal Cybersecurity Index
      ff. Indeks keamanan laut nasional
   8. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW nexus)
      gg. Indeks Ketahanan Pangan
      hh. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%)
      ii. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
   9. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW nexus)
      jj. Indeks ketahanan energi
      kk. Porsi EBT dalam bauran energi Primer (%)

10. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, da air (FEW nexus)

ll. Indeks ketahanan air nasional

mm. Kapasitas tampungan air

nn. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan

oo. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)

11. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan

pp. Posisi ekonomi syariah indonesia ditingkat global (peringkat)

qq. Indonesia Blue Economy index (IBEI)

rr. Indeks daya saing digital tingkat global (peringkat)

12. Terwujudnya transformasi ekonomi hijau

ss. Indeks ekonomi hijau

tt. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)

uu. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif (%)

vv. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan (%)

ww. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati

xx. Indeks kualitas lingkungan hidup

yy. Indeks kualitas udara

zz. Indeks kualitas air

aaa. Indeks kualitas lahan

bbb. Indeks kualitas air laut

9) Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Sasaran

6. Terwujudnya pemgembangan infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator

b. Stok infrastruktur terhadap PDB (%)

7. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB dengan indikator:

o. Total aset sektor keuangan /PDB (%)

p. Aset perbankan/PDB (%)

q. Aset dana pensiun/PDB (%)

r. Aset asuransi/PDB (%)

s. Kapitalisasi pasr modal/PDB (%)
t. Total kredit/PDB (%)
u. Inklusi keuangan (%)

8. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dengan indikator:
   v. Proporsi penciptaan lapangan kerja fromal (%)
   w. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)
   x. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)
   y. Rasio kewirausahaan (%)
9. Meningkatnya nilai tambah pariwisata dengan indikator:
   z. Rasio PDB pariwisata (%)
   aa. Devisa pariwisata (Miliar USD)
10. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif dengan indikator :
   p. Proporsi PDB ekonomi kreatif.

10) Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generesi Z) dan penyandang disabilitas

Sasaran:

6. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata dengan indikator:
   cc. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun(tahun)
   dd. Harapan lama sekolah (tahun)
   ee. Rata rata nilai PISA (membaca, matematika, dan sains)
   ff. Rata rata nilai assesmen tingkat nasional (literasi membaca dan numerasi)
   gg. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (%)
   hh. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi
   ii. Persentase pekerja lulusan pendidikan menenga dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
7. Terwujudnya kesehatan untuk semua dengan indikator:
   jj. Usia harapan hidup (UHH) (tahun)
   kk. Angka kelahiran total (total fertility rate (rata-rata kelahiran perwanita usia subur 15-49 tahun)
   ll. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
   mm. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
   nn. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

oo. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

8. Keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarkat inklusif

pp. Indeks pembangunan kualitas keluarga

qq. Indeks perlindungan anak

rr. Indeks pembangunan pemuda

ss. Indeks ketimpangan gender

tt. Indeks pembangunan gender

uu. Mobilitas penduduk lanjut usia (%)

vv. Mobilitas penduduk penyandang disabilitas (%)

9. Menguatnya iptek, inovasi dan produktifitas tenaga kerja

ww. Peringkat indeks inovasi global

xx. Tingkat pengangguran terbuka (%)

yy. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)

zz. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan)(%)

10. Meningkatnya prestas olahraga indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat

aaa. Peringkat pada Asian Games

bbb. Peringkat pada Asian Para Games

ccc. Peringkat pada asian para games

ddd. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga.

11) Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Sasaran:

3. Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktifitas dan daya saing industri pengolahan dengan indikator

e. Rasio PDB industri pengolahan (%)

4. Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, dengan indikator:

f. Biaya logistik (%PDB)

g. Pembentukan modal tetap bruto (%PDB)

h. Ekspor barang dan jasa (%PDB)

12) Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,

Sasaran :

5. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dengan indikator:
   j. Tingkat kemiskinan (%)
   k. Tingkat kemiskinan ekstrem (%)
   l. Proporsdi penduduk kelas menengah (%)
   m. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
   n. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formasl (%)
6. Meningkatkan akses hunian llayak, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan indikator:
   o. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
7. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan indikator
   p. Persentasi desa mandiri (%)
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan indikator
   q. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)
   r. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan tehradap nasional (%)

13) Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan,

Sasaran :

7. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dab tidak memihak serta sistem politik yang fungsional, dengan indikator:
   k. Indeks pembangunan hukum
   l. Indeks persepsi korupsi
   m. Indeks integritas partai politik
8. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, dengan indikator:
   n. Indeks reformasi birokrasi nasional
   o. Indeks pelayanan dan perlindungan WNI diluar negeri
9. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan indikator:
   p. Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika
10. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkann kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dengan indikator
    q. Return on Asset (ROA) BUMN (%)

11. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan seumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dengan indikator:
    r. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%)
    s. Rasio perpajakan terhadap PDB (%)
12. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator:
    t. Tingkat inflasi

14) Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan tolerasi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,

Sasaran:

3. Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju
    d. Indeks pembangunan masyarakat (IPMas)
    e. Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
    f. Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)
4. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan indikator:
    e. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2026. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya, yaitu meliputi:

Tabel 4.3 Kegiatan Prioritas Utama Nasional

PRIORITAS NASIONAL		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	
1	Prioritas Nasional 1	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
2	Prioritas Nasional 2	2	Transformasi tata kelola industry pertahanandan penerapan skema *spend to invest*
		3	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
		4	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung

			pangan Sumatra Selatan
		5	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
		6	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
		7	Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)
		8	Pembangunan pangan hewani
		9	Pembangunan pangan lokal dan nabati
		10	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
		11	Peningkatan penyediaan energi
		12	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi
		13	Penguatan implementasi transisi energy berkeadilan
		14	Konservasi sumberdaya air
		15	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
		16	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
		17	Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa
		18	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
		19	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lain
		20	Pengelolaan susut dan sisa pangan
		21	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
		22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
		23	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
		24	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
		25	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
		26	Pengembangan industry garam dan produk olahan hasil laut
3	Prioritas Nasional 3	27	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
		28	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
		29	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
		30	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena
		31	Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba
		32	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo
		33	Penguatan ekosistem aplikasi dan Game
		34	Pengembangan koperasi sector produksi
4	Prioritas Nasional 4	35	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
		36	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
		37	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
		38	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
		39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in- *service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
		40	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
		41	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
		42	Penurunan kematian ibu dan anak

		43	Pencegahan dan penurunan stunting
		44	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
		45	Penuntasan TBC
		46	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
		47	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
		48	Eliminasi penyakit kusta dan *Schistosomiasis*
		49	Investasi pelayanan kesehatan primer
		50	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pel. kesehata bergerak dan daerah sulit akses
		51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
		52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya
		53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
		54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
5	Prioritas Nasional 5	55	Pengembangan hilirisasi Nikel
		56	Pengembangan hilirisasi Tembaga
		57	Pengembangan hilirisasi Bauksit
		58	Pengembangan hilirisasi Timah
		59	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
		60	Pengembangan hilirisasi Kelapa
		61	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
		62	Pengembangan hilirisasi Kimia
		63	Pengembangan industri semikonduktor
		64	Pengembangan industry tekstil dan produk tekstil
		65	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja
		66	Pengembangan industri dirgantara
		67	Pengembangan KEK Sei Mangkei
		68	Pengembangan KIT Batang
		69	Pengembangan KI Weda bay
6	Prioritas Nasional 6	70	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
		71	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
		72	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
		73	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
		74	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
		75	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
7	Prioritas Nasional 7	76	Pencegahan tindak pidana korupsi
		77	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja ASN
		78	Transformasi digitallayanan public prioritas
		79	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
		80	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
8	Prioritas Nasional 8	81	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
		82	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
		83	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

Sumber: RKP Tahun 2026

Tujuan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 konsisten dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu mengurangi ketimpangan pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Sesuai dengan arah RPJMN Tahun 2025-2029 untuk penguatan fondasi transformasi, maka fokus pembangunan kewilayahan pada tahun 2026 adalah:

d. Penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah, melalui penuntasan rencana tata ruang, perluasan pendaftaran dan sertifikasi tanah, penataan otonomi daerah, penyediaan data dan informasi geospasial dasar, dan penguatan fondasi keuangan daerah
e. Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi, melalui Peningkatan kemandirian perdesaan, Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang, Pembangunan kawasan perbatasan, Pengelolaan urbanisasi dan perkotaan, Pengembangan pusat pertumbuhan baru, Penuntasan dan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersifat kawasan
f. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana, melalui Pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, layanan peringatan dini dan resiliensi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.

Pembangunan kewilayahan dilaksanakan melalui berbagai strategi untuk mempercepat pemerataan antarwilayah, di antaranya (i) strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara merata; (ii) strategi afirmatif pembangunan daerah-daerah tertinggal dan perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan; (iii) strategi konservasi untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; serta (iv) strategi penguatan konektivitas infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Pelaksanaan program pembangunan kweilayahan tersebut akan dijabarkan dalam highlight intervensi pembangunan wilayah di masing-masing provinsi, khusus Jawa Barat dimana Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu bagiannya, Highlight Intervensi Pembangunan Wilayah Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.4 Highlight Intervensi Pembangunan Wilayah Jawa Barat

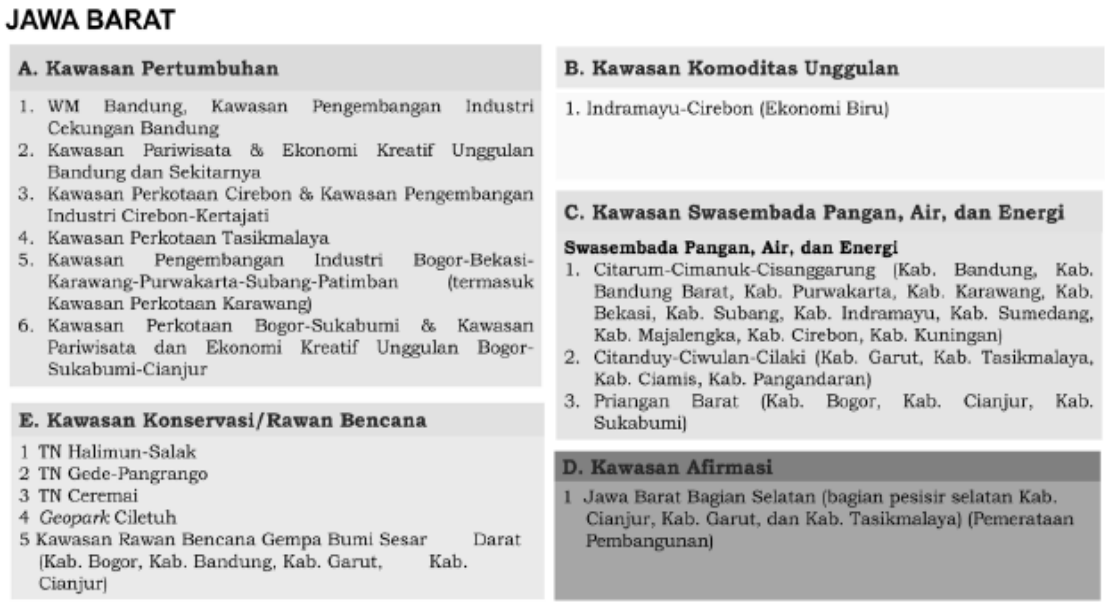

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang RKP Tahun 2026

4.1.5 Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode tahun 2025-2029, yaitu **"JAWA BARAT ISTIMEWA, Lembur Diurus, Kota Ditata"**. Visi ini diterjemahkan kedalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi Jawa Barat Istimewa, yaitu:

5. Misi Kesatu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.
6. Misi Kedua: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif
7. Misi Ketiga Yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
8. Misi Keempat: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Adapun tujuan dan sasaran pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur Bageur, Bener, Pinter,* dan *Singer*, dengan sasaran:

6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
7. Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;
8. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
9. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;
10. Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.

Tujuan 2.1

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:

5. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
6. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;
7. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa;
8. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif.

Tujuan 2.2

Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:

4. Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Meningkatnya Kualifikasi, kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
6. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, Serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan;

2. Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;
3. Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat

Tujuan 4.1

Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:

3. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan;
4. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.

Tujuan 4.2

Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:

2. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan pelaksanaan atau penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, yaitu "Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola", maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah: **"Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar"**. Tema tersebut memiliki makna bahwa aksesibilitas layanan dasar perlu merata. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ditandai dengan fokus pembangunan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dimulai dari layanan dasar melalui peningkatan intensitas dan cakupan, baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya pada daerah-daerah yang belum merata namun memiliki nilai strategis yang tinggi.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan, Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk tahun 2026.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan). Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

5. **Prioritas 1**, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
6. **Prioritas 2**, yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif;
7. **Prioritas 3**, yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
8. **Prioritas 4**, yaitu Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Program Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 didasarkan pada agenda pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun pada periode RPJMD Tahun 2025-2029. Program prioritas daerah ditetapkan dengan mengacu pada hasil penjabaran strategi sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan kebijakan (visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan) pada RPJMD Tahun 2025-2029. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 diimplementasikan melalui program prioritas Provinsi Jawa Barat, yaitu:

5) Program Prioritas 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul

17. Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan;
18. Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional;
19. Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup;
20. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama;
21. Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
22. Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi
23. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat

6) **Program Prioritas 2**: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif

24. Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
25. Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
26. Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
27. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan;
28. Program Peningkatan dan pemerataan investasi;
29. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah;
30. Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD;
31. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan.
32. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan

7) **Program Prioritas 3**: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin Dan Kaya

22. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
23. Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan;
24. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim;
25. Program Pengurangan Risiko Bencana;
26. Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)

8) **Program Prioritas 4**: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good And Clean Governance

25. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah;
26. Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan;

27. Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk Sembilan Langkah Membangun Jabar (9 Lengkah Ngawangun Jabar) sebagai berikut:

10. Lengkah Kahiji

Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan).

11. Lengkah Kadua

Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya

12. Lengkah Katilu

Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat

13. Lengkah Kaopat

Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan.

14. Lengkah Kalima

Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat.

15. **Lengkah Kagenep**

    Penanganan stunting dan gizi burukdengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan

16. **Lengkah Katujuh**

    Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan

17. **Lengkah Kadalapan**

    Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).

18. **Lengkah Kasalapan**

    Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak

Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 beserta targetnya merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15 – 6,20
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,31 - 6,66
3.	Tingkat Kemiskinan	%	5,51 - 6,02
4.	PDRB per Kapita	Juta	63,65 – 66,00
5.	Kontribusi PDRB Provinsi Jawa Barat	%	12,8
6.	Rasio Gini	Nilai	0,381 – 0,420
7.	Indeks Modal Manusia	Poin	0,58
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	6,97
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	64,31

Sumber: RKPD Prov. Jabar 2026

Dalam konteks pengembangan wilayah di Jawa barat, pada dasarnya arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di lingkup Provinsi Jawa Barat masih menggunakan pendekatan pengembangan kewilayahan berbasis Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042. RTRW Provinsi Jawa Barat membagi 27 kota/kabupaten ke dalam 6 (enam) WP dimana Kabupaten Bandung Barat termasuk pada WP Cekungan Bandung. Adapun kebijakan pembangunan untuk WP Cekungan Bandung yang harus diwujudkan dalam periode tahun 2022-2042 (termasuk pada tahun 2026 ini) diuraikan sebagai berikut:

Gambar 4.5 Wilayah Pengembangan (WP) Cekungan Bandung

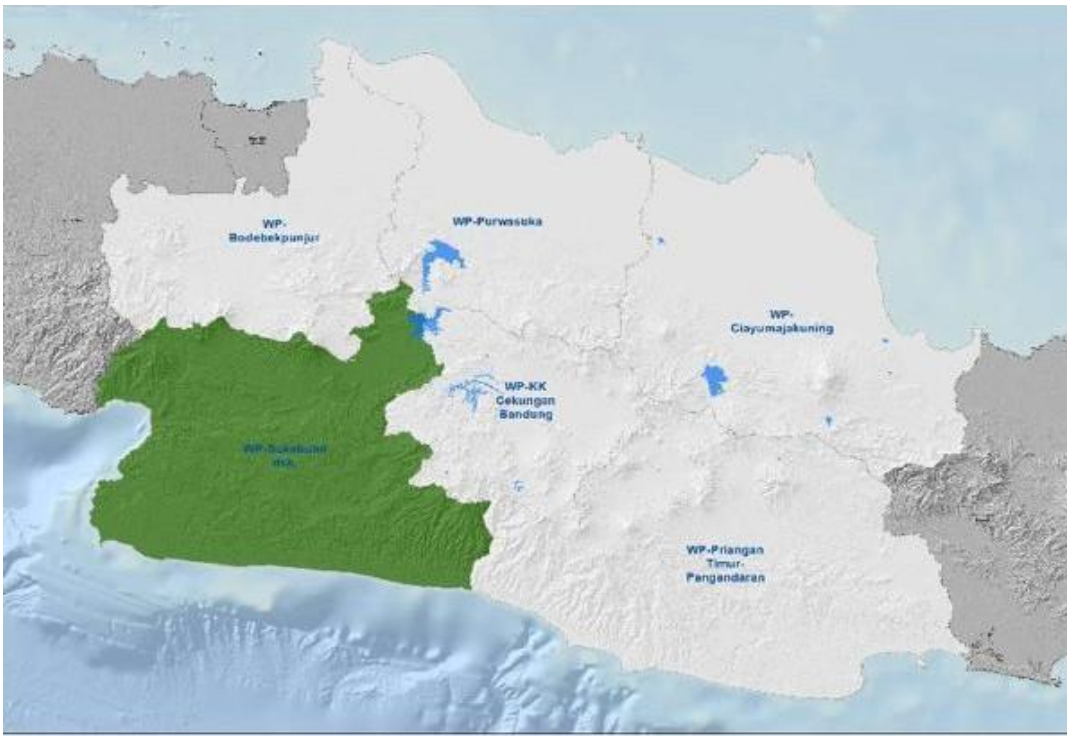

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Wilayah Pengembangan (WP) Cekungan Bandung Lingkup Wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, **Kabupaten Bandung Barat**, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.

Tema Pengembangan: Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

Arah Pengembangan:

5. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL.
6. Mengendalikan pengembangan kegiatan di Kawasan perkotaan.

7. Mengembangkan Kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung Kawasan.
8. Mengembangkan Pembangunan dan hunian vertikal.

Fokus Pengembangan:

Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi;

Sektor Unggulan:

Pertanian horti-kultura, perikanan, agroforestri, industri non-polutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas Kab./ Kota yang se-cara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya

Prioritas Pembangunan dalam RPJMD

Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.

Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.

Indikasi Program RTRW

u. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
v. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
w. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
x. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
y. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya:
   - Kawasan ekosistem esensial.
z. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian:
   - Pengembangan kawasan tanaman pangan.
   - Pengembangan kawasan hortikultura.

- Perwujudan Kawasan Pertanian (P): Pengembangan kawasan tanaman pangan; Pengembangan kawasan hortikultura; Pengembangan Potensi Lahan Kering; Pengembangan kawasan perkebunan.
- Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan
- Pengembangan Agro Techno Park dan Science Technopark.
- Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian

aa. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU):

- Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU).
- Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman.

bb. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):

- Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi.
- Modernisasi irigasi.
- Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir.
- Pengamanan, konservasi, serta operasi dan pemeliharaan situ.
- Penataan dan revitalisasi situ.

cc. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:

- Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM.
- Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota).

dd. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional:

- Pembangunan TPPAS Regional.
- Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA).
- Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional.
- Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota.
- Pengembangan TPST atau TPA Lokal.
- Pembangunan dan Pengembangan TPA.
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).
- Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R).
- Pengolahan gas metana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas metana.

ee. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:
- Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/ kota.
- Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri.
- Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri.

ff. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan:
- Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah.
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- Pengembangan Gardu Listrik.

gg. Program Pengelolaan Energi Terbarukan:
- Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
- Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

hh. Program Pengembangan Perumahan:
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.

ii. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

jj. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

kk. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

ll. Program Penyelenggaraan Jalan:
- Pembangunan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
- Pembangunan Jalan Kolektor.
- Pembangunan/peningkatan jalur jalan poros.
- Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang.
- Rencana Pembangunan jalan tol baru.
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer.

- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2).
- Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3).
- Pemeliharaan jalan tol.

mm. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ):

- Pengembangan sistem angkutan umum massal.
- Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum.

nn. Program Penyelenggaraan Perkeretaapian:

- Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting antar kota.
- Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting perkotaan.
- Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api perkotaan.
- Pengembangan Stasiun Kereta Api.
- Pengembangan Stasiun Commuter Line.
- Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel.
- Pengembangan Stasiun Kereta Api berbasis Transit Oriented Development (TOD).

4.1.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Tujuan pembangunan merupakan bentuk penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah, sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih operasional untuk mengetahui keberhasilan dalam tujuan yang bermuara pada keberhasilan masing-masing misi. Tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029.

Keadaan/kondisi Kabupaten Bandung Barat yang ingin diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Visi RPJMD Kabupaten Barat 2025– 2029 merupakan arah pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang dengan kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi terkini dan tantangan pembangunan ke depan dalam mendukung dan mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dengan memperhatikan pemikiran di atas, maka Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat 2025 – 2029 adalah : **BANDUNG BARAT AMANAH" (Agamis Maju Adaptif Nyaman Aspiratif Harmonis)** yang mengandung makna bahwa sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui

pemanfaatan sumber daya alam dan keterlibatan selutuh potensi sumber daya manusia yang dapat mengemban kepercayaan masyarakat, makna dan pokok-pokok visi AMANAH dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Visi		Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"A M A N A H"	**AGAMIS**	Nilai Religius	**AGAMIS** mengandung makna bahwa nilai-nilai religius menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Agamis juga berarti mengedepankan prinsip-prinsip agama dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang baik
	MAJU	Pengembangan Ekonomi	**MAJU** mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat Bandung Barat yang unggul, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan berbasis potensi lokal guna mendongkrak kesejahteraan seluruh masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan Bandung Barat di kawasan Bandung Raya dan Jawa Barat
	ADAPTIF	Tata Kelola Pemerintahan	**ADAPTIF** mengandung makna pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Visi Adaftif dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan merespons perubahan secara cepat, mengurangi prosedur yang berbelit, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
	NYAMAN	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	**NYAMAN** mengandung makna bahwa pembangunan di Bandung Barat dengan segala potensinya diarahkan dalam rangka mempercepat dan pemerataan Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Visi		Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
			hidup serta kondisi geografis yang rawan terhadap bencana serta tidak merusak lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
	ASPIRATIF	Pembangunan Sumber Daya Manusia	**ASPIRATIF** mengandung makna potensi penduduk Bandung Barat sebagai modal dasar pembangunan diarahkan dalam rangka meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pondasi yang kuat bagi generasi mendatang dengan memperhatikan nilai inklusif bagi seluruh masyarakat.
	HARMONIS	Kondisi Harmonis di Masyarakat dan Kearifan Budaya Lokal	**HARMONIS** berarti masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras berlandaskan kearifan budaya lokal serta membangun kondisi harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat

Sumber: Ranwal RPJMD Kab. Bandung Barat 2025-2029

Untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Visi diterjemahkan kedalam 6 (enam) Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 – 2029 yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rumusan Kerangka Penjabaran Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Misi		Penjelasan Misi	Langkah Penjabaran
1	Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter	Misi isi disusun dalam rangka mewujudkan mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang berakhlak, cerdas dan sehat didasari nilai-nilai religius dengan melibatkan peran keluarga serta penguatan Peran Perempuan dan Pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan
			Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)
			Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
			Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan
2	Meningkatkan Produktifitas	Misi ini bertujuan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan,

Misi		Penjelasan Misi	Langkah Penjabaran
	dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah	produktifitas ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berdaya saing dan berhasil guna dengan tidak merusak lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah
			Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan sosial
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Misi ini disusun untuk mewujudkan sistem birokrasi yang lebih sederhana dan mudah diakses, serta digitalisasi layanan publik untuk mempercepat proses perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang ketat guna terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.	Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
			Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan
			Meningkatkan Profesionalisme ASN
			Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan berbasis teknologi dan informasi
4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah	Misi ini disusun untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur dan konektifitas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
			Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah
5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	Misi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana, perubahan Iklim serta ketahanan air dan kemandirian pangan	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat
			Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
			Ketahanan Daerah terhadap bencana, perubahan iklim dan kemandirian pangan
6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan	Misi ini disusun untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang	Meningkatkan kondusivitas wilayah
			Meningkatkan Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa
			Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa
			Meningkatkan Pelestarian dan

Misi	Penjelasan Misi	Langkah Penjabaran
Budaya Lokal	harmonis serta penguatan pembangunan desa berbasis kearifan budaya lokal	Pemajuan Kebudayaan

Sumber: Ranwal RPJMD Kab. Bandung Barat 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025- 2029 terdiri dari 8 (delapan) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

9. Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak, dengan sasaran:
   5) Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak
   6) Kesehatan yang berkualitas untuk semua
   7) Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
10. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas, dengan sasaran:
   8) Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan
11. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran:
   8) Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi
   9) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
   10) Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja
12. Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:
   11) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif
   12) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital
   13) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
13. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah, dengan sasaran:
   13) Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman
   14) Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah

14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh, dengan sasaran:
   15) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

16) Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan

15. Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah, dengan sasaran:

16) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan

16. Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal, dengan sasaran:

18) Meningkatnya Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa

19) Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran dan indikator beserta target pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 adalah sebagia berikut:

Tabel 4.7 Tujuan, Sasaran, Indikator beserta Target Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN		SATUAN	Capaian 2024	TARGET	
							Tahun 2025	Tahun 2026
1	**I**	**Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter**						
1.1	**1**	**Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak**	**1**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**70,77**	**71,33**	**72,14**
	1	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	**Poin**	-	60	64
	2	Kesehatan yang berkualitas untuk semua	2	Umur Harapan Hidup	Poin	75,06	75,28	75,62
			3	Prevalensi Stunting	% SSGI	30,80	24,11	19,97
	3	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	4	Harapan Lama Sekolah	Poin	12,00	12,01	12,04
			5	Rata - Rata Lama Sekolah	Poin	8,24	8,25	8,27
1.2	**2**	**Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas**	**2**	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**Poin**	**6,12**	**6,91**	**63,11**
	4	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	6	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Poin	70,15	70,60	71,00
			7	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	-	43,85	44,20
2	**II**	**Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah**						
2.1	**3**	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	**3**	**PDRB per Kapita (ADHB)**	**Milyar**	**32,500**	**34,085**	**36,430**
			4	**Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi**	**Milyar**	**2,16**	**2,16**	**2,17**
	5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	5,07	5,21
			9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	63,85	64,05	65,00
			10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Poin	12.639,69	13.542,27	14.349,61
			11	Tingkat Inflasi	%	1,46	1,01 - 2,00	1,01 - 2,00
	6	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	12	Tingkat Kemiskinan	%	10,49	9,98	9,63
			13	Rasio Gini	Poin	0,400	0,369	0,367

	7	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,70	6,58	6,28
3	**III**	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel**						
3.1	**4**	**Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan**	**5**	**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**	**Poin**	**3,72**	**3,80**	**3,92**
	8	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,77	81,58	82,41
	9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	16	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	0	1,0	1,2
	10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26	85,94	86,38
4	**IV**	**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah**						
4.1	**5**	**Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah**	**6**	**Indeks Infrastruktur**	**Poin**	**-**	**71,84**	**74,5**
	11	Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	-	43,29	45,68
	12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	19	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55	25,11	24,67
5	**V**	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan**						
5.1	**6**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh**	**7**	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	Persen	N/A	**2,63**	**2,94**
	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59	59,84
			21	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif	Ton Co2eq	N/A	116.125,67	232.251,34
	14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan	22	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62	81,32	80,68

6	**VI**	**Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal**						
6.1	**7**	**Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah**	**8**	**Indeks Harmoni**	**Poin**	N/A	6,5	6,6
	15	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan	23	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Poin	-	58,48	59,42
6.2	**8**	**Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal**	**9**	**Indeks Desa**	**Poin**	**0,8436**	**0,7585**	**0,7765**
	16	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	24	Presentase Desa Mandiri	Poin	60,60	18,79	33,94
	17	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	57,58	58,50

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaen Bandung Barat, perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029. Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

NO	TUJUAN / SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1.1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berakhlak**				
	1	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan	Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan
					Peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan
					Peningkatan kesempatan dan Kebebasan Beribadah
					Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama
	2	Kesehatan yang berkualitas untuk semua	2	Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
					Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan
					Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
					Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
					Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
					Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
					Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
					Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
	3	Pendidikan yang berkualitas dan Merata	3	Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Percepatan wajib belajar 13 tahun
					Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
					Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik
					Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar

					Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
					Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
					Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah
					Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
					Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
					Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
					Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
					Peningkatan kegemaran membaca masyarakat
1.2	**Terwujudnya keluarga yang berkualitas**				
	4	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak serta meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	4	Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Pengendalian Rata-rata Angka Kelahiran (TFR)
					Peningkatan Prevalensi kontrasepsi modern
					Peningkatan Layanan KB dan kesehatan reproduksi
					Peningkatan ketahanan keluarga
					Pemberdayaan perempuan melalui penguatan kapasitas dan kemandirian perempuan
					Peningkatan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan
					Penguatan pengarusutamaan gender
					Pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak
					Pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak
					Pemenuhan hak dan perlindungan pemuda terhadap pengaruh destruktif
					Pemberdyaan dan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
					Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan pemuda kader
					Pemberdayaan dan pengembangan pemuda pada organisasi kepemudaan dan kepramukaan
					Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
					Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
					Peningkatan SDM Keolahragaan
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga

					Peningkatan Prestasi Olahraga
					Penyediaan sistem data keolahragaan terpadu
2.1	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**				
	5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	5	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan yang terintegrasi melalui modernisasi dan implementasi teknologi
					Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan
					Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi
					Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan & ekonomis
					Pengendalian kesehatan ternak
					Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
					Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)
					Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif
					Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
					Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
					Peningkatan Sarana Prasarana jaringan distribusi perdagangan
					Penguatan pengendalian inflasi daerah serta Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
					Peningkatan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat
					Pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah
					Peningkatan standar dan daya saing produk IKM

					Peningkatan koperasi aktif dan sehat
					Peningkatan kompetensi SDM pengelola koperasi
					Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
					Pembentukan dan pengembangan Koperasi desa Merah putih
					Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) serta penerapan teknologi dan kemitraan UMKM
					Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis UMKM
					Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
					Peningkatan produktivitas BUMD
	6	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	6	Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta mengurangi pengangguran	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perluasan penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
					Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran melalui pengelolaan Data masyarakat Miskin
					Pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dalam mencegah kemiskinan baru
					Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
					Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	7	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja			Meningkatkan skill dan keterampilan tenaga kerja
					Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
					Peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor potensial
3.1		**Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan**			
	8		7		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah

		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif		Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
					Penguatan kerjasama strategis antar daerah
					Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
					Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
					Center of excelent pengadaan barang jasa
					Peningkatan kualitas penganggaran dan pengawasan
					Peningkatan kualitas dan keselarasan Perencanaan pembangunan
					Sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
					Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
					Penguatan tata kelola kebijakan dan implementasi Satu Data Indonesia (SDI)
					Peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi
					Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
					Peningkatan kualitas dan pemantapan manajemen ASN
					Peningkatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
					Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
					Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah
					Pengembangan ekosistem inovasi dalam tata kelola pemerintahan
					Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif
					Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah
					Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah
					Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance
					Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
					Meningkatkan perngelolaan arsip dinamis dan arsip statis

	9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik			Pembangunan ekosistem digital melalui penguatan infrastruktur TIK, peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK, literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital
					Pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage
					Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet
					pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
					Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
					Peningkatan layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informasi
	10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
					Peningkatan layanan administasi kependudukan dan pencatatan sipil
					Peningkatan layanan dan kemudahan perijinan
					Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan
4.1	**Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah**				
	11	Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	8	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan dasar dan pelayanan Publik serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat berbasis spasial	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak
					Percepatan penyediaan infrastruktur air minum
					Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya
					Pemenuhan, penyediaan dan percepatan pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi
					Peningkatkan akses sanitasi
					Percepatan penanganan dan penataan kawasan kumuh
					Peningkatan pelayanan PSU perumahan formal
					Peningkatan layanan pemakaman umum bagi masyarakat
					Peningkatan pembangunan sistem drainase
					Pemeliharaan dan penataan bangunan gedung milik daerah
					Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah
					Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah dan RDTR
					Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C

					Penyelenggaraan penatagunaan tanah sesuai tata ruang
	12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah			Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik
					Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik
					Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal
					Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
5.1	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh**				
	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	9	Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat dan meningkatkan ketahanan daerah serta kemandirian pangan	Pengendalian dan pemantauan pencemaran udara
					Pengendalian dan pemantauan pencemaran air sungai serta buangan air limbah domestik dan industri
					Meningkatkan pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS)
					Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
					Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu
					Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy
					Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri
					Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah
					Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah dan RDTR
	14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan			Peningkatan ketahanan bencana
					Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan
					Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
					Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
					Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana
					Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian serta penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
					Peningkatan diversifikasi pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

					Peningkatan Ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan
6.1	**Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah**				
	15	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	10	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
					Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
					Peningkatan penegakan Perda dan Perkada
					Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan
					Penanganan Bencana dan Penyelamatan korban bencana
					Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
					Penguatan ideologi pancasila dan karekter kebangsaan
					Penguatan peran pemerintah daerah kehidupan demokrasi yang sehat dan Penguatan integritas partai politik
6.2	**Meningkatnya Pembangunan Berbasis desa dan budaya lokal**				
	16	Meningkatnya Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa	11	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa	Penguatan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					Peningkatan pengelolaan adminsitrasi dan keuangan desa
					Peningkatan kerjasama dan penguatan kelembagaan ekonomi desa
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
					Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
					Pemberdayaan Masyarakat Desa
	17	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	12	Pemajuan Kebudayaan	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat berasaskan kepada Pancasila
					Pelestaraian Warisan Budaya Tak Benda dan cagar budaya
					Pengembangan Kesenian Tradisional
					Penguatan ideologi pancasila dan karekter kebangsaan

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pedoman bagi pelaksanaan program– program perangkat daerah untuk fokus pada penanganan yang bersifat prioritas dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

4.1.5 Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada tahun 2026 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, terdiri dari 6 (enam) prioritas pembangunan, mencakup:

7) **Prioritas 1**, yaitu Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter
8) **Prioritas 2**, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah
9) **Prioritas 3**, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel
10) **Prioritas 4**, yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah
11) **Prioritas 5**, yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan
12) **Prioritas 6**, yaitu Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, fokus atau tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat pada RPJMD Tahun 2025-2029 per tahun menjadi tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Bandung Barat 2026 yaitu **"Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah"**.

Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan telah ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan cara untuk mewujudkan setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan diatas, membutuhkan program yang tepat selanjutnya disebut program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah selain dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah daerah, juga ditujukan untuk melaksanakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan 32 (tiga puluh dua) program prioritas Kepala Daerah untuk selanjutnya diterjemahkan sesuai dengan nomenklatur program menjadi 87 program prioritas, dalam rangka mendukung prioritas pembangunan tahun 2026 dengan lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1: Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter, terdiri dari 10 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 14 Program Prioritas, yaitu:

33. Peningkatan Kesejahteraan SDM Keagamaan,
34. Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan termasuk Pesantren
    dengan Program Prioritas:
    5) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
35. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah
    dengan Program Prioritas:
    6) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
36. Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
37. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PUSKESDES)
38. Penanganan stunting dan peningkatan gizi
    dengan Program Prioritas:
    7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
39. Penempatan Tenaga Kesehatan Desa
    dengan Program Prioritas:
    6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

40. Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan

dengan Program Prioritas:

8) Program Pengelolaan Pendidikan
9) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

41. Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

dengan Program Prioritas:

13) Program Pembinaan Keluarga Berencana
14) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
15) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
16) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
17) Program Pemenuhan Hak Anak

42. Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan

dengan Program Prioritas:

15) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
16) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Prioritas Daerah 2: Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah, terdiri dari 7 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 21 Program Prioritas, yaitu:

43. Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital
44. Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa

dengan Program Prioritas:

20) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
21) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
22) Program Penyuluhan Pertanian
23) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
24) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

45. Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf

dengan Program Prioritas:

25) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
26) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
27) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

28) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
29) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

46. Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah
dengan Program Prioritas:
27) Program Pengembangan UMKM
28) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

47. Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat
dengan Program Prioritas:
31) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
32) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
33) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
34) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

48. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif
dengan Program Prioritas:
34) Program Rehabiliasi Sosial
35) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
36) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

49. Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja
dengan Program Prioritas:
36) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
37) Program Penempatan Tenaga Kerja

Prioritas Daerah 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel, terdiri dari 5 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 20 Program Prioritas, yaitu:

50. Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
dengan Program Prioritas:
46) Program Perekonomian Dan Pembangunan
47) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
48) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
49) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
50) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

51) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
52) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
53) Program Penyelenggaraan Pengawasan
54) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
55) Program Pengelolaan Arsip

51. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan
dengan Program Prioritas:
47) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
52. Meningkatkan Profesionalisme ASN
dengan Program Prioritas:
49) Program Kepegawaian Daerah
50) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
53. Penguatan Pembangunan Smartcity
54. Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan
dengan Program Prioritas:
56) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
57) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
58) Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik
59) Program Pendaftaran Penduduk
60) Program Pencatatan Sipil
61) Program Pelayanan Penanaman Modal
62) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Prioritas Daerah 4: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah, terdiri dari 2 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 8 Program Prioritas, yaitu:

55. Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
56. Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan
dengan Program Prioritas:
64) Program Kawasan Permukiman
65) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

66) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
67) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
68) Program Pengembangan Permukiman
69) Program Penyelenggaraan Jalan
70) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
71) Program Pengelolaan Pelayaran

Prioritas Daerah 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan, terdiri dari 3 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 13 Program Prioritas, yaitu:

57. Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup
    dengan Program Prioritas:
    67) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    68) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
    69) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
58. Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga
    dengan Program Prioritas:
    69) Program Pengelolaan Persampahan
    70) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
59. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah
    dengan Program Prioritas:
    77) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    78) Program Penanggulangan Bencana
    79) Program Penanganan Bencana
    80) Program Pengembangan Perumahan
    81) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
    82) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    83) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
    84) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Prioritas Daerah 6: Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan

Budaya Lokal, terdiri dari 5 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 11 Program Prioritas, yaitu:

60. Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan
    dengan Program Prioritas:
    81) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    82) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
    83) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
    84) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
61. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
62. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
63. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
    dengan Program Prioritas:
    86) Program Penataan Desa
    87) Program Administrasi Pemerintahan Desa
    88) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
    89) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
    90) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
64. Pemajuan Kebudayaan, dengan Program Prioritas:
    88) Program Pengembangan Kebudayaan
    89) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tabel 4.9 Prioritas, Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

NO			MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
1			Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter					
1.1	1		Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak		Indeks Pembangunan Manusia			
	1		Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)			
		1.1	Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan	1	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan yang	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra Setda
		1.2	Peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan	2	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan			
		1.3	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kebebasan beribadah	3	Indeks kerukunan Umat Beragama	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
	2		Kesehatan yang berkualitas untuk semua	2	Umur Harapan Hidup			
				3	Prevalensi Stunting			
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	4	Angka kematian ibu	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				5	Angka kematian bayi			
				6	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis			
				7	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis			
				8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional			
				9	Presentase ketersediaan sapras kesehatan yang memenuhi standar			
				10	Cakupan Layanan Intervensi Balita dan Ibu Hamil bermasalah gizi			
		2.2	Meningkatnya kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan	11	Presentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		2.3	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	12	Presentase cakupan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan perijinan makanan minuman	5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	3		Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	4	Harapan Lama Sekolah			
				5	Rata - Rata Lama Sekolah			
		3.1	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	13	APS usia 5-6	6	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
				14	APS usia 7-15			
				15	APS usia 7 - 18 Kesetaraan			
		3.2	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	16	Rasio Guru/Murid PAUD	7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				17	Rasio Guru/Murid SD			
				18	Rasio Guru/Murid SMP			
1.2	2		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			
	4		Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	6	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)			
				7	Indeks Pembangunan Pemuda			
		4.1	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	19	Total Fertility Rate (TFR)	8	Program Pengendalian Penduduk	BPS/DP2KBP3A
		4.2	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	20	Indeks Kerentanan Keluarga	9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
				21	Median Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP)			
				22	Indeks Lansia Tangguh			
		4.3	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam pembangunan	23	Presentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhuk sosek	10	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
		4.4	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	24	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar	11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		4.5	Terjaminnya pemenuhan semua hak anak secara kemprehensif	25	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	12	Program Pemenuhan Hak Anak	
		4.6	Meningkatnya layanan kepemudaan dan daya saing pemuda	26	Presentase layanan kepemudaan	13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
		4.7	Meningkatnya pembangunan olahraga dan prestasi olahraga	27	Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				28	Indeks SDM Keolahragaan			
				29	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga			
				30	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi			

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME			INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME			PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
2			Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah					
2.1	3		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		PDRB per Kapita (ADHB)			
					Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi			
	5		Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	8	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
				9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah			
				10	Pembentukan Modal Tetap Bruto			
				11	Tingkat Inflasi			
		5.1	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	31	Persentase Sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
				32	Persentase peningkatan produksi peternakan			Dispernakan
		5.2	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	33	Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasana	16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
				34	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik			Dispernakan
		5.3	Meningkatnya kapasitas SDM pelaku pertanian dan peternakan	35	Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	17	Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
				36	Presentase SDM petani yang ditingkatkan kompetensinya			
				37	Presentase kelompok peternakan yang dibina			Dispernakan
		5.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	38	Presentase luas layanan irigasi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUTR
		5.5	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	39	Jumlah produksi perikanan budidaya	18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispernakan
		5.6	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	40	Jumlah produksi perikanan tangkap	19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		5.7	Meningkatnya produksi hasil olahan ikan	41	Jumlah produksi olahan ikan	20	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		5.8	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	42	Peresentase pengembangan daya tarik wisata yang siap kunjung	21	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Disparbud
		5.9	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	43	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi	22	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		5.10	Meningkatnya produktivitas koperasi	44	Presentase koperasi yang berkualitas	23	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop UKM
		5.11	Meningkatnya kapasitas UMKM	45	Pertumbuhan Wirausaha	24	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
		5.12	Meningkatnya daya saing UMKM	46	Presentase pengembangan UMKM	25	Program Pengembangan UMKM	
		5.13	Meningkatnya potensi investasi daerah / Meningkatnya investasi	47	Persentase Peningkatan Dokumen Investasi yang Siap ditawarkan kepada Investor	26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		5.14	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegrasi	48	Presentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag
		5.15	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	49	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		5.16	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	50	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	29	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		5.17	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	51	Presentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	30	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag
		5.18	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	52	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag. Perekonomian
	6		Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	12	Tingkat Kemiskinan			
				13	Rasio Gini			
		6.1	Meningkatnya rehabilitasi sosial	53	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	31	Program Rehabiliasi Sosial	Dinsos
		6.2	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	54	Presentase penerima manfaat (individu/keluarga miskin) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				55	Presentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindugan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan			
				56	Presentase pengelolaan data kemiskinan daerah			
		6.3	Meningkatnya pencegahan terhadap berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	57	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	33	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim
	7		Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
		7.1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	58	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	34	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		7.2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	59	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	35	Program Penempatan Tenaga Kerja	

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME			INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS		PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
3			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel					
3.1	4		Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)			
	8		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	15	Indeks Reformasi Birokrasi			
		8.1	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	60	Persentase produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Hukum Setda
		8.2	Meningkatnya kerja sama strategis Regional yang ditindaklanjuti	61	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti			Bag. Tapem Setda
				62	Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan			
		8.3	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	63	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	36	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag. Pemb. Setda
		8.4	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	64	Tingkat kematangan UKPBJ			Bag ULP Setda
		8.5	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Perpu	65	Presentase pembentukan Ranperda Tahun n	37	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				66	Ketepatan penetapan perda APBD Tahun n			
		8.6	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	67	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			
				68	Persentase peningkatan kapasitas DPRD			
		8.7	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	69	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	38	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				70	Presentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan			
		8.8	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang PPM, Ik dan PSDA	71	Persentase Capaian program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	39	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				72	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
				73	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA			
		8.9	Meningkatnya pamanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi dalam perencanaan	74	Indeks inovasi daerah	40	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
		8.10	Meningkatnya tata kelola anggaran	75	Presentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	41	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
				76	Presentase alokasi belanja infrasturktur pelayanan publik			
		8.11	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	77	Presentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar			
				78	Presentase penurunan silva			
		8.12	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan	79	Presentase laporan keuangan tepat waktu			
		8.13	Meningkatnya tata kelola aset daerah	80	Presentase penambahan nilai aset tetap	42	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		8.14	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	81	Persentase Peningkatan Pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah	43	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
		8.15	Meningkatnya kualitas layanan adm. Kepegawaian	82	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	44	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		8.16	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	83	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi			
		8.17	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	84	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin			
		8.18	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	85	Nilai Aspek Pengembangan Karir	45	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		8.19	Menurunnya kejadian penyelewengan/penyimpangan baik yang bersipat anggaran atau proses dan kewenangan	86	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	46	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		8.20	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	87	Nilai Peningkatan Kapabilitas APIP	47	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
				88	Nilai Survey Penilaian Integritas			
		8.21	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	89	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	48	Program Pengelolaan Arsip	Disarpus
				90	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	9		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	16	Indeks Pemerintahan Digital			
		9.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menunjang transformasi digital	91	Nilai Strategi dan Rencana Pemdigi	49	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfotik
				92	Nilai Teknologi Digital			
		9.2	Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral dalam rangka mendukung penyelenggaraan SDI	93	Nilai implementasi prinsip Satu Data Indonesia	50	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				94	Nilai Kualitas Data staitsik			
				95	Nilai Proses Bisnis statistik			
	10		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	17	Indeks Kepuasan Masyarakat			
		10.1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemda	96	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemda	51	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfotik
		10.2	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	97	Presentase kepemilikan identitas kependudukan digital	52	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
				98	Presentase kepemilikan kartu identitas anak			
		10.3	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	99	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	53	Program Pencatatan Sipil	
				100	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
				101	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
				102	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
		10.4	Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan	103	Persentase Waktu Proses Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	54	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		10.5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	104	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16 Kecamatan

NO			MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
4			Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah					
4.1	5		Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah		Indeks Infrastruktur			
	11		Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak			
		11.1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	105	Presentase luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani	56	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		11.2	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	106	Presentase peningkatan PSU perumahan formal yang sudah serah terima	57	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
		11.3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	107	Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum	58	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR
		11.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	108	Presentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		11.5	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	109	Presentase cakupan drainase dalam kondisi baik	60	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
		11.6	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	110	Presentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	61	Program Pengembangan Permukiman	
	12		Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	19	Indeks Kesulitan Geografis			
		12.1	Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	111	Persentase jalan dalam kondisi baik	62	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
		12.2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	112	Konektifitas transportasi darat	63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		12.3	Meningkatnya kualitas layanan transportasi pelayaran	113	konektifitas transportasi pelayaran	64	Program Pengelolaan Pelayaran	
5			Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan					
5.1	6		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh		Penurunan Intensitas Emisi GRK			
	13		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
				21	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif			
		13.1	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	114	Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat	65	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		13.2	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3	115	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3	66	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	
		13.3	Meningkatnya tata kelola persampahan	116	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	67	Program Pengelolaan Persampahan	
				117	Presentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			
		13.4	Meningkatnya penyediaan sarpras persampahan	118	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana persampahan	68	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUTR
	14		Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan	22	Indeks Resiko Bencana			
		14.1	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	119	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	69	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		14.2	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	120	Presentase penanganan tanggap darurat bencana			
		14.3	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	121	Presentase penanganan pasca bencana			
		14.4	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	122	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	70	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		14.5	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga korban bencana	123	Presentase penanganan rumah korban bencana	71	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan
		14.6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	124	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	72	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
		14.7	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap ketahanan air dan banjir	125	Kapasitas Air Baku	73	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
				126	Presentase perlindungan rawan banjir			
		14.8	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	127	Presentase penanganan bencana pertanian	74	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
				128	Presentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian			
				129	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak			Dispernakan
		14.9	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian	130	Presentase sarpras pangan yang terbangun	75	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPP
		14.10	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	131	Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)	76	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				132	Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)			

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME			INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS		PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
6			Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
6.1	7		Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah		Indeks Harmoni			
	15		Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan	23	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
		15.1	Meningkatnya penanganan ganguan ketentraman dan ketertiban umum	133	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	77	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		15.2	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	134	Persentase Cakupan perlindungan masyarakat			
		15.3	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	135	Presentase penegakan perda dan perkada			
				136	Persentase PPNS yang telah mengikuti peningkatan kapasitas			
		15.4	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran	137	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	78	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Disdamkar & Penyelamatan
		15.5	Meningkatnya kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana	138	Presentase penanggulangan bencana		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		15.6	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	139	Presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	79	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
		15.7	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	140	Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
		15.8	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	141	Presentase konflik sosial yang diselesaikan	80	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
6.2	8		Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal		Indeks Desa			
	16		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	24	Presentase Desa Mandiri			
		16.1	Meningkatnya kualitas penataan desa	142	Presentase fasilitasi penataan desa	81	Program Penataan Desa	DPMD
		16.2	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengasawan pemerintahan desa	143	Presentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	82	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				144	Presentase fasilitasi tata kelola desa			
		16.3	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	145	Presentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakat desa	83	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum	
		16.4	Meningkatnya lembaga kemasyarakatn yang aktif dalam pembangunan	146	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16 Kecamatan
		16.5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	147	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	85	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	17		Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	25	Indeks Pembangunan Kebudayaan			
		17.1	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	148	Presentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	86	Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
		17.2	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	149	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	87	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Selanjutnya dalam rangka untuk mendukung 32 program prioritas pembangunan disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk **"12 (dua belas) Amanah Ngawangun Bandung Barat"** dengan penjelasan sebagai berikut:

13. Amanah Kahiji

yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan, dilaksanakan melalui: Pemberian insentif guru ngaji dan ustadz; Pemberian insentif Marbot Masjid dan pengelola tempat ibadah; Pendataan, pelatihan, dan sertifikasi bagi pengajar, guru ngaji dan marbot; Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi sarana keagamaan; Peningkatan nilai hibah kelembagaan keagamaan; Pendampingan dan tata kelola manajemen sarana peribadatan; Renovasi sarana peribadatan; Digitalisasi layanan peribadatan; Peningkatan moderasi dalam beragama; Pendidikan karakter dengan pemusatan pendidikan masing-masing pemeluk agama di usia sekolah; Pendidikan karakter melalui penguatan keagamaan di sekolah dasar dan Kehadiran pejabat pemerintah daerah dalam acara keagamaan.

14. Amanah Kadua

yaitu eningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting), dilaksanakan melalui: Membentuk Satuan Gugus Tugas Kesehatan sampai tingkat desa; Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan puskesmas; Penguatan kapasitas pos kesehatan desa; Pengadaan ambulance desa; Pemberian pelayanan kesehatan yang cepat dan ramah; Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan obat – obatan; Peningkatan pelayanan kesehatan melalui mobil kesehatan ke setiap desa; Peningkatan peran puskesmas pembantu terintegrasi di setiap desa; Akses pelayanan kesehatan gratis; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan rumah sakit daerah; Meningkatkan peran puskesmas pembantu di desa dalam pelayanan kesehatan; Meningkatkan peran posyandu dalam pemberian gizi ibu hamil dan anak balita; Meningkatkan kualitas kesehatan di sekolah-sekolah melalui peran puskesmas pembantu; Penambahan fasilitas Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan); SATU NAFAS DESA (Satu Nakes dan Satu Faskes di setiap Desa); Peningkatan kapasitas kader posyandu; Pemberian makan siang bergizi bagi siswa pendidikan dasar; Pemberian bantuan pangan, sandang dan papan dan Pemberian susu dan telur gratis bagi ibu menyusui dan balita.

15. Amanah Katilu

yaitu Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dilaksanakan melalui: Program PARENTING (Pemberian edukasi wajib belajar terhadap orang tua bahwa wajib belajar itu penting); Bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah desa dan sektor swasta mengembangkan pusat-pusat belajar masyarakat di desa; Pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan bansos bagi siswa tidak mampu; Memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pendidik; Penguatan wajib belajar melalui bantuan penyetaraan pendidikan, pemberantasan buta huruf dan pemberantasan putus sekolah; Pemberian bantuan jaringan internet gratis bagi seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah; Membangun sekolah-sekolah baru dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi; Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai bagi masyarakat; dan Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan sekolah - sekolah desa.

16. Amanah Kaopat

yaitu Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan, dilaksanakan melalui: Peningkatan pembangunan sarana olahraga; Pekan olahraga antar sekolah SD dan SMP; Pekan olahraga antar kecamatan; Tata kelola sarana olah raga yang baik; Pembinaan kelembagaan pemuda; Pelatihan dasar kepemimpinan; Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda; Memberikan advokasi pertanian terhadap pemuda; Penguatan advokasi kepada calon pengantin; Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan; Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak; Penguatan dan pengembangan kelembagaan perempuan dan anak; Pemberdayaan peranan perempuan di bidang ekonomi;

17. Amanah Kalima

yaitu Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah, dilaksanakan melalui: Mendorong kebijakan pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif; Fasilitasi hasil produk UMKM; Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM dan akses modal UMKM; Program One Village One Product; Fasilitasi jejaring dan bantuan permodalan bagi UMKM; Pemberian bantuan pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); Mendorong investasi dan pengembangan pariwisata berbasis desa; Mendorong investasi tempat wisata baru; Fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif masyarakat; Pemberian penyuluhan, pembinaan & pelatihan bagi remaja dlm bid. digital & Ekraf; Pembangunan gedung creative centre untuk kreativitas milenial; Job Fair / Bandung

Barat Job Fair; Pembangunan sumber air pertanian (sal. irigasi, pompanisasi, sumur bor dan kantung air); Pembangunan jalan pertanian dan optimalisasi lahan pertanian; Pemberian kebutuhan benih yang berkualitas; Bantuan sarana dan prasarana pertanian; Pengembangan peternak melalui bantuan bibit dan pakan ternak; Fasilitasi pengolahan hasil pertanian; Mendorong pembangunan pertanian terintegrasi; Fasilitasi insentif modal usaha pertanian, peternakan dan perikanan; Pelayanan kesehatan ternak; Diversifikasi/klusterisasi sistem pertanian; Menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan; Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan; Pemberian Bibit Kepada Para Petani Dengan Kualitas Yang Unggul; Subsidi bebas PBB bagi lahan sawah yang dilindungi; Pembentukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; Modernisasi pengolahan lahan pertanian; Pembangunan sentra-sentra pemasaran produk unggulan; Revitalisasi teknik tradisional, penggunaan bahan baku lokal, atau penemuan produk baru yang terinspirasi oleh budaya dan alam local; Pemetaan potensi sentra ekonomi; Pemberian akses permodalan bagi pelaku usaha di sentra produk local; dan Peningkatan kualitas produk unggulan desa; Fasilitasi hasil produk local.

18. Amanah Kagenep

yaitu Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan social, dilaksanakan melalui: Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin; Validasi data penduduk miskin; Pemberian bantuan pangan, sandang dan papan; Pelatihan wirausaha bagi para penyandang disabilitas; Renovasi rumah untuk lansia penyandang disabilitas; Mendirikan rumah kreatif untuk penyandang disabilitas; Pelatihan keterampilan kerja bagi para penyandang disabilitas; Mewujudkan pembangunan fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas dan Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

19. Amanah Katujuh

yaitu Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi, dilaksanakan melalui: Penguatan dan hilirisasi inovasi daerah melalui Bandung Barat Innovation Week; Menyediakan layanan pengaduan terintegrasi; Menjamin keterbukaan informasi secara digital; Penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi; Pengelolaan keuangan desa secara non tunai dan dipadukan dengan siskeudes secara online; Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah; Penguatan Satu Data Indonesia (SDI); Memperkuat pemberian insentif pajak; Integrasi sistem pemungutan pajak; Menciptakan sistem pengembangan kompetensi ASN melalui Government University; Menjamin pelaksanaan sistem merit di lingkungan ASN; Penghargaan ASN Berprestasi; Penghargaan ASN of The Month; Program FIFO (first in first out) pada pelayanan

public; Membangun Mall Pelayanan Publik Digital; Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Penyederhanaan SOP pelayanan public; Mengembangkan pelayanan jemput bola keliling (mobile); Membangun infrastruktur ICT pelayanan yang terintegrasi secara menyeluruh; Penguatan dimensi smart governance; penguatan dimensi smart branding; Penguatan dimensi smart economy; Penguatan dimensi smart society; Penguatan dimensi smart living; dan Penguatan dimensi smart environtment

20. Amanah Kadalapan

yaitu Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat, dilaksanakan melalui: Penambahan dan perbaikan akses jalan desa; Perbaikan jalan akses pariwisata; Peningkatan pembangunan listrik desa, dan jaringan internet desa; Mempercepat penataan kawasan kumuh; Pembangunan sarana air bersih, melalui pipanisasi air bersih; Penertiban tata ruang wilayah; Mendukung infrastruktur Program BRT (Bus Rapid Transit) Bandung Raya; Penataan pemakaman yang sudah teridentifikasi wakaf; Pembentukan Satuan Pengelola Pemakaman Tingkat Desa; Penyediaan air bersih untuk masyarakat desa; Penyediaan air minum untuk masyarakat desa dan Penyediaan MCK umum bagi masyarakat desa tidak mampu.

21. Amanah Kasalapan

yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah, dilaksanakan melalui: Memberikan pelatihan kebencanaan yang terencana, terukur dan berkelanjutan; Melengkapi infrastruktur penanganan kebencanaan; Meningkatkan anggaran penanganan kebencanaan; Mendorong program desa tangguh bencana; Program pemilahan sampai rumah tangga; Program pengelolaan sampah perdesaan; Program pengelolaan sampah terpadu; Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat melalui program kebersihan masyarakat; Perlindungan untuk wilayah sumber mata air; Pembangunan lahan - lahan hijau pedesaan; Pembangunan TPST (Tempat Pembuangan Sampah terpadu) dengan lokasi yang representative dan Program mengubah sampah bernilai ekonomis;

22. Amanah Kasapuluh

yaitu Meningkatkan kondusivitas wilayah, dilaksanakan melalui: Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan penegakan Perda dan Perkada serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan

23. Amanah Kasabelas

yaitu Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa, dilaksanakan melalui: Pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi RT/RW, BPD, Linmas dan Kader PKK; RT/RW Leadership Program; Pemberian insentif bagi perangkat RT/RW; Pembinaan dalam pengembangan manajemen dan SDM pengelola lembaga ekonomi desa; Menjalin kemitraan dan jaringan dlm memberikan bantuan permodalan pengembangan ekonomi desa; Pelatihan dan pendidikan manajemen dan SDM pengelola lembaga ekonomi desa; Pemilihan perangkat desa berprestasi se-Kabupaten Bandung Barat; Memberikan akses beasiswa bagi perangkat desa; Membangun kerja sama dalam rangka pemberian beasiswa perangkat desa.

24. Amanah Kaduabelas

yaitu Pemajuan Kebudayaan, dilaksanakan melalui: Festival dan pameran seni dan budaya Bandung Barat; Peningkatan pembangunan sanggar seni dan budaya serta Tata kelola sanggar seni yang baik

Tabel 4.10 Program Prioritas dan Langkah Strategis dalam Mendukung Prioritas Daerah Tahun 2026

No	Prioritas Daerah	No	32 PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	No	87 PROGRAM PRIORITAS SESUAI NOMENKLATUR	No	LANGKAH SRATEGIS 12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter	1	Peningkatan Kesejahteraan SDM Keagamaan dan Pengelola Tempat Ibadah	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan	Bag. Kesra Setda
		2	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan termasuk Pesantren					
		3	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Bakesbangpol
		4	Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2	Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)	Dinkes
		5	Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
		6	Penanganan stunting dan peningkatan gizi					
		7	Penempatan Tenaga Kesehatan Desa	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		8	Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan	6	Program Pengelolaan Pendidikan	3	Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Disdik
				7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			
		9	Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4	Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	DP2KBP3A
				9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera			
				10	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			
				11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			
				12	Program Pemenuhan Hak Anak			
		10	Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan	13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			Dispora
				14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	11	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah	DKPP Dispernakan
		12	Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa	16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
				17	Program Penyuluhan Pertanian			
				18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
				19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
		13	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf	20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata			Disparbud
				21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			
				22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			Disperindag
				23	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			Diskop UKM
				24	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro			
					Program Perekonomian Dan Pembangunan			Bag. Perekonomian Setda
		14	Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah	25	Program Pengembangan UMKM			Diskop UKM
				26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			DPMPTSP
		15	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat	27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			Disperindag
				28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
				29	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			
				30	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri			
		16	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif	31	Program Rehabiliasi Sosial	6	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan sosial	Dinsos
				32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			
				33	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Disperkim
		17	Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja	34	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			Dinsos
				35	Program Penempatan Tenaga Kerja			

No	Prioritas Daerah	No	32 PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	No	87 PROGRAM PRIORITAS SESUAI NOMENKLATUR	No	LANGKAH SRATEGIS 12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT	PERANGKAT DAERAH
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	18	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7	Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi	Setda
				36	Program Perekonomian Dan Pembangunan			
				37	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			Sekretariat DPRD
				38	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Bappelitbangda
				39	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
				40	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah			
				41	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			BKAD
				42	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			
				46	Program Penyelenggaraan Pengawasan			Inspektorat Daerah
				47	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			
				48	Program Pengelolaan Arsip			Disarpus
		19	Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan	43	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Bapenda
		20	Meningkatkan Profesionalisme ASN	44	Program Kepegawaian Daerah			BKPSDM
				45	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		21 22	Penguatan Pembangunan Smartcity Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan	49	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			Diskominfotik
				50	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
				51	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik			
				52	Program Pendaftaran Penduduk			Disdukcapil
				53	Program Pencatatan Sipil			
				54	Program Pelayanan Penanaman Modal			DPMPTSP
				55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			16 Kecamatan
4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah	23 24	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan	56	Program Kawasan Permukiman	8	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
				57	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum			
				58	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Dinas PUTR
				60	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			
				61	Program Pengembangan Permukiman			
				62	Program Penyelenggaraan Jalan			
				63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Dinas Perhubungan
				64	Program Pengelolaan Pelayaran			
5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	25	Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup	65	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
				66	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)			
				59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Dinas PUTR
		26	Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga	67	Program Pengelolaan Persampahan			Dinas Lingkungan Hidup
				68	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			Dinas PUTR
		27	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah	72	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			Dinas PUTR
				69	Program Penanggulangan Bencana			BPBD
				70	Program Penanganan Bencana			Dinsos
				71	Program Pengembangan Perumahan			Disperkim
				73	Program Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas PUTR
				74	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			DKPP
				75	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			
				76	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			

No	Prioritas Daerah	No	32 PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	No	87 PROGRAM PRIORITAS SESUAI NOMENKLATUR	No	LANGKAH SRATEGIS 12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT	PERANGKAT DAERAH
6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai kearifan Budaya Lokal	28	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan	77	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Satpol PP
				78	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			Disdamkar & Penyelamatan
				80	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan			Bakesbangpol
				79	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
		29 30 31	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	81	Program Penataan Desa	11	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa	DPMD
				82	Program Administrasi Pemerintahan Desa			
				83	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			
				84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			16 Kecamatan
				85	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
		32	Pemajuan Kebudayaan	86	Program Pengembangan Kebudayaan	12	Pemajuan Kebudayaan	Disparbud
				87	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			

Sumber: Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 beserta targetnya merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KAB/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2026	TARGET RKPD KAB. BANDUNG BARAT TAHUN 2026	KETERANGAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05 - 6,05	5,21	Target Kab/Kota berdasarkan Surat No: 2575/PR.01/PPEPD Tanggal 10 Juni 2025 Perihal Penyampaian Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025-2030
2	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta	36,42 - 38,79	36,430	
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi	%	2,14	2,17	
4	Tingkat Kemiskinan	%	8,82 - 9,63	9,63	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,88 - 6,2	6,28	
6	Rasio Gini	Poin	0,375 - 0,371	0,367	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,01	72,14	
8	Persentase Penurunan Intesitas Emisi GRK	%	2,94	2,94	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,25	59,84*	*Berdasarkan BA No: BA13/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/ B04/ 2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target IKLH Kab/Kota Lingkup Prov. Jawa Barat Tahun 2025-2045

Sumber : Target RPJMD 2025-2029, diolah

Target indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2026 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

4.1.8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sehingga diharapakan adanya keterkaitan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2026. Keselarasan Program Daerah terhadap Program Nasional menjadi faktor penting bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan. Keselarasan program Nasional, di turunkan kedalam program-program yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat, selengkapnya keterkaitan dan keselarasan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat		Program Prioritas Nasional		Program Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia						
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,	5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	9 1 11	Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif Mencapai swasembada pangan dan energi dan air	28 24 25 26	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan

	ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				Menjamin pelestarian lingkungan hidup		Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah			23	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) , sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generesi Z) dan penyandang disabilitas	1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter	8 9 10 17	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta disabilitas Pelestarian seni budaya, peningkatan eknomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	1 2 4 5 6 7 8 9	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji, Dan Pengelola Tempat Ibadah Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PUSKESDES) Penanganan stunting dan peningkatan gizi Penempatan Tenaga Kesehatan Desa

						10 32	Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan Pemajuan Kebudayaan
5	Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumberdaya alam termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi		
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	5 12 13 14	Pemberantasan kemiskinan Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan peptisida langsung ke petani Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif	11 12 13 14 15 16	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah

					-karakteristik-mandiri lainnya	17 29 30 31	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	2 3 4 7	Penyempurnaan sistem penerimaan Negara Reformasi politik, hukum dan birokrasi Pencegahan dan pemberantasan korupsi Pencegahan dan pemberantasan narkoba	18 19 20 21 22	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan Meningkatkan Profesionalisme ASN Penguatan Pembangunan Smartcity Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan

8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan tolerasi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah pendirian dan perawatan rumah ibadah	3 27	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah

Sumber : RKP Tahun 2026, diolah

4.1.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Sehingga diharapakan adanya keterkaitan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Untuk mengetahui keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026 antara Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dilihat secara parsial, karena pada prinsipnya untuk satu tujuan dan sasaran provinsi Jawa Barat bisa didukung oleh beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Kabupaten Bandung Barat. Secara rinci berikut keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat		Program Prioritas Pembangunan Jawa Barat		Program Prioritas Pembangunan Kab. Bandung Barat	
1	Mewujudkan Sumber Daya	1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang	1	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan	1 2	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji, Dan Pengelola Tempat Ibadah

	Manusia Berkarakter	6	berakhlak dan berkarakter Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 3 4 5 6	IPTEK serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi Program Peningkatan dan Pemerataan Layanan Kesehatan Primer dan Layanan Pengobatan Tradisional Program Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi dan Nutrisi bagi Anak, Balita, serta Ibu Hamil dan Menyusui Program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Lokal dan Informal Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Pemuda dan Perlindungan Kelompok Rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas)	3 4 5 6 7 8 9 10 16 32	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PUSKESDES) Penanganan stunting dan peningkatan gizi Penempatan Tenaga Kesehatan Desa Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif Pemajuan Kebudayaan
2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan	2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor	7 8 9	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Program Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri	11 12 13	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa

	yang tidak eksploitatif		unggulan daerah	10 11 12 13 14 15	Program Pengembangan Kewirausahaan Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan Program Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD Program Penguatan Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Program Pengendalian Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Program Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Program Pengembangan digitalisasi sektor Ekonomi Strategis Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan peningkatan kesejahteraan petani	14 15 17 30	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	4 5	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	16 17 18 19 20 21 22	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan Program Pengelolaan Sampah Mandiri dan Terpadu Program Pelestarian, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Ketahanan Air dan Energi Program Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	23 24 25 26 27 29 31	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

				22			
4	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	23 24 25	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	18 19 20 21 22 28	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan Meningkatkan Profesionalisme ASN Penguatan Pembangunan Smartcity Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan

Sumber : RKPD Prov. Jabar Tahun 2026, diolah

4.1.10 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Bandung Barat

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang dan pola ruang, rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044, meliputi:

f. Kebijakan Penataan Ruang

Tabel 4.14 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kab. Bandung Barat

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
Penetapan sistem pusat permukiman sesuai fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan pengembangan pusat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya	Meningkatkan peran daerah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan regional
	Meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
	Meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan perdesaan sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan
	Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Kawasan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dengan memantapkan fungsi pusat pelayanan kawasan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung
	Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai kawasan perdesaan yang berfungsi untuk melayani keg skala desa
Mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk	Menetapkan 4 (empat) WP untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah
	Mengoptimalkan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas pembangunan
	Mengarahkan pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP
	Memantapkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di setiap WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan perekonomian daerah
	Meningkatkan ketersediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap WP
Penataan dan pengembangan jaringan prasarana	Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan serta kualitas jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan antar WP
	Mengembangkan sistem angkutan umum massal
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di setiap WP

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis daerah aliran sungai untuk menunjang kegiatan perkotaan, industri, dan pertanian
	Meningkatkan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah di kabupaten, sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kegiatan perkotaan
	Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Perwujudan, pemeliharaan kelestarian dan pencegahan kerusakan kawasan lindung	Mengendalikan alih fungsi kawasan hutan
	merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi lindung
	Menyediakan pemenuhan RTH di kawasan perkotaan, paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas seluruh Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat
Perwujudan keterpaduan kawasan budi daya	Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan utk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wil. sekitarnya
	Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
	Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan
	Mengembangkan potensi kecamatan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi
	Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang bernilai ekonomi tinggi di waduk/danau untuk meningkatkan perekonomian
Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung	Membatasi pengembangan lahan terbangun di daerah bagian utara
	Mengendalikan air larian kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk mencegah erosi
	Mengendalikan pembangunan pada lahan yang melampaui daya dukung dan daya tampung
	Mengendalikan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
	Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah bagian utara

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
Pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan	Mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan padat penduduk
	Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Lembang, dan Batujajar
Mengembangkan kawasan permukiman di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung	Mengembangkan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan penduduknya dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung ruang yang ada
	Mempertahankan kawasan non terbangun di sekitar kawasan permukiman dan menjaga fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya
	Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana
Pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri	Mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Lembang
	Mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Cililin.
Pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan	Mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur utara
	Mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur selata
	Mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur barat
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan
	Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannnya
	Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun
	Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan
Pengembangan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan kegiatan ekonomi yang ada di dalam dan sekitar KSK
	Menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan masuknya investasi
	Mengembangkan kawasan tematik
Pengembangan KSK sudut kepentingan pendayagunaan	Menata kegiatan yang ada di dalam dan sekitar KSK
	Mengendalikan alih fungsi lahan

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
sumber daya alam dan teknologi tinggi	Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata
Pengembangan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Mengembangan kegiatan pertanian yang ada di dalam dan sekitar KSK
	Mengembangan pusat agobisnis
	Mengendalikan alih fungsi lahan lindung dan pertanian
	Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata
Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budi daya	Menetapkan ketentuan umum zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian KKPR untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum
	Menetapkan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UKM
	Menerapkan penilaian perwujudan RTR daerah
	Menetapkan ketentuan pemberiaan insentif dan disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk perwujudan RTRW
	Menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan yang melanggar KKPR yang diberikan
	Menjalankan penyelesaian sengketa penataan ruang dan konflik pemanfaatan ruang yang berkeadilan

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

g. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah sesuai dengan peran dan fungsi wilayahnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah lainnya. Sistem pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan menciptakan perkembangan ekonomi yang pesat. Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten, yang tersusun atas pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain berdasarkan peran dan fungsinya serta saling terhubung satu sama lainnya oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, meliputi sistem pusat permukiman, sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 4.6 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat

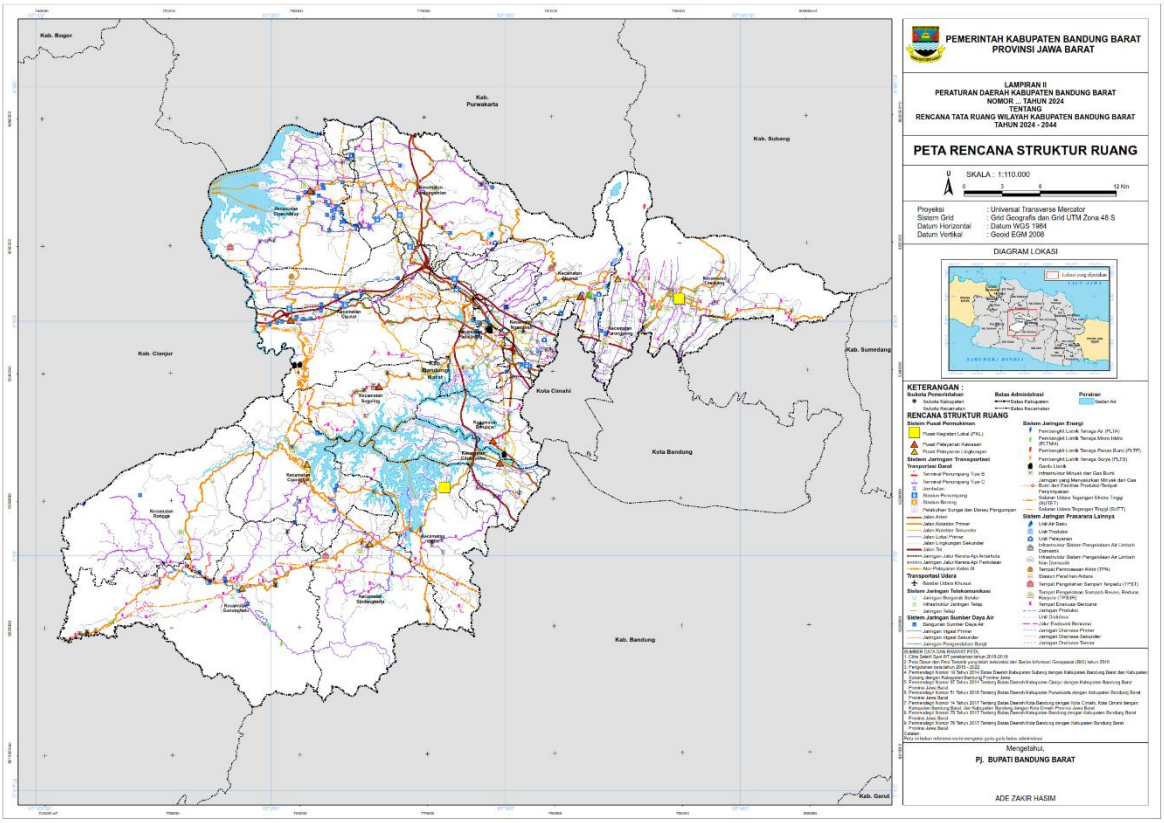

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Berdasarkan karakteristik serta fungsinya, rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dibedakan menjadi dua rencana pengembangan, yaitu rencana pengembangan sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

Rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan pusat lainnya. Rencana sistem perkotaan yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan berdasarkan rencana

hierarki kota. Titik simpul (kota-kota) berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat-pusat pelayanan. Sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/ atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.

5) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
   - Ditandai dengan adanya bandar udara skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A
   - Pusat Kegiatan Nasional Bandung Raya yang menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satunya meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cikalongwetan, sebagian Kawasan Perkotaan Batujajar, sebagian Kawasan Perkotaan Cihampelas, sebagian Kawasan Perkotaan Cililin, sebagian Kawasan Perkotaan Cipatat, sebagian Kawasan Perkotaan Cipeundeuy, dan sebagian Kawasan Perkotaan Lembang.
6) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
   - Fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan
   - PKL terletak di Kawasan Perkotaan Cililin yang berada di Kecamatan Cililin dan Kawasan Perkotaan Lembang yang berada di Kecamatan Lembang.
7) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi: Batujajar, Cihampelas, Cipatat, Cipeundeuy, Cisarua, dan Saguling.
   - Fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal
   - Selain itu juga berfungsi sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan yang berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya,
   - Didukung kelengkapan sarana minimum seperti: pasar, dan sub terminal
8) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

- Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa, meliputi: Cipongkar, Gununghalu, Parongpong, Rongga, Sindangkerta.
- Selain itu juga berfungsi sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan yang berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya, dengan didukung kelengkapan sarana minimum seperti: pasar, dan sub terminal.

Sistem jaringan prasarana di Kabupaten Bandung Barat direncanakan meliputi Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

h. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Bandung Barat dan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan. Secara umum, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan fungsi utamanya, meliputi:

3) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kabupaten Bandung Barat meliputi

- Badan air, tersebar di 13 Kecamatan
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yakni berupa kawasan hutan lindung seluas 18.103 ha, tersebar di 10 kecamatan
- Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan sungai, sempadan sekitar waduk/danau/situ, dan kawasan perlindungan setempat lainnya seluas 2.548 ha, tersebar di 13 Kecamatan
- Kawasan konservasi yang meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, terdiri dari Kawasan Suaka Alam, mencakup: Cagar Alam Junghunh di Kecamatan Lembang, Cagar Alam Gunung Tangkuban Parahu meliputi wilayah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong, Cagar Alam Burangrang meliputi Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Cisarua dan Kawasan pelestarian alam, mencakup: Taman Hutan Raya berupa Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda terletak di Kecamatan Lembang serta Taman Wisata Alam berupa Taman Wisata Alam Kawah Gunung Tangkuban Parahu meliputi Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong.

- Kawasan cagar budaya. mencakup: Teropong Bintang Bosscha di Kecamatan Lembang; Monumen/Makam Franz Wilhelm Junghuhn di Kecamatan Lembang; Stasiun Kereta Api Padalarang di Kecamatan Padalarang; Pabrik Kertas Padalarang di Kecamatan Padalarang; Situs Cagar Budaya Gua Pawon di Kecamatan Cipatat; Kampung Budaya Gua Pawon, terletak di Kecamatan Cipatat; Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro di Kecamatan Cipatat; Situs Batu Mukapayung di Kecamatan Cililin; Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin; Gedung Pemancar Radio (Telefunken/NIROM) di Kecamatan Cililin; dan Makam Tiga Waliulloh di Kecamatan Cipongkor

4) Kawasan budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah: Kawasan Hutan Produksi; Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; Kawasan Pertanian Tanaman Holtikultura; Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan; Kawasan Peternakan dan perikanan; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman; Kawasan Transportasi serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

i. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan dalam lingkup kabupaten. Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya struktur dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 4.7 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

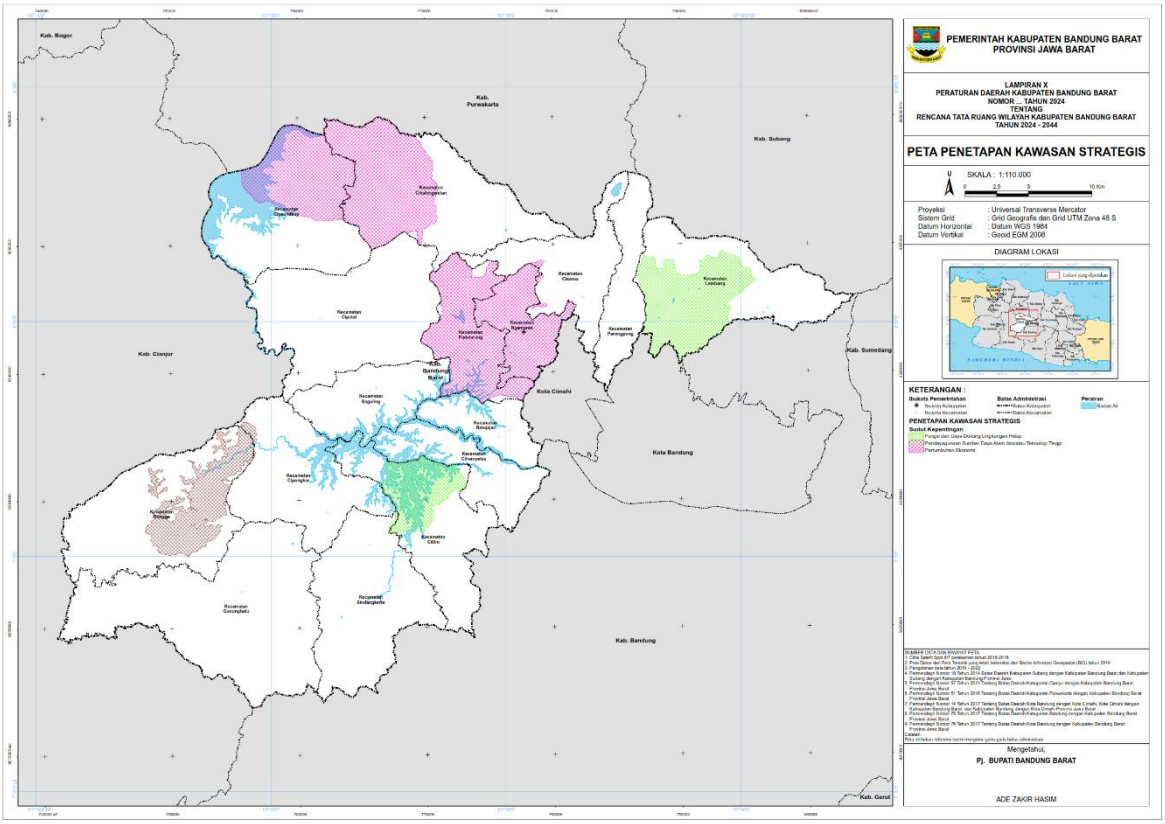

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Tabel 4.15 Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

No	Program	Lokasi
III	**Kawasan Strategis**	
III.A	**Kawasan Strategis Nasional**	
III.A.1	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	KSN Perkotaan Cekungan Bandung; KSN Teropong Bintang Bosscha
III.A.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional	
III.B	**Kawasan Strategis Provinsi**	

No	Program	Lokasi
III.B.1	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang	KSP Kawasan Bandung Urata (KBU)
III.B.2	Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	
III.B.3	Monitoring dan evaluasi	
III.B.4	Fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah	
III.B.5	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
III.B.6	Rehabilitasi Kawasan hutan, Kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang	
III.B.7	Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir Wilayah Sungai Citarum	
III.C	**Kawasan Strategis Kabupaten**	
III.C.1	**Pertumbuhan Ekonomi**	
III.C.1.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cisarua Kecamatan Ngamprah Kecamatan Padalarang
III.C.1.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.1.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.1.4	Pengembangan Kegiatan Pariwisata	
III.C.1.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
	Penataan Kawasan pusat pemerintahan	
	Penataan Kawasan sekitar Stasiun Kereta Api Padalarang	
	Penataan RTH di sekitar waduk Saguling	
	Penataan Pusat Kota Padalarang	
III.C.1.6	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cikalongwetan
III.C.1.7	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.1.8	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.1.9	Pengembangan Kegiatan Pariwisata	
III.C.1.10	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	

No	Program	Lokasi
III.C.1.11	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cipeundeuy
III.C.1.12	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.1.13	Pengembangan Sapras dan utilitas Kawasan	
III.C.1.14	Pengembangan Kegiatan Industri	
III.C.1.15	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
III.C.2	**Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**	
III.C.2.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kecamatan Cipongkor Kecamatan Rongga
III.C.2.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.2.3	perlindungan dan pelestarian Kawasan	
III.C.2.4	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.2.5	Pengembangan Kegiatan Pariwisata	
III.C.2.6	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
III.C.3	**Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**	
III.C.3.1	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kecamatan Cililin Kecamatan Lembang Kecamatan Sindangkerta
III.C.3.2	Perlindungan dan pelestarian Kawasan	
III.C.3.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.3.4	Pengembangan Agrbisnis	
III.C.3.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

j. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Dalam rencana struktur ruang RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 tertuang bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp), yaitu kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Fasilitas minimum

yang harus dimiliki Kabupaten Bandung Barat sebagai PKNp adalah pusat bisnis kegiatan utama yang akan dikembangkan dengan skala internasional maupun nasional dan akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional.

Penetapan Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dimana Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu bagiannya, didasari oleh perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pendidikan tinggi. Salah satu indikasi pesatnya perkembangan tersebut adalah tingginya alih fungsi lahan menuju kawasan perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan di Kawasan Perkotaan Bandung Raya menjadi salah satu amanat yang harus dipenuhi oleh wilayah-wilayah di dalamnya. Salah tujuannya untuk mengurangi kecendrungan alih fungsi lahan yang menerus di kawasan perkotaan, mengingat target jumlah kawasan lindung yang ditargetkan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 45%.

Dalam Rencana Struktur Ruang Dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 juga ditetapkan sistem perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, yang di dalamnya juga terdapat beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kecamatan Padalarang sebagai Kota Hierarki II serta Kecamatan Cililin, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang sebagai Kota Hierarki III.

Kawasan Bandung Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042. Saat ini, pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara tidak terkendali sehingga mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan daerah sebagai daerah tangkapan air. Kawasan Bandung Utara atau yang disingkat KBU, memiliki peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Kawasan Bandung Utara merupakan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Penataan ruang pada kawasan ini diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dan dalam berbagai aspek.

Secara administratif, Kawasan Bandung Utara meliputi sebagian Kabupaten Bandung, seluruh Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Bandung Utara yang termasuk ke dalam daerah Kabupaten Bandung Barat adalah:

7. Sebagian daerah Kecamatan Cikalongwetan
8. Kecamatan Cisarua
9. Kecamatan Lembang
10. Sebagian Kecamatan Ngamprah

11. Sebagian Kecamatan Padalarang
12. Kecamatan Parongpong

Berdasarkan pola ruang, Kawasan Bandung Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Daerah kawasan lindung Kawasan Bandung Utara yang masuk kedalam wilayah Kab Bandung Barat adalah:

5. Kawasan pelestarian alam: sebagian Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda serta Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu
6. Kawasan suaka alam: Cagar Alam Tangkuban Perahu
7. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Observatorium Bosscha
8. Kawasan rawan bencana alam geologi: Sesar Lembang

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2026 berpedoman pada rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana umat, serta hibah.

1.8 Rencana Program dan Kegiatan dalam Mendukung Arah Kebijakan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Indikator makro pembangunan terdiri dari 9 (Sembilan) indikator, yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi GRK ditambah indikator Prevalensi stunting. Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sebagaimana surat edaran dari Bappeda Provinsi Jawa Barat Nomor: 2575/PR.01/PPEPD perihal Penyampaian Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026 (untuk Kabupaten Bandung Barat yang terlebih dahulu untuk disepakati), yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1 Target Indikator Makro Tahun 2026 untuk Kabupaten Bandung Barat

LAMPIRAN
Nomor : 2575/PR.01/PPEPD
Tanggal : 10 Juni 2025
Hal : Penyampaian Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026

Kabupaten Bandung Barat

Indikator Makro	Target Kabupaten/Kota berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026
[a]	*[b]*
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05 - 6,05
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	36,42 - 38,79
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	2,14
Tingkat Kemiskinan (%)	8,82 - 9,63
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,88 - 6,2
Rasio Gini (Poin)	0,379 - 0,425
Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,01
Penurunan Intensitas Emisi GRK (ton CO_2eq/Miliar)	2,94
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	59,84
Prevalensi Stunting (%)	25,36

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

Indikator Makro Pembangunan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro pembangunan dihasilkan dari berbagai program dengan dukungan ketersediaan anggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya. Dalam rangka pencapaian target indikator makro Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 perlu adanya penyelarasan dari semua pemangku kepentingan dengan dukungan program dan pendanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Kontribusi PDRB Kabupaten Bandung Barat terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat

Dalam pelaksanaan pembangunan di Bandung Barat untuk pencapaian indikator makro maka fokus utama yaitu mendorong **laju pertumbuhan ekonomi** yang berkelanjutan**,** memperbaiki **PDRB per kapita** agar lebih mencerminkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kontribusi **PDRB Kabupaten Bandung Barat terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat** sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah yang berdampak luas.

Berikut Dukungan Program dan pendanaan untuk Peningkatan **Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Kontribusi PDRB Kabupaten Bandung Barat terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat**

Tabel 5.2 Program dan pendanaan untuk Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Kontribusi PDRB Kabupaten Bandung Barat terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat

Program	Indikator	Pagu
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	920.000.000
	Persentase peningkatan produksi peternakan	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasana	1.550.000.000
	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis	2.910.000.000
	Presentase unit usaha pangan hewan yang memiliki sertifikat NKV/NKV	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Presentase ijin usaha pertanian yang terfasilitasi	42.000.000
	Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	
Program Penyuluhan Pertanian	Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	315.600.000
	Presentase SDM petani yang ditingkatkan kompetensinya	
	Presentase kelompok peternakan yang dibina	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	715.000.000
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	50.000.000
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan ikan	595.000.000
Program Pengembangan Ekraf Melalui Pemanfaatan & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual	600.000.000
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi	750.000.000
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	400.000.000
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	588.250.000
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase koperasi aktif	325.000.000
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha	705.000.000

Program Pengembangan UMKM	Presentase pengembangan UMKM	765.000.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Dokumen Investasi yang Siap ditawarkan kepada Investor	425.500.000
Program Promosi Penanaman Modal	Presentase peningkatan investor yang berinvestasi	258.500.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam pengisian LKPM	313.000.000
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	165.000.000
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	280.000.000
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	733.000.000
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang	420.164.586
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat metrologi yang sesuai standar	170.000.000
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	200.000.000
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	850.000.000
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase izin usaha industri yang diterbitkan	100.000.000
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	300.000.000

5.1.2 Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini

Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi secara umum. Sementara itu, **Rasio Gini** menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan

Untuk mencapai target indikator makro Kabupaten Bandung Barat tahun 2026, khususnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki pemerataan pendapatan yang diukur melalui Rasio Gini, diperlukan upaya kolaboratif dan terarah dari seluruh pemangku kepentingan. Berikut Dukungan Program dan pendanaan untuk penurunan Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini :

Tabel 5.3 Program dan pendanaan untuk penurunan Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini

Program	Indikator	Pagu
Program Pemberdayaan Sosial	Presentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS	111.562.400
Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	229.527.200
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase penerima manfaat (individu/keluarga miskin) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.478.318.000
	Presentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindugan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	
	Presentase pengelolaan data kemiskinan daerah	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	3.850.000.000

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah yang mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai. Masalah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga dengan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja (mismatch), rendahnya daya saing tenaga kerja, serta terbatasnya akses ke peluang ekonomi, terutama di sektor-sektor produktif. Berikut Dukungan Program dan pendanaan untuk penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) :

Tabel 5.4 Program dan pendanaan untuk penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Program	Indikator	Pagu
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	742.320.600
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	400.000.000
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB dan BPJS Ketenagakerjaan)	1.500.000.000

5.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: **pendidikan** dan **kesehatan.**

Berikut Dukungan Program dan pendanaan untuk peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :**

Tabel 5.5 Program dan pendanaan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Program	Indikator	Pagu
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan yang ditindaklanjuti	3.735.920.137
	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks kerukunan Umat Beragama	336.736.500
Program Pengelolaan Pendidikan	APS usia 5-6	64.027.959.472
	APS usia 7-15	
	APS usia 7 - 18 Kesetaraan	
Program Pengembangan Kurikulum	Presentase satuan pendidikan yang yang mengambankan kurikulum muatan lokal	204.027.469
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid PAUD	11.690.287.077
	Rasio Guru/Murid SD	
	Rasio Guru/Murid SMP	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola oleh masyarakat yang telah diterbitkan atau diperbarui	127.517.168
	Persentase usulan izin satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh masyarakat, yang telah diterbitkan atau diperbarui	

5.1.5 Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian target penurunan **Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** dan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** (IKLH) merupakan bagian penting dari upaya Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengurangan emisi GRK dan peningkatan kualitas lingkungan hidup memiliki dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas udara, mengurangi perubahan iklim, dan memastikan keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. Untuk mencapai target ini pada tahun 2026 Berikut Dukungan Program dan pendanaan untuk penurunan **Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Tabel 5.6 Program dan pendanaan untuk penurunan Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Pagu

Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersediaan kajian lingkungan hidup	400.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat	525.000.000
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3	300.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Presentase peningkatan ketaatan kegiatan dan/atau usaha dalam pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup	150.000.000
Program Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Persentase lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya	650.000.000
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	200.000.000
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	200.000.000
Program Pengelolaan Persampahan	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	10.000.000.000
	Presentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase RTH Kehati yang terkelola	60.000.000
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana persampahan	5.000.000.000

5.1.6 Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas gizi dan kesehatan anak di Kabupaten Bandung Barat. Stunting, atau gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan produktivitas manusia di masa depan. Oleh karena itu, penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam mencapai target pembangunan yang berkualitas pada tahun 2026. Berikut Dukungan Program dan pendanaan untuk penurunan Stunting :

Tabel 5.7 Program dan pendanaan untuk penurunan Stunting

Program	Indikator	Pagu
	Angka kematian ibu	152.072.676.950
	Angka kematian bayi	

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	
	Presentase ketersediaan sapras kesehatan yang memenuhi standar	
	Cakupan Layanan Intervensi Balita dan Ibu Hamil bermasalah gizi	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	621.946.000
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase cakupan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan perijinan makanan minuman	958.517.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	1.500.000.000

1.9 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan pusat dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, keterkaitan secara utuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8 Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat terhadap Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Program Daerah Kabupaten Bandung Barat	Indikator Kinerja Program
P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan yang ditindaklanjuti
		Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks kerukunan Umat Beragama
	Program Pengelolaan Pendidikan	APS usia 5-6
		APS usia 7-15
		APS usia 7 - 18 Kesetaraan
	Program Pengembangan Kurikulum	Presentase satuan pendidikan yang yang mengambankan kurikulum muatan lokal

	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid PAUD
		Rasio Guru/Murid SD
		Rasio Guru/Murid SMP
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola oleh masyarakat yang telah diterbitkan atau diperbarui
		Persentase usulan izin satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh masyarakat, yang telah diterbitkan atau diperbarui
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan
		Persentase peningkatan produksi peternakan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasana
		Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis
		Presentase unit usaha pangan hewan yang memiliki sertifikat NKV/NKV
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Presentase ijin usaha pertanian yang terfasilitasi
		Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi
	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya
		Presentase SDM petani yang ditingkatkan kompetensinya
		Presentase kelompok peternakan yang dibina
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Presentase luas layanan irigasi
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan ikan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Peresentase pengembangan daya tarik wisata yang siap kunjung
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	Program Pengembangan Ekraf Melalui Pemanfaatan &	Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual

	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase koperasi aktif
	Program penguatan badan hukum koperasi	Persentase Pertumbuhan fasilitasi badan hukum koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha
	Program Pengembangan UMKM	Presentase pengembangan UMKM
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Dokumen Investasi yang Siap ditawarkan kepada Investor
	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase peningkatan investor yang berinvestasi
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam pengisian LKPM
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat metrologi yang sesuai standar
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase izin usaha industri yang diterbitkan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini

P3 : Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Penataan Desa	Presentase fasilitasi penataan desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase fasilitasi kerjasama desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya
		Presentase fasilitasi tata kelola desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakat desa
P4 : Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemda
	Program Pendaftaran Penduduk	Presentase kepemilikan identitas kependudukan digital
		Presentase kepemilikan kartu identitas anak
	Program Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
		Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Strategi dan Rencana Pemdigi
		Nilai Teknologi Digital
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai implementasi prinsip Satu Data Indonesia
		Nilai Kualitas Data staitsik
		Nilai Proses Bisnis statistik
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Keamanan Siber
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan
		Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief
		Tingkat kematangan UKPBJ
		Presentase pembentukan Ranperda Tahun n

	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Presentase ketepatan penetapan perda APBD Tahun n
		Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
		Persentase peningkatan kapasitas DPRD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah
		Presentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks inovasi daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD
		Presentase alokasi belanja infrasturktur pelayanan publik
		Presentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar
		Presentase penurunan silva
		Presentase laporan keuangan tepat waktu
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase penambahan nilai aset tetap
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah
		Presentase PAD terhadap pendapatan daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Aspek Pengembangan Karir
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Sumber: SIPD-RI Kab. Bandung Barat, 2026

1.10 Rencana Program dan Kegiatan yang Mewakili Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah secara konsisten mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme penjaringan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Rencana program dan kegiatan yang dirumuskan pada tahun perencanaan ini difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD Kabupaten Bandung Barat yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Kabupaten Bandung Barat. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiaanya, karena Pokok-pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan termasuk diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah. Gambaran Uraian Aspirasi Masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan uraian aspirasi masyarakat

Prioritas Pembangunan	Uraian	Jumlah Usulan
P1: meningkatkan kulitas sdm unggul yang berakhlak dan berkarakter	**Kesehatan**	
	#Bankeu Pembangunan PUSTU	18
	#Bankeu Rehabilitasi PUSTU	6
	#Hibah Bantuan Operasional Aids	1
	#Hibah Bantuan Operasional PMI	1
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	#Hibah Bantuan Modal PEKKA	41
	#Hibah Bantuan Operasional DWP	1

	#Hibah Bantuan Operasional Komisi Perlindungan Anak Daerah	1
	#Hibah Organisasi Wanita	7
	Pendidikan	
	#Hibah Bantuan Operasional Organisasi Profesi Pendidikan	7
	#HIBAH BOP UNTUK PKBM	31
	#HIBAH PAUD HI	26
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	#Hibah Bantuan Modal UPPKA	7
	#HIBAH FORUM POS KB	1
	#HIBAH KLP KB PRIA	1
	Sekretariat Daerah	
	#Hibah Bantuan Operasional BAZNAS	1
	#Hibah Bantuan Operasional Ormas Keagamaan	21
	#Hibah Peningkatan Sarana Keagamaan	361
	#Hibah Penyediaan Prasarana Keagamaaan	117
	Kepemudaan dan Olahraga	
	#Bankeu Rehab Prasarana Olahraga	59
	#Hibah Bantuan Operasional KNPI	1
	#Hibah Bantuan Operasional KONI	1
	#Hibah Bantuan Operasional NPCI	1
	#Hibah Oraganisasi Pramuka	1
	#Hibah Penyediaan Sarana Olahraga	34
P2: meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	#Hibah Pengembangan sentra/klaster/kelompok UMKM	48
	Pangan	
	#Hibah Pembangunan Lumbung Pangan/ gudang/Rumah RMU	2
	#Hibah Penyediaan alat pengolahan pangan	3
	Pariwisata	
	#Bankeu Pembangunan sarana dan prasarana (jalan setapak dan jalur evakuasi) desa wisata/destinasi wisata	34
	Perindustrian	
	#Hibah Sarana dan Prasarana Industri Kecil Menengah	36
	Pertanian	
	#Hibah Bantuan budidaya ternak ayam petelur	30
	#Hibah Bantuan budidaya ternak itik petelur	6
	#Hibah Bantuan budidaya ternak sapi perah	37
	#Hibah Irigasi Perpompaan dan Irigasi Perpipaan (Peternakan)	8
	#Hibah Pembangunan Green House Komposting	2
	#Hibah Pembangunan Green House Pertanian	9
	#Hibah Pembangunan Gudang atau Packing House Pertanian	3
	#Hibah Penyediaan alat mesin pertanian dan teknologi pemanfaatannya	38

	#Hibah Penyediaan Bibit rumput unggul	20
	#Hibah Penyediaan Bibit/ benih	47
	#Hibah Penyediaan Pakan Ternak	11
	#Hibah Penyediaan Peralatan Budidaya Ternak	7
	#Hibah Penyediaan Pupuk dan pestisida	8
	Jalan usaha tani	52
	Jaringan Irigasi pertanian tersier	38
	Sosial	
	#Bankeu Penguatan Puskesos Desa	4
	#Bansos Bantuan PENA	52
	#HIBAH Forum Komunkasi RBM	1
	Tenaga Kerja	
	#Hibah Bantuan LPK/BKK	3
P4 : mempercepat pembangunan infrastruktur dan aksebilitas wilayah	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	#Bankeu Jalan Desa	402
	#Hibah Jalan Desa	2
	#Hibah Jamban Sehat	11
	#Hibah PRASARANA PERSAMPAHAN	22
	#Hibah SPAM	47
	Perhubungan	
	#Bankeu SARPRAS JALAN	170
P5 : meningkatkan lingkungan hidup yang tanggu dan berkelanjutan	**Lingkungan Hidup**	
	#Hibah Sarana PENGOLAHAN SAMPAH	29
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	#Bansos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	85
P6 : mewujudkan kondisi yang harmonis di masyarakat sesuai kearifan budaya lokal	**Kebudayaan**	
	#Hibah Bantuan alat kesenian	50
	Kesatuan Bangsa dan Politik	
	#Hibah Badan Narkotika Nasional KBB	1
	#Hibah Bantuan Lilin Lodaya	1
	#Hibah Bantuan Operasional FKUB	1
	#Hibah Bantuan Operasional Ormas	20
	#Hibah Bantuan Pamnataru	1
	#HIBAH OPERASIONAL KPU	1
	#Hibah Parpol	13
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	#Hibah Bantuan Operasional APDESI	1
	#Hibah Bantuan Operasional Asosiasi BPD	1
	#Hibah Bantuan Operasional Kartar	6
	#Hibah Bantuan Operasional TP PKK	4
	#Hibah BSMSS	4
	#Hibah TMMD	1

Tabel 5.10 Jumlah dan Uraian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bandung Barat

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Jumlah Usulan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Bankeu Jalan Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	145
Pariwisata	#Bankeu Pembangunan sarana dan prasarana (jalan setapak dan jalur evakuasi) desa wisata/destinasi wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5
Sosial	#Bankeu Penguatan Puskesos Desa	Dinas Sosial	2
Kepemudaan dan Olahraga	#Bankeu Rehab Prasarana Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	12
Perhubungan	#Bankeu SARPRAS JALAN	Dinas Perhubungan	12
Sosial	#Bansos Bantuan PENA	Dinas Sosial	72
Perumahan dan Kawasan Pemukiman	#Bansos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7
Perumahan dan Kawasan Pemukiman	#Bansos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#Hibah PRASARANA PERSAMPAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4
Kebudayaan	#Hibah Bantuan alat kesenian	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	18
Perikanan dan Peternakan	#Hibah Bantuan budidaya ternak ayam petelur	Dinas Perikanan dan Peternakan	18
Perikanan dan Peternakan	#Hibah Bantuan budidaya ternak itik petelur	Dinas Perikanan dan Peternakan	7
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	#Hibah Bantuan Modal UPPKA	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	1
Pertanian	#Hibah Jalan usaha tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	#Hibah Jamban Sehat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1
Pertanian	#Hibah Jaringan Irigasi pertanian tersier	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
Pertanian	#Hibah Pembangunan Green House Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	#HIBAH Pengembangan sentra/klaster/kelompok UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	46
Sekretariat Daerah	#Hibah Peningkatan Sarana Keagamaan	Sekretariat Daerah	174
Pertanian	#Hibah Penyediaan alat mesin pertanian dan teknologi pemanfaatannya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16
Ketahanan Pangan	#Hibah Penyediaan alat pengolahan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
Perikanan dan Peternakan	#Hibah Penyediaan Bibit rumput unggul	Dinas Perikanan dan Peternakan	11
Perikanan dan Peternakan	#Hibah Penyediaan Bibit/ benih	Dinas Perikanan dan Peternakan	82
Perikanan dan Peternakan	#Hibah Penyediaan Pakan Ternak	Dinas Perikanan dan Peternakan	5
Perikanan dan Peternakan	#Hibah Penyediaan Peralatan Budidaya Ternak	Dinas Perikanan dan Peternakan	5
Sekretariat Daerah	#Hibah Penyediaan Prasarana Keagamaaan	Sekretariat Daerah	50
Perikanan dan Peternakan	#Hibah Penyediaan Pupuk dan pestisida	Dinas Perikanan dan Peternakan	1
Perindustrian dan Perdagangan	#Hibah Sarana dan Prasarana Industri Kecil Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	59
Lingkungan Hidup	#Hibah SARANA PENGOLAHAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup	8
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	#Hibah SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100
Perikanan dan Peternakan	#Hibah Bantuan budidaya ternak sapi perah	Dinas Perikanan dan Peternakan	9

Sumber: SIPD, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.

1.11 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang diusulan menjadi Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang didanai oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 5.11 Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2025 untuk RKPD Provinsi Tahun 2026 Provinsi Jawa Barat

USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI

#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang tidak baik di Ruas Jalan Haji Gofur - Pakuhaji	Bandung barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang tidak baik di Ruas Jalan Kalapa - Pasir Calung	Bandung barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi jalan yang tidak baik di Ruas Jalan Maribaya - Patrol	Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Jaminan Kesehatan Bagi PBPU dan BP yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Integrasi Kedalam Jaminan Kesehatan Nasional	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Pengembangan Rumah Sakit (Layanan Unggulan)	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang KJSU KIA	RSUD Cililin, Provinsi Jawa Barat
#BK Dana Operasional Posyandu Kelurahan dan TP Posyandu Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Dana Operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Tim Pembina Posyandu)	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Pengembangan Rumah Sakit (Layanan Unggulan)	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Penunjang KJSU KIA (Lab Patologi, Gedung Farmasi, Ruang operasi, Poliklinik Poli Jatung, NICU/PICU)	RSUD Cililin, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Ambulance Gawat Darurat untuk IGD Puskesmas Rawat Inap/menuju Rawat Inap	Pengadaan Ambulance Gawat Darurat	Puskesmas Gununghalu, Cililin, Batujajar, Rajamandala, Jayagiri, Cikalongwetan, Saguling, Sindangkerta, Pasirlangu, Cipeundeuy, Provinsi Jawa Barat
#BK Pengembangan Puskesmas (Rawat Inap/Menjadi rawat Inap)	Pengembangan Puskesmas menjadi Rawat Inap	Puskesmas Pasirlangu, Provinsi Jawa Barat
#BK Pengembangan Puskesmas (Rawat Inap/Menjadi rawat Inap)	Pengembangan Puskesmas menjadi Rawat Inap	Pusekesmas Cipeundeuy, Provinsi Jawa Barat
#BK Bantuan Keuangan Khusus Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Pengembangan Rumah Sakit (Layanan Unggulan)	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Bedah Sentral (IBS)	RSUD Cikalongwetan, Provinsi Jawa Barat
#BK Pengembangan Rumah Sakit (Layanan Unggulan)	Pengadaan alkes di Unit ICU	RSUD Lembang, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Olahraga	Rehab Gedung Pemuda / Olahraga	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Peningkatan Sarana dan Prasarana Latihan Kerja	Meningkatnya jumlah pengangguran yang diakibatkan oleh jarak BLK yang jauh dari lokasi	Kec. Gununghalu (desa gununghalu,celak,cilangari, sukasari), Kec.Rongga (desa cibedug,bojong, cibitung

	kecamatan di Kabupaten Bandung Barat	bojongsalam)dan Kec. Sindangkerta (desa cicangkanggirang, sindangkerta, pasirpogor, pucaksari), Provinsi Jawa Barat
#HB Sarana Prasarana dan Teknologi Produksi Peternakan	Rumah potong hewan yang tersedia belum memenuhi tata cara yang baik pada rantai produksi seperti ukuran kandang penampung yang terlalu kecil, belum tersedianya kandang karantina, belum tersedianya kandang untuk pemeriksaan status reproduksi dan belum tersedianya sarana pengolahan limbah padat	Desa Cempaka Mekar Kecamatan Padalarang, Provinsi Jawa Barat
#HB Sarana Prasarana dan Teknologi Produksi Peternakan	Peningkatan yang signifikan terhadap permintaan produk pangan khususnya produk hewani seperti telur dan susu sapi perah	Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Rongga, Provinsi Jawa Barat
#BK Penataan Kawasan Kumuh Kewenangan Kab/Kota	Kondisi jalan lingkungan dan drainase di kawasan kumuh kewenangan Kabupaten yang terdapat di kecamatan Ngamprah, Padalarang dan Lembang	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Belum maksimalnya kondisi jaringan irigasi DI Rajamandala di Kabupaten Bandung Barat dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan yang ada	DI Rajamandala , Provinsi Jawa Barat
#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Belum maksimalnya kondisi jaringan irigasi D.I Cihideung (Cilangari) di Kabupaten Bandung Barat dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan yang ada	D.I Cihideung (Cilangari), Provinsi Jawa Barat
#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Belum maksimalnya kondisi jaringan irigasi D.I Ciseuseup di Kabupaten Bandung Barat dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan yang ada	D.I Ciseuseup, Provinsi Jawa Barat
#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Belum maksimalnya kondisi jaringan irigasi D.I Pasir Angin di Kabupaten Bandung Barat dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan yang ada	D.I Pasir Angin, Provinsi Jawa Barat
#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Belum maksimalnya kondisi jaringan irigasi D.I Radio di Kabupaten Bandung Barat dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan yang ada	D.I Radio, Provinsi Jawa Barat
#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Belum maksimalnya kondisi jaringan irigasi D.I Cidadap 2 di Kabupaten Bandung Barat dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan yang ada	D.I Cidadap 2, Provinsi Jawa Barat

#BK Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten/Kota	Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang berada dalam kawasan kumuh yg menjadi kewenangan kabupaten	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya ketersediaan Alat Penerangan Jalan di Wilayah Kecamatan Ngamprah, Padalarang dan Saguling	Kabupaten Bandung barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya ketersedian Alat Penerangan Jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya ketersedian Alat Penerangan Jalan di wilayah utara Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya ketersedian Alat Penerangan Jalan di wilayah tengah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya ketersedian Alat Penerangan Jalan Highmast di Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya marka Jalan di Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya ketersedian Rambu Lalu lintas dan Cermin tikungan wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya ketersedian Rambu Lalu lintas dan Cermin tikungan wilayah tengah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya ketersedian Rambu Lalu lintas dan Cermin tikungan wilayah utara Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Belum optimalnya kondisi Drainase Jalan Cangkorah - Bts - Leuwigajah	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukanya Turap/Talud/Bronjong Jalan Cilangari - Cisokan	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Citatah - Nyalindung	Kabupaten Bandung barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukanya Drainase Jalan Batujajar - pangauban Girimukti	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukanya pembangunan Drainase Jalan Boscha Wangunsari	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukanya Pembangunan Drainase Jalan Cipeundeuy - Cipicung	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Drainase Jalan Ciririp - Bangsaya - Buninagara	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya pembangunan Drainase Jalan Gununghalu - Bunijaya	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukanya Pembangunan Drainase Jalan Gununghalu - Datarpuspa	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukanya Pembangunan Drainase Jalan Haji Gofur-Paku Haji	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukanya pembangunan Drainase Jalan Jambudipa - Citeureup	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukan pembangunan Drainase Jalan Kayu Ambon	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukanya Pembangunan Drainase Jalan Kb. Kalapa - Pasircalung	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Drainase Jalan Langensari - Medu - Dago	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Drainase Jalan Langensari - Simpangwaas	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Drainase Jalan Pasirucing - Margaluyu	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya pembangunan Drainase Jalan Rancapanggung - Puncakmulya (Bts Kutawaringin)	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya pembangunan Drainase Jalan Sersan Bajuri	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Drainase Jalan Sp. Tagogapu - Salakuning	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Turap/Talud/Bronjong Jalan Gununghalu - Bunijaya	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Gununghalu - Tamanjaya	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Drainase Jalan Maribaya - Patrol	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukan Pembangunan Drainase Jalan Punclut (Bts. Kota Bandung) - Pagerwangi - Cijeruk	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Sp.Tagog apu - Salakuning	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Boscha - Wangunsari	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Bunijaya - Cilangari	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Diperlukannya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Celak - gununghalu	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	Rekonstruksi Jalan/Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Boscha - Wangunsari	Jalan Boscha - Wangunsari, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Bunijaya-Cilangari	Bunijaya-Cilangari, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Celak-Gununghalu	Celak-Gununghalu, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Celak-Sodong	Celak-Sodong, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Cipeundeuy-Cipicung	Cipeundeuy-Cipicung, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Cisarongge-Sodong	Cisarongge-Sodong, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Gununghalu-Datarpuspa	Gununghalu-Datarpuspa, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT H.Gofur-Pakuhaji	H.Gofur-Pakuhaji, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Kb.kalapa	Kb.kalapa, Provinsi Jawa Barat

#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Maribaya-Patrol	Maribaya-Patrol, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Nanggerang-Karyamukti	Nanggerang-Karyamukti, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Rongga-Cicadas	Rongga-Cicadas, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Rongga-Cipari	Rongga-Cipari, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Sindangkerta-Celak	Sindangkerta-Celak, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Tanjungwangi-Kidangpananjung	Tanjungwangi-Kidangpananjung, Provinsi Jawa Barat
#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	TPT Warungawi-Pasirhaur	Warungawi-Pasirhaur, Provinsi Jawa Barat

Sumber: Bappelitbangda, 2025

1.12 Program Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

Perencanaan program Stategis merupakan perencanaan strategis memiliki pengaruh yang sangat luas dan memiliki intensitas lebih tinggi sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tanggungjawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah. Program strategis/proyek strategis yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.12 Proyek Strategis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026

No	Proyek Strategis	Lokasi	Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK)	Bandung Barat	16.000.000.000	APBD	Perangkat daerah Terkait
2	PKP CIPATAT	Tersebar Kecamatan Cipatat	3.800.000.000	APBD	Perangkat daerah Terkait
3	Koperasi Merah Putih	Tersebar		APBD	Perangkat daerah Terkait
4	Pembangunan Gedung Damkar	Bandung Barat	10.000.000.000	APBD	Perangkat daerah Terkait

Sumber: Bappelitbangda, 2025 dilah

1.13 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan serta kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terpetakan kedalam setiap urusan pemerintahan dengan rekapitulasi sebagaimana table berikut:

Tabel 5.13 Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Subkegiatan	Pagu	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	21	82	330.126.501.522	Dinas Kesehatan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	5	730.000.000	Diskominfotik
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	14	51	17.972.710.595	Dinas Sosial
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	17	58	30.495.412.174	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	16	51	10.432.600.000	DKPP,Dispernakan
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	5	6	12	5.725.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	2	5	880.000.000	Diskominfotik
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	4	20	4.184.900.000	Disarpus
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	10	2.100.000.000	Disperindag
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	23	72	27.488.423.624	Dinas Perhubungan
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	22	59	18.277.158.343	Disperindag
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	8	53	5.229.830.614	Dinas P2KBP3A
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	13	42	10.710.370.574	DPMTSP
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	21	73	18.294.301.308	Dinas P2KBP3A
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	9	39	19.338.953.761	DPMD
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	11	24	99	84.689.365.913	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

	UMUM DAN PENATAAN RUANG					
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	15	75	14.729.792.403	Disparbud
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	15	56	22.022.641.814	DKPP
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	21	51	47.249.173.918	Dinas Lingkungan Hidup
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	14	50	11.566.103.754	DiskopUMKM
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	9	44	21.367.500.000	Diskominfotik
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	20	89	46.765.290.104	Satpol PP, BPBD, Disdamkar
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	400.000.000	Disnaker
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	17	56	12.325.203.233	Disnaker
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	15	41	30.363.033.519	Dispora
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	17	52	16.025.000.000	Dispernakan
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	7	17	3.750.000.000	Disparbud
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	14	46	11.582.220.365	Disarpus
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	16	42	20.298.202.131	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	SEKRETARIAT DPRD	2	17	88	76.870.035.589	Setwan
31	SEKRETARIAT DAERAH	2	7	23	6.315.711.800	Setda
32	PERENCANAAN	3	14	59	18.616.418.140	Bappelitbangda
33	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	11	1.500.000.000	Bappelitbangda
34	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	4	1.500.000.000	BKPSDM
35	KEUANGAN	4	15	98	731.407.744.275	BKAD
36	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	11	43	14.075.658.427	Bakesbangpol
37	KEPEGAWAIAN	2	5	35	4.208.389.856	BKPSDM
38	KECAMATAN	5	17	61	76.873.098.280	Kecamatan
39	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	31	27.253.165.535	Inspektorat

Sumber: SIPD-RI 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan kerangka pendanaan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026. Secara rinci Program, Kegiatan dan sub kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, dapat dilihat sebagaimanan terlampir pada lampiran I.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diukur berdasarkan indikator kinerja keluaran (*output*), indikator kinerja hasil (*outcome*) dan indikator kinerja dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah serta keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan, indikator kinerja daerah juga bertujuan untuk mengukur capaian arah pembangunan dan sasaran pokok pembangunan yang diukur melalui Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagai penjabaran visi dan misi RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045.

Penetapan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) IUP telah diselaraskan dengan IUP RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 berdasarkan Surat Edaran Nomor Gubernur Jawa Barat Nomor: 117/PR.01/BAPP Tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota Dalam RPJPD Tahun 2025-204 dengan memastikan dari 45 indikator IUP Kab/Kota terdapat 9 (sembilan) indikator sasaran Visi dan 25 (dua puluh lima) IUP yang digunakan dalam RPJPD Kab/Kota Tahun 2025-2045 yang harus selaras dengan RPJPD Prov. Jabar Tahun 2025-2045. Berdasarkan indikator visi dan 45 indikator utama pembangunan RPJPD Tahun 2025-20245 tersebut, pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan dan menurunkan seluruh indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD tahun 2025-2045 menjadi indikator makro pembangunan dan indikator terseleksi pada indikator kinerja dampak (*impact*) serta indikator kinerja hasil antara (*intermediate outcome*) dan indikator kinerja hasil akhir (*ultimate outcome*) menjadi indikator kinerja daerah Kabupaten Bandung Barat.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat disertai target tahun 2026, meliputi:

1. **Indikator Kinerja Makro Pembangunan**

   Merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro pembangunan dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya. Indikator Makro Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 meliputi tujuh indikator yang mewakili kinerja dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan disajikan pada **Tabel 6.1.**

2. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

   Merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Tahun 2025-2029, IKU merupakan indikator terseleksi dari indikator kinerja dampak (*impact*) atau indikator kinerja hasil akhir (*ultimate outcome)* hasil dari *crosscutting* beberapa urusan atau program disajikan pada **Tabel 6.2.**

3. **Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

   Merupakan indikator kinerja untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan daerah yang disajikan berdasarkan 4 (empat) aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. IKD juga berfungsi sebagai alat ukur untuk melihat dampak (*impact*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program pembangunan yang telah dilakukan serta untuk mengetahui sejauh mana Visi Dan Misi Kepala daerah tercapai. Indikator kinerja daerah merupakan indikator terseleksi dari indikator kinerja dampak (*impact*) dan indikator kinerja hasil akhir (*ultimate outcome*) disajikan pada **Tabel 6.3** dan indikator kinerja hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program Perangkat Daerah berdasarkan urusan disajikan pada **Tabel 6.4**.

4. **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

   Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menghubungkan kinerja hasil pelaksanaan program Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berada pada level *intermediate outcome* merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (IKU Perangkat Daerah) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan pada **Tabel 6.5.**

Tabel 6.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025*	Target 2026**
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	10,77	71,33	72,14
2	Presentase Penduduk Miskin	Persen	10,49	9,98	9,63
3	Gini Rasio	Point	0,400	0,369	0,367
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,70	6,58	6,28
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,94	5,07	5,21
6	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	32,500	34,085	36,430
7	Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	N/A	2,63	2,94

*Sumber: *Target 2025, berdasarkan target pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025*
***Target 2026, berdasarkan target pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil fasilitasi RKPD oleh Bappeda Jabar*

Tabel 6.2 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Poin	N/A	60	64
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,06	75,28	75,25
3	Prevalensi Stunting	%	30,80	24,11	25,14
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00	12,01	12,19
5	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,25	8,27
6	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Poin	70,15	70,60	71,00
7	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N/A	43,85	44,20
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	5,07	5,21
9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	63,85	64,05	40,70
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar	12.639,69	13.542,27	14.349,61
11	Tingkat Inflasi	%	1,46	1,01 - 2,00	1,01 - 2,00
12	Tingkat Kemiskinan	%	10,49	9,98	9,63
13	Rasio Gini	Poin	0,400	0,369	0,367
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,70	6,58	5,88
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,77	81,58	82,41
16	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A	1,0	1,2
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26	85,94	86,38
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	N/A	43,29	44,32
19	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55	25,11	24,67
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59	59,84
21	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif	Ton Co2eq	N/A	116.125,67	286.294,48
22	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62	81,32	80,68
23	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	58,48	60,83
24	Presentase Desa Mandiri	Poin	60,60	18,79	62,42
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	57,58	58,50

*Sumber: *Target 2025, berdasarkan target pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025*

***Target 2026, berdasarkan target pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil fasilitasi RKPD oleh Bappeda Jabar*

Indikator kinerja daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 disajikan berdasarkan 4 (empat) aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum dengan memperhatikan capaian tahun 2024 dan target tahun 2025. Indikator kinerja daerah merupakan indikator terseleksi dari indikator kinerja dampak (impact) dan indikator kinerja hasil akhir (ultimate outcome) disajikan pada **Tabel 6.3** dan indikator kinerja hasil (outcome) dari pelaksanaan program Perangkat Daerah berdasarkan urusan disajikan pada **Tabel 6.4**.

Tabel 6.3 Target dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Dampak (*Impact*) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	KET
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2eq/ 210 IDR Mil	N/A	2,63	2,94	Indikator Makro
2	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	63,85	64,05	65,00	IKU Daerah
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59	59,84	IKU Daerah
4	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif	Ton Co2eq	N/A	116.125,67	232.251,34	IKU Daerah
5	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62	81,32	80,68	IKU Daerah
6	Indeks Kualitas Air	Poin	46,9	46,9	58,22	IKU DLH
7	Indeks Kualitas Udara	Poin	73,6	73,6	58,18	IKU DLH
8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	N/A	40,1	41	IKU DLH
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,4	1,39	1,38	IKU PD2KBP3A
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	PDRB per Kapita (ADHB)	Milyar	32,500	34,085	36,430	Indikator Makro
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,77	71,33	72,14	Indikator Makro
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	5,07	5,21	IKU Daerah
4	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Poin	N/A	60	64	IKU Daerah

5	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,06	75,28	75,62	IKU Daerah
6	Prevalensi Stunting	%	30,80	24,11	19,97	IKU Daerah
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00	12,01	12,04	IKU Daerah
8	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,25	8,27	IKU Daerah
9	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Poin	70,15	70,60	71,00	IKU Daerah
10	Tingkat Inflasi	%	1,46	1,01 - 2,00	1,01 - 2,00	IKU Daerah
11	Tingkat Kemiskinan	%	10,49	9,98	9,63	IKU Daerah
12	Rasio Gini	Poin	0,400	0,369	0,367	IKU Daerah
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,70	6,58	6,28	IKU Daerah
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	N/A	43,29	45,68	IKU Daerah
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26	85,94	86,38	IKU Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	KET
16	Indeks SPM Pendidikan	Poin	74,64	75,54	79,57	IKU Disdik
17	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 100.00 KH	6,3	5,3	4,3	IKU Dinkes
18	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 1.000 KH	112,4	68,1	61,3	IKU Dinkes
19	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,070	0,069	0,068	IKU Dinkes
20	Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum	%	N/A	27,48	37,48	IKP DPUTR
21	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	N/A	55,65	55,7	IKU Dinsos
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,90	70,87	73,00	IKU Disnkaer
23	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,59	81,89	82,40	IKU DP2KBP3A
24	Indeks Perlidungan Anak	Poin	60,83	62,03	62,63	IKU DP2KBP3A
25	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	IKU Itda
26	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,25	6,15	5,37	IKU DKPP
27	Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)	Score	9,21	92,1	87,7	IKP DKPP

28	Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)	Score	80,29	80,29	81,3	IKP DKPP
29	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	17,11	2,4	4,53	IKU DKPP
30	Peningkatan produksi tanaman holtikultura (Sayuran,Buah-buahan,Obat-Obatan)	%	1,6	2,33	4,67	IKU DKPP
31	Peningkatan produksi tanaman holtikultura (tanaman hias)	%	2,61	4,14	8,28	IKU DKPP
32	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	118,59	4,07	7,76	IKU DKPP
33	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	2	2	2	IKP Dispernakan
34	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	51.585	53.133	54.727	IKP Dispernakan
35	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	%	5,23	5,40	5,66	IKU Disbudpar
36	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,38	12,25	12,12	IKU Disperindag
37	Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	%	40,85	40,96	41,25	IKU Disperindag
38	Indeks Harmoni Indonesia	Poin	N/A	6,5	6,6	IKU Bakesbangpol
39	Cakupan Layanan Adm Kependudukan	%	72,88	73,83	74,5	IKU Disdukcapil
40	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Poin	81,75	81,9	82,05	IKU DPMPTSP
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,72	3,80	3,92	IKT
2	Indeks Infrastruktur	Poin	-	71,84	74,5	IKT
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi	Milyar	2,16	2,16	2,17	Indikator Makro
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar	12.639,69	13.542,27	14.349,61	IKU Daerah
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N/A	43,85	44,20	IKU Daerah
6	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55	25,11	24,67	IKU Daerah
7	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	58,48	59,42	IKU Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	KET
8	Presentase Desa Mandiri	%	60,60	18,79	33,94	IKU Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	57,58	58,50	IKU Daerah

10	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	5,18	9,62	10,56	IKU Diskop UKM
11	Rasio kewirausahaan daerah	%	1,93	1,94	1,97	IKU Diskop UKM
12	Nilai Investasi	Triliun	3,89	4	4,1	IKU DPMPTSP
13	Rasio kewirausahaan pemuda	%	2,18	2,2	2,22	IKU Dispora
14	Presentase infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik	%	61,67	63	64	IKU DPUTR
15	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	%	55,65	57,65	59,65	IKU DPUTR
16	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	72,14	75,14	81,355	IKU DPUTR
17	Rasio Konektivitas	%	70,49	70,49	76	IKU Dishub
18	Skor Tata Kelola Pemerintahan Desa	Score	65	66	66	IKU DPMD
19	Skor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Score	30	34	34	IKU DPMD
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	4,99	5,04	5,09	IKU Diskominfotik
21	Indeks Profesionlitas ASN	Poin		67,75	71	IKU BKPSDM
22	Indeks Profesionlitas P3K	Poin	-	80,95	81,5	IKU BKPSDM
23	Indeks Merit	Poin	0,81	0,81	0,82	IKU BKPSDM
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,77	81,58	82,41	IKU Daerah
2	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A	1,0	1.2	IKU Daerah
3	Nilai kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Nilai	100	100	100	IKU Setda
4	Presentase produk hukum yang dihasilkan	%	25	50	75	IKU Setda
5	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	IKU Itda
6	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Poin	93,29	90	90,5	IKU Itda
7	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Poin	N/A	5,5	5,9	IKU Bappelitbangda
8	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	73,36	74	75,2	IKU Diskominfotik

*Sumber: *Target 2025, berdasarkan target pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025*
***Target 2026, berdasarkan target pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil fasilitasi RKPD oleh Bappeda Jabar*

Tabel 6.4 Target dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat Hasil (*outcome*) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
1	**Pelayanan Urusan Wajib Dasar**					
1	Pendidikan					
1	APS usia 5-6	%	73,28	76,32	79,36	Disdik
2	APS usia 7-15	%	98,06	98,32	98,59	Disdik
3	APS usia 7 - 18 Kesetaraan	N/A	19,78	23,88	27,97	Disdik
4	Presentase satuan pendidikan yang yang mengambankan kurikulum muatan lokal	%	75	78,71	81,89	Disdik
5	Rasio Guru/Murid PAUD	%	1:13	1:13,92	1:14,84	Disdik
6	Rasio Guru/Murid SD		1:22.1	1:23,88	1:24,22	Disdik
7	Rasio Guru/Murid SMP	%	1:19.9	1:22,23	1:24,17	Disdik
8	Persentase usulan izin satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola oleh masyarakat yang telah diterbitkan atau diperbarui	%	19	19,45	19,59	Disdik
9	Persentase usulan izin satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh masyarakat, yang telah diterbitkan atau diperbarui	%	15,00	15,04	15,50	Disdik
2	Kesehatan					
10	Angka kematian ibu	per 100.000 KH	112,4	68,1	61,3	Dinkes
11	Angka kematian bayi	per 1.000 KH	6,3	5,3	4,3	Dinkes
12	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	%	53,8	90	91	Dinkes
13	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	91,02	90	91	Dinkes
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	89,66	98	98,1	Dinkes
15	Presentase ketersediaan sapras kesehatan yang memenuhi standar	%	68,8	69	69,2	Dinkes
16	Cakupan Layanan Intervensi Balita dan Ibu Hamil bermasalah gizi	%	76,4	76,5	76,6	Dinkes
17	Presentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	86	87	89	Dinkes
18	Presentase cakupan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan perijinan makanan minuman	%	98,94	99,04	99,14	Dinkes
19	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	4	15	25	Dinkes
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
20	Presentase luas layanan irigasi	%	61,67	63	64	Dinas PUTR
21	Presentase bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	%	33,33	42,86	52,38	Dinas PUTR
22	Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum	%	-	27,48	37,48	Dinas PUTR
23	Presentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	-	5,94	11,32	Dinas PUTR
24	Presentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	68,93	70,97	73,01	Dinas PUTR
25	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	75,9	59,61	64,61	Dinas PUTR
26	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana persampahan	%	N/A	46,48	51,48	Dinas PUTR
27	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	0	17,64	29,41	Dinas PUTR
28	Kapasitas Air Baku	(m3/detik)	N/A	4,55	5,12	Dinas PUTR
29	Presentase perlindungan rawan banjir	%	N/A	16,7	16,7	Dinas PUTR
30	Presentase tenaga kerja konstruksi tersertifikasi	%	6,18	16,57	33,14	Dinas PUTR

31	Presentase penataan bangunan dan lingkungan	%	0	58	66	Dinas PUTR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
32	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	%	23,18	6,65	10,57	Disperkim
33	Presentase luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani	%	35,57	83	67	Disperkim
34	Presentase peningkatan PSU perumahan formal yang sudah serah terima	%	66,67	100	100	Disperkim
35	Presentase penanganan rumah korban bencana	%	72,22	100	100	Disperkim
5	Trantibum					
36	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	Satpol PP
37	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	0	16,02	32,04	Satpol PP
38	Presentase penegakan perda dan perkada	%	100	100	100	Satpol PP
39	Persentase PPNS yang telah mengikuti peningkatan kapasitas	%	0,00	100	100	Satpol PP
40	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	%	82	84	87	Disdamkar
41	Presentase penanggulangan bencana	%	100	100	100	BPBD
42	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	100	100	100	BPBD
43	Presentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	BPBD
44	Presentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	BPBD
6	Sosial					
45	Presentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS	%	0	100	100	Dinas Sosial
46	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	10	20	40	Dinas Sosial
47	Presentase penerima manfaat (individu/keluarga miskin) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0	20	40	Dinas Sosial
48	Presentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindugan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	0	20	40	Dinas Sosial
49	Presentase pengelolaan data kemiskinan daerah	%	0	100	100	Dinas Sosial
50	Presentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	Dinas Sosial
51	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	Dinas Sosial
2	**Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar**					
1	Tenaga Kerja					
52	Persentase perusahaan yang menyusun RTK (Rencana Tenaga Kerja Mikro)	%	-	50	60	Disnaker
53	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	100	100	100	Disnaker
54	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	100	100	100	Disnaker
55	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB dan BPJS Ketenagakerjaan)	%	42,53	45,05	47,26	Disnaker
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
56	Presentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhuk sosek	%	87,5	61	63	DP2KBP3A
57	Presentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	100	100	DP2KBP3A
58	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	100	100	100	DP2KBP3A
59	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	N/A	59,77	60,79	DP2KBP3A

60	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan penyusunan kebijakan	%	100	100	100	DP2KBP3A
61	Presentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	100	100	DP2KBP3A
3	Pangan					
62	Presentase sarpras pangan yang terbangun	%	0	100	100	DKPP
63	Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)	Score	92,1	92,1	87,7	DKPP
64	Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)	Score	80,29	80,29	81,3	DKPP
65	Persentase Desa Tahan Pangan	%	87,88	87,88	89,7	DKPP
66	Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	31,33	9,52	19,05	DKPP
4	Pertanahan					
67	Presentase penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan	%	N/A	100	100	Disperkim
68	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	N/A	100	100	Disperkim
69	Tersedianya tanah objek landreform yang siap didistribusikan yang berasal dari kelebihan maks. dan tanah Absentee	ha	N/A	100	100	Disperkim
70	Presentase perencanaan penggunaan tanah	%	N/A	100	100	Disperkim
71	Presentase tanah kosong yang dikelola	%	N/A	100	100	Disperkim
72	Persentase hak atas tanah bagi masyarakat dan pemda yang ditetapkan	%	N/A	100	100	Disperkim
5	Lingkungan Hidup					
73	Presentase ketersediaan kajian lingkungan hidup	%	42,86	100	100	DLH
74	Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat	%	-	5	5	DLH
75	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3	%	40	12	12	DLH
76	Presentase peningkatan ketaatan kegiatan dan/atau usaha dalam pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup	%	17.57	60	64	DLH
77	Persentase lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	20	20	DLH
78	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Entitas	35	27	27	DLH
79	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	DLH
80	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	25,45	46,84	55,87	DLH
81	Presentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	2,20	2,49	DLH
82	Presentase RTH Kehati yang terkelola	%	100	100	100	DLH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
83	Presentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	10,3	15	17	Disdukcapil
84	Presentase kepemilikan kartu identitas anak	%	27	28	30	Disdukcapil
85	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	Disdukcapil
86	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	Disdukcapil
87	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	Disdukcapil
88	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	Disdukcapil
89	Presentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	Disdukcapil
90	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	100	100	Disdukcapil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
91	Presentase fasilitasi penataan desa	%	36,36	18,79	33,94	DPMD

92	Presentase fasilitasi kerjasama desa	%	36,36	18,79	33,94	DPMD
93	Presentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	16	14	14	DPMD
94	Presentase fasilitasi tata kelola desa	%	20	13	13	DPMD
95	Presentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakat desa	%	87,31	100	100	DPMD
8	Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana					
96	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2,15	2,14	2,13	DP2KBP3A
97	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	-	63	65	DP2KBP3A
98	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	%	71,80	71,83	71,85	DP2KBP3A
99	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	11,07	11,05	11	DP2KBP3A
100	Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	%	21	21	20,99	DP2KBP3A
101	Indeks Kerentanan Keluarga	Poin	7,6	7,4	7,2	DP2KBP3A
102	Median Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	18,7	18,9	19,1	DP2KBP3A
103	Indeks Lansia Tangguh	Poin	50	50,25	50,5	DP2KBP3A
9	Perhubungan					
104	Konektifitas transportasi darat	%	8,50	12,4	18,63	Dishub
105	konektifitas transportasi pelayaran	%	N/A	0,47	0,65	Dishub
10	Komunikasi dan Informatika					
106	Nilai Strategi dan Rencana Pemdigi	Nilai	0,05	0,05	0,09	Diskominfotik
107	Nilai Teknologi Digital	Nilai	0,20	0,20	0,55	Diskominfotik
108	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemda	%	-	60	64	Diskominfotik
11	Koperasi dan UKM					
109	Presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	25,03	30,16	31,43	Diskop UKM
110	Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	5,01	18,09	19,79	Diskop UKM
111	Persentase Koperasi Berkualitas	%	46,45	47,22	47,98	Diskop UKM
112	Presentase koperasi aktif	%	65,21	66,47	67,64	Diskop UKM
113	Persentase Pertumbuhan fasilitasi badan hukum koperasi	%	N/A	0	36,67	Diskop UKM
114	Pertumbuhan Wirausaha	%	1	2,4	2,5	Diskop UKM
115	Presentase pengembangan UMKM	%	4	4,48	5,12	Diskop UKM
12	Penanaman Modal					
116	Persentase Peningkatan Dokumen Investasi yang Siap ditawarkan kepada Investor	%	N/A	100	100	DPMPTSP
117	Presentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	10	11	10	DPMPTSP
118	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam pengisian LKPM	%	100	100	100	DPMPTSP
119	Persentase Waktu Proses Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	78,03	78,5	79,00	DPMPTSP
120	Presentase pamanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	100	DPMPTSP
13	Kepemudaan dan Olahraga					
121	Presentase layanan kepemudaan	%	10,34	10,34	10,4	Dispora
122	Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	Poin	0,67	0,67	0,68	Dispora
123	Indeks SDM Keolahragaan	Poin	0,31	0,31	0,31	Dispora
124	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Poin	0,38	0,38	0,39	Dispora
125	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Atlet	201	150	500	Dispora
126	Tingkat partisipasi pemuda dalam kepramukaan	%	5,77	5,8	5,85	Dispora
14	Statistik					
127	Nilai implementasi prinsip Satu Data Indonesia	Nilai	3	3	3	Diskominfotik

128	Nilai Kualitas Data staitsik	Nilai	3	3	3	Diskominfotik
129	Nilai Proses Bisnis statistik	Nilai	2,64	2,64	2,64	Diskominfotik
15	Persandian					
130	Nilai Keamanan Siber	Nilai	0,09	0,09	0.09	Diskominfotik
16	Kebudayaan					
131	Presentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	N/A	16,22	18,71	Disparbud
132	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	%	8,58	12,86	17,15	Disparbud
133	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	3,00	9,60	14,36	Disparbud
134	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah	Dokumen	1	1	1	Disparbud
135	Presentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Museum	%	0	0	0	Disparbud
17	Perpustakaan					
136	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	64,74	65,50	65,75	Disarpus
137	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	-	0	10	Disarpus
18	Kearsipan					
138	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	%	74,65	75,00	75,50	Disarpus
139	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	%	65,96	68,00	69,00	Disarpus
140	Tingkat pemenuhan penyelamatan dan perlindungan arsip	%	77,00	78,33	79,00	Disarpus
141	Presentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	28,00	42,40	56,80	Disarpus
3	**Pelayanan Urusan Pilihan**					
1	Kelautan dan Perikanan					
142	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	51.585	53.133	54.727	Dispernakan
143	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	220	226	234	Dispernakan
144	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	3.222	3.383	3.553	Dispernakan
145	Persentase Sumber Daya Perikanan yang diawasi	%	100	100	100	Dispernakan
2	Pariwisata					
146	Peresentase pengembangan daya tarik wisata yang siap kunjung	%	3	5	5	Disparbud
147	Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	3.435.438	3.607.210	3.787.570	Disparbud
148	Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual	%	100	100	100	Disparbud
149	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi	%	9	11	13	Disparbud
3	Pertanian					
150	Persentase Sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	%	88,25	100	100	DKPP
151	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	2	2	2	Dispernakan
152	Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasana	ha	100	500	500	DKPP
153	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	100	100	100	Dispernakan
154	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis	%	85	85	100	Dispernakan
155	Presentase unit usaha pangan hewan yang memiliki sertifikat NKV/NKV	%	31,25	32,81	34,48	Dispernakan
156	Presentase ijin usaha pertanian yang terfasilitasi	%	100	100	100	DKPP
157	Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	85	85	100	Dispernakan
158	Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	%	54,79	20	20	DKPP
159	Presentase SDM petani yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	20	20	DKPP
160	Presentase kelompok peternakan yang dibina	%	100	100	100	Dispernakan

161	Presentase penanganan bencana pertanian	%	0	100	100	DKPP
162	Presentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	0	100	100	DKPP
163	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	100	100	100	Dispernakan
4	Perdagangan					
164	Presentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	50	60	70	Disperindag
165	Presentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	30	35	45	Disperindag
166	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	10	15	20	Disperindag
167	Nilai ekspor barang	Milyar	3.036,10	2.742,16	2.796,86	Disperindag
168	Persentase alat metrologi yang sesuai standar	%	50	50	50	Disperindag
169	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	%	40	45	55	Disperindag
5	Industri					
170	Presentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	50	65	75	Disperindag
171	Presentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	50	60	70	Disperindag
172	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Jumlah	400	450	500	Disperindag
6	Transmigrasi					
173	Persentase calon transmigran yang dibina	%	100	100	100	Disnaker
4	**Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan**					
1	Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah					
174	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan yang ditindaklanjuti	%	-	25	50	Bag Kesra Setda
175	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan	%	-	25	50	Bag Kesra Setda
176	Persentase produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan	%	70	75	80	Bag. Hukum Setda
177	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	80	80	85	Bag. Tapem Setda
178	Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan	Katagori	Sedang	Sedang	Sedang	Bag. Tapem Setda
179	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	80	80	85	Bag. Pemb. Setda
180	Tingkat kematangan UKPBJ	%	100	100	100	Bag ULP Setda
181	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	85	80	85	Bag. Ekonomi Setda
2	Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD					
182	Presentase pembentukan Ranperda Tahun n	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
183	Presentase ketepatan penetapan perda APBD Tahun n	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
184	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	98	100	100	Sekretariat DPRD
185	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
5	**Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan**					
1	Perencanaan					
186	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	%	100	100	100	Bappelitbangda
187	Presentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	90	90	100	Bappelitbangda
188	Persentase Capaian program PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	Bappelitbangda

189	Persentase Capaian Program PD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	Bappelitbangda
190	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA	%	100	100	100	Bappelitbangda
2	Keuangan					
191	Presentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	38	38	37	BKAD
192	Presentase alokasi belanja infrasturktur pelayanan publik	%	24,22	25	30	BKAD
193	Presentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	100	100	100	BKAD
194	Presentase penurunan silva	%	100	15	15	BKAD
195	Presentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	BKAD
196	Presentase penambahan nilai aset tetap	%	0,15	2	2	BKAD
197	Persentase Peningkatan Pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah	%	98,24	100	100	Bapenda
3	Kepegawaian					
198	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	106	106	107	BKPSDM
199	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	30	30	31,2	BKPSDM
200	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	115	115	116	BKPSDM
4	Pendidikan dan Pelatihan					
201	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Nilai	82,5	82,5	83	BKPSDM
5	Penelitian dan Pengembangan					
202	Indeks inovasi daerah	Poin	40,6	43,96	47,31	Bappelitbangda
6	Program Penunjang Urusan					
203	Nilai RB General Setda	Nilai	49,31	51	53	Setda
204	Nilai RB General Sekretariat DPRD	Nilai	44,57	45,57	46,47	Sekretariat DPRD
205	Nilai RB General Inspektorat Daerah	Nilai	51,66	52,66	53,56	Itda
206	Nilai RB General Dinas Pendidikan	Nilai	49,82	50,82	51,72	Disdik
207	Nilai RB General Dinas Kesehatan	Nilai	51,53	52,53	53,43	Dinkes
208	Nilai RB General Dinas PUTR	Nilai	47,31	48,31	49,21	DPUTR
209	Nilai RB General Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	46,03	47,03	47,93	Disperkim
210	Nilai RB General Satpol PP	Nilai	53,00	53,1	53,25	Satpol PP
211	Nilai RB General Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	49,28	50	50,5	Disdamkar
212	Nilai RB General Dinas Sosial	Nilai	46,66	47,66	48,56	Dinas Sosial
213	Nilai RB General Dinas Tenaga Kerja	Nilai	51,93	52,89	53,85	Disnaker
214	Nilai RB General DP2KBP3A	Nilai	52,9	52,9	53,15	DP2KBP3A
215	Nilai RB General Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	47,51	48,51	49,41	DLH
216	Nilai RB General Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	50,84	51,84	52,74	Disdukcapil
217	Nilai RB General Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	50,55	51,55	52,45	DPMD
218	Nilai RB General Dinas Perhubungan	Nilai	50,97	51,97	52,87	Dishub
219	Nilai RB General Dinas Kominfo dan Statistik	Nilai	54,17	55,17	56,07	Diskominfotik
220	Nilai RB General Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	45,71	46,71	47,61	Disperindag
221	Nilai RB General Dinas Koperasi dan UKM	Nilai	44,27	45,27	46,3	Diskop UKM
222	Nilai RB General DPMPTSP	Nilai	50,72	51,8	52,55	DPMPTSP
223	Nilai RB General Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai	48,95	49	50	Dispora
224	Nilai RB General Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai	48,26	49,26	50,16	Disparbud

225	Nilai RB General Dinas Ketahaanan Pangan dan Pertanian	Nilai	44,06	44,46	44,76	DKPP
226	Nilai RB General Dinas Perikanan dan Peternakan	Nilai	45,54	47	49	Dispernakan
227	Nilai RB General Dinas Arsip dan Perpustakaan	Nilai	52,22	53,22	54,12	Disarpus
228	Nilai RB General Bappelitbangda	Nilai	50,06	51,06	51,96	Bappelitbangda
229	Nilai RB General BKAD	Nilai	47,3	48,3	49,2	BKAD
230	Nilai RB General Bapenda	Nilai	51,13	52,13	53,03	Bapenda
231	Nilai RB General BKPSDM	Nilai	49,38	50	50,62	BKPSDM
232	Nilai RB General BPBD	Nilai	46,61	47,61	48,51	BPBD
233	Nilai RB General Bakesbangpol	Nilai	53,02	54	56	Bakesbangpol
234	Nilai RB General Kecamatan Lembang	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Lembang
235	Nilai RB General Kecamatan Parongpong	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Parongpong
236	Nilai RB General Kecamatan Cisarua	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Cisarua
237	Nilai RB General Kecamatan Cikalongwetan	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Cikalongwetan
238	Nilai RB General Kecamatan Cipeundeuy	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Cipeundeuy
239	Nilai RB General Kecamatan Ngamprah	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Ngamprah
240	Nilai RB General Kecamatan Cipatat	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Cipatat
241	Nilai RB General Kecamatan Padalarang	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Padalarang
242	Nilai RB General Kecamatan Batujajar	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Batujajar
243	Nilai RB General Kecamatan Cihampelas	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Cihampelas
244	Nilai RB General Kecamatan Cililin	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Cililin
245	Nilai RB General Kecamatan Cipongkor	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Cipongkor
246	Nilai RB General Kecamatan Rongga	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Rongga
247	Nilai RB General Kecamatan Sindangkerta	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Sindangkerta
248	Nilai RB General Kecamatan Gununghalu	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Gununghalu
249	Nilai RB General Kecamatan Saguling	Nilai	44,06	44,86	45,56	Kec. Saguling
6	**Pelayanan Pengawasan**					
250	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	76,7	76,7	77	Itda
251	Nilai Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	Itda
252	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	69,85	70	70,5	Itda
7	**Pelayanan Pemerintahan Umum**					
253	Indeks kerukunan Umat Beragama	%	-	92,5	92,6	Bakesbangpol
254	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	85,71	85,9	86	Bakesbangpol
255	Presentase pendidikan politik pada kader parpol	%	87,5	87,6	87,8	Bakesbangpol
256	Presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	0	70	71	Bakesbangpol
257	Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan	%	83,33	84	85	Bakesbangpol
258	Presentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	100	100	Bakesbangpol
8	**Pelayanan Kewilayahan**					
259	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Lembang	%	100	100	100	Kec. Lembang
260	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Parongpong	%	100	100	100	Kec. Parongpong
261	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cisarua	%	100	100	100	Kec. Cisarua

262	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cikalongwetan	%	100	100	100	Kec. Cikalongwetan
263	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipeundeuy	%	100	100	100	Kec. Cipeundeuy
264	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Ngamprah	%	100	100	100	Kec. Ngamprah
265	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipatat	%	100	100	100	Kec. Cipatat
266	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Padalarang	%	100	100	100	Kec. Padalarang
267	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Batujajar	%	100	100	100	Kec. Batujajar
268	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cihampelas	%	100	100	100	Kec. Cihampelas
269	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cililin	%	100	100	100	Kec. Cililin
270	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipongkor	%	100	100	100	Kec. Cipongkor
271	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Rongga	%	100	100	100	Kec. Rongga
272	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Sindangkerta	%	100	100	100	Kec. Sindangkerta
273	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Gununghalu	%	100	100	100	Kec. Gununghalu
274	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Saguling	%	100	100	100	Kec. Saguling
275	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Lembang	%	100	100	100	Kec. Lembang
276	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di kec. Lembang	%	100	100	100	
277	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Parongpong	%	100	100	100	Kec. Parongpong
278	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Parongpong	%	100	100	100	
279	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cisarua	%	100	100	100	Kec. Cisarua
280	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cisarua	%	100	100	100	
281	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cikalongwetan	%	100	100	100	Kec. Cikalongwetan
282	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cikalongwetan	%	100	100	100	
283	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipeundeuy	%	100	100	100	Kec. Cipeundeuy
284	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipeundeuy	%	100	100	100	
285	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Ngamprah	%	100	100	100	Kec. Ngamprah

286	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Ngamprah	%	100	100	100	
287	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipatat	%	100	100	100	Kec. Cipatat
288	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipatat	%	100	100	100	
289	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Padalarang	%	100	100	100	Kec. Padalarang
290	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Padalarang	%	100	100	100	
291	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Batujajar	%	100	100	100	Kec. Batujajar
292	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Batujajar	%	100	100	100	
293	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cihampelas	%	100	100	100	Kec. Cihampelas
294	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cihampelas	%	100	100	100	
295	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cililin	%	100	100	100	Kec. Cililin
296	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cililin	%	100	100	100	
297	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipongkor	%	100	100	100	Kec. Cipongkor
298	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipongkor	%	100	100	100	
299	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Rongga	%	100	100	100	Kec. Rongga
300	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Rongga	%	100	100	100	
301	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Sindangkerta	%	100	100	100	Kec. Sindangkerta
302	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Sindangkerta	%	100	100	100	
303	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Gununghalu	%	100	100	100	Kec. Gununghalu
304	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Gununghalu	%	100	100	100	
305	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Saguling	%	100	100	100	Kec. Saguling
306	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Saguling	%	100	100	100	
307	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Lembang	%	100	100	100	Kec. Lembang
308	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Lembang	%	100	100	100	
309	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Parongpong	%	100	100	100	Kec. Parongpong
310	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Parongpong	%	100	100	100	
311	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cisarua	%	100	100	100	Kec. Cisarua

312	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cisarua	%	100	100	100	
313	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cikalongwetan	%	100	100	100	Kec. Cikalongwetan
314	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cikalongwetan	%	100	100	100	
315	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipeundeuy	%	100	100	100	Kec. Cipeundeuy
316	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipeundeuy	%	100	100	100	
317	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Ngamprah	%	100	100	100	Kec. Ngamprah
318	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Ngamprah	%	100	100	100	
319	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipatat	%	100	100	100	Kec. Cipatat
320	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipatat	%	100	100	100	
321	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Padalarang	%	100	100	100	Kec. Padalarang
322	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Padalarang	%	100	100	100	
323	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Batujajar	%	100	100	100	Kec. Batujajar
324	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Batujajar	%	100	100	100	
325	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cihampelas	%	100	100	100	Kec. Cihampelas
326	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cihampelas	%	100	100	100	
327	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cililin	%	100	100	100	Kec. Cililin
328	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cililin	%	100	100	100	
329	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipongkor	%	100	100	100	Kec. Cipongkor
330	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipongkor	%	100	100	100	
331	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Rongga	%	100	100	100	Kec. Rongga
332	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Rongga	%	100	100	100	
333	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Sindangkerta	%	100	100	100	Kec. Sindangkerta
334	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Sindangkerta	%	100	100	100	

335	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Gununghalu	%	100	100	100	Kec. Gununghalu
336	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Gununghalu	%	100	100	100	
337	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Saguling	%	100	100	100	Kec. Saguling
338	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Saguling	%	100	100	100	

*Sumber: *Target 2025, berdasarkan target pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025*
***Target 2026, berdasarkan target pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil fasilitasi RKPD oleh Bappeda Jabar*

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menghubungkan kinerja hasil pelaksanaan program Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berada pada level intermediate outcome merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (IKU Perangkat Daerah) disajikan pada **Tabel 6.5**

Tabel 6.5 Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat Tahun 2024 – 2026

No	Indikator	SATUAN	CAP 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	PERANGKAT DAERAH
1	Indeks SPM Pendidikan	Poin	74,64	75,54	79,57	Disdik
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	6,3	5,3	4,3	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	112,4	68,1	61,3	
4	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,070	0,069	0,068	
5	Presentase infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik	%	61,67	63	64	Dinas PUTR
6	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	%	55,65	57,65	59,65	
7	Presentase penataan kawasan dan bangunan gedung milik Pemda	%	33,33	42,86	52,38	
8	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	72,14	75,14	81,355	
9	Indeks kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Poin	42	58	66	
10	Tingkat kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Poin	100	100	100	Disperkim
11	Indeks tertib adm. Pertanahan	Poin	100	100	100	
12	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Trantibum	Poin	N/A	52,33	52,95	Satpol PP
13	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Poin	N/A	55,61	56,17	
14	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Kebakaran	Poin	N/A	73	75	Disdamkar
15	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.49	0.50	0.51	BPBD

16	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Bencana	Poin	N/A	53	53.59	
17	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	N/A	55,65	55,7	Dinas Sosial
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,90	70,87	73,00	Disnaker
19	Tingkat Perlindungan tenaga kerja	%	42,53	45,05	47,26	
20	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,59	81,89	82,4	DP2KBP3A
21	Indeks Perlidungan Anak	Poin	60,83	62,03	63,63	
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,4	1,39	1,38	
23	Indeks Kualitas Air	Poin	46,9	46,9	58,22	DLH
24	Indeks Kualitas Udara	Poin	73,6	73,6	58,18	
25	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	N/A	40,1	41	
26	Cakupan Layanan Adm Kependudukan	%	72,88	73,83	74,5	Disdukcapil
27	Skor Tata Kelola Pemerintahan Desa	Score	65	66	66	DPMD
28	Skor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Score	30	34	34	
29	Rasio Konektivitas	%	70,49	70,49	76	Dishub
30	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	4,99	5,04	5,09	Diskominfotik
31	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,66	2,7	2,75	
32	Indeks Keamanan Informasi	Poin	417	452	497	
33	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	73,36	74	75,2	
34	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	5,18	9,62	10,56	Diskop UKM
35	Rasio kewirausahaan daerah	%	1,93	1,94	1,97	
36	Nilai Investasi	Triliun	3.89	4.00	4.10	DPMPTSP
37	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Poin	81,75	81,9	82,05	
38	Rasio kewirausahaan pemuda	%	2,18	2,20	2,22	Dispora
39	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,45	0,46	0,48	
40	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	%	5.23	5.33	5.60	Disparbud
41	Persentase pertumbuhan pelaku ekraf yg memiliki kekayaan intelektual dan tersertifikasi	%	19	20	20	
42	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	%	4	6	12	
43	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	60,3	61,5	61,6	Disarpus
44	Indeks Kearsipan	Poin	71,17	72,2	72,9	
45	Presentase Pangan asal hewan yang terpenuhi	%	85,3	86	87	Dispernakan
46	Presentase Pangan asal ikan yang terpenuhi	%	86	88	90	
47	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	17,11	2,4	4,53	DKPP
48	Peningkatan Produksi pertanian tanaman hortikultura (sayuran, biofarmaka dan buah-buahan	%	1,6	2,33	4,67	
49	Peningakatan Produksi pertanian tanaman hortikultura (tanaman hias)	%	2,61	4,14	8,28	
50	Peningkatan Produksi pertanian tanaman perkebunan	%	118,59	4,07	7,76	

51	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,25	6,15	6,05	
52	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12.38	12.47	12.53	Disperindag
53	Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	%	40.85	41.20	41.73	
54	Tingkat kepuasaan anggota DPRD thd pelayanan Sekretariat DPRD	%	82,91	83	84	Sekretariat DPRD
55	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	25	50	75	Setda
56	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	25	50	75	
57	Nilai kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Nilai	25	50	75	
58	Nilai kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Nilai	100	100	100	
59	Presentase produk hukum yang dihasilkan	%	25	50	75	
60	Presentase kerja sama strategis Regional yang ditindaklanjuti	%	25	50	75	
61	Nilai LPPD	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	
62	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Poin	N/A	5,5	5,9	Bappelitbangda
63	Indeks Inovasi Daerah	Poin	42,02	44,97	47,92	
64	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD
65	Persentase Peningkatan PAD	%	3	5	5	Bapenda
66	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	23,46	28,46	33,46	
67	Indeks Profesionlitas ASN	Poin	-	82,1	82,5	BKPSDM
68	Indeks Profesionlitas P3K	Poin	-	80,95	81,5	
69	Indeks Merit	Poin	0,81	0,81	0,82	
70	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	Inspektorat Daerah
71	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Poin	93,29	90	90,5	
72	Indeks Harmoni Indonesia	Poin	N/A	6,5	6,6	Bakesbangpol
73	IKM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Poin	100	100	100	Kecamatan

*Sumber: *Target 2025, berdasarkan target pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025*
***Target 2026, berdasarkan target pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan berdasark hasil fasilitasi RKPD oleh Bappeda Jabar*

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada Rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 - 2029, dan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2044. Bagian yang sangat penting dalam suatu penyusunan rencana pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan. Prioritas Pembangunan Tahun 2026 merupakan hasil dari Penjabaran dari sasaran Visi Misi RPJMD Tahun 2026 yang selanjutnya dipengaruhi oleh Isu Strategi Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut disusunlah sasaran, indikator dan target pembangunan. Untuk mencapai target pembangunan maka disusunlah strategi dan kebijakan yang jitu serta inovasi-inovasi yang mendukung kemuajuan dan kemudahan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya dari kebijakan-kebijakan dalam operasionalnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas serta unggulan yang dalam implementasinya tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 dan sesuai dengan tema pembangunan di pusat dan daerah yakni dalam ranah peningkatan ekonomi yang inklusif. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah maka disusunlah program pembangunan daerah beserta kegiatan-kegiatan dan inovasi inovasi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program prioritas dan kegiatan prioritas serta unggulan Tahun 2026.

Sebagai penutup, dokumen RKPD ini pada akhirnya akan menjadi pedoman dasar penyusunan rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) serta rancangan APBD kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026, agar setiap Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan amanat Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. BANDUNG BARAT
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**527.038.683.812,00**							**507.188.602.572,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**527.038.683.812,00**							**507.188.602.572,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**527.038.683.812,00**							**507.188.602.572,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**478.050.034.572,00**							**477.326.222.572,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Dinas Pendidikan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**478.050.034.572,00**	-	-	-	-	-	-	**477.326.222.572,00**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.782.008.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	1.496.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		53.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	59.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		61.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		56.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		66.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	58.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	175.008.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	628.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4 Dokumen	411.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		367.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	210.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	73.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	473.965.222.572,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	473.998.472.572,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6601 Orang/bulan	473.342.222.572,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		473.342.222.572,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		36.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	142.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		168.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	147.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		168.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	258.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		73.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	584.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	738.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	441.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		577.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	143.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		160.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	264.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	283.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				125 Orang	135.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		126.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	129.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	580.971.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	809.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	18.653.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		7.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	28.277.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		31.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	60.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		63.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	21.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		31.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	305.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		514.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	57.616.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		63.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	90.025.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		99.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	747.833.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	37.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	82.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	628.233.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**478.050.034.572,00**	-	-	-	-	-	-	**477.326.222.572,00**	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	126.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Dinas Pendidikan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**478.050.034.572,00**	-	-	-	-	-	-	**477.326.222.572,00**	-
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	26.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**-**	**34.398.767.240,00**							**15.162.380.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.398.767.240,00**	-	-	-	-	-	-	**15.162.380.000,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	16.008.873.240,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	4.732.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	2.250.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	250.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				25 Paket	3.382.980.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	99.790.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	573.492.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	117.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				704 Satuan Pendidikan	718.864.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				693 Satuan Pendidikan	100.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				100 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.398.767.240,00**	-	-	-	-	-	-	**15.162.380.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				3 Komunitas	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		77.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.398.767.240,00**	-	-	-	-	-	-	**15.162.380.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca														
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				16 Ruang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	250.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	250.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	459.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	6.306.546.440,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	250.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	13.299.894.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	5.672.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	1.750.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	4.780.160.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Ruang	500.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	220.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		242.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Unit	200.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Unit	750.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				20 Paket	1.700.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	1.100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				203 Satuan Pendidikan	1.099.894.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				194 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				194 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	-	-	-	-	-	**34.398.767.240,00**	-	-	-	-	-	-	**15.162.380.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama														
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				100 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	-	-	-	-	-	**34.398.767.240,00**	-	-	-	-	-	-	**15.162.380.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca														
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				16 Ruang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	199.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	200.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	200.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	3.414.400.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	3.448.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	395.322.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				17 Paket	383.114.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		770.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				16 Paket	290.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		319.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				115 Orang	76.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		83.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				288 Satuan Pendidikan	290.764.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		136.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				989 Satuan Pendidikan	126.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		138.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				105 Orang	132.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		145.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	723.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		880.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				140 Orang	76.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		83.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1500 Paket	200.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				5 Paket	411.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				994 Satuan Pendidikan	111.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		122.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.675.600.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	1.309.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				250 Peserta Didik	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				125 Orang	44.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		49.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				46 Satuan Pendidikan	123.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		135.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				46 Satuan Pendidikan	66.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		72.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				46 Orang	51.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		56.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				32 Paket	200.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				16 Unit	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				125 Orang	44.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		49.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				46 Peserta Didik	746.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		61.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				5 unit	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					**-**	**14.589.882.000,00**							**14.700.000.000,00**	
		[Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.589.882.000,00**	-	-	-	-	-	-	**14.700.000.000,00**	-
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	14.589.882.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	14.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6 Dokumen	12.089.882.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		12.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				10 Laporan	2.500.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN						**378.050.594.941,00**							**6.857.277.299.853.572,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**378.050.594.941,00**							**6.857.277.299.853.572,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**378.050.594.941,00**							**6.857.277.299.853.572,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**62,40 (B) Nilai/Predikat**	**177.198.104.304,00**							**358.792.482.334,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Dinas Kesehatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**177.198.104.304,00**	-	-	-	-	-	-	**358.792.482.334,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya ketersediaan informasi perencanaan dan penganggaran perangkat daerahyang sesuai dengan standar*	-			100 %	482.851.300,00			-	-	-	-	478.735.907,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	70.488.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		97.366.409,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	17.912.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.452.602,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	21.791.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		34.912.404,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	14.362.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74.976.921,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	21.791.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.452.657,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	171.302.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		107.254.914,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	153.843.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		32.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	11.360.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		11.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	176.152.753.004,00			-	-	-	-	189.557.660.128,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16500 Orang/bulan	175.502.753.004,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		189.274.561.296,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**177.198.104.304,00**	-	-	-	-	-	-	**358.792.482.334,00**	-
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				36 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.474.900,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Dinas Kesehatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**177.198.104.304,00**	-	-	-	-	-	-	**358.792.482.334,00**	-
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	136.294.140,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.305.406,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	195.305.860,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.422.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	318.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		67.895.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	193.370.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.685.325,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				270 Orang	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.685.325,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	171.335.000,00			-	-	-	-	571.598.108,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.940.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.769.541,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	62.615.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		134.687.564,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		149.808.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				27 Dokumen	26.520.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		57.003.359,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	67.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		181.329.004,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.500.000,00			-	-	-	-	429.439.604,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	97.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		429.439.604,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	193.665.000,00			-	-	-	-	184.213.335,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	114.665.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.066.882,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	14.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		68.809.388,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	65.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.337.065,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	-	-	-	167.377.464.602,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				36 Unit Kerja	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		167.377.464.602,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**100 % 100 %**	**199.720.759.613,00**							**6.856.915.118.861.938,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**199.720.759.613,00**	-	-	-	-	-	-	**6.856.915.118.861.938,00**	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ASPAK di fasilitasehatan dasar dan rujukan*	-			100 %	5.840.559.400,00			-	-	-	-	26.263.718.618,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				5 Unit	1.144.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		807.915.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				5 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		345.474.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		601.583.001,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				40 Unit	619.180.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.350.735.970,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				420 Unit	219.107.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		284.717.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				780 Unit	185.724.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		254.687.730,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				3 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.032.939.165,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	3.000.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		17.549.879.532,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				275934 Keluarga	93.959.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		170.384.170,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2 Paket	327.788.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		865.401.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	193.611.161.219,00			-	-	-	-	6.856.879.295.428.101,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30006 Orang	28.156.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		115.158.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29618 Orang	66.599.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		472.053.736,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29370 Orang	34.029.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		366.068.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126750 Orang	63.178.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		240.449.220,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				292127 Orang	291.659.630,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		840.403.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1038890 Orang	2.122.744.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		792.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				183694 Orang	34.014.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		185.404.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100131 Orang	20.350.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		347.567.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16244 Orang	38.616.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		203.885.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2336 Orang	82.582.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		275.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				32665 Orang	588.150.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		1.585.243.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				24725 Orang	73.142.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		1.324.756.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		332.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	1.896.954.921,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		6.993.732.390,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	73.604.921,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		237.380.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	260.005.539,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		900.407.475,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				52 Dokumen	38.220.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		113.388.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				866 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		357.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1264 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				97 Dokumen	981.233.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		6.929.877.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	185.392.375.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		110.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				403 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		129.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				106 Paket	12.650.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		61.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	219.472.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		349.443.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	786.667.708,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		70.210.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				52 Dokumen	60.352.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		6.856.740.075.424.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	99.494.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		3.994.017.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				7699 Orang	28.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		556.238.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				390 Orang	123.404.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		303.979.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				277 Orang	29.974.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		194.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	15.131.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	76.372.594,00			-	-	-	-	252.197.219,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	76.372.594,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		252.197.219,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	192.666.400,00			-	-	-	-	9.307.518.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				210 Unit	64.065.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		1.135.590.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				210 Unit	128.601.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		8.171.927.500,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					**-**	**611.132.700,00**							**684.140.600,00**	
		[Meningkatnya Kompetensi dan Dstribusi Tenaga Kesehatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**611.132.700,00**	-	-	-	-	-	-	**684.140.600,00**	-
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.391.700,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				37 Dokumen	9.391.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	169.935.000,00			-	-	-	-	154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	85.745.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				74 Orang	84.190.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		126.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	431.806.000,00			-	-	-	-	475.140.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				125 Orang	431.806.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		475.140.600,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					**-**	**321.521.400,00**							**1.054.368.700,00**	
		[Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**321.521.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1.054.368.700,00**	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	62.781.400,00			-	-	-	-	226.341.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				170 Dokumen	62.781.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		226.341.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-			-	9.860.000,00			-	-	-	-	106.306.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				40 Dokumen	9.860.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		106.306.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	168.640.000,00			-	-	-	-	368.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				4 Dokumen	168.640.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		368.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	80.240.000,00			-	-	-	-	352.913.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	80.240.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		352.913.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					**-**	**199.076.924,00**							**1.650.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**199.076.924,00**	-	-	-	-	-	-	**1.650.000.000,00**	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	78.597.924,00			-	-	-	-	770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	78.597.924,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.103.000,00			-	-	-	-	440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	60.103.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.376.000,00			-	-	-	-	440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	60.376.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD LEMBANG						**35.670.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35.670.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**35.670.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**31.670.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.670.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	31.670.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	RSUD LEMBANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	31.670.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	RSUD LEMBANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**4.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.000.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	RSUD LEMBANG
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	RSUD LEMBANG
		RSUD CILILIN						**85.000.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**85.000.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**85.000.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**80.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	80.000.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	RSUD CILILIN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	80.000.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	RSUD CILILIN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**5.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	RSUD CILILIN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	RSUD CILILIN
		RSUD CIKALONGWETAN						**33.000.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**33.000.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**30.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	30.000.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	RSUD CIKALONGWETAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	30.000.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	RSUD CIKALONGWETAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					**-**	**3.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.099.302.600,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	RSUD CIKALONGWETAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	313.059.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	RSUD CIKALONGWETAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	786.243.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	RSUD CIKALONGWETAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.900.697.400,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	RSUD CIKALONGWETAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1.900.697.400,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	RSUD CIKALONGWETAN
		PUSKESMAS DTP CILILIN						**3.210.165.361,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.210.165.361,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.210.165.361,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.210.165.361,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.210.165.361,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS DTP CILILIN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100% Unit Kerja	3.210.165.361,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Cililin Kab. Bandung Barat, Cililin, Budiharja Kab. Bandung Barat, Cililin, Batulayang Kab. Bandung Barat, Cililin, Karanganyar Kab. Bandung Barat, Cililin, Karangtanjung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS DTP CILILIN
		PUSKESMAS DTP GUNUNGHALU						**4.762.643.203,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.762.643.203,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.762.643.203,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**4.762.643.203,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4.762.643.203,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS DTP GUNUNGHALU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.762.643.203,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS DTP GUNUNGHALU
		PUSKESMAS DTP RAJAMANDALA						**2.852.740.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.852.740.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.852.740.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**62,40 (B) Nilai/Predikat**	**2.852.740.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.852.740.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS DTP RAJAMANDALA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.852.740.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Ciptaharja Kab. Bandung Barat, Cipatat, Rajamandalakulon Kab. Bandung Barat, Cipatat, Mandalawangi Kab. Bandung Barat, Cipatat, Mandalasari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS DTP RAJAMANDALA
		PUSKESMAS DTP CIKALONGWETAN						**4.860.525.850,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.860.525.850,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.860.525.850,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**4.860.525.850,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4.860.525.850,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS DTP CIKALONGWETAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	4.860.525.850,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS DTP CIKALONGWETAN
		PUSKESMAS DTP JAYAGIRI						**2.915.366.711,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.915.366.711,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.915.366.711,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.915.366.711,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.915.366.711,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS DTP JAYAGIRI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.915.366.711,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Cikahuripan Kab. Bandung Barat, Lembang, Gudangkahuripan Kab. Bandung Barat, Lembang, Jayagiri Kab. Bandung Barat, Lembang, Sukajaya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS DTP JAYAGIRI
		PUSKESMAS DTP SAGULING						**2.988.174.717,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.988.174.717,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.988.174.717,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.988.174.717,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.988.174.717,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS DTP SAGULING
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.988.174.717,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS DTP SAGULING
		PUSKESMAS PARONGPONG						**1.884.676.094,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.884.676.094,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.884.676.094,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1.884.676.094,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.884.676.094,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS PARONGPONG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.884.676.094,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS PARONGPONG
		PUSKESMAS CIWARUGA						**1.417.936.352,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.417.936.352,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.417.936.352,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1.417.936.352,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.417.936.352,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS CIWARUGA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.417.936.352,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Ciwaruga Kab. Bandung Barat, Parongpong, Cigugurgirang Kab. Bandung Barat, Parongpong, Sariwangi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS CIWARUGA
		PUSKESMAS CIHAMPELAS						**4.431.497.785,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.431.497.785,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.431.497.785,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**4.431.497.785,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4.431.497.785,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS CIHAMPELAS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.431.497.785,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Cihampelas Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Mekarjaya Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Mekarmukti Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Singajaya Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Tanjungjaya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS CIHAMPELAS
		PUSKESMAS MUKAPAYUNG						**2.663.808.512,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.663.808.512,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.663.808.512,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.663.808.512,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.663.808.512,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS MUKAPAYUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.663.808.512,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Bongas Kab. Bandung Barat, Cililin, Karyamukti Kab. Bandung Barat, Cililin, Kidangpananjung Kab. Bandung Barat, Cililin, Mukapayung Kab. Bandung Barat, Cililin, Nanggerang Kab. Bandung Barat, Cililin, Rancapanggung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS MUKAPAYUNG
		PUSKESMAS SINDANGKERTA						**2.303.625.568,00**							**2.533.988.124,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.303.625.568,00**							**2.533.988.124,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.303.625.568,00**							**2.533.988.124,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.303.625.568,00**							**2.533.988.124,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.303.625.568,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	2.533.988.124,00	PUSKESMAS SINDANGKERTA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.303.625.568,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		2.533.988.124,00	PUSKESMAS SINDANGKERTA
		PUSKESMAS CICANGKANGGIRANG						**2.154.119.300,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.154.119.300,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.154.119.300,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.154.119.300,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.154.119.300,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS CICANGKANGGIRANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.154.119.300,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Cicangkanggirang Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Mekarwangi Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Pasirpogor Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Puncaksari Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Weninggalih	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS CICANGKANGGIRANG
		PUSKESMAS CIPATAT						**3.039.500.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.039.500.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.039.500.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.039.500.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.039.500.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS CIPATAT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			0				1 0	3.039.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS CIPATAT
		PUSKESMAS SUMURBANDUNG						**1.477.496.307,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.477.496.307,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.477.496.307,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1.477.496.307,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.477.496.307,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS SUMURBANDUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.477.496.307,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS SUMURBANDUNG
		PUSKESMAS RONGGA						**2.951.394.762,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.951.394.762,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.951.394.762,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.951.394.762,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.951.394.762,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS RONGGA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.951.394.762,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Cibedug Kab. Bandung Barat, Rongga, Bojong Kab. Bandung Barat, Rongga, Bojongsalam Kab. Bandung Barat, Rongga, Cibitung Kab. Bandung Barat, Rongga, Cicadas Kab. Bandung Barat, Rongga, Cinengah Kab. Bandung Barat, Rongga, Sukamanah Kab. Bandung Barat, Rongga, Sukaresmi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS RONGGA
		PUSKESMAS JAYAMEKAR						**2.027.359.948,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.027.359.948,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.027.359.948,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.027.359.948,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.027.359.948,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS JAYAMEKAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.027.359.948,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Padalarang Kab. Bandung Barat, Padalarang, Cimerang Kab. Bandung Barat, Padalarang, Jayamekar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS JAYAMEKAR
		PUSKESMAS CIPEUNDEUY						**3.152.236.531,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.152.236.531,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.152.236.531,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.152.236.531,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.152.236.531,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS CIPEUNDEUY
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.152.236.531,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS CIPEUNDEUY
		PUSKESMAS CITALEM						**2.683.831.435,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.683.831.435,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.683.831.435,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.683.831.435,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.683.831.435,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS CITALEM
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.683.831.435,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS CITALEM
		PUSKESMAS CIPONGKOR						**4.274.746.402,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.274.746.402,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.274.746.402,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**4.274.746.402,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4.274.746.402,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS CIPONGKOR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.274.746.402,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Sarinagen Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Baranangsiang Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Cijambu Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Cibenda Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Cintaasih Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Karangsari Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Sirnagalih	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS CIPONGKOR
		PUSKESMAS CIMAREME						**3.147.384.367,00**							**3.304.753.585,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.147.384.367,00**							**3.304.753.585,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.147.384.367,00**							**3.304.753.585,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.147.384.367,00**							**3.304.753.585,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	3.147.384.367,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	3.304.753.585,00	PUSKESMAS CIMAREME
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.147.384.367,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Cimareme Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Cilame Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Tanimulya Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Margajaya Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Gadobangkong Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Pakuhaji	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		3.304.753.585,00	PUSKESMAS CIMAREME
		PUSKESMAS NGAMPRAH						**2.829.937.901,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.829.937.901,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.829.937.901,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.829.937.901,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.829.937.901,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS NGAMPRAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.829.937.901,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS NGAMPRAH
		PUSKESMAS BATUJAJAR						**4.900.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.900.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.900.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**4.900.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	4.900.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS BATUJAJAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.900.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS BATUJAJAR
		PUSKESMAS CIBODAS						**1.677.824.829,00**							**1.761.716.070,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.677.824.829,00**							**1.761.716.070,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.677.824.829,00**							**1.761.716.070,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1.677.824.829,00**							**1.761.716.070,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.677.824.829,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Masyarakat wilayah kerja BLUD Puskesmas Cibodas	-	1.761.716.070,00	PUSKESMAS CIBODAS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.677.824.829,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Cibodas	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Masyarakat wilayah kerja BLUD Puskesmas Cibodas		1.761.716.070,00	PUSKESMAS CIBODAS
		PUSKESMAS CIKOLE						**1.539.391.570,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.539.391.570,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.539.391.570,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1.539.391.570,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.539.391.570,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS CIKOLE
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.539.391.570,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Cikidang Kab. Bandung Barat, Lembang, Cikole Kab. Bandung Barat, Lembang, Cibogo Kab. Bandung Barat, Lembang, Wangunharja	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS CIKOLE
		PUSKESMAS LEMBANG						**2.575.548.526,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.575.548.526,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.575.548.526,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.575.548.526,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.575.548.526,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS LEMBANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.575.548.526,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Pagerwangi Kab. Bandung Barat, Lembang, Kayuambon Kab. Bandung Barat, Lembang, Lembang Kab. Bandung Barat, Lembang, Mekarwangi Kab. Bandung Barat, Lembang, Wangunsari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS LEMBANG
		PUSKESMAS PASIRLANGU						**1.669.455.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.669.455.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.669.455.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1.669.455.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.669.455.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS PASIRLANGU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1.669.455.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirlangu Kab. Bandung Barat, Cisarua, Cipada Kab. Bandung Barat, Cisarua, Tugumukti Kab. Bandung Barat, Cisarua, Sadangmekar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS PASIRLANGU
		PUSKESMAS RENDE						**2.183.748.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.183.748.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.183.748.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.183.748.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.183.748.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS RENDE
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.183.748.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Cikalong Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Kanangasari Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Puteran Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Rende Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Tenjolaut	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS RENDE
		PUSKESMAS CIRATA						**1.808.776.138,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.808.776.138,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.808.776.138,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1.808.776.138,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terpenuhi*	-			100 %	1.808.776.138,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Cirata	-	0,00	PUSKESMAS CIRATA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.808.776.138,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Ciharashas Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Ciroyom Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Margalaksana Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Sirnagalih Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Sukahaji	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Cirata		0,00	PUSKESMAS CIRATA
		PUSKESMAS CISARUA						**2.270.399.000,00**							**2.497.438.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.270.399.000,00**							**2.497.438.900,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.270.399.000,00**							**2.497.438.900,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.270.399.000,00**							**2.497.438.900,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.270.399.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	2.497.438.900,00	PUSKESMAS CISARUA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.270.399.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Jambudipa Kab. Bandung Barat, Cisarua, Padaasih Kab. Bandung Barat, Cisarua, Pasirhalang Kab. Bandung Barat, Cisarua, Kertawangi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		2.497.438.900,00	PUSKESMAS CISARUA
		PUSKESMAS PATARUMAN						**2.935.000.000,00**							**2.950.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.935.000.000,00**							**2.950.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.935.000.000,00**							**2.950.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.935.000.000,00**							**2.950.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.935.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	2.950.000.000,00	PUSKESMAS PATARUMAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.935.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		2.950.000.000,00	PUSKESMAS PATARUMAN
		PUSKESMAS TAGOG APU						**1.786.308.646,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.786.308.646,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.786.308.646,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**1.786.308.646,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.786.308.646,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	PUSKESMAS TAGOG APU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.786.308.646,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	PUSKESMAS TAGOG APU
		PUSKESMAS PADALARANG						**2.487.995.106,00**							**2.612.394.861,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.487.995.106,00**							**2.612.394.861,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.487.995.106,00**							**2.612.394.861,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.487.995.106,00**							**2.612.394.861,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.487.995.106,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	2.612.394.861,00	PUSKESMAS PADALARANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.487.995.106,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		2.612.394.861,00	PUSKESMAS PADALARANG
		UPT LAB KESDA						**2.500.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.500.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.500.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**2.500.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.500.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	UPT LAB KESDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.500.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	UPT LAB KESDA
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						**171.749.847.212,00**							**155.768.795.413,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**171.749.847.212,00**							**155.768.795.413,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**171.749.847.212,00**							**155.768.795.413,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**22.893.885.730,00**							**26.092.795.413,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.893.885.730,00**	-	-	-	-	-	-	**26.092.795.413,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	518.528.400,00			-	-	-	-	945.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	77.926.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	61.119.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	64.065.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	21.238.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	26.259.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	81.041.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	10.241.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	37.348.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	58.485.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	80.802.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.392.898.910,00			-	-	-	-	18.237.795.413,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				101 Orang/bulan	20.095.565.390,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.937.795.413,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	106.379.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	56.103.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	114.131.320,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	20.720.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	215.821.600,00			-	-	-	-	32.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	83.601.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	132.220.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	182.253.800,00			-	-	-	-	825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	182.253.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				185 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	547.779.790,00			-	-	-	-	2.614.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.947.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	106.084.890,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.058.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	48.483.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.086.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25.001.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.248.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	318.870.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	241.330.800,00			-	-	-	-	149.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	87.521.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81.811.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	71.998.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	795.272.430,00			-	-	-	-	3.140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	283.220.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	495.892.430,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	16.160.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**-**	**14.499.427.381,00**							**6.910.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap ketahanan air dan banjir]	**Kapasitas Air Baku** **Presentase perlindungan rawan banjir**	**16.7** **6.87**	**-**	**16.7** **4.55**	**16.7** **4.55**	**14.499.427.381,00**	-	-	-	-	-	-	**6.910.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.380.968.270,00			-	-	-	-	3.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				7 Lembaga	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir														
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,1 KM	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.499.427.381,00**	-	-	-	-	-	-	**6.910.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.32 KM	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap ketahanan air dan banjir]	**Kapasitas Air Baku** **Presentase perlindungan rawan banjir**	**16.7** **6.87**	**-**	**16.7** **4.55**	**16.7** **4.55**	**14.499.427.381,00**	-	-	-	-	-	-	**6.910.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.3 KM	1.113.979.520,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.499.427.381,00**	-	-	-	-	-	-	**6.910.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap ketahanan air dan banjir]	**Kapasitas Air Baku** **Presentase perlindungan rawan banjir**	**16.7** **6.87**	**-**	**16.7** **4.55**	**16.7** **4.55**	**14.499.427.381,00**	-	-	-	-	-	-	**6.910.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				7 Dokumen	861.266.750,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				2 Dokumen	253.503.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0130	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	152.218.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	**Presentase luas layanan irigasi**	**68**	**62**	**63**	**64**	**14.499.427.381,00**	-	-	-	-	-	-	**6.910.000.000,00**	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.118.459.111,00			-	-	-	-	3.510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,9 KM	1.108.647.074,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1,4 KM	4.796.884.696,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				2 Lembaga	121.446.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				2 Lembaga	388.114.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				25 Dokumen	2.692.932.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		710.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				6 UNIT	3.010.433.641,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**-**	**2.795.029.000,00**							**8.800.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum**	**77.48**	**11.58**	**27.48**	**37.48**	**2.795.029.000,00**	-	-	-	-	-	-	**8.800.000.000,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.795.029.000,00			-	-	-	-	8.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				25 Unit	2.745.029.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa														
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Desa	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				20 Liter/Detik	30.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					**-**	**654.738.400,00**							**6.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyediaan sarpras persampahan]	**Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana persampahan**	**56.48**	**36**	**46.48**	**48.48**	**654.738.400,00**	-	-	-	-	-	-	**6.000.000.000,00**	-
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	654.738.400,00			-	-	-	-	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	290.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				2 Unit	364.738.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**-**	**916.199.000,00**							**4.200.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	**Presentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman**	**9.0**	**4.8**	**5.5**	**6.2**	**916.199.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.200.000.000,00**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	916.199.000,00			-	-	-	-	4.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				30 M³/Hari	876.199.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa														
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				10 Desa	35.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**-**	**2.420.052.208,00**							**3.200.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	**Presentase cakupan drainase dalam kondisi baik**	**81.17**	**68.93**	**70.97**	**73.01**	**2.420.052.208,00**	-	-	-	-	-	-	**3.200.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.420.052.208,00			-	-	-	-	3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1500 M	2.320.052.208,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				2 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				750 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				750 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**-**	**20.179.506.266,00**							**13.024.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung milik pemerintah daerah]	**Presentase bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik**	**85.25**	**33.33**	**42.86**	**52.38**	**20.179.506.266,00**	-	-	-	-	-	-	**13.024.000.000,00**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	20.179.506.266,00			-	-	-	-	13.024.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara														
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				656 Bangunan Gedung Negara	244.647.666,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				12 Bangunan Gedung Cagar Budaya	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif				12 Orang	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				5 Bangunan Gedung	780.526.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				4 Bangunan Gedung	1.626.972.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				5 Bantuan Teknis	22.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	17.302.525.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				3 Orang	2.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				424 Dokumen	191.844.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					**-**	**51.575.000,00**							**5.200.000.000,00**	
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**80.43**	**-**	**14.29**	**28.57**	**51.575.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.200.000.000,00**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.575.000,00			-	-	-	-	5.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	50.575.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	1.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**-**	**103.791.299.227,00**							**74.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	**Persentase jalan dalam kondisi baik**	**69.61**	**54.61**	**57.11**	**59.61**	**103.791.299.227,00**	-	-	-	-	-	-	**74.250.000.000,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	103.791.299.227,00			-	-	masyarakat pengguna jalan	-	74.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat pengguna jalan		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	4.796.023.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat pengguna jalan		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				648,06 KM	1.123.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat pengguna jalan		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0050	Pelebaran Jalan Menambah Lajur														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur				0,50 KM	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	masyarakat pengguna jalan		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				9,02 KM	4.041.149.627,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat pengguna jalan		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				4,01 KM	12.187.018.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), OPSEN PKB	-	-	masyarakat pengguna jalan		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat pengguna jalan		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan														
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				20 Meter	8.200.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	masyarakat pengguna jalan		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				60 Meter	1.923.692.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), OPSEN PKB	-	-	masyarakat pengguna jalan		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10,20 KM	69.146.032.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	-	-	masyarakat pengguna jalan		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi				648,06 KM	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat pengguna jalan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				90 Meter	1.223.692.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat pengguna jalan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	masyarakat pengguna jalan		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					**-**	**399.476.000,00**							**1.212.000.000,00**	
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	**Presentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli**	**100**	**6.18**	**7.31**	**25.6**	**399.476.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.212.000.000,00**	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	331.298.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				112 Orang	226.278.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	31.341.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				112 Orang	73.678.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.803.000,00			-	-	-	-	272.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	4.970.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Orang	4.865.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	15.968.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	42.375.000,00			-	-	-	-	540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				48 Paket Pekerjaan	42.375.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**399.476.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.212.000.000,00**	-
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				1 Bangunan Konstruksi	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				5 Lembaga	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				2 Badan Usaha	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	**Presentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli**	**100**	**6.18**	**7.31**	**25.6**	**399.476.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.212.000.000,00**	-
	1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				40 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					**-**	**3.148.659.000,00**							**6.880.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang]	**Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang**	**76.47**	**42**	**17.64**	**29.41**	**3.148.659.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.880.000.000,00**	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	602.329.400,00			-	-	-	-	2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	114.524.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	65.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				1 Dokumen	88.766.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	207.528.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	126.510.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.164.870.400,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar														
			Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	186.789.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	901.655.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				1 Orang	76.426.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	504.476.600,00			-	-	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	139.923.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	105.631.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	105.374.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	153.548.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	876.982.600,00			-	-	-	-	1.880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				1 Laporan	99.829.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1 Kasus	140.383.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	173.431.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	139.948.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	75.786.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				1 Dokumen	115.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR														
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	131.854.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang														
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	-	-	-	-	-	**3.148.659.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.880.000.000,00**	-
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						**36.656.803.150,00**							**44.172.139.879,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.700.546.750,00**							**38.029.647.499,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**30.700.546.750,00**							**38.029.647.499,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**70,5 (BB) Nilai/Predikat**	**10.633.646.890,00**							**13.843.147.499,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.633.646.890,00**	-	-	-	-	-	-	**13.843.147.499,00**	-
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*	-			11 Dokumen	377.885.200,00			-	-	-	-	841.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	54.403.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	51.800.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.855.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.943.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.855.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	57.550.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	130.528.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		-	-	-	-	-	-	**10.633.646.890,00**	-	-	-	-	-	-	**13.843.147.499,00**	-
	1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	11.245.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		27.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman]	-	-	-	-	-	**10.633.646.890,00**	-	-	-	-	-	-	**13.843.147.499,00**	-
	1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	16.345.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	47.359.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas*	-			8 Dokumen	9.382.771.290,00			-	-	-	-	10.642.147.499,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	9.165.134.090,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.081.647.499,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	59.742.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	59.725.760,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		148.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	94.283.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3.885.240,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu*	-			100 %	97.370.000,00			-	-	-	-	385.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	97.370.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrai Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	133.825.100,00			-	-	-	-	526.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.859.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		86.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.339.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.055.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	92.572.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Milik daerah Penunjang OPD*	-			6 Paket	5.885.000,00			-	-	-	-	440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5.885.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang urusan pemerintah OPD*	-			3 Paket	217.892.300,00			-	-	-	-	513.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	93.003.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		88.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	124.888.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		245.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara*	-			32 Unit	418.018.000,00			-	-	-	-	495.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	82.768.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	62.870.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	8.410.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	263.970.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					**100 %**	**3.001.737.301,00**							**3.008.000.000,00**	
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga korban bencana]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.001.737.301,00**	-	-	-	-	-	-	**3.008.000.000,00**	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	-			5 Dokumen	349.363.000,00			-	-	-	-	330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				2 Dokumen	314.363.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	14.999.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	19.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	-			3 Dokumen	24.999.900,00			-	-	-	-	118.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				150 Orang	24.999.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		118.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terehabilitasi*	-			30 Rumah	2.604.060.101,00			-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-	-	2.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				200 Unit Rumah	2.604.060.101,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		2.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah dokumen pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan*	-			2 Dokumen	23.314.300,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	23.314.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**100 % 50 %**	**4.581.495.000,00**							**5.935.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.581.495.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.935.000.000,00**	-
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Jumlah dokumen penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani* *Jumlah dokumen penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani*	-			2 Dokumen 2 Dokumen	35.000.000,00			-	-	-	-	77.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		77.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha* *Jumlah dokumen kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha*	-			7 Dokumen 7 Dokumen	1.246.995.000,00			-	-	-	-	1.348.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				6 Dokumen	1.085.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				78 Kelompok Masyarakat	65.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.581.495.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.935.000.000,00**	-
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	16.995.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.581.495.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.935.000.000,00**	-
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				30 Rumah Tangga	80.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		83.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha* *Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	-			100 % 100 %	3.299.500.000,00			-	-	-	-	4.510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				114 Unit Rumah	2.510.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				10 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				20,65 Ha	789.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**					**50 %**	**5.175.000.000,00**							**6.620.000.000,00**	
		[Meningkatnya pencegahan terhadap berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.175.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.620.000.000,00**	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	5.175.000.000,00			-	-	-	-	6.620.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				450 Unit Rumah	5.175.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				20 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		1.120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					**100 %**	**7.308.667.559,00**							**8.623.500.000,00**	
		[Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.308.667.559,00**	-	-	-	-	-	-	**8.623.500.000,00**	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase ketercapaian penyelenggaraan PSU Perumahan*	-			100 Persentase	7.308.667.559,00			-	-	-	-	8.623.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				7 Dokumen	1.656.047.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		970.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	29.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU														
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				4 Kelompok	14.999.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				53 Lokasi	2.891.099.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		3.041.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				1 Dokumen	14.999.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		172.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				6 Lokasi	2.671.521.259,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.956.256.400,00**							**6.142.492.380,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**5.956.256.400,00**							**6.142.492.380,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**					**100 %**	**153.389.800,00**							**188.610.120,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153.389.800,00**	-	-	-	-	-	-	**188.610.120,00**	-
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan*	-			3 Dokumen	153.389.800,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	188.610.120,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Berita Acara	99.575.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		47.805.060,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	53.814.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		140.805.060,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**					**100 %**	**0,00**							**210.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan*	-			2 Dokumen	0,00			-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-	-	210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**					**100 %**	**388.722.800,00**							**1.998.652.720,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian inventarisasi berupa data subjek, Objek redistribusi tanah dan terkoordinasikan, tersinkronisasikan untuk penataan aset dan akses reforma agraria*	-			4 Dokumen	388.722.800,00			-	-	-	-	1.998.652.720,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Dokumen	147.088.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		374.025.300,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.														
			Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota				5 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah														
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Dokumen	241.633.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		669.627.420,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**					**100 %**	**0,00**							**680.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Jumlah dokumen inventarisasi pemanfaatan tanah kosong*	-			4 Dokumen	0,00			-	-	-	-	680.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				2 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.08.2.02.0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong														
			Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**					**100 %**	**5.414.143.800,00**							**3.065.229.540,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota*	-			6 Dokumen	5.414.143.800,00			-	-	-	-	3.065.229.540,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	5.414.143.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.945.229.540,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				4 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**17.930.876.350,00**							**1.490.106.760,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.930.876.350,00**							**1.490.106.760,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**17.930.876.350,00**							**1.490.106.760,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**13.683.211.950,00**							**780.147.140,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Satpol PP**	**55.70**	**53.00**	**53.20**	**53.50**	**13.683.211.950,00**	-	-	-	-	-	-	**780.147.140,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	114.058.000,00			-	-	-	-	39.526.640,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.704.680,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	18.293.340,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	17.998.320,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.543.340,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.648.320,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	12.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	13.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.638.320,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	10.650.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.638.320,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	22.120.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.296.481.058,32			-	-	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/bulan	12.264.626.378,32	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.502.340,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	21.352.340,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.440.000,00			-	-	-	-	17.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				35 Laporan	4.950.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	157.288.000,00			-	-	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	67.394.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.650.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				161 Orang	9.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				161 Orang	78.244.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	185.917.891,68			-	-	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12.496.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.734.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.376.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	23.586.091,68	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	19.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	101.525.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	122.666.000,00			-	-	-	-	416.305.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		416.305.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	5.415.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	116.927.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	324.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	201.686.800,00			-	-	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	18.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	176.686.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	586.674.200,00			-	-	-	-	307.015.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	166.455.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.895.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	389.621.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	27.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.998.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**4.247.664.400,00**							**709.959.620,00**	
		[Meningkatnya penanganan ganguan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja]	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.247.664.400,00**	-	-	-	-	-	-	**709.959.620,00**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.547.219.400,00			-	-	-	-	574.880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	96.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja]	**Persentase cakupan perlindungan masyarakat**	**100**	**-**	**16.02**	**32.04**	**4.247.664.400,00**	-	-	-	-	-	-	**709.959.620,00**	-
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	283.028.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya penanganan ganguan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja]	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.247.664.400,00**	-	-	-	-	-	-	**709.959.620,00**	-
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				1 Dokumen	47.048.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	49.820.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja]	**Persentase cakupan perlindungan masyarakat**	**100**	**-**	**16.02**	**32.04**	**4.247.664.400,00**	-	-	-	-	-	-	**709.959.620,00**	-
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				832 Orang	147.686.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		574.880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya penanganan ganguan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja]	**Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.247.664.400,00**	-	-	-	-	-	-	**709.959.620,00**	-
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				60 laporan	2.560.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	170.014.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	5.622.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				49 Unit	187.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada Satuan Polisi Pamong Praja]	**Presentase penegakan perda dan perkada**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.247.664.400,00**	-	-	-	-	-	-	**709.959.620,00**	-
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	594.526.000,00			-	-	-	-	122.079.620,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				3 unit	91.355.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.599.620,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	53.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				4 laporan	49.080.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				1 Dokumen	3.142.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	81.474.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	150.900.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	165.574.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan SDM PPNS]	**Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya**	**100**	**-**	**100**	**100**	**4.247.664.400,00**	-	-	-	-	-	-	**709.959.620,00**	-
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	105.919.000,00			-	-	-	-	13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS														
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	38.947.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1 Dokumen	19.772.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	47.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**14.901.814.480,00**							**14.444.596.397,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.901.814.480,00**							**14.444.596.397,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**14.901.814.480,00**							**14.444.596.397,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**7.623.751.820,00**							**7.068.406.153,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General BPBD**	**49.61**	**46.61**	**47.11**	**47.61**	**7.623.751.820,00**	-	-	-	-	-	-	**7.068.406.153,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	75.330.700,00			-	-	-	-	299.466.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6.471.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.806.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6.026.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.122.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.740.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.122.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.026.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.122.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9.740.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.122.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.122.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1.065.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1.251.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	28.620.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.095.689.320,00			-	-	-	-	6.086.111.581,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	6.074.011.580,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.074.011.581,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.471.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	15.206.640,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	24.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.623.751.820,00**	-	-	-	-	-	-	**7.068.406.153,00**	-
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	215.754.000,00			-	-	-	-	228.690.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				46 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.190.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General BPBD**	**49.61**	**46.61**	**47.11**	**47.61**	**7.623.751.820,00**	-	-	-	-	-	-	**7.068.406.153,00**	-
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	68.996.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				46 Orang	146.758.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	645.184.800,00			-	-	-	-	171.148.175,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.623.751.820,00**	-	-	-	-	-	-	**7.068.406.153,00**	-
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General BPBD**	**49.61**	**46.61**	**47.11**	**47.61**	**7.623.751.820,00**	-	-	-	-	-	-	**7.068.406.153,00**	-
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	95.362.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		112.263.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.520.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.623.751.820,00**	-	-	-	-	-	-	**7.068.406.153,00**	-
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.957.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General BPBD**	**49.61**	**46.61**	**47.11**	**47.61**	**7.623.751.820,00**	-	-	-	-	-	-	**7.068.406.153,00**	-
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11.928.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114 Laporan	525.894.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.256.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	54.868.000,00			-	-	-	-	80.514.572,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		67.809.572,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	54.868.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.655.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	19.360.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.520.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.420.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.420.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	536.925.000,00			-	-	-	-	158.915.075,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	84.755.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.608.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	433.330.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.256.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	18.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					**-**	**7.278.062.660,00**							**7.376.190.244,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.278.062.660,00**	-	-	-	-	-	-	**7.376.190.244,00**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	261.596.000,00			-	-	-	-	715.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				120 Orang	261.596.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		715.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	4.458.448.800,00			-	-	-	-	3.555.423.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				140 Unit	195.776.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				500 Orang	142.152.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		605.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.278.062.660,00**	-	-	-	-	-	-	**7.376.190.244,00**	-
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				6 Kawasan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		982.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.278.062.660,00**	-	-	-	-	-	-	**7.376.190.244,00**	-
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				40 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		121.058.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	710.677.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.065.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				14 Kawasan	3.409.843.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		715.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.278.062.660,00**	-	-	-	-	-	-	**7.376.190.244,00**	-
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	1.874.284.560,00			-	-	-	-	1.040.182.129,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				4 Dokumen	11.460.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.738.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1257 Orang	301.702.560,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		292.491.009,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				2 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2240 Orang	1.505.076.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		669.353.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				4 Laporan	56.046.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.599.820,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.278.062.660,00**	-	-	-	-	-	-	**7.376.190.244,00**	-
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	683.733.300,00			-	-	-	-	2.065.584.815,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				40 Laporan	4.120.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.350.584.815,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				150 Orang	361.784.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				25 Kegiatan	179.861.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	137.968.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		440.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**31.873.817.772,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31.873.817.772,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**31.873.817.772,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**24.395.489.172,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.395.489.172,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	84.195.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	16.068.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.733.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.489.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8.733.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.598.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.850.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	16.224.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	7.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.921.429.272,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	12.902.569.672,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.793.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	10.066.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	111.415.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	72.839.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3.558.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	6.760.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				155 Orang	23.998.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	490.284.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	131.525.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.175.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.272.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	183.908.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.471.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	212.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	13.280.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	109.180.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.104.865.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	5.243.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10.089.136.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10.486.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.450.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	662.850.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	652.450.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	7.632.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2.768.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					**-**	**7.478.328.600,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.879.772.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	2.766.211.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				150 Orang	11.999.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				165 Desa/Kelurahan	2.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	75.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran]	-	-	-	-	-	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	4.004.672.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	-	-	-	-	-	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				5 Dokumen	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran]	-	-	-	-	-	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	13.455.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	10.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	3.055.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	-	-	-	-	-	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	3.330.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				12 Dokumen	3.330.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	26.270.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	3.550.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				165 Desa/Kelurahan	21.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.04.0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana														
			Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran				1 Unit	1.420.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.478.328.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	555.501.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				12 Laporan	625.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	7.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				1 Unit	547.776.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL						**14.600.072.014,00**							**1.717.120.950,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.600.072.014,00**							**1.717.120.950,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**14.600.072.014,00**							**1.717.120.950,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**46.76 Nilai**	**8.722.808.714,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Dinas Sosial]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Sosial**	**47.20**	**46.66**	**46.71**	**46.76**	**8.722.808.714,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	245.222.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	134.822.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	19.999.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19.999.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.500.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	13.680.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	8.291.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	8.668.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Dokumen Keuangan yang Sesuai Standar*	-			100 Persen	8.018.487.814,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	7.826.171.414,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	114.357.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	77.959.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	-			100 Persen	110.822.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	109.822.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Alat Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi*	-			100 Persen	205.585.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.445.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	76.402.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	963.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	46.324.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1000 Paket	1.605.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	376.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	8.520.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	69.949.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Standar*	-			100 Persen	12.864.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	124.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	12.740.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi*	-			100 Persen	27.608.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	988.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	19.959.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terpelihara*	-			100 Persen	102.218.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	40.715.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	57.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4.043.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					**100 Persen**	**1.164.726.400,00**							**1.150.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**Presentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1.164.726.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1.150.000.000,00**	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Evaluasi Kinerja Pendamping dan Mitra Kerja*	-			100 Persen	1.164.726.400,00			-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	1.150.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				233 Keluarga	300.685.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	655.711.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial														
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				30 Orang	39.340.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				100 orang	168.989.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		990.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					**40 Persen**	**1.506.658.300,00**							**567.120.950,00**	
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	**Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**10**	**20**	**40**	**1.506.658.300,00**	-	-	-	-	-	-	**567.120.950,00**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Presentase Layanan Terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Berbasis Data PPKS*	-			40 Persen	1.192.072.200,00			-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	567.120.950,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	40.369.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	68.288.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	434.956.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	11.580.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	168.865.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	226.842.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	12.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	75.852.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	9.935.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		39.802.950,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	12.326.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		121.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	4.620.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		13.068.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis														
			Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi				10 Orang	91.218.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		211.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24.720.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		181.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Presentase layanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial*	-			40 Persen	314.586.100,00			-	-	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				250 Orang Dokumen	296.802.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya														
			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya				16 Kecamatan Orang	17.784.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					**40 Persen**	**1.749.028.600,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial]	**Presentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindugan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan** **Presentase penerima manfaat (individu/keluarga miskin) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** **Presentase pengelolaan data kemiskinan daerah**	**100**	**0**	**20**	**40**	**1.749.028.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase pengelolaan data PPKS dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Penerima Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial*	-			40 Persen	1.749.028.600,00			-	-	Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	306.256.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				3000 Usulan	1.442.772.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					**100 Persen**	**1.360.005.900,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana]	**Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.360.005.900,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Presentase Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi*	-			100 Persen	856.999.500,00			-	-	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	224.120.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	199.331.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	119.478.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	114.714.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	199.355.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Presentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana*	-			undefined	503.006.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	1.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	495.006.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah														
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana				100 Orang	7.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**					**100 Persen**	**96.844.100,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan]	**Presentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**96.844.100,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Yang Dipelihara*	-			100 Persen	96.844.100,00			-	-	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	96.844.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA						**16.583.635.056,00**							**13.557.723.556,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.494.116.056,00**							**13.557.723.556,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**16.494.116.056,00**							**13.557.723.556,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**7.910.947.456,00**							**8.167.723.556,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.910.947.456,00**	-	-	-	-	-	-	**8.167.723.556,00**	-
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	126.994.100,00			-	-	-	-	207.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	32.686.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		129.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.261.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.261.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.261.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.261.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	36.107.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	3.550.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	33.084.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	2.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.814.742.356,00			-	-	-	-	6.330.723.556,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	6.803.958.956,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.297.723.556,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.681.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	6.101.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	61.689.200,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	58.849.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.910.947.456,00**	-	-	-	-	-	-	**8.167.723.556,00**	-
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	335.876.000,00			-	-	-	-	396.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.910.947.456,00**	-	-	-	-	-	-	**8.167.723.556,00**	-
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	24.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.910.947.456,00**	-	-	-	-	-	-	**8.167.723.556,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.910.947.456,00**	-	-	-	-	-	-	**8.167.723.556,00**	-
	2.07.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	155.844.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	63.986.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	92.046.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	333.177.400,00			-	-	-	-	753.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.530.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	78.183.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	17.994.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.353.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		88.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.128.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	48.048.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	41.120.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	106.820.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
		-	-	-	-	-	-	**7.910.947.456,00**	-	-	-	-	-	-	**8.167.723.556,00**	-
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja]	-	-	-	-	-	**7.910.947.456,00**	-	-	-	-	-	-	**8.167.723.556,00**	-
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	104.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		104.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.238.400,00			-	-	-	-	45.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	32.238.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	206.230.000,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	197.850.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	7.310.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.910.947.456,00**	-	-	-	-	-	-	**8.167.723.556,00**	-
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.070.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**					**-**	**52.473.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	52.473.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	31.693.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				10 Orang	20.780.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**-**	**1.727.842.100,00**							**3.190.000.000,00**	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	**Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.727.842.100,00**	-	-	-	-	-	-	**3.190.000.000,00**	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	1.580.036.600,00			-	-	-	-	2.684.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				900 Orang	989.589.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		759.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	485.770.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				21 Unit	34.436.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.221.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				240 Orang	70.240.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas														
			Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas				1 Lembaga	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas														
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n				8 Kesepakatan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		704.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	11.935.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	11.935.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-			-	22.770.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				1 Perizinan	22.770.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-			-	54.737.900,00			-	-	-	-	275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				25 Perusahaan	54.737.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	58.362.600,00			-	-	-	-	231.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	58.362.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		231.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					**-**	**396.940.200,00**							**440.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja]	**Persentase Pencari kerja yang ditempatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**396.940.200,00**	-	-	-	-	-	-	**440.000.000,00**	-
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	178.806.000,00			-	-	-	-	99.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				20 Orang	34.060.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				400 Orang	10.624.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				200 Orang	31.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				10 Orang	70.790.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	31.832.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi														
			Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi				1 Lembaga	7.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				1 Lembaga	12.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
		-	-	-	-	-	-	**396.940.200,00**	-	-	-	-	-	-	**440.000.000,00**	-
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	177.959.200,00			-	-	-	-	165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				0 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		[Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja]	**Persentase Pencari kerja yang ditempatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**396.940.200,00**	-	-	-	-	-	-	**440.000.000,00**	-
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				450 Orang	177.959.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		154.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.675.000,00			-	-	-	-	176.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	20.675.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		-	-	-	-	-	-	**396.940.200,00**	-	-	-	-	-	-	**440.000.000,00**	-
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				10 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
		[Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja]	**Persentase Pencari kerja yang ditempatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**396.940.200,00**	-	-	-	-	-	-	**440.000.000,00**	-
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				40 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					**-**	**6.405.913.300,00**							**1.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pekerja yang terlindungi]	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**56.1**	**42.53**	**45.05**	**47.26**	**6.405.913.300,00**	-	-	-	-	-	-	**1.650.000.000,00**	-
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	276.356.900,00			-	-	-	-	170.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				60 Perusahaan	110.791.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				8 Perusahaan	110.809.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	54.756.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.129.556.400,00			-	-	-	-	1.479.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				35 Perkara	235.065.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		363.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				35 Perkara	264.831.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		484.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	119.488.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	450.503.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		418.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				180 Orang	5.059.667.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**89.519.000,00**							**0,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**89.519.000,00**							**0,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					**-**	**89.519.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89.519.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	89.519.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	23.647.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran														
			Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan				1 Lokasi	23.647.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan				35 Orang	18.578.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi														
			Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi				2 KK	23.647.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)						**21.389.483.859,00**							**29.289.924.497,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.389.483.859,00**							**29.289.924.497,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**2.683.136.800,00**							**3.729.469.841,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					**-**	**1.315.443.600,00**							**2.330.054.484,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Presentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhuk sosek**	**71**	**87,5**	**61**	**63**	**1.315.443.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.330.054.484,00**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Lembaga Pemerintah dalam melaksanakan Pengarusutamaan gender di Daerah*	-			34 Perangkat Daerah	59.356.600,00			-	-	-	-	255.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	49.336.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				34 Lembaga	10.020.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	606.793.000,00			-	-	-	-	1.595.054.484,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				33 orang	100.860.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.520.054.484,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				34 Orang	505.933.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	649.294.000,00			-	-	-	-	480.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				33 Lembaga	649.294.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		480.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					**-**	**237.681.600,00**							**216.000.000,00**	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	**Presentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**237.681.600,00**	-	-	-	-	-	-	**216.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	88.116.600,00			-	-	-	-	42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	70.436.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	17.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	108.465.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	21.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatataten/Kota				30 Orang	4.025.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				30 orang	14.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				30 orang	2.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				30 orang	7.340.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		-	-	-	-	-	-	**237.681.600,00**	-	-	-	-	-	-	**216.000.000,00**	-
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				30 orang	9.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	**Presentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**237.681.600,00**	-	-	-	-	-	-	**216.000.000,00**	-
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	41.100.000,00			-	-	-	-	54.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi				1 Laporan	13.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				16 orang	27.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					**-**	**428.246.600,00**							**244.175.357,00**	
		[Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak]	**Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**428.246.600,00**	-	-	-	-	-	-	**244.175.357,00**	-
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	428.246.600,00			-	-	-	-	244.175.357,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				1 Dokumen	428.246.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		244.175.357,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**					**-**	**52.254.600,00**							**195.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak]	**Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan penyusunan kebijakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**52.254.600,00**	-	-	-	-	-	-	**195.000.000,00**	-
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	52.254.600,00			-	-	-	-	195.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	45.204.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak				34 Lembaga	7.050.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					**-**	**313.505.400,00**							**276.000.000,00**	
		[Terjaminnya pemenuhan semua hak anak secara kemprehensif]	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**62,27**	**0**	**59,77**	**60,27**	**313.505.400,00**	-	-	-	-	-	-	**276.000.000,00**	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	46.490.800,00			-	-	-	-	180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Lembaga	46.490.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	267.014.600,00			-	-	-	-	96.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	267.014.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					**-**	**336.005.000,00**							**468.240.000,00**	
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	**Presentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komperhensif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**336.005.000,00**	-	-	-	-	-	-	**468.240.000,00**	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.814.600,00			-	-	-	-	171.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	41.264.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				34 Kegiatan	10.550.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**336.005.000,00**	-	-	-	-	-	-	**468.240.000,00**	-
	2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	**Presentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komperhensif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**336.005.000,00**	-	-	-	-	-	-	**468.240.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	134.297.000,00			-	-	-	-	189.240.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				35 Orang	16.340.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				35 Orang	28.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				10 Orang	10.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.040.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				35 Orang	8.050.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				35 Orang	32.856.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				35 Orang	18.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				35 Orang	19.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				35 Orang	1.551.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**336.005.000,00**	-	-	-	-	-	-	**468.240.000,00**	-
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	149.893.400,00			-	-	-	-	108.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	104.055.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	35.288.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	10.550.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**18.706.347.059,00**							**25.560.454.656,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**14.390.060.659,00**							**18.673.691.727,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan DP2KBP3A]	**Nilai Reformasi Birokrasi General DP2KBP3A**	**54.15**	**52.90**	**52.90**	**53.15**	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	526.937.000,00			-	-	-	-	682.778.151,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	100.701.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		144.519.557,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.715.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.010.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.715.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.010.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.715.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.010.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.715.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.010.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	70.350.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		261.971.434,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	240.069.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		106.246.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	41.072.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	51.884.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu*	-			100 %	12.706.729.359,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DP2KBP3A	-	14.136.976.644,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	12.567.121.459,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DP2KBP3A		13.972.958.374,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	36.844.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DP2KBP3A		42.036.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	3.550.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DP2KBP3A		3.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	95.021.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DP2KBP3A		113.582.270,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	4.192.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DP2KBP3A		4.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	111.787.000,00			-	-	-	-	137.909.073,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	13.265.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.232.360,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	64.815.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.404.713,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	33.707.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.272.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	524.971.600,00			-	-	-	-	924.865.419,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	90.906.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		141.419.433,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	64.156.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		186.695.433,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	369.908.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		416.750.553,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				123 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan DP2KBP3A]	**Nilai Reformasi Birokrasi General DP2KBP3A**	**54.15**	**52.90**	**52.90**	**53.15**	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	84.388.200,00			-	-	-	-	709.480.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.853.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		323.850.720,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	73.534.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		104.957.760,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		166.671.720,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	95.224.000,00			-	-	-	-	1.260.264.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		528.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	95.224.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		240.264.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		72.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan DP2KBP3A]	**Nilai Reformasi Birokrasi General DP2KBP3A**	**54.15**	**52.90**	**52.90**	**53.15**	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		-	-	-	-	-	-	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan DP2KBP3A]	**Nilai Reformasi Birokrasi General DP2KBP3A**	**54.15**	**52.90**	**52.90**	**53.15**	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	163.323.500,00			-	-	-	-	307.920.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	16.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		-	-	-	-	-	-	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	21.223.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan DP2KBP3A]	**Nilai Reformasi Birokrasi General DP2KBP3A**	**54.15**	**52.90**	**52.90**	**53.15**	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	126.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		259.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	176.700.000,00			-	-	-	-	513.498.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	23.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.498.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	146.700.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		114.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.390.060.659,00**	-	-	-	-	-	-	**18.673.691.727,00**	-
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**					**-**	**736.756.800,00**							**1.331.083.659,00**	
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	**Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)** **Total Fertility Rate (TFR)**	**2,09** **73**	**0** **2,15**	**2,14** **63**	**2,13** **65**	**736.756.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.331.083.659,00**	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	184.807.600,00			-	-	-	-	504.325.833,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.308.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35.065.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				48 Satuan Pendidikan	44.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		202.404.916,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	105.332.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.01.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		240.612.917,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	551.949.200,00			-	-	-	-	826.757.826,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				62 Laporan	409.565.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		264.627.993,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.676.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				17 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.572.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		117.504.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				62 Unit	142.384.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.462.633,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.915.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					**71,00 %**	**2.340.029.800,00**							**2.681.547.943,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana]	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)** **Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)** **Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi**	**10.8** **20,95-20,95** **71,95**	**11,07** **21-21** **71,8**	**11.05** **21-21** **71,83**	**11** **20,99-20,99** **71,85**	**2.340.029.800,00**	-	-	-	-	-	-	**2.681.547.943,00**	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Kegiatan KIE Masa*	-			16 Gerak	129.609.000,00			-	-	-	-	645.120.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	29.609.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		102.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				6 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.160.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				16 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.960.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				34 Organisasi	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia (SDM) Petugas lini lapangan*	-			141 Orang	1.228.332.800,00			-	-	-	-	647.352.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				20 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				17 Orang	268.332.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				10 Organisasi	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		137.352.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				12 Laporan	960.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes*	-			35 Faskes	715.204.600,00			-	-	-	-	891.075.943,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.803.943,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4853 Orang	124.253.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP														
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.480.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Dokumen	71.479.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				10 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		102.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				4853 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		78.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	105.354.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				65 Orang	115.920.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		104.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				16 Laporan	241.609.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				100 Orang	56.588.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				35 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.892.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				50 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		91.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Kampung KB*	-			165 Kampung KB	266.883.400,00			-	-	-	-	498.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				165 Unit	162.933.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		156.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				165 Kampung	103.950.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		162.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					**100 %**	**1.239.499.800,00**							**2.874.131.327,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera]	**Indeks Kerentanan Keluarga** **Indeks Lansia Tangguh** **Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)**	**19,9** **60,5** **6,4**	**18,7** **50** **7,6**	**18,9** **50,25** **7,4**	**19,1** **50,5** **7,2**	**1.239.499.800,00**	-	-	-	-	-	-	**2.874.131.327,00**	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			200 Kelompok	767.691.800,00			-	-	-	-	1.994.736.460,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				16 Laporan / Dokumen	141.248.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	345.844.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				32 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				4131 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				4131 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				4131 Orang	189.499.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		205.885.132,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				4 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				38 Kelompok	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		678.851.328,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				38 Kelompok	91.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	-			75 %	471.808.000,00			-	-	-	-	879.394.867,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				12 laporan	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		562.114.867,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga														
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				2 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		77.280.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				4 Laporan	321.808.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						**44.992.818.308,00**							**32.030.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.379.172.680,00**							**25.860.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**32.379.172.680,00**							**25.860.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**22.791.565.055,00**							**20.485.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Ketahaanan Pangan dan Pertanian**	**56.56**	**44.06**	**46.46**	**48.76**	**22.791.565.055,00**	-	-	-	-	-	-	**20.485.000.000,00**	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	362.337.640,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	185.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	121.002.820,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		95.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8.927.720,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	10.969.140,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.931.220,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	5.619.140,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	210.887.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	19.685.520.015,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	17.550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/bulan	19.537.406.655,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		17.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	63.296.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.882.440,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	68.934.120,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	548.349.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	5.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	418.501.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	124.748.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	731.537.500,00			-	-	-	-	835.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.335.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	22.806.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	66.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	69.980.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.791.565.055,00**	-	-	-	-	-	-	**20.485.000.000,00**	-
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Ketahaanan Pangan dan Pertanian**	**56.56**	**44.06**	**46.46**	**48.76**	**22.791.565.055,00**	-	-	-	-	-	-	**20.485.000.000,00**	-
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	306.928.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	133.487.900,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	573.983.500,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	55.070.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	-	-	-	-	-	**22.791.565.055,00**	-	-	-	-	-	-	**20.485.000.000,00**	-
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	518.913.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Ketahaanan Pangan dan Pertanian**	**56.56**	**44.06**	**46.46**	**48.76**	**22.791.565.055,00**	-	-	-	-	-	-	**20.485.000.000,00**	-
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	474.650.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	510.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	66.759.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				17 Laporan	343.552.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	64.338.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	415.187.000,00			-	-	-	-	645.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	56.541.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	105.276.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	17.850.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	235.520.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**					**-**	**4.449.333.000,00**							**925.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.449.333.000,00**	-	-	-	-	-	-	**925.000.000,00**	-
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.449.333.000,00			-	-	-	-	925.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	4.437.833.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				2 Laporan	11.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.449.333.000,00**	-	-	-	-	-	-	**925.000.000,00**	-
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				2 unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**-**	**4.477.582.825,00**							**3.025.000.000,00**	
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	**Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)** **Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)**	**85.7** **95**	**80.29** **92.1**	**80.8** **92.5**	**81.3** **93**	**4.477.582.825,00**	-	-	-	-	-	-	**3.025.000.000,00**	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	716.192.600,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	57.595.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				2 Laporan	89.073.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				4 Keluarga	211.501.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				2 Laporan	211.500.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	-	-	-	-	-	**4.477.582.825,00**	-	-	-	-	-	-	**3.025.000.000,00**	-
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														
			Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	**Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)** **Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)**	**85.7** **95**	**80.29** **92.1**	**80.8** **92.5**	**81.3** **93**	**4.477.582.825,00**	-	-	-	-	-	-	**3.025.000.000,00**	-
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	67.509.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	11.502.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	67.509.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	3.303.385.625,00			-	-	-	-	425.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	3.255.647.225,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				10 Ton	47.738.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	-	-	-	-	-	**4.477.582.825,00**	-	-	-	-	-	-	**3.025.000.000,00**	-
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				6 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	**Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)** **Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)**	**85.7** **95**	**80.29** **92.1**	**80.8** **92.5**	**81.3** **93**	**4.477.582.825,00**	-	-	-	-	-	-	**3.025.000.000,00**	-
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	458.004.600,00			-	-	-	-	1.150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	428.004.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					**-**	**394.682.800,00**							**675.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**6.67**	**12.12**	**11.52**	**10.3**	**394.682.800,00**	-	-	-	-	-	-	**675.000.000,00**	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	379.682.800,00			-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	321.678.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	43.004.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					**-**	**266.009.000,00**							**750.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**266.009.000,00**	-	-	-	-	-	-	**750.000.000,00**	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	266.009.000,00			-	-	-	-	750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	71.009.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	164.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**12.613.645.628,00**							**6.170.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**12.613.645.628,00**							**6.170.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**-**	**5.789.126.600,00**							**2.800.000.000,00**	
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian]	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**403769**	**358812**	**367414**	**375054**	**5.789.126.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.800.000.000,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	3.773.601.200,00			-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-	-	2.150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	1.060.711.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	2.143.668.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				25 Ton	102.755.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	-	-	-	-	-	**5.789.126.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.800.000.000,00**	-
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				2500 Batang	74.766.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian]	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**403769**	**358812**	**367414**	**375054**	**5.789.126.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.800.000.000,00**	-
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				2500 Batang	99.506.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan				1 Laporan	292.193.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	2.015.525.400,00			-	-	-	-	650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	1.910.525.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**-**	**6.174.456.428,00**							**1.820.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.174.456.428,00**	-	-	-	-	-	-	**1.820.000.000,00**	-
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	524.554.300,00			-	-	-	-	430.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				3 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian]	**Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasarana**	**500**	**100**	**500**	**500**	**6.174.456.428,00**	-	-	-	-	-	-	**1.820.000.000,00**	-
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan														
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	524.554.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	5.649.902.128,00			-	-	-	-	1.390.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	1.434.250.528,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	610.438.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	770.003.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				2 Unit	2.830.209.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**-**	**0,00**							**450.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian]	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian** **Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**450.000.000,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				15 Ha	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				6 Ha	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**450.000.000,00**	-
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				15 Ha	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**					**-**	**1.836.000,00**							**150.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.836.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	918.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian]	**Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**	**100**	**0**	**0**	**100**	**1.836.000,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	918.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**-**	**648.226.600,00**							**950.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian]	**Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya**	**310.64**	**54.79**	**97.87**	**140.43**	**648.226.600,00**	-	-	-	-	-	-	**950.000.000,00**	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	648.226.600,00			-	-	-	-	950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Unit	115.140.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	384.664.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				6 Unit	148.422.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**38.167.718.128,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**38.167.718.128,00**							**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**38.167.718.128,00**							**0,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**12.566.384.928,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Lingkungan Hidup**	**53.51**	**47.51**	**48.51**	**49.51**	**12.566.384.928,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	306.225.360,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	46.009.260,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			0				4 0	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			0				1 0	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				7 Data	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	100.216.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.350.648.568,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	11.299.239.568,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	36.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	15.409.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	45.999.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	9.999.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	35.999.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	119.988.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	99.988.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	520.253.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	82.806.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.005.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	217.749.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	67.530.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	117.162.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80.025.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	49.993.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	30.032.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	18.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	72.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.566.384.928,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.245.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	38.265.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Lingkungan Hidup**	**53.51**	**47.51**	**48.51**	**49.51**	**12.566.384.928,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14.980.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					**-**	**1.300.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP]	**Presentase ketersediaan kajian lingkungan hidup**	**100**	**42.86**	**100**	**100**	**1.300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	508.528.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	508.528.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	791.472.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	791.472.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					**-**	**1.550.481.900,00**							**0,00**	
		[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	**Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat**	**1.5**	**-**	**1.5**	**1.5**	**1.550.481.900,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	1.017.610.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	74.988.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	19.955.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut														
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				1 Laporan	88.937.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				81 Lokasi	748.749.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	34.992.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				1 Laporan	49.988.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	532.871.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	355.132.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	177.739.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					**-**	**60.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan RTH Kehati]	**Presentase RTH Kehati yang terkelola**	**100**	**100**	**100**	**100**	**60.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	60.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					**-**	**220.614.700,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3]	**Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3**	**12**	**40**	**12**	**12**	**220.614.700,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	220.614.700,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)														
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				10 Dokumen	20.000.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3														
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan				120 Usaha	200.614.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**					**-**	**304.750.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang ditterbitkan]	**Presentase peningkatan ketaatan kegiatan dan/atau usaha dalam pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup**	**72**	**17.57**	**60**	**64**	**304.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	304.750.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				15 Dokumen	56.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				66 Usaha/Kegiatan	248.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**-**	**374.750.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	**Persentase lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya**	**20**	**100**	**20**	**20**	**374.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	374.750.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	324.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				23 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					**-**	**70.000.000,00**							**0,00**	
		[Masyarakatnya /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH]	**Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH**	**27**	**35**	**27**	**27**	**70.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	70.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				27 Entitas	70.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**					**-**	**150.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti]	**Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				20 Pengaduan	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**-**	**21.570.736.600,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	**Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah** **Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**	**12** **81**	**-**	**2.02** **46.84**	**4** **48**	**21.570.736.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	21.570.736.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				165 Kelompok	545.999.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	77.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				4 Dokumen	348.749.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				80647 Ton	15.428.436.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				56 Unit	2.999.979.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				42844 Ton	490.586.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan				13 Unit	1.679.986.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**16.566.665.992,00**							**19.545.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.566.665.992,00**							**19.545.500.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**16.566.665.992,00**							**19.545.500.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**12.124.105.792,00**							**12.640.500.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**52.50**	**50.84**	**51.15**	**51.30**	**12.124.105.792,00**	-	-	-	-	-	-	**12.640.500.000,00**	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	66.057.600,00			-	-	-	-	128.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	11.584.880,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.881.220,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.824.140,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.581.220,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.224.140,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	7.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4 Dokumen	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	28.442.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.509.672.992,00			-	-	-	-	9.573.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	9.448.774.812,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	3.201.220,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	57.696.960,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	425.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	491.178.000,00			-	-	-	-	1.089.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	7.420.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	92.186.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	17.822.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	58.173.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16.906.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	6.390.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	292.280.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		325.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.207.327.200,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.179.349.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				23 Unit	27.978.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	681.810.000,00			-	-	-	-	1.110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	123.375.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		365.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	167.958.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	390.476.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		575.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	168.060.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	290.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	140.135.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		235.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	27.925.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					**-**	**2.992.032.500,00**							**4.245.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	**Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**100** **38**	**100** **27**	**100** **28**	**100** **30**	**2.992.032.500,00**	-	-	-	-	-	-	**4.245.000.000,00**	-
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	1.237.142.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	4.085.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				4 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				1500 Orang	25.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	1.211.882.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	1.754.890.500,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				6 Laporan	26.476.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				12 Laporan	1.728.414.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**-**	**244.348.800,00**							**620.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	**Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan** **Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan** **Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**244.348.800,00**	-	-	-	-	-	-	**620.000.000,00**	-
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	133.490.600,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				12 Layanan	133.490.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	110.858.200,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	370.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				6 Laporan	33.980.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**244.348.800,00**	-	-	-	-	-	-	**620.000.000,00**	-
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	**Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan** **Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan** **Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**244.348.800,00**	-	-	-	-	-	-	**620.000.000,00**	-
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	27.390.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	49.488.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					**-**	**1.129.064.900,00**							**2.005.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	**Presentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.129.064.900,00**	-	-	-	-	-	-	**2.005.000.000,00**	-
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	1.022.090.300,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	1.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				6 Dokumen	1.022.090.300,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	90.134.600,00			-	-	-	-	380.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	19.290.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				12 Dokumen	17.580.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	53.264.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	16.840.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	16.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**					**-**	**77.114.000,00**							**35.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.114.000,00**	-	-	-	-	-	-	**35.000.000,00**	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	77.114.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	77.114.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**27.595.617.012,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.595.617.012,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**27.595.617.012,00**							**0,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**7.713.205.012,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.713.205.012,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	282.047.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	70.597.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	13.117.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	13.740.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	12.187.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11.268.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	75.537.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	12.538.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	23.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	23.864.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	25.333.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.816.971.512,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33/14 Orang/bulan	6.696.392.112,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11.768.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	103.548.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen	284.874.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	35.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	55.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	194.794.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			0 Dokumen	228.096.500,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.216.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	31.797.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	12.703.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	74.493.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	19.815.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	24.708.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	59.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			17 Unit	101.215.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	89.765.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		-	-	-	-	-	-	**7.713.205.012,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	11.450.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**					**100 %**	**1.656.041.100,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas penataan desa]	**Presentase fasilitasi penataan desa**	**0**	**0**	**794.652100**	**874.117310**	**1.656.041.100,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Persentase desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya*	-			100 %	1.656.041.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				16 Desa	409.428.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				45 Desa	86.946.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				165 Unit	1.159.666.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**					**-**	**683.122.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya efektivitas kerja sama desa]	**Presentase fasilitasi kerjasama desa**	**0**	**0**	**723726000**	**796098600**	**683.122.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	683.122.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				20 Dokumen	250.958.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				20 Dokumen	347.206.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	84.958.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**5.271.084.300,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengasawan pemerintahan desa]	**Presentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya** **Presentase fasilitasi tata kelola desa**	**0**	**0**	**2231919600** **5004919304**	**2366708000** **5255165000**	**5.271.084.300,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	5.271.084.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				165 Dokumen	201.233.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				165 Dokumen	181.643.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				165 Dokumen	121.743.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				2582 Orang	4.244.681.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				165 Dokumen	97.445.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				165 Dokumen	66.910.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				1900 Orang	281.853.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	75.575.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					**-**	**12.272.164.200,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan]	**Presentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakat desa**	**0**	**0**	**5.783.828.592**	**6.362.211.451**	**12.272.164.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.272.164.200,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				16 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	174.738.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	7.852.897.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Dokumen	128.004.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5 Laporan	103.004.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	3.903.519.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						**44.280.097.981,00**							**46.106.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**44.280.097.981,00**							**46.106.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**44.280.097.981,00**							**46.106.000.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**13.909.279.414,00**							**23.316.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.909.279.414,00**	-	-	-	-	-	-	**23.316.000.000,00**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	492.074.460,00			-	-	-	-	1.630.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	99.838.840,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	31.668.820,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	23.672.340,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	16.697.720,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	16.490.340,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	63.756.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	177.470.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.085.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				23 Data	14.253.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	43.141.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.937.063.654,00			-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-	-	13.508.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				12 0	10.866.686.454,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		12.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	497.883.100,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		424.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	123.855.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		398.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	430.579.100,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		365.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	18.059.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		321.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	568.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		288.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	**13.909.279.414,00**	-	-	-	-	-	-	**23.316.000.000,00**	-
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		280.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	225.042.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	225.042.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				171 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan]	-	-	-	-	-	**13.909.279.414,00**	-	-	-	-	-	-	**23.316.000.000,00**	-
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	633.208.800,00			-	-	-	-	2.080.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	205.755.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	278.254.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	31.899.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	39.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	38.020.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	39.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.637.500,00			-	-	-	-	2.980.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.637.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.909.279.414,00**	-	-	-	-	-	-	**23.316.000.000,00**	-
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.909.279.414,00**	-	-	-	-	-	-	**23.316.000.000,00**	-
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		280.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	601.253.000,00			-	-	-	-	1.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	72.873.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				61 Unit	405.980.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	122.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**-**	**29.516.078.167,00**							**21.790.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	15.688.631.000,00			-	-	-	-	5.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1500 Unit	14.289.278.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				600 Unit	1.399.352.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	1.259.935.200,00			-	-	-	-	1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	91.074.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				5 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital				5 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				50 Orang	411.101.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	757.760.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	1.784.942.500,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1.369.058.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	415.884.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	1.881.083.606,00			-	-	-	-	4.170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				10 Unit	810.154.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				16 Orang	176.956.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				20000 Unit	169.960.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				18000 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				3 Laporan	90.888.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji														
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				5 Laporan	191.203.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				20 Unit	273.828.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	20.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		340.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	12.991.606,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	3.159.238.400,00			-	-	-	-	3.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	957.545.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)														
			Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun				1 Unit	49.920.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	91.975.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				10 Laporan	113.719.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				2 Dokumen	447.020.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				2 Laporan	1.449.058.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	55.740.000,00			-	-	-	-	810.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				10 Laporan	20.850.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				2 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				10 Laporan	34.890.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	205.002.300,00			-	-	-	-	1.310.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				5 Laporan	113.788.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				10 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	35.970.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				3 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	55.243.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	235.549.200,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	235.549.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				330 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.245.955.961,00			-	-	-	-	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	138.418.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5.107.537.561,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.13.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.13.0004	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	**29.516.078.167,00**	-	-	-	-	-	-	**21.790.000.000,00**	-
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					**-**	**854.740.400,00**							**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	-	-			-	0,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-			-	854.740.400,00			-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-	-	850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau														
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau														
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				5 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				1 Laporan	854.740.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						**16.070.412.907,80**							**24.143.584.596,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.065.844.907,80**							**24.143.584.596,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**15.409.835.707,80**							**24.143.584.596,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**BB (71.20) Nilai/Predikat 54,30 Nilai**	**8.017.106.073,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Kominfo dan Statistik**	**55.30**	**54.17**	**54.30**	**54.50**	**8.017.106.073,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi Jumlah perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			10 Dokumen 10 dokumen	135.462.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	51.217.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.108.280,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.136.680,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.134.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.468.660,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	41.902.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	16.495.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah*	-			37 dokumen	7.132.215.953,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	7.086.726.373,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.643.580,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Ngamprah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	41.846.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			22 laporan	6.144.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.999.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.145.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentasi terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	95.425.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6 Unit	27.232.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	19.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	34.693.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				88 Orang	14.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	86.903.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	18.311.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	9.008.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	15.391.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	3.653.100,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	40.540.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			10 unit	248.088.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	248.088.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			24 laporan	50.944.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.355.900,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	43.588.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara*	-			23 unit	261.921.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	129.451.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	14.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.017.106.073,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	118.220.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**100 %**	**1.110.223.634,80**							**0,00**	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemda]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.110.223.634,80**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)*	-			88.80 %	1.110.223.634,80			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				50 Laporan	75.120.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				16 Komunitas	365.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				50 Permohonan	28.271.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				100 Persentase	24.520.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				10 Rekomendasi	39.470.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	137.006.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	252.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				20 Konten	161.075.934,80	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				60 Orang	27.720.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					**0,09 Nilai 0,55 Nilai**	**6.282.506.000,00**							**24.143.584.596,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menunjang transformasi digital]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.282.506.000,00**	-	-	-	-	-	-	**24.143.584.596,00**	-
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola*	-			100 Persen	6.282.506.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Perangkat Daerah	-	24.143.584.596,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				15 Aplikasi	9.320.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	52.104.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				47 Perangkat Daerah	88.738.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		1.954.544.801,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				2 Layanan	40.714.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	52.104.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				5 Aplikasi	588.780.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	240.955.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		708.546.295,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	47.705.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				4 Laporan	52.125.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				373 Perangkat Daerah	4.961.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		21.480.493.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				2 Dokumen	69.676.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	78.314.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				2 Dokumen	568.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**356.009.200,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**3.04 Nilai 2.67 Nilai**	**356.009.200,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral dalam rangka mendukung penyelenggaraan SDI]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**356.009.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Memenuhi Standar Data*	-			3368 Dataset	356.009.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kabupaten Bandung Barat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				16 %	38.267.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				16 %	6.390.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				16 %	270.242.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				47 Orang	36.830.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				16 %	4.279.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**300.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**0,09 Nilai**	**300.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah*	-			100 %	266.296.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	209.438.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	14.808.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				47 Perangkat Daerah	30.068.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	11.981.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi*	-			47 Perangkat Daerah	33.704.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				2 Kegiatan	33.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X	**NON URUSAN**						**4.568.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**4.568.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**BB (71.20) Nilai/Predikat 54,30 Nilai**	**4.568.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.568.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi Jumlah perencanaan,penganggaran,evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			10 Dokumen 10 dokumen	4.568.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				6 Data	2.698.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	1.870.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						**16.023.124.863,50**							**9.763.796.875,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.023.124.863,50**							**9.763.796.875,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**16.023.124.863,50**							**9.763.796.875,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**74,5 Nilai**	**7.262.416.948,00**							**6.428.796.875,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Koperasi dan UKM**	**50.9**	**44.27**	**45.27**	**46.30**	**7.262.416.948,00**	-	-	-	-	-	-	**6.428.796.875,00**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	406.011.420,00			-	-	-	-	562.796.875,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	185.544.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		176.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	23.738.880,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	23.738.880,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.417.920,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.577.880,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	24.670.760,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	108.181.780,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	9.140.920,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		78.796.875,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	6.040.887.638,00			-	-	-	-	5.866.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5.957.010.538,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.800.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	13.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	47.564.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	22.632.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			3 Laporan	28.675.000,00			-	-	Pegawai	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	28.675.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	-			50 Orang 50 Laporan	292.411.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pegawai	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				43 Paket	33.045.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				43 Orang	259.366.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	293.826.590,00			-	-	Pegawai	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4.396.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	34.898.890,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	61.929.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	18.544.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	13.888.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	7.125.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				21 Laporan	19.319.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	133.726.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			20 Unit	11.111.100,00			-	-	Pegawai	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	11.111.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	57.259.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	57.259.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.262.416.948,00**	-	-	-	-	-	-	**6.428.796.875,00**	-
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			52 Unit	132.235.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	115.035.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	1.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Koperasi dan UKM**	**50.9**	**44.27**	**45.27**	**46.30**	**7.262.416.948,00**	-	-	-	-	-	-	**6.428.796.875,00**	-
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	16.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					**31.43 %**	**352.186.600,00**							**800.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi]	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**35.75**	**25.03**	**30.16**	**31.43**	**352.186.600,00**	-	-	-	-	-	-	**800.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*	-			100 %	352.186.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Koperasi	-	800.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				100 Unit Usaha	250.992.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Koperasi		350.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				300 Unit Usaha	101.194.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Koperasi		450.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**					**67.64 %**	**95.722.600,00**							**425.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi]	**Persentase Koperasi Aktif**	**71.60%**	**65,21**	**66.47%**	**67.64%**	**95.722.600,00**	-	-	-	-	-	-	**425.000.000,00**	-
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Koperasi yang dinilai kesehatannya*	-			250 Unit Usaha	95.722.600,00			-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Koperasi	-	425.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				258 Unit Usaha	95.722.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Koperasi		425.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					**19.79 %**	**3.040.988.600,00**							**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian]	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**25.54%**	**5.01%**	**18.09%**	**19.79%**	**3.040.988.600,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	-			2347 Orang	3.040.988.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pengurus, Pengelola dan Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				2347 Orang	3.040.988.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pengurus, Pengelola dan Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					**47.98 %**	**1.690.945.625,50**							**1.610.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produktivitas Koperasi]	**presentase koperasi berkualitas**	**51.06**	**46.45**	**47.22**	**47.98**	**1.690.945.625,50**	-	-	-	-	-	-	**1.610.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi*	-			25.82 %	1.690.945.625,50			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Koperasi dan Masyarakat	-	1.610.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				12 Kelompok Masyarakat	87.838.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Koperasi dan Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				46 Unit Usaha	191.154.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Koperasi dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				120 Unit Usaha	75.558.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Koperasi dan Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				60 Unit Usaha	41.525.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Koperasi dan Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				150 Unit Usaha	1.294.870.025,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Koperasi dan Masyarakat		800.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					**1,97 persentase**	**1.953.624.990,00**							**0,00**	
		[Peningkatan kemampuan dan kemandirian UMKM, pertumbuhan ekonomi daerah]	**Pertumbuhan Wirausaha**	**2.70**	**1**	**2.4**	**2.50**	**1.953.624.990,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	1.953.624.990,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				70 Unit Usaha	52.822.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				100 Unit Usaha	296.716.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				50 Unit Usaha	1.030.674.990,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				35 Orang	31.230.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				25 Unit Usaha	60.736.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1000 Unit Usaha	89.869.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				50 Orang	391.576.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**4,48 persentase**	**1.627.239.500,00**							**0,00**	
		[Peningkatan kesejahteraan, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing UMKM]	**Proporsi UMKM yang berdaya saing / Presentase pengembangan UMKM**	**8.40**	**4**	**4.48**	**5.12**	**1.627.239.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang berorientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil*	-			0,35 persentase	1.627.239.500,00			-	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat	-	0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	345.345.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
			Jumlah yang Difasilitasi				40 Orang	403.322.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.627.239.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				20 Unit Usaha	64.436.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Peningkatan kesejahteraan, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing UMKM]	**Proporsi UMKM yang berdaya saing / Presentase pengembangan UMKM**	**8.40**	**4**	**4.48**	**5.12**	**1.627.239.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				25 Unit Usaha	814.136.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**10.229.454.243,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.229.454.243,00**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**10.229.454.243,00**							**0,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**8.679.902.293,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu]	**Nilai Reformasi Birokrasi General DPMPTSP**	**56.50**	**50.72**	**51.80**	**52.55**	**8.679.902.293,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	150.500.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	57.514.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	16.548.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	16.641.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	16.548.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	16.641.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	26.608.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.069.394.252,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	7.019.394.252,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.679.902.293,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	191.658.760,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu]	**Nilai Reformasi Birokrasi General DPMPTSP**	**56.50**	**50.72**	**51.80**	**52.55**	**8.679.902.293,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	60.201.960,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	64.486.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	66.970.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	510.560.211,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.698.710,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	108.713.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.587.201,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55.036.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6.793.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	14.768.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	170.963.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.023.290,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.023.290,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.964.880,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.510.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.454.880,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	721.800.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	275.460.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	23.140.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	423.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					**-**	**149.371.300,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya iklim investasi daerah]	**Peningkatan dokumen investasi yang siap ditawarkan kepada investor**	**100**	**-**	**9**	**27**	**149.371.300,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**149.371.300,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				15 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	149.371.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		[Meningkatnya iklim investasi daerah]	**Peningkatan dokumen investasi yang siap ditawarkan kepada investor**	**100**	**-**	**9**	**27**	**149.371.300,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	149.371.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					**-**	**380.618.200,00**							**0,00**	
		[Tersedianya media informasi dan promosi investasi]	**Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**20**	**-**	**6**	**7**	**380.618.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	380.618.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	380.618.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					**-**	**535.480.000,00**							**0,00**	
		[Terwujudnya peningkatan jumlah perizinan yang diberikan secara lebih cepat dan berkualitas]	**Persentase waktu proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP**	**87.5**	**78.03**	**85**	**85.50**	**535.480.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	535.480.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				7000 Pelaku Usaha	360.905.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400 Pelaku Usaha	70.128.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				25 Kegiatan Usaha	104.446.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					**-**	**424.696.200,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan investasi daerah]	**Persentase pemenuhan kepatuhan teknis dan administrasi pelaku usaha**	**100**	**100**	**100**	**100**	**424.696.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	424.696.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	45.730.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				260 Pelaku Usaha	205.866.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				27 Kegiatan Usaha	173.100.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					**-**	**59.386.250,00**							**0,00**	
		[Tersedianya sistem informasi penanaman modal yang handal]	**Persentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**59.386.250,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	59.386.250,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	59.386.250,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						**29.243.132.076,00**							**43.066.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.034.186.076,00**							**42.866.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**29.034.186.076,00**							**42.866.000.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**6.607.163.466,00**							**8.938.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Pemuda dan Olahraga]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Pemuda dan Olahraga**	**52**	**48.95**	**49**	**50**	**6.607.163.466,00**	-	-	-	-	-	-	**8.938.000.000,00**	-
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	111.513.120,00			-	-	-	-	330.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	59.135.880,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.607.520,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.547.520,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.547.520,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.547.520,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	33.127.160,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.491.550.646,00			-	-	-	-	5.844.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	5.486.230.646,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.320.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	46.004.600,00			-	-	-	-	159.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	18.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		93.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	28.004.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	414.613.400,00			-	-	-	-	531.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.625.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	229.088.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		190.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	48.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	83.900.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		132.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	247.014.400,00			-	-	-	-	1.595.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	210.043.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	36.971.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	171.844.300,00			-	-	-	-	148.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	46.754.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	125.089.700,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	124.623.000,00			-	-	-	-	330.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	124.623.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					**-**	**5.262.407.400,00**							**18.903.000.000,00**	
		[Meningkatnya layanan kepemudaan dan daya saing pemuda]	**Presentase layanan kepemudaan**	**10.60**	**10.34**	**10.34**	**10.40**	**5.262.407.400,00**	-	-	-	-	-	-	**18.903.000.000,00**	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	4.434.267.400,00			-	-	-	-	17.913.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	185.648.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		770.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				10 Orang	1.157.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.108.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				5 Orang	44.060.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				4 Kegiatan	444.060.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				50 Orang	115.764.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				50 Unit	2.487.234.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	828.140.000,00			-	-	-	-	990.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	828.140.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		990.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**-**	**16.154.478.210,00**							**12.975.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembangunan olahraga dan prestasi olahraga]	**Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga** **Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga** **Indeks SDM Keolahragaan**	**0.37** **0.43** **0.72**	**0.31** **0.38** **0.67**	**0.32** **0.39** **0.67**	**0.33** **0.39** **0.68**	**16.154.478.210,00**	-	-	-	-	-	-	**12.975.000.000,00**	-
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.754.892.160,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	1.950.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota				1 Unit	45.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				25 Unit	5.709.892.160,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	210.866.600,00			-	-	-	-	1.870.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	100.842.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				215 Orang	110.024.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.320.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	745.277.200,00			-	-	-	-	4.809.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	138.665.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				315 Orang	63.109.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				30 Orang	94.663.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	448.839.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		198.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	7.768.744.000,00			-	-	-	-	2.255.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	7.764.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.544.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	1.674.698.250,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	2.091.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	15.190.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		33.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	35.835.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	9.700.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		33.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				90 Unit	1.388.421.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.320.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Lembaga	225.551.850,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**					**-**	**1.010.137.000,00**							**2.050.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas kepramukaan]	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kepramukaan**	**16000**	**13000**	**13500**	**14000**	**1.010.137.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.050.000.000,00**	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	1.010.137.000,00			-	-	-	-	2.050.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	394.060.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				150 Orang	37.580.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	-	-	-	-	-	**1.010.137.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.050.000.000,00**	-
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				10 Unit	578.497.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	X	**NON URUSAN**						**208.946.000,00**							**200.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**208.946.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**208.946.000,00**							**200.000.000,00**	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	208.946.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				42 Orang	208.946.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN						**17.715.723.696,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.715.723.696,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**9.060.678.099,00**							**0,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					**-**	**9.014.060.099,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**	**66.50**	**64.74**	**65.50**	**65.75**	**9.014.060.099,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.414.626.100,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	1.634.232.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	51.263.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				1 Layanan	710.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				35 Perpustakaan	41.026.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				1750 Eksemplar	66.198.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi														
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				1 Dokumen	8.980.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	383.987.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				3 Dokumen	45.785.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2600 Eksemplar	128.210.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Eksemplar	3.549.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	50.686.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.599.433.999,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				32 Orang	89.321.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				150 Perpustakaan	308.213.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				6 Perpustakaan	6.050.399.999,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	78.710.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				4 Lokus	72.790.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**					**-**	**46.618.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno]	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**50**	**0**	**0**	**10**	**46.618.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.419.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				1 Orang	39.084.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	1.335.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.199.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				10 Eksemplar	4.779.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				10 Eksemplar	1.420.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**8.655.045.597,00**							**0,00**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**6.966.354.797,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.966.354.797,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	33.096.600,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.730.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.086.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.464.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.086.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.464.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3.195.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	7.191.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	2.272.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	4.606.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.341.556.097,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	5.336.587.997,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.336.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.631.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	320.040.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				137 Unit	71.925.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				137 Paket	33.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	48.230.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				132 Orang	31.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				132 Orang	93.510.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				132 Orang	41.495.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	460.021.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.522.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	337.111.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	35.047.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	26.053.900,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.190.900,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	8.520.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	9.176.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	117.363.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				41 Unit	117.363.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	452.288.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	452.288.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	241.989.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	93.811.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	57.448.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	16.890.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	73.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					**-**	**1.595.712.800,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	**Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal** **Nilai Pengawasan Kearsipan Internal**	**73.00** **77.50**	**65.96** **74.65**	**68.00** **75.00**	**69.00** **75.50**	**1.595.712.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	243.748.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				3290 Berkas	9.396.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1907 Berkas	34.021.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				47 Laporan	73.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis														
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				26 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0006	Penyusunan Database Arsiparis														
			Jumlah arsiparis				1 Dokumen	14.931.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				50 Instansi	111.560.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	249.334.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				1 Arsip	15.111.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip				1 Naskah	109.906.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3 Arsip	72.431.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan														
			Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				1 Dokumen	51.886.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	1.102.630.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				47 Pengguna	91.782.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	1.010.848.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**					**-**	**79.627.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Perlindungan dan Penyelaman Arsip sesuai NSPK]	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**83.66**	**77**	**78.33**	**79**	**79.627.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	18.986.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2 Arsip	18.986.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-			-	27.706.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	9.051.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Arsip	5.491.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				1 Arsip	13.164.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	16.667.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				1 Arsip	11.176.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip	5.491.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	-			-	16.268.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				1 Arsip	5.491.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				1 Arsip	5.491.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				1 Arsip	5.286.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**					**-**	**13.351.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup]	**Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	**100**	**28**	**42**	**56**	**13.351.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-			-	13.351.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	8.010.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				1 Arsip	5.341.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN						**40.846.893.423,00**							**22.097.600.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**40.846.893.423,00**							**22.097.600.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**17.183.644.743,00**							**16.200.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**13.608.557.893,00**							**13.245.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perikanan dan Peternakan]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Perikanan dan Peternakan**	**57**	**45**	**47**	**49**	**13.608.557.893,00**	-	-	-	-	-	-	**13.245.000.000,00**	-
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	399.029.600,00			-	-	-	-	420.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	40.139.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	344.240.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.773.140.793,00			-	-	-	-	10.955.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	11.651.567.193,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.700.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	65.945.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.830.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	47.668.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.890.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.500.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.760.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.500.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.890.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	4.630.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	556.226.000,00			-	-	-	-	436.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				150 Unit	147.720.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	130.273.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	84.041.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	77.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	110.341.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	391.323.500,00			-	-	-	-	717.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.134.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	216.819.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	52.478.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.728.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	74.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	28.763.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	289.063.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	193.820.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	95.243.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.600.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	172.395.000,00			-	-	-	-	270.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	32.915.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	103.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	35.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.608.557.893,00**	-	-	-	-	-	-	**13.245.000.000,00**	-
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**-**	**30.134.600,00**							**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap]	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**263**	**224**	**226**	**234**	**30.134.600,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.134.600,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30.134.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**-**	**2.985.163.250,00**							**1.430.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya]	**Produksi Perikanan Budidaya**	**61595**	**52000**	**53133**	**54727**	**2.985.163.250,00**	-	-	-	-	-	-	**1.430.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	527.114.600,00			-	-	-	-	464.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				50 Kelompok	154.934.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		331.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.985.163.250,00**	-	-	-	-	-	**-**	**1.430.000.000,00**	-
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				10 Kelompok	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.200.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				16 Kelompok	370.050.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		127.800.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.130.000,00			-	-	-	-	11.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				5 Rekomendasi	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	2.455.918.650,00			-	-	-	-	955.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		267.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya]	**Produksi Perikanan Budidaya**	**61595**	**52000**	**53133**	**54727**	**2.985.163.250,00**	-	-	-	-	-	-	**1.430.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	471.187.650,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Cisomangbarat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		630.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	**2.985.163.250,00**	-	-	-	-	-	-	**1.430.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	26.868.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya]	**Produksi Perikanan Budidaya**	**61595**	**52000**	**53133**	**54727**	**2.985.163.250,00**	-	-	-	-	-	-	**1.430.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1.955.732.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**-**	**59.856.000,00**							**166.000.000,00**	
		[Meningktatnya pengawasan sumberdaya perikanan]	**Persentase perairan umum yang diawasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**59.856.000,00**	-	-	-	-	-	-	**166.000.000,00**	-
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	59.856.000,00			-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-	-	166.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				30 Pelaku Usaha	55.596.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-		3.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	2.130.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				10 Pelaku Usaha	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					**-**	**499.933.000,00**							**1.309.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan]	**Jumlah produksi olahan ikan**	**4318**	**3200**	**3383**	**3553**	**499.933.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.309.000.000,00**	-
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	142.073.000,00			-	-	-	-	154.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	142.073.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		154.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	206.130.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				60 Unit Usaha	206.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	151.730.000,00			-	-	-	-	605.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	151.730.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		605.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**23.663.248.680,00**							**5.897.600.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**-**	**17.324.906.000,00**							**920.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi komoditias peternakan]	**Peningkatan produksi komoditas peternakan**	**2**	**2**	**2**	**2**	**17.324.906.000,00**	-	-	-	-	-	-	**920.000.000,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	743.957.100,00			-	-	-	-	220.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	743.957.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.324.906.000,00**	-	-	-	-	-	-	**920.000.000,00**	-
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	57.734.600,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	57.734.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya produksi komoditias peternakan]	**Peningkatan produksi komoditas peternakan**	**2**	**2**	**2**	**2**	**17.324.906.000,00**	-	-	-	-	-	-	**920.000.000,00**	-
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-			-	57.807.600,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	57.807.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.465.406.700,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan														
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				170 Ton	708.882.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.324.906.000,00**	-	-	-	-	-	-	**920.000.000,00**	-
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				1 Laporan	15.756.524.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**-**	**4.577.044.480,00**							**1.550.000.000,00**	
		[Terpeliharanya Prasaran peternakan]	**Presentase prasarana peternakan yang terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.577.044.480,00**	-	-	-	-	-	-	**1.550.000.000,00**	-
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	3.957.014.480,00			-	-	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak														
			Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi				1 Unit	2.205.631.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan														
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	482.633.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1.268.749.680,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.577.044.480,00**	-	-	-	-	-	-	**1.550.000.000,00**	-
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	620.030.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	620.030.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					**-**	**1.572.203.200,00**							**3.020.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner]	**Presentase unit usaha pangan hewan yang memiliki sertifikat NKV/NKV** **Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis**	**100** **44.6**	**100** **30**	**100** **32.8**	**100** **34.3**	**1.572.203.200,00**	-	-	-	-	-	-	**3.020.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	450.409.600,00			-	-	-	-	700.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	224.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														
			Jumlah kader zoonosis				165 Orang	28.004.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	120.255.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	78.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.572.203.200,00**	-	-	-	-	-	-	**3.020.000.000,00**	-
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	121.438.000,00			-	-	-	-	555.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		190.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner]	**Presentase unit usaha pangan hewan yang memiliki sertifikat NKV/NKV** **Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis**	**100** **44.6**	**100** **30**	**100** **32.8**	**100** **34.3**	**1.572.203.200,00**	-	-	-	-	-	-	**3.020.000.000,00**	-
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	22.930.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		-	-	-	-	-	-	**1.572.203.200,00**	-	-	-	-	-	-	**3.020.000.000,00**	-
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	98.508.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner]	**Presentase unit usaha pangan hewan yang memiliki sertifikat NKV/NKV** **Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis**	**100** **44.6**	**100** **30**	**100** **32.8**	**100** **34.3**	**1.572.203.200,00**	-	-	-	-	-	-	**3.020.000.000,00**	-
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	773.027.200,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	773.027.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	227.328.400,00			-	-	-	-	1.265.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				0 Unit Usaha	25.530.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		495.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				35 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan														
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				80 Orang	148.930.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				60 Unit Usaha	52.868.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					**-**	**89.350.000,00**							**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan]	**Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak**	**100**	**100**	**100**	**100**	**89.350.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	89.350.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis														
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	89.350.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**					**-**	**28.082.000,00**							**42.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.082.000,00**	-	-	-	-	-	-	**42.000.000,00**	-
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-			-	28.082.000,00			-	-	-	-	42.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi				1 Laporan	28.082.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**-**	**71.663.000,00**							**315.600.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	71.663.000,00			-	-	-	-	315.600.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		211.600.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		[Meningkatnya Kapasitas kelompok Ternak]	**Presentase kelompok peternakan yang dibina**	**100**	**100**	**100**	**100**	**71.663.000,00**	-	-	-	-	-	-	**315.600.000,00**	-
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	71.663.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		104.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**15.811.054.850,00**							**21.334.792.403,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.138.670.600,00**							**4.600.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.138.670.600,00**							**4.600.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					**-**	**1.760.482.600,00**							**2.500.000.000,00**	
		[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan]	**Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan**	**28.68**	**35**	**16.22**	**18.71**	**1.760.482.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.500.000.000,00**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	99.999.800,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	99.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.760.482.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.500.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan]	**Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan**	**28.68**	**35**	**16.22**	**18.71**	**1.760.482.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.500.000.000,00**	-
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	466.639.800,00			-	-	-	-	1.275.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				12 Objek	266.639.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		675.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				100 Sertifikat	200.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.193.843.000,00			-	-	-	-	725.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				100 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		325.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				11 Unit	1.193.843.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					**-**	**0,00**							**375.000.000,00**	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	**Presentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan**	**34**	**8.58**	**12.86**	**17.15**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**375.000.000,00**	-
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	375.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				3 Sertifikat	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					**-**	**100.000.000,00**							**375.000.000,00**	
		[meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah]	**Persentase SDM /lembaga sejarah yang dibina**	**42.86**	**0**	**10.00**	**18.46**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**375.000.000,00**	-
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	375.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				50 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					**-**	**278.188.000,00**							**1.350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	**Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**33.39**	**50**	**9.6**	**14.36**	**278.188.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.350.000.000,00**	-
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	278.188.000,00			-	-	-	-	975.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				30 Objek	278.188.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		525.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				6 Objek	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	375.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				17 Objek	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**13.672.384.250,00**							**16.734.792.403,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**13.672.384.250,00**							**16.734.792.403,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**9.491.537.342,00**							**8.934.792.403,00**	
		[Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	**58.26**	**-**	**48.26**	**50.26**	**9.491.537.342,00**	-	-	-	-	-	-	**8.934.792.403,00**	-
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	255.316.900,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	176.883.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.542.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.841.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.542.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.841.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	4.542.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4.542.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	50.582.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.902.157.142,00			-	-	-	-	7.331.959.364,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	7.823.437.942,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.236.959.364,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	39.359.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	39.359.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	228.582.000,00			-	-	-	-	285.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	87.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	141.582.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	492.956.000,00			-	-	-	-	345.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	47.846.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	103.129.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	51.646.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	23.430.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	210.895.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	56.009.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	112.710.300,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	112.710.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	499.815.000,00			-	-	-	-	342.833.039,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	282.815.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		255.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.833.039,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	217.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					**-**	**1.420.322.508,00**							**3.075.000.000,00**	
		[Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata]	**Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata**	**3**	**3**	**3**	**3**	**1.420.322.508,00**	-	-	-	-	-	-	**3.075.000.000,00**	-
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	378.328.948,00			-	-	-	-	1.025.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	99.976.948,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				5 Lokasi	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				25 Orang	278.352.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	430.464.000,00			-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-	-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Dokumen	430.464.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.420.322.508,00**	-	-	-	-	-	-	**3.075.000.000,00**	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	611.529.560,00			-	-	-	-	1.150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				3 Lokasi	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata]	**Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata**	**3**	**3**	**3**	**3**	**1.420.322.508,00**	-	-	-	-	-	-	**3.075.000.000,00**	-
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Dokumen	99.999.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				25 Unit	282.171.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	229.358.560,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota														
			Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				1 Usaha Pariwisata	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota														
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021				1 Usaha	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					**-**	**1.425.006.800,00**							**2.400.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.425.006.800,00**	-	-	-	-	-	-	**2.400.000.000,00**	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	1.425.006.800,00			-	-	-	-	2.400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya jangkauan pemasaraan pariwisata]	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**4603815**	**3435438**	**3607210**	**3787570**	**1.425.006.800,00**	-	-	-	-	-	-	**2.400.000.000,00**	-
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				2 Dokumen	57.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	789.411.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	578.395.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**					**-**	**849.013.600,00**							**1.125.000.000,00**	
		[meningkatnya kualitas ekosistem kreatif]	**Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual**	**100**	**100**	**100**	**100**	**849.013.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.125.000.000,00**	-
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	799.013.600,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**849.013.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.125.000.000,00**	-
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		[meningkatnya kualitas ekosistem kreatif]	**Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual**	**100**	**100**	**100**	**100**	**849.013.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.125.000.000,00**	-
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	99.999.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**849.013.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.125.000.000,00**	-
	3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Insentif yang Diberikan				5 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		[meningkatnya kualitas ekosistem kreatif]	**Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual**	**100**	**100**	**100**	**100**	**849.013.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.125.000.000,00**	-
	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah														
			Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				1 Lembaga	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual														
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	125.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**849.013.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.125.000.000,00**	-
	3.26.04.2.02.0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		[meningkatnya kualitas ekosistem kreatif]	**Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual**	**100**	**100**	**100**	**100**	**849.013.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.125.000.000,00**	-
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	102.013.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Produk	172.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					**-**	**486.504.000,00**							**1.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]	**Presentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi**	**21**	**9**	**11**	**13**	**486.504.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.200.000.000,00**	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	302.284.000,00			-	-	-	-	650.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	152.284.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**486.504.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.200.000.000,00**	-
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				50 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]	**Presentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi**	**21**	**9**	**11**	**13**	**486.504.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.200.000.000,00**	-
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				30 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	184.220.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				50 Orang	94.220.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**486.504.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.200.000.000,00**	-
	3.26.05.2.02.0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal				1 Lembaga	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]	**Presentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi**	**21**	**9**	**11**	**13**	**486.504.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.200.000.000,00**	-
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				25 Orang	90.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**27.895.312.856,00**							**21.498.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**27.895.312.856,00**							**21.498.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**19.298.072.656,00**							**18.938.000.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**16.547.711.856,00**							**16.567.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.547.711.856,00**	-	-	-	-	-	-	**16.567.000.000,00**	-
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	27.077.260,00			-	-	-	-	137.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7.912.340,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.197.940,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.627.320,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.452.340,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.627.320,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	7.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.825.319.468,00			-	-	-	-	14.979.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	14.816.710.108,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	3.652.340,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4.957.020,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	120.765.000,00			-	-	-	-	260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	42.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	77.965.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				110 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	797.830.500,00			-	-	-	-	480.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	534.695.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	58.356.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	65.457.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	31.347.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				90 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.780.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	47.195.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	170.805.100,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	170.805.100,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	508.949.528,00			-	-	-	-	485.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	286.562.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.713.728,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.440.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	186.233.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	96.965.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	68.165.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	28.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					**-**	**179.706.200,00**							**208.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	127.462.200,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	127.462.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	16.972.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	16.972.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-	-			-	17.272.000,00			-	-	-	-	37.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				1 Dokumen	17.272.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	-	-			-	0,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri														
			Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-			-	18.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya														
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					**-**	**717.393.000,00**							**450.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	717.393.000,00			-	-	-	-	340.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	168.435.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	548.958.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	0,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					**-**	**1.411.884.400,00**							**863.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	78.259.000,00			-	-	-	-	250.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	29.590.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	48.669.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	1.273.725.400,00			-	-	-	-	387.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	1.273.725.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	59.900.000,00			-	-	-	-	225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan														
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	20.658.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				12 Laporan	19.834.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	19.408.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					**-**	**349.205.200,00**							**455.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	**Nilai Ekspor Barang**	**4427.07**	**3036.10**	**3077.37**	**3347.31**	**349.205.200,00**	-	-	-	-	-	-	**455.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	349.205.200,00			-	-	-	-	455.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4 Pelaku Usaha	97.176.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				4 Pelaku Usaha	119.388.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				2 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	-	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				3 Produk	132.641.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					**-**	**92.172.000,00**							**180.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92.172.000,00**	-	-	-	-	-	-	**180.000.000,00**	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	92.172.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3 Unit	92.172.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				4 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					**-**	**0,00**							**215.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri]	**Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan**	**90**	**40**	**45**	**55**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**215.000.000,00**	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	0,00			-	-	-	-	215.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				3 UMKM	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**8.597.240.200,00**							**2.560.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					**-**	**8.347.240.200,00**							**2.080.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.347.240.200,00**	-	-	-	-	-	-	**2.080.000.000,00**	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	8.347.240.200,00			-	-	-	-	2.080.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	724.645.900,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1.044.569.300,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	174.738.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	3.152.915.700,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	2.436.622.100,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	813.748.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**					**-**	**50.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**					**-**	**200.000.000,00**							**355.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	355.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**105.011.467.998,00**							**67.462.599.206,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**48.766.042.290,00**							**8.350.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**48.766.042.290,00**							**8.350.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					**-**	**44.050.031.990,00**							**4.750.000.000,00**	
		[Meningkatnya kerja sama strategis Regional yang ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.050.031.990,00**	-	-	-	-	-	-	**4.750.000.000,00**	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	1.314.318.300,00			-	-	-	-	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	430.965.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	503.644.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	379.708.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.050.031.990,00**	-	-	-	-	-	-	**4.750.000.000,00**	-
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	39.949.454.900,00			-	-	-	-	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	39.040.828.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.050.031.990,00**	-	-	-	-	-	-	**4.750.000.000,00**	-
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	451.715.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	456.910.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.050.031.990,00**	-	-	-	-	-	-	**4.750.000.000,00**	-
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	2.209.036.900,00			-	-	-	-	1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				30 Dokumen	546.897.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	1.137.003.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				5 Dokumen	525.135.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kerja sama strategis Regional yang ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.050.031.990,00**	-	-	-	-	-	-	**4.750.000.000,00**	-
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	577.221.890,00			-	-	-	-	800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	215.701.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	182.129.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.050.031.990,00**	-	-	-	-	-	-	**4.750.000.000,00**	-
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	179.391.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					**-**	**4.716.010.300,00**							**3.600.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan]	**Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti**	**95**	**65**	**70**	**75**	**4.716.010.300,00**	-	-	-	-	-	-	**3.600.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	1.452.981.200,00			-	-	-	-	1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	484.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	484.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	484.327.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.716.010.300,00**	-	-	-	-	-	-	**3.600.000.000,00**	-
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan]	**Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti**	**95**	**65**	**70**	**75**	**4.716.010.300,00**	-	-	-	-	-	-	**3.600.000.000,00**	-
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	1.263.029.100,00			-	-	-	-	850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	434.933.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	383.873.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	444.222.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa]	**Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti**	**95**	**60**	**65**	**70**	**4.716.010.300,00**	-	-	-	-	-	-	**3.600.000.000,00**	-
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	2.000.000.000,00			-	-	-	-	1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	365.060.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	915.262.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.716.010.300,00**	-	-	-	-	-	-	**3.600.000.000,00**	-
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				25 Orang	719.676.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**56.245.425.708,00**							**59.112.599.206,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**56.245.425.708,00**							**59.112.599.206,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**56.245.425.708,00**							**59.112.599.206,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.160.061.509,00			-	-	-	-	1.824.409.722,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	897.348.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	20.582.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	51.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	25.982.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	20.582.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	46.480.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	66.680.209,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				10 Data	31.275.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74.409.722,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	37.517.791.838,00			-	-	-	-	31.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125/14 Orang/bulan	37.125.280.538,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	246.941.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	80.376.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	28.917.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	17.142.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	9.229.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	9.905.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	68.925.000,00			-	-	-	-	138.189.484,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74.409.722,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	68.925.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.779.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	526.484.400,00			-	-	-	-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	62.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	116.895.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	347.589.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.376.247.500,00			-	-	-	-	4.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.690.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.059.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	7.153.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	7.446.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15.850.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.685.638.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	638.410.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	693.380.000,00			-	-	-	-	4.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	18.380.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	675.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.924.008.900,00			-	-	-	-	3.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	427.878.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	155.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	465.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.875.080.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.582.756.600,00			-	-	-	-	1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	1.083.488.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	273.189.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	185.928.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	40.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	4.568.836.111,00			-	-	-	-	5.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/14 Orang/Bulan	2.448.836.111,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	40.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	80.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/14 Orang/Bulan	2.000.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	326.039.600,00			-	-	-	-	1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	132.283.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	115.893.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	77.863.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	1.200.004.650,00			-	-	-	-	1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	209.735.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	258.745.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	324.964.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	182.916.750,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	223.642.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	3.300.889.600,00			-	-	-	-	3.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	1.509.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	1.392.136.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	399.603.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**92.679.338.587,00**							**95.523.445.650,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**92.664.352.587,00**							**95.506.445.650,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**92.664.352.587,00**							**95.506.445.650,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**73.130.224.137,00**							**78.587.567.650,00**	
		[Meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat DPRD]	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**56.00**	**44.57**	**46.00**	**48.00**	**73.130.224.137,00**	-	-	-	-	-	-	**78.587.567.650,00**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	204.654.500,00			-	-	-	-	235.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	24.976.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	19.512.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	25.091.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	24.976.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	24.976.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	24.976.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	24.976.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	4.610.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	5.585.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	24.976.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.060.478.523,00			-	-	-	-	7.610.000.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	8.923.348.523,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.450.000.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	42.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	48.005.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	23.110.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	23.415.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	2.181.762.300,00			-	-	-	-	335.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	49.999.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	59.683.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.953.569.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	60.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	25.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	33.510.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.147.435.300,00			-	-	-	-	2.915.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	14.978.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	299.792.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	299.989.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		245.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	149.974.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	199.920.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	465.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	360.790.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	291.991.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.573.618.000,00			-	-	-	-	1.565.100.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	490.930.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.130.224.137,00**	-	-	-	-	-	-	**78.587.567.650,00**	-
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	344.188.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		435.100.700,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat DPRD]	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**56.00**	**44.57**	**46.00**	**48.00**	**73.130.224.137,00**	-	-	-	-	-	-	**78.587.567.650,00**	-
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	500.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.130.224.137,00**	-	-	-	-	-	-	**78.587.567.650,00**	-
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	238.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat DPRD]	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**56.00**	**44.57**	**46.00**	**48.00**	**73.130.224.137,00**	-	-	-	-	-	-	**78.587.567.650,00**	-
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	217.411.800,00			-	-	-	-	190.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	22.999.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	34.427.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	129.985.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	273.374.800,00			-	-	-	-	885.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	49.831.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	35.095.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	63.470.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	24.977.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	56.823.822.514,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	53.587.466.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	56.543.822.514,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		53.287.466.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	130.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	647.666.400,00			-	-	-	-	11.265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				50 Dokumen	17.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				10 Laporan	75.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				33 Laporan	344.868.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				5 Paket	209.998.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		135.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					**-**	**19.534.128.450,00**							**16.918.878.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Perpu]	**Persentase Penetapan Ranperda Tahun N** **Presentase ketepatan penetapan perda APBD Tahun n**	**100**	**0**	**100**	**100**	**19.534.128.450,00**	-	-	-	-	-	-	**16.918.878.000,00**	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	1.759.480.000,00			-	-	-	-	1.771.878.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				20 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		540.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	396.569.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		324.578.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	24.215.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		146.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	125.271.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		135.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				100 Orang	213.425.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		325.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	**Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**19.534.128.450,00**	-	-	-	-	-	-	**16.918.878.000,00**	-
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	1.400.700.950,00			-	-	-	-	1.380.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	449.558.950,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	199.920.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	199.914.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	199.706.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	199.930.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	151.672.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	938.851.000,00			-	-	-	-	1.130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				20 Laporan	100.420.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				20 Laporan	124.485.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				20 Laporan	119.690.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				20 Laporan	109.940.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				20 Laporan	119.690.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				20 Dokumen	110.196.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				6 Dokumen	200.075.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	54.355.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Perpu]	**Persentase Penetapan Ranperda Tahun N** **Presentase ketepatan penetapan perda APBD Tahun n**	**100**	**0**	**100**	**100**	**19.534.128.450,00**	-	-	-	-	-	-	**16.918.878.000,00**	-
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	3.253.401.500,00			-	-	-	-	700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				4 Dokumen	55.010.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	2.632.434.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	47.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				10 Orang	54.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	83.457.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				20 Dokumen	305.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	**Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**19.534.128.450,00**	-	-	-	-	-	-	**16.918.878.000,00**	-
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	7.305.243.000,00			-	-	-	-	8.232.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3 Laporan	88.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	230.049.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		212.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	6.840.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		7.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				50 Orang	146.694.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		135.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Perpu]	**Persentase Penetapan Ranperda Tahun N** **Presentase ketepatan penetapan perda APBD Tahun n**	**100**	**0**	**100**	**100**	**19.534.128.450,00**	-	-	-	-	-	-	**16.918.878.000,00**	-
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	106.000.000,00			-	-	-	-	140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	53.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	53.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-			-	32.962.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				12 Dokumen	32.962.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	4.737.490.000,00			-	-	-	-	3.490.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	1.500.350.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	28.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	119.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	3.071.460.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				4 Dokumen	17.930.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		145.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X	**NON URUSAN**						**14.986.000,00**							**17.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**14.986.000,00**							**17.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**14.986.000,00**							**17.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.986.000,00**	-	-	-	-	-	-	**17.000.000,00**	-
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	14.986.000,00			-	-	-	-	17.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	14.986.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						**18.909.755.447,00**							**23.064.559.954,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**18.909.755.447,00**							**23.064.559.954,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**18.029.005.497,00**							**21.390.559.954,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**12.911.075.097,00**							**15.088.059.954,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bappelitbangda]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Bappelitbangda**	**55.00**	**50.06**	**50.88**	**51.71**	**12.911.075.097,00**	-	-	-	-	-	-	**15.088.059.954,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	335.736.020,00			-	-	-	-	473.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	150.887.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.471.220,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8.214.140,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.471.220,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.214.140,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	11.469.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	39.371.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		77.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	96.246.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	6.390.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.391.585.277,00			-	-	-	-	13.570.059.954,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	11.160.754.337,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.130.059.954,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	88.204.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		169.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	40.506.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		58.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	95.010.440,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	7.110.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	28.982.000,00			-	-	-	-	66.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	28.982.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	123.289.900,00			-	-	-	-	264.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	52.395.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	70.894.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	149.805.300,00			-	-	-	-	297.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	36.860.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	19.076.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	1.896.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.153.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	81.818.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	495.750.000,00			-	-	-	-	121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	495.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.911.075.097,00**	-	-	-	-	-	-	**15.088.059.954,00**	-
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bappelitbangda]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Bappelitbangda**	**55.00**	**50.06**	**50.88**	**51.71**	**12.911.075.097,00**	-	-	-	-	-	-	**15.088.059.954,00**	-
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119.161.600,00			-	-	-	-	88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	119.161.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		77.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	266.765.000,00			-	-	-	-	209.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	227.625.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9.140.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.911.075.097,00**	-	-	-	-	-	-	**15.088.059.954,00**	-
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					**-**	**2.287.930.500,00**							**2.132.500.000,00**	
		[Meningkatnya integrasi, sinkronisasi, dan efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah]	**Nilai Komponen isi dokumen perencanaan pembangunan** **persentase capaian kinerja Daerah**	**100** **3.0**	**0** **2.02**	**100** **2.1**	**100** **2.2**	**2.287.930.500,00**	-	-	-	-	-	-	**2.132.500.000,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	1.535.399.500,00			-	-	-	-	1.142.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	5.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	5.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	51.860.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	21.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	421.080.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1 Usulan	60.440.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	969.359.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-	-	420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	116.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	134.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	502.531.000,00			-	-	-	-	570.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	92.254.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	410.276.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**-**	**2.829.999.900,00**							**4.170.000.000,00**	
		[Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia]	**persentase capaian kinerja perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100**	**0**	**100**	**100**	**2.829.999.900,00**	-	-	-	-	-	-	**4.170.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	1.181.999.900,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	1.090.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	265.082.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				23 Laporan	81.898.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				23 Laporan	51.499.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	103.416.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	292.319.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				12 Laporan	82.455.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				12 Laporan	82.399.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	222.927.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam]	**persentase capaian kinerja perangkat daerah mitra bidang PSDA**	**100**	**0**	**100**	**100**	**2.829.999.900,00**	-	-	-	-	-	-	**4.170.000.000,00**	-
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	786.000.000,00			-	-	-	-	1.540.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	139.861.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	22.059.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	33.426.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan	217.525.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	129.138.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	19.773.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	34.306.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	189.912.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	**persentase capaian kinerja perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**2.829.999.900,00**	-	-	-	-	-	-	**4.170.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	862.000.000,00			-	-	-	-	1.540.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	200.212.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		261.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	26.120.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		107.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	174.756.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		261.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	212.738.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		246.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		123.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	48.535.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		138.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	165.559.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		308.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**880.749.950,00**							**1.674.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					**-**	**512.917.950,00**							**1.650.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah]	**persentase hasil litbang yang dimanfaatkan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**512.917.950,00**	-	-	-	-	-	-	**1.650.000.000,00**	-
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	169.159.000,00			-	-	-	-	506.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	83.995.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				7 Laporan	85.164.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		442.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	243.627.700,00			-	-	-	-	442.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				3 Dokumen	173.908.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		189.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				2 Dokumen	35.896.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		126.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				2 Dokumen	33.823.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		126.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	100.131.250,00			-	-	-	-	316.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2 Dokumen	26.439.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		126.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				2 Dokumen	42.139.750,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		126.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	31.552.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				4 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		258.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**					**-**	**367.832.000,00**							**24.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah]	**Persentase hasil riset yang dimanfaatkan** **Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan**	**100** **55**	**100** **20**	**100** **30**	**100** **35**	**367.832.000,00**	-	-	-	-	-	-	**24.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	367.832.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				1 Laporan	18.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				1 Laporan	263.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				1 Laporan	54.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi														
			Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi				1 Naskah	31.282.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**675.074.679.027,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**675.074.679.027,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**675.074.679.027,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**135.978.002.187,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General BKAD**	**59**	**47,3**	**49**	**51**	**135.978.002.187,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	170.804.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	35.146.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	29.224.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	47.386.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.417.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	21.384.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	31.246.300,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135.978.002.187,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General BKAD**	**59**	**47,3**	**49**	**51**	**135.978.002.187,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	109.215.339.387,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	109.055.123.787,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	69.211.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	41.619.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	49.384.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	49.476.800,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135.978.002.187,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	49.476.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Badan Keuangan dan Aset Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General BKAD**	**59**	**47,3**	**49**	**51**	**135.978.002.187,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70.173.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				79 Unit	33.830.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	25.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				360 Orang	10.843.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	539.435.400,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.536.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.809.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	15.060.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	202.125.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.560.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				18 Laporan	56.009.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	68.656.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	5.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	567.075.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	540.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	27.075.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.174.344.800,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	49.476.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.004.868.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	191.353.600,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	85.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	7.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	-	-	-	-	-	**135.978.002.187,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	98.953.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					**-**	**537.631.595.790,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya tata kelola anggaran]	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD** **Presentase alokasi belanja infrasturktur pelayanan publik**	**30** **40**	**24.22** **38**	**25** **37**	**30** **35**	**537.631.595.790,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	2.100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				3 Dokumen	74.945.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	74.945.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				47 Dokumen	85.914.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				47 Dokumen	122.789.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				47 Dokumen	82.370.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				47 Dokumen	86.409.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	583.114.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	620.376.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	165.270.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	23.048.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	88.951.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	14.464.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				115 Orang	77.398.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya tata kelola perbendaharaan]	**Persentase Penurunan SILPA** **Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**100** **15**	**100**	**100** **15**	**100** **15**	**537.631.595.790,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	684.454.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				4 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	28.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	63.582.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	50.450.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	370.638.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	96.934.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				94 Orang	20.590.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan]	**Persentase laporan keuangan tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**537.631.595.790,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	565.551.400,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	319.556.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	245.995.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**537.631.595.790,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	534.281.590.390,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				4 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya tata kelola perbendaharaan]	**Persentase Penurunan SILPA** **Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**100** **15**	**100**	**100** **15**	**100** **15**	**537.631.595.790,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	428.615.147.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	37.905.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				2 Laporan	67.761.443.390,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan]	**Persentase laporan keuangan tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**537.631.595.790,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				94 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					**-**	**1.465.081.050,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**2**	**0.15**	**2**	**2**	**1.465.081.050,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.465.081.050,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	157.000.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	33.152.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	77.544.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	421.011.950,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	13.582.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	683.269.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	9.017.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	850.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	850.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				6 Laporan	42.792.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	10.485.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				110 Orang	15.522.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**35.055.522.169,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.055.522.169,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**35.055.522.169,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**27.431.150.769,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Badan Pendapatan Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Bapenda**	**84**	**81.60**	**82**	**82.5**	**27.431.150.769,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	99.448.900,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.080.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12.285.400,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8.069.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.662.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.533.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	13.693.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	29.123.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	25.774.892.769,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41/12 Orang/bulan	25.460.291.669,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	135.461.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	18.750.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	160.388.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	110.230.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	36.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				116 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				116 Orang	73.730.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	372.212.700,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.787.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.967.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14.988.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.088.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	112.388.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	28.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	105.111.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	**27.431.150.769,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	7.483.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	73.687.500,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	44.541.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	21.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7.306.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Badan Pendapatan Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Bapenda**	**84**	**81.60**	**82**	**82.5**	**27.431.150.769,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	312.839.900,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	87.953.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	164.886.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	687.839.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				55 Unit	282.329.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	225.510.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.431.150.769,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	180.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**-**	**7.624.371.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah** **Persentase Peningkatan PAD**	**5**	**0** **3**	**5**	**5**	**7.624.371.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	7.624.371.400,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Dokumen	215.649.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	371.479.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	865.342.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				103 Unit	705.929.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	709.790.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				10 Laporan	10.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				25 Obyek Pajak	568.251.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	710.362.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	608.560.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				8 Dokumen	415.103.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				2 Dokumen	2.010.633.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				10 Dokumen	83.544.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				9 Dokumen	308.275.500,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				21 Laporan	40.947.700,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**18.073.760.712,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.850.503.400,00**							**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**3.256.626.200,00**							**0,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**322.784.600,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia]	**Nilai Reformasi Birokrasi General BKPSDM**	**79**	**75.65**	**75.65**	**77**	**322.784.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	322.784.600,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	75.030.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	19.060.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	22.765.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	19.060.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	22.765.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	56.504.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	107.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**-**	**2.933.841.600,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan adm. Kepegawaian]	**Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian**	**112**	**106**	**106**	**107**	**2.933.841.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	1.149.990.600,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	20.650.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	20.190.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	623.345.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	21.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 Dokumen	21.070.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				3 Dokumen	122.667.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	21.050.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				4 Lembaga	65.380.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	20.290.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	144.273.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4 Dokumen	49.784.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	20.140.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN]	**Nilai Aspek Promosi dan Mutasi**	**32**	**30**	**30**	**31.2**	**2.933.841.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	738.546.400,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	316.167.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	283.979.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				3 Dokumen	138.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	524.124.600,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	336.392.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				8 Orang	123.632.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	44.220.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	10.650.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				8 Orang	7.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN]	**Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin**	**120**	**115**	**115**	**116**	**2.933.841.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	521.180.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	57.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	155.060.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Laporan	186.340.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				10 Orang	61.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				94 Orang	27.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				4 Dokumen	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**2.593.877.200,00**							**0,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**-**	**2.593.877.200,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.593.877.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	520.524.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				60 Orang	494.509.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				4 Dokumen	26.015.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	2.073.353.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4 Laporan	15.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				4 Dokumen	2.058.253.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	**NON URUSAN**						**12.223.257.312,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**12.223.257.312,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**12.223.257.312,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.223.257.312,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.845.085.172,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	10.764.620.572,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	20.360.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	60.104.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	17.040.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	122.580.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	24.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	63.700.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	412.033.950,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.823.170,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	10.526.463,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	48.412.317,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	11.877.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	55.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	25.560.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108 Laporan	236.595.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	233.526.240,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	56.343.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	177.182.640,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103.516.800,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	900.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102.616.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	489.475.150,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	287.569.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	51.140.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	50.255.250,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	50.255.250,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.255.250,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH						**28.177.011.437,00**							**26.953.552.195,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.177.011.437,00**							**26.953.552.195,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**28.177.011.437,00**							**26.953.552.195,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**22.988.375.437,00**							**21.737.504.395,00**	
		[Meningkatnya kualitas tata kelola Inspektorat Daerah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Inspektorat Daerah**	**54.5**	**51.66**	**52**	**52.5**	**22.988.375.437,00**	-	-	-	-	-	-	**21.737.504.395,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	150.907.600,00			-	-	-	-	250.133.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	49.924.880,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		131.692.380,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.331.220,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.021.220,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	16.074.140,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.764.140,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.331.220,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.021.220,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	16.074.140,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.764.140,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	19.086.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		12.435.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	19.086.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		12.435.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	19.613.381.437,00			-	-	-	-	17.517.222.395,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	19.587.337.777,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.490.941.735,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	19.262.440,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.520.440,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	6.781.220,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.760.220,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	749.714.000,00			-	-	-	-	1.035.939.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				77 Unit	101.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		92.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	648.464.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		943.439.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.975.352.400,00			-	-	-	-	2.441.587.900,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	119.940.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		335.131.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	565.230.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		587.644.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	276.717.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		313.485.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.013.465.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1.205.326.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	52.450.000,00			-	-	-	-	66.010.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	47.450.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.010.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	446.570.000,00			-	-	-	-	426.612.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	446.570.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		426.612.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					**-**	**4.420.671.000,00**							**3.691.662.600,00**	
		[Menurunnya kejadian penyelewengan/penyimpangan baik yang bersipat anggaran atau proses dan kewenangan]	**Indeks Pencegahan Korupsi Daerah**	**92.5**	**93.29**	**90**	**90.5**	**4.420.671.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.691.662.600,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	3.709.171.000,00			-	-	-	-	2.952.960.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Laporan	198.230.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		188.540.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				16 Laporan	475.340.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		610.740.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	1.180.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		619.617.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				15 Laporan	664.730.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		320.238.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				330 Laporan	659.825.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		823.824.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				3 Dokumen	530.366.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		390.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	711.500.000,00			-	-	-	-	738.701.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				6 Laporan	168.110.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		113.677.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	543.390.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		625.024.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					**-**	**767.965.000,00**							**1.524.385.200,00**	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah]	**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	**3**	**3**	**3**	**3**	**767.965.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.524.385.200,00**	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	392.095.000,00			-	-	-	-	655.753.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				5 Rekomendasi	181.905.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		306.235.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	210.190.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		349.518.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	375.870.000,00			-	-	-	-	868.632.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				3 perangkat daerah	130.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		111.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	28.900.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	122.618.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		387.265.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				3 perangkat daerah	94.102.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		341.767.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN BATUJAJAR						**5.533.026.172,00**							**20.736.358,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.533.026.172,00**							**20.736.358,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.533.026.172,00**							**20.736.358,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**51 Nilai**	**3.727.441.372,00**							**20.736.358,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Batujajar]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.727.441.372,00**	-	-	-	-	-	-	**20.736.358,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan*	-			100 Persen	86.456.700,00			-	-	Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat	-	19.345.871,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.359.400,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.379.400,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.469.250,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.379.400,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.469.250,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	45.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat		8.184.791,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	21.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat		11.161.080,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan*	-			100 Persen	3.406.913.272,00			-	-	PNS dilingkungan Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 orang/14 bulan Orang/bulan	3.401.614.472,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	PNS dilingkungan Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.379.400,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PNS dilingkungan Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PNS dilingkungan Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.419.400,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	PNS dilingkungan Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kecamatan*	-			100 Persen	10.584.000,00			-	-	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	10.584.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Kecamatan*	-			100 Persen	107.289.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	44.717.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5.228.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.700.400,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.143.600,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	27.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	31.150.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	31.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	24.738.400,00			-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.738.400,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	60.310.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat	-	1.390.487,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	17.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	18.160.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		1.390.487,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 Persen**	**547.075.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Batujajar]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**547.075.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			100 Persen	417.239.000,00			-	-	Peserta Kegiatan HUT KBB, HUT RI, Kearifan Lokal dan Lomba MTQ Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	24.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peserta Kegiatan HUT KBB, HUT RI, Kearifan Lokal dan Lomba MTQ Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	392.639.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peserta Kegiatan HUT KBB, HUT RI, Kearifan Lokal dan Lomba MTQ Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			12 Laporan	121.686.000,00			-	-	Petugas Pelayanan terpadu kecamatan Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	121.686.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Petugas Pelayanan terpadu kecamatan Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Persentase Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat*	-			1 Laporan 100 Persen	8.150.000,00			-	-	Aparatur Desa yang bertugas dalam Kegiatan Peningkatan PBB Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	8.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Desa yang bertugas dalam Kegiatan Peningkatan PBB Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 Persen**	**551.175.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Batujajar]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**551.175.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			100 Persen	551.175.000,00			-	-	Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	36.125.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	13.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	501.450.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 Persen**	**546.210.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Batujajar]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.210.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Tersusunnya Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			100 Persen	27.930.000,00			-	-	Kecamatan Batujajar	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	27.930.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Batujajar		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			100 Persen	518.280.000,00			-	-	Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	518.280.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**100 Persen**	**30.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Batujajar]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 Persen	30.000.000,00			-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 Persen**	**131.124.800,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kec. Batujajar]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.124.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	131.124.800,00			-	-	Kab. Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Semua Kelurahan	-	0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	17.640.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kab. Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	25.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kab. Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	88.284.800,00	Kab. Bandung Barat, Batujajar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kab. Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Semua Kelurahan		0,00	KECAMATAN BATUJAJAR
		KECAMATAN CIPEUNDEUY						**5.392.759.852,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.392.759.852,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.392.759.852,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**48 Nilai / Predikat**	**3.266.454.452,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cipeundeuy]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Cipeundeuy**	**52**	**45.4**	**47**	**48**	**3.266.454.452,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cipeundeuy*	-			16 Dokumen	83.594.600,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	33.684.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.620.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.240.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.220.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	5.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	15.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	17.290.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			11 Orang/bulan	2.863.793.852,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	2.828.909.252,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	34.884.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	-			4 Unit/Dokumen	78.804.400,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	53.418.400,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	25.386.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			5 Paket	163.594.500,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	47.732.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	59.747.300,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	16.115.200,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			7 Kendaraan /Bangunan	76.667.100,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	27.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	49.567.100,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**481.955.300,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cipeundeuy]	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipeundeuy**	**100**	**100**	**100**	**100**	**481.955.300,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			1 Dokumen	366.636.100,00			-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	366.636.100,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			1 Dokumen	31.554.600,00			-	-	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	31.554.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	-			4 Dokumen	25.940.000,00			-	-	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	25.940.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	-			12 Laporan	57.824.600,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	57.824.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**590.819.100,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Cipeundeuy]	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**590.819.100,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pemberdayaan Desa*	-			5 Lembaga Kemasyarakat	413.929.500,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	41.926.300,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	273.182.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	98.820.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	-			5 Lembaga Kemasyarakat	176.889.600,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	176.889.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**861.171.800,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cipeundeuy]	**Indeks Harmoni Indonesia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**861.171.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			12 Laporan	861.171.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	861.171.800,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**4 Dokumen**	**51.870.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cipeundeuy]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.870.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cipeundeuy*	-			4 Dokumen	51.870.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	51.870.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 %**	**140.489.200,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Cipeundeuy]	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**140.489.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			6 Dokumen	140.489.200,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3 Dokumen	28.160.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	80.649.200,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	31.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipeundeuy, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPEUNDEUY
		KECAMATAN GUNUNGHALU						**5.030.256.794,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.030.256.794,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.030.256.794,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.106.127.794,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Gununghalu]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.106.127.794,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.456.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.092.750,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.644.250,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.734.825,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.644.250,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.734.825,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.605.900,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.855.769.294,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2.824.476.194,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.644.250,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	29.648.850,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	53.792.400,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	24.794.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	28.998.400,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	146.104.100,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.508.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.667.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	4.497.500,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	21.293.500,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2.138.100,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.005.200,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	30.700.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.106.127.794,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.305.200,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**71.638.800,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Gununghalu]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.638.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	2.840.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	52.316.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				4 Dokumen	52.316.800,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	16.482.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	16.482.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**1.136.641.600,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Gununghalu]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.136.641.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	1.136.641.600,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	22.567.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	1.114.074.600,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**674.400.600,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Gununghalu]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**674.400.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	21.489.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	16.562.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	4.927.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	652.911.600,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	652.911.600,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**41.448.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Gununghalu]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.448.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	41.448.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	10.362.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	10.362.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				4 Dokumen	10.362.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				4 Dokumen	10.362.000,00	Kab. Bandung Barat, Gununghalu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUNGHALU
		KECAMATAN PADALARANG						**5.560.967.415,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.560.967.415,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.560.967.415,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**69 (BB) Nilai /Predikat**	**3.688.370.115,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Padalarang]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Padalarang**	**55**	**47.59**	**50**	**51**	**3.688.370.115,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			11 Dokumen	68.794.500,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.622.500,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.943.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.943.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.943.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.943.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.203.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	9.945.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	17.484.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	16.768.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			31 Dokumen	3.115.402.215,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	3.104.109.215,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.350.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.943.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			13 Dokumen	232.939.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	26.525.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	206.414.400,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			9 Laporan	160.523.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6.319.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	53.770.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	9.015.600,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	32.516.500,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	24.552.300,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	34.350.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			16 Unit	110.710.600,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	25.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85.410.600,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**417.395.800,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Padalarang]	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Padalarang**	**100**	**100**	**100**	**100**	**417.395.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			5 Dokumen	287.302.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	287.302.400,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			9 Laporan	106.893.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	106.893.400,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			5 Laporan	23.200.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	23.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**620.281.300,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Padalarang]	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Padalarang**	**100**	**100**	**100**	**100**	**620.281.300,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			11 Dokumen	620.281.300,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	30.750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	394.850.100,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	194.681.200,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**740.483.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Padalarang]	**Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Padalarang**	**100**	**100**	**100**	**100**	**740.483.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			12 Laporan	740.483.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	740.483.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 %**	**94.437.200,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Padalarang]	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Padalarang**	**100**	**100**	**100**	**100**	**94.437.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			9 Dokumen	94.437.200,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	8.948.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	5.544.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	8.316.000,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	71.629.200,00	Kab. Bandung Barat, Padalarang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN PADALARANG
		KECAMATAN LEMBANG						**7.286.606.036,00**							**11.248.806.765,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.286.606.036,00**							**11.248.806.765,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.286.606.036,00**							**11.248.806.765,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**71,26 (BB) Nilai/Predikat**	**4.885.494.986,00**							**5.309.257.670,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Lembang]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Lembang**	**56**	**47.8**	**51**	**52**	**4.885.494.986,00**	-	-	-	-	-	-	**5.309.257.670,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			6 dokumen	55.601.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	113.307.062,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.703.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		22.427.592,00	KECAMATAN LEMBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.389.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.173.830,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.577.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		4.088.590,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.821.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.173.830,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.733.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		4.088.590,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.075.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.996.630,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	15.151.600,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		36.179.000,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	15.151.600,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		36.179.000,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			6 dokumen	4.233.237.686,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	4.504.638.724,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	4.230.162.086,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		4.492.582.768,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.075.600,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		12.055.956,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Baratng Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			11 dokumen	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	1.832.545,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		1.832.545,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			46 dokumen	136.312.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	190.708.705,00	KECAMATAN LEMBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	17.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		57.717.605,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	118.812.500,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		132.991.100,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			15 Laporan	345.103.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	309.070.421,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.703.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		12.373.460,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	159.063.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		145.923.701,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	151.337.400,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		124.637.260,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		26.136.000,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			14 Laporan	28.812.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	55.176.000,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	10.812.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		26.136.000,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		29.040.000,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	-			5 unit	83.427.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	134.524.213,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	20.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		36.179.000,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	63.277.600,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		98.345.213,00	KECAMATAN LEMBANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 % 2 dokumen**	**649.924.800,00**							**446.754.528,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Lembang]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**649.924.800,00**	-	-	-	-	-	-	**446.754.528,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			3 dokumen	426.791.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	171.835.488,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	426.791.600,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		171.835.488,00	KECAMATAN LEMBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			3 Laporan	202.532.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	252.587.280,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	202.532.200,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		252.587.280,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			5 Laporan	20.601.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	22.331.760,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	20.601.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		22.331.760,00	KECAMATAN LEMBANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**630.215.450,00**							**4.264.746.578,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**630.215.450,00**	-	-	-	-	-	-	**4.264.746.578,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			7 dokumen	630.215.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	4.264.746.578,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	31.891.250,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		42.827.466,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				5 Dokumen	403.158.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		4.135.519.112,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	195.166.200,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		86.400.000,00	KECAMATAN LEMBANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**1.031.942.400,00**							**1.100.000.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Lembang]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.031.942.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1.100.000.000,00**	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			8 Laporan	1.031.942.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	1.100.000.000,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	1.031.942.400,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		1.100.000.000,00	KECAMATAN LEMBANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**68.427.400,00**							**115.435.210,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Lembang]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.427.400,00**	-	-	-	-	-	-	**115.435.210,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	68.427.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	115.435.210,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	54.227.400,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		57.717.605,00	KECAMATAN LEMBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	14.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		57.717.605,00	KECAMATAN LEMBANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 %**	**20.601.000,00**							**12.612.779,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Lembang]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.601.000,00**	-	-	-	-	-	-	**12.612.779,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			36 dokumen	20.601.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-	-	12.612.779,00	KECAMATAN LEMBANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	20.601.000,00	Kab. Bandung Barat, Lembang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		12.612.779,00	KECAMATAN LEMBANG
		KECAMATAN SINDANGKERTA						**5.330.386.505,00**							**6.170.045.964,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.292.486.505,00**							**6.130.045.964,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**5.292.486.505,00**							**6.130.045.964,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**B Angka**	**3.363.031.805,00**							**3.350.497.144,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sindangkerta]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.363.031.805,00**	-	-	-	-	-	-	**3.350.497.144,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			9 Dokumen	37.343.200,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	-	24.530.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.491.500,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		3.850.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.273.750,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		3.850.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.100.700,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		3.850.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.348.625,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		3.850.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.348.625,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		3.850.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		5.280.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.363.031.805,00**	-	-	-	-	-	-	**3.350.497.144,00**	-
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		0,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		0,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Sindangkerta]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.363.031.805,00**	-	-	-	-	-	-	**3.350.497.144,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen	2.971.965.305,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	-	3.005.332.164,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.912.188.705,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		2.926.615.394,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	59.776.600,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		78.716.770,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	109.706.200,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	-	157.334.980,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	30.510.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		27.500.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	18.927.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		27.500.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	60.269.200,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		102.334.980,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	177.121.100,00			-	-	-	-	134.500.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.151.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.750.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	97.190.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	6.237.500,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.750.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	42.408.800,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.703.800,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	23.430.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Laporan	18.000.000,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	-	20.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				48.896.000,00			-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	-	8.800.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7.830.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		8.800.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	41.066.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan		0,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**438.670.500,00**							**317.614.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Sindangkerta]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**438.670.500,00**	-	-	-	-	-	-	**317.614.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			4 Dokumen	311.316.500,00			-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	-	104.500.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	311.316.500,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		104.500.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			4 Laporan	86.853.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	-	136.400.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	86.853.400,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		136.400.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			4 Laporan	40.500.600,00			-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	-	76.714.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	40.500.600,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		76.714.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**511.409.400,00**							**1.411.822.500,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Sindangkerta]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**511.409.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1.411.822.500,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan*	-			4 Dokumen	511.409.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1.411.822.500,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	29.002.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		58.822.500,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	482.407.400,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.353.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**873.418.800,00**							**980.112.320,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sindangkerta]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**873.418.800,00**	-	-	-	-	-	-	**980.112.320,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			12 Laporan	8.384.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan	-	0,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	8.384.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan		0,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			4 Laporan	865.034.800,00			-	-	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan	-	980.112.320,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	865.034.800,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan		980.112.320,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**62.220.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Sindangkerta]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.220.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	62.220.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	62.220.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 %**	**43.736.000,00**							**70.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Sindangkerta]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.736.000,00**	-	-	-	-	-	-	**70.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			4 Dokumen	43.736.000,00			-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	-	70.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	26.554.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		35.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	17.182.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		35.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	X	**NON URUSAN**						**37.900.000,00**							**40.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**37.900.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**64 (B) Nilai/ Predikat**	**37.900.000,00**							**40.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.900.000,00**	-	-	-	-	-	-	**40.000.000,00**	-
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				37.900.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	37.900.000,00	Kab. Bandung Barat, Sindangkerta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SINDANGKERTA
		KECAMATAN CISARUA						**5.671.033.589,00**							**6.206.291.108,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.671.033.589,00**							**6.206.291.108,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.671.033.589,00**							**6.206.291.108,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**69 (B) Nilai/ Predikat**	**3.562.996.589,00**							**3.660.905.279,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cisarua]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Cisarua**	**81,28**	**80,77**	**74,85**	**75,96**	**3.562.996.589,00**	-	-	-	-	-	-	**3.660.905.279,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			8 Dokumen	35.641.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	41.741.200,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.005.800,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		10.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.812.900,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.832.900,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.039.700,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		5.059.700,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.812.900,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.832.900,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.039.700,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		5.059.700,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	11.930.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		11.956.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			5 Laporan	3.313.896.499,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	3.283.625.179,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	3.244.862.399,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		3.219.172.879,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.811.500,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.571.500,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	65.222.600,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		59.880.800,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen	37.547.500,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	98.039.800,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	29.877.500,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		40.735.000,00	KECAMATAN CISARUA
		-	-	-	-	-	-	**3.562.996.589,00**	-	-	-	-	-	-	**3.660.905.279,00**	-
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	7.670.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		57.304.800,00	KECAMATAN CISARUA
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cisarua]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Cisarua**	**81,28**	**80,77**	**74,85**	**75,96**	**3.562.996.589,00**	-	-	-	-	-	-	**3.660.905.279,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perngkat Daerah*	-			17 Laporan	65.040.590,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	114.688.300,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.916.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		43.490.500,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	1.317.100,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		5.368.800,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	16.516.900,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.400.500,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.710.590,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		3.728.500,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	41.580.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		39.700.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			4 Unit	25.151.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	33.360.800,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	25.151.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		33.360.800,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			24 Laporan	53.300.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	50.300.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		15.100.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		35.200.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	-			6 Unit	32.420.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	39.150.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	17.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		18.150.000,00	KECAMATAN CISARUA
		-	-	-	-	-	-	**3.562.996.589,00**	-	-	-	-	-	-	**3.660.905.279,00**	-
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.270.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		21.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**472.852.000,00**							**503.303.100,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cisarua]	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**91,20**	**84,26**	**85,94**	**86,38**	**472.852.000,00**	-	-	-	-	-	-	**503.303.100,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			3 Dokumen	272.425.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	211.586.600,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	272.425.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		211.586.600,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			5 Laporan	111.166.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	175.623.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	111.166.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		175.623.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			2 Laporan	89.261.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	116.093.500,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	89.261.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		116.093.500,00	KECAMATAN CISARUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**848.895.000,00**							**1.257.292.729,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Cisarua]	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**848.895.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.257.292.729,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			5 Laporan	848.895.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	1.257.292.729,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	11.010.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		46.750.000,00	KECAMATAN CISARUA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**848.895.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.257.292.729,00**	-
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	837.885.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1.210.542.729,00	KECAMATAN CISARUA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**670.440.000,00**							**673.620.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cisarua]	**Indeks Ketenteraman dan Ketertiban**	**100**	**100**	**100**	**100**	**670.440.000,00**	-	-	-	-	-	-	**673.620.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			4 Laporan	22.020.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	38.200.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22.020.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		38.200.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			1 laporan	648.420.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	635.420.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	648.420.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		635.420.000,00	KECAMATAN CISARUA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**4.970.000,00**							**25.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cisarua]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.970.000,00**	-	-	-	-	-	-	**25.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	4.970.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	4.970.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		25.000.000,00	KECAMATAN CISARUA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 %**	**110.880.000,00**							**86.170.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Cisarua]	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**110.880.000,00**	-	-	-	-	-	-	**86.170.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			6 Dokumen	110.880.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	86.170.000,00	KECAMATAN CISARUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	6.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		16.950.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	10.520.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		32.500.000,00	KECAMATAN CISARUA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	93.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Cisarua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		36.720.000,00	KECAMATAN CISARUA
		KECAMATAN NGAMPRAH						**5.294.789.480,00**							**5.125.635.788,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.294.789.480,00**							**5.125.635.788,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.294.789.480,00**							**5.125.635.788,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.171.689.280,00**							**3.318.039.973,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Ngamprah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Ngamprah**	**81,28**	**80,77**	**74,85**	**75,96**	**3.171.689.280,00**	-	-	-	-	-	-	**3.318.039.973,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	59.890.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	53.445.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.674.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		10.500.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.425.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		3.885.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.879.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.725.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.425.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		3.885.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.879.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.725.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15.666.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.725.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	11.940.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		21.000.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
		-	-	-	-	-	-	**3.171.689.280,00**	-	-	-	-	-	-	**3.318.039.973,00**	-
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Ngamprah]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Ngamprah**	**81,28**	**80,77**	**74,85**	**75,96**	**3.171.689.280,00**	-	-	-	-	-	-	**3.318.039.973,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.820.784.780,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	2.927.282.473,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.791.639.780,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		2.912.557.473,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.480.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.725.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	13.665.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		10.000.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.830.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	4.725.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.830.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.725.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	81.680.200,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	70.612.500,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	30.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		31.500.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	51.680.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		39.112.500,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	159.943.900,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	218.925.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		7.875.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		15.750.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	57.511.900,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		52.500.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15.408.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		21.000.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	18.972.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		52.500.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	68.052.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		69.300.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	44.560.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	43.050.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	23.950.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		3.150.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	20.610.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		18.900.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		21.000.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**271.526.400,00**							**478.080.431,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**271.526.400,00**	-	-	-	-	-	-	**478.080.431,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	200.026.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	200.026.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Ngamprah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**271.526.400,00**	-	-	-	-	-	-	**478.080.431,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	71.500.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	76.000.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	71.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		76.000.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	402.080.431,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		402.080.431,00	KECAMATAN NGAMPRAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**788.423.400,00**							**1.329.515.384,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Ngamprah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**788.423.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1.329.515.384,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	788.423.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	1.329.515.384,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	42.931.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		42.000.000,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	745.492.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1.287.515.384,00	KECAMATAN NGAMPRAH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**997.508.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngamprah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**997.508.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	997.508.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	997.508.400,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**65.642.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Ngamprah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.642.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	65.642.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	5.642.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN NGAMPRAH
		KECAMATAN CIKALONGWETAN						**6.547.805.123,00**							**8.419.007.888,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.220.926.600,00**							**3.793.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.220.926.600,00**							**3.793.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**65 (B) Nilai/ Predikat**	**73.750.000,00**							**210.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cikalongwetan]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Cikalongwetan**	**70.62**	**61.30**	**64.08**	**65.38**	**73.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**210.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			17 Dokumen	24.900.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	14.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		20.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	10.700.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		20.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	48.850.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	170.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	21.714.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		30.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	27.136.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		40.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**210.000.000,00**	-
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		100.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**321.817.000,00**							**225.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cikalongwetan]	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cikalongwetan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**321.817.000,00**	-	-	-	-	-	-	**225.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	200.207.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Kegiatan Dokumen	200.207.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		90.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	74.750.000,00			-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-	-	108.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Bulan Laporan	74.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-		108.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	25.560.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	25.560.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	21.300.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	21.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		15.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**718.909.200,00**							**2.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Cikalongwetan]	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cikalongwetan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**718.909.200,00**	-	-	-	-	-	-	**2.250.000.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	718.909.200,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	2.250.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	34.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		50.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Bulan Laporan	684.659.200,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		2.200.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**986.400.400,00**							**978.000.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cikalongwetan]	**Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cikalongwetan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**986.400.400,00**	-	-	-	-	-	-	**978.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	21.300.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	21.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		38.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	965.100.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	940.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Bulan Laporan	965.100.400,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		940.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**39.050.000,00**							**20.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cikalongwetan]	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cikalongwetan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39.050.000,00**	-	-	-	-	-	-	**20.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	39.050.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				85 Orang	0,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		10.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	39.050.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		10.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**81.000.000,00**							**110.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Cikalongwetan]	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cikalongwetan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**81.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**110.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	81.000.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Bulan Dokumen	28.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		70.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Kegiatan Dokumen	52.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		40.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X	**NON URUSAN**						**4.326.878.523,00**							**4.626.007.888,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**4.326.878.523,00**							**4.626.007.888,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**65 (B) Nilai/ Predikat**	**4.326.878.523,00**							**4.626.007.888,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.326.878.523,00**	-	-	-	-	-	-	**4.626.007.888,00**	-
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			17 Dokumen	29.950.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	41.500.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.450.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.200.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.450.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		4.200.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	900.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		2.200.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	900.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		2.200.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	7.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		6.700.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.934.160.523,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	4.023.007.888,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	3.923.714.523,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		3.979.507.888,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		6.500.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	8.316.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		37.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.600.000,00			-	-	-	-	7.200.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	67.550.000,00			-	-	-	-	87.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	46.250.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	21.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	192.893.300,00			-	-	-	-	172.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	11.081.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	63.594.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	17.186.200,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	37.017.100,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	44.490.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.525.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		29.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		100.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.038.100,00			-	-	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	3.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12.038.100,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		34.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	83.686.600,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	157.300.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	43.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		50.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12.820.000,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		7.300.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	27.766.600,00	Kab. Bandung Barat, Cikalongwetan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		100.000.000,00	KECAMATAN CIKALONGWETAN
		KECAMATAN CIPONGKOR						**5.509.957.304,00**							**6.005.242.785,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.509.957.304,00**							**6.005.242.785,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.509.957.304,00**							**6.005.242.785,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**70,00 (BB) Nilai/Predikat**	**3.248.771.704,00**							**3.089.696.785,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cipongkor]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Cipongkor**	**69.31**	**61.00**	**62.77**	**64.08**	**3.248.771.704,00**	-	-	-	-	-	-	**3.089.696.785,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			11 Dokumen	30.905.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor	-	37.258.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.481.900,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		15.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.827.300,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		1.700.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.902.900,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		1.800.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.827.300,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		1.700.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.902.900,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		1.800.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.266.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		3.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	6.532.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		3.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	3.266.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		4.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	4.899.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		5.258.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*	-			20 Laporan	2.953.655.004,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor	-	2.765.533.385,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.910.182.704,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		2.720.233.385,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.942.300,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		1.800.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	38.034.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		40.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	3.496.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		3.500.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*	-			2 Dokumen	5.014.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor	-	5.995.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.633.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		1.500.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.748.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		3.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.633.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		1.495.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			17 Dokumen	41.068.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor	-	45.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	34.536.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		35.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	6.532.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		10.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			57 Laporan	135.924.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor	-	158.910.400,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	2.932.300,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		7.410.400,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	34.262.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		45.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				102 Paket	5.876.700,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		6.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				751 Paket	72.060.400,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		70.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10084 Paket	4.293.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		5.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	16.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		25.500.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Laporan	27.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor	-	27.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	27.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		27.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			15 Unit	55.204.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor	-	50.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	16.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		20.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	39.054.400,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat Kecamatan Cipongkor		30.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**474.116.000,00**							**408.100.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cipongkor]	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipongkor**	**100**	**99.95**	**100**	**100**	**474.116.000,00**	-	-	-	-	-	-	**408.100.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			3 Dokumen	252.169.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Masyarakat Kecamatan Cipongkor	-	185.200.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	4.118.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		5.200.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	248.051.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		180.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang Ada di Kecamatan*	-			12 Laporan	200.931.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Masyarakat Kecamatan Cipongkor	-	202.900.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	1.633.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		2.900.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	199.298.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		200.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	-			2 Dokumen	2.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor	-	5.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2.840.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		5.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			4 Laporan	18.176.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor	-	15.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	18.176.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		15.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**650.469.600,00**							**1.300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Cipongkor]	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipongkor**	**100**	**100**	**100**	**100**	**650.469.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.300.000.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			52 Dokumen	599.832.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Masyarakat Kecamatan Cipongkor	-	1.255.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	26.021.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		45.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				22 Dokumen	209.041.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		160.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				29 Laporan	364.770.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		1.050.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	50.637.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10 Keluarga	15.140.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	9.899.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		10.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10 Keluarga	6.198.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		10.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				15 Keluarga	19.400.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		15.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**990.750.000,00**							**1.052.360.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cipongkor]	**Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipongkor**	**100**	**100**	**100**	**100**	**990.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.052.360.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	24.540.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor	-	90.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13.590.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		70.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	10.950.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Kecamatan Cipongkor		20.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			12 Laporan	966.210.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	LINMAS Se-Kecamatan Cipongkor	-	962.360.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	966.210.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	LINMAS Se-Kecamatan Cipongkor		962.360.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**87.320.000,00**							**80.986.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cipongkor]	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipongkor**	**100**	**100**	**100**	**100**	**87.320.000,00**	-	-	-	-	-	-	**80.986.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	87.320.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	80.986.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	28.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		10.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	58.820.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		70.986.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 %**	**58.530.000,00**							**74.100.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Cipongkor]	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipongkor**	**100**	**100**	**100**	**100**	**58.530.000,00**	-	-	-	-	-	-	**74.100.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			8 Dokumen	58.530.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cipongkor	-	74.100.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	11.824.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cipongkor		15.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4.260.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cipongkor		5.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	9.990.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cipongkor		15.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	7.883.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cipongkor		30.000.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	8.511.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cipongkor		0,00	KECAMATAN CIPONGKOR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	16.062.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipongkor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cipongkor		9.100.000,00	KECAMATAN CIPONGKOR
		KECAMATAN SAGULING						**4.978.214.028,00**							**124.858.877.826,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.978.214.028,00**							**124.858.877.826,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.978.214.028,00**							**124.858.877.826,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.348.060.428,00**							**124.024.877.826,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Saguling]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Saguling**	**53**	**45.65**	**48**	**49**	**3.348.060.428,00**	-	-	-	-	-	-	**124.024.877.826,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	145.383.000,00			-	-	-	-	202.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.659.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.493.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.249.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.493.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.249.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	21.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	21.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	29.820.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		11.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	29.820.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		27.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.838.692.896,00			-	-	-	-	2.984.377.826,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	2.715.543.896,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.807.877.826,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13.975.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	109.174.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.550.000,00			-	-	-	-	16.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.550.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	91.146.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30 Unit	91.146.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN SAGULING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	214.907.500,00			-	-	-	-	394.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	21.992.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	14.387.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	16.184.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.584.500,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	146.760.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		155.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.348.060.428,00**	-	-	-	-	-	-	**124.024.877.826,00**	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	18.550.000,00			-	-	-	-	120.035.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Saguling]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Saguling**	**53**	**45.65**	**48**	**49**	**3.348.060.428,00**	-	-	-	-	-	-	**124.024.877.826,00**	-
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	18.550.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000.000,00	KECAMATAN SAGULING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.531.032,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.531.032,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	23.300.000,00			-	-	-	-	202.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	23.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.348.060.428,00**	-	-	-	-	-	-	**124.024.877.826,00**	-
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Saguling]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Saguling**	**53**	**45.65**	**48**	**49**	**3.348.060.428,00**	-	-	-	-	-	-	**124.024.877.826,00**	-
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**565.102.000,00**							**264.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Saguling]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Saguling**	**53**	**45.65**	**48**	**49**	**565.102.000,00**	-	-	-	-	-	-	**264.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	434.162.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	220.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	5.112.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		60.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	429.050.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		160.000.000,00	KECAMATAN SAGULING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	112.520.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	16.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	112.520.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		16.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	18.420.000,00			-	-	-	-	27.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	18.420.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN SAGULING
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**455.766.800,00**							**275.000.000,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Saguling]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Saguling**	**53**	**45.65**	**48**	**49**	**455.766.800,00**	-	-	-	-	-	-	**275.000.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	455.766.800,00			-	-	-	-	275.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	26.340.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN SAGULING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	429.426.800,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**524.274.800,00**							**215.000.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Saguling]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Saguling**	**53**	**65.65**	**48**	**49**	**524.274.800,00**	-	-	-	-	-	-	**215.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	38.240.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	38.240.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		160.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	486.034.800,00			-	-	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	486.034.800,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**85.010.000,00**							**80.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Saguling]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Saguling**	**53**	**65.65**	**48**	**49**	**85.010.000,00**	-	-	-	-	-	-	**80.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	85.010.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	46.230.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
		-	-	-	-	-	-	**85.010.000,00**	-	-	-	-	-	-	**80.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	38.780.000,00	Kab. Bandung Barat, Saguling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN SAGULING
		KECAMATAN CILILIN						**5.820.174.538,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.820.174.538,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.820.174.538,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.540.808.138,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cililin]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.540.808.138,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25.524.120,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.928.500,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.652.340,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.627.320,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	652.340,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	627.320,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	892.300,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3.870.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.504.800,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	8.769.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.062.566.018,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	3.030.396.208,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	694.210,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	31.475.600,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	71.479.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	28.028.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	43.451.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	89.264.200,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.712.200,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	14.075.100,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	6.238.200,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	37.801.500,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.545.200,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20.892.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	59.937.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	59.937.800,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.405.600,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	55.305.600,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162.631.400,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	22.950.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	5.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
		-	-	-	-	-	-	**3.540.808.138,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	134.001.400,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**378.851.200,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cililin]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**378.851.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-				246.362.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	21.900.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	224.462.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	111.110.400,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	111.110.400,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	21.378.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	21.378.800,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**787.195.600,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Cililin]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**787.195.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	696.701.200,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	37.809.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	237.551.200,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	421.341.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	90.494.400,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				110 Keluarga	22.783.200,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				110 Keluarga	32.136.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				55 Keluarga	15.743.800,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				55 Keluarga	19.831.400,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**836.291.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cililin]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**836.291.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	62.670.400,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	62.670.400,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	773.621.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	773.621.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**151.276.400,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cililin]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**151.276.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	151.276.400,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				660 Orang	98.410.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	52.866.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**125.751.800,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Cililin]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125.751.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	125.751.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	86.540.800,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	17.007.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	7.243.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	14.961.000,00	Kab. Bandung Barat, Cililin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILILIN
		KECAMATAN PARONGPONG						**5.603.123.477,00**							**5.077.414.880,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.603.123.477,00**							**5.077.414.880,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.603.123.477,00**							**5.077.414.880,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**4.057.795.877,00**							**3.632.552.378,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Parongpong]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.057.795.877,00**	-	-	-	-	-	-	**3.632.552.378,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	21.240.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	33.000.002,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	9.880.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.272.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		2.200.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.272.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		2.200.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.272.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		2.200.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.272.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		2.200.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.272.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		2.200.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	0,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.491.819.477,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	3.555.552.369,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	3.487.019.477,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		3.511.552.369,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	15.488.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	44.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	12.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	2.688.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	163.310.100,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	3,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	40.741.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	84.229.100,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	38.340.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.380.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	1,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.380.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	340.558.300,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	3,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	3.700.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	19.750.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	317.108.300,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**546.137.600,00**							**243.210.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Parongpong]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.137.600,00**	-	-	-	-	-	-	**243.210.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	146.320.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	22.605.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	146.320.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.605.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	371.257.600,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	198.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	371.257.600,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		198.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	28.560.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	22.605.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	28.560.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.605.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**436.350.000,00**							**1.135.652.500,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Parongpong]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**436.350.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.135.652.500,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-			3 Dokumen undefined undefined	436.350.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1.135.652.500,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	28.350.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		27.472.500,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				5 Dokumen	408.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		20.500.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.087.680.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**528.560.000,00**							**44.000.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Parongpong]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**528.560.000,00**	-	-	-	-	-	-	**44.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	14.280.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	14.280.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	514.280.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	514.280.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**14.280.000,00**							**2,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Parongpong]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.280.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	14.280.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	2,00	KECAMATAN PARONGPONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				25 Orang	14.280.000,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Parongpong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		1,00	KECAMATAN PARONGPONG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**20.000.000,00**							**22.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Parongpong]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**22.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	20.000.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		22.000.000,00	KECAMATAN PARONGPONG
		KECAMATAN CIPATAT						**5.831.265.525,00**							**7.618.367.319,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.831.265.525,00**							**7.618.367.319,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.831.265.525,00**							**7.618.367.319,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**3.663.213.425,00**							**3.980.117.429,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cipatat]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Cipatat**	**77**	**69.82**	**71**	**73**	**3.663.213.425,00**	-	-	-	-	-	-	**3.980.117.429,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	82.704.800,00			-	-	-	-	115.368.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	63.960.800,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74.367.040,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.988.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.704.960,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	994.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.002.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.988.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.002.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	994.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.002.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	12.780.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.290.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.237.118.525,00			-	-	-	-	3.546.697.079,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	3.236.236.525,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.544.849.079,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	882.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.848.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	29.029.000,00			-	-	-	-	38.469.640,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	29.029.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.469.640,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	200.628.100,00			-	-	-	-	198.758.120,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	130.391.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		112.657.820,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	60.297.100,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		69.002.450,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	5.340.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.029.850,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.068.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	74.733.000,00			-	-	-	-	37.924.590,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	74.733.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.924.590,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39.000.000,00			-	-	-	-	42.900.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	39.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.900.000,00	KECAMATAN CIPATAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**-**	**409.727.900,00**							**361.896.480,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cipatat]	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipatat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**409.727.900,00**	-	-	-	-	-	-	**361.896.480,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	272.159.800,00			-	-	-	-	173.289.160,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	11.932.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.887.160,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	260.227.800,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		116.402.000,00	KECAMATAN CIPATAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	91.317.700,00			-	-	-	-	107.321.280,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	91.317.700,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		107.321.280,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	11.932.000,00			-	-	-	-	27.654.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	11.932.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.654.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	34.318.400,00			-	-	-	-	53.632.040,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	34.318.400,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		53.632.040,00	KECAMATAN CIPATAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**-**	**719.145.600,00**							**2.172.885.330,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Cipatat]	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipatat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**719.145.600,00**	-	-	-	-	-	-	**2.172.885.330,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	719.145.600,00			-	-	-	-	2.172.885.330,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	21.671.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.896.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	697.474.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.144.989.330,00	KECAMATAN CIPATAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**-**	**951.109.600,00**							**82.283.080,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cipatat]	**Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipatat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**951.109.600,00**	-	-	-	-	-	-	**82.283.080,00**	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	951.109.600,00			-	-	-	-	82.283.080,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	951.109.600,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		82.283.080,00	KECAMATAN CIPATAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**-**	**88.069.000,00**							**1.021.185.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Cipatat]	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipatat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**88.069.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.021.185.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	88.069.000,00			-	-	-	-	1.021.185.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	12.594.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.484.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	6.297.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.656.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	57.246.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.165.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	11.932.000,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.664.000,00	KECAMATAN CIPATAT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Cipatat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		909.216.000,00	KECAMATAN CIPATAT
		KECAMATAN CIHAMPELAS						**6.162.703.276,00**							**7.554.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.162.703.276,00**							**7.554.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.162.703.276,00**							**7.554.700.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**62,00 (B) Nilai/Predikat**	**4.091.635.676,00**							**4.162.900.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cihampelas]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.091.635.676,00**	-	-	-	-	-	-	**4.162.900.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah*	-			10 Dokumen	36.924.500,00			-	-	Kecamatan CIhampelas	-	19.500.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.485.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan CIhampelas		2.500.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.485.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan CIhampelas		2.500.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.485.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan CIhampelas		2.500.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.485.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Clhampelas		2.500.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.784.500,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Clhampelas		2.500.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
		-	-	-	-	-	-	**4.091.635.676,00**	-	-	-	-	-	-	**4.162.900.000,00**	-
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	7.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Clhampelas		2.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	7.100.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Clhampelas		5.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			20 Laporan	3.830.485.476,00			-	-	12 Orang ASN	-	3.840.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	3.802.480.876,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	12 Orang ASN		3.800.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	28.004.600,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	12 Orang ASN		40.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Cihampelas]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.091.635.676,00**	-	-	-	-	-	-	**4.162.900.000,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordiansi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	-			12 Dokumen	48.738.400,00			-	-	Kecamatan Cihampelas	-	60.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				24 Unit	24.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Cihampelas		20.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	24.738.400,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Cihampelas		40.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	146.889.300,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	98.400.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3.310.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		5.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	64.539.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	22.240.300,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	56.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		23.400.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		100.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			7 Paket	28.598.000,00			-	-	Kecamatan Cihampelas	-	45.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	15.350.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Cihampelas		20.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.248.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Cihampelas		25.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**564.319.800,00**							**230.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Cihampelas]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**564.319.800,00**	-	-	-	-	-	-	**230.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	433.700.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	433.700.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			12 Laporan	130.619.800,00			-	-	Kecamatan Cihampelas	-	130.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	130.619.800,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Cihampelas		130.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**677.604.800,00**							**1.635.000.000,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Cihampelas]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**677.604.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.635.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			5 Laporan 11 Dokumen	677.604.800,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Cihampelas	-	1.635.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	29.850.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Cihampelas		35.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	647.754.800,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kecamatan Cihampelas		1.600.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**747.604.600,00**							**1.420.000.000,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cihampelas]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**747.604.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.420.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan SInergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			12 laporan	10.000.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Cihampelas	-	700.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Cihampelas		700.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	737.604.600,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	720.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	737.604.600,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		720.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**42.600.000,00**							**46.800.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**46.800.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	42.600.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	46.800.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	42.600.000,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		46.800.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 %**	**38.938.400,00**							**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Cihampelas]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.938.400,00**	-	-	-	-	-	-	**60.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah DOkumen Yang DIfasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	-			4 Laporan	38.938.400,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Cihampelas	-	60.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	38.938.400,00	Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Kecamatan Cihampelas		60.000.000,00	KECAMATAN CIHAMPELAS
		KECAMATAN RONGGA						**5.065.559.759,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.065.559.759,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.065.559.759,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**60,35 (B) Nilai/Predikat**	**3.694.799.259,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Rongga]	**Nilai Reformasi Birokrasi General Kecamatan Rongga**	**68.00**	**60.22**	**61.46**	**62.77**	**3.694.799.259,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Kecamatan*	-			60,35 %	24.929.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.754.500,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.141.500,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.519.500,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.141.500,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.519.500,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.493.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	5.680.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Kecamatan*	-			60,35 %	2.958.894.759,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2.928.337.959,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.775.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	28.781.800,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Kecamatan*	-			60,35 %	196.311.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	46.767.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	149.544.600,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai Sakip Kecamatan*	-			60,35 %	205.102.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.360.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12.113.600,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	24.952.400,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	163.676.400,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	261.761.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	232.934.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	28.827.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Sakip Kecamatan*	-			60,35 %	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Sakip Kecamatan*	-			60,35 %	40.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	40.300.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**100 %**	**349.243.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Rongga]	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Rongga**	**100**	**100**	**100**	**100**	**349.243.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi*	-			100 %	277.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	2.130.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	275.200.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi*	-			100 %	54.873.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	54.873.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi*	-			100 %	17.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	17.040.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**100 %**	**352.184.500,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pembangunan Kecamatan Rongga]	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Rongga**	**100**	**100**	**100**	**100**	**352.184.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan*	-			100 %	87.210.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	14.150.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	73.060.600,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	264.973.900,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	79.404.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1 Keluarga	36.480.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Keluarga	48.621.900,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				1 Keluarga	76.612.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**352.184.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				1 Keluarga	23.856.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**100 %**	**587.765.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Rongga]	**Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Rongga**	**100**	**100**	**100**	**100**	**587.765.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi*	-			100 %	587.765.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	587.765.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**-**	**10.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Rongga]	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Rongga**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Orang	5.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**100 %**	**71.568.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Rongga]	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Rongga**	**100**	**100**	**100**	**100**	**71.568.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi*	-			100 %	71.568.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	40.896.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	22.720.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	7.952.000,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bandung Barat, Rongga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN RONGGA
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**17.915.829.685,00**							**15.112.145.199,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**17.915.829.685,00**							**15.112.145.199,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**17.915.829.685,00**							**15.112.145.199,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**-**	**5.241.301.385,00**							**4.914.266.854,00**	
		[Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.241.301.385,00**	-	-	-	-	-	-	**4.914.266.854,00**	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	-			22 Dokumen	281.687.700,00			-	-	-	-	229.844.098,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	236.291.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		155.325.399,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.809.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.286.708,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.498.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.286.708,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11.464.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.332.499,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.201.500,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.332.499,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	6.422.100,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.442.913,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.837.372,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.283.673.085,00			-	-	-	-	3.737.359.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	4.277.283.085,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.710.790.737,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.390.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.834.187,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.734.336,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	188.647.200,00			-	-	-	-	200.982.368,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	64.254.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.912.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	124.392.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		151.069.868,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	374.708.400,00			-	-	-	-	645.377.668,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.965.913,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.775.600,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.262.010,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	82.595.200,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.460.562,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	28.384.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.166.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	52.800.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.353.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	124.492.800,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		318.323.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	78.660.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.845.483,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	4.871.460,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.871.460,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	112.585.000,00			-	-	-	-	95.832.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	82.585.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.557.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.275.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					**-**	**1.283.618.500,00**							**1.304.925.005,00**	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan]	**Indeks Harmoni Indonesia**	**7.20**	**0**	**6.50**	**6.60**	**1.283.618.500,00**	-	-	-	-	-	-	**1.304.925.005,00**	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.283.618.500,00			-	-	-	-	1.304.925.005,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	46.380.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		136.057.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	763.600.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		928.595.480,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	473.637.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		240.271.625,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					**-**	**6.256.615.000,00**							**5.405.711.914,00**	
		[Meningkatnya etika dan budaya politik]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.256.615.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.405.711.914,00**	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	6.256.615.000,00			-	-	-	-	5.405.711.914,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				10 Dokumen	16.890.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.795.892.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	12.900.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.676.420,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				750 Orang	6.007.726.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		358.933.340,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				160 Orang	176.396.800,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.009.910,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	42.702.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.200.020,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					**-**	**988.828.000,00**							**621.251.893,00**	
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**988.828.000,00**	-	-	-	-	-	-	**621.251.893,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	988.828.000,00			-	-	-	-	621.251.893,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	6.390.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.226.222,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	29.524.100,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.647.074,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				920 Orang	668.576.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		213.089.278,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				460 Orang	158.262.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		207.146.742,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	126.075.900,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.142.577,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**					**-**	**577.541.000,00**							**370.410.150,00**	
		[Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kebebasan beribadah] [Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**577.541.000,00**	-	-	-	-	-	-	**370.410.150,00**	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	577.541.000,00			-	-	-	-	370.410.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	341.650.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.832.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat] [Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kebebasan beribadah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**577.541.000,00**	-	-	-	-	-	-	**370.410.150,00**	-
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	180.035.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		184.735.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kebebasan beribadah] [Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**577.541.000,00**	-	-	-	-	-	-	**370.410.150,00**	-
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	55.856.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89.842.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					**-**	**3.567.925.800,00**							**2.495.579.383,00**	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.567.925.800,00**	-	-	-	-	-	-	**2.495.579.383,00**	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	3.567.925.800,00			-	-	-	-	2.495.579.383,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	12.334.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.546.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	61.708.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.048.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				400 Orang	2.809.554.600,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		88.910.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				860 Orang	81.720.000,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		804.425.424,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	602.609.200,00	Kab. Bandung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		783.648.459,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**2.901.763.262.838,30**							**6.858.716.595.857.895,00**	